Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan

Tahun 2019-2024

WALI KOTA TARAKAN

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 342 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengatur bahwa Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat dilakukan apabila terjadi perubahan mendasar yang mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional;

c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini, sehingga perlu diubah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3711);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir terakhir dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4817);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2010 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2019 Nomor 40, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 21);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN

dan

WALI KOTA TARAKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2019-2024.

Pasal I

Ketentuan Lampiran sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2019 Nomor 40, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 21) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 24 Desember 2021

WALI KOTA TARAKAN,

KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan
Pada tanggal 24 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

A. HAMID

LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2021 NOMOR 66
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR (66/5/2021)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2019-2024

I. UMUM

RPJMD Kota Tarakan merupakan dokumen perencanaan Kota Tarakan untuk Periode 5 Tahun yang dimaksudkan untuk memberikan arahan sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di Kota Tarakan dalam menyelenggarakan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. RPJMD dituangkan dalam penjabaran dari Visi, Misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 260 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 264 ayat (1) dan Pasal 267 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan dan diundangkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan Tahun 2019-2024.

Bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 342 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengatur bahwa Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat dilakukan apabila terjadi perubahan mendasar yang mencakup terjadinya bencana alam,

goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Kemudian berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, RPJM Nasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden tersebut memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, proyek prioritas strategis, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, arah pembangunan kewilayahan dan lintas kewilayahan, Prioritas Pembangunan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program dalam RPJM Nasional yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan RPJM Daerah. Dalam menyusun Rencana Strategis RPJMD melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Menteri. Dengan demikian dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan harus berpedoman dan menyesuaikan dengan RPJMN yang telah ditetapkan. Arah pembangunan jangka menengah daerah diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Sesuai dengan ketentuan pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 bahwa Pemerintah Daerah dalam penyusunan rancangan awal RPJMD harus berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional, kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya. maka Pemerintah Kota Tarakan perlu menyusun penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 2019-2024.

II. PASAL DEMI PASAL

1. Pasal I

   Cukup Jelas

2. Pasal II

   Cukup Jelas.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR GAMBAR xxi

BAB I PENDAHULUAN ..... I-I

1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan I-15
1.3 Hubungan Antar Dokumen I-23

1.3.1. Hubungan Perubahan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024 dengan Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 ..... I-23

1.3.2. Hubungan Perubahan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024 dengan RPJPD Kota Tarakan Tahun 2005-2025 ..... I-24

1.3.3. Hubungan Perubahan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024 dengan Revisi RTRW Kota Tarakan Tahun 2021-2041 ..... I-25

1.3.4. Hubungan Perubahan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024 dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021-2026 ..... I-25

1.3.5. Hubungan Perubahan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024 dengan RTRW Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037 ..... I-26

1.3.6. Hubungan Perubahan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024 dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024 ..... I-26

1.3.7. Hubungan Perubahan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024 dengan RKPD, Renstra-PD dan Renja-PD I-27

1.4 Maksud dan Tujuan I-28
1.5 Sistematika Penulisan I-29

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-1

A.1 Informasi Kondisi Umum Daerah II-1
A.1.1. Aspek Geografi dan Demografi II-3
1). Luas dan Batas Wilayah Administrasi II-3
2). Letak dan Kondisi Geografis II-6
3). Topografi (Kemiringan dan Ketinggian) II-7
4). Kondisi geologi II-9
5). Hidrologi II-12
6). Klimatologi II-18
7). Penggunaan lahan II-19
8). Wilayah Rawan Bencana II-24
A.1.2. Aspek Demografi II-26
A.1.3. Potensi Sumber Daya II-30
A.1.4. Indikator Kinerja Penyelanggaraan Pemerintahan Daerah . II-30
A.1.4.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-30
a. Fokus Kesejahteraan dan Pemetaan Ekonomi II-30
1. Pertumbuhan PDRB II-30
2. Laju Inflasi II-43
3. Indeks Gini II-45
4. Persentase Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan II-46
5. Indeks Pembangunan Manusia II-48
b. Fokus Kesejahteraan Sosial II-49
1. Angka Melek Huruf Penduduk Usia di Atas 15 Tahun, Perempuan dan Laki-laki II-49
2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah II-51
3. Angka Usia Harapan Hidup II-52
4. Angka Harapan Lama Sekolah II-54
5. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawat-an II-55
6. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TAPK) II-57
7. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) II-58
8. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) II-59
9. Angka Partisipasi Murni II-60
10. Persentase PAD terhadap Pendapatan II-61
11. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan . II-62
c. Fokus Seni Budaya dan Olahraga II-63
1. Jumlah Gedung Olahraga II-63

2. Jumlah Gedung Kesenian II-64
A.1.4.2. Aspek Daya Saing Daerah..... II-64
a. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah II-64
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita II-64
2. Persentase Pengeluaran Konsumsi bukan Makanan per Kapita..... II-65
3. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan) . II-68
b. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrakstruktur II-69
1. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan..... II-69
2. Jumlah Orang/Barang Melalui Bandara dan Dermaga..... II-70
3. Ketaatan terhadap RTRW II-72
4. Luas Wilayah Produktif II-73
5. Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang..... II-73
6. Jenis, Kelas, dan Jumlah Restoran II-75
7. Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/Hotel II-75
8. Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih II-76
9. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik II-78
10. Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon II-79
c. Fokus Iklim berinvestasi II-80
1. Angka Kriminalitas..... II-81
2. Lama Proses Perijinan II-82
3. Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah .. II-87
d. Fokus Sumberdaya Manusia..... II-94
1. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3)..... II-94
A.1.4.3. Aspek Pelayanan Umum II-95
a. Layanan Urusan Pemerintahan Wajib yang Barkaitan dengan Pelayan Dasar II-95
1. Pendidikan..... II-95
2. Kesehatan II-110
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang II-130

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman II-139
5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyrakat II-143
6. Urusan Sosial II-153
b. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar II-163
1. Urusan Tenaga Kerja II-163
2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak II-169
3. Urusan Pangan II-176
4. Urusan Pertanahan II-178
5. Urusan Lingkungan Hidup II-178
6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencacatan Sipil II-186
7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan II-191
8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana II-195
9. Urusan Perhubungan II-208
10. Urusan Komunikasi dan Informatika II-215
11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah II-219
12. Urusan Penanaman Modal II-220
13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga II-224
14. Urusan Statistik II-225
15. Urusan Kebudayaan II-226
16. Urusan Perpustakaan dan Kearsipan II-230
c. Urusan Pemerintahan Pilihan II-237
1. Urusan Pariwisata II-237
2. Urusan Pertanian II-241
3. Urusan Perdagangan II-247
4. Urusan Perindustrian II-249
5. Urusan Kelautan dan Perikanan II-251
d. Penunjang Urusan II-256
1. Keuangan II-256
2. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan II-261
3. Pengawasan II-267

4. Sekretariat Dewan II-271

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH III-1

3.1 Kinerja Keuangan Masa lalu III-2
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD III-6
1. Pendapatan Daerah III-6
2. Belanja Daerah III-10
3. Pembiayaan III-13
3.1.2. Neraca Daerah III-15
1. Aset III-15
2. Kewajiban III-16
3. Ekuitas Dana III-17
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa lalu III-28
3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran III-29
3.2.2. Analisis Pembiayaan III-32
3.3 Kerangka Pendanaan III-34
3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah III-37
3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendapatan III-43

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH..... IV-1

4.1 Permasalahan Pembangunan IV-2
4.1.1. Permasalahan Berdasarkan Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah IV-4
4.1.1.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar IV-4
1. Urusan Pendidikan IV-4
2. Urusan Kesehatan IV-6
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .. IV-12
4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman IV-14
5. Urusan Pelayanan Kebencanaan IV-16
6. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat IV-18
7. Urusan Sosial IV-19
4.1.1.2. Urusan Wajib Pelayanan Dasar IV-21
1. Urusan Tenaga Kerja IV-21
2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak IV-22
3. Urusan Pangan IV-24
4. Urusan Pertanahan IV-25

5. Urusan Lingkungan Hidup IV-26
6. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil IV-28
7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat IV-29
8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana IV-30
9. Urusan Perhubungan IV-31
10. Urusan Komunikasi dan Informatika IV-33
11. Urusan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil IV-35
12. Urusan Penanaman Modal IV-36
13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga IV-37
14. Urusan Statistik IV-38
15. Urusan Kebudayaan IV-39
16. Urusan Perpustakaan IV-39
4.1.1.3. Urusan Pemerintahan Pilihan IV-40
1. Urusan Kelautan dan Perikanan IV-40
2. Urusan Pariwisata IV-41
3. Urusan Pertanian IV-43
4. Urusan Perdagangan IV-44
5. Urusan Perindustrian IV-46
4.1.1.4. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang IV-47
1. Urusan Keuangan IV-47
2. Urusan Kepegawaian IV-49
3. Urusan Administrasi Pemerintahan IV-49
4. Urusan Pengawasan IV-51
5. Urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan IV-52
4.1.2. Aspek Daya Saing dan Indikator Makro IV-53
1. Aspek Daya Saing Daerah IV-53
2. Aspek Geografi dan Demografi IV-55
3. Indikator Makro IV-56
4.1.3. Hasil Kajian Permasalahan Pembangunan Berkelanjutan . IV-65
1. Faktor-Faktor Penentu Permasalahan IV-65
4.2 Isu Strategis IV-74
4.2.1. Pengertian Isu Strategis IV-74
4.2.2. Kajian Kebijakan Internasional dan Nasional IV-75
a. Penelahaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) IV-75

b. Penelahaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) IV-78
c. Penelahaan RPJMN 2020-2024 ..... IV-79
4.2.3. Kajian Kebijakan Pembangunan Daerah IV-87
a. Penelahaan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 ..... IV-87
b. Penelahaan RTRW Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037 ..... IV-93
c. Penelahaan RPJD Kota Tarakan Tahun 2005-2025 ..... IV-96
d. Penelahaan RTRW Kota Tarakan Tahun 2021-2041 ..... IV-104
e. Penelahaan KLHS Kota Tarakan Tahun 2019-2024 ..... IV-111
4.2.4. Penetapan Isu Strategis Kota Tarakan IV-117
1. Sumber Daya Manusia Belum Kompetitif IV-118
2. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintah Daerah IV-118
3. Belum Optimalnya Pelayanan Infrastruktur Wilayah IV-118
4. Tingkat Pertumbuhan dan Pemetaan Ekonomi Daerah Belum Optimal IV-119
5. Belum Optimalnya Fungsi Lingkungan Hidup IV-120
6. Potensi Meningkatnya Kerawanan dan Gangguan Ketertiban Umum IV-120

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN V-1

5.1 Visi V-1
5.2 Misi V-3
5.3 Tujuan dan Sasaran V-7
5.3 Tujuan dan Sasaran Perubahan V-16
5.4 Program Unggulan OKE V-21

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI-1

6.1 Strategi VI-1
6.2 Arah Kebijakan VI-6
6.2.1. Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) VI-6

6.2.2. Arah Kebijakan Tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah..... VI-7

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII-1

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH..... VIII-1

BAB IX PENUTUP IX-1

9.1 Kaidah Pelaksanaan IX-1
9.2 Pedoman Transisi IX-3

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan Tahun 2020 di Kota Tarakan II-4
Tabel 2.2 Luas dan Penyebaran Masing-Masing Kemiringan Lahan . II-7
Tabel 2.3 Tinggi Wilayah dan Jarak ke Ibu Kota Menurut Kecamatan di Kota Tarakan, 2020 ..... II-9
Tabel 2.4 Luasan dan Debit DAS Kota Tarakan II-13
Tabel 2.5 Luasan Status Daya Dukung Air di Kota Tarakan II-17
Tabel 2.6 Distribusi Jasa Ekosistem Penyedia Air berdasarkan Kecamatan.....II-17
Tabel 2.7 Luas Tanah Menurut Penggunaan (Ha) II-20
Tabel 2.8 Rencana Pola Ruang Kota Tarakan Tahun 2021-2041 ..... II-22
Tabel 2.9 Rencana Penyediaan RTH Kota Tarakan Tahun 2021-2041 ..... II-24
Tabel 2.10 Potensi Jenis Bahaya dan Resiko Tinggi di Kota Tarakan... II-25
Tabel 2.11 Lokasi potensi resiko rawan longsor per kelurahan II-26
Tabel 2.12 Jumlah Penduduk Kota Tarakan Tahun 2016- 2020 ..... II-27
Tabel 2.13 Luas Wilayah, Jumlah Kelurahan, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kecamatan..... II-28
Tabel 2.14 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2020 ..... II-29
Tabel 2.15 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2016-2020 Atas Dasar Konstan (Juta Rupiah) II-34
Tabel 2.16 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2016-2020 Atas Dasar Berlaku (Juta Rupiah)..... II-35
Tabel 2.17 Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2016-2020 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) II-37
Tabel 2.18 Pertumbuhan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Tahun 2016-2020 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) II-39
Tabel 2.19 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 (%) II-40
Tabel 2.20 Data Kemiskinan Kota Tarakan Tahun 2016-2020 ..... II-47
Tabel 2.21 Indeks Pembangunan Manusia Kota Tarakan Tahun 2016-2020..... II-49

Tabel 2.22 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Di Kota Tarakan Tahun 2016-2020 ..... II-56
Tabel 2.23 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kota Tarakan..... II-62
Tabel 2.24 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Sebulan di Kota Tarakan Tahun 2016-2020 ..... II-66
Tabel 2.25 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Bukan Makanan Tahun 2020..... II-67
Tabel 2.26 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Makanan di Kota Tarakan Tahun 2020..... II-67
Tabel 2.27 Perkembangan Arus Lalu Lintas Penumpang di Bandara dan Pelabuhan di Kota Tarakan Tahun 2016-2020..... II-71
Tabel 2.28 Perkembangan Arus Bagasi di Bandar Udara Internasional Juwata Tarakan di Kota Tarakan Tahun 2016-2020..... II-72
Tabel 2.29Jumlah Kantor Bank Menurut Kelompok Bank di Kota Tarakan Tahun 2016-2020 ..... II-74
Tabel 2.30 Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel II-76
Tabel 2.31 Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Sumber Air Minum Bersih dan Sumber Air Minum Layak Kota Tarakan 2016-2020..... II-78
Tabel 2.32 Angka Kriminalitas Per 10.000 Penduduk di Kota Tarakan Tahun 2016-2020 ..... II-81
Tabel 2.33 Lamanya Proses Perizinan di Kota Tarakan Tahun 2020 . II-82
Tabel 2.34 Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tarakan Tahun 2016-2020..... II-90
Tabel 2.35 Rasio Lulusan S1/S2/S3 di Kota Tarakan Tahun 2015-2020..... II-94
Tabel 2.36 APK PAUD Kota Tarakan Tahun 2016-2020 ..... II-96
Tabel 2.37 Angka Putus Sekolah (APts) di Kota Tarakan Tahun 2016-2020..... II-100
Tabel 2.38 Angka Putus Sekolah (APts) di Kota Tarakan Tahun 2016-2020..... II-100
Tabel 2.39 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kota Tarakan 2016-2020 ..... II-104
Tabel 2.40 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kota Tarakan 2016-2020 ..... II-106
Tabel 2.41 Angka Kematian Bayi di Kota Tarakan Tahun 2016-2020..... II-111
Tabel 2.42 Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup di Kota Tarakan Tahun 2016-2020 ..... II-112

Tabel 2.43 Angka Kematian Ibu Melahirkan di Kota Tarakan Tahun 2016-2020 ..... II-113
Tabel 2.44 Rasio Posyandu Per Satuan Balita di Kota Tarakan Tahun 2016-2020 ..... II-115
Tabel 2.45 Rasio Puskesmas, Klinik, Pustu per Satuan Penduduk.... II-116
Tabel 2.46 Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk Kota Tarakan Tahun 2016-2020 ..... II-117
Tabel 2.47 Rasio Dokter per Satuan Penduduk di Kota Tarakan Tahun 2016-2020 ..... II-118
Tabel 2.48 Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk di Kota Tarakan Tahun 2016-2020 ..... II-119
Tabel 2.49 Jumlah Komplikasi Kebidanan yang Mendapat Penanganan di Kota Tarakan Tahun 2016-2020 ..... II-120
Tabel 2.50 Cakupan Prtolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan di Kota Tarakan Tahun 2016-2020 ..... II-122
Tabel 2.51 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kota Tarakan Tahun 2016-2020 ... II-123
Tabel 2.52 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan di Kota Tarakan Tahun 2016-2020 ..... II-124
Tabel 2.53Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita TBC BTA di Kota Tarakan Tahun 2016-2020 ..... II-125
Tabel 2.54 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita DBD di Kota Tarakan Tahun 2016-2020 ..... II-127
Tabel 2.55 Cakupan Kunjungan Bayi di Kota Tarakan Tahun 2016-2020 ..... II-128
Tabel 2.56 Cakupan Puskesmas di Kota Tarakan Tahun 2016-2020 ..... II-129
Tabel 2.57 Kondisi Jaringan Jalan Kota Tarakan Tahun 2016-2020 . II-131
Tabel 2.58 Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk Kota Tarakan Tahun 2016-2020 ..... II-132
Tabel 2.59 Persentase Jalan yang Memilki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 M) Tahun 2016-2020 ..... II-133
Tabel 2.60 Rasio Fasilitas Pemakaman Umum per Satuan Penduduk II-137
Tabel 2.61 Rasio Bangunan ber-IMB di Kota Tarakan II-138
Tabel 2.62 Rasio Rumah Layak Huni Kota Tarakan Tahun 2016-2020 ..... II-140
Tabel 2.63 Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang Bersertifikat di Kota Tarakan Tahun 2016-2020 ..... II-149
Tabel 2.64Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran Diatas 3000-5000 Liter Pada WMK Kota Tarakan Tahun 2016-2020 ..... II-151

Tabel 2.65 PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial di Kota Tarakan Tahun 2016-2020 ..... II-154
Tabel 2.66 Sarana Sosial di Kota Tarakan Tahun 2016-2020..... II-156
Tabel 2.67 Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kota Tarakan tahun 2016-2020..... II-157
Tabel 2.68 PPKS yang Memperoleh Bantuan untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar di Kota Tarakan Tahun 2016-2020..... II-158
Tabel 2.69 Panti Sosial yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Kota Tarakan Tahun 2016-2020..... II-159
Tabel 2.70Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasisi Masyarakat (WKBSM) yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kota Tarakan Tahun 2016-2020 ..... II-160
Tabel 2.71 Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat Kota Tarakan Tahun 2016-2020..... II-161
Tabel 2.72 Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat Kota Tarakan Tahun 2016-2020..... II-162
Tabel 2.73 Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial Kota Tarakan Tahun 2016-2020 ..... II-163
Tabel 2.74 Angka Sengketa Pengusaha Kerja Per Tahun di Kota Tarakan Tahun 2016-2020 ..... II-165
Tabel 2.75Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) di Kota Tarakan Tahun 2016-2020 ..... II-166
Tabel 2.76 Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan Di Kota Tarakan Tahun 2016-2020..... II-167
Tabel 2.77 Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Di Kota Tarakan Tahun 2016-2020..... II-168
Tabel 2.78 Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan Di Kota Tarakan Tahun 2016-2020..... II-169
Tabel 2.79 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan Di Kota Tarakan Tahun 2016-2020 ..... II-170
Tabel 2.80 Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan Di DPRD Kota Tarakan Tahun 2016-2020 ..... II-171
Tabel 2.81 Rasio KDRT Di Kota Tarakan Tahun 2016-2020..... II-172
Tabel 2.82 Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan Di Kota Tarakan Tahun 2016-2020..... II-174
Tabel 2.83 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Di Kota Tarakan Tahun 2016-2020..... II-175

Tabel 2.84 Indeks Pembedayaan Gender (IDG) Di Kota Tarakan Tahun 2017-2020 ..... II-176
Tabel 2.85 Ketersediaan Pangan Utama Kota Tarakan Tahun 2016-2020 ..... II-177
Tabel 2.86 Sarana Prasarana Persampahan Kota Tarakan Tahun 2016-2020 ..... II-185
Tabel 2.87 Jumlah Penduduk Ber-KTP di Kota Tarakan Tahun 2016-2020 ..... II-187
Tabel 2.88 Kepemilikan Akte Kelahiran di Kota Tarakan Tahun 2016-2020 ..... II-188
Tabel 2.89 Rasio Pasangan Berakte Nikah Kota Tarakan Tahun 2016-2020 ..... II-189
Tabel 2.90 Ketersediaan Database Kependudukan Skala di Kota Tarakan Tahun 2016-2020 ..... II-191
Tabel 2.91 Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK di Kota Tarakan Tahun 2016-2020 ..... II-191
Tabel 2.92 Jumlah PKK Aktif di Kota Tarakan Tahun 2016-2020 .. II-193
Tabel 2.93 Jumlah Posyandu Aktif di Kota Tarakan Tahun 2016-2020 ..... II-194
Tabel 2.94 Jumlah Penduduk Kota Tarakan Tahun 2016-2020..... II-196
Tabel 2.95 Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga di Kota Tarakan Tahun 2016-2020 ..... II-198
Tabel 2.96 Ratio Akseptor KB di Kota Tarakan Tahun 2016-2020 . II-199
Tabel 2.97 Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Usia 15-49 Tahun 2016-2020 .....II-200
Tabel 2.98 Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need) di Kota Tarakan Tahun 2016-2020..... II-201
Tabel 2.99 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Kota Tarakan Tahun 2016-2020..... II-202
Tabel 2.100 Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB di Kota Tarakan Tahun 2016-2020 ..... II-204
Tabel 2.101 Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKB) ber-KB di Kota Tarakan Tahun 2016-2020..... II-205
Tabel 2.102 Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB di Kota Tarakan Tahun 2016-2020 ..... II-206
Tabel 2.103 Cakupan Data Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa di Kota Tarakan Tahun 2016-2020 ..... II-207
Tabel 2.104 Arus Penumpang di Pelabuhan Laut di Kota Tarakan Tahun 2016-2020 ..... II-209
Tabel 2.105 Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) II-222
Tabel 2.106 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kota Tarakan Tahun 2016-2020 ..... II-223

Tabel 2.107 Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai yang Memiliki Sertifikat Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip II-235
Tabel 2.108 Kunjungan Wisata di Kota Tarakan Tahun 2016-2020 . II-241
Tabel 2.109 PAD Sektor Parawisata di Kota Tarakan Tahun 2016-2020 ..... II-238
Tabel 2.110 Produksi Padi dan Bahan Pangan Lokal Lainnya Kota Tarakan Tahun 2016-2020 ..... II-244
Tabel 2.111 Luas Panen Padi Kota Tarakan Tahun 2016-2020 ..... II-245
Tabel 2.112 Jumlah Produksi Hasil Peternakan Kota Tarakan Tahun 2016-2020 ..... II-247
Tabel 2.113 Perkembangan Data Bidang Perikanan Kota Tarakan ... II-253
Tabel 2.114 Cakupan Bina Kelompok Nelayan di Kota Tarakan Tahun 2016-2019 ..... II-255
Tabel 2.115 Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Kota Tarakan . II-257
Tabel 2.116 Ketersediaan Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD Kota Tarakan Tahun 2016-2020 ..... II-272
Tabel 2.117 Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Kota Tarakan untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) Maupun Dakumen Rencana Tahunan (RKPD) .. II-273
Tabel 2.118 Terintegrasi Program-Program DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran Ke Dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD ... II-274
Tabel 2.119 Capaian Kinerja Penyelengaraan Urusan Pemerintahan II-275
Tabel 3.1 Skala Interval Otonomi Fiskal III-4
Tabel 3.2 Derajat Otonomi Fiskal Kota Tarakan Tahun 2016-2020 ..... III-5
Tabel 3.3 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Tarakan Tahun 2016-2020 ..... III-7
Tabel 3.4 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kota Tarakan Tahun 2016-2020 ..... III-11
Tabel 3.5 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Tarakan Tahun 2016-2020 ..... III-14
Tabel 3.6 Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Tarakan Tahun 2016-2020 ..... III-18
Tabel 3.7 Rasio Lancar Kota Tarakan Tahun 2013-2018 (dalam Miliar) III-23
Tabel 3.8 Rasio Hutang Terhadap Ekuitas Kota Tarakan Tahun 2016-2020 (dalam Miliar) III-24

Tabel 3.9 Rasio Hutang Terhadap Total Aktiva Kota Tarakan Tahun 2016-2020 (dalam Miliar) III-25
Tabel 3.10 Rasio Perputaran Aktiva Tetap Kota Tarakan Tahun 2016-2020 (dalam Miliar) III-27
Tabel 3.11 Rasio Perputaran Total Aktiva Kota Tarakan Tahun 2016-2020 (dalam Miliar) III-28
Tabel 3.12 Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Tarakan tahun 2016-2020 ..... III-30
Tabel 3.13 Realisasi Pengeluaran Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Tarakan tahun 2015-2020 (dalam Miliar) III-31
Tabel 3.14 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Tarakan Tahun 2016-2020 (dalm Miliar) III-33
Tabel 3.15 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Tarakan Tahun 2015-2020 (dalm Miliar) III-34
Tabel 3.16 Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Tarakan tahun 2019-2020 (dalam Juta) III-40
Tabel 3.17 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Kota Tarakan Tahun 2021-2024 (dalam Juta) III-41
Tabel 3.18 Proyeksi Kapsitas Kemampuan Keuangan Daerah Kota Tarakan Tahun 2021-2024 (dalam Juta) III-44
Tabel 3.19 Rencana Penggunaan Kapasitas Keuangan Daerah Kota Tarakan Tahun 2021-2024 (dalam Juta) III-47
Tabel 4.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pendidikan IV-5
Tabel 4.2 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kesehatan . IV-7
Tabel 4.3 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pekerjaan Umum IV-13
Tabel 4.4 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman IV-15
Tabel 4.5 Rumusan Permasalahan Pembangunan Belum Optimalnya Pelayanan Kebencanaan IV-17
Tabel 4.6 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan Kebencanaan IV-19
Tabel 4.7 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Sosial IV-20
Tabel 4.8 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Tenaga Kerja IV-21

Tabel 4.9 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak IV-23
Tabel 4.10 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pangan IV-24
Tabel 4.11 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pertanahan IV-26
Tabel 4.12 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Lingkungan Hidup IV-27
Tabel 4.13 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil IV-29
Tabel 4.14 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat IV-30
Tabel 4.15 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana..... IV-31
Tabel 4.16 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perhubungan IV-32
Tabel 4.17 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika..... IV-34
Tabel 4.18 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Koperasi Usaha Mikro dan Kecil..... IV-35
Tabel 4.19 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Penanaman Modal IV-37
Tabel 4.20 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kepemudaan dan Olahraga..... IV-37
Tabel 4.21 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Statistik..... IV-38
Tabel 4.22 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kebudayaan..... IV-39
Tabel 4.23 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perpustakaan IV-40

Tabel 4.24 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kelautan dan Perikanan IV-41
Tabel 4.25 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pariwisata.. IV-42
Tabel 4.26 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pertanian... IV-43
Tabel 4.27 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perdagangan..... IV-45
Tabel 4.28 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perindustrian..... IV-46
Tabel 4.29 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Keuangan .. IV-48
Tabel 4.30 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kepegawaian..... IV-49
Tabel 4.31 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Administrasi Pemerintahan..... IV-50
Tabel 4.32 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pengawasan..... IV-52
Tabel 4.33 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan..... IV-53
Tabel 4.34 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Dari Aspek Daya Saing Daerah..... IV-54
Tabel 4.35 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Dari Aspek Geografi dan Demografi IV-55
Tabel 4.36 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Dari Indikator Makro..... IV-63
Tabel 4.37 Pemetaan Permasalahan dan Kajian Faktor Penentu Permasalahan..... IV-65
Tabel 4.38 Capaian TPB Kota Tarakan terhadap Target Nasional..... IV-113
Tabel 4.39 Capaian Indikator TPB Organisasi Perangjat Daerah Kota Tarakan..... IV-116
Tabel 5.1 Realisasi Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Tarakan Tahun 2020 Visi: “Terwujudnya Tarakan Sebagai Kota Maju dan Sejahtera Melalui *Smart City*” V-9

Tabel 5.2 Rumusan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaaran RPJMD Kota Tarakan tahun 2021-2024 Visi: "Terwujudnya Tarakan Sebagai Kota Maju dan Sejahtera Melalui *Smart City*" V-12
Tabel 5.3 Target Pertumbuhan Ekonomi Kota Tarakan 2021-2024 .. V-20
Tabel 5.4 Program Unggulan OKE V-23
Tabel 6.1 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kota Tarakan Tahun 2019-2024 Visi: "Terwujudnya Tarakan Sebagai Kota Maju dan Sejahtera Melalui *Smart City*" VI-9
Tabel 6.2 Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Kota Tarakan 2020 (dalam ribuan) Sebelum Perubahan..... VI-14
Tabel 6.3 Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Kota Tarakan 2021-2024 (dalam ribuan) Setelah Perubahan VI-45
Tabel 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Tarakan 2021-2024 (dalam juta)..... VII-2
Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Tarakan 2021-2024..... VII-3
Tabel 8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Tarakan 2021-2024..... VIII-2
Tabel 8.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Kota Tarakan..... VIII-6

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Bagan Alur Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Perubahan RPJMD I-11
Gambar 2.1 Peta Administratif Kota Tarakan II-5
Gambar 2.2 Persentase Luas Daratan dan Lautan..... II-6
Gambar 2.3 Peta Kemiringan Lahan Kota Tarakan II-8
Gambar 2.4 Peta Geologi Kota Tarakan II-11
Gambar 2.5 Peta Jenis Tanah Kota Tarakan..... II-12
Gambar 2.6 Peta Hidrologi II-15
Gambar 2.7 Peta Daerah Aliran Sungai Kota Tarakan II-16
Gambar 2.8 Peta Penggunaan Lahan Kota Tarakan II-21
Gambar 2.9 PDRB Kota Tarakan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah) II-32
Gambar 2.10 PDRB Kota Tarakan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah) II-33
Gambar 2.11 Laju Pertumbuhan PDRB Tarakan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2016-2020 (%)..... II-41
Gambar 2.12 Laju Inflasi Kota Tarakan Tahun 2016-2020 ..... II-44
Gambar 2.13 Indeks Gini/Gini Rasio Kota Tarakan Tahun 2016-2020 ..... II-46
Gambar 2.14 Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Tarakan Tahun 2016-2020 ..... II-47
Gambar 2.15 Angka Melek Huruf Penduduk Usia diatas 15 Tahun, Perempuan dan Laki-Laki Kota Tarakan 2016-2020 ..... II-50
Gambar 2.16 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kota Tarakan Tahun 2016-2020 ..... II-51
Gambar 2.17 Angka Harapan Hidup Kota Tarakan Tahun 2016-2020 ..... II-53
Gambar 2.18 Angka Harapan Lama Sekolah Kota Tarakan 2016-2020 ..... II-55
Gambar 2.19 TAPK Kota Tarakan Tahun 2016-2020 ..... II-57
Gambar 2.20 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Tarakan Tahun 2016-2020 ..... II-58
Gambar 2.21 Tingkat Kesempatan Kerja Kota Tarakan Tahun 2016-2020 ..... II-59
Gambar 2.22 APM Kota Tarakan 2016-2020 ..... II-60
Gambar 2.23 Persentase PAD Terhadap Pendapatan Kota Tarakan Tahun 2016-2020 ..... II-61
Gambar 2.24 Jumlah Gedung Olahraga Tahun 2016-2020 ..... II-63

Gambar 2.25 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Sebulan di Kota Tarakan Tahun 2016-2020 (Rp) II-65
Gambar 2.26 Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan) di Kota Tarakan Tahun 2016-2020 ..... II-69
Gambar 2.27 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Kota Tarakan Tahun 2016-2020 ..... II-70
Gambar 2.28 Ketaatan Terhadap RTRW Kota Tarakan Tahun 2016-2020 ..... II-72
Gambar 2.29 Luas Wilayah Produktif II-73
Gambar 2.30 Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Penerangan Listrik Kota Tarakan 2016-2020 ..... II-79
Gambar 2.31 Persentase Anggota Rumah Tangga 5 Tahun Ke Atas yang Memiliki HP Kota Tarakan 2016-2020 ..... II-80
Gambar 2.32 APK Kota Tarakan Tahun 2016-2020 ..... II-97
Gambar 2.33 APM Kota Tarakan Tahun 2016-2020 ..... II-98
Gambar 2.34 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Tarkan Tahun 2016-2020 ..... II-99
Gambar 2.35 Angka Kelulusan di Kota Tarakan Tahun 2016-2020 ..... II-101
Gambar 2.36 Angka Melanjutkan di Kota Tarakan Tahun 2016-2020 ..... II-102
Gambar 2.37 Jumlah SDN/MIN dan SMPN/MTSN dengan Kondisi Baik (%) II-103
Gambar 2.38 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah Kota Tarakan Tahun 2016-2020 ..... II-104
Gambar 2.39 Rasio Guru/Murid Sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA Kota Tarakan Tahun 2016-2020 ..... II-106
Gambar 2.40 Proporsi Murid Kelas 1 yang Berhasil Menamatkan Sekolah Dasar Kota Tarakan tahun 2016-2018 ..... II-108
Gambar 2.41 Angka Melek Huruf Penduduk Usia diatas 15 Tahun, Perempuan Laki-laki Kota Tarakan Tahun 2016-2020 ..... II-109
Gambar 2.42 Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Kota Tarakan Tahun 2016-2020 ..... II-110
Gambar 2.43 Persentase Sempadan Sungai Terdapat bangunan Liar Kota Tarakan Tahun 2016-2020 ..... II-134
Gambar 2.44 Persentase Drainase dalam Kondisi Baik Kota Tarakan Tahun 2016-2020 ..... II-135

Gambar 2.45 Persentase Fasilitas Pengurangan Sampah Kota Tarakan Tahun 2016-2020 ..... II-136
Gambar 2.46 Rasio Luas Kawasan tertutup pepohonan terhadap Daratan Kota Tarakan Tahun 2016-2020 ..... II-139
Gambar 2.47 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Kota Tarakan Tahun 2016-2020..... II-141
Gambar 2.48 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni yang Terjangkau Kota Tarakan Tahun 2016-2020 ..... II-142
Gambar 2.49 Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Lnmas) Kota Tarakan Tahun 2016-2020 ..... II-144
Gambar 2.50 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Kota Tarakan Tahun 2016-2020..... II-145
Gambar 2.51 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota Tarakan Tahun 2016-2020..... II-147
Gambar 2.52 Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Manajemen Kebakaran Kota Tarakan Tahun 2016-2020 ..... II-148
Gambar 2.53 Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Standar Kualifikasi Kota Tarakan Tahun 2016-2020..... II-150
Gambar 2.54 Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran Diatas 3000-5000 Liter Pada WMK Kota Tarakan Tahun 2015-2020 ..... II-151
Gambar 2.55 Persentase Penegakan PERDA Kota Tarakan Tahun 2015-2020 ..... II-153
Gambar 2.56 Grafik PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial di Kota Tarakan Tahun 2016-2020..... II-155
Gambar 2.57 Timbulan Sampah Kota Tarakan Tahun 2016-2020 ..... II-182
Gambar 2.58 Jumlah Sampah yang Tertangani di Kota Tarakan Tahun 2016-2020..... II-184
Gambar 2.59 Grafik Kepemilikan Akte Kelahiran di Kota Tarakan Tahun 2016-2020..... II-189
Gambar 2.60 Rasio Pasangan Berakte Nikah Kota Tarakan Tahun 2016-2020 ..... II-190
Gambar 2.61 Grafik Jumlah Posyandu Aktif Kota Tarakan Tahun 2016-2020 ..... II-191
Gambar 2.62 Perkembangan Arus Lalu Litas Penumpang Bandara Juwata Kota Tarakan Tahun 2016-2020 ..... II-209

Gambar 2.63 Rasio Ijin Trayek Kota Tarakan Tahun 2016-2020 ..... II-210
Gambar 2.64 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Kota Tarakan Tahun 2016-2020..... II-211
Gambar 2.65 Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum Kota Tarakan Tahun 2016-2020..... II-213
Gambar 2.66 Pemasangan Rambu-Rambu Kota Tarakan Tahun 2016-2020 ..... II-214
Gambar 2.67 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Kota Tarakan Tahun 2016-2020..... II-211
Gambar 2.68 Cakupan Layanan Telekomunikasi Kota Tarakan Tahun 2016-2020..... II-215
Gambar 2.69 Persentase Anggota Rumah Tangga 5 Tahun Ke Atas yang Memiliki HP Kota Tarakan Tahun 2016-2020 ..... II-216
Gambar 2.70 Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet Kota Tarakan Tahun 2016-2020 ..... II-217
Gambar 2.71 Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi Kota Tarakan Tahun 2016-2020 ..... II-218
Gambar 2.72 Persentase Koperasi Aktif Kota Tarakan Tahun 2016-2020 ..... II-219
Gambar 2.73 Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) di Kota Tarakan Tahun 2016-2020 ..... II-221
Gambar 2.74 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kota Tarakan Tahun 2016-2020..... II-226
Gambar 2.75 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Kota Tarakan Tahun 2016-2020 ..... II-227
Gambar 2.76 Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi Kota Tarakan Tahun 2016-2020..... II-228
Gambar 2.77 Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu Kota Tarakan Tahun 2016-2020..... II-229
Gambar 2.78 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun..... II-231
Gambar 2.79 Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah II-232
Gambar 2.80 Rasio Perpustakaan Per Satuan Penduduk..... II-232
Gambar 2.81 Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun Kota Tarakan Tahun 2016-2020 ..... II-233
Gambar 2.82 Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan Kota Tarakan Tahun 2016-2020..... II-234

Gambar 2.83 Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku Kota Tarakan Tahun 2016-2020 ..... II-236
Gambar 2.84 Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Kota Tarakan Tahun 2016-2020 ..... II-237
Gambar 2.85 Lama Kunjungan Wisata di Kota Tarakan Tahun 2016-2020 ..... II-240
Gambar 2.86 Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan perikanan/Agricuktur Foresty and Fishery menurut Lapangan Usaha Kota Tarakan Tahun 2016-2020 .. II-242
Gambar 2.87 Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dalam PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Kota Tarakan Tahun 2016-2020 ..... II-243
Gambar 2.88 Produktivitas Padi Kota Tarakan Tahun 2016-2020 ..... II-245
Gambar 2.89 Cakupan Bina Kelompok Petani Tarakan Tahun 2016-2020 ..... II-246
Gambar 2.90 Ekspor Bersih Perdagngan Kota Tarakan Tahun 2016-2020 ..... II-248
Gambar 2.91 Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal di Kota Tarakan Tahun 2016-2020 ..... II-249
Gambar 2.92 Jumlah Kelompok Pengrajin Kota Tarakan Tahun 2016-2020 ..... II-250
Gambar 2.93 Pertumbuhan Industri Tarakan Tahun 2016-2020 (%) II-251
Gambar 2.94 Jumlah Produksi Ikan Tahun 2016-2020 ..... II-252
Gambar 2.95 Konsumsi Ikan di Kota Tarakan Tahun 2016-2020 ..... II-254
Gambar 2.96 Persentase SILPA terhadap APBD Tarakan Tahun 2016-2020 ..... II-258
Gambar 2.97 Persentase Belanja Pendidikan Kota Tarakan Tahun 2016-2020 ..... II-260
Gambar 2.98 Persentase Belanja Kesehatan Kota Tarakan Tahun 2016-2020 ..... II-261
Gambar 2.99 Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Kota Tarakan Tahun 2016-2019 ..... II-263
Gambar 2.100 Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Kota Tarakan Tahun 2016-2020 ..... II-264
Gambar 2.101 Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah Kota Tarakan tahun 2016-2020 ..... II-265

Gambar 2.102 Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah Kota Tarakan tahun 2016-2020 ..... II-266
Gambar 2.103 Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah Kota Tarakan Tahun 2016-2020 ..... II-267
Gambar 2.104 Persentase Tindak Lanjut Temuan Tarakan Tahun 2016-2020 ..... II-269
Gambar 2.105 Jumlah Temuan BPK Kota Tarakan Tahun 2016-2020 ..... II-270
Gambar 4.1 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kota Tarakan Tahun 2016-2020 ..... IV-9
Gambar 4.2 Angka Harapan Hidup Kota Tarakan Tahun 2015-2020 ..... IV-11
Gambar 4.3 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs IV-78
Gambar 4.4 Rincian Capaian TPB Kota Tarakan Menurut Tujuan IV-115
Gambar 4.5 Capaian Indikator TPB Organisasi Perangkat Daerah Kota Tarakan Menurut IV-117
Gambar 6.1 Perencanaan Strategik VI-2
Gambar 6.2 Strategi Pembangunan Jangka Menengah VI-4
Gambar 6.3 Fokus/Tema Pembangunan Kota Tarakan, RKPD Tahun 2020-2024 ..... VI-8

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan di suatu wilayah memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendorong perkembangan wilayah tersebut. Perencanaan pembangunan menjadi dasar atau acuan dalam penyelenggaraan pembangunan di waktu yang akan datang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan,menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Selain itu, perencanaan pembangunan juga bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, pengoptimalan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pemerintah memerlukan perencanaan mulai dari perencanaan jangka panjang hingga perencanaan jangka pendek yang substansinya saling berkaitan. Perencanaan yang baik akan menjadi arah bagi cita-cita pembangunan serta strategi dan cara pencapaiannya. Karena itu disusun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memberikan landasan

bagi berbagai bentuk perencanaan dari pusat hingga daerah. Terkait dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dibidang perencanaan, diamanatkan juga bahwa Pemerintahan Daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan harus menyusun perencanaan pembangunan.

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 258 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini memiliki makna bahwa Pemerintahan daerah melaksanakan pembangunan sebagai bentuk perwujudan dari pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki.

Berdasarkan Pasal 268 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah, maka pembangunan daerah tersebut adalah perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kerangka pembangunan Nasional. Dalam pelaksanaannya, pembangunan daerah harus bersinergi dan mendukung pencapaian target pembangunan Nasional, sehingga dapat diwujudkan tujuan bernegara.

Pelaksanaan pembangunan daerah diawali dengan penyusunan rencana sebagai permulaan dari siklus perencanaan pembangunan. Berdasarkan Pasal 260 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Nasional. Pemerintah daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan pada pasal Pasal 264 Ayat (4) bahwa RPJMD disusun dan ditetapkan dalam bentuk Perda paling lambat 6 bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Pasangan dr. H. Khairul, M.Kes dan Effendhi Djuprianto, SH yang dilantik pada Tanggal 1 Maret 2019 sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan Periode 2019-2024, telah melaksanakan kewajibannya menyusun Dokumen RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024 melalui Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 yang telah ditetapkan pada Tanggal 9 Agustus 2019. Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Dengan demikian, visi dan misi serta program prioritas kepala daerah terpilih menjiwai seluruh muatan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019- 2024 dan harus

dioperasionalkan oleh seluruh perangkat daerah sesuai kewenangannya.

Penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah Kota Tarakan yang dilakukan diharapkan tidak hanya sebatas proses atau cara yang selama ini telah dilakukan, namun disertai dengan berbagai bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Demikian juga diharapkan terjalin sinergisitas antara Pemerintah Kota Tarakan dengan Pemerintah Pusat maupun dengan Pemerintah Provinsi.

Dalam perjalanannya, setelah RPJMD Kota Tarakan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2019 Tanggal 9 Agustus 2019, telah terbit beberapa kebijakan nasional maupun perkembangan keadaan daerah yang dapat mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah.

Memasuki tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kota Tarakan, telah dilakukan evaluasi terhadap hasil RPJMD. Evaluasi terhadap hasil RPJMD Tahun 2019-2024 memberikan rekomendasi untuk melakukan perubahan RPJMD. Kebijakan untuk melakukan perubahan RPJMD diambil oleh Pemerintah Daerah Kota Tarakan sebab memenuhi syarat untuk melakukan perubahan RPJMD sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Lebih lanjut, perubahan RPJMD Kota Tarakan memenuhi poin c pada Pasal 342 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila terjadi perubahan yang mendasar. Perubahan yang mendasar mencakup terjadinya

bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Perubahan mendasar yang mempengaruhi sustansi Perubahan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024, adalah adanya perubahan kebijakan nasional. Kebijakan nasional dimaksud berupa peraturan perundang-undangan yang ruang lingkupnya berkaitan dengan hal-hal perencanaan dan keuangan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peraturan yang berkenaan dengan perencanaan dan keuangan daerah, diantaranya:

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini berimplikasi terhadap berubahnya struktur APBD baik pada komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. RPJMN merupakan pedoman bagi perencanaan nasional maupun perencanaan daerah karena perencanaan pusat dan perencanaan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional. Pada RPJMN Tahun 2020-2024, pembangunan daerah diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dengan target yang jelas disertai arah kebijakan dan pembangunan wilayah berdasarkan koridor pertumbuhan dan pemerataan. Agenda pembangunan yang menjadi Prioritas Nasional dalam Perencanaan Tahunan (RKP) harus didukung oleh seluruh pemerintah daerah. Sinergi pusat dan daerah sangat dibutuhkan dalam melaksanakan setiap Prioritas Nasional tersebut. Hal ini tercantum dalam pasal 159

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa sinkronisasi kebijakan dengan perencanaan pembangunan lainnya dilakukan dengan menelaah kebijakan nasional yang berdampak dan harus dipedomani oleh daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Peraturan ini mewajibkan kepada seluruh pemerintah daerah agar menggunakan sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya secara nasional yang terintegrasi dan saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah; dan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan ini diterbitkan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sehingga berimplikasi pada penyesuaian program dan kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut. Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah disusun secara sistematis dalam rangka mendukung SIPD.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

  Hasil verifikasi merupakan hasil yang dilakukan pengecekan kebenaran, keaktualan, dan relevansi data dan sumbernya dilihat dari instrument yang digunakan. Validasi Pemutakhiran

Klasifikasi dilakukan dengan cara melakukan pembaharuan klasifikasi data yang masih dianggap terbaru dan valid. Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dimaksudkan agar memudahkan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan maupun pengelolaan keuangan daerah, karena dengan adanya kodefikasi dan nomenklatur, maka semua program dan kegiatan sudah terkelompok secara baik dan memperlancar pelaksanaan dan administrasi program tersebut.

Selain peraturan perundang-undangan di atas, terbit pula beberapa peraturan yang menguatkan perlunya dilakukan perubahan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024. Peraturan dimaksud sebagai berikut:

- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah. Peraturan ini berkenaan dengan laporan dan informasi hasil kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah yang disampaikan kepada pemerintah pusat, DPRD maupun masyarakat;
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Peraturan ini terbit dalam memperkuat peran dan kapasitas Inspektorat Daerah agar lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta meningkatkan efektivitas, profesionalisme, dan kinerja pelayanan rumah sakit daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan kabupaten/Kota. Peraturan ini ditujukan untuk keseragaman nomenklatur dan unit kerja perangkat daerah

yang menyelenggarakan tugas dan fungsi sekretariat daerah, perlu pedoman nomenklatur dan unit kerja sekretariat daerah provinsi dan kabupaten/kota; dan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Peraturan ini mengatur tata cara, dan sistematika penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selanjutnya hal lain yang mendasari perubahan RPJMD adalah terjadinya kejadian luar biasa wabah pandemi COVID-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana Nasional. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai *Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)*/Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD) dan pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit Novel Coronavirus pada manusia ini dengan sebutan Corona Virus Disease (COVID-19), hingga pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Sejak ditetapkannya sebagai pandemi, pertambahan kasus positif di Indonesia maupun Kota Tarakan menunjukkan perkembangan meningkat, dengan terjadinya peningkatan jumlah kasus positif dan persebaran semakin meluas di Kota Tarakan. Hal ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor termasuk dalam pelaksanaan dan penganggaran pembangunan daerah Tahun 2020.

Kebijakan refocusing dan realokasi anggaran di Tahun 2020 untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penyediaan jaring pengaman sosial (*social safety net*) sangat berpengaruh terhadap target capaian kinerja pemerintah daerah.

Telah dilakukan beberapa kali pergerseran anggaran untuk memenuhi kebutuhan penanganan COVID-19. Memperhatikan perkembangan kondisi nasional dan Kota Tarakan akibat pandemi COVID-19 yang berdampak buruk terhadap aspek kesehatan, sosial, ekonomi dan telah merambat ke aspek kehidupan lainnya, maka perlu dilakukan penyesuaian target indikator kinerja makro, target indikator tujuan dan target indikator sasaran (IKU pemda), serta Indikator Kinerja Kunci (IKK) tingkat dampak (impact) dan tingkat hasil (outcome). Selain itu, perlu ditetapkan/diambil juga kebijakan-kebijakan pembangunan jangka menengah terkait penanganan pandemi COVID-19 dan upaya untuk pemulihannya.

Substansi RPJMD Kota Tarakan yang mengalami perubahan meliputi gambaran umum wilayah yang disesuaikan dengan kondisi terkini sampai dengan tahun berjalan; kondisi keuangan dan kerangka pendanaan; permasalahan daerah dan isu strategis terutama terkait dengan pandemi COVID-19; target indikator tujuan dan sasaran; strategi dan arah kebijakan; program dan kegiatan menjadi program, kegiatan, dan sub kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 beserta indikator kinerjanya; dan IKU Pemerintah Daerah dan target kinerjanya, IKU perangkat daerah dan target kinerjanya, dan indikator kinerja program.

Dalam penyusunan Perubahan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024, Pemerintah Kota Tarakan menerapkan beberapa pendekatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pendekatan perencanaan pembangunan Daerah yang dimaksud, meliputi:

1. Pendekatan teknokratis menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran

pembangunan Daerah.

2. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
3. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menterjemahkan visi dan misi kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
4. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, daerah kabupaten/kota, daerah provinsi, hingga nasional.

Perubahan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019 - 2024 memperhatikan pemenuhan pendekatan substansi penyusunan dokumen rencana, antara lain:

a. Pendekatan perencanaan Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial.
   1) Pendekatan Holistik-Tematik: dengan mempertimbangkan keseluruhan kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
   2) Pendekatan Integratif: dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.
   3) Pendekatan Spasial: dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.
b. Kebijakan anggaran belanja *money follow program*.

Gambar 1.1
Bagan Alur Tahapan dan Tata Cara
Penyusunan Perubahan RPJMD

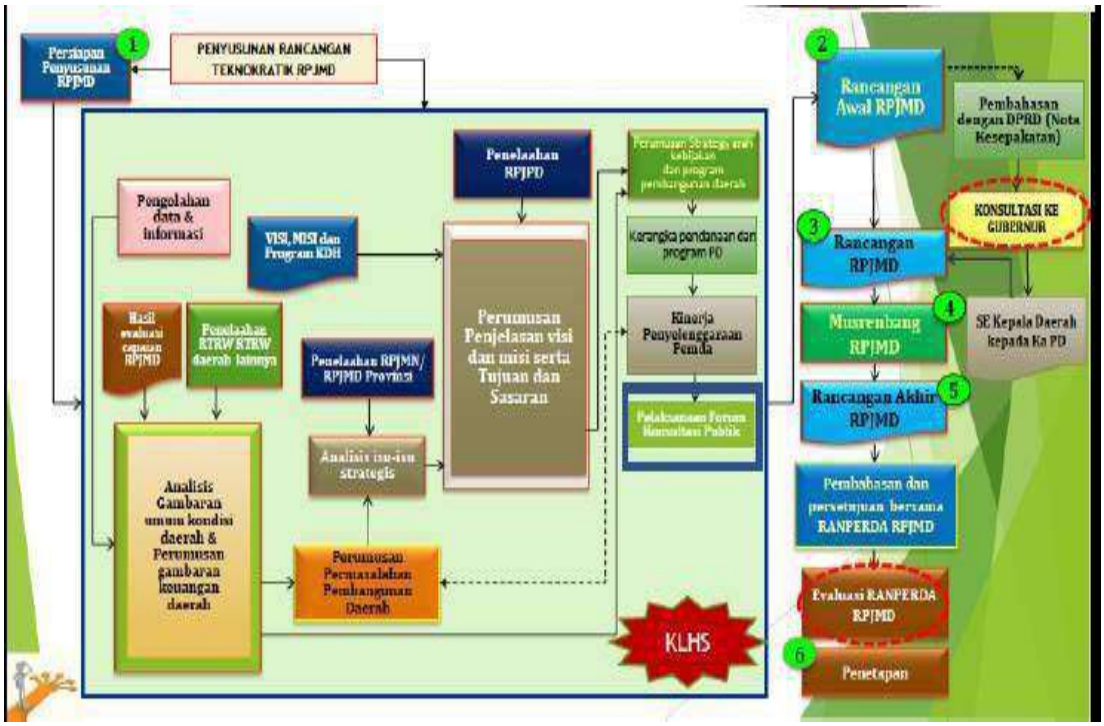

Sumber: Hasil analisis/telaah berdasarkan tahapan dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017

Berdasarkan Gambar 1.1 diatas, maka proses penting dalam penyusunan perubahan RPJMD setelah diperoleh rumusan isu-isu strategis yaitu tahap merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan. Hal ini merupakan perencanaan strategik yang membutuhkan proses berulang-ulang untuk menghasilkan rumusan tujuan dan sasaran yang dilengkapi dengan indikator kinerja sebagai tolok ukur. Selanjutnya, tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, perlu dilaksanakaan dengan berbagai upaya/cara yang dirumuskan dalam strategi dan arah kebijakan. Dengan strategi dan arah kebijakan yang dipilih, maka dapat disusun indikasi rencana program prioritas pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Penyusunan Perubahan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019 - 2024 merupakan rangkaian yang berkesinambungan, mulai dari tahap persiapan sampai dengan penetapan Perda tentang Perubahan RPJMD. Pada tahap persiapan telah dilakukan penyusunan Rancangan teknokratik perubahan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019 - 2024, sesuai amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017. Hasil dari Rancangan Teknokratik Perubahan RPJMD menjadi salah satu input bagi penyusunan Rancangan Awal Perubahan RPJMD. Selanjutnya, Rancangan Awal disusun dan disempurnakan dengan hasil konsultasi publik, pembahasan dan kesepakatan dengan DPRD Kota Tarakan serta hasil konsultasi ke Gubernur Kalimantan Utara.

Rancangan Awal yang telah disempurnakan selanjutnya menjadi dasar bagi perangkat daerah untuk menyempurnakan Rancangan Awal Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Hasil dari penyempurnaan Perubahan Renstra Perangkat Daerah menjadi rancangan Perubahan Renstra menjadi masukan untuk perumusan Rancangan Perubahan RPJMD dan siap untuk dibahas dalam Musrenbang Perubahan RPJMD.

Hasil musrenbang Perubahan RPJMD menjadi masukan untuk penyempurnaan menjadi rancangan Akhir Perubahan RPJMD. Rancangan Akhir Perubahan RPJMD selanjutnya diajukan ke DPRD untuk dibahas dan disetujui menjadi perda tentang Perubahan RPJMD. Setelah disetujui, maka Ranperda tentang Perubahan RPJMD dievaluasi oleh Gubernur. Hasil evaluasi Gubernur menjadi dasar penyempurnaan Ranperda tentang Perubahan RPJMD, yang selanjutnya ditetapkan dengan Perda tentang Perubahan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024.

Selanjutnya, Perubahan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019 - 2024 yang disusun akan menjadi dasar bagi seluruh perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah tahun 2019-2024. Dengan demikian, tercipta keselarasan antara perencanaan strategik di RPJMD dengan perencanaan operasional di perangkat Daerah, dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah, sekaligus sebagai perwujudan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Kota Tarakan.

Penyusunan perubahan RPJMD Kota Tarakan dilakukan mutatis dan mutandis sebagaimana penyusunan RPJMD. Hal ini sesuai amanat dalam Pasal 344 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Perubahan RPJMD dilakukan mulai dari tahap persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, musrenbang, penyusunan rancangan akhir, dan penetapan Perda tentang Perubahan RPJMD.

Perubahan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024 akan menjadi dasar penyusunan RKPD Tahun 2022, 2023, dan 2024. Selanjutnya, RKPD akan menjadi dasar bagi penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022, 2023 dan Tahun Anggaran 2024. Dengan demikian, tercipta keselarasan antara perencanaan strategik di Perubahan RPJMD dengan perencanaan operasional di Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah, sekaligus sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Tarakan.

Secara ringkas, Perubahan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024 dilakukan dengan perbaikan perumusan dan penyajian dokumen sebagaimana terlihat pada Rincian Perubahan tersebut.

BAB I. PENDAHULUAN

- Penajaman latar belakang dan penyebutan alasan revisi
- Melengkapi dasar hukum dengan peraturan perundangan terbaru yang relevan untuk dirujuk

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- Memperbaharui data kinerja sampai dengan tahun 2020

BAB III. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

- Memperbaharui proyeksi kapasitas riil keuangan daerah tahun 2022 - 2024

BAB IV. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

- Memperbaharui permasalahan pembangunan daerah
- Menganalisis / memasukkan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 2021-2025
- Memperbaharui isu strategis

BAB V. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

- Menyesuaikan Sasaran, indikator sasaran dan target pada tiap sasaran RPJMD

BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

- Penajaman strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah Tahun 2022 - 2024

BAB VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

- Penajaman program pembangunan dan perangkat daerah tahun 2022 – 2024

BAB VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

- Memperbaharui kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2022-2024

- Menyesuaikan nomenklatur Perangkat Daerah penanggungjawab bidang urusan/program perangkat daerah.

BAB IX. PENUTUP

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Perubahan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019 – 2024 berlandaskan pada beberapa dasar hukum, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3711);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, kolusi, dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana PembangunanJangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
28. Peraturan Menteri Dalam Republik Indonesia Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
29. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar

Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);

30. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
31. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018Nomor 1541);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018Nomor 1691);
35. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 68);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan *Coronavirus Desease* 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249)
40. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794)
42. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan

Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2010Nomor 2);

43. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi KalimantanUtara Tahun 2016 Nomor 1);
44. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 5);
45. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2020 Nomor 60);
46. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 1);
47. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2021 Nomor 64).
48. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan Tahun 2019 – 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tarakan nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kota Tarakan Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2021 Nomor 66);

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Hirarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu Perubahan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024 merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Penyusunan Perubahan RPJMD Kota Tarakan tahun 2019-2024 selain memperhatikan sinkronisasi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah, juga menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan daerah.

Penyusunan Perubahan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024 tidak terlepas dari dokumen perencanaan lainnya dengan mempedomani RPJPD Kota Tarakan Tahun 2005-2025, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tarakan Tahun 2021-2041, RPJMN Tahun 2020-2024, RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 serta RTRW Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037.

1.3.1. Hubungan Perubahan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024

Penyusunan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024 mempedomani RPJMN sebagaimana diamanatkan dalam Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Hal ini dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan dalam Perubahan RPJMD Kota Tarakan dengan arah kebijakan umum serta prioritas pembangunan nasional yang memperhatikan kewenangan, kondisi dan karakteristik daerah. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. RPJMN merupakan pedoman bagi perencanaan nasional maupun perencanaan daerah karena perencanaan pusat dan perencanaan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional.

1.3.2.Hubungan Perubahan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024 denganRPJPD Kota Tarakan Tahun 2005-2025

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tarakan Tahun 2005-2025 yang memuat visi, misi dan arah kebijakan pembangunan Daerah selama 20 tahun ke depan merupakan pedoman bagi penyusunan Perubahan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024. Penyusunan Perubahan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024 berpedoman pada arah kebijakan pembangunan tahap III dan IV RPJPD Kota Tarakan Tahun 2005-2025.

Mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tarakan Tahun 2005-2025 dalam penyusunan Perubahan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024 dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.

1.3.3. Hubungan Perubahan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024 dengan Revisi RTRW Kota Tarakan Tahun 2021-2041

Penyusunan Perubahan RPJMD Kota Tarakan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tarakan Tahun 2021-2041, yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan Tahun 2021-2041. Berpedoman pada RTRW Kota Tarakan Tahun 2021-2041 dimaksudkan untuk menyelaraskan sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka menengah daerah Kota Tarakan dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola pemanfaatan ruang wilayah.

1.3.4. Hubungan Perubahan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024 dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026

Penyusunan Perubahan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024 mempedomani RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Mempedomani RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 dilakukan dengan cara menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, dan program pembangunan daerah jangkan menengah daerah Kota Tarakan Tahun 2019-2024 dengan arah serta prioritas pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Utara, arah kebijakan, dan prioritas untuk bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Daerah.

1.3.5. Hubungan Perubahan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024 dengan RTRW Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037

Penyusunan Perubahan RPJMD Kota Tarakan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037, yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037. Berpedoman pada RTRW Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037 dimaksudkan untuk menyelaraskan sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka menengah daerah Kota Tarakan dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola pemanfaatan ruang wilayah.

1.3.6. Hubungan Perubahan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024 dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024

Salah satu dokumen yang ditelaah dalam penyusunan Perubahan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024 yaitu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS adalah kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan (dalam Renstra-PD). Dokumen KLHS Kota Tarakan Tahun 2019-2024 telah disusun pada tahun

2019, namun dalam perjalanannya setelah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka dilakukan penyesuaian Nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah, sehingga Dokumen KLHS disusun kembali dan juga dalam rangka penapisan indikator TPB yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Tarakan ke dalam Perubahan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024.

1.3.7. Hubungan Perubahan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024 dengan RKPD, Renstra-PD dan Renja-PD

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) KotaTarakan Tahun 2019-2024 menjadi pedoman bagi penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD). Renstra-PD merupakan rencana kerja lima tahunan yang menjabarkan perencanaan kerja dan kinerja tahunan perangkat Daerah untuk menunjang pencapaian visi, misi dan sasaran pembangunan jangka menengah sebagaimana termuat dalam RPJMD serta penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota. Penjabaran rencana tahunan perangkat daerah termuat dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

Selanjutnya, Perubahan RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai perencanaan tahunan daerah. RKPD menjadi acuan bagi setiap perangkat daerah dalam menyusun Renja-PD. Dalam pelaksanaannya di tahunan, Perubahan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024 melalui RKPD menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD setiap tahun selama 3 (tiga) tahun kedepan.

1.4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan RPJMD Kota Tarakan dimaksudkan untuk menyesuaikan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024 dengan peraturan perundangan yang berlaku dan permasalahan/isu strategis pembangunan paling mutakhir dengan memperbaharui kebijakan pembangunan jangka menengah Pemerintah Daerah Kota Tarakan 3 (tiga) tahun kedepan yang holistik-tematik, integratif dan berbasis spasial sebagai tindak lanjut evaluasi terhadap hasil RPJMD serta percepatan penanganan pendemi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkannya.

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Perubahan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024, yaitu:

1. Menetapkan kebijakan pembangunan jangka menengah yang selaras dengan perkembangan keadaan dan penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
2. Menetapkan pedoman untuk penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sampai dengan akhir periode RPJMD;
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dengan perencanaan pembangunan Kota Tarakan.
4. Merumuskan permasalahan pembangunan daerah berdasarkan capaian kinerja pembangunan daerah beberapa tahun terakhir.
5. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Tarakan tiga tahun kedepan.
6. Merumuskan indikasi rencana program prioritas

pembangunan daerah beserta indikator kinerjanya untuk melaksanakan strategi dan arah kebijakan.

7. Menjamin terwujudnya konsistensi antara perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.

1.5. Sistematika Penulisan

Penyusunan Perubahan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024 disusun dalam 9 (sembilan) bab, sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan Perubahan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024. Perubahan menekankan pada penjelasan alasan formil dan materiil mengapa perubahan RPJMD ini dilakukan.

Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini memuat gambaran umum kondisi daerah beberapa tahun terakhir yang disajikan dalam 4 (empat) aspek yaitu aspek geograsi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing Daerah.

Bab III. Gambaran Keuangan Daerah

Bab ini memuat kondisi dan kinerja pengelolaan keuangan daerah beberapa tahun terakhir sebagai dasar untuk merancang kerangka pendanaan untuk membiayai pembangunan selama akhir RPJMD yang akan datang.

Bab IV. Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

Bab ini memuat rangkaian proses yang menghasilkan isu-isu strategis pembangunan daerah. Tahapan dimulai dengan perumusan permasalahan pembangunan, dilanjutkan dengan menelaah dokumen perencanaan lainnya maupun kebijakan/isu

di tingkat nasional, regional maupun di internal Kota Tarakan. Berdasarkan berbagai telaahan tersebut, maka dirumuskan dan ditetapkan isu-isu strategis bagi pembangunan Kota Tarakan 3 (tiga) tahun yang akan datang.

Bab V. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Bab ini memuat rumusan visi dan misi pembangunan jangka menengah berdasarkan visi dan misi kepala daerah terpilih. Selanjutnya misi dijabarkan ke tujuan dan sasaran serta indikator kinerja tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kota Tarakan Tahun 2019-2024.

Bab VI. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

Bab ini menyajikan rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan termasuk integrasinya dengan arahan pemanfaatan ruang untuk 3 (tiga) tahun yang akan datang. Selanjutnya, ditetapkan program pembangunan daerah yang akan menunjang pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan strategi yang telah dipilih.

Bab VII. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Bab ini memuat program perangkat daerah yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun pembangunan Kota Tarakan, disertai dengan pendanaannya yang bersifat indikatif.

Bab VIII. Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Daerah

Bab ini memuat kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diwakili oleh Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang disajikan beserta target setiap tahun sampai dengan Tahun 2024.

Bab IX Penutup

Bab ini memuat hal-hal yang perlu untuk dilaksanakan dan diperhatikan untuk pelaksanaaan Perubahan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024.

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2019-2024 merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah dan program perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Perubahan RPJMD ini merupakan pedoman bagi seluruh penyelenggara pemerintahan daerah, pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pembangunan daerah periode perencanaan tahun 2019-2024.

Perubahan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari visi misi dan janji kepala daerah terpilih dengan memperhatikan berbagai kondisi, permasalah, isu strategis baik skala lokal, regional maupun global, mengacu kepada RPJPD dan RTRW Kota Tarakan, RPJMD Provinsi Kalimantan Utara dan RPJM Nasional dalam rangka sinkronisasi dan keselarasan pembangunan regional dan nasional.

9.1. Kaidah Pelaksanaan

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Peerubahan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024 merupakan pedoman dalam penyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Untuk itu, seluruh perangkat daerah dilingkup pemerintah Kota Tarakan harus menyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan,

program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

2. Sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen Perubahan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024 merupakan sasaran dan indikator kinerja daerah/kota. Perangkat daerah sebagai organisasi pelaksana harus menjabarkannya kedalam sasaran, progam dan indikator kinerja perangkat daerah yang mempunyai hasil dan dampak untuk mendukung tercapainya sasaran dan prioritasnya masing-masing.
3. Indikator kinerja perangkat daerah merupakan indikator kinerja kunci perangkat daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi perangkat daerah.
4. Perubahan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024 dijabarkan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk setiap tahunnya, dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD.
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan pembangunan daerah harus melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pada setiap tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Penyusunan RKPD Kota Tarakan pada Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 berpedoman pada Perubahan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024, yang selanjutkan menjadi

dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Tarakan Tahun 2019 sampai dengan 2024.

7. Bappeda melaksanakan Pengendalian dan evaluasi berkala terhadap RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024.

9.2. Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, diperlukan adanya pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang dilaksanakan pada Tahun 2024. Sebagaimana diketahui, tahun 2024 adalah tahun terakhir periode RPJMD Kota Tarakan. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, maka penyusunan RKPD Tahun 2025 pada saat belum ada RPJMD baru, berpedoman pada sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kota Tarakan 2005-2025, RKP Tahun 2025, dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Selanjutnya RKPD tersebut dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan RAPBD Kota Tarakan Tahun 2025. Pemerintah akan melaksanakan penyusunan RKPD Tahun 2025 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dengan menerapkan berbagai pendekatan perencanaan agar terwujud perencanaan yang berkualitas. Salah satu agenda penyusunan RKPD yaitu menyelesaikan permasalahan pembangunan yang belum seluruhnya tertangani/terselesaikan sampai dengan Tahun 2024, selain untuk menjawab isu-isu strategis tahun berikutnya, prioritas pembangunan nasional dan provinsi, dan lain-lain.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

A.1 Informasi Kondisi Umum Daerah

Bumi Paguntaka, begitulah sebutan Kota Tarakan. Berlandaskan pada semboyan "Tarakan Kota BAIS" (Bersih, Aman, Indah, Sehat dan Sejahtera), Kota Tarakan berusaha menjadikan dirinya sebagai kota modern dengan visi "TERWUJUDNYA TARAKAN SEBAGAI KOTA MAJU DAN SEJAHTERA MELALUI SMART CITY".

Kota "Tarakan" menurut cerita rakyat berasal dari bahasa tidung (suku/kaum nelayan) yang terdiri dari 2 kata yaitu kata "Tarak" (bertemu/tempat singgah) dan "Ngakan" (makan) yang secara harfiah dapat diartikan sebagai "tempat para nelayan untuk istirahat makan, bertemu serta melakukan barter hasil tangkapan dengan nelayan lain". Wilayah yang pada awalnya adalah perkampungan kecil para nelayan ini kemudian berkembang menjadi kota setelah ditemukan dan dieksploitasinya sumber minyak bumi pada tahun 1896 oleh perusahaan perminyakan milik Pemerintah Hindia Belanda *Bataafsche Petroleum Maatschappij* (BPM). Seiring dengan meningkatnya aktivitas eksploitasi minyak bumi di Pulau Tarakan, maka mulailah berdatangan penduduk baik dari daerah sekitar pulau maupun dari luar daerah baik sebagai tenaga kerja yang dibawa oleh Belanda maupun mereka yang mengadu nasib karena terpikat untuk mencari rezeki.

Sebelum menjadi sebuah kota, Tarakan adalah sebuah kecamatan bagian dari Kabupaten Bulungan. Letak dan posisi yang strategis telah mampu menjadikan kecamatan Tarakan sebagai salah satu sentra Industri di wilayah Kalimantan Timur bagian utara *(sekarang Kalimantan Utara)* sehingga pemerintah perlu untuk meningkatkan statusnya menjadi Kota Administratif sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 1981.

Pada perkembangan selanjutnya, status Kota Administratif kembali ditingkatkan menjadi Kotamadya berdasarkan Undang-Undang RI No. 29 Tahun 1997 yang *peresmiannya* dilakukan langsung oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 15 Desember 1997, sekaligus menandai tanggal tersebut sebagai Hari Jadi Kota Tarakan.

Dengan adanya perkembangan dan pemekaran wilayah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 23 Tahun 1999, maka Kota Tarakan yang sebelumnya terdiri dari 3 kecamatan dimekarkan menjadi 4 kecamatan yang terdiri dari 20 kelurahan. Keempat kecamatan tersebut antara lain Tarakan Timur, Tarakan Tengah, Tarakan Barat, dan Tarakan Utara. Di samping itu, berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, status desa yang ada di Kota Tarakan seluruhnya berubah menjadi kelurahan. Undang-undang tersebut juga mengubah penyebutan “Kotamadya Tarakan” menjadi “Kota Tarakan”.

Gambaran umum kondisi Kota Tarakan memberikan informasi tentang kondisi daerah dan capaian pembangunan Kota Tarakan secara umum sampai saat ini. Gambaran umum menjadi pemetaan secara objektif kondisi daerah dari aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, serta daya saing daerah.

A.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

a. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

1) Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kota Tarakan terdiri dari 2 (dua) pulau yaitu Pulau Tarakan dan Pulau Sadau dengan luas wilayah ± 657,33 Km^2 yang terdiri atas wilayah daratan seluas ± 250,80 Km^2 dan wilayah lautan seluas ± 406,53 Km^2. Secara administratif pemerintahan, wilayah Kota Tarakan terbagi ke dalam 4 Kecamatan yaitu Tarakan Timur, Tarakan Tengah, Tarakan Barat, dan Tarakan Utara, serta 20 Kelurahan yaitu Kelurahan Pantai Amal, Mamburungan, Mamburungan Timur, Kampung Enam, Kampung Empat, Lingkas, Gunung Lingkas, Sebengkok, Pamusian, Kampung Satu, Selumit, Selumit Pantai, Karang Anyar, Karang Anyar Pantai, Karang Harapan, Karang Rejo, Karang Balik, Juata Kerikil, Juata Permai, Juata Laut, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Tana Tidung
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bulungan
- Sebelah Timur : Laut Sulawesi
- Sebelah Barat : Kabupaten Bulungan

Tabel 2.1
Luas Wilayah Menurut Kecamatan Tahun 2020
di Kota Tarakan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km^2)				Kelurahan
		Daratan	Laut	Darat + Laut	Persentase (%)	
1	Tarakan Timur	58,01	299,69	357,70	54,42	7 Kelurahan: Kelurahan Pantai Amal, Mamburungan, Mamburungan Timur, Kampung Enam, Kampung Empat, Lingkas, Gunung Lingkas,
2	Tarakan Tengah	55,54	28,46	84,00	12,78	5 Kelurahan: Sebengkok, Pamusian, Kampung Satu, Selumit, Selumit Pantai
3	Tarakan Barat	27,89	18,46	46,35	7,05	5 Kelurahan: Karang Anyar, Karang Anyar Pantai, Karang Harapan, Karang Rejo, Karang Balik
4	Tarakan Utara	109,36	59,92	169,28	25,75	3 kelurahan: Juata Kerikil, Juata Permai, Juata Laut
		250,80	**406,53**	**657,33**	**100**	**20 kelurahan**

Sumber: Kota Tarakan Dalam Angka 2021, diolah

Kecamatan Tarakan Timur merupakan wilayah kecamatan terluas di Kota Tarakan dengan luas 357,70 Km^2 atau sekitar 54,42 persen terhadap luas wilayah Kota Tarakan. Sedangkan wilayah terkecil di Kota Tarakan adalah Kecamatan Tarakan Barat yaitu seluas 46,35 Km^2 atau 7,05 persen terhadap luas wilayah Kota Tarakan.

Gambar 2.1
Peta Adminitratif Kota Tarakan

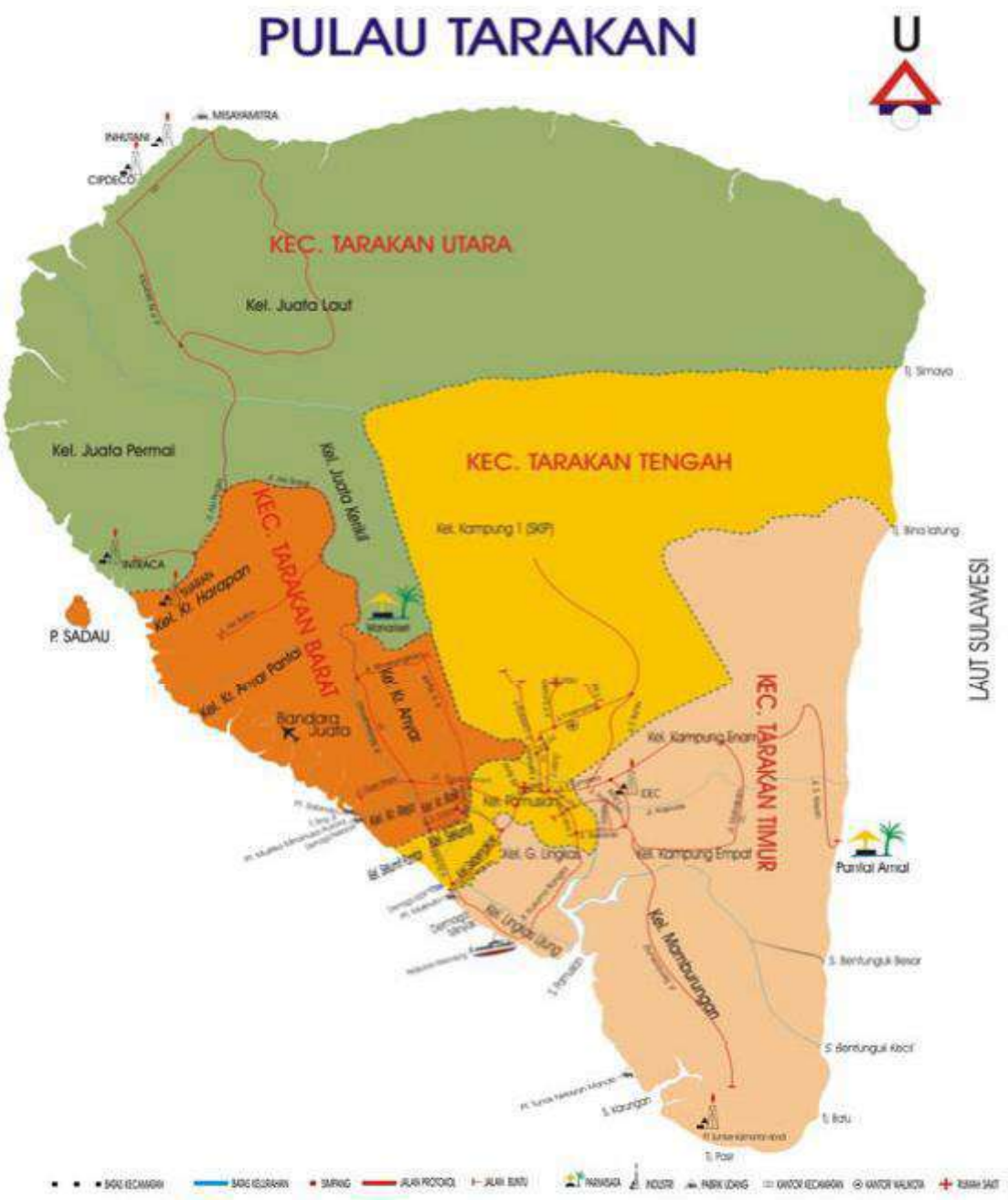

Sumber: Kota Tarakan Dalam Angka 2021

Gambar 2.2
Persentase Luas Daratan dan Lautan

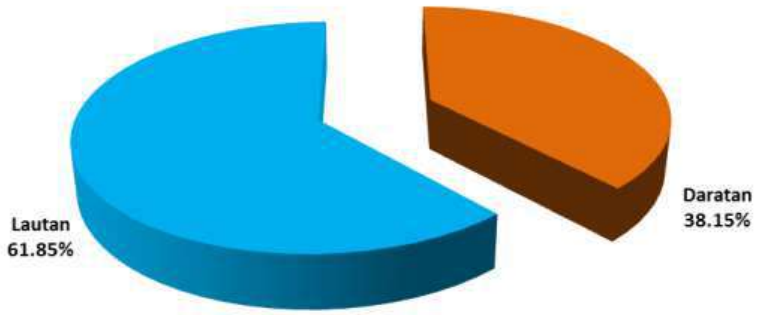

Sumber: Kota Tarakan Dalam Angka 2021, diolah

2). Letak dan Kondisi Geografis

Kota Tarakan secara geografis terletak pada 3°14'30" Lintang Utara – 3°26'37" Lintang Utara dan 117°30'50" Bujur Timur – 117°40'12" Bujur Timur. Kota Tarakan berada di sebuah pulau kecil yang memiliki posisi strategis dimana selama ini berfungsi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah utara Kalimantan dan pintu gerbang utama bagi Provinsi Kalimantan Utara sekaligus menjadi pusat transit perdagangan antara Indonesia-Malaysia-Filipina. Selain itu, karena letaknya yang strategis ini pula, Kota Tarakan menjadi salah satu bagian dari Kota Segitiga Pertumbuhan yang selama ini dirintis dalam konteks BIMP-EAGA bersama dengan Tawau (Malaysia) dan Tawitawi. Segitiga pertumbuhan tersebut diharapkan menjadi *kutub* pertumbuhan ekonomi sehingga menjadi motor penggerak perekonomian daerah sekitar khususnya Kabupaten Nunukan, Bulungan, Malinau, dan Tana Tidung.

Dalam RTRW Nasional, Kota Tarakan ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) untuk mendukung wilayah *hinterland*-nya yang kaya akan hasil hutan, pertanian, dan perkebunan. Kota

Tarakan dapat dijadikan sebagai pusat industri pengolahan hasil pertanian dan kehutanan serta pendistribusian barang dan jasa.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012, wilayah Provinsi Kalimantan Timur mengalami pemekaran menjadi 2 (dua) provinsi dimana 5 (lima) kabupaten/kota di wilayah utara pecah menjadi Provinsi Kalimantan Utara. Kelima daerah pembentuk Provinsi Kalimantan Utara tersebut adalah Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung.

3). Topografi (Kemiringan dan ketinggian)

Wilayah Tarakan didominasi daerah dataran dengan diselingi daerah bergelombang hingga berbukit di bagian tengah pulau. Distribusi terbesar merupakan daerah landai (0-2% dan 2,1 -15%) dengan jumlah 179,13 Km^2 (71,43%) yang sebagian besar berada pada Kecamatan Tarakan Utara (77,66 Km^2). Kemiringan lahan curam umumnya hanya berada pada kecamatan Tarakan Timur (3,22 Km^2) dan Kecamatan Tarakan Utara (10,65 Km^2).

Tabel 2.2
Luas dan Penyebaran Masing-masing Kemiringan Lahan

No	Kemiringan Kelas Lereng (%)	Luas Wilayah (Km^2)				Jumlah
		Tarakan Timur	Tarakan Tengah	Tarakan Barat	Tarakan Utara	
1	0 - 2	29,01	14,09	16,85	61,14	121,09 (48,28%)
2	2,1 - 15	1,98	31,72	7,82	16,52	58,04 (23,15%)
3	15,1 - 40	23,80	9,13	3,22	21,05	57,20 (22,80%)
4	> 40	3,22	0,60	0,00	10,65	14,47 (5,77%)
Jumlah		**58,01**	**55,54**	**27,89**	**109,36**	**250,80 (100%)**

Sumber: Kota Tarakan Dalam Angka 2021, diolah

Gambar 2.3
Peta Kemiringan Lahan Kota Tarakan

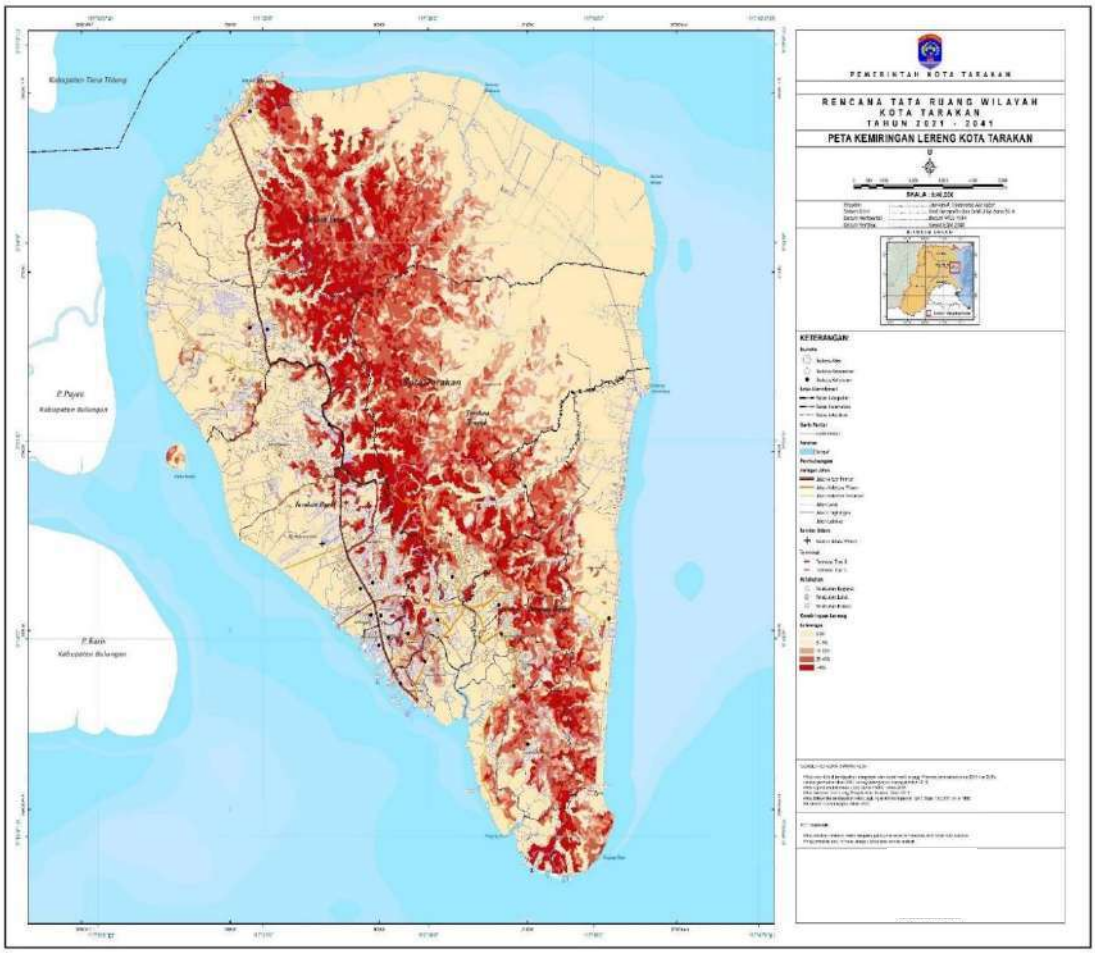

Sumber: Revisi RTRW Kota Tarakan 2021-2041

Kota Tarakan merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata ± 18 meter diatas permukaan laut, terletak pada posisi antara 3°.14'30"–3°.26'37" Lintang Utara dan 117°.30'50"–117°.40'12" bujur Timur. Luas wilayah Kota Tarakan adalah 657,33 km2 dengan daratan seluas 250,80 km2 dan lautan seluas 406,53 km2 . Akhir tahun 2020, wilayah administrasi Kota Tarakan terdiri dari 4 Kecamatan, dengan luas daratan masing-masing kecamatan, yaitu: Tarakan Timur (58,01 km2), Tarakan Tengah (55,54 km2), Tarakan Barat (27,89 km2), dan Tarakan Utara (109,36 km2).

Berdasarkan elevasi (ketinggian dari permukaan laut), dataran di Kota Tarakan di masing-masing kecamatan, yaitu: Tarakan Timur (12,00 m), Tarakan Tengah (15,00 m), Tarakan Barat (28,00 m), dan Tarakan Utara (17,00 m)

Tabel 2.3
Tinggi Wilayah dan Jarak ke Ibukota Kota Menurut Kecamatan di Kota Tarakan, 2020

No	Kecamatan	Tinggi wilayah (mdpl)	Jarak ke Ibukota
1	**Tarakan Timur**	12,00	4,70
2	**Tarakan Tengah**	15,00	0,75
3	**Tarakan Barat**	28,00	3,61
4	**Tarakan Utara**	17,00	18,63

Sumber: Kota Tarakan Dalam Angka, 2021

4). Kondisi Geologi

Kota Tarakan secara geologis memiliki orientasi fisiografi yang berhubungan dengan proses struktur yang terjadi serta jenis batuan yang menyusun kawasan Kota Tarakan. Sebagian besar Kota Tarakan terdiri dari unsur geologi berupa satuan (TPQS), yaitu batu pasir kuarsa, batu lempung, batu lanau, lignit dan konglomerat. Komposisi struktur geologi tersebut tersebar di Kota Tarakan seluas 16.058 Ha (64,03% dari luas daratan Kota Tarakan). Sedangkan sisanya berupa satuan (Qa), yaitu lumpur, lanau, pasir, kerikil, dan kerakal seluas 9.022 Ha (35,97% dari luas daratan Kota Tarakan).

Pulau Tarakan secara geologis terdiri dari 2 (dua) satuan besar, yaitu satuan wilayah perbukitan antiklin dan satuan wilayah daratan (terdiri atas dataran pantai, dataran banjir dan dataran

sungai). Masing-masing satuan mempunyai karakteristik geologi yang berbeda, seperti bentang alam, jenis batuan, hidrogeologi, serta karakteristik dinamika bumi yang sering berkonotasi bencana alam. Kondisi perbukitan di Pulau Tarakan merupakan sebuah antiklin yang sumbunya memanjang arah Barat Laut – Tenggara dimana terdiri dari batu lempung dan lapisan tipis batubara berumur terserier yang berselang-seling satu dan lainnya. Di bagian dalam antiklin ditemukan cadangan minyak dan gas bumi.

Sebagian batuan lempung bersifat kedap air dan mengembang. Bantuan tersebut menjadi mudah longsor pada kemiringan lereng yang agak besar dan mudah terkikis. Batu pasir terdiri dari mineral kuarsa sebagian bersifat lunak dan mudah terkikis, dan sebagian bersifat agak keras dan merekat.

Pada dasarnya peristiwa bencana di Kota Tarakan terdiri dari bencana banjir, gempa bumi, tanah longsor, dan angin kencang. Peristiwa bencana di Kota Tarakan didominasi oleh kejadian bencana banjir dan tanah longsor. Oleh karena itu pengelolaan serta perencanaan Wilayah Kota Tarakan perlu memperhitungkan bencana sebagai salah satu aspek yang mempengaruhinya.

Untuk keperluan perencanaan dan pengelolaan kawasan bencana diperlukan data dan informasi sehingga menghasilkan prediksi dan analisa secara signifikan. Data dan Informasi tersebut dapat diganti dari informasi geologi dan hidrologi atau dari kejadian bencana yang selama ini terjadi.

Gambar 2.4
Peta Geologi

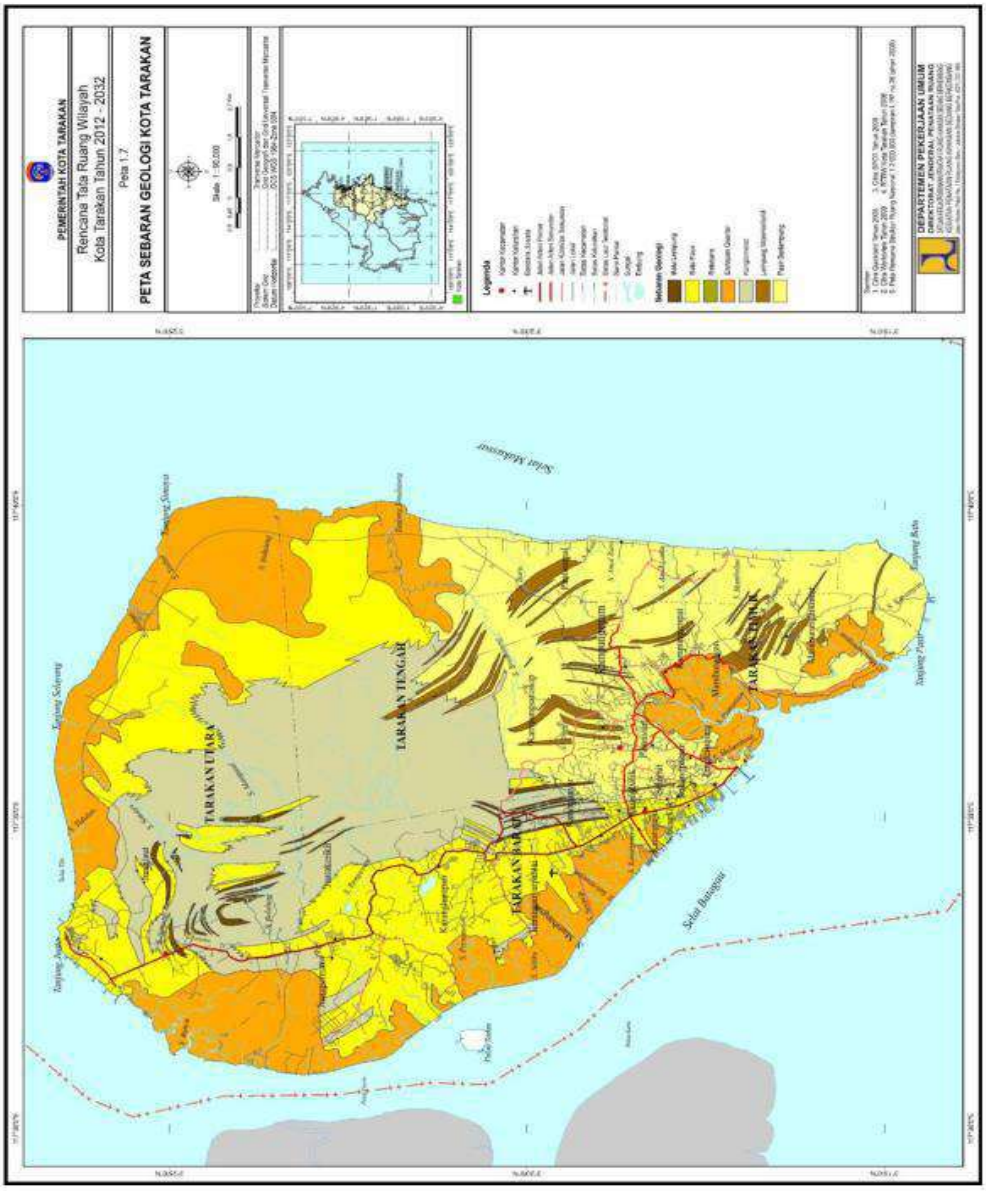

Sumber: Dinas PUPR Kota Tarakan

Gambar 2.5
Peta Jenis Tanah Kota Tarakan

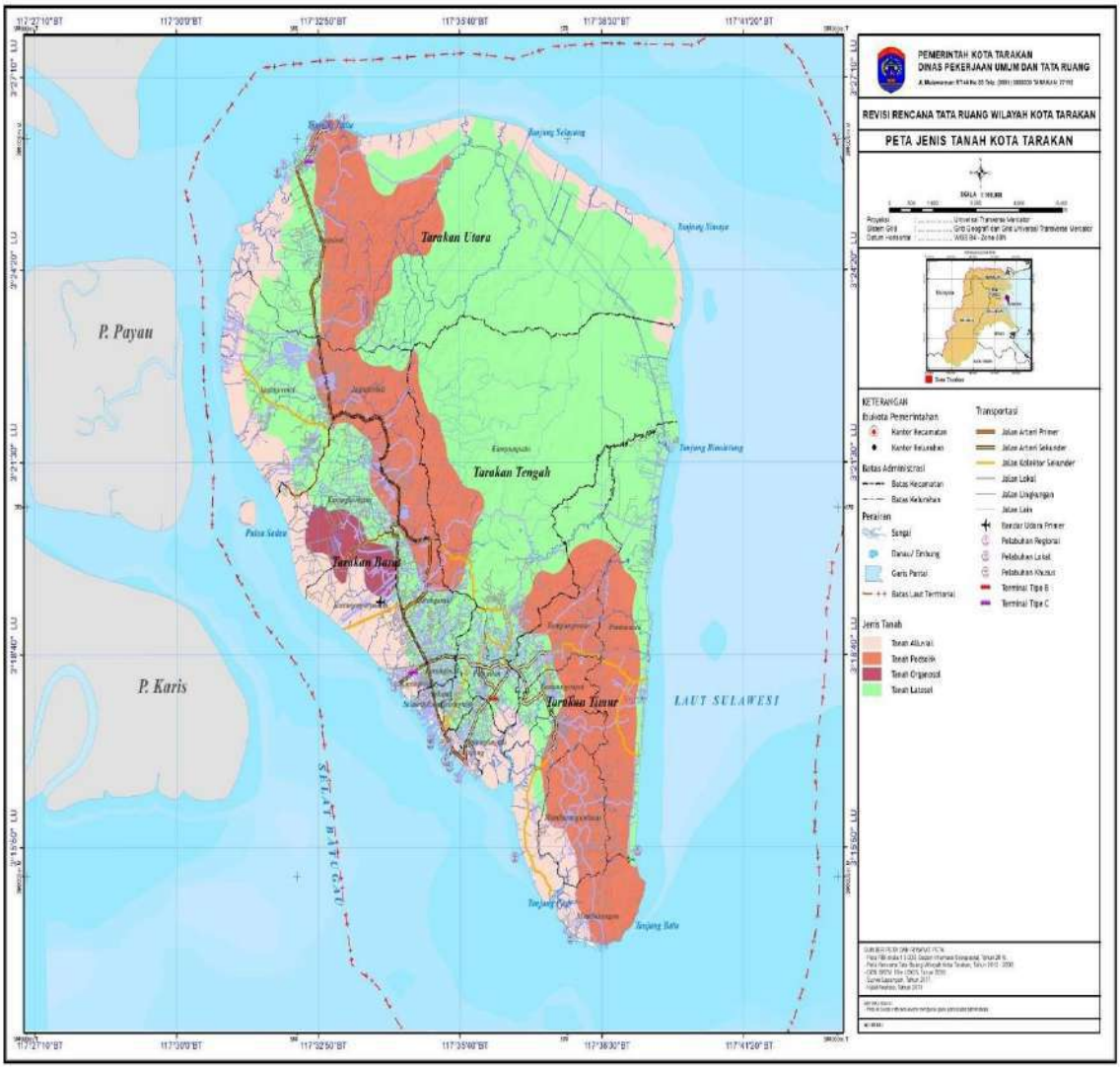

Sumber: Dinas PUPR Kota Tarakan

5). Hidrologi

Banyaknya kawasan perbukitan di Kota Tarakan dengan intensitas curah hujan cukup tinggi menyebabkan seringnya dijumpai aliran sungai dan anaknya yang bermuara di pantai Timur dan Barat. Aliran sungai tersebut yang melewati daerah perkotaan,

sehingga dapat dimanfaatkan sebagai saluran pembuangan utama (primer) bagi aliran limpasan dan limbah domestik penduduk.

Kota Tarakan memiliki 24 Daerah Aliran Sungai (DAS). Untuk melihat luasan dan pajang sungai dapat dilihat pada tabel berikut. Dalam perencanaan Dinas PU Pengairan digunakan sungai sebagai saluran pembuangan utama (primer), dapat diidentifikasikan bahwa daerah layanan dari sistem drainase ini dibagi berdasarkan aliran sungai. Lihat tabel berikut.

Tabel 2.4
Luasan dan Debit DAS Kota Tarakan

No.	Nama Sungai	Luas DAS (Ha)	Debit (m^3 /detik)
1.	Maya	15.066	1.316
2.	Mangantal	10.422	910
3.	Selayung	8.336	731
4.	Siaboi	20.492	1.789
5.	Simaya	17.245	1.506
6.	Hanjulung	6.634	579
7.	Binalatung	22.591	1.973
8.	Kuli	4.268	1.316
9.	Slipi	3.821	334
10.	Amal Baru	3.468	303
11.	Batu Mapan	3.138	274
12.	Mentogog Kecil	1.441	126
13.	Tanjung Batu	2.025	177

14.	Mentogog	4.944	432
15.	Karungan	7.054	616
16.	Nangitan	2.336	204
17.	Pamusian	23.820	2.080
18.	Kampung Bugis	5.641	493
19.	Sesanip	6.676	583
20.	Persemaian	14.779	1.290
21.	Bengawan	12.363	1.080
22.	Belalung	9.737	850
23.	Bunyu	7.575	662
24.	Semunti besar dan semunti kecil	8.976	784

Sumber: Dinas PUPR Kota Tarakan, diolah

Dalam memenuhi kebutuhan air Kota Tarakan selain digunakannya air permukaan yang berasal dari sungai, maka pengambilan air tanah di Pulau Kota Tarakan cukup potensial dalam memenuhi cadangan air minum bagi Kota Tarakan. Oleh karena itu, pemerintah Kota Tarakan memberikan wilayah-wilayah konservasi air tanah yang digunakan sebagai cadangan air minum, antara lain adalah :

1. Konservasi Mangrove yang berada menyebar di sepanjang pantai Pulau Tarakan.
2. Konservasi Mutlak yang berada relatif di kawasan Hutan Lindung (bagian Utara dan Tengah) Kota Tarakan.

3. Konservasi Pemanfaatan yang berada di bagian Barat dan Timur Kota Tarakan.
4. Konservasi Penyangga yang berada di antara konservasi mutlak dan pemanfaatan.

Gambar 2.6
Peta Hidrologi

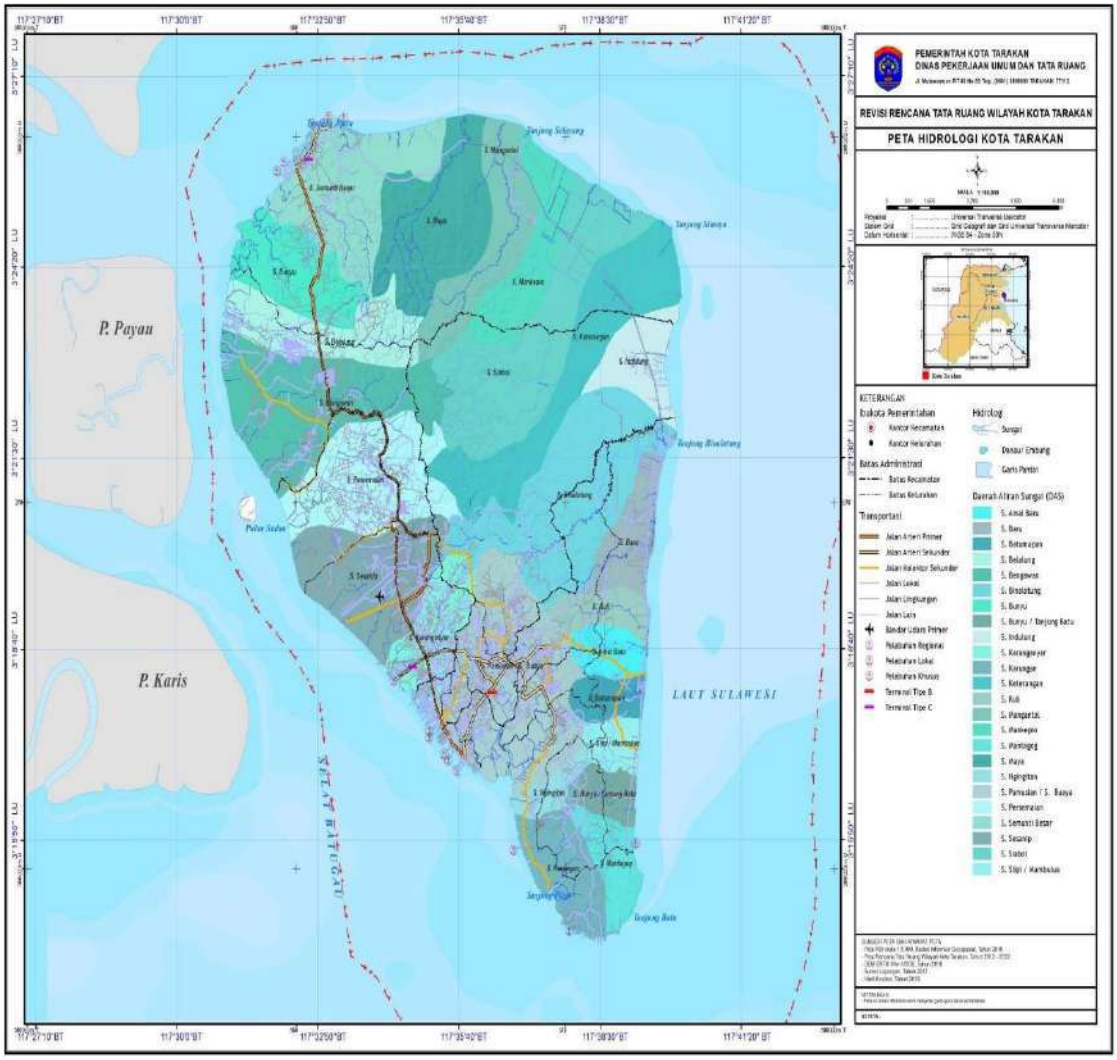

Sumber: Revisi RTRW Kota Tarakan 2021-2041

Gambar 2.7
Peta Daerah Aliran Sungai Kota Tarakan

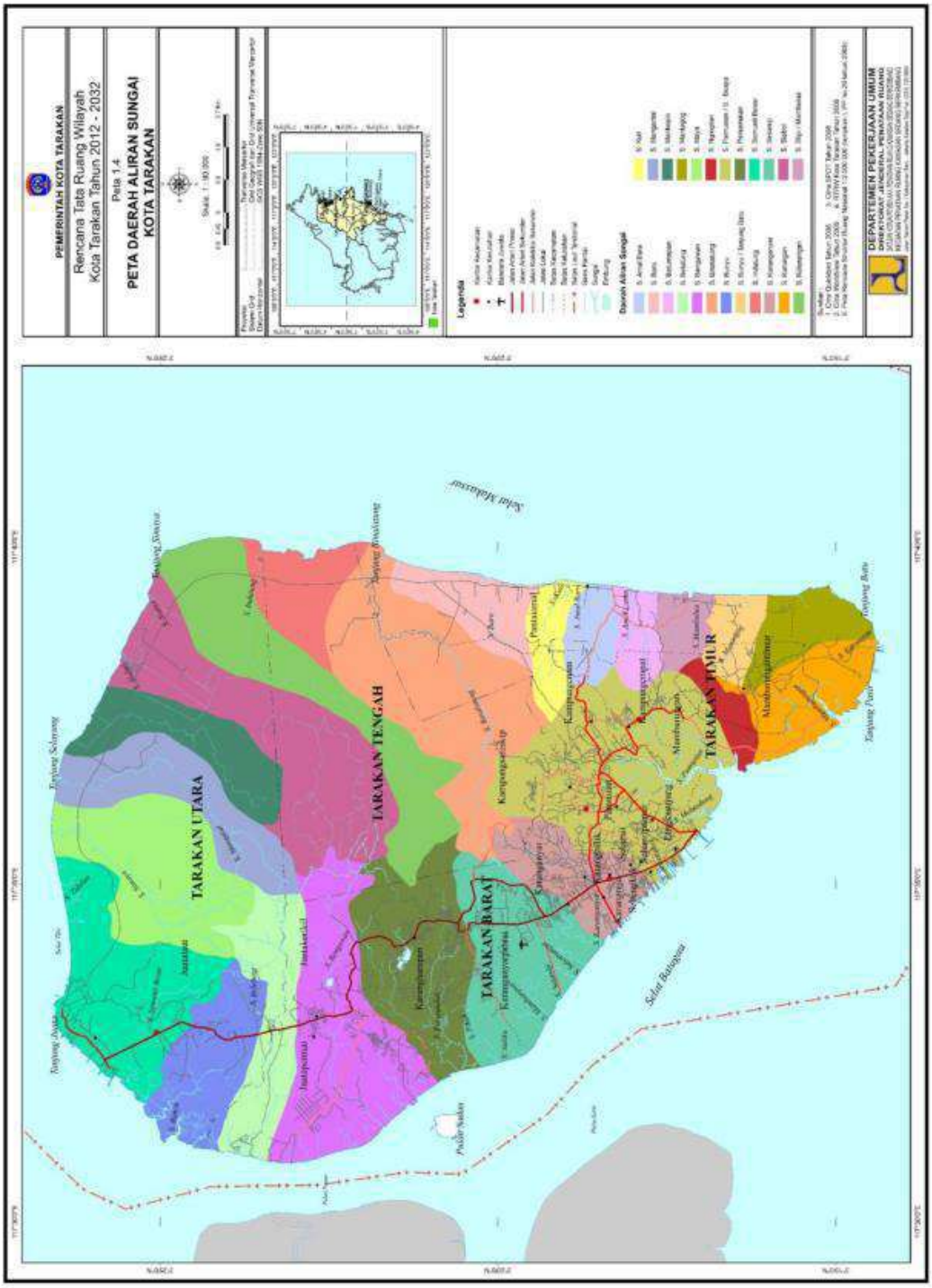

Sumber: Dinas PUPR Kota Tarakan

Berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kota Tarakan dapat dilihat data ketersediaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kota Tarakan seperti table dibawah ini.

Tabel 2.5

Luasan Status Daya Dukung Air di Kota Tarakan

KECAMATAN	Terlampaui		Belum Terlampaui		TOTAL	
	(Ha)	%	(Ha)	%	(Ha)	%
Tarakan Timur	4,77	0,02	5.747,78	23,00	**5.752,55**	**23,02**
Tarakan Tengah	2,22	0,01	6.066,44	24,28	**6.068,66**	**24,29**
Tarakan Barat	0,03	0,00	2.933,68	11,74	**2.933,71**	**11,74**
Tarakan Utara	1,31	0,01	10.229,08	40,94	**10.230,38**	**40,95**
TOTAL	**8,32**	**0,03**	**24.976,98**	**99,97**	**24.985,30**	**100,00**

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan 2020, diolah

Tabel 2.6

Distribusi Jasa Ekosistem Penyedia Air berdasarkan Kecamatan

KECAMATAN	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI		TOTAL	
	(Ha)	%	(Ha)	%	(Ha)	%	(Ha)	%	(Ha)	%	(Ha)	%
Tarakan Timur	192,52	0,77	1064,29	4,26	3056,52	12,23	1395,39	5,58	43,82	0,18	5.752,54	**23**
Tarakan Tengah	44,54	0,18	681,25	2,73	1700,65	6,81	3600,85	14,41	41,36	0,17	6.068,66	**24**
Tarakan Barat	35,92	0,14	1007,63	4,03	1097,31	4,39	748,33	3,00	44,52	0,18	2.933,71	**12**
Tarakan Utara	37,84	0,15	828,90	3,32	5012,89	20,06	4246,55	17,00	104,20	0,42	10.230,38	**41**
TOTAL	**310,83**	**1,24**	**3.582,07**	**14,34**	**10.867,36**	**43,50**	**9.991,13**	**39,99**	**233,91**	**0,94**	**24.985,30**	**100**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan 2020, diolah

Pada Tabel 2.6 terlihat bahwa jasa ekosistem penyedia air di Kota Tarakan berada pada klasifikasi Sedang seluas 10.867,36 ha (43,50 %) dari total luas hasil identifikasi. Luasan potensi jasa lingkungan penyedia air terdistribusi secara tidak merata pada masing-masing kecamatan di wilayah Kota Tarakan. Wilayah yang

memiliki kemampuan sedang dan tinggi umumnya adalah wilayah daratan, yakni pada daerah pegunungan maupun perbukitan yang tutupan lahannya berupa hutan lahan tinggi, hutan lahan rendah dan semak belukar. Sedangkan wilayah pesisir yang umumnya menjadi pusat-pusat permukiman dan pembangunan infrastruktur memiliki kemampuan sebagai penyedia air dengan kategori "Sangat Rendah".Jika dilihat distribusinya, maka kecamatan yang memiliki kemampuan sebagai penyedia air dengan kategori "Sedang" dan "Tinggi" terluas adalah Kecamatan Tarakan Utara

6). Klimatologi

Kota Tarakan yang beriklim tropis mempunyai musim yang hampir sama dengan wilayah Indonesia pada umumnya, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan biasanya terjadi pada bulan Oktober sampai dengan bulan April, sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan April sampai dengan bulan Oktober. Keadaan ini terus berlangsung setiap tahun yang diselingi musim peralihan pada bulan-bulan tertentu. Namun dalam tahun-tahun terakhir ini, keadaan musim di Kalimantan Utara termasuk Kota Tarakan kadang tidak menentu. Pada bulan-bulan yang seharusnya turun hujan terkadang tidak turun hujan sama sekali begitu juga sebaliknya.

Suhu udara di suatu tempat antara lain ditentukan oleh tinggi rendahnya tempat tersebut terhadap permukaan laut dan jaraknya dari pantai. Secara umum, Kota Tarakan beriklim panas dengan suhu udara sepanjang tahun 2017 berkisar 27,47^{0}C, dengan rata-rata titik maksimal 31,22^{0}C dan rata rata titik minimal 24,62^{0}C. Selain itu, sebagai daerah beriklim tropis, Kota Tarakan mempunyai rata-rata kelembaban udara adalah 83,00% dengan rata-rata titik maksimal 98,00% dan rata-rata titik minimal 55,00 persen. Kondisi

tekanan udara di Kota Tarakan pada tahun 2017 adalah 1.010,80 mb dengan kecepatan angin 5,00 knot dan penyinaran matahari mencapai 63,00 persen. Untuk kondisi hujan, rata-rata curah hujan di Kota Tarakan pada tahun 2017 adalah 330,00 mm3 dengan rata-rata jumlah hari hujan pada tahun 2017 adalah 24 hari.

Untuk kondisi klimatologi, rata-rata suhu udara di Kota Tarakan pada tahun 2020 adalah 27,70°C, dengan rata-rata titik maksimal pada 31,66°C dan ratarata titik minimal pada 24,66°C. Ratarata kelembaban udara di Kota Tarakan pada tahun 2020 adalah 85,225 persen dengan rata-rata titik maksimal pada 96,2 persen dan rata-rata titik minimal pada 68,975 persen. Kondisi tekanan udara di Kota Tarakan pada tahun 2020 adalah 1.011,2 mb dengan kecepatan angin 5,9 knot dan penyinaran matahari mencapai 65,60 persen.

7). Penggunaan Lahan

Secara spasial, penggunaan lahan eksisting Kota Tarakan terpusat di bagian barat dan tengah Kota Tarakan dengan sumbu perkembangan utara-selatan. Berkembangnya daerah ini terutama didukung oleh kemudahan aksesibilitas berupa pelabuhan, baik pelabuhan penumpang dan barang maupun pelabuhan minyak. Selain itu, sebagian besar penduduk di wilayah pantai barat ini memiliki ketergantungan yang besar terhadap keberadaan pelabuhan tersebut karena adanya keterkaitan aktivitas, sehingga perkembangan daerah ini memiliki sinergi yang kuat dengan aktivitas penduduk setempat. Kawasan Pantai Barat Tarakan juga merupakan pusat berbagai kegiatan ekonomi informal, pusat kegiatan perdagangan, dan perkantoran non pemerintahan. Permukiman penduduk di kawasan pantai barat telah berkembang sebagai perkampungan padat dan tidak terencana. Permukiman ini

berkembang di atas tanah atau rawa pasang surut yang telah dikeringkan namun kurang ditunjang dengan penyediaan infrastruktur yang memadai.

Sebaliknya permukiman di kawasan tengah berkembang lebih terencana yang ditunjang oleh fasilitas sosial seperti rumah sakit, sekolah, lapangan terbuka, dan perkantoran pemerintahan.

Meskipun demikian, pada perkembangannya tumbuh pula permukiman baru di pinggiran secara tidak terencana ke arah timur dan selatan, diantaranya telah merambah ke kaki perbukitan. Selain itu, perkembangan permukiman di kota Tarakan juga telah menyebar di ujung utara pulau dengan basis kegiatan perikanan dan industri pengolahan kayu. Kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi terletak di tengah pulau dengan tiga lokasi konsesi. Sedangkan kegiatan industri pengolahan kayu tersebar di pantai utara hingga selatan yang memiliki akses langsung ke laut pada masing-masing dermaga.

Tabel 2.7

Luas Tanah Menurut Penggunaan (Ha)

No	Penggunaan	Luas Wilayah (m^2)				Jumlah (Ha)
		Tarakan Timur	Tarakan Tengah	Tarakan Barat	Tarakan Utara	
1	Pemukiman	328	397	414	237	1.376
2	Semak/ladang/tegalan	2.565	1.496	1.391	2.522	7.974
3	Kebun campuran	123	9	5	35	172
4	Tambak / empang	269	0	531	281	1.081
5	Hutan lebat	382	1.669	0	1.243	3.294
6	Hutan belukar	1.602	1.886	147	4.962	8.597
7	Hutan rawa	81	69	0	849	999
8	Mangrove (bakau/nipah)	451	28	301	807	1.587
Jumlah		**801**	**5.554**	**2.789**	**10.936**	**25.080**

Sumber: Kota Tarakan Dalam Angka 2021, diolah

Gambar 2.8
Peta Penggunaan Lahan Kota Tarakan

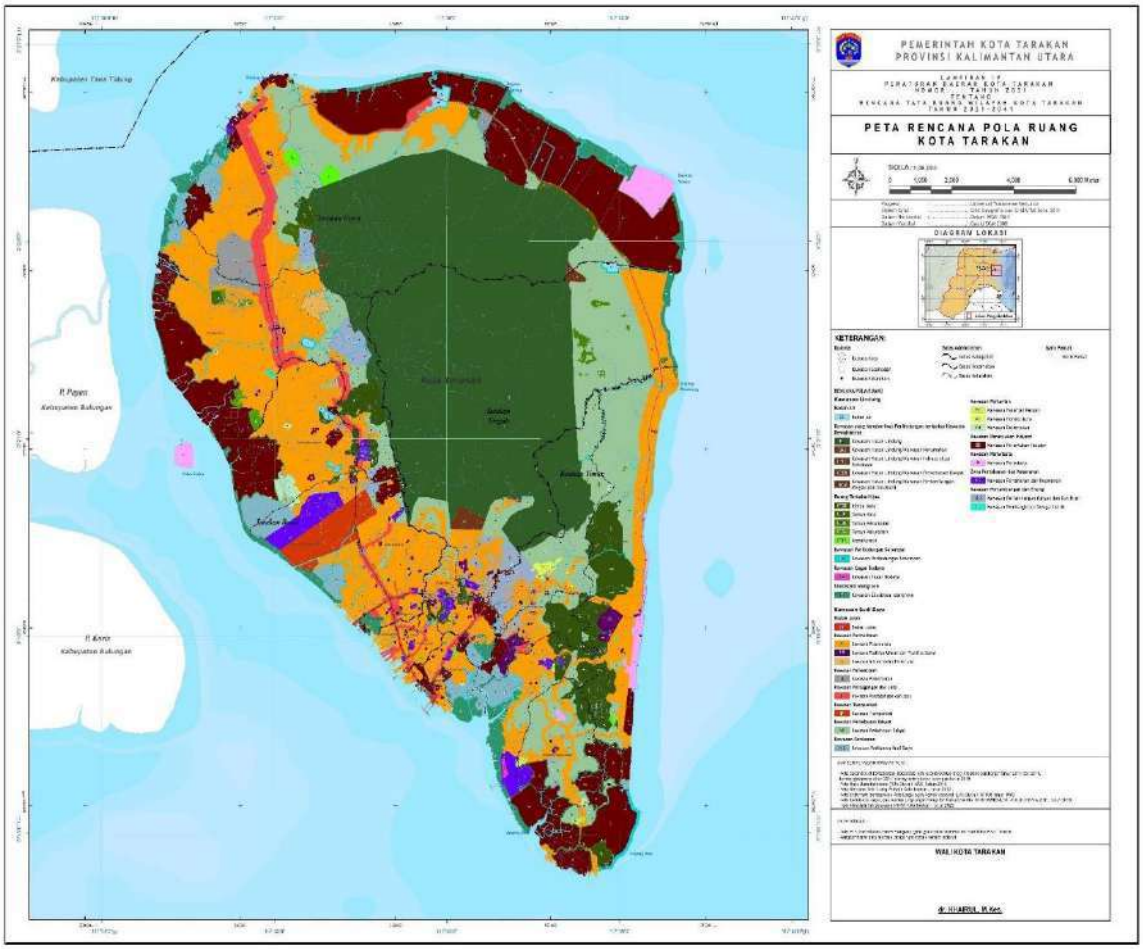

Sumber: Revisi RTRW Kota Tarakan 2021-2041

Kota Tarakan merupakan daerah yang memiliki perhatian besar dalam menjaga luasan kawasan lindungnya. Alokasi kawasan lindung berdasarkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2021 tentang Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan adalah seluas 9,720.30 Ha (38,90%), sedangkan kawasan budidaya sebesar 15.265,72 Ha (61,10%). Rencana detail pola tata ruang sesuai dengan Revisi RTRW Kota Tarakan dapat dilihat berdasarkan tabel berikut ini:

Tabel 2.8
Rencana Pola Ruang Kota Tarakan Tahun 2021-2041

NO	KAWASAN		KODE	RENCANA_290421		
				LUAS (M2)	LUAS (HA)	PROSENTASE (%)
1	**Kawasan Lindung**					
1.1	Badan Air			1,573,106.79	157.31	0.63
1.2	Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	Kawasan Hutan Lindung	HL	69,126,019.68	6,912.60	27.67
1.3	Kawasan Perlindungan Setempat		PS	5,839,664.00	583.97	2.34
1.4	Ruang Terbuka Hijau	Rimba Kota	RTH-1	10,160,005.22	1,016.00	4.07
		Taman Kota	RTH-2	1,156,464.86	115.65	0.46
		Taman Kecamatan	RTH-3	1,834,874.46	183.49	0.73
		Taman Kelurahan	RTH-4	495,074.53	49.51	0.20
		Pemakaman	RTH-7	678,810.66	67.88	0.27
1.5	Ekosistem Mangrove	Ekosistem Mangrove	EM	6,275,968.43	627.60	2.51
1.6	Kawasan Cagar Budaya	Kawasan Cagar Budaya	CB	63,053.03	6.31	0.03
	Jumlah Kawasan Lindung			97,203,041.66	9,720.30	38.90
2	**Kawasan Budidaya**					
2.1	Badan Jalan			922,175.98	92.22	0.37
2.2	Kawasan Perkebunan Rakyat	Kawasan Perkebunan Rakyat	KR	33,940,557.71	3,394.06	13.58
2.3	Kawasan Pertanian	Pertanian Holtikultura	P-2	243,590.48	24.36	0.10
		Pertanian Tanaman Pangan	P-1	122,386.16	12.24	0.05
		Peternakan	P-4	602,030.54	60.20	0.24

NO	KAWASAN		KODE	RENCANA_290421		
				LUAS (M2)	LUAS (HA)	PROSENTASE (%)
2.4	Kawasan Perikanan	Perikanan Budidaya	IK-2	4,752,996.11	475.30	1.90
2.5	Kawasan Pertambangan Dan Energi	Kawasan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi	MG	4,111,758.40	411.18	1.65
		Kawasan Pembangkit Tenaga Listrik	PTL	91,234.58	9.12	0.04
2.6	Kawasan Peruntukan Industri		KPI	33,659,365.48	3,365.94	13.47
2.7	Kawasan Pariwisata		W	2,664,981.82	266.50	1.07
2.8	Kawasan Pemukiman	Kawasan Perumahan	R	55,576,863.13	5,557.69	22.24
		Kawasan Fasilitas Umum Dan Fasilitas Sosial	FUS	1,769,716.87	176.97	0.71
		Kawasan Infrastruktur Perkotaan	IR	493,926.84	49.39	0.20
2.9	Kawasan Perdagangan Jasa		K	5,488,188.55	548.82	2.20
2.1	Kawasan Perkantoran		KT	2,295,574.40	229.56	0.92
2.11	Kawasan Transportasi		TR	2,822,352.89	282.24	1.13
2.12	Kawasan Pertahanan Keamanan		HK	3,099,507.25	309.95	1.24
	Jumlah Kawasan Budidaya			152,657,207.19	15,265.72	61.10
	Total Luas Kawasan Lindung + Kawasan Budidaya			**249,860,248.86**	**24,986.02**	**100.00**

Sumber: Revisi RTRW Kota Tarakan 2021-2041

Tabel 2.9
Rencana Penyediaan RTH Kota Tarakan Tahun 2021-2041

NO	URAIAN	LUAS (HA)		PROSENTASE (%)
1	LUAS WILAYAH		24,986.02	
2	PEMBAGI UNTUK RTH			
	Badan Air	157.31		
	Hutan Lindung	6,912.60		
	Perkebunan Rakyat	3,394.06		
	Pertanian Tanaman Pangan	12.24		
	Pertanian Holtikultura	24.36		
	JUMLAH PEMBAGI		10,500.57	
3	LUAS PEMBAGI RTH (L.WILAYAH - L. PEMBAGI RTH)		14,485.46	
4	RENCANA RTH KOTA TARAKAN			
	Kawasan Perlindungan Setempat	583.97		
	Rimba Kota	1,016.00		
	Taman Kota	115.65		
	Taman Kecamatan	183.49		
	Taman Kelurahan	49.51		
	Pemakaman	67.88		
	Ekosistem Mangrove	627.60		
	JUMLAH RENCANA RTH KOTA TARAKAN		**2,644.09**	**18.25**
	KEWAJIBAN RTH KOTA TARAKAN		**2,897.09**	**20**
	KEKURANGAN RTH KOTA TARAKAN		**253.01**	**1.75**

Sumber: Revisi RTRW Kota Tarakan 2021-2041

8. Wilayah Rawan Bencana

Wilayah rawan bencana Kota Tarakan di klasifikasikan antara lain kawasan rawan longsor, kawasan rawan banjir/genangan, dan kawasan rawan genangan akibat kenaikan air laut.

1. Kawasan rawan longsor berada di Kelurahan Karang Anyar, Kelurahan Sebengkok, Kelurahan Pamusian, Kelurahan

Kampung Empat, Kelurahan Pantai Amal, Kelurahan Kampung Enam, dan Kelurahan Mamburungan;

2. Kawasan rawan banjir/genangan, berada di Kecamatan Tarakan Timur meliputi Jalan Sungai Sesayap, Jalan Meranti, Jalan Akasia, Jalan Bengkirai, dan Jalan Tengkawang), Kecamatan Tarakan Tengah meliputi Jalan Sebengkok Tiram, Jalan Pangeran Diponegoro, Jalan Sebengkok AL, dan Jalan Martadinata; Kecamatan Tarakan Barat meliputi Jalan Slamet Riyadi, Jalan Kenanga, Jalan Seroja, Jalan Anggrek, Jalan Matahari, dan Jalan Mulawarman; serta Kecamatan Tarakan Utara meliputi Jalan P. Aji Iskandar.
3. Kawasan rawan genangan akibat kenaikan muka air laut, curah hujan tinggi, dan gelombang badai yang terjadi pada saat bersamaan berada di kawasan pesisir di Kelurahan Juata Laut, Juata Permai, Karang Harapan, Karang Anyar Pantai, Karang Rejo, Selumit Pantai, Sebengkok, Lingkas Ujung, Mamburungan, Pantai Amal, dan Kampung Satu/Skip sebagai dampak perubahan iklim yang meliputi bahaya cuaca ekstrim, La Nina, dan gelombang badai.

Adapun hasil pengkajian risiko bencana di Kota Tarakan dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.10

Potensi Jenis Bahaya dan Resiko Tinggi di Kota Tarakan

Jenis Bahaya	Potensi Luas Bahaya (ha)	% Potensi Bahaya
Rawan Longsor	8.49 ha	3.38
Rawan Banjir	31.25 km	18.40
Rawan Genangan Air	40.3 ha	16.06

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS, 2019

Tabel 2.11
Lokasi potensi resiko rawan longsor per kelurahan di Kota Tarakan

Kelurahan	Luas Bahaya (ha)	% Bahaya
Karang Anyar (Tar - Bar)	0.6	12
Sebengkok (Tar – Teng)	0.5	35
Pamusian (Tar – Teng)	0.7	30
Kampung IV (Tar – Tim)	0.9	15.5
Pantai Amal (Tar – Tim)	2.3	12.5
Kampung VI (Tar – Tim)	1.7	15
Mamburungan (Tar – Tim)	1.5	12.5

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS, 2019

A.1.2 Aspek Demografi

Kondisi demografis suatu daerah secara umum tercermin melalui jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, struktur penduduk, sebaran penduduk serta ketenagakerjaan. Berdasarkan Data Kota Tarakan Dalam Angka Kota Tarakan tahun 2021 sebanyak 242.790 jiwa yang terdiri atas 126.021 jiwa penduduk laki-laki dan 116.765 jiwa penduduk perempuan. Jumlah Penduduk Kota Tarakan Berdasar proyeksi dengan menggunakan tahun dasar 2010 yaitu sebesar 280.215 Jiwa.

Laju pertumbuhan penduduk Kota Tarakan mengalami penurunan pada tahun 2020. Dalam rentang tahun 2016-2020 tren pertumbuhan penduduk cenderung menurun. Paling rendah pada pada tahun 2020 sebesar 2,23. Rasio jenis kelamin laki-laki dan perempuan sebesar 107,93%. Angka ini menunjukkan bahwa tiap 100 penduduk perempuan terdapat 107 penduduk laki-laki.

Tabel 2.12
Jumlah Penduduk Kota Tarakan 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Penduduk (Jiwa)	244.185	253.026	262025	270.894	280.215
2.	Laki-Laki (Jiwa)	127.933	132.417	137.101	141.613	146.502
3.	Perempuan (Jiwa)	116.252	120.609	124.924	129.281	133.713
4.	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km^2)	961,20	978,83	996,38	1.013,76	968,05

Sumber: BPS Kota Tarakan 2021, diolah

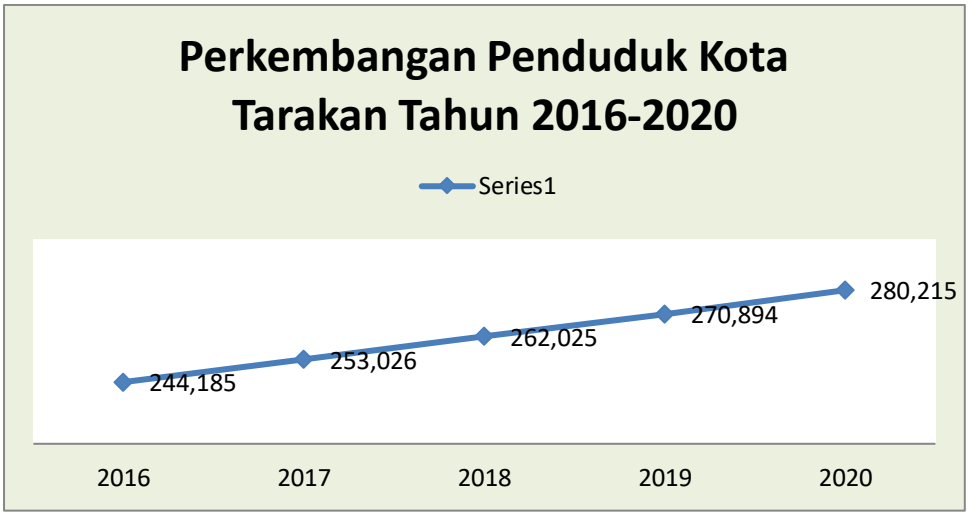

Sumber :Kota Tarakan Dalam Angka Tahun 2021, Diolah

Tabel 2.13
Luas Wilayah, Jumlah Kelurahan, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas (Km²)		Jumlah Kelurahan	Jumlah Penduduk	Kepadatan (Jiwa/Km²)
		Km²	% Terhadap Luas			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tarakan Timur	58,01	23,13	7	58.500	1.008,52
2.	Tarakan Tengah	55,54	22,15	5	69.740	1.255,71
3.	Tarakan Barat	27,89	11,12	5	81.800	2.933,06
4.	Tarakan Utara	109,36	43,60	3	32.740	299,35
2020		250,80	100	20	242.790	968,05
2019		250,80	100	20	270.894	1.330,91
2018		250,80	100	20	262.025	1.044,76
2017		250,80	100	20	253.026	1.008,87
2016		250,80	100	20	244.185	973,62

Sumber: Kota Tarakan Dalam Angka, 2021, diolah

Kepadatan penduduk di Kota Tarakan tahun 2020 mencapai 968,05 jiwa/km2. Kepadatan Penduduk di 4 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Tarakan Barat dengan kepadatan sebesar 2.933,35 jiwa/km2 dan terendah di Kecamatan Tarakan Utara sebesar 299,35 jiwa/Km2.

Jumlah Penduduk terbanyak pada tahun 2020 berada di Kecamatan Tarakan Barat sebanyak 81.800 .jiwa atau 33,69 persen, diikuti dengan Kecamatan Tarakan Tengah sebanyak 69.740 jiwa atau 28,73 persen, selanjutnya Kecamatan Tarakan Timur sebanyak 58.500 jiwa atau 24,10 persen. Kecamatan yang

paling sedikit penduduknya adalah Kecamatan Utara sebanyak 32.740 jiwa atau 13,48 persen dari total jumlah penduduk Kota Tarakan.

Tabel 2.14
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2020

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0-4	8.778	8.173	16.951
5-9	12.933	12.122	25.055
10-14	12.361	11.560	23.921
15-19	10.914	10.328	21.242
20-24	10.736	10.370	21.106
25-29	10.627	9.830	20.457
30-34	10.324	9.838	20.162
35-39	11.018	10.500	21.518
40-44	10.127	9.120	19.247
45-49	8.217	7.311	15.528
50-54	6.618	5.699	12.317
55-59	4.526	4.050	8.576
60-64	3.336	2.927	6.263
65-69	2.176	1.729	3.905
70-74	1.063	900	1.963
75 +	894	991	1.885
Tidak Tahu	1.373	1.317	2.690
Total	**126.021**	**116.765**	**242.786**

Sumber: Tarakan Dalam Angka 2021, diolah

Apabila ditinjau berdasarkan kelompok umur, maka penduduk Kota Tarakan tahun 2020 paling banyak berumur 5-9 tahun yaitu 25.055 jiwa, diikuti dengan kelompok umur 10-14 tahun sebanyak 23.921 jiwa.

A.1.3 Potensi Sumber Daya

Pembangunan berbasis wilayah adalah pembangunan yang bertujuan untuk mengembangkan wilayah. Infrastruktur yang direncanakan untuk dibangun adalah karena kebutuhan pengembangan wilayah tersebut. Pengembangan wilayah diperlukan karena kondisi wilayah yang berbeda-beda karena alasan ekonomi dan potensi setiap daerah yang berbeda-beda, seperti potensi sumber daya alam.

Berdasarkan Revisi RTRW Kota Tarakan 2021-2041 dapat dijelaskan bahwa Kota Tarakan memiliki karakteristik wilayah daerah pesisir dengan Total kawasan budidaya sebesar 15.265,72 Ha dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, pariwasata, industri, pertambangan dan lain-lain dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah. (Menjelaskan potensi yang bisa dikembangkan)

A.1.4 Indikator Kinerja Penyelanggaraan Pemerintahan Daerah

A.1.4.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Keberhasilan pembangunan merupakan cermin dari keberhasilan pencapaian indikator pembangunan yaitu terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang merata di berbagai bidang terutama bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi serta terpenuhinya kebutuhan fasilitas publik (infrastruktur).

a. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung menjadi salah satu tolok ukuran bagi kesejahteraan di setiap daerah. Indikator yang digunakan untuk melihat pertumbuhan perekonomian daerah

adalah Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dan tingkat kesejahteraan masyarakat dari sisi makro ekonomi. PDRB merupakan jumlah nilai tambah bruto yang timbul akibat adanya berbagai kegiatan ekonomi atau proses produksi yang tercipta di suatu daerah atau region dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi dimiliki daerah tersebut atau bukan.

Besaran PDRB suatu daerah dapat menggambarkan kemampuan atau potensi ekonomi dan kinerja ekonomi dari suatu daerah, baik dalam hal pengelolaan sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Perekonomian Kota Tarakan yang salah satunya diukur dari besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), selama periode 2016–2020 menunjukkan perkembangan yang meningkat.

Kontribusi atau peranan sektor ekonomi menunjukkan struktur perekonomian yang terbentuk di suatu daerah. Struktur ekonomi yang dinyatakan dalam persentase menunjukkan besarnya peranan masing-masing sektor ekonomi dalam menciptakan nilai tambah. Hal ini menggambarkan ketergantungan daerah terhadap kemampuan produksi masing-masing sektor ekonomi. Apabila struktur ekonomi disajikan dari waktu ke waktu, maka dapat dilihat perubahan dan pergeseran struktursebagai indikator adanya proses pembangunan. Misalnya adanya penurunan peran sektor pertanian yang diikuti dengan kenaikan peran sektor industri.

PDRB Kota Tarakan atas dasar harga konstan sangat dipengaruhi oleh jumlah produksi dan harga komoditi dari sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; dan kontruksi yang masih tetap menjadi sektor andalan karena

memberikan kontribusi paling besar bagi perekonomian Kota Tarakan. Konstribusi sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; tahun 2020 mencapai 20,57%. Dalam kurun waktu 5 tahun memiliki kontribusi yang paling besar dengan nilai rata-rata kontribusi sebesar 19,94%. Berdasarkan harga konstan, angka PDRB mengalami penurunan, dari 22,22 triliun rupiah pada tahun 2019 menjadi 22,05 triliun rupiah pada tahun 2020.

Gambar 2.9
PDRB Kota Tarakan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)

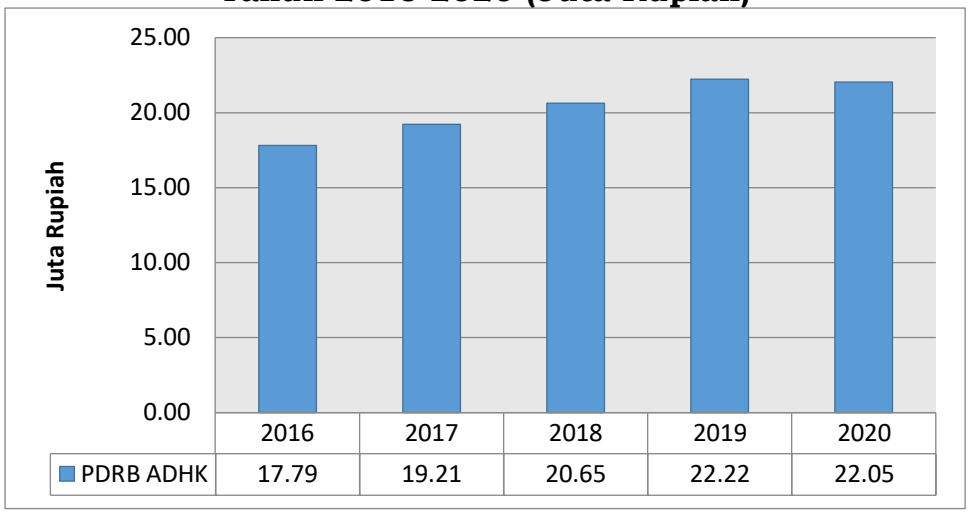

Sumber: Tinjauan Kinerja Perekonomian Kota Tarakan, 2021

Kontribusi PDRB ADHB kategori Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor terhadap PDRB tahun 2020 memegang peranan yang cukup besar di dalam perekonomian Kota Tarakan. Kategori ini menempati urutan pertama dalam struktur perekonomian Kota Tarakan dengan besarnya kontribusi mencapai 21,38 persen pertahunnya. Pada tahun 2020, kontribusi kategori ini telah mencapai 8,5 triliun rupiah atau sekitar 22,25 persen.

Nilai PDRB Kota Tarakan atas dasar dasar harga berlaku pada tahun 2020 mencapai 38,11 triliun rupiah. Secara nominal, nilai

PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 1,85 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 36,26 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi.

Seiring usaha peningkatan pembangunan di Kota Tarakan, PDRB Kota Tarakan memperlihatkan perkembangan selama beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2019, PDRB perkapita Kota Tarakan (ADH Berlaku) mencapai 133,96 juta rupiah dengan peningkatan sebesar 10,85% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jika dilihat lagi secara series semenjak tahun 2016 sampai 2019, PDRB per kapita di Kota Tarakan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa perekonomian masyarakat Kota Tarakan secara umum terus mengalami peningkatan.

Gambar 2.10
PDRB Kota Tarakan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)

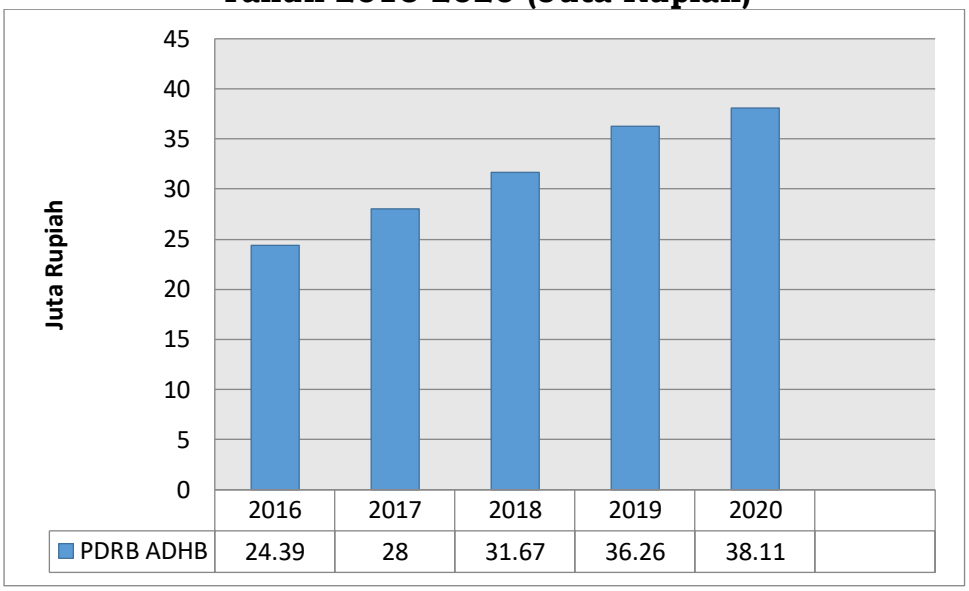

Sumber: Tinjauan Kinerja Perekonomian Kota Tarakan, 2021

Tabel 2.15

Nilai Dan Konstribusi Sektor Dalam PDRB Tahun 2016-2020 Atas Dasar Konstan (Juta Rupiah)

No	Kategori/Lapangan Usaha	2016		2017		2018		2019		2020	
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.267.354,60	12,74	2.407.252,56	12,53	2.574.766,55	12,47	2.747.775,50	12,36	2.755.188,89	12,50
2	Pertambangan dan Penggalian	1.078.977,88	6,06	1.104.069,26	5,75	1.106.860,18	5,36	1.082.287,01	4,87	1.020.747,25	4,63
3	Industri Pengolahan	2.362.478,22	13,28	2.494.284,65	12,99	2.565.371,45	12,42	2.664.443,89	11,99	2.564.547,35	11,63
4	Pengadaan Listrik dan Gas	20.587,98	0,12	22.388,98	0,12	25.067,48	0,12	25.841,10	0,12	29.220,48	0,13
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	15.030,97	0,08	16.249,20	0,08	17.311,19	0,08	17.424,31	0,08	18.022,93	0,08
6	Konstruksi	2.645.710,35	14,87	2.886.323,71	15,03	3.150.350,90	15,26	3.557.064,35	16,01	3.565.754,43	16,17
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.466.163,06	19,48	3.767.163,53	19,61	4.135.630,39	20,03	4.522.053,22	20,35	4.535.508,97	20,57
8	Transportasi dan Pergudangan	2.176.894,57	12,24	2.435.244,61	12,68	2.651.321,75	12,84	2.831.560,76	12,74	2.663.901,65	12,08
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	312.669,85	1,76	350.384,30	1,82	395.370,83	1,91	425.077,15	1,91	381.130,81	1,73
10	Informasi dan Komunikasi	817.295,83	4,59	898.755,98	4,68	986.815,89	4,78	1.065.882,44	4,80	1.119.664,16	5,08
11	Jasa Keuangan	438.229,69	2,46	459.470,06	2,39	501.611,26	2,43	527.967,42	2,38	531.076,79	2,41
12	Real Estate	248.605,46	1,40	260.766,58	1,36	278.309,82	1,35	292.244,29	1,32	294.518,23	1,34
13	Jasa Perusahaan	109.334,58	0,61	110.816,02	0,58	115.404,25	0,56	117.664,80	0,53	115.516,61	0,52
14	Administrasi Pemerintahan,	800.324,80	4,50	873.243,66	4,55	934.669,53	4,53	1.006.533,79	4,53	1.023.105,89	4,64

No	Kategori/Lapangan Usaha	2016		2017		2018		2019		2020	
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
	Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib										
15	Jasa Pendidikan	510.029,90	2,87	553.795,19	2,88	598.662,53	2,90	663.866,54	2,99	693.560,41	3,15
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	381.187,65	2,14	412.601,44	2,15	442.014,30	2,14	491.400,89	2,21	538.404,54	2,44
17	Jasa Lainnya	139.549,34	0,78	153.312,17	0,80	167.895,18	0,81	183.414,59	0,83	200.314,30	0,91
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	**17.790.424,75**		**19.206.121,91**		**20.647.433,48**		**22.222.502,05**		**22.050.183,68**	

Sumber : Kota Tarakan Dalam Angka, 2021, diolah

Tabel 2.16

Nilai Dan Konstribusi Sektor Dalam PDRB Tahun 2016-2020 Atas Dasar Berlaku (Juta Rupiah)

No	Kategori/Lapangan Usaha	2016		2017		2018		2019		2020	
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.866.549	11,75	3.135.723	11,20	3.488.674	11,02	3.986.061	10,99	4.076.009	10,70
2	Pertambangan dan Penggalian	1.212.729	4,97	1.318.019	4,71	1.477.556	4,67	1.586.130	4,37	1.644.005	4,31
3	Industri Pengolahan	3.104.829	12,73	3.535.956	12,63	3.774.613	11,92	4.146.275	11,43	4.261.161	11,18
4	Pengadaan Listrik dan Gas	21.200	0,09	26.857	0,10	30.701	0,10	32.795	0,09	37.938	0,10
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	20.442	0,08	23.903	0,09	26.013	0,08	27.058	0,07	29.834	0,08
6	Konstruksi	3.637.590	14,92	4.317.887	15,42	5.106.432	16,12	6.255.954	17,25	6.862.829	18,01

No	Kategori/Lapangan Usaha	2016		2017		2018		2019		2020	
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.110.816	20,96	5.884.238	21,01	6.841.958	21,60	7.966.113	21,97	8.479.892	22,25
8	Transportasi dan Pergudangan	3.327.898	13,65	4.011.950	14,33	4.566.570	14,42	5.113.112	14,10	5.067.068	13,30
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	543.893	2,23	637.927	2,28	738.819	2,33	842.300	2,32	806.602	2,12
10	Informasi dan Komunikasi	900.929	3,69	1.047.503	3,74	1.184.930	3,74	1.342.528	3,70	1.504.561	3,95
11	Jasa Keuangan	616.688	2,53	673.655	2,41	754.655	2,38	816.661	2,25	869.958	2,28
12	Real Estate	279.600	1,15	305.775	1,09	343.048	1,08	381.342	1,05	402.144	1,06
13	Jasa Perusahaan	136.253	0,56	150.264	0,54	160.750	0,51	168.346	0,46	182.108	0,48
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.147.782	4,71	1.261.943	4,51	1.339.117	4,23	1.497.039	4,13	1.542.304	4,05
15	Jasa Pendidikan	718.263	2,95	831.571	2,97	921.030	2,91	1.062.375	2,93	1.148.574	3,01
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	505.814	2,07	566.584	2,02	609.587	1,92	691.603	1,91	797.682	2,09
17	Jasa Lainnya	235.123	0,96	274.377	0,98	306.374	0,97	348.709	0,96	398.052	1,04
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	24.386.398		28.004.130		31.670.824		36.264.403		38.110.722	

Sumber : Kota Tarakan Dalam Angka, 2021, diolah

Tabel 2.17
Perkembangan Konstribusi Sektor Dalam PDRB
Tahun 2016-2020 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb)
dan Harga Konstan (Hk)

No	Kategori/Lapangan Usaha	2016		2017		2018		2019		2020	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11,75	12,74	11,20	12,53	11,02	12,47	10,99	12,36	10,70	12,50
2	Pertambangan dan Penggalian	4,97	6,06	4,71	5,75	4,67	5,36	4,37	4,87	4,31	4,63
3	Industri Pengolahan	12,73	13,28	12,63	12,99	11,92	12,42	11,43	11,99	11,18	11,63
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,12	0,10	0,12	0,10	0,12	0,09	0,12	0,10	0,13
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,08	0,09	0,08	0,08	0,08	0,07	0,08	0,08	0,08
6	Konstruksi	14,92	14,87	15,42	15,03	16,12	15,26	17,25	16,01	18,01	16,17
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	20,96	19,48	21,01	19,61	21,60	20,03	21,97	20,35	22,25	20,57
8	Transportasi dan Pergudangan	13,65	12,24	14,33	12,68	14,42	12,84	14,10	12,74	13,30	12,08
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,23	1,76	2,28	1,82	2,33	1,91	2,32	1,91	2,12	1,73
10	Informasi dan Komunikasi	3,69	4,59	3,74	4,68	3,74	4,78	3,70	4,80	3,95	5,08
11	Jasa Keuangan	2,53	2,46	2,41	2,39	2,38	2,43	2,25	2,38	2,28	2,41
12	Real Estate	1,15	1,40	1,09	1,36	1,08	1,35	1,05	1,32	1,06	1,34
13	Jasa Perusahaan	0,56	0,61	0,54	0,58	0,51	0,56	0,46	0,53	0,48	0,52
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,71	4,50	4,51	4,55	4,23	4,53	4,13	4,53	4,05	4,64

No	Kategori/Lapangan Usaha	2016		2017		2018		2019		2020	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
15	Jasa Pendidikan	2,95	2,87	2,97	2,88	2,91	2,90	2,93	2,99	3,01	3,15
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,07	2,14	2,02	2,15	1,92	2,14	1,91	2,21	2,09	2,44
17	Jasa Lainnya	0,96	0,78	0,98	0,80	0,97	0,81	0,96	0,83	1,04	0,91
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	**17.790.424,75**		**19.206.121,91**		**20.647.433,48**		**22.222.502,05**		**22.050.183,68**	

Sumber : Kota Tarakan Dalam Angka, 2021, diolah

Tabel 2.18
Pertumbuhan Konstribusi Sektor Dalam PDRB Tahun 2016-2020 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk)

No	Kategori/Lapangan Usaha	Pertumbuhan	
		Hb	Hk
		%	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-2,30	-0,47
2	Pertambangan dan Penggalian	-3,47	-6,49
3	Industri Pengolahan	-3,18	-3,26
4	Pengadaan Listrik dan Gas	3,06	2,08
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,79	0,00
6	Konstruksi	4,83	2,13
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,51	1,37
8	Transportasi dan Pergudangan	-0,57	-0,28
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-1,15	-0,27
10	Informasi dan Komunikasi	1,76	2,59
11	Jasa Keuangan	-2,53	-0,49
12	Real Estate	-1,99	-1,07
13	Jasa Perusahaan	-3,65	-3,90
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-3,69	0,77
15	Jasa Pendidikan	0,52	2,37
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,38	3,42
17	Jasa Lainnya	2,09	3,98

``*Sumber : Kota Tarakan Dalam Angka, 2021, diolah*

Pertumbuhan kontribusi sektor dalam PDRB tahun 2016-2020 atas dasar harga berlaku paling tinggi ada pada sektor pengadaan listrik dan gas, yaitu sebesar 8,16%. Pertumbuhan kontribusi terendah ada pada sektor pertambangan dan penggalian sebesar -6,45%. Sektor ini juga merupakan sektor yang memiliki pertumbuhan kontribusi terendah pada PDRB atas dasar harga konstan yaitu sebesar -6,34%. Sedangkan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial memiliki pertumbuhan tertinggi sebesar 3,92%.

Sektor jasa mengalami puncak kontribusi pada tahun 2020, hal ini disebabkan oleh terjadinya kondisi pandemi covid-19.

Selama lima tahun terakhir (2016-2020) struktur perekonomian Kota Tarakan didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya secara berurutan yaitu Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Konstruksi; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Transportasi dan Pergudangan; dan Industri Pengolahan. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kota Tarakan.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Tarakan ADHK pada tahun 2020 dihasilkan oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yaitu sebesar 20,57 persen (angka ini meningkat dari tahun 2016 yang sebesar 19,48 persen). Selanjutnya lapangan usaha Konstruksi sebesar 16,17 persen (meningkat dari tahun 2016 yang hanya sebesar 14,87 persen), disusul oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 12,50 persen. Transportasi dan Pergudangan sebesar 12,08 persen (menurun lambat dari tahun 2016 yang sebesar 12,24 persen). Berikutnya lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 11,63 persen (turun dari tahun 2016 yang dapat mencapai 13,28 persen) dan lapangan usaha.

Tabel 2.19
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 (%)

Kategori/ Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,62	6,17	6,96	5,88	0,27
B. Pertambangan dan Penggalian	-0,16	2,33	1,90	-2,06	-5,69
C. Industri Pengolahan	6,87	5,58	2,87	3,96	-3,75
D. Pengadaan Listrik dan Gas	8,33	8,75	12,19	5,10	13,08

Kategori/ Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,46	8,10	6,54	1,52	3,44
F. Konstruksi	8,23	9,09	9,15	13,25	0,24
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,21	8,68	9,77	9,81	0,30
H. Transportasi dan Pergudangan	5,38	11,87	8,87	7,66	-5,92
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,24	12,06	12,91	7,44	-10,34
J. Informasi dan Komunikasi	8,80	9,97	9,80	8,01	5,05
K. Jasa Keuangan	4,63	4,85	8,67	5,48	0,59
L. Real Estate	2,96	4,89	6,73	5,01	0,78
M,N. Jasa Perusahaan	-3,38	1,35	4,14	1,96	-1,83
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	10,13	9,11	7,07	6,09	1,65
P. Jasa Pendidikan	8,01	8,58	7,33	9,98	4,47
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	12,10	8,24	6,44	11,02	9,57
R,S,T,U. Jasa Lainnya	12,17	9,86	8,79	8,76	9,21
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5,93	7,96	7,55	7,69	-0,78

Sumber : Kota Tarakan Dalam Angka, 2021

Gambar 2.11
Laju Pertumbuhan PDRB Tarakan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2016-2020 (%)

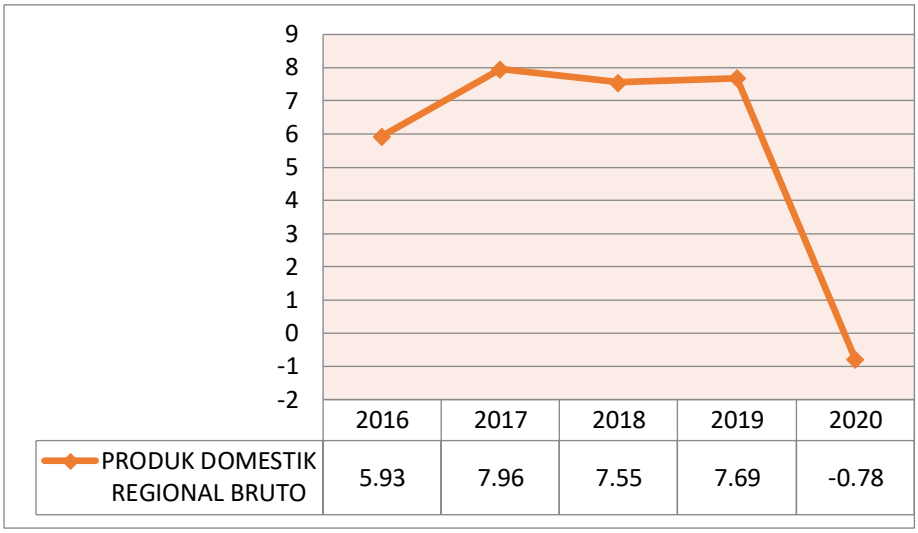

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Tarakan, 2021

Perekonomian Kota Tarakan sejak tahun 2016-2017 selalu meningkat. Pada tahun 2018 mengalami pertumbuhan melambat yaitu 7,55 persen dan terus meningkat sampai dengan tahun 2019 sehingga mencapai peningkatan sebesar 7,69 persen. Akan tetapi, pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi turun secara signifikan bahkan mencapai pertumbuhan negatif yaitu sebesar -0,78.

Selama tahun 2019, dari tujuh belas kategori lapangan usaha, terdapat satu kategori yang pertumbuhannya negatif, yaitu kategori Pertambangan dan Penggalian dengan laju pertumbuhan -2,06 persen. Ada sebelas kategori yang mengalami pertumbuhan lima sampai sepuluh persen, kemudian terdapat dua kategori yang tumbuh di atas 10 persen, yaitu kategori Konstruksi; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang tumbuh sebesar 12,25 dan 11,02 persen. Beberapa kategori sisanya tumbuh positif di bawah 5 persen, yaitu kategori Industri Pengolahan (3,96 persen); Jasa Perusahaan (1,96 persen); Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (1,52 persen).

Perekonomian Kota Tarakan mengalami fluktuasi semenjak terjadinya gejolak perekonomian global yang berdampak pada perekonomian nasional dan daerah, tak terkecuali Kota Tarakan. Perekonomian Kota Tarakan dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan hingga mencapai 7,95 persen di tahun 2016. Namun pertumbuhan ekonomi Kota Tarakan mengalami kontraksi dua tahun berturut-turut dari tahuan 2017 hingga 2019. Hal ini disebabkan oleh guncangan yang terjadi pada perekonomian nasional. Perang dagang menjadi masalah utama saat pada itu. China dan AS sebagai dua kekuatan ekonomi dunia tengah 'berperang'. Hal ini membuat negara lain mendapatkan sentimen buruk dalam proses ekspor-impor. Secara umum, kinerja perekonomian nasional sepanjang tahun 2017 bergerak stagnan

imbas dari pengetatan moneter di sejumlah negara dan isu geopolitik. Pertumbuhan ekonomi hanya mentok 5,05 persen, meski asumsi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sebesar 5,2 persen. Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang disertai anomali dari sisi produksi berupa penurunan kinerja sektor riil dan dari sisi pengeluaran konsumsi rumah tangga menyebabkan penurunan daya beli masyarakat. Walaupun demikian, pertumbuhan ekonomi Kota Tarakan mengalami progresif di tahun 2019 dengan peningkatan sebesar 0,14 poin.

Pada Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Tarakan mengalami konstraksi mencapai negatif pertumbuhan sebesar -0,78 persen. Perlambatan ekonomi pasti akan berdampak pada kinerja pertumbuhan ekonomi Kota Tarakan pada tahun 2020. Pandemi Covid-19 menimbulkan efek domino dari kesehatan ke masalah sosial dan ekonomi, termasuk pelaku usaha. Selanjutnya, pemerintah Kota Tarakan juga sudah memberikan jaring pengaman sosial terhadap aktivitas sosial dan ekonomi untuk masyarakat yang pendapatannya terdampak selama pandemi. Tujuannya agar masyarakat masih tetap bisa menjaga konsumsi pada masa pandemi.

2. Laju Inflasi

Laju inflasi adalah suatu proses menurunnya nilai mata uang disertai dengan peningkatan harga barang secara umum dan terus menerus (*continue*) dalam periode tertentu. Secara umum, dalam kurun waktu 2016-2020, laju inflasi di Kota Tarakan mengalami pelambatan. Pada tahun 2017, laju inflasi Kota Tarakan sebesar 2,77, melambat dari tahun sebelumnya sebesar 4,31, namun mengalami penurunan kembali di tahun 2020 sebesar 1,15.

Gambar 2.12
Laju Inflasi Kota Tarakan Tahun 2016-2020

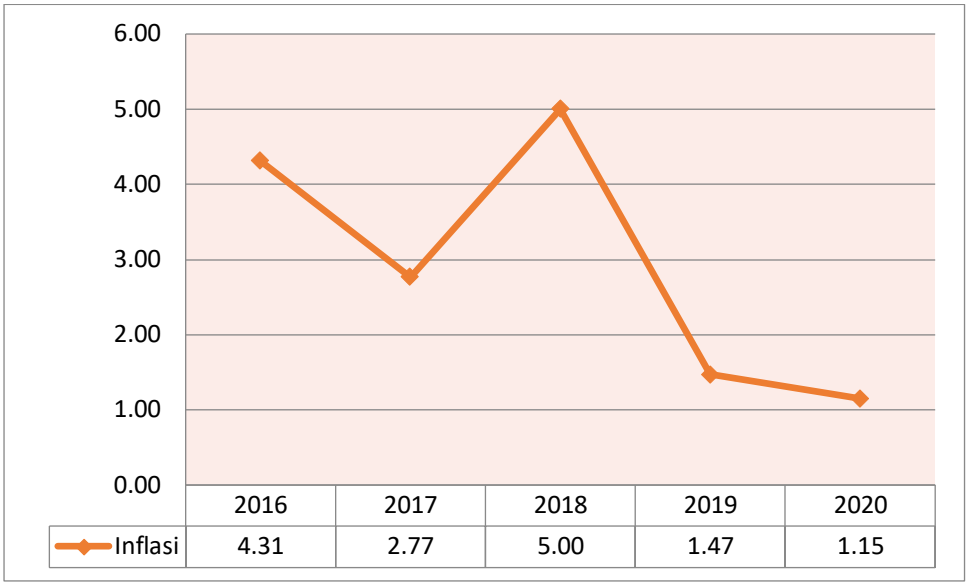

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Tarakan, 2021

Inflasi Tarakan selama Tahun 2019 mencapai 1,47 persen. Tingginya nilai inflasi di Tahun 2019 ini dipengaruhi oleh kenaikan harga yang ditunjukkan oleh kenaikan indeks harga konsumen pada enam kelompok pengeluaran yaitu kelompok transportasi dan komunikasi sebesar 4,56 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 1,22 persen; kelompok sandang sebesar 0,78 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,38 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,36 persen; dan kelompok bahan makanan sebesar 0,06 persen. Sementara kelompok pengeluaran pendidikan, rekreasi dan olahraga mengalami penurunan indeks harga konsumen sebesar -0,02 persen (BPS, 2020).

Dalam rentang waktu lima tahun terakhir (tahun 2016-2020), Kota Tarakan mencapai inflasi tertinggi di tahun 2018 sebesar 5,00 persen, sedangkan inflasi terendah terjadi di tahun 2020 sebesar

1,15 persen. Inflasi yang sangat tinggi di tahun 2018 ini disebabkan oleh efek domino kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsibsidi dengan andil sebesar 0,26 persen, yang mengakibatkan lonjakan berbagai barang kebutuhan masyarakat. Namun setelahnya, Kota Tarakan mengalami penurunan angka inflasi hingga akhirnya mencapai 1,47 persen pada tahun 2019. Hal ini disebabkan oleh turunnya daya beli masyarakat akibat *multipplier effect* Pandemi Covid-19.

3. Indeks Gini

Indeks Gini atau koefisien gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Secara umum, indeks gini Kota Tarakan berfluktuatif. Indeks gini Kota Tarakan pada tahun 2019 adalah 0,271 menurun dari tahun sebelumnya. Perubahan angka gini rasio mengindikasikan adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk yang digunakan untuk melihat apakah pemerataan pengeluaran penduduk semakin baik atau semakin buruk. Pada periode 2016-2020, distribusi pengeluaran penduduk di Kota Tarakan dapat dikatakan mengalami peningkatan kualitas, artinya bahwa distribusi pengeluaran penduduk Kota Tarakan pada tahun 2017 dan 2018 lebih merata daripada tahun-tahun sebelumnya. Secara umum, selama periode 2016-2020 ketimpangan distribusi pendapatan rumah tangga di Kota Tarakan berada pada tingkat ketimpangan rendah karena nilai indeks gini rasionya berada di bawah angka 0,3.

Gambar 2.13
Indeks Gini/Gini Rasio Kota Tarakan Tahun 2016-2020

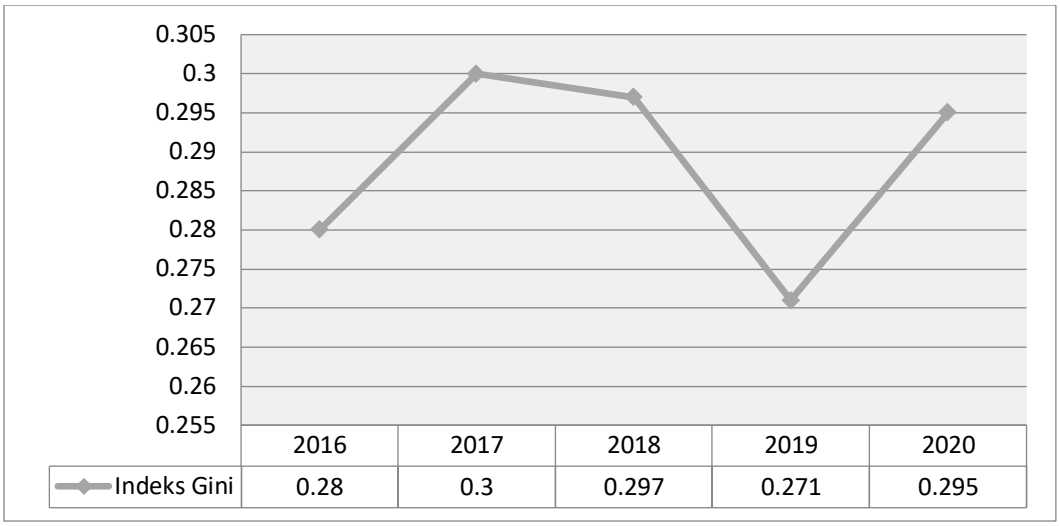

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tarakan, 2021

4. Persentase Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan

Indikator persentase penduduk di bawah garis kemiskinan merupakan langkah lanjutan dari analisis kesejahteraan penduduk dari segi pendapatan. Melalui indikator pemerataan pendapatan, diketahui bahwa terdapat penduduk dengan pendapatan terendah dan sebagian dari penduduk tersebut tergolong ke dalam kategori miskin karena pendapatan mereka berada dibawah garis kemiskinan. Menurut BPS, penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan dapat diategorikan menjadi dua, yaitu garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non-makanan (GKNM). Terdapat perbedaan dalam penentuan garis kemiskinan perkotaan dan perdesaan. GKM ditetapkan sebesar 2.100 kkalori per kapita per hari, sedangkan GKNM yaitu untuk sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Tabel 2.20
Data Kemiskinan Kota Tarakan Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Penduduk Miskin Kota Tarakan	%	5,17	6,32	6,15	6,00	6,24
Jumlah Penduduk Miskin Kota Tarakan	Jiwa	12.520	15.840	15.970	16.110	17.330
Garis Kemiskinan Kota Tarakan	Rp	519.774	572.213	613.593	654.308	696.585
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Satuan	0,67	1,45	0,99	0,7	0,77
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Satuan	0,14	0,5	0,29	0,16	0,15

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tarakan, 2020

Gambar 2.14
Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Tarakan
Tahun 2016-2020

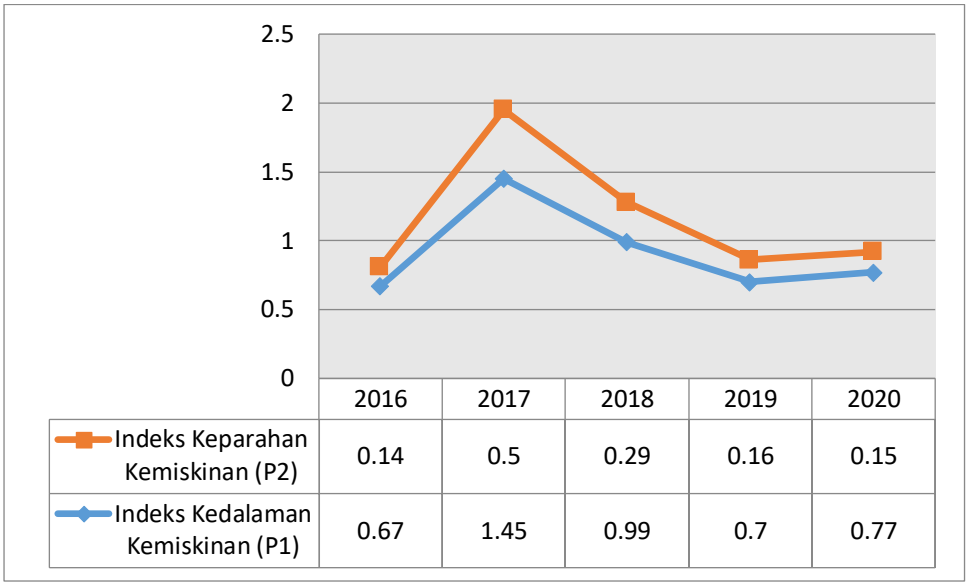

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tarakan, 2021

Garis kemiskinan Kota Tarakan semakin meningkat per tahunnya. Pada tahun 2016, garis kemiskinan Kota Tarakan setara Rp.519.774/kapita/bulan, sedangkan pada tahun 2020 meningkat sebesar Rp.696.585/kapita/bulan.

Pada periode tahun 2018-2019, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Tarakan turun dari 0,99 pada tahun 2018 menjadi 0,70 pada tahun 2019. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kota Tarakan cenderung mendekati garis kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga mengalami penurunan pada periode yang sama, yaitu dari 0,29 menjadi 0,16. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin di Kota Tarakan pada tahun 2019 semakin menyempit dibandingkan tahun 2018.

5. Indeks Pembangunan Manusia

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR).

IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar:

1. Umur panjang dan hidup sehat
2. Pengetahuan
3. Standar hidup layak

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) dan IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Tabel 2.21
Indeks Pembangunan Manusia Kota Tarakan Tahun 2016-2020

Kabupaten/Kota dan Provinsi	Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota				
	2016	2017	2018	2019	2020
Tarakan	74.88	75.27	75.69	76.09	75.83
Kalimantan Utara	69.2	69.84	70.56	71.15	70.63

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Dari tabel di atas, diketahui tingkat IPM Kota Tarakan sejak tahun 2016-2019 IPM di Kota Tarakan mengalami peningkatan rata-rata 1 persen tiap tahunnya. Namun mengalami pertumbuhan negatif sebesar 0,34 persen pada tahun 2020. Pertumbuhan ini akibat dari melemahnya kondisi ekonomi masyarakat akibat pandemi covid-19. Namun demikian, IPM Kota Tarakan masih lebih tinggi dari pada IPM Provinsi Kalimantan Utara.

b. Fokus Kesejahteraan Sosial

Fokus kesejahteraan sosial bertujuan untuk memberikan gambaran umum dan hasil analisis bidang pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Fokus ini akan melihat sejauh mana kesejahteraan masyarakat Kota Tarakan sejauh ini.

1. Angka Melek Huruf Penduduk Usia di atas 15 Tahun, Perempuan Dan Laki-Laki

Angka melek huruf (AMH) merupakan proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya (seperti huruf jawa, kanji, dll) terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. AMH digunakan untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah, karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu

pengetahuan. AMH merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan. Angka melek huruf berkisar antara 0-100. Tingkat melek huruf yang tinggi menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajaran.

Gambar 2.15
Angka Melek Huruf Penduduk Usia diatas 15 Tahun, Perempuan Dan Laki-Laki Kota Tarakan Tahun 2016-2020

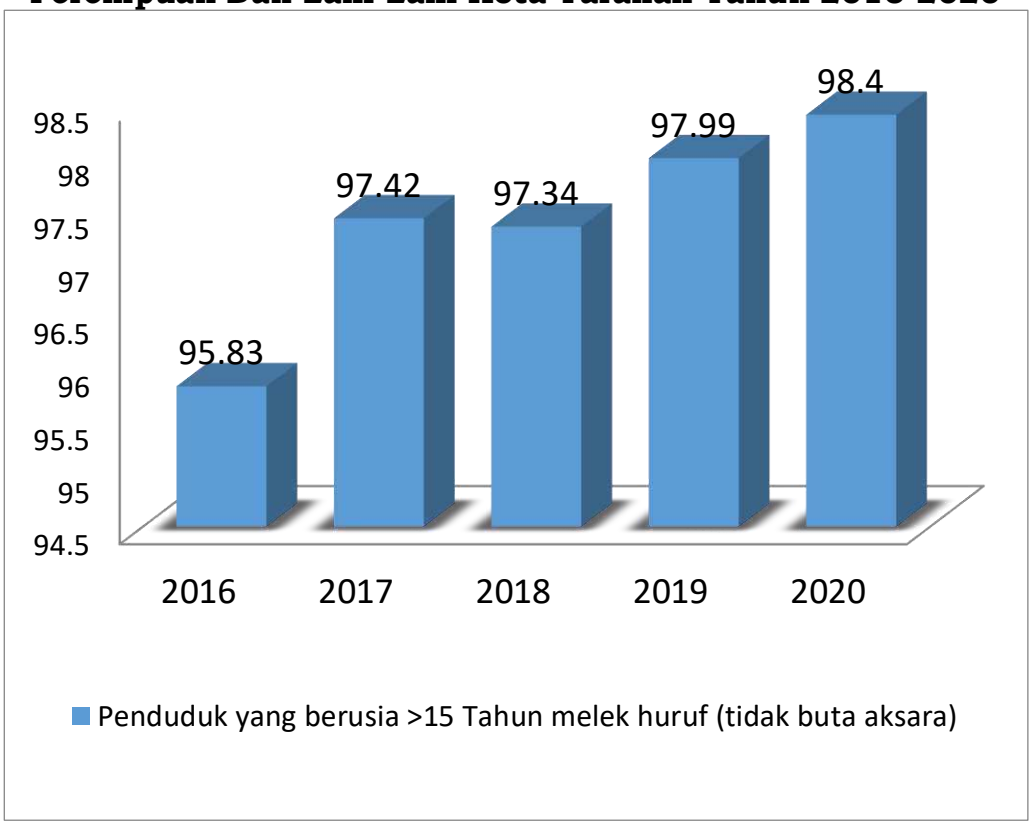

Sumber : Tarakan Dalam Angka, 2021

Dari gambar di atas, diketahui bahwa AMH penduduk usia diatas 15 tahun, perempuan dan laki-laki Kota Tarakan tahun 2016-2020 berkategori tinggi, karena berada di atas 95%.

2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka Rata-rata lama sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal. Angka RLS merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang telah ditamatkan. Angka ini mengindikasikan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk suatu wilayah dalam mengenyam pendidikan sekolah formal. Adapun cakupan penduduk yang dihitung dalam RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun, proses pendidikan sudah berakhir. Penghitungan ini mengikuti standar internasional yang digunakan oleh UNDP.

Gambar 2.16
Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kota Tarakan
Tahun 2016-2020

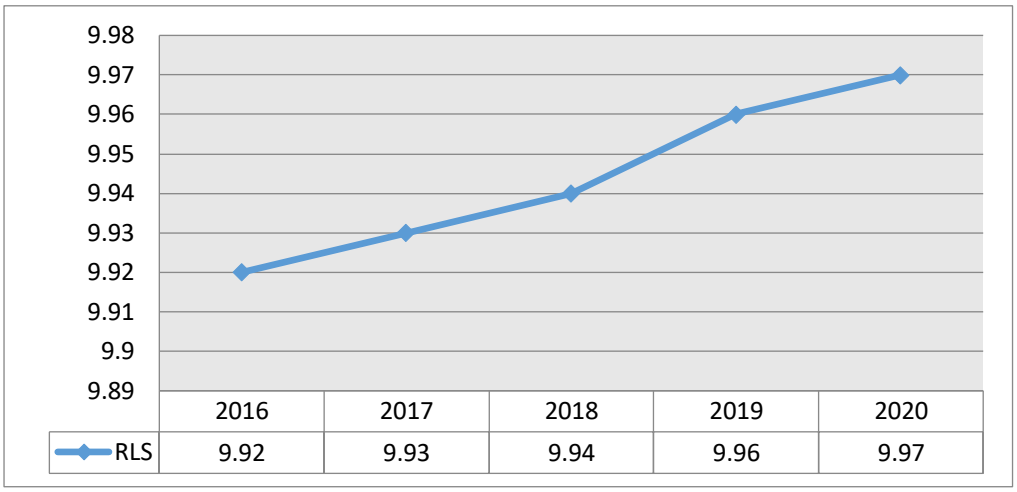

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tarakan, 2021

Dari gambar di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu 2016-2020, angka rata-rata lama sekolah di Kota Tarakan mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2020, angka rata-rata lama sekolah Kota Tarakan sebesar 9,97 dan merupakan

angka tertinggi dalam kurun waktu 2016-2020. Sedangkan angka terendah sebesar 9,92 pada tahun 2016.

Selain itu, rata-rata lama sekolah juga mengalami peningkatan menjadi 9,97 tahun di tahun 2020 atau lebih lama 0,01 tahun dari tahun sebelumnya yang sebesar 9,96 di tahun 2019. Angka tersebut menunjukkan bahwa penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 9,97 tahun atau setara hingga kelas X.

3. Angka Usia Harapan Hidup

Angka Usia Harapan Hidup (AHH) merupakan indikator penyusun Indeks Pembangunan Manusia dalam bidang kesehatan dimana angka tersebut mengindikasikan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Angka harapan hidup Kota Tarakan semakin lama semakin meningkat yang mengindikasikan keberhasilan program dan kegiatan di bidang kesehatan.

Angka usia harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Adapun angka harapan hidup di kota Tarakan dapat di tunjukkan pada Gambar.

Gambar 2.17
Angka Harapan Hidup Kota Tarakan Tahun 2016-2020

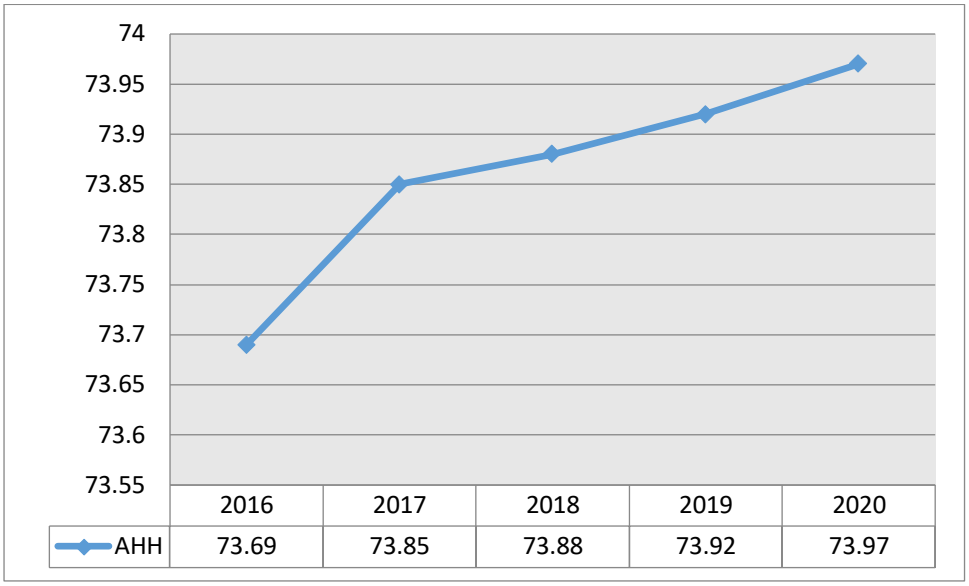

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tarakan, 2021

Angka usia harapan hidup di Kota Tarakan dari 2016-2020 mengalami kecenderungan meningkat dengan usia harapan hidup sebesar 73,69 tahun di tahun 2016 hingga menjadi 73,97 di tahun 2020. Angka usia harapan hidup di Kota Tarakan lebih tinggi bila dibandingkan angka nasional. Namun demikian tidak mencapai target RPJMD sebesar 74,18. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor yaitu:

1. Tingkat kesehatan masyarakat menurun sebagai efek domina dari pendapatan masyarakat yang menurun. Sedangkan Jumlah penduduk dan miskin yang bertambah akibat pandemi covid 19;
2. Angka kematian yang meningkat.

Beberapa hal yang dilakukan pemerintah Kota Tarakan antara lain:

1. Memfokuskan anggaran untuk penanggulangan covid 19;
2. Melakukan *refocussing* dan *reallocating;*
3. Mengoptimalkan peran RSUKT dan dinas kesehatan Kota

Tarakan.

Angka usia harapan hidup tersebut dipengaruhi oleh kualitas kesehatan yang cenderung semakin baik ditunjang dengan kemudahan dan kesadaran penduduk dalam mengakses fasilitas kesehatan yang baik.

4. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka harapan lama sekolah merupakan salah satu indikator yang memperlihatkan kualitas pendidikan suatu wilayah. Indikator Harapan Lama Sekolah merupakan indikator yang menggantikan indikator sebelumnya yaitu Angka Melek Huruf yang sudah tidak digunakan lagi karena sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Harapan Lama Sekolah (HLS) dapat didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang Nilai HLS yang semakin tinggi, dapat menggambarkan bahwa rata-rata lamanya sekolah seseorang diharapkan akan semakin besar (semakin tinggi pendidikan yang ditempuh). HLS ini dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. HLS kota Tarakan dalam kurun waktu 2016-2019 mengalami peningkatan. Dari angka 13,42 pada tahun 2016 meningkat menjadi 13,73 pada tahun 2019.

Perbaikan kualitas pendidikan tercermin dari angka harapan lama sekolah yang mengalami sedikit peningkatan menjadi 13,73 tahun, dari tahun sebelumnya sebesar 13,70 tahun. Ini berarti, anak-anak yang berusia tujuh tahun pada tahun 2019, memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 13,73 tahun atau minimal jenjang Diploma II. Pada tahun 2020 meningkat 2 persen sebesar 14,02. Menunjukkan bahwa Kota Tarakan memiliki

harapan dapat menikmati pendidikan selama 14,02 tahun atau setara dengan dengan jenjang Diploma II.

Gambar 2.18
Angka Harapan Lama Sekolah Kota Tarakan 2016-2020

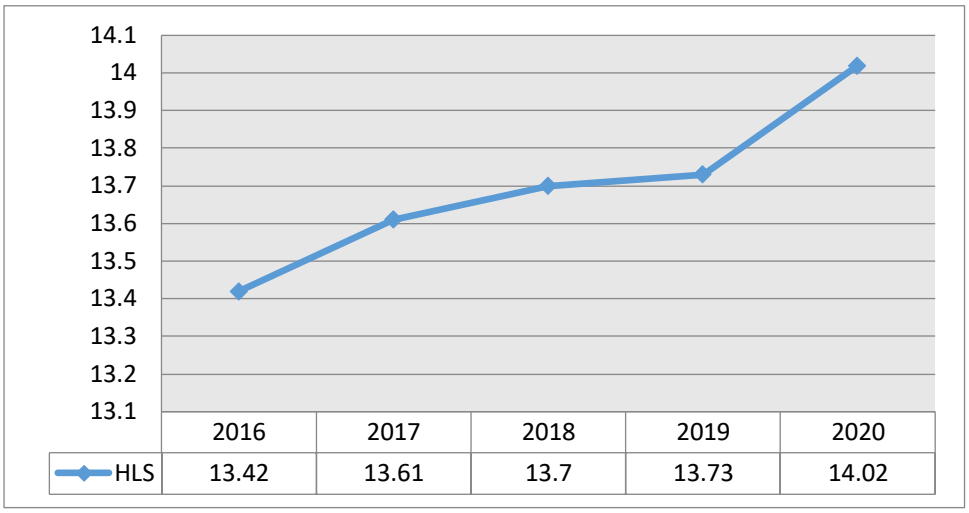

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tarakan, 2021

5. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Jumlah Balita Gizi Baik Peranan ibu sangat penting dalam mendukung upaya mengatasi masalah gizi, terutama pada asupan gizi keluarga, mulai dari penyiapan makanan, pemilihan bahan makanan, sampai menu makanan. Ibu yang memiliki status gizi baik akan melahirkan anak yang bergizi baik. Anak yang bergizi baik menjadi aset dan investasi bangsa masa depan.

Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan merupakan perbandingan antara jumlah balita gizi buruk (berdasarkan kriteria berat badan per umur) yang mendapat perawatan dibagi jumlah seluruh balita gizi buruk (berdasarkan kriteria berat badan per umur) yang ditemukan. Semakin besar persentase cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan menunjukkan semakin baik pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat, baik prasarana maupun saran kesehatan.

Perkembangan cakupan balita gizi buruk di Kota Tarakan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.22
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan
Di Kota Tarakan Tahun 2016 – 2020

INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan disarana pelayanan kesehatan	Anak	24	27	78	16	21
Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan	Anak	24	27	78	16	21
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Persen	100	100	100	100	100

Sumber: Profil Dinas Kesehatan, 2021

Berdasarkan tabel di atas, kasus balita gizi buruk yang ditemukan di Kota Tarakan dalam kurun waktu 2016 – 2020 seluruhnya telah mendapatkan perawatan (100 persen). Jika dibandingkan dengan Standar Pelayanan Minimal sebesar 100 persen, maka cakupan balita gizi buruk di Kota Tarakan sudah mampu mencapainya. Pada tahun 2020, jumlah balita gizi buruk yang ditemukan sebesar 21 anak, yang seluruhnya mendapatkan perawatan. Beberapa upaya untuk meningkatkan status gizi dan kesehatan masyarakat telah dilakukan antara lain melalui Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Reproduksi, Perbaikan Gizi Masyarakat dan PMT (Pemberian Makanan Tambahan), Pemulihan Ibu Hamil KEK (Kekurangan Energi Kronis) dan PMT Balita Gizi Buruk dan Kurang, serta Peningkatan Pembinaan terhadap Posyandu.

6. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TAPK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja merupakan tingkat persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Gambar 2.19
TAPK Kota Tarakan Tahun 2017-2020

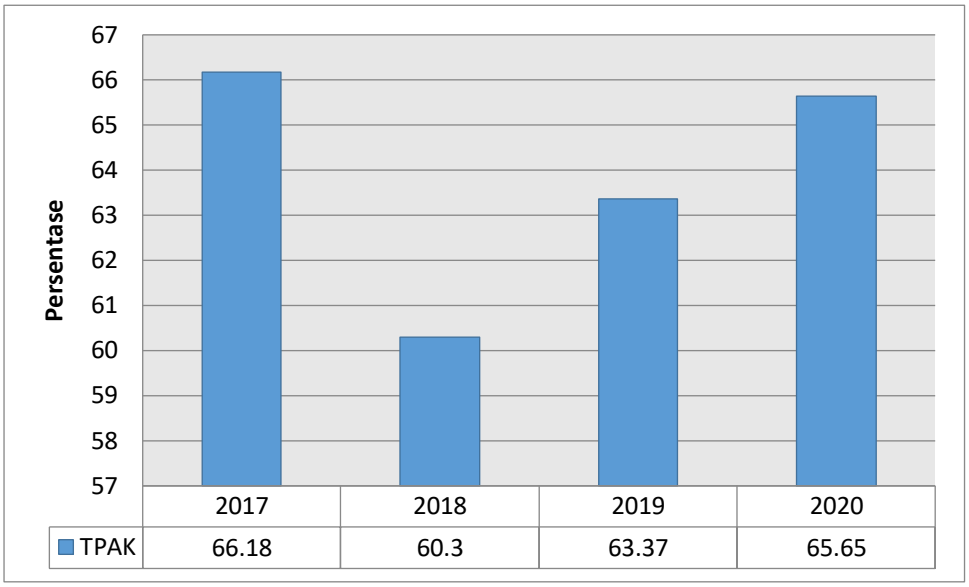

Sumber : Kota Tarakan Dalam Angka, 2021

Dari gambar di atas, diketahui tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Tarakan berfluktuatif. Dua kali mengalami penurunan di tahun 2018, hal ini diakibatkan oleh turunnya jumlah angkatan kerja atau menurunnya keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi. Pada tahun 2016, data terkait TPAK tidak tersedia. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 2,28 persen dari tahun sebelumnya yaitu 65,65 persen. Meningkatnya keterlibatan

penduduk dalam kegiatan ekonomi mengindikasikan menurunnya tingkat pengangguran.

7. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja.

Gambar 2.20
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Tarakan
Tahun 2016-2020

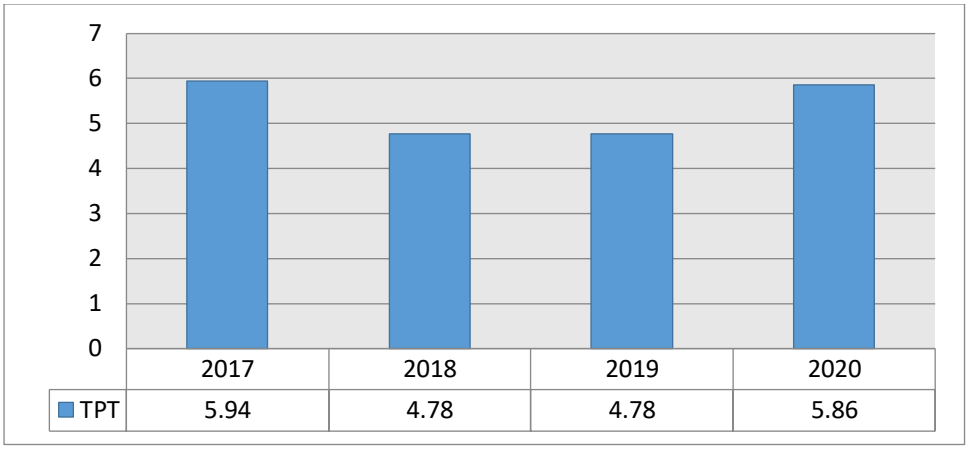

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tarakan, 2021

Dari gambar di atas, diketahui tingkat pengangguran terbuka di Kota Tarakan bertahan di angka 4,78 di tahun 2018 dan 2019. Namun mengalami peningkatan di tahun 2020 sebesar 5,86. Meningkatnya tingkat pengangguran terbuka seiring dengan menurunnya tingkat partisipasi angkatan kerja maupun tingkat kesempatan kerja. Jumlah pengganguran bertambah lebih disebabkan banyaknya karyawan yang dirumahkan khususnya

pada usaha rumah makan, perhotelan, dan transportasi laut dan darat yang diakibatkan oleh pandemi covid 19.

8. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)

Tingkat Kesempatan Kerja merupakan peluang seorang penduduk usia kerja yang termasuk angkatan kerja untuk bekerja. TKK menggambarkan kesempatan seseorang untuk terserap pada pasar kerja. Peluang seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja untuk bisa terserap dalam pasar kerja atau dapat bekerja. Semakin besar angka TKK, semakin baik pula kondisi ketenagakerjaan dalam suatu wilayah.

Gambar 2.21
Tingkat Kesempatan Kerja Kota Tarakan Tahun 2016-2020

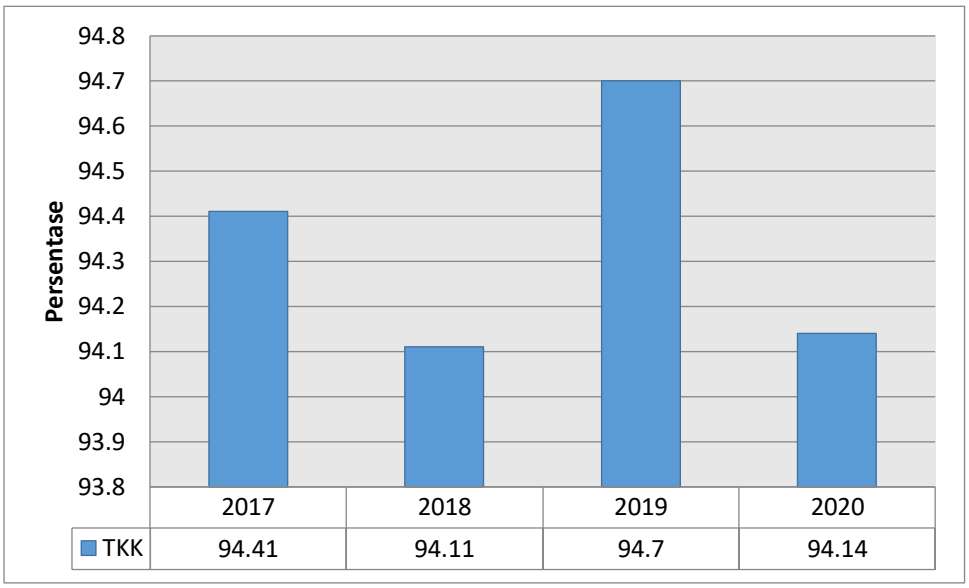

Sumber : Kota Tarakan Dalam Angka, 2021

Dari gambar di atas, diketahui tingkat kesempatan kerja di Kota Tarakan pada tahun 2020 adalah sebesar 94,14 menurun dari tahun sebelumnya yaitu 94,7 pada tahun 2019. Pada tahun 2016 data terkait tingkat kesempatan kerja Kota Tarakan tidak tersedia.

9. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah presentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang Pendidikan dan jumlah penduduk diusia yang sama. APM merupakan indikator yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar dijenjang Pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

Gambar 2.22
APM Kota Tarakan Tahun 2016-2020

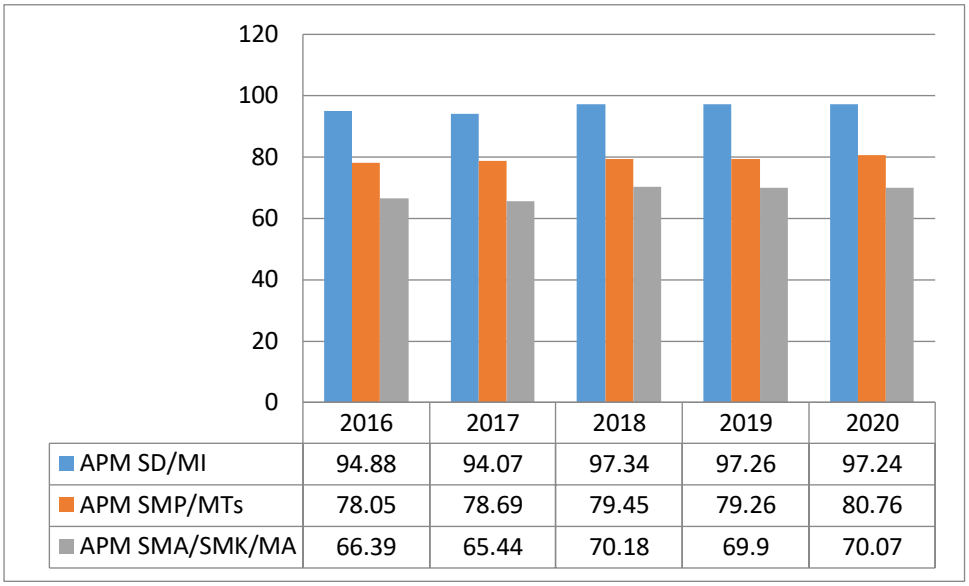

	2016	2017	2018	2019	2020
APM SD/MI	94.88	94.07	97.34	97.26	97.24
APM SMP/MTs	78.05	78.69	79.45	79.26	80.76
APM SMA/SMK/MA	66.39	65.44	70.18	69.9	70.07

Sumber: Kota Tarakan Dalam Angka, 2021

Nilai APM pada seluruh jenjang Pendidikan berfluktuatif. APM SD pada tahun 2016 adalah 94,88%, selanjutnya menurun di tahun 2017 sebesar 94,07%, dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 97,34%. Dan kembali menurun pada tahun 2019 sebesar 97,26% Sedangkan APM SMP, menurun pada tahun 2016 sebesar 78,05%, selanjutnya meningkat lagi di tahun 2017 sebesar 78,69%, dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 79,45%, dan mengalami peningkatan menjadi 80,76% di tahun 2020. Pada tahun 2020, hanya APM SD/MI saja yang mengalami penurunan menjadi sebesar 97,24%.

10. Persentase PAD terhadap Pendapatan

Pendapatan daerah adalah hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan. Pendapatan asli daerah adalah bagian dari pendapatan daerah yang berumber dari potensi daerah itu sendiri yang dipungut sesuai dengan peraturan daerah bersangkutan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gambar 2.23
Persentase PAD terhadap Pendapatan Kota Tarakan Tahun 2016-2020

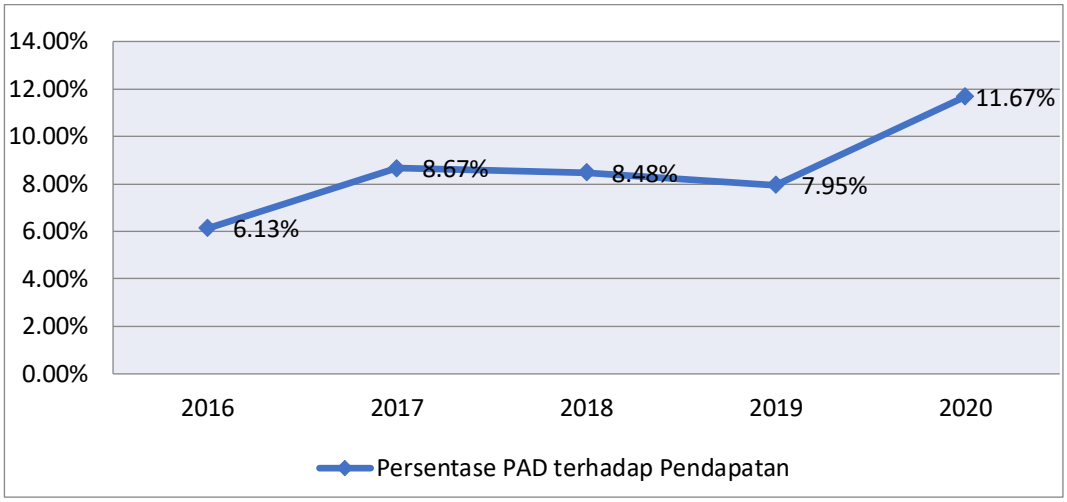

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tarakan, 2021

Berdasarkan gambar di atas, persentase PAD terhadap pendapatan secara umum berfluktuatif. Dalam kurun waktu 2016-2020, persentase PAD tertinggi pada tahun 2020 sebesar 11,67% dan terendah pada tahun 2016 sebesar 6,13%. Jika dilihat dari total pendapatan yang ada kontribusi PAD Kota Tarakan hanya menyumbang sedikit saja artinya sumber pembiayaan pembangunan masih sangat tergantung dengan dana-dana dari pusat seperti dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil pajak/non pajak dan dana transfer. Rata-rata kontribusi PAD selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2016 sampai 2020 sebesar 9,37%.

11. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni :1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah (SAP), 2) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), 3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan 4) Efektivitas sistem pengendalian intern (SPI).

Opini WTP diberikan dengan kriteria sistem pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan. Secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) yang telah diberlakukan Pemerintah sesuai dengan PP nomor 71 tahun 2010. Sedangkan opini WDP diberikan dengan kriteria sistem pengendalian internal memadai, namun terdapat salah saji yang material pada beberapa pos laporan keuangan. Laporan keuangan dengan opini WDP dapat diandalkan, tetapi pemilik kepentingan harus memperhatikan beberapa permasalahan yang diungkapkan auditor atas pos yang dikecualikan tersebut agar tidak mengalami kekeliruan dalam pengambilan keputusan.

Tabel 2.23
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kota Tarakan

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Opini BPK terhadap laporan keuangan	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2020

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkot Tarakan

pada tahun 2016-2018 Kota Tarakan mendapatkan penilai WDP. Pada tahun 2020 mampu mempertahankan peniaian WTP dari tahun 2019.

c. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Fokus seni budaya dan olahraga bertujuan untuk melihat aspek kesejahteraan masyarakat dari segi seni budaya dan olahraga. Fokus seni budaya dan olahraga memberikan gambaran dan analisis di bidang kebudayaan serta pemuda dan olahraga.

1. Jumlah Gedung Olahraga

Jumlah gedung olahraga di kota Tarakan tahun 2016-2020 tidak mengalami peningkatan, yaitu berjumlah 12 gedung olahraga, yang terdiri dari 4 gedung milik pemerintah dan 8 gedung milik swasta.

Gambar 2.24
Jumlah Gedung Olahraga Tahun 2016-2020

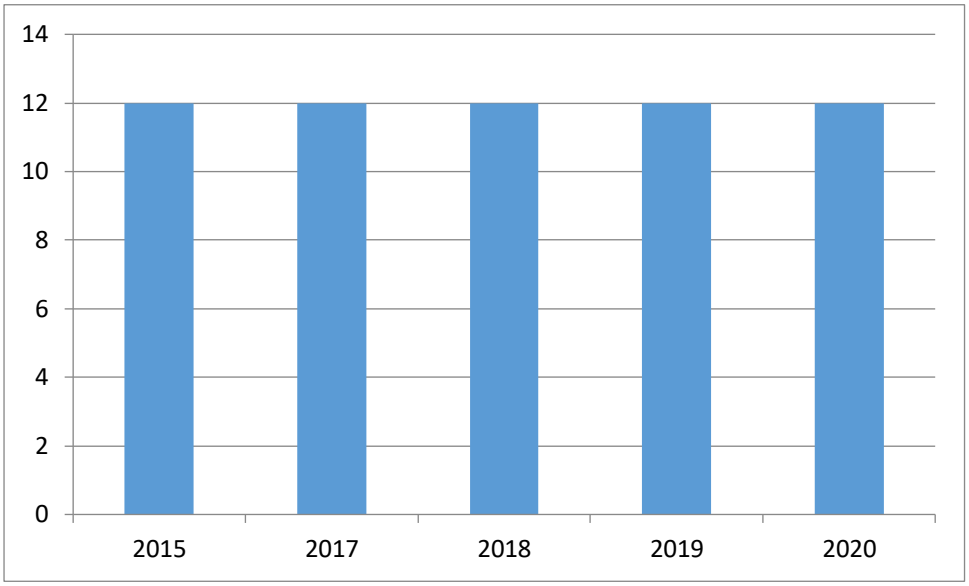

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga, 2020

Gedung olahraga milik pemerintah, diantaranya : Stadion Datu Adil yang berkapasitas 15.000 orang, gedung Tennis Indoor

Telaga Keramat yang berkapasitas 2.000 orang, gedung Tennis Outdoor di Kawasan Sport Centre yang berkapasitas 3.500 orang dan gedung Olahraga Wisma Patra yang berkapasitas 300 orang.

2. Jumlah Gedung Kesenian

Pembangunan bidang seni sangat erat kaitannya dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat di suatu daerah. Salah satunya ditunjukkan dengan adanya gedung kesenian dalam rangka mendukung berkembangnya kesenian suatu daerah. Untuk gedung kesenian di kota Tarakan yang khusus diperuntukan untuk atraksi kesenian, Kota Tarakan belum memiliki gedung kesenian yang khusus untuk pertunjukan seni, sedangkan gedung yang sering digunakan untuk pegelaran kesenian adalah gedung wisma patra dan gedung gita jalatama.

A.1.4.2 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan dan unggulan daerah. Suatu daya saing merupakan salah satu factor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

a. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita

Pengeluaran rata-rata perkapita merupakan biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga

dalam rumah tangga tersebut. Dalam kurun waktu 2016-2020, pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita di Kota Tarakan mengalami fluktuasi tiap tahunnya. Pada tahun 2020, pengeluaran konsumsi per kapita sebulan sebesar Rp.1.713.021,- naik 6,4 persen dari tahun sebelumnya.

Gambar 2.25
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Sebulan di Kota Tarakan Tahun 2016-2020 (Rp)

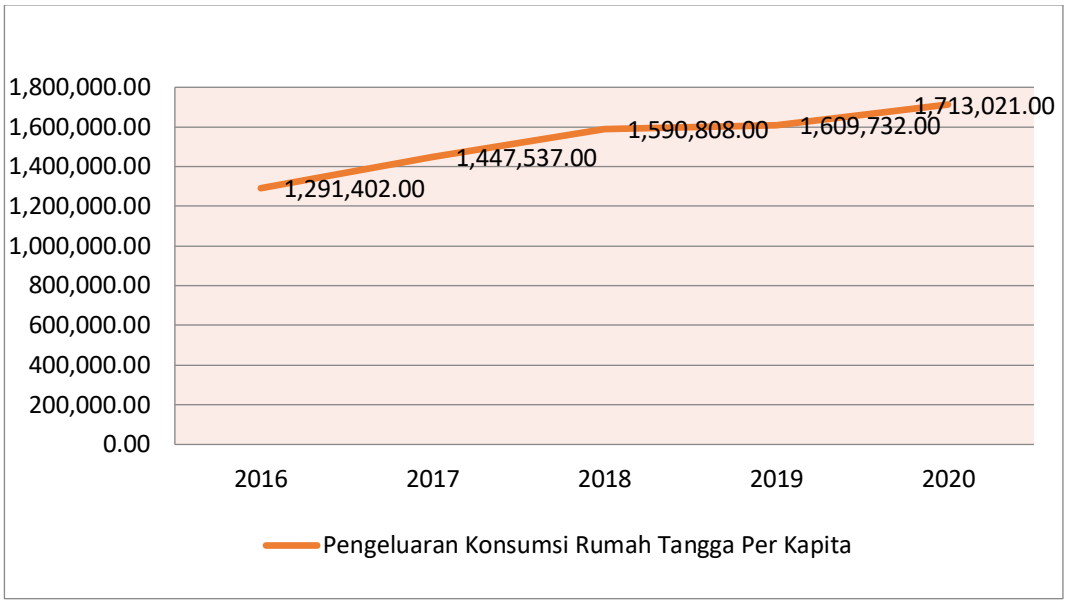

Sumber: BPS Kota Tarakan, 2021

2. Persentase pengeluaran konsumsi bukan makanan perkapita

Pengeluaran konsumsi penduduk Kota Tarakan dibedakan menjadi dua yaitu pengeluaran konsumsi untuk makanan dan bukan makanan. Pada tahun 2020, prosentase pengeluaran konsumsi bukan makanan per kapita adalah 55,68 persen, meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 53,72 persen. Pengeluaran konsumsi bukan makanan per kapita pada tahun 2020 merupakan

yang tertinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, total pengeluaran konsumsi per kapita sebesar Rp. 1.713.021,- dengan pengeluaran konsumsi untuk makanan sebesar Rp. 759.187,- dan non pangan sebesar Rp.953.835,-.

Tabel 2.24
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Sebulan di Kota Tarakan Tahun 2016-2020

Tahun	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Sebulan				Total
	Makanan (Rp)	%	Bukan Makanan (Rp)	%	
2016	591.315	45,79	700.087	54,21	1.291.402
2017	710.079	49,05	737.458	50,95	1.447.537
2018	715.001	44,95	875.807	55,05	1.590.808
2019	744.926	46,28	864.806	53,72	1.609.732
2020	759.187	44,32	953.835	55,68	1.713.021

Sumber: Statistik Kesejahteraan Kota Tarakan, 2021

Dirinci menurut kelompok bukan makanan, rata-rata pengeluaran per kapita sebulan yang terbesar di Kota Tarakan Tahun 2020 adalah untuk Keperluan Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga (Rp. 467.838,-) sebesar 49,05 persen; terbesar kedua adalah Aneka Barang dan Jasa (Rp. 231.452,-) sebesar 24,27 persen meningkat dari tahun 2019 hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat akan aneka kebutuhan sehari-hari, jasa pelayanan kesehatan, pendidikan dan jasa transportasi semakin meningkat seiring dengan kesadaran masyarakat akan kesehatan dan pendidikan; terbesar ketiga adalah Barang yang tahan lama (Rp. 128.530,-) sebesar 13,48 persen; dan yang paling kecil adalah untuk keperluan pesta dan kenduri (Rp. 21.515,-) sebesar 2,26 persen, karena adanya aturan pembatasan jumlah massa yang berkumpul dalam suatu acara pesta dan kenduri sebagai dampak

dari pandemi covid-19.

Tabel 2.25
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Bukan Makanan Tahun 2020

Kelompok Bukan Makanan	Pengeluaran (Rp)	%
Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga	467.838	49,05
Aneka barang dan jasa	231.452	24,27
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	42.585	4,46
Barang yang tahan lama	128.530	13,48
Pajak , Pungutan dan Asuransi	61.915	6,49
Keperluan pesta dan upacara/kenduri	21.515	2,26

Sumber : Statistik Kesejahteraan Kota Tarakan 2021

Sedangkan dirinci menurut kelompok makanan, 13,74 persen dari pengeluaran rata-rata per kapita sebulan di Kota Tarakan Tahun 2020 yang terbesar adalah pengeluaran rata-rata untuk ikan/udang/cumi/kerang (Rp.104.287,-); terbesar kedua adalah rokok dan tembakau 9,55 persen (Rp. 72.492,-); terbesar ketiga adalah padi-padian 9,20 persen (Rp. 69.821,-).

Tabel 2.26
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Makanan di Kota Tarakan Tahun 2020

Kelompok Makanan	Pengeluaran (Rp)	%
Padi-padian	69.821	9,20
Umbi-umbian	6.770	0,89
Ikan/udang/cumi/kerang	104.287	13,74
Daging	33.845	4,46
Telur dan Susu	46.250	6,09
Sayur-sayuran	45.080	5,32
Kacang-kacangan	11.306	5,94
Buah-buahan	31.688	4,18

Kelompok Makanan	Pengeluaran (Rp)	%
Minyak dan Kelapa	12.581	1,66
Bahan Minuman	16.718	2,20
Bumbu-bumbuan	13.287	1,75
Konsumsi Lainnya	10.610	7,12
Makanan dan Minuman Jadi	284.452	1,40
Rokok dan Tembakau	72.492	9,55

Sumber : Statistik Kesejahteraan Kota Tarakan 2021

3. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15 - 64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif.

Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase

dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Secara umum, rasio ketergantungan di Kota Tarakan relatif menurun, walaupun pernah mengalami peningkatan pada tahun 2016. Rasio ketergantungan di Kota Tarakan berkisar antara 46,28 – 47,81. Pada tahun 2020, rasio ketergantungan di Kota Tarakan sebesar 46,28 dan merupakan angka terendah dalam kurun waktu 2016-2020. Hal ini menunjukkan beban yang ditanggung usia produktif semakin menurun.

Gambar 2.26
Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)
di Kota Tarakan Tahun 2016-2020

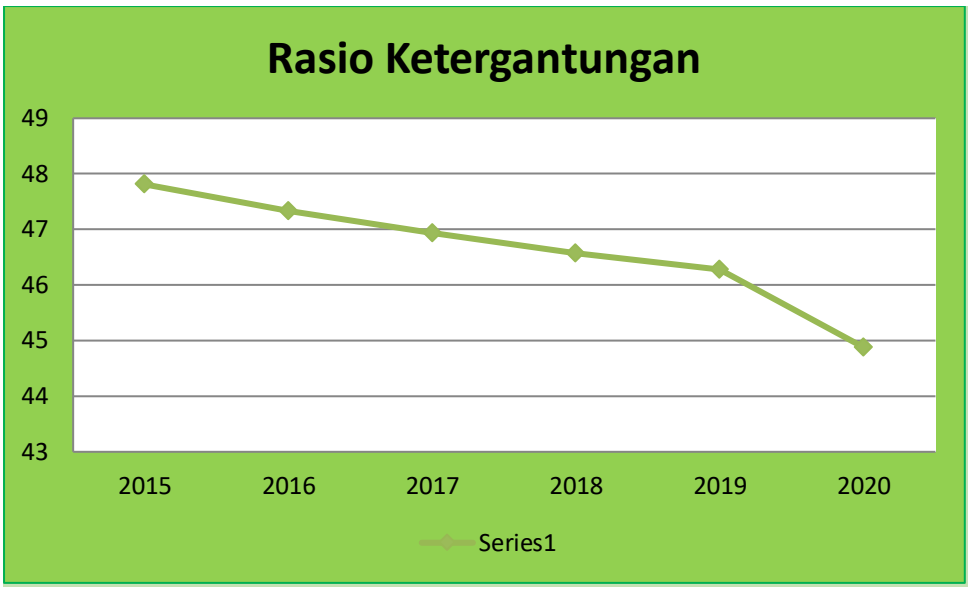

Sumber : Kota Tarakan Dalam Angka, 2020

b. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

1. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan merupakan perbandingan antara panjang jalan secara keseluruhan dengan

jumlah kendaraan yang terdapat di suatu daerah. Secara umum, kondisi rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kota Tarakan jika dilihat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal tersebut dikarenakan pembangunan ruas jalan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mengimbangi jumlah kendaraan yang masuk.

Gambar 2.27
Rasio Panjang jalan per jumlah kendaraan Kota Tarakan Tahun 2016-2020

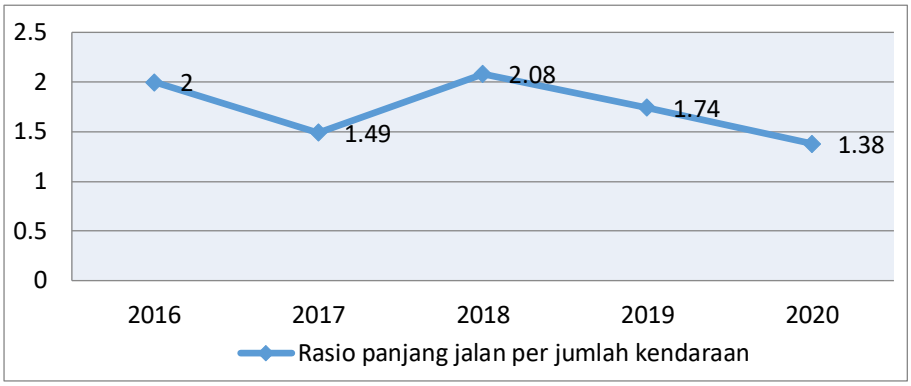

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021 diolah

Dari gambar di atas diketahui bahwa dalam kurun waktu 2016-2020, Rasio tertinggi pada tahun 2018 sebesar 2,08 dan Rasio terendah pada tahun 2020 sebesar 1,38. Pada tahun 2019 Panjang jalan dalam kondisi mantap 152,73 Km dari total panjang jalan 281,991 Km atau 54,16%. Namun ada perubahan pada tahun 2020, dikarenakan perubahan status jalan menjadi jalan provinsi, maka panjang jalan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Tarakan berkurang menjadi 232.558 Km dengan jalan dalam kondisi mantap 162.981 Km atau 70,08%.

2. Jumlah Orang/Barang Melalui Bandara dan Dermaga

Prasarana (infrastruktur) transportasi merupakan komponen berbentuk fasilitas fisik yang bersifat tetap dan bersifat mengantarkan perpindahan dari asal ke tujuan, seperti bandar udara dan pelabuhan. Di

Kota Tarakan terdapat 1 bandar udara yaitu Bandar Udara Internasional Juwata. Arus lalu lintas pesawat di bandar udara Juwata Tarakan pada tahun 2016 adalah 1.105.985 penumpang dan 2017 arus penumpang sebanyak 1.044.761 penumpang dan pada tahun 2018 arus penumpang sebanyak 606.823 (data s/d Juli 2018). Selain arus penumpang, arus bagasi di Bandara Internasional Juwata dalam kurun waktu 2016-2019 berfluktuatif dengan jumlah barang tertinggi pada tahun 2017 yaitu 8.181.604 kg barang yang dibongkar dan 7.654.288 kg barang dimuat.

Pelabuhan laut juga menjadi jalur transportasi di Kota Tarakan, karena menjadi pintu masuk dari beberapa provinsi dan kabupaten/kota lainnya. Jumlah arus penumpang mengalami kenaikan pada tahun 2016 dan 2017 hal ini disebabkan oleh banyaknya arus penumpang dari dan ke ibu kota provinsi Tanjung selor. Dengan beroperasinya pelabuhan ferry yang berada di juata laut yang melayani pelayaran ke Sulawesi maka penumpang naik pada tahun 2016–2019 dari 4.183 menjadi 18.881 penumpang. Arus penumpang di pelabuhan laut Malundung mengalami penurunan pada tahun 2017, dimana tahun 2015 terdapat 128.383 penumpang dan meningkat 112.704 penumpang pada tahun 2017.

Tabel 2.27
Perkembangan Arus Lalu Lintas Penumpang di Bandara dan Pelabuhan Laut Kota Tarakan Tahun 2016-2020

Tahun	Tengkayu Satu	Pelabuhan Juata Laut	Pelabuhan Malundung	Bandara Juwata
2016	837.585	-	115.636	1.105.985
2017	976.702	13.198	112.704	1.044.761
2018	967.352	20.826	belum ada data	1.030.847
2019	987.315	16.881	belum ada data	842.258
2020	467.749	16.968	Belum ada data	409. 572

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Tarakan, 2020

Tabel 2.28
Perkembangan Arus Bagasi di Bandar Udara Internasional Juwata Tarakan di Kota Tarakan Tahun 2016-2020

Arus Lintas Bagasi	2016	2017	2018	2019	2020
Bongkar	4.727.629	8.181.604	2.819.709	2.825.189	3.342.854
Muat	4.759.880	7.654.288	4.628.984	2.825.189	3.342.854

Sumber: Kota Tarakan Dalam Angka, 2020

3. Ketaatan terhadap RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan rencana pembangunan jangka panjang. RTRW Kota Tarakan ditetapkan pada tahun 2012 sehingga perhitungan ketaatan terhadap RTRW Kota Tarakan telah dapat dilakukan dari tahun 2013. Jika kita lihat hasil perhitungan terkait ketaatan terhadap rencana dalam RTRW Kota maka dalam kurun waktu 2016-2020, ketaatan terhadap RTRW di Kota Tarakan mengalami peningkatan yang signifikan yakni dari 45% pada tahun 2016 hingga mencapai 82,49% ketaatan pada tahun 2020.

Gambar 2.28

Ketaatan Terhadap RTRW Kota Tarakan Tahun 2016-2020

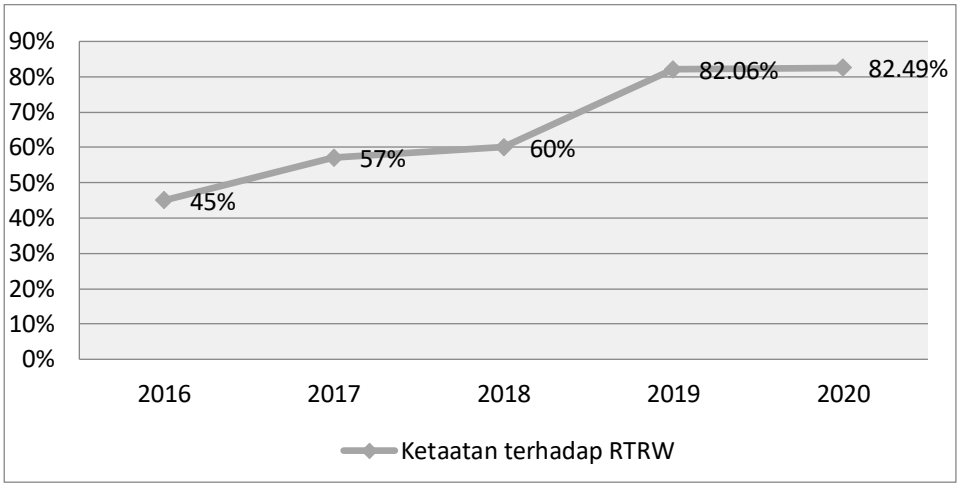

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan, 2021

4. Luas Wilayah Produktif

Luas wilayah produktif dalam hal ini sangat menyesuaikan dengan kondisi rencana penggunaan lahan yang terdapat di dalam RTRW Kota Tarakan. Sehingga setelah pelaksanaan rencana pembangunan dalam RTRW Kota Tarakan maka diperoleh perkembangan luas wilayah produktif.

Gambar 2.29
Luas Wilayah Produktif

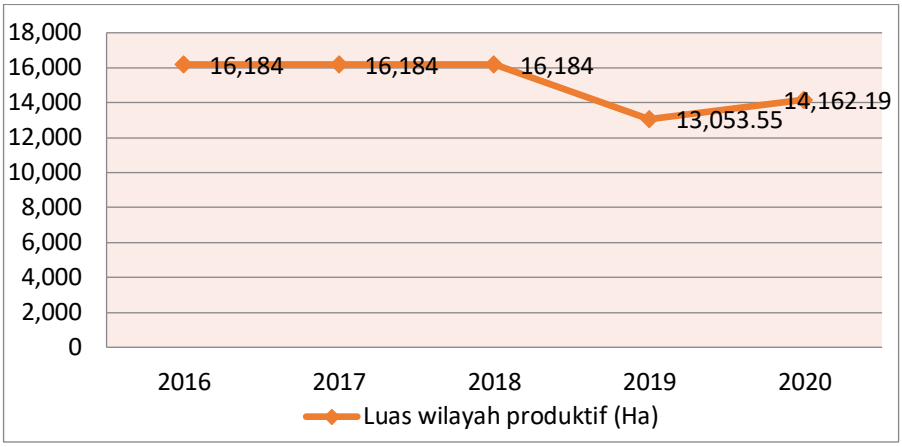

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan, 2021

5. Jenis Dan Jumlah Bank Dan Cabang

Bank adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. Dalam kurun waktu 2016-2020, perkembangan jumlah kantor bank di Kota Tarakan mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 16,63%.

Secara umum, bank dapat dikelompokkan menjadi bank umum pemerintah dan bank umum swasta. Di Kota Tarakan, dalam kurun waktu 2016-2020, jumlah bank umum pemerintah lebih

banyak dibandingkan bank umum swasta dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 16,63%. Bank Mandiri merupakan bank umum pemerintah dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi yaitu 20,83%. Walaupun demikian, BPD Kalimantan Utara merupakan bank umum pemerintah dengan jumlah kantor paling banyak. Tercatat pada tahun 2020, jumlah kantor bank BPD Kalimantan Utara yang ada di Kota Tarakan sejumlah 10 kantor atau 50% dari total kantor bank umum pemerintah yang ada di Kota Tarakan.

Tabel 2.29
Jumlah Kantor Bank Menurut Kelompok Bank di Kota Tarakan Tahun 2016-2020

Kelompok Bank	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
Bank Umum Pemerintah						
BNI 46	2	4	4	4	4	25
BRI	10	9	9	9	-	8,21
Bank Mandiri	3	4	3	3	3	20,83
BPD Kalimantan Timur-Utara	6	6	6	10	10	12,5
Bank Tabungan Negara	1	1	1	1	-	0
Bank Umum Swasta						
Bank Danamon Indonesia	2	2	2	2	0	0
Bank Tabungan Negara	1	1	1	1	0	0
Bank Niaga	1	1	0	0	0	0
Bank Central Asia	1	1	1	1	1	0
Bank MNC	1	1	1	1	1	0
Bank Muamalat	1	1	1	1	0	0
Bank CIMB NIaga	1	1	1	1	0	0
Bank Maybank Indonesia	1	2	1	1	0	0

Kelompok Bank	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
Bank Tabungan Pensiun Nasional	1	1	1	1	0	0
Bank Mandiri Syariah	1	1	1	1	0	0
Total	**32**	**35**	**33**	**37**	**19**	**16,63**

Sumber: Kota Tarakan Dalam Angka, 2020

6. Jenis, Kelas, Dan Jumlah Restoran

Restoran adalah istilah umum untuk menyebut usaha gastronomi yang menyajikan hidangan kepada masyarakat dan menyediakan tempat untuk menikmati hidangan itu serta menetapkan tarif tertentu untuk makanan dan pelayanannya. Umumnya restoran menyajikan makanan di tempat, tetapi ada juga restoran yang menyediakan layanan *takeout dinning* dan *delivery service* untuk melayani konsumennya. Pada tahun 2020, jumlah Restoran/Rumah Makan yang terdapat di Kota Tarakan sebesar 111 buah, menurun -28,85% dari tahun sebelumnya sebesar 156 buah.

7. Jenis, Kelas, Dan Jumlah Penginapan/Hotel

Penginapan atau hotel merupakan salah satu kebutuhan penunjang dalam kegiatan pariwisata di suatu wilayah, termasuk di Kota Tarakan. Usaha penyediaan akomodasi merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya. Usaha penyediaan akomodasi dapat berupa hotel, villa, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan caravan dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata.

Perkembangan fasilitas akomodasi di Kota Tarakan cukup signifikan terutama fasilitas penginapan tinggal. Hal ini dikarenakan Kota Tarakan menjadi wilayah transit utama bagi

seluruh wilayah di Provinsi Kalimantan Utara mengingat keberadaan Bandara Juata Tarakan sebagai bandara internasional. Selama 5 tahun terakhir, jumlah ketersediaan akomodasi bertambah hingga 10 unit.

Secara umum, hotel terdiri dari hotel berbintang dan hotel non bintang (melati dan akomodasi lainnya). Dalam kurun waktu tahun 2016 – 2020, jumlah hotel non bintang jauh lebih banyak dibandingkan hotel berbintang. Pada tahun 2020, jumlah hotel non bintang berjumlah 37 hotel dibandingkan hotel berbintang yang hanya 8 hotel.

Tabel 2.30
Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel

Jenis Akomodasi	2016	2017	2018	2019	2020
Bintang 5	0	0	0	0	0
Bintang 4	1	1	1	1	1
Bintang 3	0	0	1	0	0
Bintang 2	1	1	3	4	4
Bintang 1	3	3	3	3	3
Melati	34	34	30	32	31
Akomodasi lainnya	6	6	6	6	6
Total	**45**	**45**	**44**	**46**	**45**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tarakan, 2020

8. Persentase Rumah Tangga (RT) Yang Menggunakan Air Bersih

Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat menyebabkan penggunaan air semakin tinggi. Kebutuhan terhadap kuantitas juga kualitas air pun turut meningkat. Penyediaan air bersih di Indonesia dijamin dalam Pasal 33 UUD 1945 ayat (3) yang berbunyi "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Lebih lanjut lagi, kebijakan tersebut dipertegas dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah bahwa pemenuhan air bersih bagi masyarakat merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah sebagai bagian dari pelayanan publik yang harus mereka lakukan.

Dalam kurun waktu 2016-2020, persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum bersih terus meningkat. Sumber air minum bersih terdiri dari air kemasan, air isi ulang, leding, dan (sumur bor/pompa, sumur terlindung serta mata air terlindung) dengan jarak ke Tempat Penampungan Limbah/Kotoran/Tinja Terdekat ≥10m. Pada tahun 2016, persentase tangga yang menggunakan air minum bersih sebesar 85,40%, meningkat menjadi 99,45% pada tahun 2020.

Selain sumber air minum bersih, rumah tangga di Kota Tarakan juga menggunakan sumber air minum layak. Sumber air minum layak terdiri dari leding, air hujan, dan (sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung) dengan jarak ke Tempat Penampungan Limbah/Kotoran/Tinja Terdekat ≥ 10 m. Secara umum, persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak berfluktuatif. Pada tahun 2016, persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak sebesar 96,66%, meningkat sebesar 97,20% pada tahun 2017.

Pada tahun 2018, terdapat penambahan klasifikasi akses air layak yang merupakan sumber air minum yang terdiri dari leding, air hujan, dan (sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung) dengan jarak ke Tempat Penampungan Limbah/Kotoran/ Tinja Terdekat ≥ 10 m dan sumber air minum kemasan/isi ulang dimana sumber air cuci/masak/mandi/dll menggunakan (sumur bor/pompa, sumur terlindung serta mata air terlindung) dengan jarak ke Tempat Penampungan Limbah/Kotoran/Tinja Terdekat ≥10m. Pada tahun 2020 sendiri, persentase rumah tangga yang menggunakan akses air layak

dengan sumber air minum layak sebesar 86,52.

Tabel 2.31
Persentase Rumah Tangga (RT) Yang Menggunakan Sumber Air Minum Bersih Dan Sumber Air Minum Layak Kota Tarakan 2016-2020

Karakteristik Air Bersih	2016	2017	2018	2019	2020
Sumber Air Minum Bersih	85,40	90,88	92,45	97,45	99,45
Sumber Air Minum Layak	96,66	97,20	11,10	74,05	86,52
Akses Air layak				74,05	86,52

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Tarakan, 2021

9. Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik

Listrik merupakan salah satu kebutuhan utama di Kota Tarakan. Salah satu manfaat listrik adalah sebagai sumber penerangan. Secara umum, untuk fasilitas sumber penerangan, rumah tangga menggunakan sumber penerangan yang berasal dari listrik dari PLN dan non PLN. Walaupun demikian, pada tahun 2018, seluruh rumah tangga di Kota Tarakan sudah menggunakan sumber penerangan yang berasal dari listrik PLN. Dalam kurun waktu 2016-2019, persentase rumah tangga dengan sumber penerangan listrik meningkat setiap tahunnya, mulai dari 99,39% pada tahun 2013 hingga 100% pada tahun 2018. Menurun menjadi 98,87% di tahun 2019 serta tahun 2020 sebesar 99,32% berdasarkan hal ini dikarenakan bertambahnya perumahan penduduk yang belum terdaftar.

Gambar 2.30
Persentase Rumah Tangga Dengan Sumber Penerangan Listrik Kota Tarakan 2015-2020

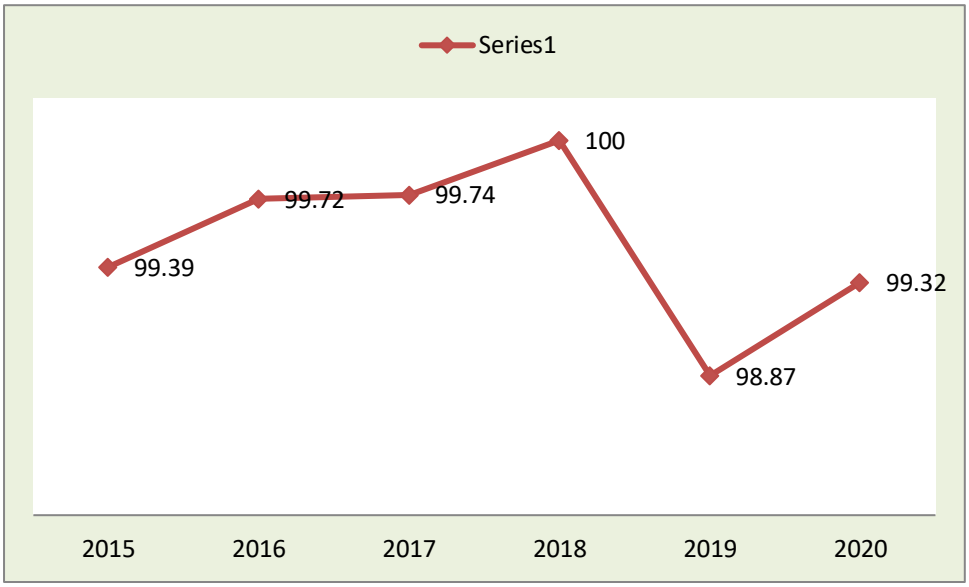

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Tarakan, 2020

10. Persentase Penduduk Yang Menggunakan HP/Telepon

Telepon seluler (HP) merupakan perangkat telekomunikasi yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon kabel, namun dapat dibawa kemana-mana dan tidak perlu disambungan dengan jaringan telekomunikasi kabel. Di era globalisasi, HP sangat penting untuk memperlancar hubungan dengan orang lain untuk kepentingan seseorang yang mendadak maupun tidak. Dalam kurun waktu 2016-2019, persentase penduduk yang menggunakan hp/telepon meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2019, persentase penduduk yang menggunakan hp/telepon sebesar 90,13%, meningkat dari tahun 2016 sebesar 73,00%.

Gambar 2.31
Persentase Anggota Rumah Tangga 5 Tahun Ke Atas Yang Memiliki HP Kota Tarakan 2016-2020

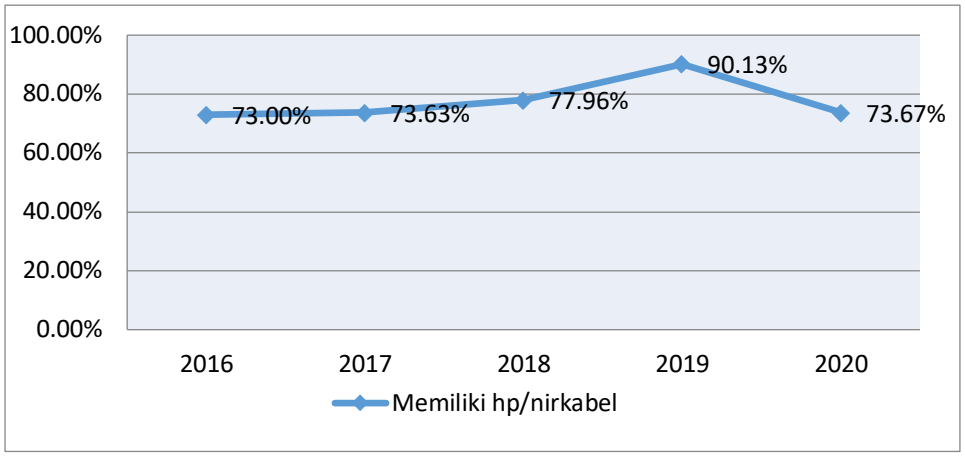

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Tarakan, 2020

c. Fokus Iklim Berinvestasi

Iklim investasi adalah semua kebijakan, kelembagaan, dan lingkungan, baik yang sedang berlangsung maupun yang diharapkan terjadi di masa datang, yang bisa mempengaruhi tingkat pengembalian dan resiko suatu investasi. Tiga faktor utama dalam iklim investasi mencakup:

1. Kondisi ekonomi makro-termasuk stabilitas ekonomi makro, keterbukaan ekonomi, persaingan pasar, dan stabilitas sosial dan politik.
2. Kepemerintahan dan kelembagaan, termasuk kejelasan dan efektifitas peraturan, perpajakan, sistem hukum, sektor keuangan, fleksibilitas pasar tenaga kerja dan keberadaan tenaga kerja yang terdidik dan trampil.
3. Infrastruktur-mencakup antara lain sarana transportasi, telekomunikasi, listrik, dan air.

Selain tiga faktor diatas terdapat variabel lain yang juga mempengaruhi iklim berinvestasi diantaranya:

1. Angka Kriminalitas

Tingkat kriminalitas termasuk variabel yang penting untuk diperhatikan dalam mewujudkan kesejahteraan penduduk. Kriminalitas menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, di sisi lain kriminalitas dapat menjadi indikator tidak sejahteranya masyarakat. Jadi terdapat hubungan timbal balik (*reciprocal)* antara variabel kesejahteraan dengan variabel kriminalitas. Angka kriminalitas yang relatif tinggi dapat mengganggu terciptanya stabilitas keamanan, sehingga angka krminalitas harus ditekan dengan mengaktifkan banyak pihak terkait dan kelembagaan sosial di masyarakat.

Tabel 2.32
Angka Kriminalitas per 10.000 Penduduk di Kota Tarakan Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Tindak Kriminal	Kasus	221	279	269	282	277
Jumlah Penduduk	Jiwa	244.185	253.026	262.025	270.894	280.215
Angka Kriminalitas per 10.000 penduduk	Kasus	9,05	11,03	10,79	11,11**	11,42***

Sumber: Kota Tarakan Dalam Angka, 2020

Dari tabel di atas, diketahui angka kriminalitas di Kota Tarakan pada tahun 2017 sebesar 11,03, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 9,05 dan tampak dari data tahun 2020 tingkat kriminalitas di Kota Tarakan diperkirakan semakin tinggi yaitu sebesar 11,42. Untuk itu, diharapkan semua lini baik pemerintah, masyarakjat bnersama-sama melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat preventif atau pencegahan.

2. Lama Proses Perijinan

Peningkatan kinerja pemerintah dalam penyediaan pelayanan publik semakin meningkat, salah satunya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kota Tarakan. Pentingnya pelayanan perizinan satu pintu menjadi pintu masuk bagi investor-investor yang akan memacu tumbuhnya investasi sehingga banyak menciptakan peluang kerja, meningkatnya income per kapita dan pendapatan asli daerah Kota Tarakan. Untuk itulah sistem informasi pelayanan perizinan yang progresif menjadi sangat penting dalam mendukung pengembangan investasi daerah dan pertumbuhan ekonomi. DPMPTSP Kota Tarakan telah meningkatkan kemudahan pelayanan dengan menerapkan sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (online) sejak tahun 2011. Jenis perizinan yang diterbitkan oleh DPMPTSP Kota Tarakan pada tahun 2014-2016 sejumlah 57 jenis perizinan, sedangkan pada tahun 2020 menjadi 90 jenis perizinan. Adapun lama proses perizinan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.33
Lamanya Proses Perizinan di Kota Tarakan Tahun 2020

No	Nama Perizinan	Lama Proses Perizinan
1.	Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal	14 hari kerja
2.	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	14 hari kerja
3.	Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan	14 hari kerja
4.	Izin Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional	30 hari kerja
5.	Izin Praktik Apoteker	14 hari kerja

No	Nama Perizinan	Lama Proses Perizinan
6.	Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian	hari kerja
7.	Izin Praktik Bidan	14 hari kerja
8.	Izin Kerja Bidan	hari kerja
9.	Izin Praktik Dokter (Faskes)	14 hari kerja
10.	Izin Praktik Dokter (Mandiri)	14 hari kerja
11.	Izin Praktik Fisioterapis	14 hari kerja
12.	Izin Kerja Fisioterapis	5 hari kerja
13.	Izin Praktik Tenaga Gizi	14 hari kerja
14.	Izin Kerja Tenaga Gizi	14 hari kerja
15.	Izin Praktik Okupasi Terapis	14 hari kerja
16.	Izin Kerja Okupasi Terapis	14 hari kerja
17.	Izin Praktik Perawat	14 hari kerja
18.	Izin Kerja Perawat	14 hari kerja
19.	Izin Kerja Radiografer	14 hari kerja
20.	Izin Kerja Optometris	14 hari kerja
21.	Izin Kerja Refraksionis Optisien	14 hari kerja
22.	Izin Praktik Terapis Wicara	20 hari kerja
23.	Izin Kerja Terapis Wicara	20 hari kerja
24.	Izin Apotek	20 hari kerja
25.	Izin Optik	20 hari kerja
26.	Izin Toko Alat Kesehatan	20 hari kerja

No	Nama Perizinan	Lama Proses Perizinan
27.	Izin Toko Obat	14 hari kerja
28.	Izin Operasional Pemberantasan Hama	14 hari kerja
29.	Izin Mendirikan Rumah Sakit	30 hari kerja
30.	Izin Operasional Rumah Sakit	45 hari kerja
31.	Izin Operasional Klinik	30 hari kerja
32.	Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium	14 hari kerja
33.	Izin Praktik Ortotesis Prostetis	14 hari kerja
34.	Izin Kerja Ortotesis Prostetis	5 hari kerja
35.	Izin Praktik Penata Anastesi	14 hari kerja
36	Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut	14 hari kerja
37.	Izin Praktik Elektromedis	14 hari kerja
38.	Izin Kerja Tenaga Sanitarian	5 hari kerja
39.	Izin Kerja Perekam Medis	5 hari kerja
40.	Izin Praktik Psikologis Klinik	14 hari kerja
41.	Izin Penyehat Tradisional	14 hari kerja
42.	Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus	45 hari kerja
43.	Izin Tukang Gigi	14 hari kerja
44.	Izin Praktik Tenaga Akupuntur	14 hari kerja
45.	Izin Penyelenggaraan Puskesmas	hari kerja

No	Nama Perizinan	Lama Proses Perizinan
46.	Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisonal	14 hari kerja
47.	Izin Penyelenggaraan Unit Transfusi Darah	14 hari kerja
48.	Izin Mendirikan Bangunan	12 hari kerja
49.	Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional	10 hari kerja
50.	Izin Penyelenggaraan Reklame	5 hari kerja
51.	Izin Pembuangan Air Limbah	25 hari kerja
52.	Izin Penataan dan Pemotongan Bukit	7 hari kerja
53.	Izin Pemrosesan Akhir Sampah	5 hari kerja
54.	Izin Pengolahan Sampah	5 hari kerja
55.	Izin Pengangkutan Sampah	5 hari kerja
56.	Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) untuk Jasa	45 hari kerja
57.	Izin Lingkungan	60 hari kerja
58.	Izin Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan	7 hari kerja
59.	Izin Penyelenggaraan Parkir	5 hari kerja
60.	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang	7 hari kerja
61.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	3 hari kerja
62.	Pendaftaran Usaha Pertenakan	14 hari kerja
63.	Izin Pengusahaan Sarang Walet	7 hari kerja
64.	Izin Usaha Penyedia Sarana Produksi Pertanian (*Phoultry Shop*)	14 hari kerja

No	Nama Perizinan	Lama Proses Perizinan
65.	Izin Usaha Obat Hewan (Toko atau Depo)	14 hari kerja
66.	Izin Usaha Penjualan Daging	7 hari kerja
67.	Izin Produksi Pupuk	10 hari kerja
68.	Izin Usaha Pemotongan Hewan atau Unggas	14 hari kerja
69.	Izin Praktik Dokter Hewan Bersama	7 hari kerja
70.	Izin Praktik Hewan Mandiri	5 hari kerja
71.	Izin Praktik Dokter Hewan	3 hari kerja
72.	Izin Klinik Hewan	7 hari kerja
73.	Izin Usaha Perikanan	5 hari kerja
74.	Tanda Daftar Bagi Pembudidaya Ikan Kecil	2 hari kerja
75	Tanda Daftar Kapal Perikanan untuk Nelayan Kecil	2 hari kerja
76.	Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	7 hari kerja
77.	Izin Usaha Pedagangan	3 hari kerja
78.	Tanda Daftar Gudang	5 hari kerja
79.	Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat	5 hari kerja
80.	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba	3 hari kerja
81.	Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi	7 hari kerja
82.	Izin Pembukaan Kantor Pembantu Koperasi	7 hari kerja
83.	Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi	7 hari kerja

No	Nama Perizinan	Lama Proses Perizinan
84.	Izin Koperasi Simpan Pinjam	30 hari kerja
85.	Izin Usaha Industri	5 hari kerja
86.	Izin Perluasan (Industri)	5 hari kerja
87.	Izin Lembaga Pelatihan Kerja	5 hari kerja
88.	Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta	5 hari kerja
89.	Tanda Daftar Lembaga Pelatihan Kerja	5 hari kerja
90.	Izin Lokasi	22 hari kerja

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan, 2018

3. Jumlah Dan Macam Pajak Dan Retribusi Daerah

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau PDRD adalah pungutan oleh daerah yang merupakan salah satu hak daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Hak-hak daerah tersebut sebagaimana di maksud dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hasil PDRD merupakan sebagian sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah Otonom (daerah) yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan PERDA Kota Tarakan nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah pada Bab II pasal 2, terdapat 11 jenis pajak di Kota Tarakan yaitu: 1) Pajak Hotel, 2) Pajak Restoran, 3) Pajak Hiburan,

4) Pajak Reklame, 5) Pajak Penerangan Jalan, 6) Pajak Parkir, 7) Pajak Air Tanah, 9) Pajak Sarang Burung Walet, 9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, 10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan 11) Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan.

Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Retribusi menurut UU no. 28 tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Secara umum, retribusi dikelompokkan menjadi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

Retribusi Jasa Umum, adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Berdasarkan PERDA Kota Tarakan nomor 1 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, terdapat 11 jenis retribusi jasa umum di Kota Tarakan yaitu : 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan, 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, 3) Retribusi Pergantian Biaya Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, 4) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, 5) Retribusi Pelayanan Pasar, 6) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, 7) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, 8) Retribusi Pelayanan Pendidikan, 9) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, 10) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan 11) Retribusi

Kelayakan.Retribusi Pergantian Biaya Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sejak tahun 2015 sudah tidak ada, dikarenakan sudah menggunakan e-KTP. Sedangkan Retribusi Kelayakan Kapal sejak tahun 2016 sudah diambil alih oleh KSOP.

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Berdasarkan PERDA Kota Tarakan nomor 2 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, terdapat 7 retribusi jasa usaha di Kota Tarakan yaitu: 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, 2) Retribusi Terminal, 3) Retribusi Tempat khusus Parkir, 4) Retribusi Rumah Potong Hewan, 5) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan (sejak Nopember 2018–diambil alih oleh Propinsi Kaltara), 6) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, dan 7) Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan sejak Nopember 2018 diambil alih oleh Propinsi Kaltara.

Retribusi Perizinan Tertentu, adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang. penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Berdasarkan PERDA Kota Tarakan nomor 3 tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, terdapat 4 retribusi perizinan tertentu yaitu: 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, 3) Retribusi izin trayek, 4) Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Tabel 2.34
Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tarakan
Tahun 2016-2020

PENDAPATAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	2016	2017	2018	2019	2020
PAJAK DAERAH					
Pajak Hotel	6.170.627.646	7.030.509.965	7.588.802.274,29	7.116.708.377,90	4.091.376.300,30
Pajak Restoran	4.814.433.639	6.071.371.964	6.506.540.925,60	7.643.466.015,00	7.363.873.191,43
Pajak Hiburan	480.474.630	475.576.267	394.995.252,60	374.240.064,65	253.145.983,90
Pajak Reklame	1.334.396.304	1.684.262.990	2.617.704.454,25	3.350.818.767,40	3.829.375.080,40
Pajak Penerangan Jalan	7.046.729.003	5.103.500.369	6.915.447.815,00	6.573.637.854,00	6.760.013.813,00
Pajak Parkir	329.792.800	111.546.000	110.000.000,00	100.000.000,00	105.944.400,00
Pajak Air Tanah	203.939.455	3.679.115	388.255.235,89	404.752.739,71	621.988.380,14
Pajak Sarang Burung Walet	1.950.000	1.050.000	31.830.000,00	53.703.000,00	44.225.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	205.215.459	394.920.659	-	-	10.098.932,80
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	6.977.921.693	10.365.204.011	9.461.368.242,00	10.015.307.128,00	9.763.821.357,00
Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan	7.165.570.667	9.367.471.698	10.759.414.575,00	12.449.854.972,46	11.687.913.047,06
Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C			681.894.794,40	42.292.538,00	
Total Pendapatan Pajak Daerah	**34.731.051.295**	**40.609.093.038**	**45.456.253.569,03**	**48.124.781.457,12**	

PENDAPATAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	2016	2017	2018	2019	2020
Retribusi Jasa Umum					
Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.372.455.500	1.750.979.700	951.475.000,00	2.024.006.967,00	1.111.708.670,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	467.730.000	19.350.000	277.060.000,00	174.900.000,00	231.250.000,00
Retribusi Pergantian Biaya Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil	-	- -	-	-	
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	438.511.000	448.060.000	349.785.000,00	380.270.000,00	1.346.169.783,00
Retribusi Pelayanan Pasar	-	536.867.000	481.500.000,00	420.925.000,00	355.488.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	277.920.900	241.387.200	190.180.700,00	212.255.900,00	171.384.300,00
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	25.529.000	32.982.000	31.875.000,00	15.595.000,00	29.020.000,00
Retribusi Pelayanan Pendidikan	-	- -	-	-	
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	9.600.000	18.000.000	12.400.000,00	13.600.000,00	23.600.000,00
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	188.379.574	36.625.000	-	-	1.448.556.285,00
Retribusi Kelayakan Kapal	-	-	-	-	

PENDAPATAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Retribusi Umum	**3.780.125.974**	**3.084.250.900**	**2.294.275.700,00**	**3.241.552.867,00**	
Retribusi Jasa Usaha					
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.377.752.828	909.299.500	3.365.094.844,00	3.157.493.150,00	3.934.964.475,00
Retribusi Terminal	-	172.625.254	399.840.000,00	375.490.000,00	341.600.000,00
Retribusi tempat Khusus Parkir	46.105.000	23.900.000	-	-	
Retribusi Rumah Potong Hewan	50.850.000	49.175.000	53.075.000,00	48.785.000,00	25.135.000,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	4.440.036.005	5.032.912.749	4.327.127.634,00	175.453.710,00	135.107.675,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	350.975.000	413.798.000	636.415.000,00	380.627.500,00	223.458.000,00
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah	-	7.900.000	14.080.000,00	64.080.000,00	3.844.000,00
Retribusi Tempat Pariwisata			467.320.000,00	155.094.000,00	
Jumlah Retribusi Jasa Usaha	**6.265.718.833**	**6.609.610.503**	**9.262.952.478,00**	**4.357.023.360,00**	

PENDAPATAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	2016	2017	2018	2019	2020
Retribusi Perizinan Tertentu					
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.135.954.100	1.225.441.000	1.669.258.375,00	1.828.716.390,63	1.449.481.999,70
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	50.000.000	50.000.000	125.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00
Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	810.627.166	914.195.200	38.174.168,00	-	-
Retribusi Izin Trayek	750.000	3.500.000	12.000.000,00	1.050.000,00	
Retribusi Izin Usaha Perikanan	-	-	-	-	-
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	-	81.345.600	120.327.600,00	-	-
Jumlah Retribusi Perizinan Tertentu	**1.997.331.266**	**2.274.481.800**	**1.964.760.143,00**	**1.929.766.390,63**	
Total Retribusi Daerah	**12.043.176.073**	**11.968.343.203**	**13.521.988.321,00**	**9.528.342.617,63**	
REALISASI PENDAPATAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	**46.774.227.368,77**	**52.577.436.240,59**	**58.978.241.890,03**	**57.653.124.074,75**	

Sumber: BPKPAD Kota Tarakan, 2020

d. Fokus Sumberdaya Manusia

1. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3)

Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah salah satunya ditentukan oleh tingkat pendidikan, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3. Rasio lulusan S1/S2/S3 didapatkan dari perbandingan antara jumlah lulusan S1/S2/S3 terhadap jumlah penduduk, dikalikan sepuluh ribu.

Secara umum, dalam kurun waktu 2015-2019, jumlah lulusan S1/S2/S3 di Kota Tarakan mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, jumlah lulusan S1/S2/S3 mencapai 10.816 orang, meningkat 0,58% dari tahun sebelumnya sejumlah 10.754 orang. Sedangkan rasio lulusan S1/S2/S3 mencapai 440,06. Sedangkan Tahun 2020 jumlah lulusan S1/S2/S3 mencapai 428,78.

Tabel 2.35
Rasio lulusan S1/S2/S3 di Kota Tarakan Tahun 2015-2020

Tahun	Jumlah Lulusan S1/S2/S3	Jumlah Penduduk	Rasio lulusan S1/S2/S3
2015	9.125	231.741	393,76
2016	9.226	246.496	374,29
2017	10.003	252.464	396,21
2018	10.754	259.001	415,21
2019	10.816	245.784	440,06
2020	10.867	253.785	428,78

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan, 2020

A.1.4.3 Aspek Pelayanan Umum

a. Layanan Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Pelayanan dasar merupakan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara Indonesia. Oleh karena ini, layanan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar merupakan layanan urusan pemerintahan daerah yang wajib dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di Kota Tarakan.

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar yang bertujuan untuk menyiapkan sumber daya manusia dari aspek kecerdasan, akhlak, serta keterampilan. Kemajuan pendidikan bisa dilihat dari berapa indikator antara lain :

1) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Berdasarkan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pembangunan Berkelanjutan, pada tahun 2030 menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan pra-sekolah dasar yang berkualitas sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar. Pendidikan anak usia dini menggambarkan penduduk usia 3-6 Tahun yang mendapatkan pendidikan di TK/RA/Penitipan Anak. Pada tahun 2017 berdasarkan data kementerian pendidikan dan kebudayaan seperti terlihat di tabel berikut.

Tabel 2.36
APK PAUD Kota Tarakan Tahun 2016-2020

Uraian	Angka Partisipasi Kasar PAUD Kota Tarakan				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah siswa TK/SLB/RA/KB/SPS	11.060	11.442	19.969	23.161	4.848
Jumlah Penduduk Umur 3-6 Tahun	19.428	19.969	23.161	19.969	9.313
APK PAUD Kota Tarakan	56,93	57,30	86,22	115,98	52,06

Sumber: Kemendikbud, 2020

APK PAUD merupakan ukuran daya serap pendidikan terhadap penduduk usia 3 sampai 6 tahun yang bersekolah pada jenjang PAUD. Berdasarkan tabel di atas, dalam kurun waktu 2016-2019 mengalami peningkatan, Namun, ditahun 2020 Jumlah siswa mengalami penurunan yang cukup siginificant yaitu sebesar 4.848 dengan prosentase sebesar 52,06% dampak dari adanya pandemic covid-19 sehingga orang tua tidak menyekolahkan anaknya secara langsung mendapat pendidikan usia dini.

2) Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum disuatu tingkat Pendidikan. APK adalah rasio jumlah siswa berapapun usianya yang sedang bersekolah ditingkat Pendidikan tertentu terhadap jumlah kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang Pendidikan tertentu. APK merupakan perbandingan jumlah siswa pada tingkat Pendidikan SD/SMP/SMA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah dimasing-masing jenjang Pendidikan.

Gambar 2.32
APK Kota Tarakan Tahun 2016-2020

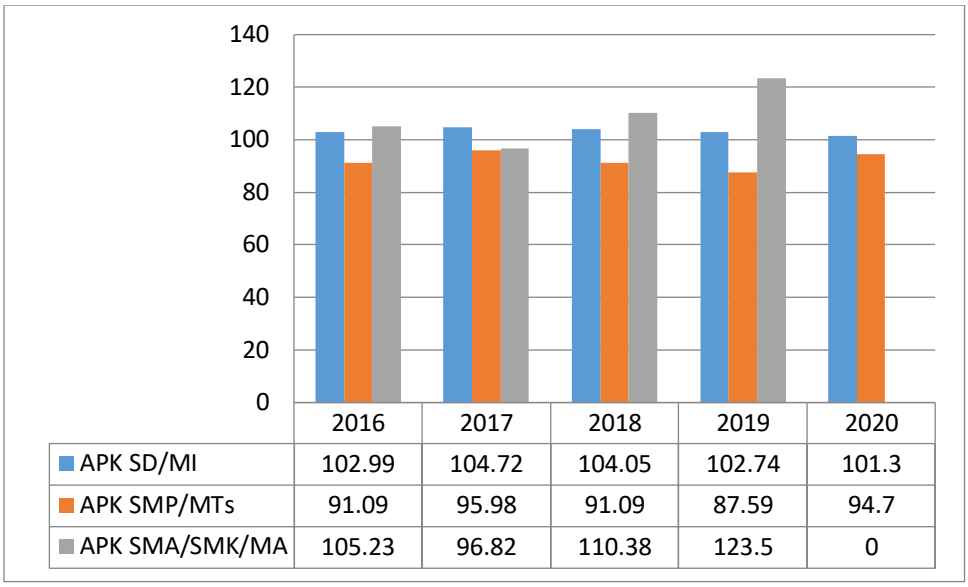

	2016	2017	2018	2019	2020
APK SD/MI	102.99	104.72	104.05	102.74	101.3
APK SMP/MTs	91.09	95.98	91.09	87.59	94.7
APK SMA/SMK/MA	105.23	96.82	110.38	123.5	0

Sumber: Kota Tarakan Dalam Angka 2021, diolah

Secara umum, nilai APK cenderung berfluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2019, APK SD/MI sebesar 102,74 menurun dari tahun sebelumnya sebesar 104,05. APK SMP/Mts sebesar 87,59 menurun dari tahun sebelumnya sebesar 91,09. Sedangkan APK SMA/SMK/MA sebesar 123,5 meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 110,38.

3) Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah presentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang Pendidikan dan jumlah penduduk diusia yang sama. APM merupakan indikator yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar dijenjang Pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

Gambar 2.33
APM Kota Tarakan Tahun 2016-2020

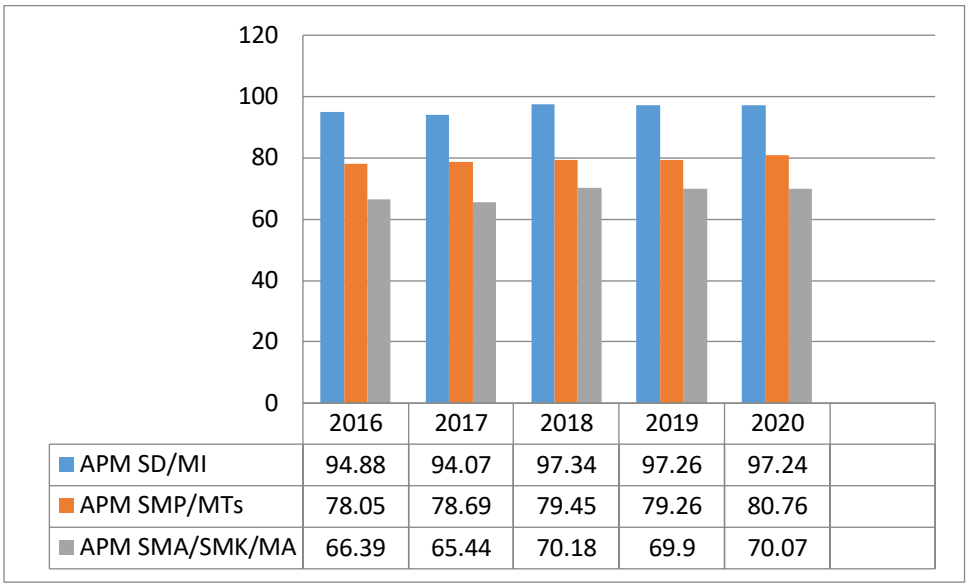

Sumber: Kota Tarakan Dalam Angka, 2021

Nilai APM pada seluruh jenjang Pendidikan berfluktuatif. APM SD pada tahun 2016 adalah 94,88%, meningkat daripada pada tahun 2015 sebesar 91,52%, selanjutnya menurun di tahun 2017 sebesar 94,07%, dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 97,34%. Dan kembali menurun pada tahun 2019 sebesar 97,26% Sedangkan APM SMP, menurun pada tahun 2015 sebesar 77,47%, dan di tahun 2016 meningkat menjadi 78,05%, selanjutnya meningkat lagi di tahun 2017 sebesar 78,69%, dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 79,45%, dan mengalami peningkatan menjadi 80,76% di tahun 2020. Pada tahun 2020, hanya APM SD/MI saja yang mengalami penurunan menjadi sebesar 97,24%.

4) Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah merupakan rasio daya serap pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia

muda. APS menggambarkan penduduk usia sekolah yang bersekolah. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum.

Gambar 2.34
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Tarakan Tahun 2016-2020

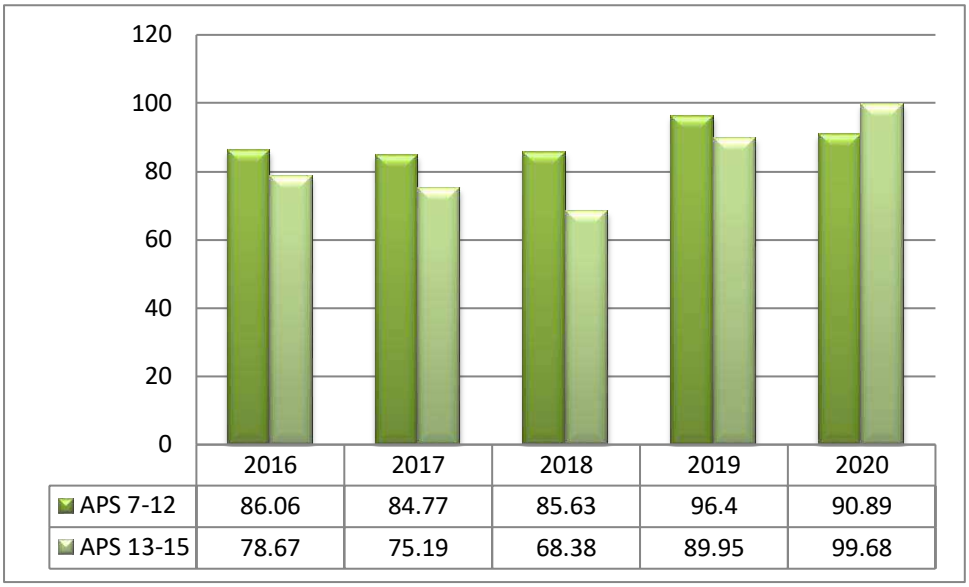

	2016	2017	2018	2019	2020
APS 7-12	86.06	84.77	85.63	96.4	90.89
APS 13-15	78.67	75.19	68.38	89.95	99.68

Sumber : Statistik Daerah Kota Tarakan, 2020

Dari gambar di atas, dalam kurun waktu 2016-2020, APS Kota Tarakan berfluktuatif baik APS 7-12 dan APS 13-15. APS 7-12 tertinggi pada tahun 2019 sebesar 96,4 dan terendah pada tahun 2017 sebesar 84,77. APS 13-15 tertinggi pada tahun 2020 sebesar 99,68 dan terendah pada tahun 2018 sebesar 68,38.

5) Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah merupakan proporsi anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Angka putus sekolah digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing tingkat pendidikan. Semakin tinggi angka putus sekolah menggambarkan kondisi

pendidikan yang tidak baik dan tidak merata. Begitu sebaliknya jika angka putus sekolah semakin kecil maka kondisi pendidikan di suatu wilayah semakin baik.

Tabel 2.37
Angka Putus Sekolah (APtS) di Kota Tarakan Tahun 2016-2020

Tahun	APts SD/Sederajat	APts SMP/Sederajat	APts SMA/Sederajat
2016	0,08	0,05	0,13
2017	0,21	0,01	n/a
2018	0,23	0,4	n/a
2019	0,02	0,28	n/a
2020	0,14	0,35	n/a

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan, 2020

Tabel 2.38
Angka Putus Sekolah (APS) di Kota Tarakan Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI					
1.1	jumlah murid usia 7-12 thn	25.556	25.653	24.372	27.329	26.545
1.2	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	29.696	30.261	28.462	28.351	29.206
1.3	APS SD/MI	86,06	84,77	85,63	96,40	90,89
2	SMP/MTs					
2.1	jumlah murid usia 13-15 thn	11.250	10.986	8.905	11.424	13.207
2.2	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	14.300	14.611	13.023	12.701	13.249
2.3	APS SMP/MTs	78,67	75,19	68,38	89,95	99,68

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan, 2021

Dari gambar di atas, dapat diketahui bahwa secara umum APtS di Kota Tarakan pada tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. APtS SD/Sederajat pada tahun 2020 sebesar 0,14, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 0,02. APtS SMP/Sederajat pada tahun 2020 sebesar 0,35, meningkat dari

tahun sebelumnya 0,28. APtS SMA/Sederajat pada tahun 2016 sebesar 0,13, menurun dari tahun sebelumnya 1,48. Hal ini menunjukkan perlu perhatian khusus atas peningkatan angka putus sekolah SD dan SMP yang cenderung meningkat.

6) Angka Kelulusan

Angka kelulusan adalah presentase kelulusan yang dicapai setiap tahunnya pada setiap jenjang pendidikan. Angka kelulusan digunakan untuk mengukur keberhasilan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan disekolah serta kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan daerah.

Gambar 2.35
Angka Kelulusan di Kota Tarakan Tahun 2016-2020

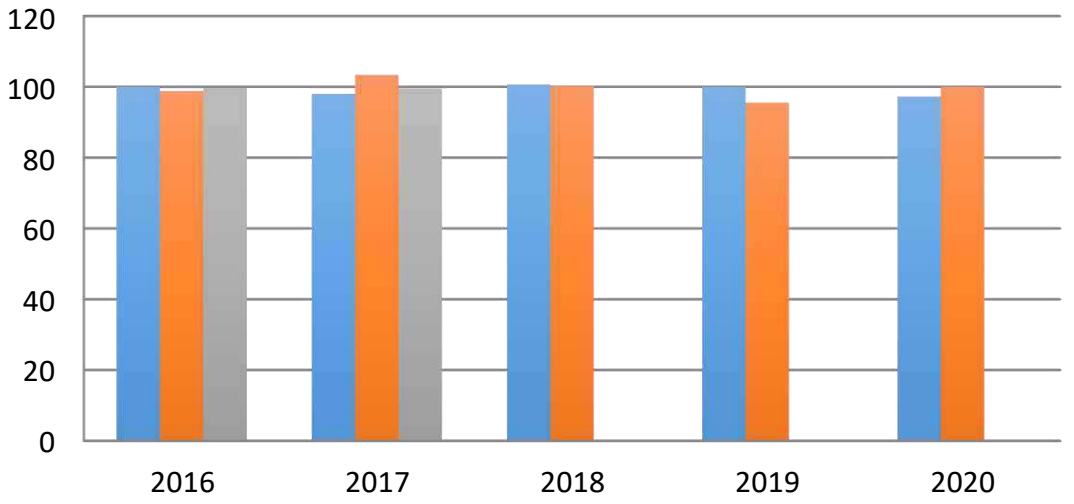

	2016	2017	2018	2019	2020
AL SD/MI	100	98.04	100.66	100	97.26
AL SMP/MTS	98.85	103.37	100.15	95.54	100
SMA/SMK/MA	99.68	99.49	0.00	0.00	0.00

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tarakan, 2021

Dari gambar di atas, dapat diketahui secara umum angka kelulusan SD/MI tinggi, bahkan pada tahun 2016, 2018 dan 2019,

angka kelulusan mencapai 100%. Begitu pula angka kelulusan SMP/MTS. Pada tahun 2017, 2018 dan 2020 angka kelulusan mencapai 100%, meningkat dari tahun 2016 yaitu sebesar 98,85%. Sementara angka kelulusan SMA/SMK/MA mengalami penurunan dari tahun 2016 sebesar 100%, pada tahun 2017 menjadi 99,49%. Pada tahun 2018-2020 data terkait angka kelulusan tingkat SMA/SMK/MA menjadi kewenangan provinsi.

7) Angka Melanjutkan (AM)

Angka melanjutkan pendidikan adalah persentase siswa yang melanjutkan pendidikan setiap tahunnya pada setiap jenjang pendidikan. Angka melanjutkan pendidikan dapat digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Gambar 2.36
Angka Melanjutkan di Kota Tarakan Tahun 2016-2020

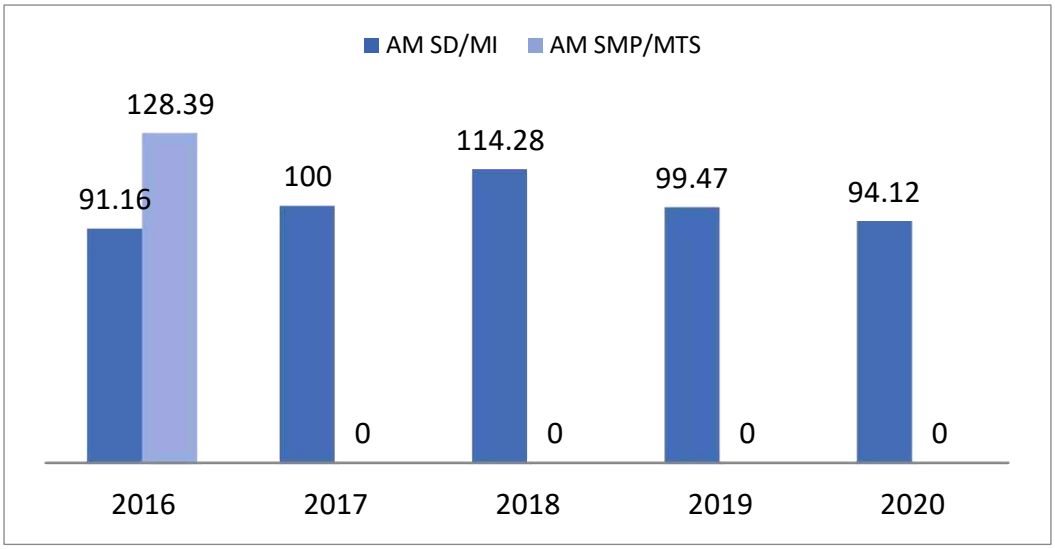

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tarakan, 2021

Dari gambar di atas, dapat diketahui secara umum angka melanjutkan SD/MI ke SMP tinggi, bahkan pada tahun 2018, angka melanjutkan mencapai 114,28%. Begitu pula angka melanjutkan

SMP/MTS ke SMA/MA. Pada tahun 2016 angka melanjutkan mencapai 128,39, meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 98,95%.

8) Fasilitas Pendidikan

Kondisi fasilitas pendidikan berupa bangunan sekolah dan fasilitas penunjang pendidikan mulai dari PAUD, SD hingga SMP di Kota Tarakan pada umumnya dalam kondisi baik. Pada tahun 2018, bangunan SD di Kota Tarakan sebanyak 64 Unit terdiri dari Sekolah Negeri 47 unit sekolah dan Sekolah swasta 17 Unit. Secara umum, sebagian besar mempunyai kondisi bangunan baik, sedangkan lainnya merupakan bangunan lama yang belum dapat dibangun disebabkan oleh kondisi lahan dan belum tersedianya anggaran untuk merehabilitasi bangunan. Sedangkan bangunan SMP/MTS di Kota Tarakan sejumlah 26 unit terdiri Negeri 12 Unit dan sekolah swasta 14 Unit. Secara umum, sebagian besar bangunan SMP/MTS di Kota Tarakan dalam kondisi baik karena merupakan bangunan baru.

Gambar 2.37
Jumlah SDN/MIN dan SMPN/MTSN dengan Kondisi Baik (%)

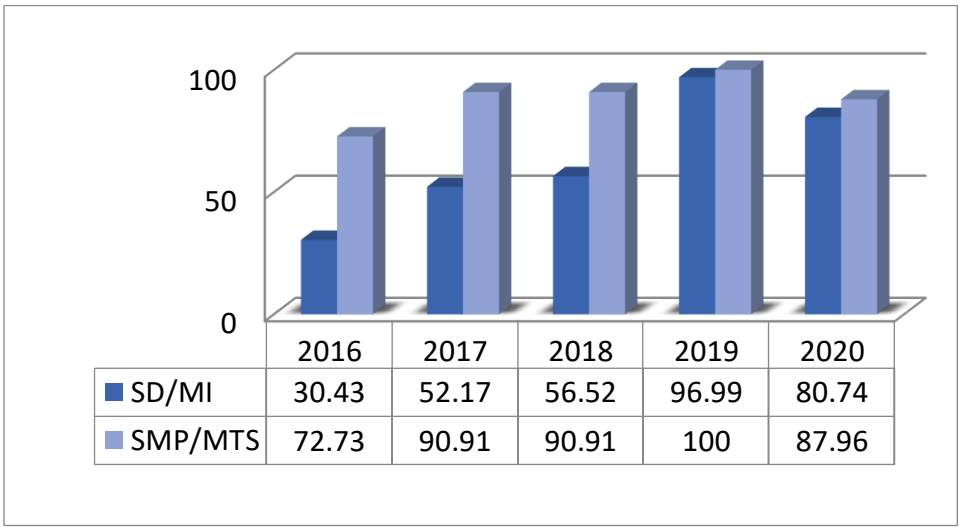

	2016	2017	2018	2019	2020
SD/MI	30.43	52.17	56.52	96.99	80.74
SMP/MTS	72.73	90.91	90.91	100	87.96

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Tarakan, 2021

9) Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah dapat menunjukkan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan. Rasio ketersediaan sekolah ini dihitung untuk tiap 10.000 penduduk.

Tabel 2.39
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Kota Tarakan 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI					
1.1	Jumlah gedung sekolah	67	66	68	72	71
1.2	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	29.696	30.261	28.462	28.351	29.206
1.3	Rasio	22,56	21,81	23,89	25,40	24,31
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah gedung sekolah	25	25	26	33	32
2.2	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	14.300	14.611	13.023	12.701	13.249
2.3	Rasio	17,48	17,11	19,96	25,98	24,15

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Tarakan, 2021

Gambar 2.38
Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah
Pendidikan Dasar dan Menengah Kota Tarakan
Tahun 2016-2020

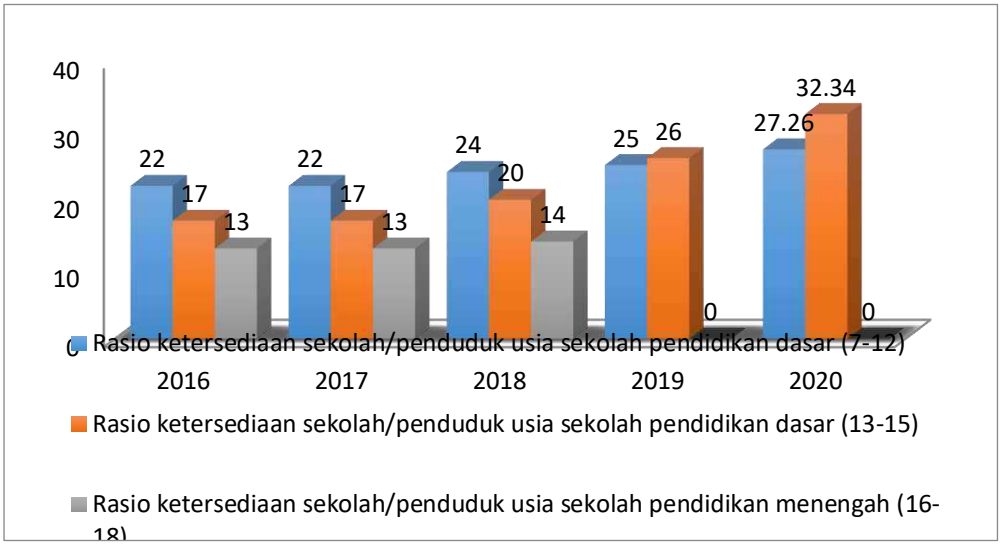

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Tarakan, 2021

Dari gambar di atas diketahui bahwa dalam kurun waktu 2016-2020, rasio ketersediaan sekolah pendidikan dasar dan menengah cenderung meningkat. Pada tahun 2020, rasio ketersediaan sekolah pendidikan dasar untuk usia 7-12 tahun sebesar 27,26, meningkat dari tahun 2019 sebesar 25. Rasio ketersediaan sekolah pendidikan dasar untuk usia 13-15 tahun pada tahun 2020 sebesar 32,34, meningkat dari tahun 2019 sebesar 26. Rasio ketersediaan sekolah pendidikan menengah untuk usia 16-18 tahun pada tahun 2018 sebesar 14,39, meningkat dari tahun 2017 sebesar 12,57.

10) Rasio Guru/Murid Sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA

Rasio guru/murid merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan baik tidaknya mutu pendidikan. Sehingga setiap daerah atau bahkan negara, ingin selalu memperoleh rasio yang ideal untuk mendukung perkembangan pendidikannya. Sejak terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2008 tentang Guru, pemerintah telah mengatur tentang rasio perbandingan untuk pelayanan guru terhadap siswa pada satuan pendidikan. Dalam pasal 17 telah disebutkan, untuk jenjang SD/SMP/SMA perbandingan guru terhadap siswa adalah 1 : 20, sedangkan untuk MI/MTs/MA perbandingan guru terhadap siswa adalah 1 : 15. Hal ini menjadi kemudian dijadikan dasar untuk melakukan pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG).

Tabel 2.40
Jumlah guru dan murid jenjang pendidikan dasar
Kota Tarakan Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI					
1.1	Jumlah Guru	1.174	1.304	1.296	1.291	1.366
1.2	Jumlah Murid	27.097	26.993	26.199	27.096	26.756
1.3	Rasio	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah Guru	568	631	709	702	805
2.2	Jumlah Murid	10.492	10.599	10.759	11.445	11.593
2.3	Rasio	0,05	0,06	0,07	0,06	0,07

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Tarakan, 2020

Gambar 2.39
Rasio Guru/Murid Sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA
Kota Tarakan Tahun 2016-2020

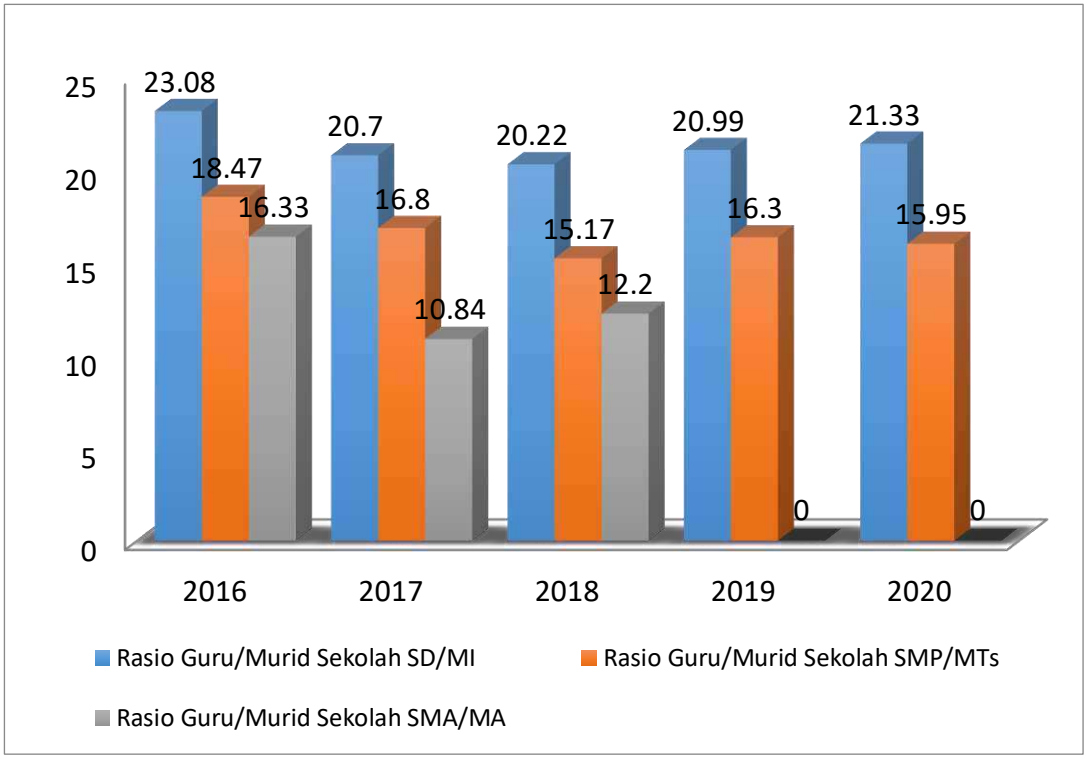

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Tarakan, 2021

Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui dalam kurun waktu 2016-20209, rasio guru SD/MI mengalami penurunan. Pada tahun 2019, rasio guru SD/MI sebesar 20,99, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 20,22. Namun, pada tahun 2020 rasio guru SD/MI meningkat menjadi 21,33 persen. Hal ini menunjukkan rasio guru/murid sekolah SD/MI di Kota Tarakan sudah mendekati rasio ideal. Sedangkan rasio guru/murid SMP/MTS dan SMA/MA dalam kurun 2016-2020 berfluktuatif dengan rasio tertinggi pada tahun 2016 sebesar 18,47 dan 16,33. Walaupun demikian, rasio ini termasuk ideal.

11) Proporsi Murid Kelas 1 Yang Berhasil Menamatkan Sekolah Dasar

Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar merupakan salah satu indikator untuk melihat pencapaian pendidikan dasar untuk semua. Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasarnya dan selanjutnya menyelesaikan sembilan tahun pendidikan dasar, dapat dilihat pada arus siswa pendidikan dasar yang menunjukkan proporsi siswa yang menyelesaikan satu siklus pendidikan dasar tertentu. Secara implisit, proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar mengindikasikan tingkat kesuksesan pelaksanaan program wajib belajar serta kemajuan tingkat pe-nyelesaian pendidikan dasar dalam kurun waktu 11 tahun. dalam kurun waktu tahun 2016-2017, proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar berfluktiatif. Angka proporsi tertinggi sebesar 87,86 pada tahun 2016 sedangkan terendah sebesar 82,39 pada tahun 2018. Pada tahun 2019-2020 data terkait propors murid kelas 1 belum tersedia, dikarenakan data jumlah penduduk tunggal yaitu usia 12 dan 15 tahun belum ada.

Gambar 2.40
Proporsi Murid Kelas 1 Yang Berhasil Menamatkan Sekolah Dasar Kota Tarakan Tahun 2016-2020

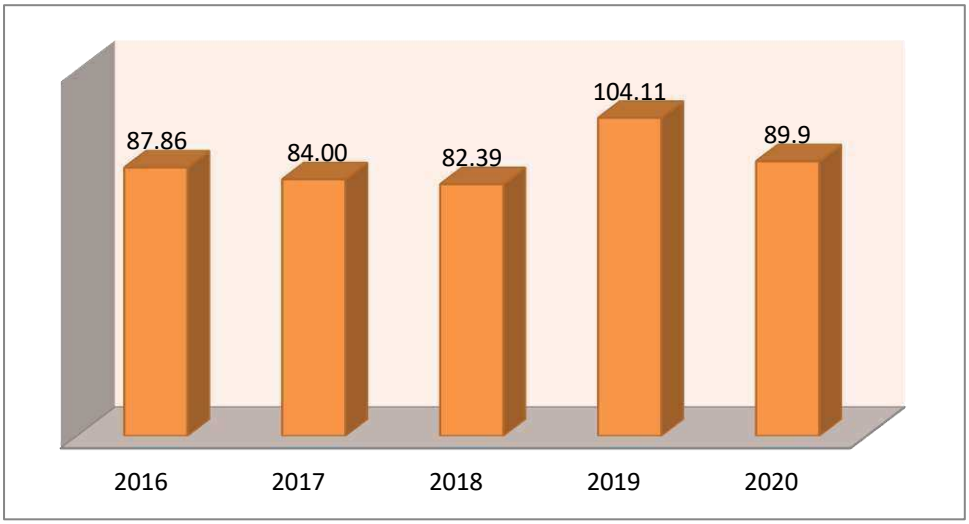

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Tarakan, 2021

12) Angka Melek Huruf Penduduk Usia di atas 15 Tahun, Perempuan Dan Laki-Laki

Angka melek huruf (AMH) merupakan proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya (seperti huruf jawa, kanji, dll) terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. AMH digunakan untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah, karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. AMH merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan. Angka melek huruf berkisar antara 0-100. Tingkat melek huruf yang tinggi menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajaran.

Gambar 2.41
Angka Melek Huruf Penduduk Usia diatas 15 Tahun, Perempuan Dan Laki-Laki Kota Tarakan Tahun 2016-2020

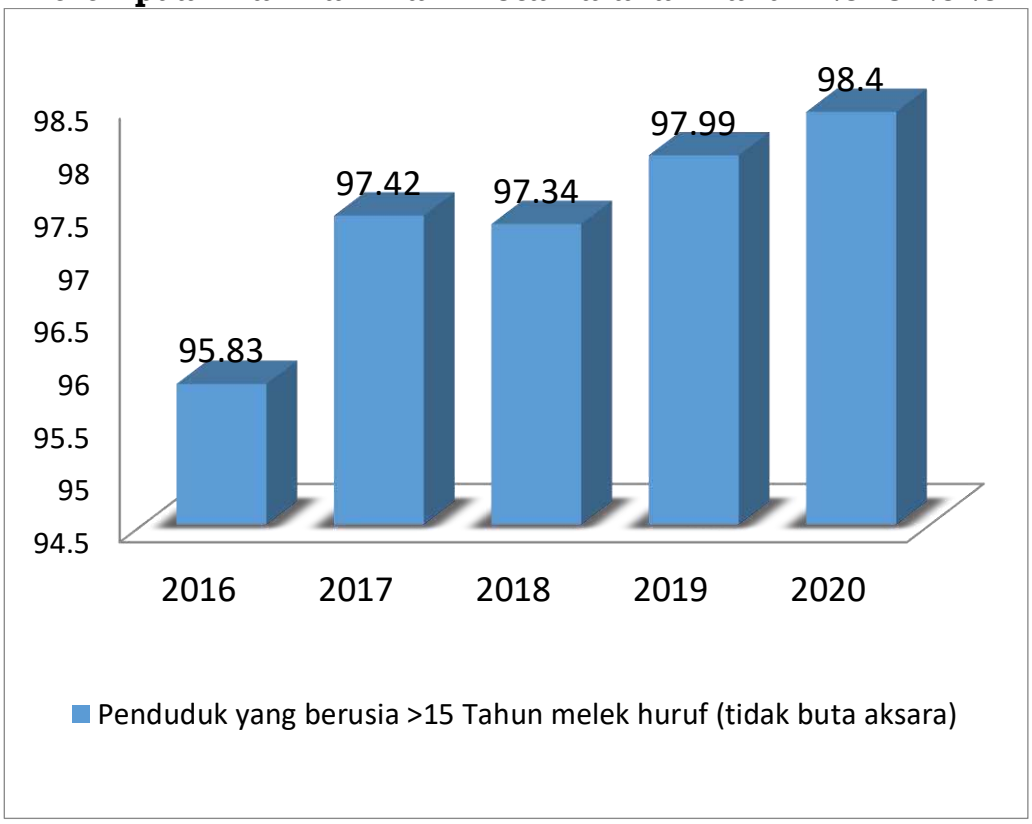

Sumber : Tarakan Dalam Angka, 2021

Dari gambar di atas, diketahui bahwa AMH penduduk usia diatas 15 tahun, perempuan dan laki-laki Kota Tarakan tahun 2016-2020 berkategori tinggi, karena berada di atas 95%.

13) Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Guru sebagai tenaga pendidik yang berhubungan langsung dengan peserta didik harus memiliki keahlian khusus atau kualifikasi khusus di bidang akademik. Dengan kompetensi yang dimilikinya guru dapat menjalankan tugas dengan baik untuk mencerdaskan peserta didik. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007, guru harus memiliki

kualifikasi akademik minimum diploma 4 (D4) atau sarjana (S1). Secara umum, dalam kurun waktu 2016-2020, persentase guru yang memenuhi kualifikasi diploma 4 (D4) atau sarjana (S1) mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, persentase guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi diploma 4 (D4) atau sarjana (S1) sebesar 92,46%, dan persentase guru SMP/MTs sebesar 95,65%. Untuk data guru SMA/MA yang memenuhi kualifikasi diploma 4 (D4) atau sarjana (S1) pada tahun 2019, sudah menjadi kewenangan provinsi.

Gambar 2.42
Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Kota Tarakan Tahun 2016-2020

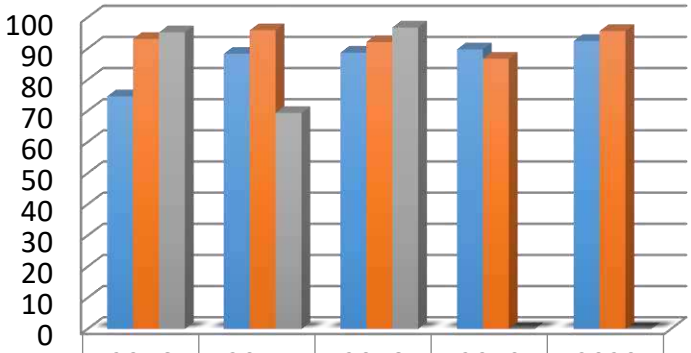

	2016	2017	2018	2019	2020
Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	74.7	88.34	88.73	89.78	92.46
Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	93.13	95.88	92.1	86.75	95.65
Guru SMA/MA yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	95.22	69.32	96.78	0	0

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tarakan, 2021

2. Kesehatan

Perkembangan bidang kesehatan suatu daerah menjadi salah satu tujuan pokok pemerintah daerah dalam mensejahterakan masyarakatnya dalam kerangka peningkatan kualitas sumber daya

manusia yang sehat jasmani dan rohani. Terkait dengan hal tersebut, bidang kesehatan sendiri juga menjadi salah satu indikator dalam menentukan keberhasilan pembangunan suatu daerah dari segi fasilitas, sarana prasarana, pemerataan kesehatan, hingga tingkat kesehatan penduduk suatu wilayah.

1) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup

Angka kematian bayi (AKB) menggambarkan banyaknya kematian bayi berusia di bawah satu tahun per 1.000 kelahiran hidup pada suatu tahun tertentu. Penyebab kematian bayi dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu karena faktor endogen (faktor dari dalam) dan eksogen (faktor dari luar). Faktor endogen merupakan faktor- faktor yang dibawa bayi sejak lahir yang diperoleh pada saat konsepsi atau selama kehamilan. Faktor eksogen merupakan faktor-faktor yang diakibatkan oleh pengaruh lingkungan luar. AKB dapat menjadi salah satu indikator penting dalam merepresentasikan kondisi kesehatan masyarakat.

Tabel 2.41
Angka Kematian Bayi di Kota Tarakan Tahun 2016 - 2020

INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah kematian bayi (umur <1 tahun)	Orang	5	2	2	3	0
Jumlah kelahiran hidup	Orang	3920	4184	4390	4700	4810
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	per 1.000 kelahiran hidup	1.28	0.48	0,46	0.63	0

Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

Berdasarkan tabel di atas, angka kematian bayi di Kota Tarakan tahun 2016 - 2020 menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun, pada tahun 2016 mencapai 1,28 per 1.000

kelahiran hidup dimana ada 5 kasus bayi meninggal. Namun pada tahun berikutnya sampai dengan Tahun 2020 jumlah kasus kematian bayi hanya 2 kasus atau 0,46 per 1.000 kelahiran hidup. Hal ini menandakan keberhasilan pemerintah menekan jumlah angka kematian bayi. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan kualitas kesehatan masyarakat.

2) Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup

Angka kematian balita menggambarkan banyaknya kematian balita berusia di bawah lima tahun per 1.000 kelahiran hidup pada suatu tahun tertentu. Berdasarkan pengertiannya angka kematian balita sendiri memiliki arti bahwa suatu kejadian atau kematian anak yang berusia antara 0-5 tahun.

Tabel 2.42
Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup
Di Kota Tarakan Tahun 2016 – 2020

INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah kematian balita (umur <5 tahun)	Orang	11	0	2	7	5
Jumlah kelahiran hidup	Orang	3920	4184	4390	4700	4810
Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	per 1.000 kelahiran hidup	3/1000KH	0/1000KH	0/1000KH	1/1000KH	1/1000KH

Sumber: Profil Dinas Kesehatan, 2021

Berdasarkan tabel di atas, Angka Kematian Balita di Kota Tarakan secara umum bersifat fluktuatif. Angka Kematian Balita tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 3 per 1.000 penduduk atau terdapat 11 kasus balita meninggal baik yang disebabkan penyakit menular, penyakit tidak menular, dan lainnya. Sedangkan

angka kematian balita terendah terjadi pada tahun 2017 sebesar 0. Hal ini menunjukkan pemerintah mampu mencanangkan program-progam yang diupayakan mampu mengoptimalkan kesehatan yang ada pada masyarakat. Salah satu program yang sampai kini terus dicanangkan oleh Dinas Kesehatan ialah pemberantasan dan penanggulangan penyakit.

3) Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan angka yang dihitung berdasarkan kematian yang terjadi pada ibu karena peristiwa kehamilan, persalinan, dan masa nifas per 100.000 kelahiran hidup. Indikator AKI dapat dipengaruhi status kesehatan secara umum, pendidikan, pelayanan selama antenatal (K4), dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

Tabel 2.43
Angka Kematian Ibu Melahirkan di Kota Tarakan
Tahun 2016 – 2020

INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah ibu hamil yang meninggal krn hamil, bersalin dan nifas	Orang	4	3	7	5	2
Jumlah kelahiran hidup	Orang	3920	4184	4390	4699	4810
Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	per 100.000 kelahiran hidup	102/100.000 KH	72/100.000 KH	159/100.000 KH	106/100.000 KH	42/100.000 KH

Sumber: Profil Dinas Kesehatan, 2021

Berdasarkan tabel di atas, angka kematian ibu melahirkan di Kota Tarakan tahun 2016 - 2020 bersifat fluktuatif dari tahun ke

tahun, dengan kecenderungan menurun. Kasus kematian ibu melahirkan pada tahun 2016 menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2017, perkembangan yang baik ditunjukkan dengan penurunan AKI yang signifikan, menjadi 72 per 100.000 kelahiran hidup. Akan tetapi, peningkatan AKI kembali terjadi pada tahun 2018 menjadi 159 per 100.000 kelahiran hidup, yang menunjukkan kondisi derajat kesehatan terutama ibu melahirkan yang menurun. Namun menurun ditahun 2020 yaitu 42 per 100.000 kelahiran hidup.

Angka kematian ibu yang cenderung mengalami peningkatan dapat disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya ibu hamil tidak pernah ANC rutin di Puskesmas, pemeriksaan kehamilan diduga hanya dilakukan pada saat menjelang melahirkan saja sehingga meningkatkan risiko bagi ibu dan bayi. Selain itu, adanya penyakit menular juga menyebabkan menurunnya kesehatan ibu, serta Program Perencanaan Pertolongan dan Penanganan Komplikasi (P4K) yang digerakkan oleh kader belum optimal sehingga masih memungkinkan adanya ibu hamil yang tidak terpantau kesehatannya.

Jumlah kematian ibu melahirkan meningkat drastis dibandingkan tahun sebelumnya, kemungkinan disebabkan tidak disiplinnya ibu dalam memeriksakan kesehatan selama kehamilan, sehingga terdapat penyakit-penyakit penyerta yang tidak terdeteksi selama kehamilan berlangsung dan menyebabkan semakin meningkatnya resiko kematian.

4) Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Posyandu merupakan wadah peran serta masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasarnya, sehingga diharapkan strategi operasional pemeliharaan dan

perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini, dapat dilakukan di setiap posyandu. Pembentukan posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan puskesmas agar pendekatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih tercapai. Posyandu di Kota Tarakan dibedakan menjadi 4 macam, yaitu posyandu pratama, madya, purnama, dan mandiri. Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat, dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Hal tersebut ditujukan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat, dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Tabel 2.44
Rasio Posyandu Per Satuan Balita di Kota Tarakan
Tahun 2016 - 2020

INDIKATOR	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah posyandu	177	148	148	147	149
Jumlah balita	24.650	24.771	25.247	20.719	24.580
Rasio posyandu per satuan balita	7,18	5,97	5,86	7,09	6,06

Sumber: Profil Dinas Kesehatan, 2021

Berdasarkan Tabel di atas, rasio posyandu per satuan balita di Kota Tarakan cenderung mengalami penurunan, terutama pada tahun 2018. Pada tahun 2018, rasio posyandu per satuan balita sebesar 5,86, yang artinya setiap 1.000 balita dilayani oleh 5 posyandu. Kecenderungan rasio yang menurun menunjukkan adanya penurunan pada layanan kesehatan bagi balita di posyandu yang tersebar di 20 kelurahan.

5) Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk

Puskesmas, poliklinik dan Puskesmas Pembantu merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama saat ini dimana Puskesmas menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat.

Rasio sarana kesehatan seperti Puskesmas, dan poliklinik terhadap jumlah penduduk dan sebarannya memberikan data tentang tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Indikator rasio puskesmas per 100.000 penduduk adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui keterjangkauan penduduk terhadap puskesmas.

Tabel 2.45
Rasio Puskesmas, Klinik, Pustu per Satuan Penduduk
Tahun 2016-2020

INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah puskesmas	Unit	7	7	7	6	6
Jumlah poliklinik/klinik	Unit	4	4	6	8	6
Jumlah pustu	Unit	2	2	2	2	2
Jumlah penduduk	Jiwa	246.496	247.663	259.001	245.784	253.791
Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	**Per 100.000 Jiwa**	**5,27**	**5,25**	**5,79**	**6,51**	**5,51**

Sumber: Profil Dinas Kesehatan, 2021

6) Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Rumah sakit

sebagai sarana pelayanan kesehatan yang memiliki tenaga medis profesional serta sarana kedokteran yang permanen, dan asuhan keperawatan yang berkesinambungan. Semakin banyak rumah sakit yang tersedia, akan semakin mudah bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan, sehingga rumah sakit memiliki peranan penting dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Tabel 2.46
Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Kota Tarakan
Tahun 2016-2020

INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah rumah sakit	Unit	3	3	3	4	4
Jumlah penduduk	Jiwa	244.180	253.030	262.020	270.890	280.215*
Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	**Per 1.000 penduduk**	**0,012**	**0,012**	**0,012**	**0,015**	**0,014**

Sumber: Profil Dinas Kesehatan, 2021

Berdasarkan tabel di atas, data rasio rumah sakit per satuan penduduk menunjukkan tingkat cakupan pelayanan kesehatan berupa rumah sakit terhadap jumlah penduduk di wilayah tertentu. Berdasarkan data di atas, rasio rumah sakit per satuan penduduk di Kota Tarakan dalam periode tahun 2016–2020 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, rasio rumah sakit sebesar 0,15, berarti bahwa untuk setiap 1.000 penduduk dilayani 0,015 rumah sakit, atau setiap 100.000 penduduk dilayani 1,47 rumah sakit, atau setiap 1 rumah sakit melayani 68.027 jiwa.

7) Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Dokter umum dan dokter spesialis yang dimaksud merupakan dokter yang memberikan pelayanan kesehatan di Kota Tarakan, baik berstatus PNS maupun bukan. Keberhasilan

pelayanan kesehatan di Kota Tarakan tidak terlepas dari peran tenaga medis dokter. Jumlah dokter dihitung berdasarkan Surat Izin Praktik (SIP) dokter di Kota Tarakan.

Tabel 2.47
Rasio Dokter Per Satuan Penduduk di Kota Tarakan Tahun 2016-2020

INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah dokter umum	Orang	55	85	90	81	150
Jumlah dokter spesialist	Orang	35	67	67	55	68
Jumlah dokter gigi	Orang	18	13	11	23	21
Jumlah dokter gigi spesialist	Orang	3	6	6	3	3
Jumlah penduduk	Jiwa	246.496	247.663	259.001	245.784	253,791
Rasio Dokter per satuan penduduk	**Per 1.000 Penduduk**	**0,45**	**0,69**	**0,67**	**0,66**	**0,95**

Sumber: Profil Dinas Kesehatan, 2021

Berdasarkan tabel diatas rasio dokter per satuan penduduk di Kota Tarakan dalam kurun waktu 2016-2020 cenderung mengalami penurunan pada tahun 2016, dan meningkat pada tahun 2017 namun menurun lagi ditahun 2018. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 81/Menkes/SK/I/2004, rasio dokter ditetapkan dengan perbandingan 1: 5000 sampai 1: 2.500 (satu dokter melayani 2.500 – 5.000 penduduk). Berdasarkan hal tersebut, rasio dokter di Kota Tarakan telah memenuhi perbandingan tersebut.

8) Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Salah satu jenis tenaga kesehatan adalah tenaga medis. Tenaga medis terdiri dari bidan, perawat, farmasi, dan tenaga kesehatan lainnya.

Tabel 2.48
Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk di Kota Tarakan Tahun 2016 - 2020

INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Tenaga kebidanan	Orang	89	114	108	97	230
Jumlah Tenaga keperawatan	Orang	483	529	529	323	907
Jumlah Tenaga kefarmasian	Orang	67	71	71	78	229
Jumlah Tenaga kesehatan lainnya	Orang	168	163	163	185	290
Jumlah penduduk	Jiwa	246.496	247.663	259.001	245.784	253.791
Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk	**Per 1.000 Penduduk**	**3,27**	**3,54**	**3,36**	**2,78**	**6,53**

Sumber: Profil Dinas Kesehatan, 2021

Berdasarkan tabel di atas, rasio tenaga medis di Kota Tarakan memiliki angka yang fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2020, rasio tenaga medis sebesar 6,53 per 1.000 penduduk, artinya setiap 1.000 penduduk ditangani oleh 6 tenaga medis.

9) Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani

Komplikasi kebidanan merupakan kesakitan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas yang mengancam jiwa ibu dan/atau bayi.

Komplikasi dalam kehamilan meliputi abortus, hyperemesis gravidarum, perdarahan per vaginam, hipertensi dalam kehamilan (preeklamsia, eklamsia), kehamilan lewat waktu, ketuban pecah. Komplikasi dalam persalinan meliputi kelainan letak/presentasi janin, partus macet/distosia, hipertensi dalam kehamilan (preeklamsia, eklamsia), perdarahan pasca persalinan, infeksi berat/sepsis, kontraksi dini/persalinan premature, kehamilan ganda. Komplikasi dalam nifas meliputi hipertensi dalam kehamilan (preeklamsia, eklamsia), infeksi nifas, perdarahan nifas.

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang mendapat penanganan definitif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan (Polindes, Puskesmas, Puskesmas PONED, Rumah Bersalin, RSIA/RSB, RSU, RSU PONEK). Penanganan definitif adalah penanganan/pemberian tindakan terakhir untuk menyelesaikan permasalah setiap kasus komplikasi kebidanan. Indikator ini mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara profesional kepada bumil, bulin, dan bufas dengan komplikasi.

Tabel 2.49
Jumlah Komplikasi Kebidanan Yang Mendapat Penanganan Di Kota Tarakan Tahun 2016 – 2020

INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan	Orang	451	404	236	254	139
Jumlah ibu hamil dengan komplikasi kebidanan	Orang	1.101	1.085	1.085	1.094	1.039
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	**Persen**	**40,96**	**37,23**	**21,75**	**23,22**	**13,38**

Sumber: Profil Dinas Kesehatan, 2021

Berdasarkan Tabel di atas, cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di Kota Tarakan dalam periode tahun 2016– 2020 menunjukkan kecenderungan menurun. Cakupan komplikasi kebidanan paling tinggi yaitu pada tahun 2016, sebesar 40,96 persen, sedangkan paling rendah pada tahun 2018, sebesar 21,75 persen. Semakin besar persentase menunjukkan bahwa semakin besar penanganan yang diberikan kepada ibu dengan komplikasi kebidanan. Jumlah penanganan komplikasi kebidanan paling banyak yaitu pada tahun 2016, sebesar 451 orang, sedangkan paling sedikit pada tahun 2020, sebesar 139 orang. Dengan demikian, semakin besar terselesaikannya (penanganan) komplikasi kebidanan menunjukkan semakin baik kualitas dan kuantitas bidan dalam menangani masalah kebidanan.

10) Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Persalinan yang ditolong oleh tenaga medis seperti dokter atau bidan dianggap lebih baik daripada yang ditolong dukun atau lainnya karena dapat menggambarkan tingkat kemajuan pelayanan kesehatan, terutama pada saat kelahiran. Data penolong kelahiran merupakan salah satu indikator kesehatan terutama yang berhubungan dengan tingkat kesehatan ibu dan anak maupun pelayanan kesehatan secara umum. Proporsi pertolongan kelahiran oleh tenaga kesehatan terlatih atau cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan merupakan perbandingan antara persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih, seperti dokter, bidan, perawat, dan tenaga medis lainnya dengan jumlah persalinan seluruhnya yang dinyatakan dalam persentase. Dengan indikator ini dapat diperkirakan proporsi persalinan yang ditangani tenaga kesehatan dan ini

menggambarkan kemampuan manajemen program KIA dalam pertolongan persalinan sesuai standar.

Tabel 2.50
Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Di Kota Tarakan Tahun 2016 – 2020

INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Ibu Bersalin	Orang	5.254	5.178	5.177	4688	4.950
Jumlah ibu Bersalin yang ditolong tenaga kesehatan	Orang	3.926	4.229	4.385	5215	4.812
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	**Persen**	**74,72**	**81,67**	**84,70**	**89,89**	**97,21**

Sumber: Profil Dinas Kesehatan, 2021

11) Cakupan kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)

Universal Child Immunization (UCI) merupakan tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0 – 11 bulan), ibu hamil, wanita usia subur, dan anak sekolah tingkat dasar. Imunisasi dasar lengkap pada bayi meliputi: 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis polio, 4 dosis hepatitis B, 1 dosis campak. Imunisasi memberikan konstribusi besar dalam meningkatkan *Human Development Index* terkait dengan angka harapan hidup. Selain itu, juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesehatan. Semakin besar persentase maka semakin besar pula cakupan desa/ kelurahan *Universal Child Immunization*.

Tabel 2.51
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Di Kota Tarakan Tahun 2016 – 2020

INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah kelurahan UCI	Unit	9	18	17	19	15
Jumlah kelurahan	Unit	20	20	20	20	20
Cakupan Desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)	Persen	45	90	85	95	75

Sumber: Profil Dinas Kesehatan, 2021

Berdasarkan tabel di atas, cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunization (UCI*) di Kota Tarakan dalam periode tahun 2016– 2019 berkisar antara 45-90%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Tarakan telah mendapatkan pelayanan imunisasi baik melalui posyandu, puskesmas, maupun rumah sakit. Kondisi ini harus ditingkatkan untuk mendapatkan cakupan desa/ kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) secara menyeluruh (100 persen) setiap tahunnya.

12) Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Jumlah Balita Gizi Baik Peranan ibu sangat penting dalam mendukung upaya mengatasi masalah gizi, terutama pada asupan gizi keluarga, mulai dari penyiapan makanan, pemilihan bahan makanan, sampai menu makanan. Ibu yang memiliki status gizi baik akan melahirkan anak yang bergizi baik. Anak yang bergizi baik menjadi aset dan investasi bangsa masa depan.

Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan merupakan perbandingan antara jumlah balita gizi buruk

(berdasarkan kriteria berat badan per umur) yang mendapat perawatan dibagi jumlah seluruh balita gizi buruk (berdasarkan kriteria berat badan per umur) yang ditemukan. Semakin besar persentase cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan menunjukkan semakin baik pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat, baik prasarana maupun saran kesehatan. Perkembangan cakupan balita gizi buruk di Kota Tarakan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.52
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan
Di Kota Tarakan Tahun 2016 – 2020

INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan disarana pelayanan kesehatan	Anak	24	27	78	16	21
Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan	Anak	24	27	78	16	21
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Persen	100	100	100	100	100

Sumber: Profil Dinas Kesehatan, 2021

Berdasarkan tabel di atas, kasus balita gizi buruk yang ditemukan di Kota Tarakan dalam kurun waktu 2016 – 2020 seluruhnya telah mendapatkan perawatan (100 persen). Jika dibandingkan dengan Standar Pelayanan Minimal sebesar 100 persen, maka cakupan balita gizi buruk di Kota Tarakan sudah mampu mencapainya. Pada tahun 2020, jumlah balita gizi buruk yang ditemukan sebesar 21 anak, yang seluruhnya mendapatkan perawatan. Beberapa upaya untuk meningkatkan status gizi dan

kesehatan masyarakat telah dilakukan antara lain melalui Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Reproduksi, Perbaikan Gizi Masyarakat dan PMT (Pemberian Makanan Tambahan), Pemulihan Ibu Hamil KEK (Kekurangan Energi Kronis) dan PMT Balita Gizi Buruk dan Kurang, serta Peningkatan Pembinaan terhadap Posyandu.

13) Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA adalah jumlah penderita baru TBC BTA yang ditemukan dan diobati di suatu wilayah kerja selama satu tahun dibanding dengan jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA dalam kurun waktu yang sama. Penemuan TBC BTA adalah penemuan pasien baru melalui pemeriksaan dahak sewaktu pagi dan sewaktu (SPS) dan diobati di unit pelayanan kesehatan dalam suatu wilayah kerja pada waktu tertentu. Perkembangan cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA di Kota Tarakan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.53
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita TBC BTA Di Kota Tarakan Tahun 2016 – 2020

INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati	Orang	491	253	338	389	251
Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+)	Orang	236	536	530	544	516
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Persen	48.01	47.20	63,77	71,51	48,64

Sumber: Profil Dinas Kesehatan, 2021

Berdasarkan Tabel di atas, cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA di Kota Tarakan dalam periode tahun 2016– 2020 mengalami fluktuatif dimana pada tahun 2018 mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut disebabkan jumlah penderita baru TBC BTA yang ditemukan dan diobati semakin besar, sedangkan jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA semakin berkurang. Pada tahun 2017, mengalami penurunan dibanding 2016 dimana cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA sebesar 48,01 persen, yang berarti bahwa jumlah penderita baru TBC BTA yang ditemukan dan diobati besar sementara perkiraan penemuan penderita TBC BTA + kecil. Rendahnya penemuan kasus TB BTA + disebabkan karena:

- Aktrif promotif belum berfungsi dan berjalan optimal
- Diagnosa TB dengan pemeriksaan dahak di laboraturium hanya dengan menggunakan foto Thorax
- Masih ada Kasus TB BTA + yang diobati di RSUD Tarakan tidak dilaporkan

14) Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wilayah kerja selama satu tahun dan jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama. Perkembangan cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD di Kota Tarakan disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 2.54
Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita DBD Di Kota Tarakan Tahun 2016 – 2020

INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP	Jiwa	545	140	124	741	119
Jumlah penderita DBD yang ditemukan	Jiwa	545	140	124	741	119
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Profil Dinas Kesehatan, 2021

Berdasarkan tabel di atas, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD di Kota Tarakan dalam kurun waktu 2016 – 2020 telah mencapai 100 persen, berarti seluruh penderita penyakit DBD yang ditemukan sudah ditangani. Meskipun secara penanganan sudah 100%, masalah DBD ini harus menjadi perhatian. Jika dilihat dari jumlah penderita DBD yang ada, terjadi fluktuasi peningkatan dan penurunan pada tahun 2018 sebanyak 124 orang. Jumlah penderita DBD yang ditemukan dan diobati pada tahun 2020, sebanyak 119 jiwa.

Diperlukan upaya pemberantasan DBD untuk mengurangi kasus penderita DBD. Upaya yang harus dilakukan antara lain peningkatan kegiatan surveilans penyakit dan surveilans vector, diagnosis dini dan pengobatan dini, serta peningkatan upaya pemberantasan vektor penular penyakit DBD. Metode yang tepat

guna untuk mencegah DBD adalah Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) melalui 3M plus (Menguras, Menutup dan Mengubur) plus menabur larvasida, penyebaran ikan pada tempat penampungan air serta kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat mencegah/memberantas nyamuk Aedes berkembang biak.

15) Cakupan Kunjungan Bayi

Cakupan kunjungan bayi merupakan cakupan bayi yang mendapatkan pelayanan minimal 4 kali, yaitu 1 kali pada umur 29 hari sampai 2 bulan, 1 kali pada umur 3 sampai 5 bulan, 1 kali pada umur 6-8 bulan, dan 1 kali pada umur 9-11 bulan sesuai standar di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Dengan indikator ini dapat diketahui efektivitas, *continuum of care* dan kualitas pelayanan kesehatan bayi. Semakin besar persentase kunjungan bayi menunjukkan semakin efektif, serta semakin baik continuum of care dan kualitas pelayanan kesehatan bayi.

Tabel 2.55
Cakupan Kunjungan Bayi di Kota Tarakan Tahun 2016 – 2020

INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	Bayi	2600	3049	4008	3.828	4.714
Jumlah seluruh bayi lahir hidup	Bayi	3920	4184	4390	4.700	2.196
Cakupan kunjungan bayi	Persen	66,33	72,87	91,30	81,45	46,58

Sumber: Profil Dinas Kesehatan, 2021

Data cakupan kunjungan bayi di Kota Tarakan mengalami fluktuasi setiap tahunnya, cakupan kunjungan bayi paling tinggi pada tahun 2019, sebesar 81,45 persen, sedangkan paling rendah

pada tahun 2016 sebesar 66,33 persen. Sementara itu, rata-rata jumlah kunjungan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar 65,72 persen. Tahun 2020 cakupan kunjungan bayi menurun menjadi sebesar 46,58%. Hal ini disebabkan tertundanya jadwal kunjungan akibat pandemi.

Jumlah kunjungan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar memiliki kecenderungan meningkat, begitu pula dengan jumlah bayi lahir. Penurunan jumlah kunjungan bayi tersebut disebabkan karena ada perbedaan kriteria jumlah kunjungan bayi dan kunjungan ke layanan kesehatan lain yang tidak terlaporkan.

16) Cakupan Puskesmas

Puskesmas merupakan suatu kesatuan organisasi fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat. Cakupan Puskesmas dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah puskesmas dan jumlah seluruh kecamatan di Kota Tarakan. Semakin besar persentase cakupan puskesmas maka semakin baik pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.

Tabel 2.56
Cakupan Puskesmas di Kota Tarakan Tahun 2016 – 2020

INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah puskesmas	Unit	7	7	7	7	7
Jumlah kecamatan	Unit	4	4	4	4	4
Cakupan Puskesmas	Persen	175%	175%	175%	175%	175%

Sumber: Profil Dinas Kesehatan, 2021

Berdasarkan Tabel di atas, cakupan puskesmas di Kota Tarakan dalam periode tahun 2016 – 2020 menunjukkan perkembangan yang tetap dengan cakupan puskesmas mencapai 175 persen. Hal tersebut menunjukkan seluruh kecamatan sudah tersedia puskesmas, dimana Kecamatan Tarakan Barat terdiri dari 1 Puskesmas, Kecamatan Tarakan Tengah ada 1 Puskesmas, Kecamatan Tarakan Utara 2 Puskesmas sedangkan Kecamatan Tarakan Timur ada 3 Puskesmas karena di Kecamatan Tarakan Timur ada 7 Kelurahan. Tersedianya puskesmas di setiap kecamatan memberikan kemudahan akses terhadap layanan kesehatan terdekat dan terjangkau bagi masyarakat. Selain itu terdapat dua puskesmas pembantu. Adapun Puskesmas pembantu berada di wilayah Kelurahan Mamburungan Timur Kecamatan Tarakan Timur dan Kelurahan Karang Harapan Kecamatan Tarakan Barat.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Di Kota Tarakan terdapat tiga kelas jalan yaitu kelas IIIa, IIIb, dan IIIc yang merupakan tanggung jawab atau wewenang dari pemerintah Kota Tarakan. Jalan merupakan prasarana pengangkutan yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian suatu daerah. Untuk meningkatkan usaha pembangunan dituntut pula peningkatan pembangunan jalan guna memudahkan akses dan mobilitas penduduk serta memperlancar lalu lintas barang dari suatu tempat ke tempat yang lain.

Jalan sebagai sarana penunjang transportasi memiliki peran penting khususnya untuk transportasi darat.

Tabel 2.57
Kondisi Jaringan Jalan Kota Tarakan Tahun 2016-2021

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0,78	0,72	0,55	0,65	0,70
Panjang jalan dalam kondisi baik	185.220	166.477	181.649	184.712	162.961
Panjang jalan seluruhnya	234.460	231.219	330.078	281.991	232.558

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2021

Panjang jalan di Kota Tarakan dari tahun 2016 sampai tahun 2018 mengalami peningkatan sepanjang 234.460 km menjadi 330.078 km. panjang jalan mengalami penurunan di tahun 2020 sebesar 232.558 km. Hal ini dikarenakan, beberapa area jalan, bukan lagi menjadi kewenangan Kota Tarakan, namun kewenangan provinsi. Apabila dilihat dari kondisi jalan, 162.961 km kondisinya baik.

Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik Kota Tarakan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 terlihat dan tercatat dengan trend dinamis. Hal ini dapat terlihat bahwa pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 0,78 dan pada tahun 2017 tercatat menjadi 0,72 dan menjadi 0,55 di tahun 2018, dan kembali naik menjadi 0,70 di tahun 2020.

2) Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk (Meter/ Penduduk)

Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk dapat memberikan perbandingan kapasitas jalan terhadap jumlah penduduk. Rasio ini dapat digunakan untuk melihat kebutuhan panjang jalan berbanding dengan pertumbuhan penduduk.

Proporsi rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk di Kota Tarakan dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 2.58
Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk Kota Tarakan Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Panjang Jalan	234.460	231.219	330.078	281.991	232.558
Jumlah Penduduk	244.185	253.026	262.025	270.894	280.215*
Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk	0.0010	0.0009	0.0011	0.0010	0.0010

**) Angka Sementara*
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2021

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk di Kota Tarakan relatif tidak mengalami perkembangan yang berarti. Rasio tersebut mengalami perubahan yang tidak signifikan dari tahun 2016 sampai dengan 2020 yakni 0,001. Pada tahun 2020, rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk menjadi 0,0010.

3) Persentase Kawasan Pemukiman Yang Yang Belum Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4

Kawasan permukiman yang dimaksud dalam hal ini adalah kawasan permukiman yang memiliki lebar jalan lingkungan masih di bawah 2 meter. Berdasarkan data eksisting yag diperoleh maka pada tahun 2017 terdapat 177.000 kelompok kawasan permukiman di Kota Tarakan. Sedangkan kawasan permukiman yang masih memiliki lebar jalan di bawah 2 meter terdapat 40.000 kawasan. Berdasarkan data eksisting tersebut maka diketahui bahwa persentase kawasan permukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4 (empat) di Kota Tarakan adalah sebesar 22,6%.

4) Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/ Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 M)

Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase dengan lebar minimal 1,5 meter di Kota Tarakan terus mengalami penambahan. Pada tahun 2016 panjang jalan dengan kondisi tersebut mencapai 1.655 meter dan terus berkembang hingga tahun 2020 mencapai 4.440 meter. Permasalahan yang terjadi adalah panjang jalan tersebut secara proporsional masih sangat rendah persentase terhadap panjang jalan seluruhnya di Kota Tarakan. Berikut perkembangan persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase dengan lebar 1,5 meter:

Tabel 2.59
Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar Dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 M) Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Panjang jalan dengan trotoar dan drainase lebar 1,5m	1.655	1.797	4.440	4.440	4.440
Panjang jalan seluruhnya	234.460	231.219	280.650	232.560	232.560
Persentase	0,71%	0,78%	1,58%	1,91%	1,91%

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tarakan, 2021

5) Persentase Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar

Sempadan sungai merupakan kawasan yang seharusnya tidak terdapat bangunan liar. Kawasan sempadan sungai dapat dimanfaatkan untuk pemeliharaan dan kontrol terhadap sungai misalnya dengan membangun jalan inspeksi. Kondisi bangunan liar yang terdapat di kawasan sempadan sungai tentunya akan menghambat proses pemeliharaan dan control terhadap jaringan sungai dimaksud. Kondisi ini seringkali menyebabkan terjadinya

banjir dari luapan air sungai. Kawasan sempadan sungai di Kota Tarakan sebagian juga masih terdapat bangunan liar. Berikut adalah persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar di Kota Tarakan.

Gambar 2.43
Persentase Sempadan Sungai Terdapat Bangunan Liar Kota Tarakan Tahun 2016-2020

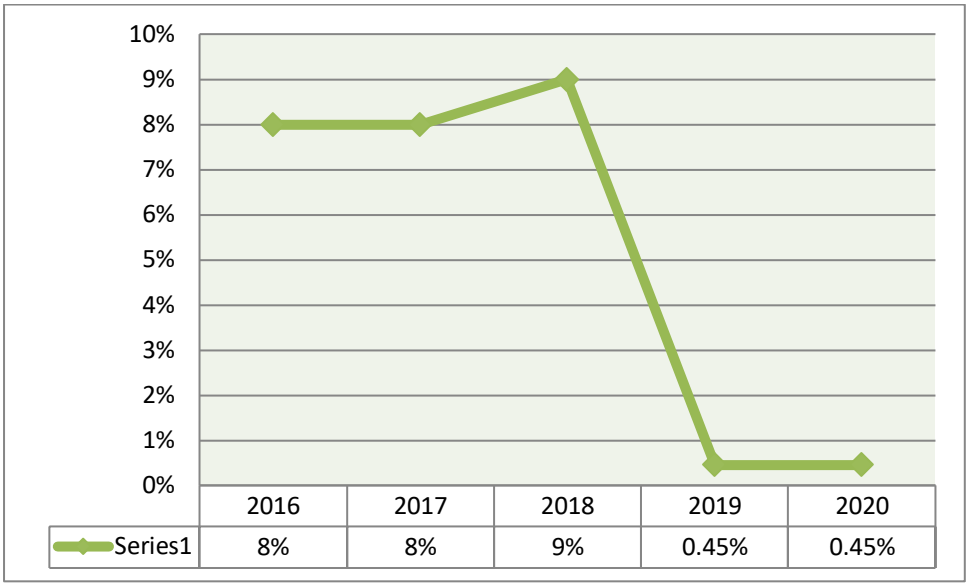

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tarakan, 2018

Melalui berbagi upaya baik yang bersifat persuasif maupun penegakkan dan penguatan hokum melalui perda maka trend pemanfaatan sempadan sungai untuk bangunan liar di Kota Tarakan cenderung menurun.

6) Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat

Drainase di Kota Tarakan merupakan salah satu sarana yang penting dalam rangka untuk pengendalian banjir. Kota Tarakan merupakan salah satu daerah rawan genangan air ketika terjadi

hujan deras dan air pasang. Drainase dalam kondisi baik atau saluran air tidak terseumbat di Kota Tarakan dapat dikatakan dalam kondisi baik dari sisi persentasenya. Permasalahan yang ada adalah kapasitas drainase yang ada masih kurang untuk menampung volume air ketika terjadi hujan deras dan pasang air laut secara bersamaan. Berikut kondisi persentase drainase dalam kondisi baik di Kota Tarakan dari tahun 2016 sampai dengan 2020.

Gambar 2.44
Persentase Drainase dalam Kondisi Baik Kota Tarakan Tahun 2016-2020

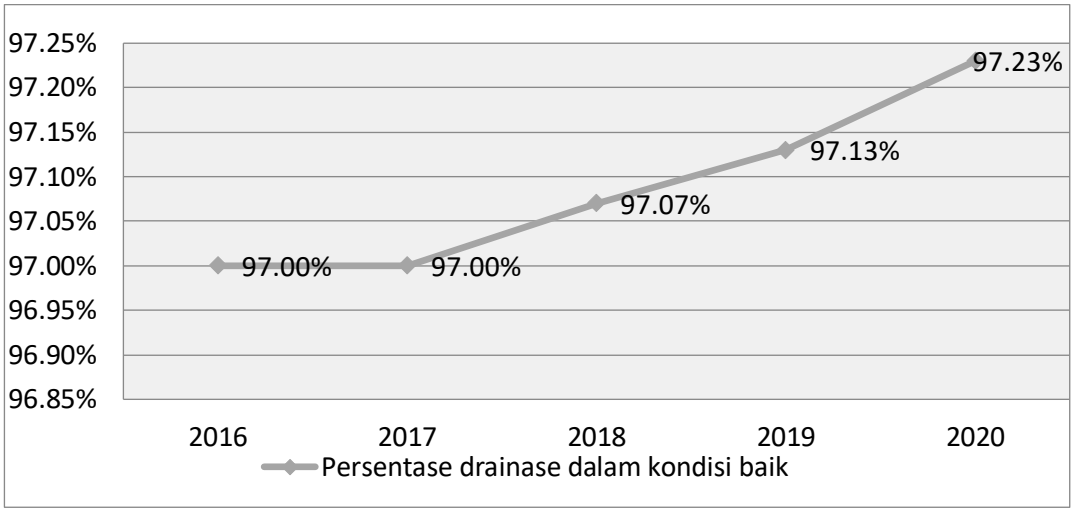

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tarakan, 2021

7) Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah Di Perkotaan

Fasilitas pengurangan sampah di kawasan perkotaan sangat penting untuk disediakan. Hal tersebut dikarenakan kawasan perkotaan merupakan produsen sampah yang paling besar. Dalam rangka upaya untuk mengurangi beban pengolahan sampah di TPA maka fasilitas pengurangan sampah ini dipandang penting. Saat ini Pemerintah Kota Tarakan telah menyediakan beberapa fasilitas pengurangan sampah di kawasan perkotaan. Pada tahun 2016 dan 2017 persentase fasilitas pengurangan sampah di kawasan

perkotaan berada pada besaran 40,93%. Dan meningkat menjadi 98% pada tahun 2020. Trend persentase penyediaan fasilitas pengurangan sampah di Kota Tarakan dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.45
Persentase Fasilitas Pengurangan Sampah Kota Tarakan Tahun 2016-2020

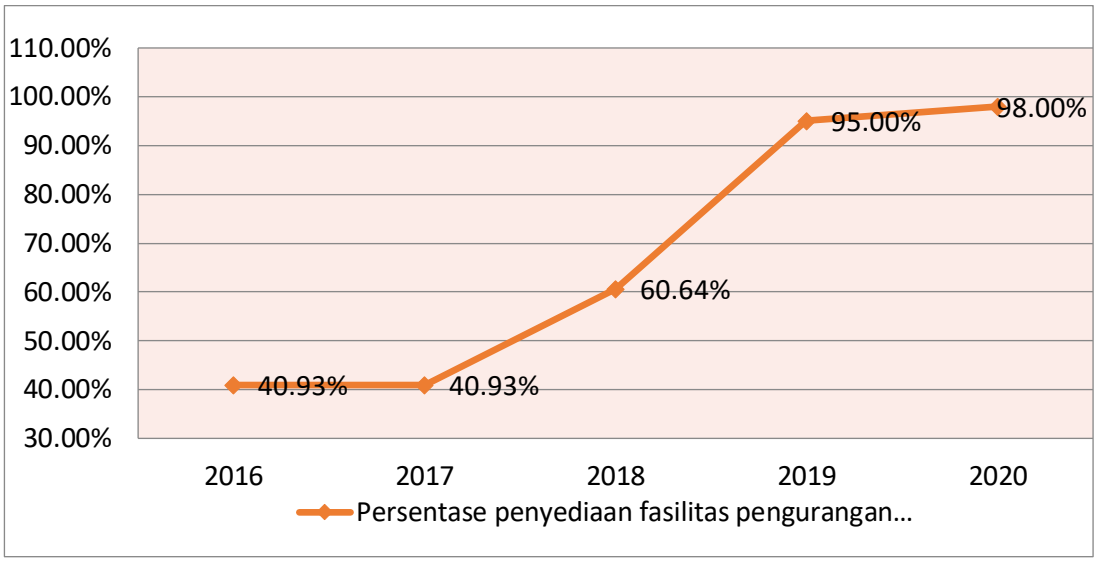

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan, 2021

8) Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tarakan saat ini mempunyai 4 (empat) lokasi instalasi yaitu instalasi Kampung Bugis, instalasi Persemaian, instalasi Kampung Satu, dan instalasi Juata Laut. Berkaitan dengan hal tersebut, air merupakan suatu kekayaan alam yang menjadi kebutuhan manusia secara hakiki. Keadaan prasarana air bersih tampaknya semakin dibutuhkan masyarakat terutama daerah perkotaan. Hal ini disebabkan sumber-sumber air di daerah perkotaan sudah banyak tercemar baik oleh limbah industri maupun limbah rumah tangga. Aksesibilitas air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan mengalami peningkatan dari tahun 2014-2020. Pada

tahun 2014 persentase akses air minum melalui SPAM dengan jaringan perpipaan adalah 48,97%, meningkat di tahun 2015 menjadi 49,13%, dan meningkat lagi di tahun 2016 sebesar 53,59%. Selanjutnya pada tahun 2017 persentase akses air minum melalui SPAM dengan jaringan perpipaan adalah 57,6% dan meningkat di tahun 2018 menjadi 60,59%. Pada tahun 2020 meningkat menjadi 86,62%. Sebenarnya, sistem PDAM Kota Tarakan pada umumnya berada dalam kondisi operasional yang baik. Namun perlu diketahui bahwa pemeliharaan terhadap beberapa pompa kurang memadai sehingga mengurangi kapasitas dan membatasi sambungan baru yang potensial pada daerah-daerah tertentu merupakan solusi terbaik saat ini.

9) Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk

Tempat pemakaman umum merupakan salah satu fasilitas yang harus disediakan oleh suatu kota. Tempat pemakaman umum di Kota Tarakan tersebar di empat kecamatan yang ada. Rasio perbandingan tempat pemakaman umum per satuan penduduk di Kota Tarakan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.60
Rasio Fasilitas Pemakaman Umum per Satuan Penduduk

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio	1 : 3	1 : 3	1 : 3	1:3	1:2

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tarakan 2021

Berdasarkan data di atas tampak bahwa pada tahun 2016 rasio fasilitas tempat pemakaman umum persatuan penduduk adalah 1 : 3, artinya dalam setiap seribu penduduk tersedia tempat pemakaman umum berkapasitas 250 orang. Kondisi ini tidak

berubah selama empat tahun sampai tahun 2019 yaitu 1:3. Atau setiap seribu penduduk tersedia tempat pemakaman umum sejumlah 333 orang. Pada tahun 2020, rasio menurun menjadi 1:2, artinya setiap seribu penduduk tersedia tempat pemakaman umum sejumlah 500 orang.

10) Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan

IMB merupakan salah satu instrument bagi pemerintah daerah untuk dapat mengarahkan dan mengontrol pembangunan di wilayahnya. Melalui kebijakan IMB ini maka evaluasi dan pemanfaatan ruang dapat disesuaikan RTRW kota. Pemerintah Kota Tarakan telah memberikan berbagai program untuk mempermudah pelayanan proses pengurusan IMB. Upaya perbaikan dan kemudahan pelayanan ini nampaknya belum mampu memberikan hasil maksimal jika kita lihat dari rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan yang masih rendah di Kota Tarakan. Berikut adalah data terkait rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan di Kota Tarakan.

Tabel 2.61
Rasio Bangunan ber-IMB di Kota Tarakan

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Bangunan	44.369	44.369	51.994	51.994	51.994
Jumlah Bangunan ber-IMB	733	639	19.670	20.560	21.694
Rasio Bangunan ber-IMB per satuan bangunan	0,017	0,014	0,38	0,396	0,42

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2021

11) Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan

Tutupan lahan merupakan hal yang penting dalam suatu perencanaan kawasan. Tutupan lahan berupa tegakan pepohonan menjadi hal yang penting menjaga kesimbangan lahan terbangun dan lahan tidak terbangun di suatu kawasan. Salah satu metode untuk menghitung dan menganalisa luas kawasan tertutup pepohonan di suatu daerah adalah dengan memanfaatkan citra satelit. Berdasarkan telaahan terhadap pemotretan citra satelit maka rasio tersebut di Kota Tarakan adalah sebagai berikut ini:

Gambar 2.46
Rasio Luas Kawasan Tertutup Pepohonan terhadap Daratan Kota Tarakan Tahun 2016-2020

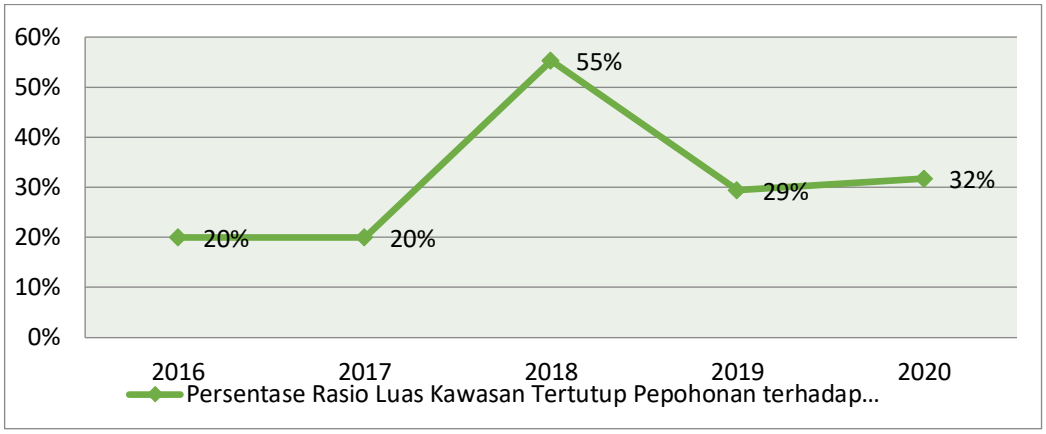

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2021

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1) Rasio Rumah Layak Huni

Rasio rumah layak huni merupakan nilai perbandingan antara jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk secara keseluruhan di suatu daerah. Kondisi rasio rumah layak huni di Kota Tarakan cenderung mengalami peningkatan. Hal tersebut seiring dengan upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Tarakan

dalam penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat. Baik melalui perbaikan rumah tidak layak huni maupun peningkatan cakupan ketersediaan rumah layak huni. Rasio rumah layak huni tahun 2016 sampai tahun 2020 di Kota Tarakan adalah sebagaimana tampak pada tabel berikut:

Tabel 2.62
Rasio Rumah Layak Huni Kota Tarakan Tahun 2016-2020

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio	1 : 5	1 : 5	1 : 5	1 : 4	1 : 4

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tarakan 2021

2) Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi guna menjamin kehidupan masyarakat. Kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik dapat ditingkatkan dengan jalan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni. Pemerintah Kota Tarakan dalam rangka upaya untuk peningkatan cakupan ketersediaan rumah layak huni telah melakukan beberapa program misalnya rehab rumah tidak layak huni, pembangunan dan penyediaan perumahan bagi PNS serta mendorong sektor swasta dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat Kota Tarakan. Kondisi saat ini cakupan ketersediaan rumah layak huni di Kota Tarakan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 cakupan pelayanan tersebut telah mencapai 89,19% dari kebutuhan. Upaya pemenuhan yang terus dilakukan meningkatkan cakupan tersebut menjadi 94,11% pada tahun 2020 seperti yang ditunjukkan pada data berikut:

Gambar 2.47
Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Kota Tarakan Tahun 2016-2020

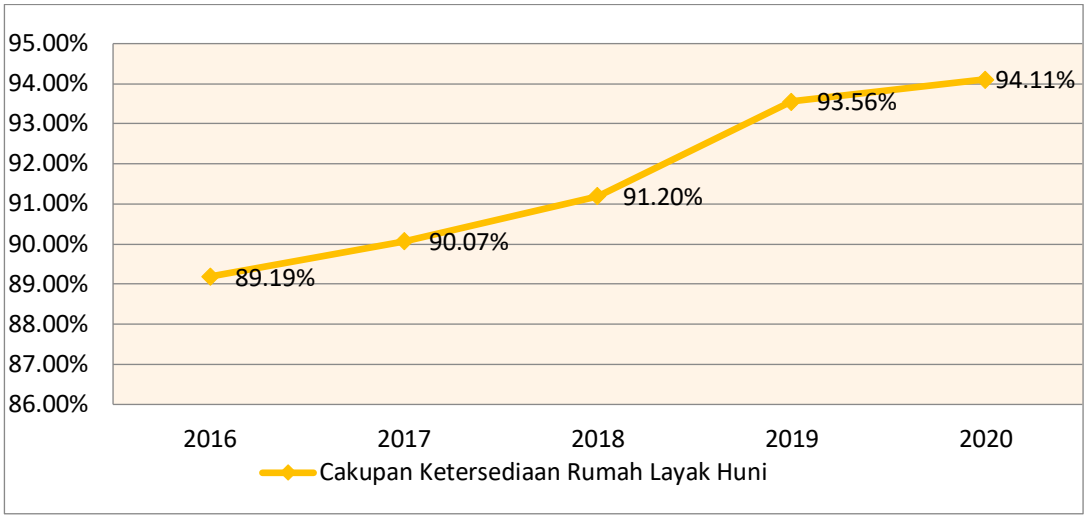

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tarakan, 2021

3) Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau

Cakupan ketersediaan rumah pada data sebelumnya menunjukkan angka yang cukup tinggi. Hal tersebut kita tinjau dari ketersediaan rumah layak huni yang ada. Permasalahan yang ada adalah daya beli masyarakat utamanya MBR tidak mampu menjangkau harga yang ditawarkan untuk sebuah ruamah layak huni. Sehingga di Kota Tarakan masih banyak MBR yang belum memiliki rumah layak huni. Mereka sebagian besar bermukim di daerah permukiman atas laut kawasan pesisir pantai Kota Tarakan. Kondisi ini menyebabkan masih terdapatnya kawasan permukiman kumuh yang relatif luas di Kota Tarakan. Pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk menyediakan perumahan layak huni yang terjangkau bagi MBR. Salah satunya melalui program pembangunan perumahan PNS, rumah bersubsidi yang dapat dimiliki melalui KPR bersubsidi dari lembaga yang ditunjuk pemerintah pusat. Dilihat dari cakupan layanan rumah layak huni

yang terjangkau untuk Kota Tarakan masih sangat rendah dengan trend yang fluktuatif. Berikut data perkembangan cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau di Kota Tarakan.

Gambar 2.48
Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau Kota Tarakan Tahun 2016-2020

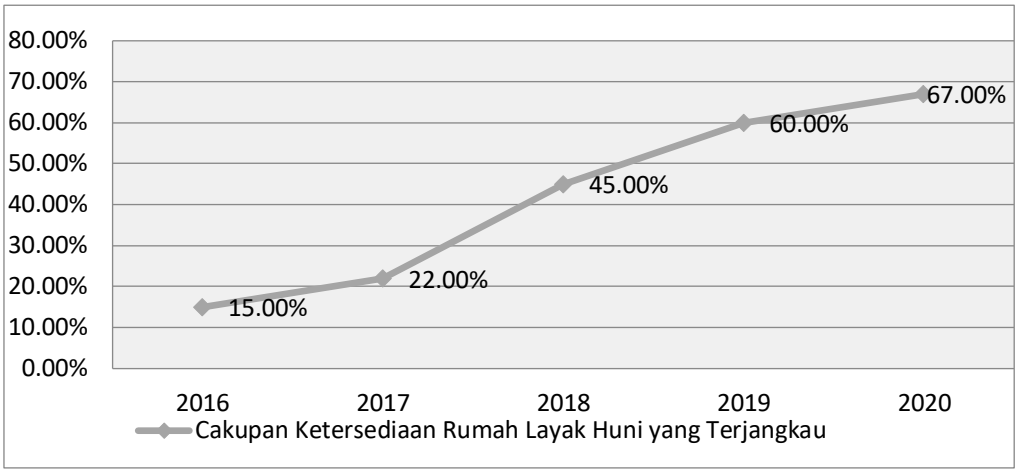

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tarakan, 2021

4) Persentase Pemukiman Yang Tertata

Data yang diperoleh untuk permukiman yang tertata adalah data pada tahun 2017-2020. Data time series yang diharapkan dapat menunjukkan trend tidak diperoleh. Pada tahun 2017 menunjukkan bahwa luas permukiman yang tertata di Kota Tarakan adalah 85% dari total keseluruhan luas permukiman. Semakin meningkat di tahun 2020 menjadi 93%.

Kondisi permukiman yang tumbuh secara sporadis menyebabkan masyarakat membangun hunian sesuai keinginan mereka. Aturan hokum terkait IMB sebenarnya merupakan instrument yang dapat digunakan untuk mengatur tumbuhnya bangunan dan hunian masyarakat. Namun melihat rendahnya nilai rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan maka dapat kita simpulkan bahwa aturan ini belum dapat maksimal dijalankan di

lapangan. Perlunya upaya untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih intensif di Kota Tarakan sehingga pertumbuhan permukiman yang ada dapat tertata dengan baik.

5) Cakupan Lingkungan Yang Sehat Dan Aman Yang Didukung Dengan PSU

Cakupan lingkungan yang sehat dan aman serta didukung dengan PSU di Kota Tarakan saat ini telah mencapai 100% dari tahun 2015-2020. PSU merupakan salah satu indicator yang digunakan untuk menilai tingkat kekumuhan suatu lingkungan permukiman. Keberadaan PSU yang sesuai dengan standar merupakan upaya untuk menciptakan lingkungan yang bebas kumuh serta memberi keamanan, kenyamanan dan lingkungan sehat bagi masyarakat. Sehingga sangat penting untuk memperhatikan cakupan lingkungan yang sehat dana man serta dilengkapi dengan PSU guna tercapainya Indonesia bebas kumuh.

5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Aspek Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat merupakan faktor penting dalam menciptakan rasa aman, damai, dan tentram dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mewujudkan suasana yang kondusif dalam segala aktifitas pembangunan daerah. Keberhasilan Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain:

1) Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satuan Linmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. Petugas Linmas di Kota Tarakan berjumlah 20 orang yang penempatannya di masing-masing kelurahan.

Gambar 2.49
Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)
Kota Tarakan Tahun 2016-2020

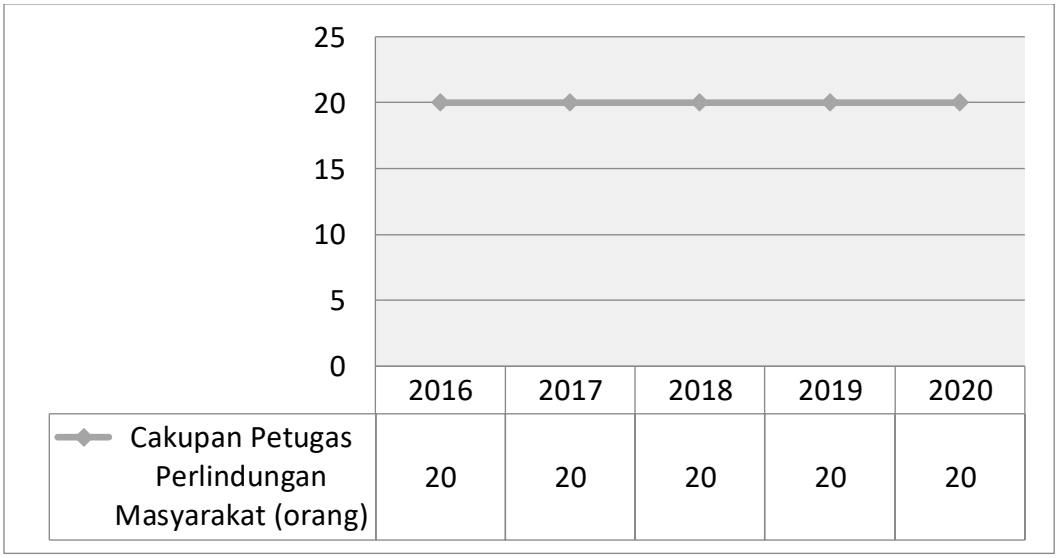

Sumber: Badan Kesbang, Politik dan Linmas Kota Tarakan, 2021

2) Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)

Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah (Perda).

Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kota Tarakan adalah upaya mengkondisikan lingkungan kehidupan masyarakat yang kondusif dan demokratis, sesuai Peraturan Daerah yang telah ditetapkan. Hal ini untuk mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tentram, serta menjaga keindahan.

Gambar 2.50
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Kota Tarakan Tahun 2016-2020

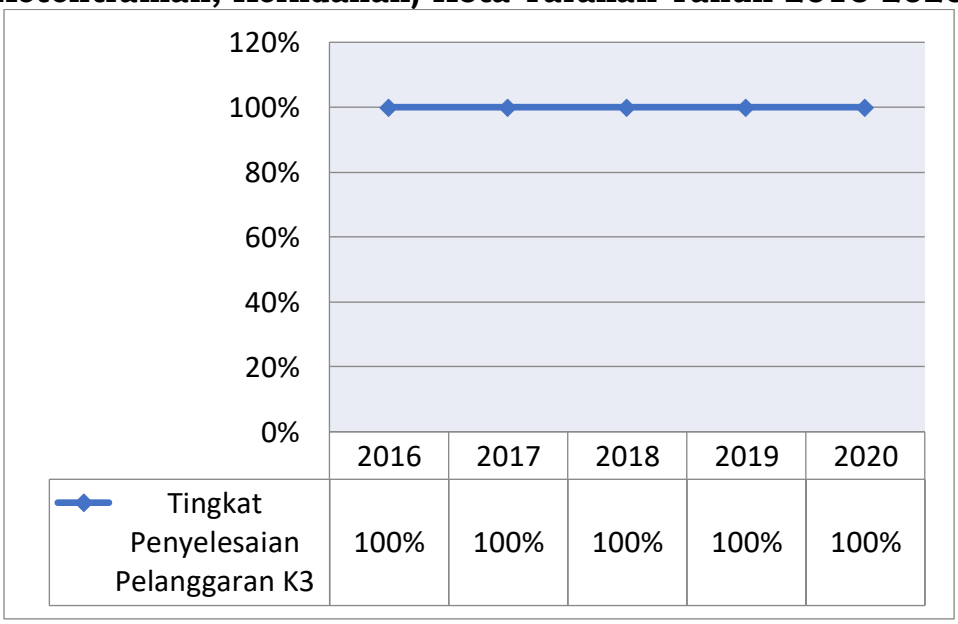

	2016	2017	2018	2019	2020
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Kantor Satpol PP dan PMK Kota Tarakan, 2021

Berdasarkan tabel diatas tergambar bahwa pelanggaran K3 yang terjadi di Kota Tarakan dapat ditangani dengan baik oleh Petugas dari Satpol PP baik melalui penangangan lewat pembinaan maupun dengan cara Tipiring. Untuk tahun 2017 terdapat 427 kasus pelanggaran K3 dimana ada 12 kasus yang ditangani lewat

persidangan (Tipiring) dan 415 kasus diselesaiakan lewat pembinaan. Sedangkan tahun 2018 terjadi 121 pelanggaran Perda dan 86 pelanggaran K3.

3) Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota

Bencana kebakaran adalah setiap peristiwa bencana yang disebabkan karena kebakaran dan dapat menimbulkan kerugian materiil maupun korban jiwa. Cakupan pelayanan bencana kebakaran mencerminkan berapa persen luas wilayah yang terproteksi dari bencana kebakaran.

Untuk memberikan proteksi terhadap bencana kebakaran, menurut Kepmeneg PU No.11/KPTS/2000 tentang ketentuan teknis manajemen kebakaran perkotaan, suatu kota perlu membentuk WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran dimana jumlah minimal WMK untuk suatu daerah tergantung luas darah tersebut dengan minimal satu WMK. Daerah layanan WMK ditentukan oleh waktu tanggap dengan ketentuan tidak lebih dari 15 (lima belas) menit. Berdasarkan ketentuan ini bahwa daerah layanan dalam setiap WMK tidak boleh melebihi radius 7,5 km. Diluar daerah tersebut dikategorikan sebagai daerah tidak terlindungi (unprotected area). Daerah yang sudah terbangun harus mendapat perlindungan oleh mobil kebakaran yang pos terdekatnya berada dalam jarak 2,5 km dan berjarak 3,5 km dari sektor.

Gambar 2.51
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota Tarakan Tahun 2016-2020

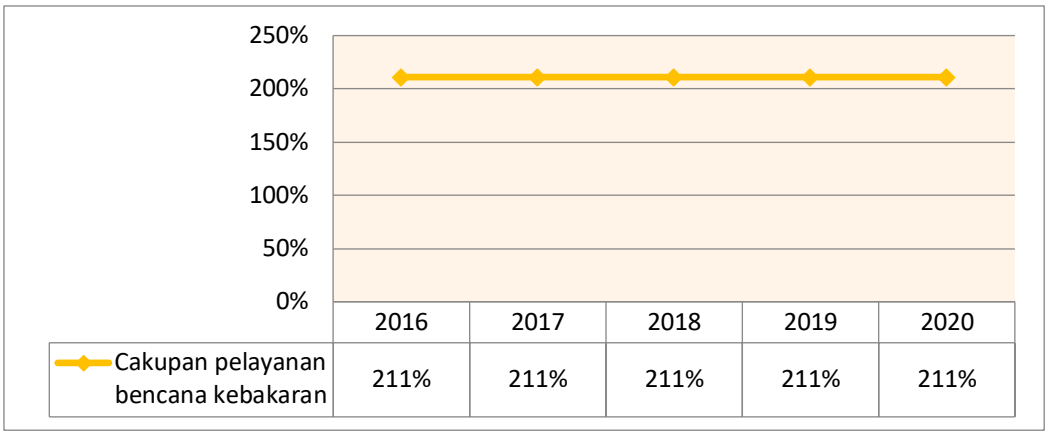

Sumber: Kantor Satpol PP dan PMK Kota Tarakan, 2020

Berdasarkan tabel diatas, Kota Tarakan dengan luas wilayah 250,8 km2 terdapat 3 WMK yaitu Sektor Kampung I sebagai Markas Komando, Sektor Karang Balik (Wilayah Barat) dan Sektor Juata (Wilayah Utara) dimana jangkauan pelayanannya pada radius 7,5 km sehingga jangkauan luas WMK adalah 3 WMK x 176.26 /250,8 km2. Jika dilakukan perhitungan maka cakupan pelayanan bencana kebakaran adalah sebesar 211%.

4) Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Respond time (waktu tanggap) adalah waktu minimal yang diperlukan dimulai saat menerima informasi dari warga/penduduk sampai tiba di tempat kejadian serta langsung melakukan tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat sasaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).

Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) adalah rasio antara kejadian

kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK.

Gambar 2.52
Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Manajemen Kebakaran Kota Tarakan Tahun 2016-2020

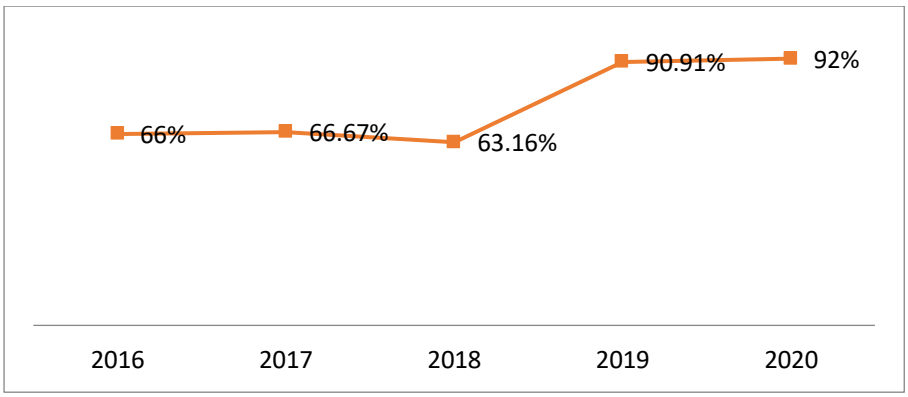

Sumber: Kantor Satpol PP dan PMK Kota Tarakan, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat kita jelaskan bahwa tingkat waktu tanggap daerah layanan manajemen kebakaran untuk Kota Tarakan mengalami kenaikan dimana tahun 2016 dengan jumlah kasus kebakaran sebanyak 50 kasus dan jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit sebanyak 33 kasus sehingga diperoleh diperoleh tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK Tahun 2016 adalah 66,00% dan tingkat waktu tanggap ini meningkat di tahun 2017 menjadi 66,67% dengan jumlah kasus kejadian kebakaran sebanyak 30 kasus dan yang tertangani yang dapat ditangani dalam waktu kurang dari 15 menit sebanyak 20 kasus. Sedangkan tahun 2018 waktu tanggap menurun menjadi 57,89% dengan jumlah kasus kejadian kebakaran sebanyak 38 kasus dan yang tertangani yang dapat ditangani dalam waktu kurang dari 15 menit sebanyak 22 kasus. Beberapa kendala yang dihadapi oleh Satgas PMK Kota Tarakan untuk waktu tanggap adalah kondisi jalan menuju lokasi kejadian kebakaran, kemacetan, listrik yang belum padam dan SDM.

5) Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran Yang Memenuhi Standar Kualifikasi

Aparatur pemadam kebakaran adalah satuan petugas pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi sebagai aparat Dinas yang membidangi Pemadam Kebakaran dengan keahlian untuk melakukan inspeksi proteksi kebakaran, investigasi penyebab kebakaran, pemadaman api dan penyelamatan korban jiwa serta asset harta benda. Satuan petugas pemadam kebakaran ini memiliki peranan penting dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran dengan prinsip pengurangan resiko kebakaran.

Dalam rangka pembinaan petugas pemadam kebakaran dalam pelaksanaan tugasnya secara tepat guna, tepat sasaran dan tepat tindakan di lapangan, perlu dilakukan peningkatan kapasitas aparatur pemadam di daerah dengan cara standarisasi kualifikasi aparatur pemadam kebakaran sesuai aturan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran Di Daerah.

Tabel 2.63
Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran Yang bersertifikat Di Kota Tarakan Tahun 2016 – 2020

INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Aparatur PMK yang bersertifikat	Orang	49	49	50	50	44
Jumlah Aparatur PMK	Orang	69	69	64	69	67
Persentase Aparatur PMK yang berserifikat	**Persen**	**71,01**	**71,01**	**78,13**	**78,13**	**65,67**

Sumber : Dinas Satpol PP dan PMK, 2020

Gambar 2.53
Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran Yang Memenuhi Standar Kualifikasi Kota Tarakan Tahun 2016-2020

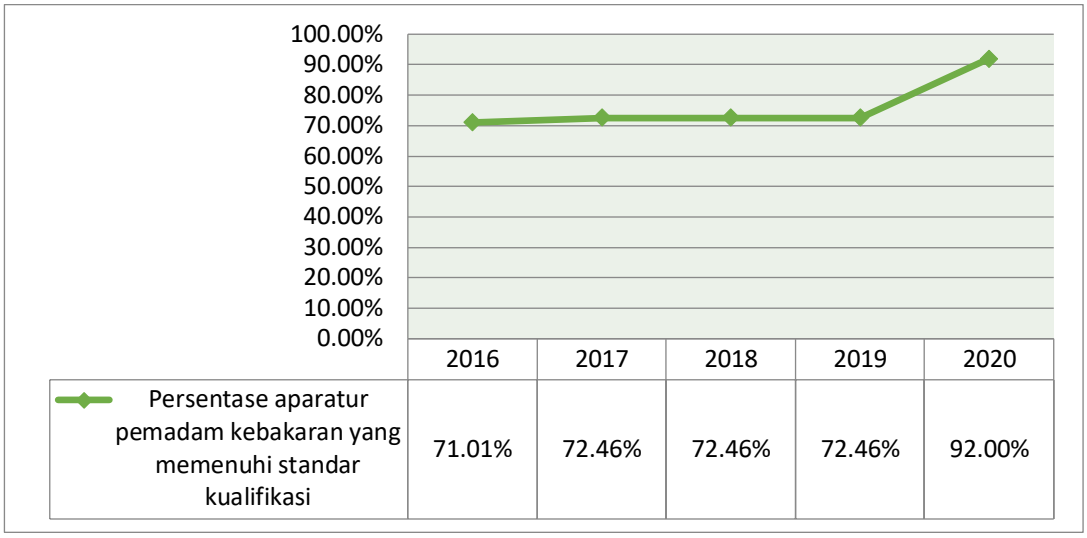

	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	71.01%	72.46%	72.46%	72.46%	92.00%

Sumber: Dinas Satpol PP dan PMK Kota Tarakan, 2020

6) Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran Diatas 3000 - 5000 Liter Pada WMK

Mobil pemadam kebakaran dan/atau mesin pemadam kebakaran adalah salah satu sarana pemadam kebakaran yang digunakan oleh satuan tugas pemadam kebakaran, Satlakar, Balakar atau sebutan lainnya untuk memenuhi waktu tanggap darurat kebakaran yang cepat dan tepat dalam pengurangan resiko kebakaran.

Mobil pemadam kebakaran dan/atau mesin pemadam kebakaran sebagai identitas bentuk kepedulian pemerintah daerah memberi perlindungan dari bahaya kebakaran terhadap seluruh asset yang berada di lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran.

Jumlah mobil dan/atau mesin pemadam kebakaran diatas 3000-5000 Liter pada WMK adalah cakupan mobil dan/atau mesin

pemadam kebakaran yang disediakan pemerintah daerah yang layak pakai untuk mendukung tindakan waktu tanggap darurat kebakaran pada lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran dan/atau WMK.

Tabel 2.64
Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran Diatas 3000-5000 Liter Pada WMK Kota Tarakan Tahun 2016-2020

INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Mobil PMK di atas 3.000 – 5.000 Liter	Orang	8	7	7	6	6

Sumber: Dinas Satpol PP dan PMK Kota Tarakan, 2021

Gambar 2.54
Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran Diatas 3000-5000 Liter Pada WMK Kota Tarakan Tahun 2016-2020

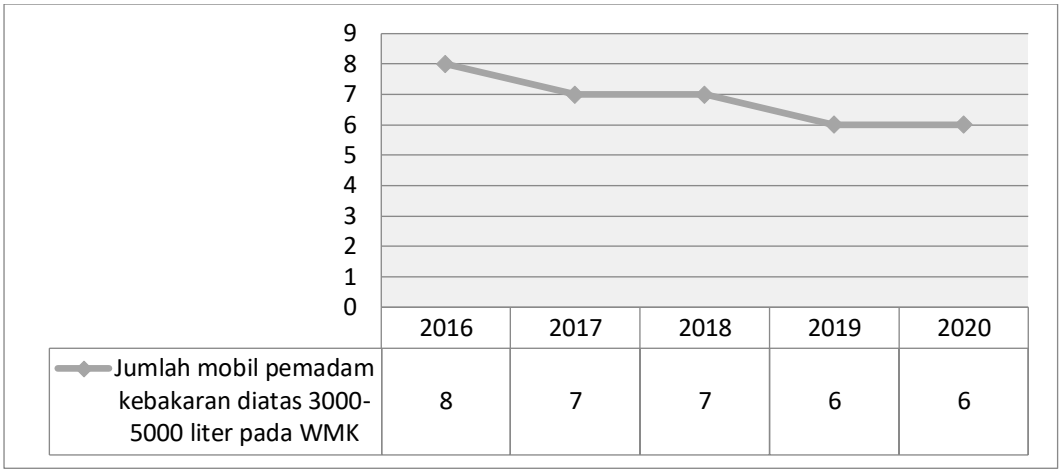

Sumber: Dinas Satpol PP dan PMK Kota Tarakan, 2021

Berdasarkan tabel di atas jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter ada 6unit yang tersebar di Mako PMK 3unit, 2 unit disektor utara dan 1 unit di sektor barat. Untuk mobil pemadam kebakaran 10.000 liter ada 1 unit berada di Mako PMK.

Jumlah mobil pemadam kebakaran pada WMK pada dasarnya sudah memenuhi SPM tetapi tidak diimbangi dengan kondisi mobil yang sering mengalami kerusakan dikarenakan faktor usia

kendaraan tersebut dimana terdapat 1 unit mobil pemadam kebakaran 5000 liter yang pengadaannya tahun 2001, 1 unit tahun 2007, 3 unit tahun 2008 dan 1 unit pengadaan tahun 2009.

7) Persentase Penegakan PERDA

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas Pokok melaksanakan penegakan peraturan daerah, peraturan walikota, serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masayarakat, dan perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, Satpol PP berwenang:

- Melakukan tindakan penertiban nonyudisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- Melakukan tindakan penyelidikan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
- Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Dalam melaksanakan penegakan Perda, Satpol PP bertindak selaku koordinator Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah, dapat berkoordinasi dengan TNI, Polri, Kejaksaan, dan pengadilan yang berada di daerah provinsi/kabupaten/kota," bunyi Pasal 8 ayat (2) PP ini.

PP ini juga menegaskan, penyelenggaraan penegakan Perda dan Perkada oleh Satpol PP dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur dan kode etik.

Gambar 2.55
Persentase Penegakan PERDA Kota Tarakan Tahun 2016-2020

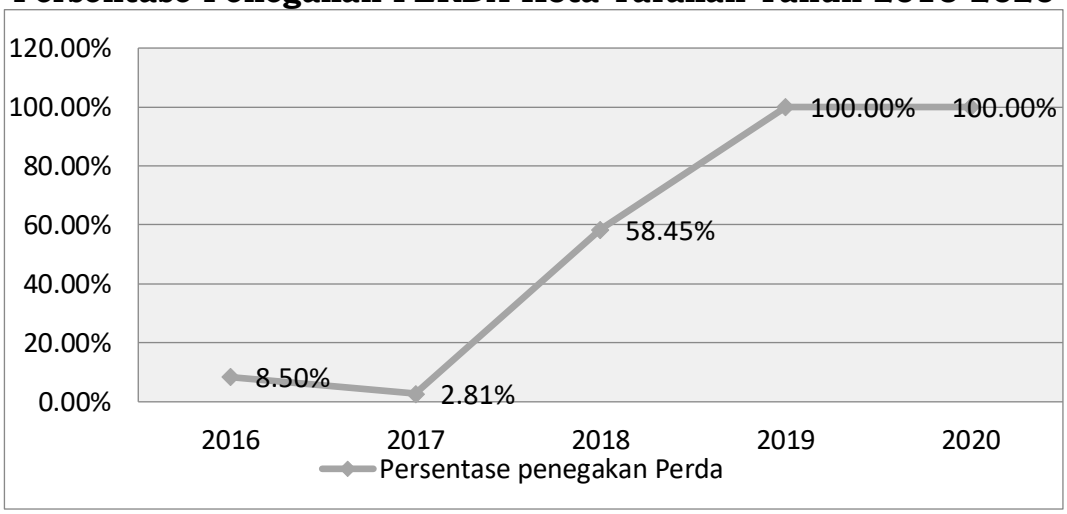

Sumber: Kantor Satpol PP dan PMK Kota Tarakan, 2021

Berdasarkan tabel diatas penegakan PERDA yang dilakukan oleh Aparat Pol PP dimana jumlah penyelesaian pelanggaran PERDA yang terjadi melalui penyidangan (Tipiring) di tahun 2016 mengalami penurunan yaitu 200 kasus dengan 17 kasus yang diproses lewat penyidangan (tipiring) tetapi di tahun 2017 terjadi peningkatan jumlah kasus pelanggaran PERDA yaitu 427 kasus dengan penyelesaian secara tipiring ada 12 kasus. Dan pada tahun 2018 terjadi penurunan jumlah kasus pelanggaran PERDA yaitu 207 kasus dengan penyelesaian secara tipiring ada 121 kasus. Pada Tahun 2020 terjadi penurunan jumlah kasus pelanggaran Perda yaitu 83 kasus dan diselesaikan sebanyak 83 kasus.

6. Urusan Sosial

Urusan sosial erat kaitannya dengan masyarakat PPKS, korban bencana maupun masyarakat lainnya yang rentan dan

mempunyai keterbatasan dalam hidupnya. Keberhasilan pembangunan urusan sosial dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain:

1) Persentase PPKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial

Yang termasuk sebagai Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, atau gangguan tersebut dapat berupa permasalahan permasalahan sosial seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketuhanan sosial, keterbelakangan, keterasingan/ ketertinggalan dan bencana alam maupun bencana sosial. PPKS yang memperoleh bantuan adalah proporsi jumlah PPKS yang memperoleh bantuan terhadap jumlah PPKS yang seharusnya menerima bantuan.

Tabel 2.65
PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial di Kota Tarakan Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
PPKS yang diberikan bantuan	Jiwa	5,992	2,557	4,977	5,975	10,013
Jumlah PPKS yang seharusnya menerima bantuan	Jiwa	8,223	7,753	6,703	12,154	12,365
Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen	72.87	32.98	74.25	49.16	80.99

Sumber: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, 2021

Pada Tabel di atas dapat dilihat bahwa, perkembangan jumlah PPKS yang memperoleh bantuan sosial kurun waktu 2016-2020 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2015 jumlah PPKS yang memperoleh bantuan sosial sebanyak 69,09% dan mengalami peningkatan di tahun 2020 menjadi 80,99%.

Gambar 2.56
Grafik PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial di Kota Tarakan Tahun 2016-2020

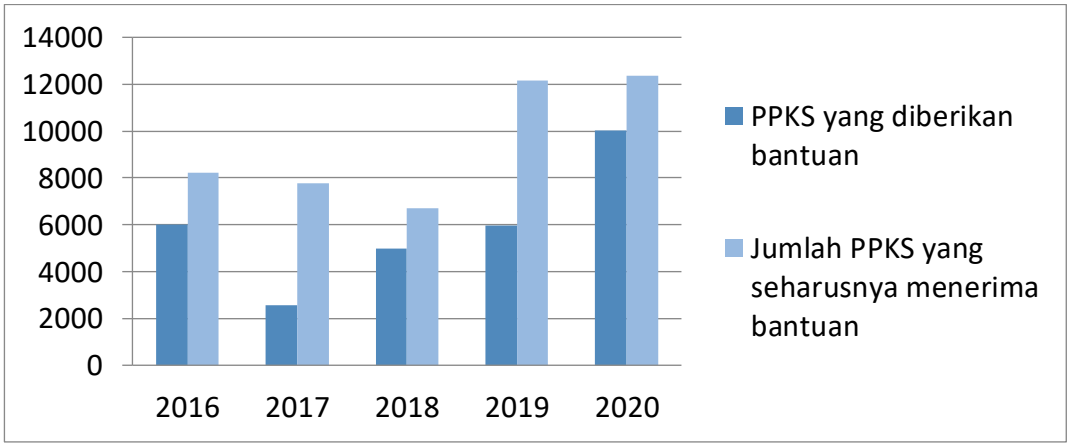

Sumber: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, 2021

2) Sarana Sosial seperti Panti Asuhan, Panti Jompo, dan Rehabilitasi

Penyediaan fasilitas sosial ditujukan untuk membantu masyarakat yang kurang beruntung. Penyediaan fasilitas tersebut diberikan oleh pemerintah, melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan juga Yayasan yang dikelola oleh Masyarakat. Data sarana sosial yang tersedia di Kota Tarakan disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 2.66
Sarana Sosial di Kota Tarakan Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Panti Asuhan	Unit	11	11	11	13	13
Panti Jompo	Unit	1	1	1	1	1
Panti Rehabilitasi	Unit	1	1	1	1	1
Rumah Singgah	Unit	1	1	1	1	1
Jumlah Seluruh Sarana Sosial	Unit	14	14	14	16	16

Sumber: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, 2021

Dapat dilihat dalam Tabel di atas, bahwa dalam kurun waktu 2016-2020 jumlah sarana sosial di Kota Tarakan mengalami peningkatan dari 14 unit di tahun 2016 menjadi 16 unit di tahun 2020. Tersedianya sarana sosial ini diharapkan dapat membantu bagi orang-orang yang kurang beruntung untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

3) Persentase PPKS Yang Tertangani

Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial merupakan persentase jumlah PPKS yang ditangani terhadap jumlah PPKS yang ada. Data menunjukkan bahwa, persentase PPKS yang tertangani pada tahun 2016-2017 fluktuasi cenderung menurun. Pada tahun 2016 persentasi PPKS yang ditangani sebesar 1,19% dan mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 75,65% .

Tabel 2.67
Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kota Tarakan tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah PPKS yang tertangani	Jiwa	98	74	133	6,259	9675
Jumlah PPKS yang ada	Jiwa	8,223	7,753	6,703	12,154	12,765
Persentase PPKS yang tertangani	Persen	1.19	0.95	1.98	51.50	75.65

Sumber: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, 2021

4) Persentase PPKS Skala Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Persentase PPKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar merupakan perbandingan jumlah PPKS yang memperoleh bantuan sosial selama 1 tahun terhadap jumlah PPKS dalam 1 tahun yang seharusnya memeperoleh bantuan sosial dikali 100. Dalam kurun waktu tahun 2016-2020, Persentase PPKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar berfluktuatif. Pada tahun 2020, persentase PPKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar mencapai 80,99%, meningkat tahun sebelumnya yaitu 51,80%. Peningkatan ini seiring dengan peningkatan jumlah PPKS yang memperoleh bantuan sosial pada tahun 2020.

Tabel 2.68
PPKS Yang Memperoleh Bantuan Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Di Kota Tarakan Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah PPKS yang memperoleh bantuan sosial selama 1 tahun	Jiwa	97	2557	4977	6,299	10,013
Jumlah PPKS dalam 1 tahun yang seharusnya memeperoleh bantuan sosial	Jiwa	8,223	7,753	6,705	12,159	12,365
Persentase PPKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persen	1.18	32.98	74.25	51.80	80.99

Sumber: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, 2021

5) Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya

Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya merupakan perbandingan jumlah PMKS dalam 1 tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis terhadap jumlah PMKS dalam 1 tahun yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis dikali 100. Pada tahun 2020, Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya sebesar 100%.

Tabel 2.69
Panti Sosial yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Kota Tarakan Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis	Jiwa	-	280	262	20	50
Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis	Jiwa	8223	7753	6,703	20	50
Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	Persen	-	3.61	3.91	100	100

Sumber: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, 2021

6) Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial merupakan perbandingan jumlah WKBSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial terhadap jumlah WKBSM yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial dikali 100. Dalam kurun waktu tahun 2016-2020, persentase WKSBM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial di Kota Tarakan mencapai 100% setiap tahunnya.

Tabel 2.70
Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kota Tarakan Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah WKBSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Unit	156	156	156	178	178
Jumlah WKBSM yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Unit	156	156	156	178	178
Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Persen	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, 2021

7) Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat

Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat adalah perbandingan jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat terhadap jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dikali 100. Pada tahun 2017-2020, persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat mencapai 100%.

Tabel 2.71
Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat Kota Tarakan Tahun 2017-2020

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020
Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Jiwa	14	139	131	772
Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Jiwa	14	139	131	772
Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	100	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, 2021

8) Persentase Korban Bencana Yang Dievakuasi Dengan Mengunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap

Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap merupakan perbandingan Jumlah korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap terhadap Jumlah korban bencana yang seharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dikali 100. Pada tahun 2020, persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap mencapai 100%.

Tabel 2.72
Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat Kota Tarakan Tahun 2019-2020

Indikator	Satuan	2019	2020
Jumlah korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Jiwa	131	772
Jumlah korban bencana yang seharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Jiwa	131	772
Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Persen	100	`100

Sumber: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, 2021

9) Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial

Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial merupakan perbandingan jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial terhadap jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dikali 100.

Tabel 2.73
Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial Kota Tarakan Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Jiwa	27	47	181	319	430
Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial	Jiwa	495	500	476	319	430
Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial	Persen	5.45	9.4	38.03	100	100

Sumber: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, 2021

b. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan daerah yang wajib meskipun bukan merupakan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di Kota Tarakan. Berikut analisis singkat data dan informasi pada setiap urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

1. Urusan Tenaga Kerja

Ketenagakerjaan merupakan bidang yang penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat karena dalam bidang ini dapat menunjukkan kualitas sumber daya manusia yang secara otomatis berdampak pada *income* rumah tangga untuk memenuhi

kebutuhan sehari-hari. Dalam bidang ketenagakerjaan dimana semakin menurun tingkat pengangguran dapat mengindikasikan peningkatan kesejahteraan manusia. Ada beberapa hal yang mempengaruhi kualitas/kuantitas tenaga kerja antara lain tergambar dari:

1) Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun (Perseribu)

Hubungan antara pengusaha dan pekerja merupakan sebuah simbiosis mutualisme dimana kedua pihak memiliki peranannya masing-masing dan hanya akan mencapai keuntungan seperti yang diinginkan apabila kerjsama antar kedua pihak terjaga dengan baik. Oleh karena itu, berbagai kasus sengketa antara yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha dengan pekerja/buruh, baik karena perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, maupun perselisihan pemutusan hubungan kerja akan memberikan efek buruk terhadap kinerja perindustrian.

Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun merupakan perbandingan antara jumlah sengketa pengusaha pekerja yang terjadi terhadap jumlah perusahaan yang ada dikalikan dengan seribu. Dalam kurun waktu 2016-2020, angka sengketa pengusaha-pekerja tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu 12 dan yang terendah terjadi pada tahun 2017 yaitu 2 kasus. Pada tahun 2019, angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun yaitu 17,14 meningkat dari tahun sebelumnya (8,57).

Secara umum, dibandingkan tahun 2016-2020, angka sengketa pengusaha-kerja tahun 2019 menjadi yang tertinggi.

Tabel 2.74
Angka Sengketa Pengusaha Kerja Per Tahun di Kota Tarakan Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Sengketa	Jumlah Perusahaan	Angka Sengketa
2016	5	700	7,14
2017	2	700	2,86
2018	6	700	8,57
2019	12	700	17,14
2020	11	1893	5,81

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tarakan, 2021

2) Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)

Sengketa antara Pengusaha dan Pekerja dapat diselesaikan dengan cara damai tanpa harus menempuh proses litigasi, dan akhir dari penyesaian secara win-win solution atas suatu perselisihan hubungan industrial dibentuklah Perjanjian Bersama. Perjanjian Bersama adalah persetujuan yang dibuat oleh 2 (dua) pihak atau lebih yang masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Perjanjian Bersama pada dasarnya dibentuk sebagai perjanjian atas kesesuaian kehendak para pihak karena adanya perselisihan atau semata-mata demi terwujudnya hubungan industrial yang harmonis dalam perusahaan dengan memperhatikan kepentingan masing-masing pihak.

Besaran Kasus yang diselesaikan dengan PB merupakan prosentase dari perbandingan jumlah kasus yang diselesaikan dengan PB terhadap jumlah kasus yang dicatatkan. Dalam kurun waktu 2016-2020, besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian bersama paling tinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 100%. Dari 6 kasus yang tercatat, ada 6 kasus yang diselesaikan

dengan perjanjian bersama. Sedangkan pada tahun 2017, tidak ada kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama.

Tabel 2.75
Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) di Kota Tarakan Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Kasus yang Diselesaikan dengan PB	Jumlah Kasus yang Dicatatkan	Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan PB (%)
2016	2	5	40
2017	0	2	0
2018	6	6	100
2019	9	12	75
2020	9	11	81,82

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tarakan, 2021

3) Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan

Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan adalah persentasi jumlah pencari kerja yang mendaftarkan dan tercatat pada dinas kabupaten/kota yang menangani bidang ketenagakerjaan dan jumlah pencari kerja yang diterima bekerja oleh pemberi kerja dalam hal ini perusahaan yang mendaftarkan lowongan pekerjaannya pada dinas kabupaten/kota. Dalam kurun waktu 2016-2020, besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan terlihat fluktuatif. Hal ini dikarenakan penyesuaian permintaan tenaga kerja yang ada dengan keterampilan/latar belakang pendidikan pencari kerja yang mendaftar.

Pada tahun 2018, besaran pencari kerja yang ditempatkan mencapai 60,27%. Besaran ini merupakan yang tertinggi dalam kurun waktu 2016-2020. Dari 1.986 orang pencari kerja yang terdaftar, pekerja yang ditempatkan sebesar 1.197 orang. Besaran terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu 20,98%. Dari 2.922 pencari kerja yang terdaftar, hanya 613 orang yang ditempatkan.

Tabel 2.76
Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan Di Kota Tarakan Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Jumlah Pencari Kerja yang terdaftar	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan %
2016	613	2.922	20,98
2017	1.074	3.159	34
2018	1.197	1.986	60,27
2019	689	1.894	36,38
2020	117	889	13,16

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tarakan, 2021

4) Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi

Pelatihan berbasis kompetensi adalah pelatihan yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja sedangkan besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan adalah persentasi jumlah tenaga kerja yang dilatih dalam waktu satu sampai lima tahun secara kumulatif dibandingkan dengan jumlah orang yang mendaftar pelatihan.

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi pada tahun 2020 sebesar 40,52%, menurun dari tahun sebelumnya sebesar 55,29%. Hal ini dikarenakan peningkatan jumlah pendaftar peserta pelatihan lebih besar daripada peningkatan jumlah kuota peserta pelatihan.

Tabel 2.77
Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Di Kota Tarakan Tahun 2016-2020

Tahun	Tenaga kerja yang dilatih	Pendaftar pelatihan berbasis kompetensi	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)
2016	224	313	71,57
2017	240	305	78,69
2018	624	933	72,03
2019	1.024	1.852	55,29
2020	400	987	40,52

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tarakan, 2021

5) Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan

Pelatihan kewirausahaan adalah pelatihan yang membekali peserta secara bertahap agar memiliki kompetensi kewirausahaan dan bisnis, sehingga mampu menciptakan kesempatan kerja bagi dirinya sendiri maupun orang lain sesuai tuntutan pembangunan. Secara umum, dalam kurun waktu 2016-2020, besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan belum mencapai 100%. Hal ini menunjukkan masih banyak tenaga kerja yang mendaftar pelatihan kewirausahaan belum mendapatkan pelatihan kewirausahaan.

Tabel 2.78
Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan Di Kota Tarakan Tahun 2016-2020

Tahun	Tenaga kerja yang dilatih	Jumlah Pendaftar kewirausahaan	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (%)
2016	20	55	36,36
2017	20	47	42,55
2018	20	50	40
2019	20	51	39,22
2020	140	225	62,22

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tarakan, 2021

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dan anak masih menjadi perhatian pemerintah daerah Kota Tarakan dalam rangka mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender. Kesetaraan dan keadilan gender dapat terjadi apabila porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis.

1) Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar persentase partisipasi perempuan di Lembaga pemerintahan adalah dengan membandingkan dari jumlah pekerja perempuan di pemerintah dengan jumlah seluruh pekerjaan perempuan. Jumlah pekerja perempuan dilembaga pemerintahan didapat dari BKPP, dan jumlah seluruh pekerja perempuan didapat dari penjumlahan data dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak dan Keluarga Berencana. Data prosentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintahan di Kota Tarakan Tahun 2016 – 2019 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.79
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan di Kota Tarakan Tahun 2016 - 2020

INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Pekerja perempuan di lembaga Pemerintah	Orang	1766	1734	1678	1631	1563
Jumlah pekerja perempuan	Orang	n/a	28613	38302	36477	36240
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	n/a	6,06	4,38	4,47	4,31

Sumber: BPPPAPPKB Kota Tarakan, 2021

Berdasarkan tabel di atas, persentase partisipasi perempuan di Lembaga pemerintahan di Kota Tarakan dalam kurun waktu 2016–2020 sangat kecil, dimana data yang tersedia di tahun 2017 sebesar 6,06%. Namun untuk jumlah pekerja perempuan di Lembaga pemerintahan mengalami penurunan dari 1.766 jiwa di tahun 2016 menjadi 1563 jiwa di tahun 2020. Persentase perempuan yang bekerja dilembaga pemerintah masih terbilang cukup rendah, melihat kemungkinan yang akan terjadi dimasa mendatang

2) Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan Di DPR

Peningkatan partisipasi perempuan di DPR merupakan bagian integral dari upaya untuk mewujudkan kualitas demokrasi yang berkeadilan gender guna mempercepat terwujudnya kesetaraan gender di bidang politik dan pengambilan keputusan. Salah satu upaya untuk meningkatkan peran perempuan sudah dilakukan dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin peningkatan keterwakilan perempuan di

kursi DPR. Peraturan ini dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang di dalamnya juga mengatur pemilu tahun 2009 dimana UU No. 2 Tahun 2008 memuat kebijakan yang mengharuskan partai politik menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pendirian maupun dalam kepengurusan di tingkat pusat. Data prosentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintahan di Kota Tarakan Tahun 2016 – 2020 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.80
Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan Di DPRD Kota Tarakan Tahun 2016 - 2020

INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan	Orang	1	1	1	3	3
Jumlah total kursi di keanggotaan DPRD	Orang	25	25	25	30	30
Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	Persen	4%	4%	4%	10%	10%

Sumber: BPPPAPPKB, 2021

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa persentase partisipasi perempuan di DPRD Kota Tarakan dalam kurun waktu 2016 – 2020 semakin meningkat. Pada periode 2014 – 2020 keterwakilan perempuan menurun menjadi 4 % atau 1 orang yang duduk di kursi DPRD meningkat menjadi 10% di tahun 2020. Ada

beberapa factor hambatan di balik rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD yaitu faktor budaya dan faktor prosedural.

3) Rasio KDRT

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besarrasio KDRT di Kota Tarakan. Rasio KDRT dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah KDRT dengan jumlah rumah tangga. Berikut ini merupakan rasio KDRT di Kota Tarakan Tahun 2016 – 2020.

Tabel 2.81
Rasio KDRT Di Kota Tarakan Tahun 2016 – 2020

INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah KDRT	Orang	49	60	45	44	35
Jumlah rumah tangga	Orang	79469	85,466	79.734	77.276	79.811
Rasio KDRT	Persen	0.06%	0.07%	0,06%	0,06%	0,05%

Sumber: BPPPAPPKB, 2021

Jumlah kasus ini semakin menurun hingga mencapai 35 kasus di tahun 2020. Rendahnya kasus KDRT di tahun 2019 bukan berarti memang hanya terjadi sedikit kasus KDRT, namun disebabkan karena masyarakat belum berani melaporkan adanya tindakan KDRT atau ketidaktahuan harus melaporkan kemana.

Pada Tahun 2017 terdapat peningkatan yang cukup besar, hal ini menandakan makin sadarnya korban KDRT untuk melaporkan kasus KDRT. Pada kurun waktu 2016 – 2020 terjadi penurunan rasio KDRT hal tersebut mengindikasikan adanya kondisi yang sedikit demi sedikit membaik dengan berkurangnya kasus KDRT.

Terjadinya kasus KDRT disebabkan karena beberapa faktor diantaranya : 1] budaya bahwa isteri bergantung pada suami, khususnya ekonomi; 2} Kepribadian dan kondisi psikologis suami yang tidak stabil; 3} laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat dan 4] pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama mengenai aturan mendidik isteri, kepatuhan isteri pada suami, penghormatan posisi suami sehingga terjadi persepsi bahwa laki-laki boleh menguasai isteri, serta kondisi ini disebabkan suami menggunakan narkoba, miras sehingga kecendrungan suami lebih keras.

4) Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan. Tindakan kekerasan pada perempuan dan anak sama halnya dengan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan merupakan proporsi.

Tabel 2.82
Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan di Kota Tarakan Tahun 2016 – 2020

INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu	Orang	49	60	45	44	35
Jumlah laporan/pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu	Orang	49	60	45	44	35
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Persen	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: BPPPAPPKB Kota Tarakan, 2021

Kesadaran masyarakat untuk melaporkan semakin tinggi sehingga jumlah kasus pengaduan semakin menurun, bukan banyak. Namun untuk masa yang akan datang diharapkan jumlah kasus pengaduan semakin menurun, bukan karena hanya sedikit kasusyang dilaporkan, tapi memang benar-benar berkurang jumlah kasusnya.

5) Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembanguan Gender {IPG} adalah penghitungan ukuran pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur Pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan, Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG.

Tabel 2.83
Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kota Tarakan
Tahun 2017 – 2020

INDIKATOR	2017	2018	2019	2020
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,23	92,28	92,16	91,90

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Angka ini cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat Provinsi dengan IPG sebesar 86,74 dan Nasional dengan IPG sebesar 90,99. Hal ini menunjukkan Pemerintah Kota Tarakan telah memperhatikan kebutuhan dasar perempuan seperti kesehatan, pemdidikan serta partisipasi perempuan dalam bidang pembangunan masyarakat.

6) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk mengukur persamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. IPG dan IDG diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang kesetaraan dan keadilan gender yang telah dicapai melalui berbagai

program pembangunan serta dapat digunakan sebagai bahan dalam menentukan arah kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan keadilan gender. IDG dibentuk berdasarkan tiga komponen, yaitu keterwakilan perempuan dalam parlemen; perempuan sebagai tenaga profesional, teknisi, kepemimpinan dan ketatalaksanaan; dan sumbangan pendapatan; Berikut ini merupakan data IDG Kota Tarakan Tahun 2016 – 2020.

Tabel 2.84
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kota Tarakan Tahun 2017 – 2020

INDIKATOR	2017	2018	2019	2020
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	50,65	52	59,34	62,69*

Sumber: Badan Pusat Statistik

IDG di Kota Taralan dalam kurun waktu 2017 - 2019 bersifat fluktuatif.

3. Urusan Pangan

Ketahanan pangan merupakan kondisi dimana suatu wilayah mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya secara mandiri dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan menyeluruh. Padi masih merupakan bahan pokok pangan bagi sebagian besar masyarakat di Kota Tarakan.

Ketersediaan pangan berhubungan dengan suplai pangan melalui kebutuhan, produksi, dan luas panen. Ketersediaan pangan utama (meliputi beras dan palawija) di Kota Tarakan pada tahun 2013 – 2015 meningkat namun kemudian cenderung menurun di tahun 2016-2017. Ketersediaan pangan utama 2013-2017 mengalami pertumbuhan rata-rata negatif yaitu sebesar -5,78 persen per tahun, sementara rata-rata jumlah ketersediaan pangan

pun mengalami pertumbuhan rata-rata negatif sebesar -2,29 persen per tahun. Ketersediaan pangan utama di Kota Tarakan pada tahun 2016 adalah yang paling besar pada kurun waktu 2016-2020. Namun pada tahun 2016, ketersediaan pangan utama Kota Tarakan hanya mencapai 27,93 kg/jiwa. Sedangkan pada tahun 2017 turun lagi menjadi sebesar 20,50 kg/jiwa. Dengan ketersediaan pangan utama tersebut, maka ketersediaan energi (kkal/kapita/hari) dan ketersediaan protein (gram/kapita/hari) yang dihasilkan selama tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.85
Ketersediaan Pangan Utama Kota Tarakan Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Rata-
1	-rata Jumlah rsediaan Pangan na	Kg	6.819.700	5.187.700	5.004.780	6.412.140	6.524.440	- 0,16
2	Penduduk	Jiwa	244.185	253.026	253.030	270.984	253.785	2,36
3	Ketersediaan Pangan Utama	Kg/jiwa	27,93	20,50	19,17	30,49	59,19	7,24
4	Ketersediaan energi per kapita per hari	kkal/per kapita/ hari	10,47	9,06	8,50	12,69	12,26	5,07
5	Ketersediaan protein per kapita per hari	gram/ kapita/ hari	2.677.748,52	2.434.100,26	2.571.146,00	3.141.209,00	2.484.555,00	3,42

Sumber: BPS Kota Tarakan, 2021

Pertumbuhan rata-rata negatif sebesar -0,16 persen per tahun. Ketersediaan pangan di Kota Tarakan selain dari produksi lokal juga berasal dari daerah lain di sekitar seperti Malinau, Bulungan maupun Makasar dan Surabaya. Selama tahun 2016-2020 Kota Tarakan telah melaksanakan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan.

4. Urusan Pertanahan

Sertifikat tanah adalah surat bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan (Profil Pertanahan Provinsi Kalimantan Utara-Kalimantan Timur Tahun 2015).

Lahan merupakan salah satu aset bagi setiap orang. Apalagi kondisi harga lahan saat ini yang terus merangkak naik menjadikannya komoditas yang berharga. Hal yang masih menjadi masalah dalam sektor pertanahan negara ini adalah administrasi pertanahan yang belum maksimal seperti salah satunya adalah sertifikat kepemilikan tanah. Akibatnya, kasus sengketa tanah banyak terjadi karena lemahnya data teknis dan sertifikat. Luas lahan bersertifikat Kota Tarakan di tahun 2010 sebesar 0,61%, tahun 2011 sebesar 27,10%, dan tahun 2012 sebesar 26,06, serta di tahun 2013 sebesar 26,56%.

5. Urusan Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan salah satu unsur yang diutamakan dalam pelaksanaan pembangunan yang dinamis atau bisa disebut pembangunan yang berkelanjutan. Untuk itu dalam setiap pelakasanaan pembangunan harus memperhatikan daya dukung lingkungannya. Keberhasilan pembangunan bidang lingkungan hidup dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain:

1) Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota

RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) adalah dokumen perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan

pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu yang menjadi masukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah (RPJP/M) dan merupakan bagian yang integral dalam pembangunan daerah. RPPLH sebaiknya disusun oleh pemerintah kabupaten/kota. Tujuan adanya RPPLH sebagai pedoman dalam menjaga kelestarian lingkungan agar bisa dimanfaatkan hingga ke generasi berikutnya yang berintegrasi dengan pembangunan Daerah.

Namun dokumen RPPLH Kota Tarakan dari tahun 2013–2017 belum tersusun. Hal ini dikarenakan, peraturan baru dan belum terkoordinasi dengan baik. Dokumen RPPLH meskipun belum tersusun namun sudah terintegrasi dengan dokumen perencanaan daerah. Dokumen perencanaan daerah sudah memuat tentang pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan.

2) Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air

Indeks kualitas air berhubungan dengan kualitas air sebagai kebutuhan manusia yang paling utama. Indeks kualita air atau mutu air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 115 tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air).

Pengukuran status mutu air di Kota Tarakan dilakukan di 9 titik di 4 sungai antara lain: Sungai Karang Anyar, Sungai Semunti, Sungai Persemaian, Sungai Binalatung. Metode yang digunakan storet yaitu membandingkan data kualitas air dengan baku mutu yang disesuaikan dengan peruntukannya. Berdasarkan pengambilan sampel dan pengukuran yang dilakukan di peroleh hasil dari Tahun 2016–2020. Tahun 2019 hasil perhitungannya 60 dan Tahun 2020 nilai indeks kualitas air 45-56. Berdasarkan

Indeks CWQI angka (45-64) menunjukkan kualitas air yang marginal/berada diambang batas terbawah, sedangkan angka 43 menunjukkan kualitas yang buruk. Indeks kualitas air Tarakan menunjukkan kualitas air yang buruk, sehingga diperlukan pengolahan.

3) Hasil Pengukuruan Indeks Kualitas Udara

Indeks kualitas udara merupakan suatu nilai yang menjelaskan dan menginformasikan kondisi dan perubahan kualitas udara suatu daerah. Dalam rangka pemantauan kualitas udara dengan metode passive sampler untuk perhitungan Indeks Kualitas Udara Tahun 2016–2020. Lokasi sampling ada 4 lokasi pada masing masing kab/kota: a) Daerah padat transportasi (jalan utama yg lalu lintasnya padat) b) Daerah/kawasan Industri (bukan industrinya) c) Pemukiman padat penduduk (*urban background*) d) Kawasan komersil (perkantoran, perdagangan yang tidak terpengaruh langsung transportasi). Hasil pengukuran indeks kualitas udara di kota Tarakan pada tahun 2019 adalah 94,02 dan pada tahun 2020 adalah 93,42. Hal ini menunjukkan kualitas udara Kota Tarakan dalam kondisi baik.

4) Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup

Penghargaan lingkungan hidup merupakan salah satu indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup di suatu daerah. Adipura, Adiwiyata, Kalpataru merupakan beberapa penghargaan di bidang lingkungan yang pernah di dapat oleh Kota Tarakan. Tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami kenaikan jumlah perolehan penghargaan. Namun mengalami penurunan pada tahun berikutnya yaitu hanya 9 penghargaan yang

didapatkan sampai tahun 2018. Dan mengalami peningkatan menjadi 40 penghargaan dibidang lingkungan.

5) Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH Dan PUU LH Yang Di Terbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha Dan Dampaknya Di Daerah Kabupaten/Kota.

Salah satu kinerja pengelolaan lingkungan hidup adalah penanganan terhadap pengaduan masyarakat beripa izin lingkungan, izin PPLH, izin lokasi dan lainnya. Selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, pengaduan masyarakat ditangani 100 % oleh dinas terkait. Diharapkan dengan pelayanan penuh tidak ada ijin lingkungan yang tidak terselesaikan.

6) Timbulan Sampah Yang Ditangani

Timbulan sampah adalah volume sampah yang dihasilkan dalam satuan waktu. Timbulan sampah perlu untuk diketahui pertahunnya digunakan sebagai dasar pengelolaan sampah di Kawasan kelurahan maupun kota. Timbulan sampah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Gambar 2.57
Timbulan Sampah Kota Tarakan 2016 – 2020

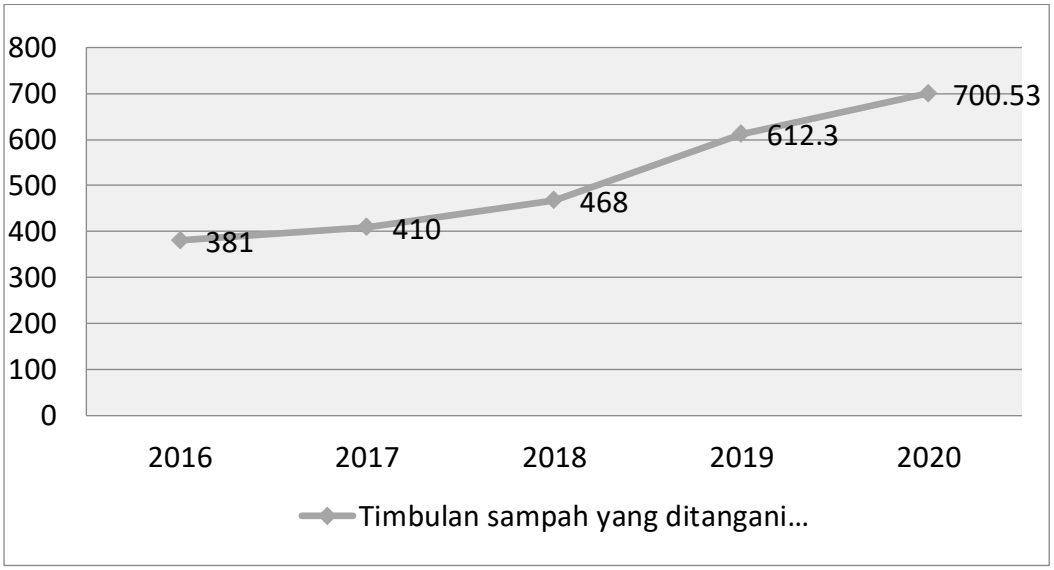

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan, 2021

Berdasarkan gambar diatas, dapat diketahui timbulan sampah yang ditangani mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2016, timbulan sampah yang tertangani yang masuk TPA adalah 381 m3/hari, meningkat setiap tahunnya hingga pada tahun 2020 mencapai 700,53 m3/hari. Peningkatan timbulan sampah di Kota Tarakan dipengaruhi oleh : 1) peningkatan atau penambahan jumlah penduduk dan pertumbuhannya, 2) cara hidup dan mobilitas penduduk yang semakin bertambah seiring dengan pertumbuhan kota, 3) Kota Tarakan sebagai kota transit sehingga semakin banyak pendatang yang juga mempengaruhi timbulan sampah, dan 4) cara penanganan makanannya terutama setiap bulan puasa atau ada perayaan hari besar yang menyebabkan timbulan sampah semakin meningkat dibandingkan hari biasa.

7) Persentase Jumlah Sampah Yang Terkurangi Melalui 3R

Pengelolaan sampah di Kota Tarakan terus dilakukan perbaikan sehingga timbulan sampah yang dihasilkan tidak langsung masuk ke TPA. Timbulan sampah dapat diolah dulu di sumber sampah dengan sistem 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Pengelolaan sampah dengan sistem 3R sedang gencar dilaksanakan di Kota Tarakan. Pengurangan jumlah sampah dengan sistem 3R pada tahun 2013 hanya sebesar 5% dan diusahakan terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Dengan dibangunnya depo 3R di beberapa kelurahan dan pengembangan sekolah Taling, diharapkan pengelolaan sampah 3R terus mengalami peningkatan sehingga jumlah sampah yang ditangani melalui 3R mengalami peningkatan. Peningkatan ditunjukkan dengan 12,45% penanganan sampah dengan 3R pada tahun 2020. Dari tahun 2016-2020 mengalami peningkatan 2%. Meskipun peningkatan masih tergolong rendah, namun system 3R sudah mampu mempengaruhi perubahan pola pikir dan kebiasaan masyarakat terhadap pengelolaan sampah.

8) Cakupan Area Pelayanan Persampahan Dan Kawasan Yang Terlayani Pengangkutan Sampah.

Pengangkutan sampah dan pengelolaan sampah pada tahun 2016 sudah mencapai 78% dari seluruh Kawasan Kota Tarakan dan terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2018, capaian area pelayanan sebesar 90% meningkat menjadi 98% pada tahun 2020. Dengan 98% cakupan pelayanan menunjukkan bahwa pelayanan persampahan sudah hampir mencakup seluruh wilayah dan masyarakat Kota Tarakan.

9) Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani

Jumlah sampah yang tertangani setiap hari terukur berdasarkan sampah yang masuk ke TPA. Pencatatan dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak sampah yang masuk ke TPA. Dengan 12 truk sampah yang beroperasi sampah yang masuk ke TPA setiap harinya mengalami kenaikan.

Gambar 2.58
Jumlah Sampah Yang Tertangani Di Kota Tarakan
Tahun 2016-2020

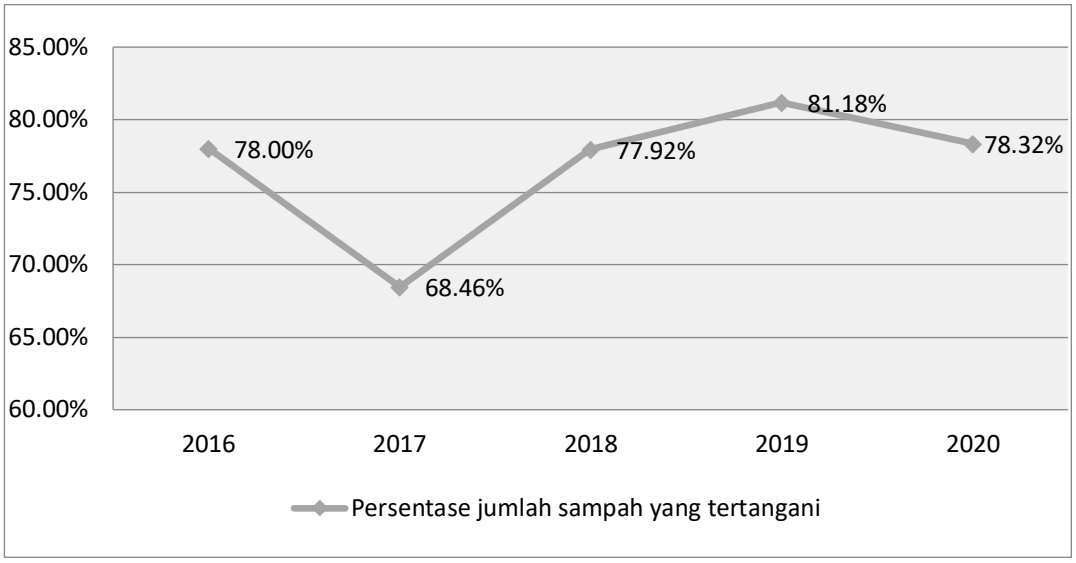

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan, 2021

Dari tabel di atas, dapat diketahui persentase jumlah sampah yang tertangani mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2016, sampah kota yang tertangani sebesar 78% dan mengalami fluktuatif setiap tahunnya. Pada akhir tahun 2020 sebanyak 78,32% sampah kota yang tertangani. Jumlah sampah yang tertangani dapat menunjukkan kinerja pemerintah yang semakin baik, dengan tertangani semua sampah kota.

10) Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kota Tarakan

Sarana dan prasarana persampahan yang terdata merupakan sarana dan prasarana yang ada di fasilitas umum dan fasilitas khusus. Sedangkan untuk fasilitas di permukiman disediakan oleh masyarakan secara swadaya. TPS di Kota Tarakan ditunjukkan dengan data dibawah.

Tabel 2.86
Sarana Prasarana Persampahan Kota Tarakan
Tahun 2016-2020

Sarana Prasarana Persampahan	2016	2017	2018	2019	2020
TPS Drum	-	-	-	-	-
TPS Beton	-	-	-	-	-
TPS Plat	-	-	-	-	-
TPS Fiber 120L	-	30	-	-	-
TPS Fiber 660L	-	15	7	7	-
TPS Container	-	17	20	20	26
Transfer Depo	-	17	17	19	17
TPS 3R/depo pengelolaan sampah	5	5	8	9	9

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan, 2021

Mulai tahun 2016 - 2020, jumlah TPS baik drum, beton, plat ditiadakan dan dimusnahkan. Pemerintah Kota Tarakan mengeluarkan kebijakan tidak ada TPS di jalan protokol maupun di permukiman. Pengurangan jumlah TPS digantikan dengan keberadaan transfer depo dan depo pengelolaan sampah. Depo pengelolaan sampah sudah terdapat di 5 kelurahan di Kota Tarakan sehingga diharapkan dengan adanya pengelolaan sampah di sumber sampah, sampah yang terbuang ke TPA berkurang. TPA

Kota Tarakan dengan luasan 8 Ha yang berada di Kelurahan Karang Harapan sudah hampir penuh sehingga perlu adanya penambahan jumlah TPA di Kota Tarakan.

11) Persentase Izin Pengelolaan Sampah Oleh Swasta Yang Diterbitkan Dan Persentase Pengelolaan Sampah Oleh Swasta Yang Taat Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Pengelolaan sampah di Kota Tarakan dijalankan oleh Pemerintah Kota Tarakan, bukan pihak swasta. Pada tahun 2013 – 2017, pengelolaan sampah Kota Tarakan dilakukan oleh KSM dan swadaya masyarakat sehingga tidak ada ijin yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk swasta dalam hal pengelolaan sampah. Dalam Peraturan Daerah, pihak swasta, dalam hal ini toko, hotel, supermarket, restoran mengelola sampahnya sendiri, dan sampai saat ini terpantau mereka mematuhi peraturan daerah yang berlaku.

6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan administrasi kependudukan merupakan urusan yang sangat penting dalam tata pemerintahan baik pusat maupun daerah. Untuk itu tata administrasi kependudukan dan catatan sipil harus berkualitas. Keberhasilan tata administrasi kependudukan dan catatan sipil setidaknya tergambar dari beberapa indikator antara lain:

1) Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar kepemilikan KTP per satuan penduduk Kota Tarakan. Cara untuk mencari rasio ini menurut Lampiran 1 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah dengan membagi jumlah penduduk usia >17

tahun yang memiliki KTP dengan jumlah penduduk usia>17 tahun atau telah menikah (wajib KTP). Jumlah penduduk usia >17 tahun yang ber KTP yang disajikan dalam table dibawah ini adalah jumlah e-KTP yang dicetak oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Tabel 2.87
Jumlah Penduduk Ber-KTP Di Kota Tarakan Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah penduduk usia > 17 tahun yang ber KTP	Jiwa	99.964	172.790	178.504	171.066	170.100
Jumlah penduduk usia > 17 tahun atau telah menikah	Jiwa	168.131	172.833	174.216	163.269	176.646
Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Persen	59,46	99,98	97,59	95,44	96,29

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2021

Rasio penduduk ber-KTP pada tahun 2017 tergolong dalam kondisi yang baik karena sudah hampir mencapai angka 100%. Pada tahun 2019 rasio penduduk ber-KTP mengalami penurunan sebesar 95,44%. Hal ini dikarenakan, bertambahnya jumlah penduduk dan belum melakukan pelaporan. Rasio mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 96,29%.

2) Kepemilikan Akte Kelahiran

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar persentase penduduk yang memiliki akte kelahiran. Kepemilikan

akte lahir menunjukkan bahwa kelahirannya telah dicatat dalam data kependudukan. Kepemilikan akte kelahiran tidak hanya penting bagi bayi yang baru lahir akan tetapi bagi orang dewasa. Manfaat memiliki akte kelahiran adalah kemudahan dalam mengakses pelayanan publik yang bersifat formal ataupun menjadi syarat untuk pembuatan surat keterangan diri penduduk. Cara menghitung kepemilikan akta kelahiran adalah perbandingan jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran terhadap jumlah penduduk.

Tabel 2.88
Kepemilikan Akte Kelahiran di Kota Tarakan Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran	Jiwa	117.344	124.012	132.498	136.091	145.494
Jumlah penduduk	Jiwa	247.663	252.464	259.001	245.784	253.785
Kepemilikan akta kelahiran	Persen	47,38	49,12	51,16	55,37	57,33

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2021

Berdasarkan Tabel di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu 2016-2020, kepemilikan akte kelahiran penduduk di Kota Tarakan menunjukan peningkatan baik dari jumlah kepemilikan maupun rasio terhadap jumlah penduduk. Pada tahun 2020, kepemilikan akta kelahiran mencapai 57,33%, meningkat dari tahun sebelumnya 55,37%.

Gambar 2.59
Grafik Kepemilikan Akte Kelahiran di Kota Tarakan Tahun 2016-2020

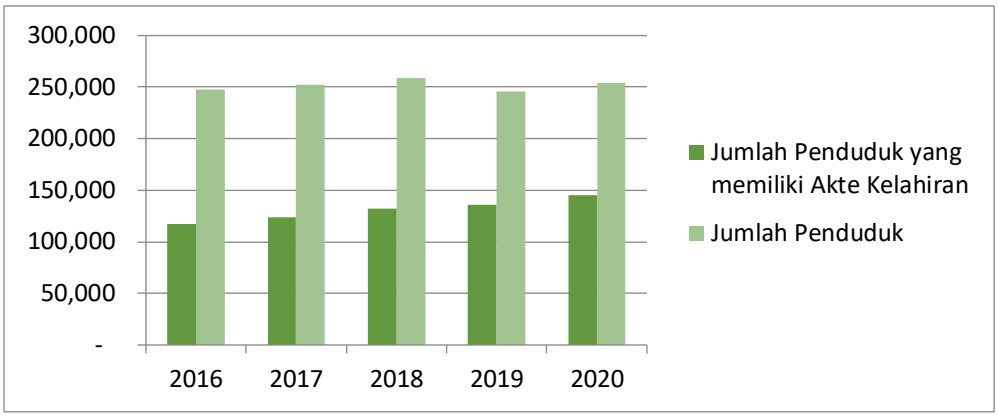

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2021

3) Rasio Pasangan Berakte Nikah

Indikator ini bertujuan untuk mihat seberapa besar persentase penduduk menikah yang memiliki akte. Akte nikah merupakan bukti pernikahan suami istri yang sah diakui oleh negara dan agama. Kepemilikan akte nikah memudahkan dalam administrasi dan identifikasi kependudukan. Rasio pasangan berakte nikah dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pasangan berakte nikah dengan jumlah seluruh pasangan nikah.

Tabel 2.89
Rasio Pasangan Berakte Nikah Kota Tarakan tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah pasangan nikah berakte nikah	Jiwa	53.658	56.856	61.088	65.646	70.092
Jumlah keseluruhan pasangan nikah	Jiwa	105.309	106.714	109.272	107.429	116.443
Rasio pasangan berakte nikah	Persen	50,95	53,28	55,9	61,11	60,19

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2021

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa rasio pasangan berakte nikah di Kota Tarakan dalam kurun waktu 2016-2020 mengalami peningkatan. Peningkatan ini seiring dengan peningkatan jumlah pasangan menikah dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, rasio pasangan berakte nikah sebesar 60,19%.

Gambar 2.60
Rasio Pasangan Berakte Nikah Kota Tarakan Tahun 2016-2020

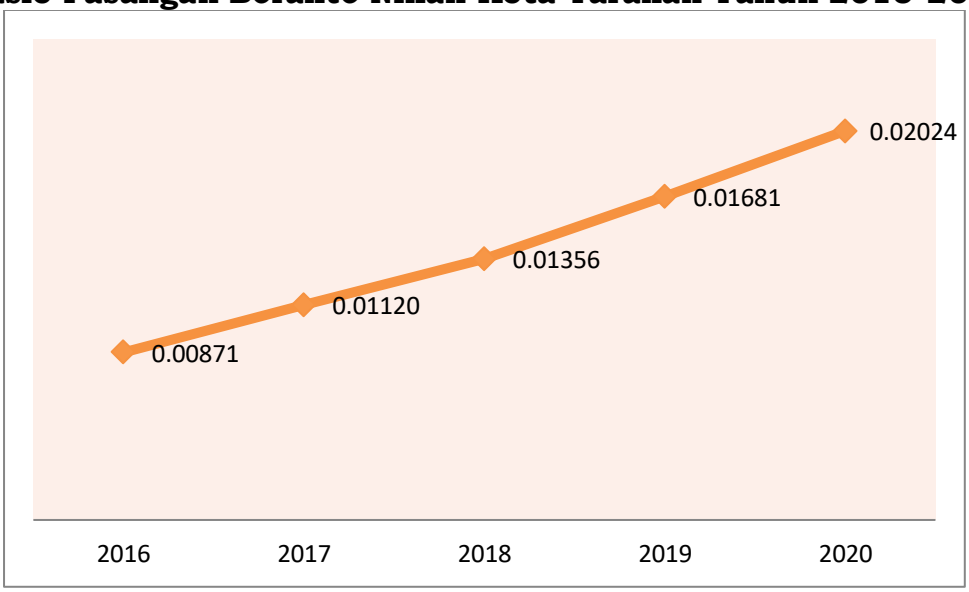

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2021

4) Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi

Indikator ini bertujuan untuk melihat apakah Kota Tarakan memiliki database kependudukan pada skala kota. Data mengenai ketersediaan database kependudukan skala kota berdasarkan informasi dari instansi terkait yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan sudah tersedia. Peng*update*-an database kependudukan di Kota Tarakan dilakukan secara rutin melalui program SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan). Melalui program tersebut, database kependudukan di Kota Tarakan dapat dilihat secara berkala.

Tabel 2.90
Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kota Di Kota Tarakan Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Ketersediaan data base kependudukan skala Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2021

5) Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK

Indikator ini bertujuan untuk melihat apakah KTP yang diterbitkan sudah berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan). Kartu Tanda Penduduk berbasis NIK adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta telah menerapkan program e-KTP dan penerapan KTP berbasis NIK. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, penerapan KTP Nasional berbasis NIK telah dilaksanakan mulai tahun 2009.

Tabel 2.91
Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK di Kota Tarakan Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2021

7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan

1) Jumlah LPM

Ukuran kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa adalah memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya serta mengoptimalkan sumberdaya alam dan manusia setempat sebaik mungkin. Upaya yang harus dilakukan adalah

menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya.

2) Persentase PKK Aktif

PKK atau yang biasa dikenal sebagai Pembinaan Kesejahteraan Keluarga merupakan wadah kegiatan untuk kaum wanita dengan tujuan untuk mengembangkan kreativitas. Tujuan PKK adalah untuk mewujudkan keluarga sejahtera. Keluarga sejahtera seperti tujuan awal pergerakan PKK adalah keluarga yang mampu menciptakan keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara kemajuan lahiriah dan kepuasan batiniah serta mamu berperan dalam masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

Keaktifan PKK untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga merupakan sebuah kekuatan mendasar pada setiap keluarga. Pembangunan terkecil dilakukan oleh PKK di rumah tangganya masing-masing. Untuk itu peran PKK menjadi sangat strategis untuk merealisasikan visi dan misi pemerintah pada skup yang paling kecil. Pemantauan kegiatan PKK menjadi sangat penting untuk mengetahui usaha-usaha aktif di tingkat akar rumput dalam merealisasikan program pembangunan.

Monitoring terhadap kegiatan PKK dilakukan untuk melihat peran serta dalam mencapai tujuan pembangunan. Tabel informasi di bawah ini menunjukkan bahwa kegiatan PKK di Kota Tarakan muncul di tiap-tiap jenjang administrasi, mulai dari RT, Kelurahan, Kecamatan hingga Kota. Keaktifan PKK sebenarnya dapat membantu ibu-ibu untuk meningkatkan kreativas di berbagai

bidang, yang mungkin dapat dikembangkan untuk membantu ekonomi keluarga.

Tabel 2.92
Jumlah PKK Aktif di Kota Tarakan Tahun 2016 – 2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah TP PKK Kota	Kelompok	1	1	1	1	1
Jumlah TP PKK Kecamatan	Kelompok	4	4	4	4	4
Jumlah TP PKK Kelurahan	Kelompok	20	20	20	20	20
Jumlah Kel PKK RT	Kelompok	444	444	444	444	444
Jumlah PKK Aktif se-Kota Tarakan	**Kelompok**	**469**	**469**	**469**	**469**	**469**

Sumber: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, 2021

Pada Tabel di atas diketahui bahwa organisasi PKK secara terstruktur memiliki ikatan integral mulai dari kelompok terkecil yaitu PKK RT, PKK Kelurahan, PKK Kecamatan dan PKK Kota. Pada organisasi PKK ini sesungguhnya terjadi integrasi antara pemerintah yang secara struktural menjadi pengatur dengan institusi terbawah sebagai pembentuk suatu pemerintahan, yaitu unsur keluarga. Sebenarnya jika mampu memaknai secara lebih hakiki kekuatan PKK ini maka suatu daerah akan berkembang. Namun sayangnya untuk mencapai pemaknaan hakiki tersebut masih butuh kesungguh-sungguhan pemerintah dan para Pembina PKK untuk menggali hakikat organisasi ini.

3) Persentase Posyandu Aktif

Posyandu merupakan wadah pemeliharaan kesehatan yang dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibimbing petugas

terkait. Tujuan posyandu antara lain: 1) Menurunkan angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas, 2) Membudayakan NKBS, 3) Meningkatkan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera dan 4) Berfungsi sebagai wahana gerakan reproduksi keluarga sejahtera, gerakan ketahanan keluarga dan gerakan ekonomi keluarga sejahtera. Capaian kinerja posyandu aktif sejak tahun 2015 hingga 2019 sudah sangat baik yaitu 100%, namun dari sisi jumlah posyandu cenderung berfluktuatif.

Tabel 2.93
Jumlah Posyandu Aktif di Kota Tarakan tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Posyandu Aktif	Unit	177	148	180	147	147
Jumlah Posyandu	Unit	177	148	180	147	147
Persentase Posyandu Aktif	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, 2021

Pada tahun 2016, jumlah posyandu di Kota Tarakan sejumlah 177 unit, meningkat dari tahun sebelumnya sejumlah 151 unit. Namun, pada tahun 2017, jumlah posyandu menurun menjadi 148 unit yang dikarenakan terjadi beberapa penggabungan posyandu. Dan meningkat lagi pada tahun 2018 menjadi 180 unit. Pada tahun 2019, jumlah posyandu aktif sebanyak 147.

Gambar 2.61
Grafik Jumlah Posyandu Aktif Kota Tarakan Tahun 2016-2020

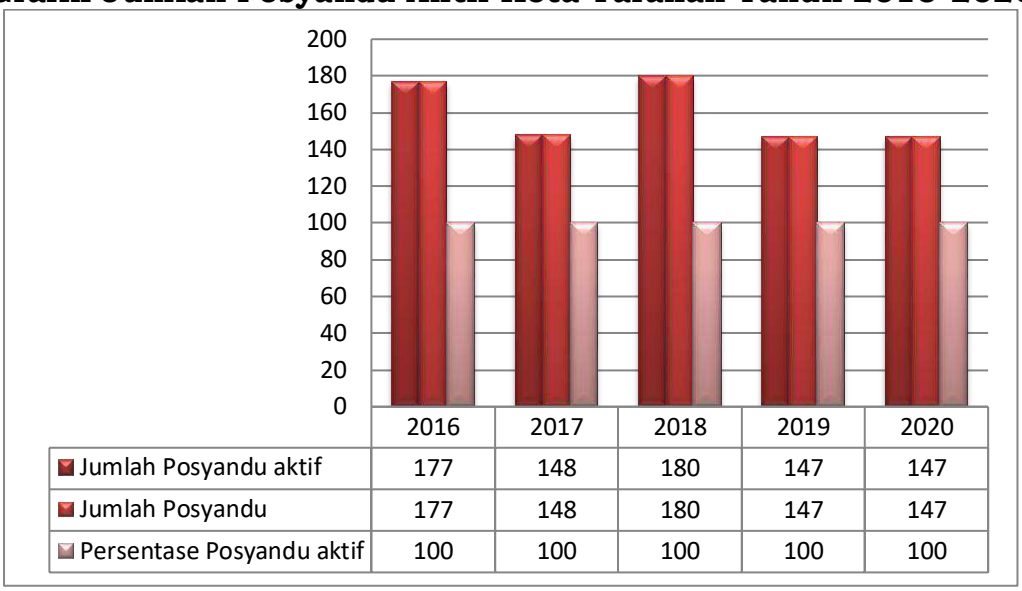

	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Posyandu aktif	177	148	180	147	147
Jumlah Posyandu	177	148	180	147	147
Persentase Posyandu aktif	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, 2021

8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian kependudukan dan keluarga berencana merupakan faktor penting dalam pembangunan khususnya berkaitan dengan keterbatasan sumberdaya. Untuk itu jumlah penduduk perlu dikendalikan dan dikelola secara baik. Ada beberapa indikator yang menggambarkan keberhasilan dalam pengelolaan kependudukan antara lain :

1) Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

Berdasarkan hasil proyeksi BPS, secara umum dalam kurun waktu 2016-2020, laju pertumbuhan penduduk berfluktuatif dengan kecenderungan menurun. Penduduk Kota Tarakan tahun 2020 sebanyak 280.215 jiwa yang terdiri atas 146.502 jiwa penduduk laki-laki dan 133.713 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2019, penduduk Kota Tarakan mengalami pertumbuhan sebesar 3,4

persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2019 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 109,54, yang berarti bahwa di antara 100 penduduk perempuan, terdapat 109 sampai 110 penduduk laki-laki di Kota Tarakan tahun 2018.

Tabel 2.94
Jumlah Penduduk Kota Tarakan Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Penduduk (Jiwa)	244.185	253.026	262.025	270.894	280.215*
2.	Laki-Laki (Jiwa)	127.930	132.420	137.100	141.610	146.502
3.	Perempuan (Jiwa)	116.250	120.610	124.920	129.280	133.713
4.	Laju pertumbuhan penduduk (%)	3,66	3,62	3,56	3,4	3,41
5.	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km^2)	1.070,65	1.089,85	1.116,01	1.080,12	1.117,28*

Ket: Data Proyeksi Penduduk BPS Kota Tarakan (Back Casting)
Sumber: BPS Kota Tarakan, 2021

2) Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB

Kampung KB merupakan salah satu “senjata pamungkas” baru pemerintah dalam mengatasi masalah kependudukan, terutama di wilayah-wilayah yang jarang “terlihat” oleh pandangan pemerintah. Kampung KB, kedepannya akan menjadi ikon program kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Kehadiran Kampung KB bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK serta pembangunan sektor lain dalam rangka mewujudkan

keluarga kecil berkualitas. Prinsipnya Program KKBPK mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera dengan melaksanakan delapan fungsi keluarga. Penerapan fungsi keluarga ini membantu keluarga lebih bahagia dan sejahtera, terbebas dari kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan.

Kampung KB dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada Tanggal 14 Januari 2016 sehingga kampung KB di Kota Tarakan baru dilaksanakan pada Tanggal 29 Maret 2016 dibentuk pada 1 Kelurahan yaitu Kelurahan Juata Laut sementara untuk kegiatan bersama satuan perangkat daerah dan satuan kerja lainnya dilaksanakan mulai tahun 2017 dengan jumlah 23.81% atau ada 10 Organisasi perangkat daerah yang telah mendukung program Kampung KB dari 32 OPD yang ada di Kota Tarakan.

3) Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga

Rata-rata jumlah anak per keluarga dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah anak dan jumlah keluarga. Definisi anak dan keluarga menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas} tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan keluarga unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri atau suami istri dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah samping dengan derajat ketiga. Dari definisi tersebut didapat bahwa yag dimaksud dengan anak adalah penduduk berusia 0-17 tahun. Berikut merupakan data rata-rata jumlah anak per keluarga di Kota Tarakan.

Tabel 2.95
Rata-Rata Jumlah Anak Per keluarga di Kota Tarakan
Tahun 2016 – 2020

INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah anak	Anak	42,529	45,606	67.040	76.349	81.896
Jumlah keluarga	Keluarga	79,469	85,466	37.026	41.743	45.029
Rata-rata jumlah anak per keluarga	Anak	0.54	0.53	1,81	1,83	1,82

Sumber : BPPPAPPKB, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2020

Berdasarkan Tabel di atas diketahui bahwa data jumlah penduduk dengan usia 0-17 tahun menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan. Sedangkan untuk jumlah keluarga menggunakan data jumlah kartu keluarga yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan. Dari pendataan dari Tahun 2016 – 2020 cenderung menunjukkan bahwa dalam satu keluarga masih memiliki jumlah anak yang sama, yaitu satu anak per keluarga. Jumlah ini sudah memenuhi {tidak melebihi} target program keluarga berencana dengan jumlah anak tidak lebih dari dua orang.

4) Ratio Akseptor KB

Akseptor KB adalah pasangan usia subur di mana salah seorang menggunakan salah satu cara/alat kontrasepsi untuk tujuan pencegahan kehamilan, baik melalui program maupun non program. Sasaran program KB dibagi menjadi 2 yaitu sasaran langsung dan sasaran tidak langsung, tergantung dari tujuan yang ingin dicapai. Sasaran langsungnya adalah Pasangan Usia Subur

(PUS) yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kelahiran dengan cara penggunaan kontrasepsi secara berkelanjutan. Sedangkan sasaran tidak langsungnya adalah pelaksana dan pengelola KB, dengan tujuan menurunkan tingkat kelahiran melalui pendekatan kebijaksanaan kependudukan terpadu dalam rangka mencapai keluarga yang berkualitas, keluarga sejahtera. Adapun jenis–jenis aseptor KB meliputi Akseptor KB baru, Akseptor KB Lama, Akseptor KB Aktif dan Akseptor KB aktif kembali. Berikut merupakan data ratio akseptor KB di Kota Tarakan.

Tabel 2.96
Ratio Akseptor KB di Kota Tarakan Tahun 2016 – 2020

INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah akseptor KB	Jiwa	22.080	22.814	23.354	23.816	25.522
Jumlah PUS	Jiwa	32.475	32.343	34.055	34.407	41.126
Ratio Akseptor KB	Persen	67,99%	70,54%	68,50%	69,22%	69,22%

Sumber: BPPAPPKB, 2021

Untuk menekan laju pertumbuhan penduduk salah satu caranya adalah melalui program KB dimana Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dicanangkan untuk mengetahui tingkat Partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap KB. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk.

5) Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 – 49

Peserta KB aktif merupakan pasangan usia subur (PUS) yang pada saat ini masih menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi. Cakupan peserta KB aktif dilihat berdasarkan proposal jumlah peserta program KB aktif terhadap pasangan usia subur. Dalam rangka menekan laju pertumbuhan penduduk, salah satu cara yag digunakan adalah melalui program KB, Keluarga Berencana dan keluarga sejahtera dicanangkan untuk mengetahui tingkat partisipasi KB (Akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk.

Tabel 2.97
Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Usia 15-49 Tahun 2016-2020

INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah peserta KB aktif	Jiwa	22.085	22.063	23.354	23.816	25.522
Jumlah PUS	Jiwa	32.475	31.587	34.055	34.407	41.126
Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	Persen	68,01%	69,85%	68,50%	69,22%	62,13%

Sumber: BPPAPPKB, 2021

Berdasarkan Tabel di atas, angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi pasangan usia subur sepanjang tahun 2016–2019 cenderung meningkat. Meningkatnya jumlah peserta KB aktif menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam program keluarga berencana. Di masa yang akan datang diharapkan jumlah penduduk dapat ditekan dan tidak terjadi lagi ledakan jumlah

penduduk yang berdampak bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

6) Cakupan PUS Yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi *(Unmeet Need)*

Secara harfiah makna *unmet need* adalah kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kondisi ini mengisyaratkan keinginan pasangan usia subur (PUS) terhadap suatu jenis alat kontrasepsi yang tidak tersedia sehingga mereka mengambil keputusan tidak menggunakan alat atau metode kontrasepsi Cakupan PUS yang ingin ber – KB (*Unmet need*). dapat dipahami dalam dua perspektif yaitu dari sisi penyediaan layanan dan dari sisi klien.

Tabel 2.98
Cakupan PUS Yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Di Kota Tarakan Tahun 2016 – 2020

INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani	Jiwa	9.387	8.853	7.020	6.982	10.686
Jumlah PUS	Jiwa	38.209	41.118	34.055	34.407	41.126
Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	28,91%	27,37%	31,50%	20,29%	25,98%

Sumber: BPPPAPPKB, 2021

Angka ini menunjukan bahwa tingkat PUS yang ingin ber-KB namun tidak terpenuhi meningkat dan ini merupakan keberhasilan pemerintah Kota Tarakan mendorong pasangan usia subur untuk

melaksanakan program KB, namun ada 31,50% Pasangan usia subur belum ber KB hal ini disebabkan karena pasangan usia subur yang tinggal di kawasan / daerah pesisir dan tinggal di daerah pertambakan sehingga pmerintah sebagai penyedia layanan bertanggung jawab dan berupaya menyediakan alat kontrasepsi yang di butuhkan masyarakat sebagai klien.

7) Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Metode KB Jangka Panjang (MKJP) adalah alat kontrasepsi yang digunakan untuk menunda kehamilan, serta menghentikan kesuburan, yang digunakan dengan jangka panjang, yang meliputi IUD (alat kontrasepsi dalam rahim), implan dan kontrasepsi mantap. Adapun jenis-jenis MKJP adalah Kontrasepsi dalam rahim (AKDR)/IUD, alat Kontrasepsi Bawah Kulit (AKBK)/Implan/Susuk, tubektomi (pada Perempuan) dan Vasektomi (pada Laki-Laki).

Tabel 2.99
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
Di Kota Tarakan Tahun 2016 – 2020

INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah aseptor KB yang menggunakan MKJP	Jiwa	3.207	3.239	632	608	3.174
Jumlah aseptor KB	Jiwa	22.085	22.814	23.354	23.816	25.552
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen	14,52%	14,20%	2,71%	2,55%	12,42%

Sumber: BPPPAPPKB Kota Tarakan, 2021

Berdasarkan tabel di atas penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP) bagi pasangan usia subur di Kota Tarakan semakin menurun dibandingkan dengan tahun 2016 – 2017, dimana tahun

2016 – 2017 berada di angka 14 persen kemudian di Tahun 2018 – 2019 menurun menjadi 2 persen. Pada tahun 2020 menurun menjadi 2,55. Angka ini masih di bawah angka nasional dimana berdasarkan RPJMN untuk penggunaan kontrasepsi jangka panjang berada 23,5 persen. Untuk itu Pemerintah sangat mengharapkan pelayanan KB di arahkan lebih banyak ke alat kontrasepsi MKJP yang tingkat efektivitasnya sangat tinggi.

8) Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB

Bina Keluarga Balita (BKB) adalah upaya peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan kesadaran ibu serta anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang balitanya melalui rangsangan fisik, motorik, kecerdasan, sosial, emosional serta moral yang berlangsung dalam proses interaksi antara ibu/anggota keluarga lainnya dengan anak balita. Kelompok BKB umumnya terdiri dari keluarga muda dengan anggota yang mempunyai anak batita atau anak balita. Untuk memberdayakan keluarga Batita (Bawah Usia Tiga Tahun) dan keluarga Balita (Bawah Usia Lima Tahun), seluruh jajaran pembangunan diarahkan agar setiap keluarga memberi prioritas yang tinggi terhadap kesehatan dan pertumbuhan anak balitanya dan sebagai gerakan bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk memelihara kesehatan, hantaran tumbuh kembang anaknya, deteksi dini kelainan atau kecacatan dan akhirnya menyiapkan anak balitanya siap sekolah bersama anak-anak lain. Berikut merupakan data Bina keluarga balita (BKB).

Tabel 2.100
Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB di Kota Tarakan Tahun 2016 – 2020

INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah anggota kelompok BKB yang ber-KB	Anggota	575	628	661	981	429
Jumlah anggota kelompok BKB	Anggota	653	714	1.541	2.217	2.139
Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Persen	88.06%	87.96%	42,89%	44,25%	20,06%

Sumber : BPPPAPPKB Kota Tarakan, 2021

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa dalam kurun waktu 2016 – 2020 cakupan anggota bina keluarga balita (BKB) ber KB menurun dimana di tahun 2020 cakupan anggota bina keluarga balita ber-KB 20,06%, langkah-langkah pemerintah untuk membina anggota bina keluarga sebagai berikut : Melakukan analisis kemampuan, kondisi dan potensi wilayah, Menyusun rencana kegiatan kelompok Bina Keluarga Balita ber-KB yang dituangkan dalam RPJMD, Menyusun rencana kerja SKPD-KB yang meliputi , Melakukan analisa data keluarga Balita setiap tahun, Melatih kader BKB, Membentuk dan mengembangkan kelompok BKB, Menyediakan sarana, prasarana dan materi pembinaan kegiatan kelompok BKB, Operasional Kelompok Kegiatan (POKTAN) BKB, Membina kader BKB, Temu kreativitas kader BKB.

9) Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber-KB

Program Bina Keluarga Remaja (BKR) adalah kegiatan bersama yang dilakukan oleh kader dengan orangtua atau anggota keluarga lainnya yang mempunyai anak dan remaja. Sasaran

langsung, adalah setiap keluarga yang memiliki anak usia 7-21 tahun. Adapu sasaran tidak langsung yaitu Perorangan, yaitu pendidik/ guru, pemuka agama, pemuka adat, pimpinan arganisasi profesi, organisasi social kemasyarakatan, pemuda/ wanita, para ahli dari berbagai bidang ilmu yang terkaitInstitusi/ lembaga pemerintah dan non pemerintah, seperti organisasi wanita, sekolah, dan LSOM, Pengelola/ pelaksana Pokja. Berikut merupakan data Bina keluarga remaja (BKB) dalam Tabel berikut.

Tabel 2.101
Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKB) ber-KB di Kota Tarakan Tahun 2016 – 2020

INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah anggota kelompok BKR yang ber-KB	Anggota	56	61	30	155	98
Jumlah anggota kelompok BKR	Anggota	84	92	83	409	409
Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	Persen	66.67%	66.30%	36.14%	37.90%	23,96%

Sumber: BPPPAPPKB Kota Tarakan, 2021

Berdasarkan tabel di atas bahwa cakupan anggota bina keluarga remaja (BKR) ber KB sepanjang tahun 2019 turun menjadi 37,90 persen. Oleh Karena itu pemerintah perlu menerapkan Nilai-nilai moral sebagai dasar dari norma yang dianut keluarga perlu diberikan kepada remaja, penerapannya dilaksanakan melalui 8 fungsi keluarga, agar remaja berprilaku baik sesuai dengan norma-norma dalam keluarga maupun masyarakat.

10) Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB

BKL adalah kelompok kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga yang memiliki lanjut usia dalam pengasuhan, perawatan dan pemberdayaan lansia agar dapat meningkatkan kesejahteraannya. Adapun tujuan Bina Keluarga Lanjut Usia (BKL), untuk meningkatkan kesejahteraan lansia melalui kepedulian dan peran keluarga dalam mewujudkan lansia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, produktif dan bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat. Berikut merupakan data Bina keluarga remaja (BKB) dalam Tabel berikut.

Tabel 2.102
Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB
Di Kota Tarakan Tahun 2016 – 2020

INDIKATOR	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah anggota kelompok BKL yang ber-KB	Anggota	94	103	113	99	148	35
Jumlah anggota kelompok BKL	Anggota	199	214	234	457	632	616
Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Persen	47.24%	48.13%	48.29%	21.66%	23,42%	5,68%

Sumber: BPPPAPPKB Kota Tarakan, 2021

Berdasarkan tabel di atas bahwa cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber KB pada tahun 2016 – 2020 berkisar di angka 48,29 persen sampai dengan 5 persen.

11) Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa

Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK -Remaja) adalah suatu wadah kegiatan program PKBR yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dankonseling tentang Perencanaan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja serta kegiatan – kegiatan penunjang lainnya. Tujuan umum dari PIK Remaja adalah untuk memberikan informasi PKBR, Pendewasaan Usia Perkawianan, Keterampilan Hidup (Life Skills), pelayanan konseling dan rujukan PKBR. Disamping itu, juga dikembangkan kegiatan - kegiatan lain yang khas dan sesuai minat dan kebutuhan remaja untuk mencapai Tegar Remaja dalam rangka tegar Keluarga guna mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera. Berikut merupakan data Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa dalam Tabel di atas.

Tabel 2.103
Cakupan Data Remaja Dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa Di Kota Tarakan Tahun 2016 – 2020

INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah PIK R/M	Anggota	17	20	19	17	18
Jumlah Kecamatan	Kecamatan	4	4	4	4	4
Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	Persen	425%	500%	475%	425%	450%

Sumber: BPPPAPPKB Kota Tarakan, 2021

Berdasarkan tabel di atas bahwa cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa semakin meningkat, hal ini dikarenakan Pemerintah Kota Tarakan bersama

BKKBN Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan program GenRe di kalangan Renaja dan Mahasiswa baik di tingkat di tingkat sekolah maupun tingkat perguruan tinggi di Kota Tarakan. Tahun 2019 pembentukan PIK R/M sudah membentuk 17 kelompok di 4 (empat) kecamatan.

9. Urusan Perhubungan

Perhubungan merupakan aspek penting dalam pembangunan. Semakin baik perhubungan suatu daerah, maka semakin baik pula konektifitas daerah dalam banyak aspek yang kemudian akan merangsang penguatan ekonomi daerah.

Sebagai pintu gerbang utama Provinsi Kalimantan Utara sekaligus wilayah transit, maka bidang perhubungan di Kota Tarakan menjadi salah satu pondasi vital dalam merencanakan pembangunan daerah. Titik tolak perhubungan di Kota Tarakan adalah transportasi udara dimana Kota Tarakan merupakan satu-satunya wilayah di Provinsi Kalimantan Utara yang memiliki bandar udara berstatus bandara internasional dan pelabuhan.

1) Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Transportasi umum dalah layanan angkutan penumpang oleh sistem perjalanan kelompok yang tersedia untuk digunakan oleh masyarakat umum, biasanya dikelola sesuai jadwal, dioperasikan pada rute yang ditetapkan, dan dikenakan biaya untuk setiap perjalanan. Sebagian besar sistem transportasi umum berjalan di sepanjang rute tetap dengan titik pemberhentian dengan jadwal yang telah diatur sebelumnya. Angkutan umum terdiri dari angkutan umum dalam kota dan antar kota. Angkutan dalam kota antara lain angkutan kota, taxi, ojek dan bis. Angkutan umum antar kota terdiri dari pesawat, speed, kapal dan ferry.

Gambar 2.62
Perkembangan Arus Lalu Lintas Penumpang Bandara Juwata Kota Tarakan Tahun 2016 – 2020

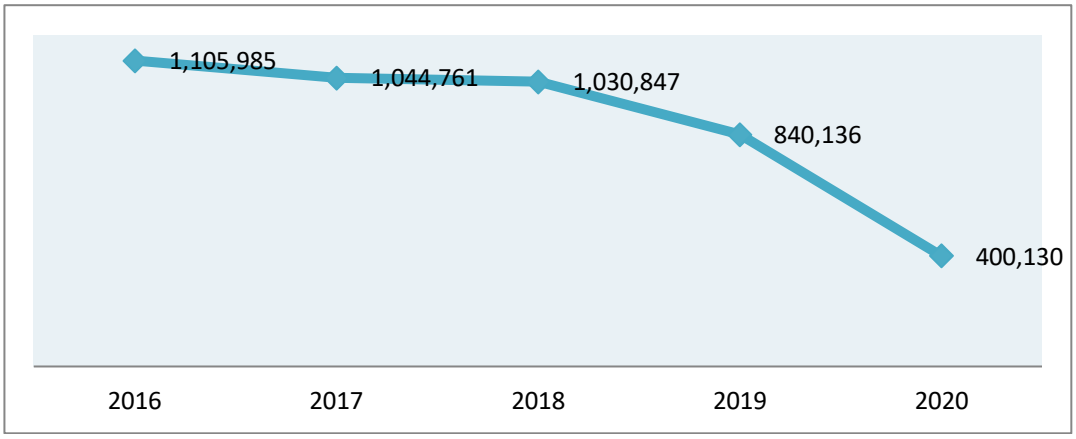

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Tarakan, 2021

Arus lalu lintas pesawat di bandar udara Juwata Tarakan pada tahun 2017 menurun tahun sebelumnya. Arus lalu lintas penumpang mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2018. Sedangkan arus penumpang mengalami penurunan pada tahun berikutnya, yang datang maupun yang pergi, pada tahun 2017 adalah 1.044.761 penumpang. Di tahun 2018 kembali meningkat mencapai 1.030.847 penumpang. Namun menjadi arus terendah di tahun 2020 yaitu sebesar 400.130. PSBB akibat pandemi menjadi salah satu penyebab menurunnya arus lalu lintas pesawat.

Tabel 2.104
Arus Penumpang Di Pelabuhan Laut Di Kota Tarakan Tahun 2016-2020

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Speed Boat (Tengkayu Satu)	837.585	976.702	967.352	987.315	483.984
Kapal Ferry (Pelabuhan Juata Laut)	N/A	13.198	13.963	16.881	9.680
Kapal Laut (Pelabuhan Malundung)	115.636	112.704	142.824	162.513	150.494*

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Tarakan, 2021

Pelabuhan laut juga menjadi jalur transportasi di kota Tarakan, karena menjadi pintu masuk dari beberapa provinsi dan kabupaten/kota lainnya. Jumlah arus penumpang mengalami kenaikan pada tahun 2017 sampai 2019 hal ini disebabkan oleh banyaknya arus penumpang dari dan ke ibu kota provinsi Tanjung selor. Dengan beroperasinya pelabuhan ferry yang berada di juata laut yang melayani pelayaran ke Sulawesi maka penumpang naik pada tahun 2016 – 2018 dari 4.183 menjadi 13.963 penumpang. Arus penumpang di pelabuhan laut Malundung tahun 2017 terdapat 112.704 penumpung dan meningkat 142.824 penumpang pada tahun 2018.

2) Rasio Ijin Trayek

Rasio ijin trayek ijin trayek angkutan kota menunjukkan jumlah transportasi umum terhadap jumlah penduduk. Rasio ijin trayek di kota Tarakan selalu mengalami penurunan dari tahun 2016 – 2020, dari 1,08 % menjadi 3.53 % di tahun 2018 serta mengalami penurunan tahun 2019 sebesar 2,92% dan kembali mengalami peningkatan di tahun 2020 sebesar 3,22%. Angkutan umum di Kota Tarakan memang terhitung sedikit, dikarenakan saat ini banyak masyarakat yang memiliki transportasi pribadi.

Gambar 2.63
Rasio Ijin Trayek Kota Tarakan Tahun 2016-2020

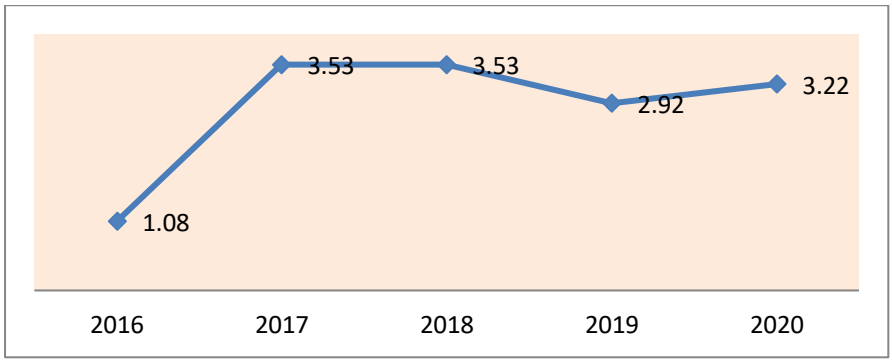

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Tarakan, 2021

3) Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Jumlah Uji KIR angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Uji KIR angkutan umum dilakukan bebrapa pengujian dan dilakukan setiap tahun. Pengujian dilakukan untuk control terhadap angkutan umum, agar penumpang merasa nyaman atas pelayanan angkutan umum.

Gambar 2.64
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Tarakan Tahun 2016-2020

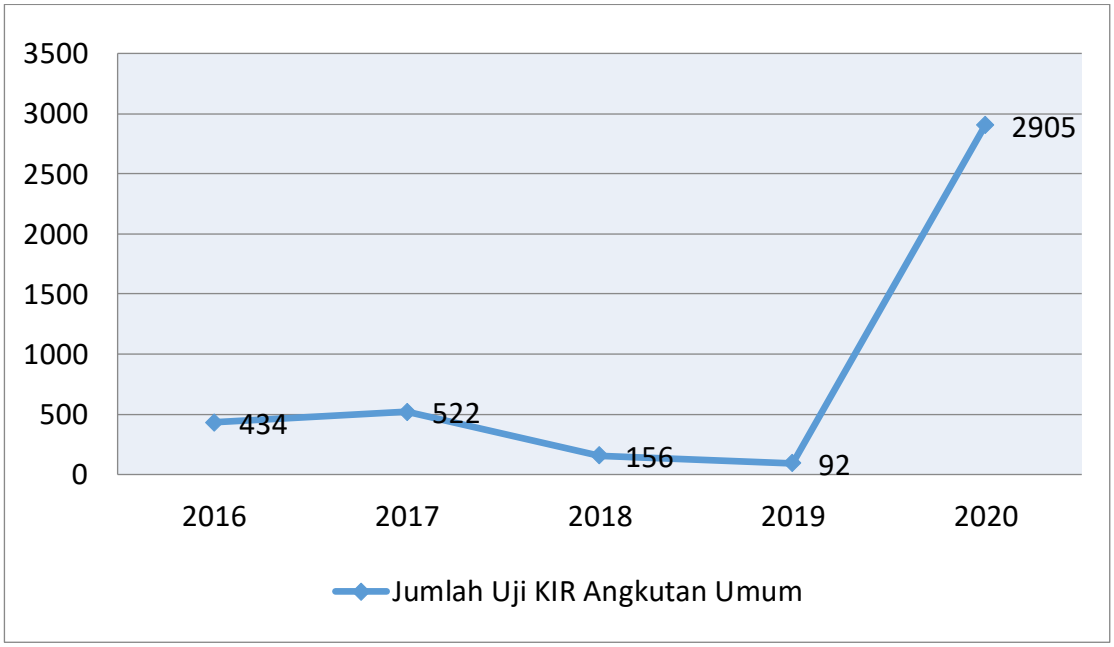

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Tarakan, 2021

Setiap tahunnya angkutan yang melakukan uji KIR dapat dibilang tetap, tidak mengalami kenaikan dan penurunan yang signifikan. Hal ini dapat disebabkan karena semakin berkurangnya angkutan umum yang beroperasi di Kota Tarakan.

4) Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Kota Tarakan merupakan pintu gerbang sekaligus merupakan simpul distribusi barang dan orang bagi wilayah Kalimantan Utara. Oleh karena itu, sarana dan prasarana transportasi Kota Tarakan untuk menghubungkan wilayah ini dengan daerah luar pelabuhan laut terus dikembangkan. Fasilitas tersebut terdiri dari bandara Internasional Juata, Pelabuhan Malundung, Pelabuhan Tengkayu I sampai III, dan Pelabuhan Ferry Juata Laut. Upaya perpanjangan landasan pacu Bandara Juata sedang ditingkatkan dari 1.850 meter menjadi 2.500 meter. Diharapkan nantinya bandara ini akan mampu didarati pesawat Boeing 737 seri 400 dan 500, atau Airbus seri A-320. Di sisi lain, pengembangan Pelabuhan Malundung ditingkatkan dengan pembangunan dermaga 130x25 meter persegi dan 340x10 meter persegi lengkap dengan aksesoris dermaga yang diperlukan.

5) Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum

Kepemilikan KIR angkutan umum merupakan pengendalian terhadap angkutan umum yang dapat beroperasi. Setiap tahunnya kepemilikan pemilik angkutan umum yang melakukan uji KIR mengalami penurunan dari tahun 2016 sampai tahun 2019 meningkat pada tahun 2020. Dari 29,58 persen sampai 49,14 persen pada tahun 2020. Penurunan kepemilikan uji KIR ini dimungkinkan bukan karena ketidaktaatan pemilik angkutan umum, namun dikarenakan berkurangnya jumlah angkutan umum yang beroperasi di Kota Tarakan.

Gambar 2.65
Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum
Kota Tarakan Tahun 2016-2020

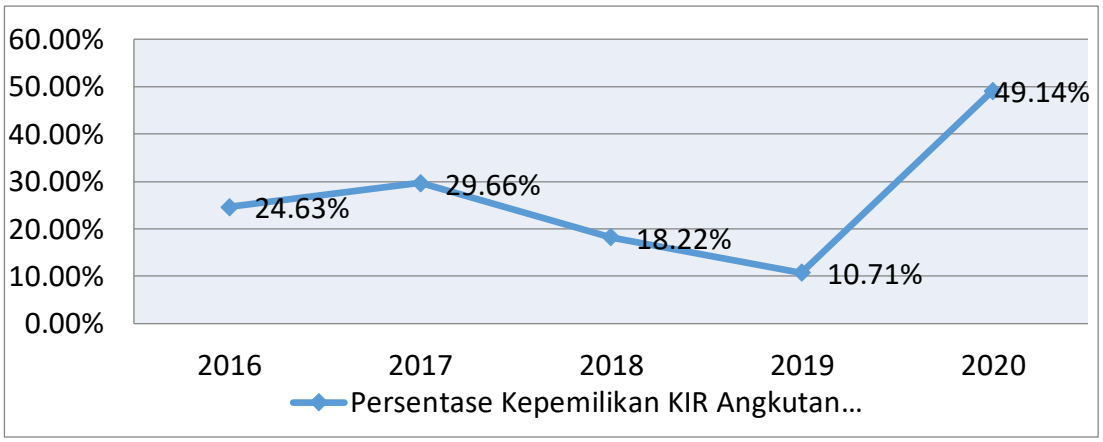

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Tarakan, 2021

6) Pemasangan Rambu-Rambu

Rambu-rambu lalu lintas diperlukan untuk pengaturan ketertiban berkendara oleh pengguna jalan di Kota Tarakan. Pemasangan rambu lalu lintas sebagai petunjuk di beberapa jalan kota Tarakan. Pada tahun 2016 adalah 75 buah dan pemasangan rambu rambu ini terus menurun setiap tahunnya. Tahun 2017 sebanyak 60 buah dan tidak ada pemasangaan rambu-rambu lalu lintas di tahun 2018. Penurunan pemasangan rambu ini dikarenakan, kekurangan pendanaan pada kegiatan pemasangan rambu lalu lintas ini. Namun hal ini tidak mengurangi ketaatan masyarakat dalam berkendara.

Gambar 2.66
Pemasangan Rambu-Rambu Kota Tarakan Tahun 2016-2020

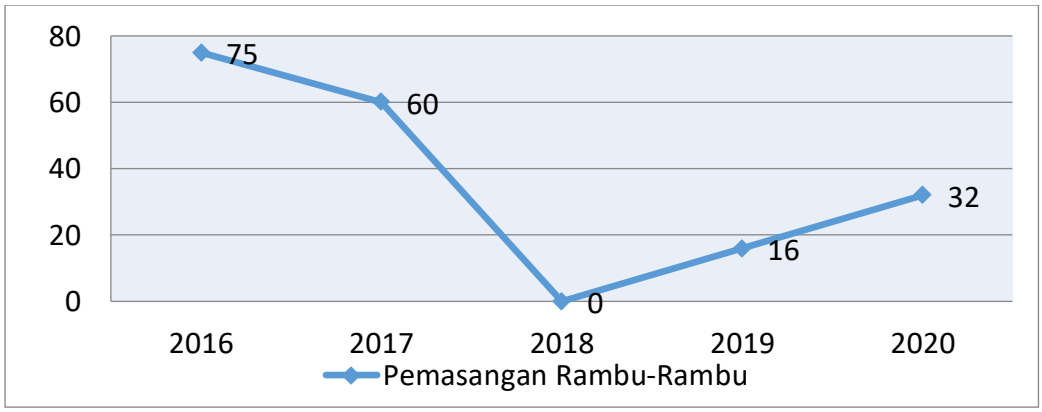

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Tarakan, 2021

7) Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan merupakan perbandingan antara panjang jalan secara keseluruhan dengan jumlah kendaraan yang terdapat di suatu daerah. Kondisi rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kota Tarakan jika dilihat dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan. Hal tersebut dikarenakan pembangunan ruas jalan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mengimbangi jumlah kendaraan yang masuk.

Gambar 2.67
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Kota Tarakan Tahun 2016-2020

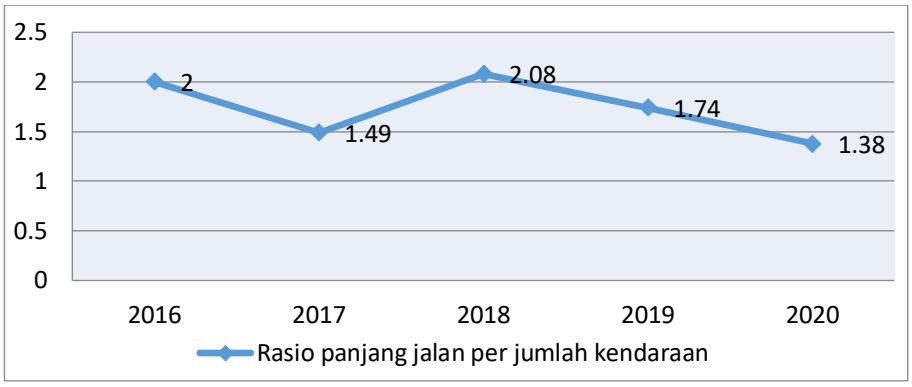

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan, 2021

10. Urusan Komunikasi dan Informatika

Kebutuhan komunikasi dan informasi menjadi kebutuhan utama masyarakat pada era globalisasi ini. Hal ini membuat masyarakat mengandalkan teknologi dan informasi dalam kesehariannya dalam berbagai aktifitasnya termasuk dalam pembangunan.

1) Cakupan Layanan Telekomunikasi

Ketersediaan jaringan telekomunikasi yang andal menjadi faktor utama pendukung pengembangan ekonomi dan pendidikan di daerah. Terlebih lagi, saat ini, pelaksanaan kegiatan administrasi dan transaksi keuangan telah bergeser ke arah digitalisasi upaya pemerataan layanan telekomunikasi di Kota Tarakan tidak mendapatkan masalah yang berarti. Kesiapan infrastruktur pendukungnya jauh lebih mudah diperoleh.

Kualitas jaringan layanan telekomunikasi juga perlu ditingkatkan dengan melakukan peningkatan kualitas jaringan internet broadband dan refarming spektrum frekuensi radio. Tujuannya untuk mengatasi tingkat kepadatan jaringan mobile yang terlalu padat, mengingat jika menginginkan layanan data yang berkualitas baik maka ukuran bandwith harus memadai.

Gambar 2.68
Cakupan Layanan Telekomunikasi Tarakan Tahun 2016-2020

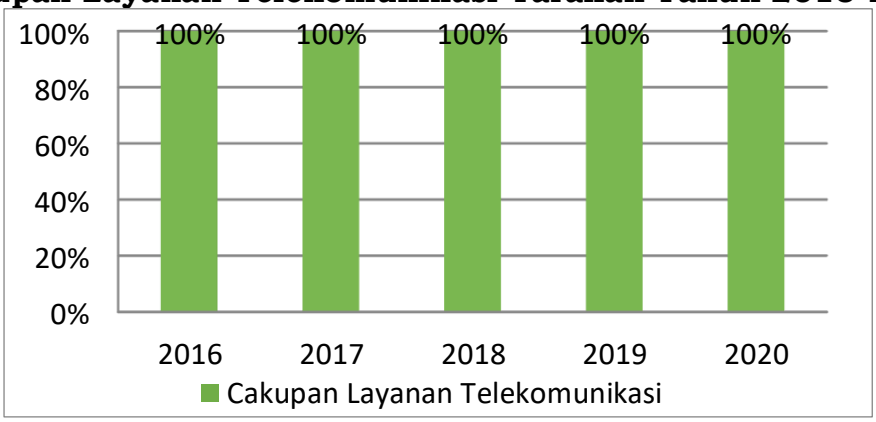

Sumber: Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Tarakan, 2021

Untuk Kota Tarakan layanan telekomunikasi telah dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. BTS berfungsi menjembatani perangkat komunikasi pengguna dengan jaringan menuju jaringan lain sehingga layanan telekomunikasi kita menjadi lancar.

2) Persentase Penduduk Yang Menggunakan HP/Telepon

Telepon seluler (HP) merupakan perangkat telekomunikasi yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon kabel, namun dapat dibawa kemana-mana dan tidak perlu disambungan dengan jaringan telekomunikasi kabel. Di era globalisasi, HP sangat penting untuk memperlancar hubungan dengan orang lain untuk kepentingan seseorang yang mendadak maupun tidak.

Gambar 2.69
Persentase Anggota Rumah Tangga 5 Tahun Ke Atas Yang Memiliki HP Kota Tarakan 2016-2020

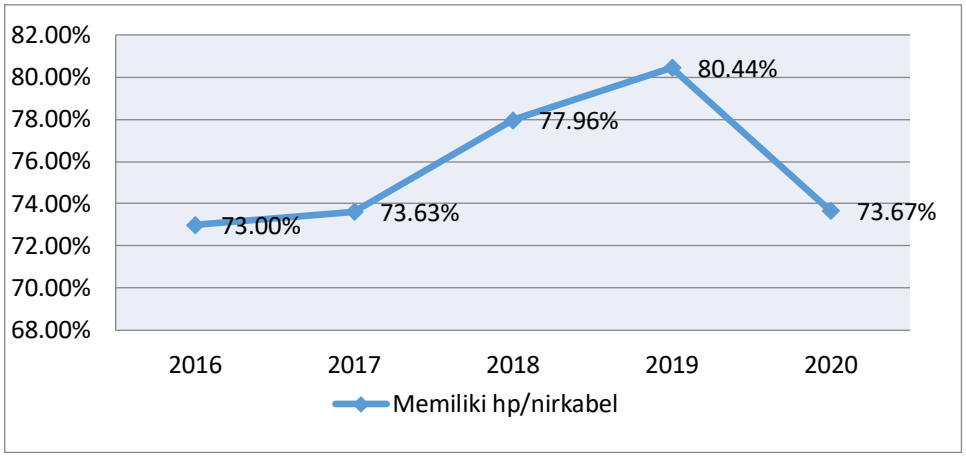

Sumber: Diskominfo, 2021

Berdasarkan tabel di atas, dalam kurun waktu 2016-2020, persentase penduduk yang menggunakan hp/telepon meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2019, persentase penduduk yang menggunakan hp/telepon sebesar 80,44%. Namun pada tahun 2020 persentase anggota rumah tangga yang memiliki HP menurun

menjadi 73,67%. Sebagai salah satu produk perkembangan teknologi, telepon/HP memiliki banyak manfaat diantaranya mempercepat laju komunikasi dan informasi, dapat menyimpan banyak file dan pesan, dapat digunakan sebagai bahan hiburan dan sebagai media diskusi karena banyak media chat atau pesan yang menyediakan diskusi grup.

3) Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet

Proporsi rumah tangga dengan akses internet merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhapat internet terhadap jumlah rumah tangga secara keseluruhan, dinyatakan dalam persentase. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan masyarakat terhadap teknologi terutama untuk mengakses komunikasi dan informasi yang dapat bermanfaat dalam mendukung upaya pembangunan. Semakin tinggi persentase rumah tangga yang memiliki akses internet, maka semakin banyak rumah tangga yang memanfaatkan teknologi informasi dalam hal ini akses internet di kehidupan sehari-hari.

Gambar 2.70
Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet Kota Tarakan Tahun 2016-2020

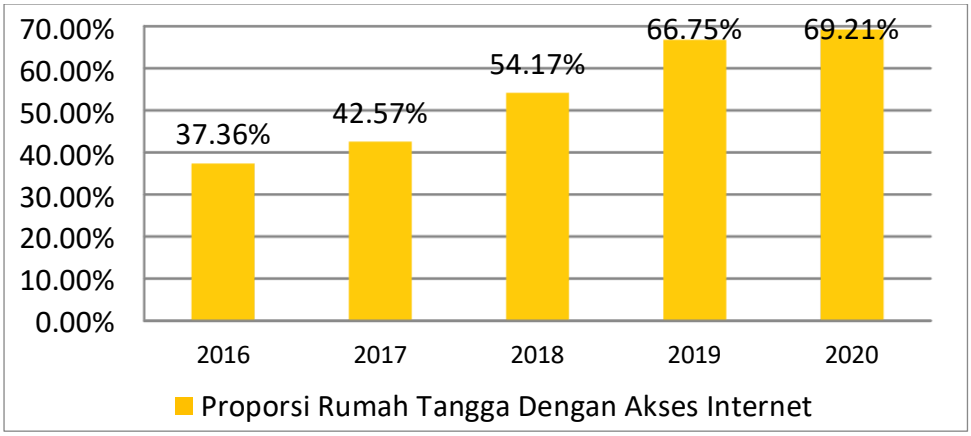

Sumber: Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Tarakan, 2021

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa proporsi rumah tangga di Kota Tarakan dengan penggunaan akses internet dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Internet sudah menjadi kebutuhan dasar di masyarakat Kota Tarakan. Saat ini perkembangan teknologi informasi berkembang tanpa batas. Dewasa ini dunia Internet begitu populer dikalangan masyarakat. Memang adanya teknologi internet banyak merubah cara kerja hampir disemua bidang kehidupan. hampir setiap detik kita disibukan untuk berselancar menggunakan jaringan Internet baik itu untuk mencari informasi, komunikasi atau sekedar untuk hiburan.

4) Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Pribadi

Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Hampir di setiap rumah tangga di Kota Tarakan memiliki komputer pribadi baik itu bentuk PC, Laptop atau Notebook. Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa terjadi peningkatan atas penggunaan komputer pribadi pada rumah tangga di Kota Tarakan.

Gambar 2.71
Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Pribadi Kota Tarakan Tahun 2016-2020

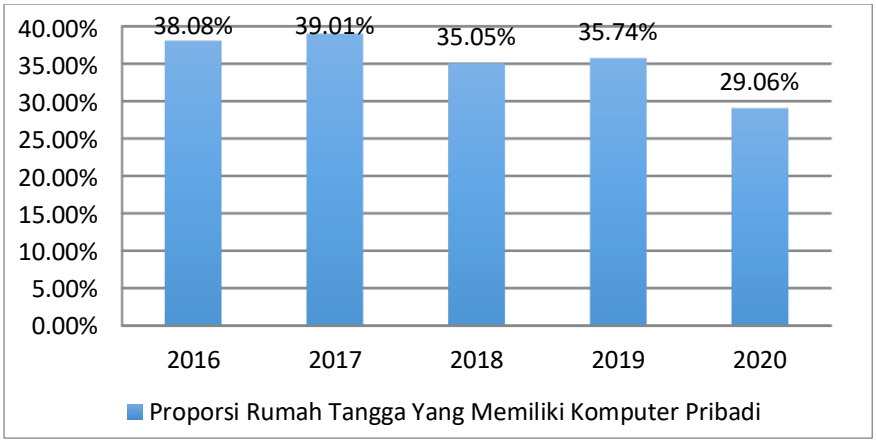

Sumber: Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Tarakan, 2021

11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Salah satu penunjang perekonomian masyarakat, dalam perekonomian mikro (usaha kecil menengah) adalah koperasi yang merupakan wadah kegiatan produktif masyarakat dalam perekonomian rakyat. Untuk itu, dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi mikro maka kapasitas koperasi perlu dibangun.

1) Persentase Koperasi Aktif

Koperasi merupakan salah satu sarana perekonomian yang difungsikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat kalangan menengah ke bawah. Pentingnya fungsi koperasi ditunjukkan melalui peranannya dalam mendukung usaha mikro, kecil dan menengah. Usaha kecil mikro menengah atau informal sebagai bentuk perekonomian rakyat yang mampu bertahan ketika usaha formal tidak mampu memenuhi lapangan perkerjaan. Persentase koperasi aktif di Kota Tarakan selama tahun 2016-2020 cenderung fluktuatif. Persentase koperasi aktif yang paling tinggi ialah pada tahun 2020 yaitu sebesar 60%.

Gambar 2.72
Persentase Koperasi Aktif Kota Tarakan Tahun 2016-2020

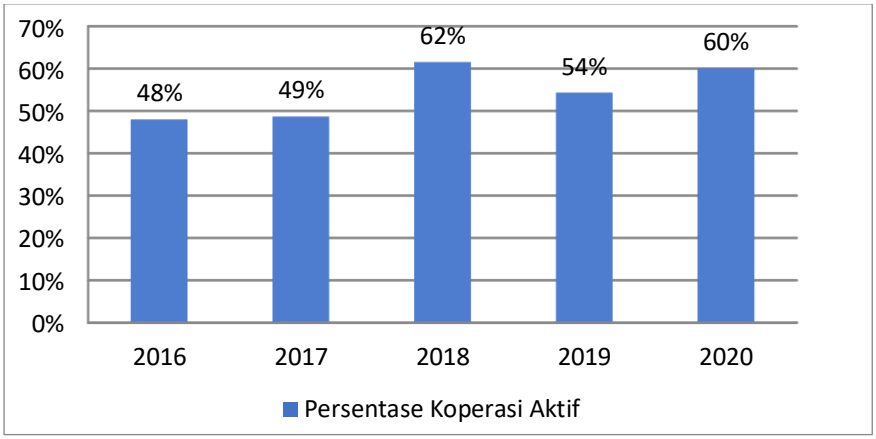

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM, 2021

2) Persentase Usaha Mikro dan Kecil

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan usaha informal yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang tidak ada hubungannya dengan usaha pada level di atasnya (bukan berupa cabang). Keberadaan UMKM membuka kesempatan kerja yang lebih besar bagi masyarakat, terutama bagi kalangan menengah ke bawah. Perbedaan usaha mikro dan usaha kecil dengan usaha menengah hanya terletak pada nilai aset dan omzetnya. Usaha mikro dan kecil juga merupakan salah satu sektor usaha dalam perekonomian yang potensial, oleh karena itu sektor ini perlu diperhatikan dan dikembangkan.

Jumlah usaha kecil dan mikro di Kota Tarakan berkembang pesat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 usaha mikro meningkat menjadi 2.524 unit pada tahun 2016, lalu meningkat menjadi 2.972 unit, kemudian terus meningkat menjadi 3.897 unit pada tahun 2018 bahkan terus bertambah mencapai 15.014 unit pada tahun 2020.

12. Urusan Penanaman Modal

Geliat pembangunan ekonomi sangat dipengaruhi oleh besarnya perkembangan investasi disuatu daerah. Untuk itu berbagai cara perlu dilakukan untuk menarik investasi masuk.

1) Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Penanaman modal merupakan salah satu sumber biaya pembangunan yang potensial di suatu wilayah. Dengan adanya penanaman modal berskala nasional, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri diharapkan mampu memaksimalkan potensi-potensi perekonomian wilayah dan mampu menstimulasi perkembangan pada sektor-sektor lainnya.

Secara umum, dalam kurun waktu 2016-2020, jumlah investor berskala nasional cenderung meningkat. Dibandingkan jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN) pada tahun 2017, jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN) pada tahun 2018 meningkat 173,91% yaitu sebesar 63 investor. Pada tahun 2016, terjadi peningkatan jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) yang sangat besar, hal ini dikarenakan pada tahun 2016, pihak kontraktor yang melaksanakan PL untuk kegiatan pemerintah dikategorikan sebagai investor sedangkan untuk tahun-tahun lainnya, kontraktor yang melaksanakan PL tidak dikategorikan sebagai investor. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2020, jumlah investor mencapai 4.439 investor.

Gambar 2.73
Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) di Kota Tarakan Tahun 2016-2020

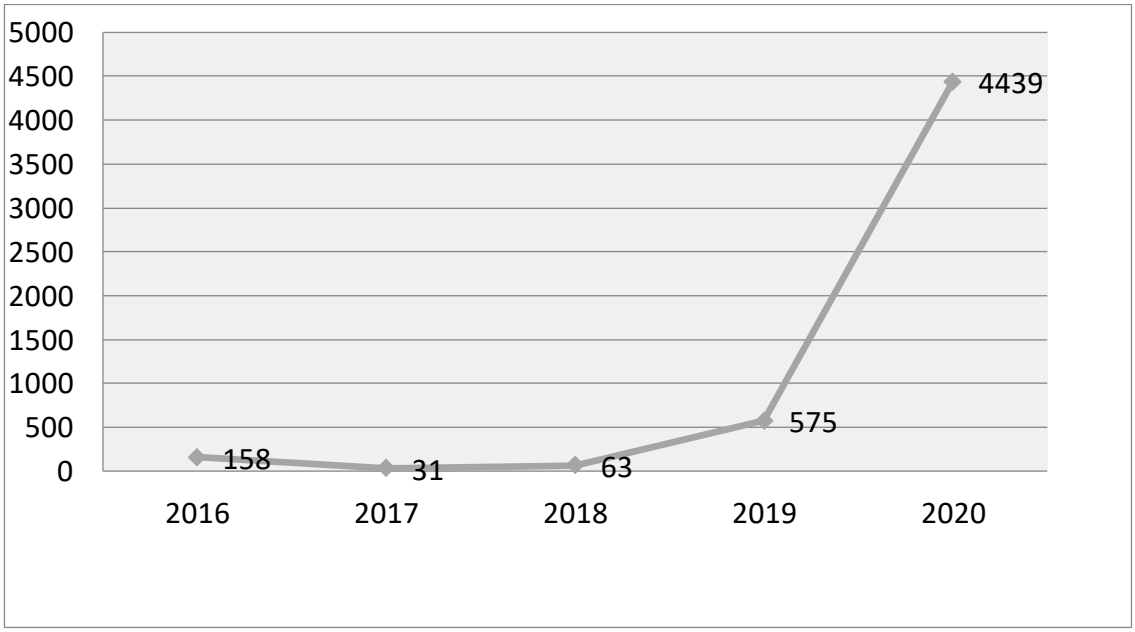

Sumber : DPMPTSP, 2021

2) Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Dalam kurun waktu tahun 2016-2020, perkembangan nilai investasi berskala nasional meningkat setiap tahunnya. Namun,

pada tahun 2017, nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) menurun dan meningkat lagi pada tahun 2018. Dibandingkan nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) di Kota Tarakan pada tahun 2017 sebesar Rp.49.878.705.043, nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) di Kota Tarakan pada tahun 2019 meningkat yaitu sebesar Rp. 179.309.346.960. Pada tahun 2016, nilai Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) sangat besar, hal ini dikarenakan pada tahun 2016, nilai kegiatan PL untuk kegiatan pemerintah dikategorikan sebagai investasi, sedangkan untuk tahun-tahun lainnya, PL tidak dikategorikan sebagai investasi. Pada tahun 2020, terjadi peningkatan nilai investasi sebesar Rp. 542.599.113.489.

Tabel 2.105
Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Tahun	Nilai Investasi (Rp.)	Kenaikan/Penurunan (Rp.)	Kenaikan/ Penurunan (%)
2016	1.009.866.899.005	944.566.879.903	1446,50
2017	49.878.705.043	-959.988.193.962	-95,06
2018	179.309.346.960	129.430.641.917	259,49
2019	714.513.744.160	535.204.397.200	298,48
2020	1.257.112.857.649	542.599.113.489	75,94

Sumber: DPMPTSP, 2021

3) Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Pertumbuhan jumlah perusahaan maupun nilai investasi PMA dan PMDN diharapkan memberikan efek yang positif terhadap perekonomian penduduk. Salah satu efek positif tersebut dapat dilihat dari segi peningkatan rasio daya serap tenaga kerja. Rasio daya serap tenaga kerja merupakan perbandingan jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMA/PMDN terhadap jumlah

seluruh PMA/PMDN.

Rasio daya serap tenaga kerja pada perusahaan penanaman modal asing (PMA) dan perusahaan penanaman modal dalam negeri (PMDN) mencerminkan besar kecilnya daya tampung proyek investasi PMA/PMDN dalam menyerap tenaga kerja di suatu daerah. Semakin besar rasio daya serap PMA/PMDN semakin besar pula jumlah tenaga kerja suatu daerah yang dapat terserap pada perusahaan tersebut.

Pada tahun 2019, rasio daya serap tenaga kerja adalah 8, dimana rata-rata jumlah tenaga kerja yang terserap untuk setiap PMA/PMDN yang ada di Kota Tarakan adalah 8 tenaga kerja. Capaian ini cenderung menurun dari tahun sebelumnya. Dibandingkan tahun 2018, jumlah PMA/PMDN pada tahun 2020 meningkat yaitu sebesar 4.439 PMA/PMDN. Namun, jumlah tenaga kerja yang terserap justru menurun sehingga rasio daya serap tenaga kerja pun menurun.

Tabel 2.106
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kota Tarakan Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Tenaga Kerja Bekerja Pada Perusahaan PMA/PMDN	Jumlah Seluruh PMA/PMDN	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja
2016	1713	158	11
2017	289	31	9
2018	647	63	10
2019	4.526	575	8
2020	17441	4439	4

Sumber : DPMPTSP Kota Tarakan, 2021

13. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Kepemudaan dan olahraga merupakan bagian dari urusan pembangunan yang mengedepankan kreativitas generasi penerus bangsa. Oleh karena itu aspek pemuda dan olah raga tidak boleh dikesampingkan dalam pembangunan.

1) Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif

Organisasi kepemudaan adalah lembaga yang menghimpun segenap potensi anak muda baik mahasiswa maupun anak sekolah yang masuk kategori pemuda bahkan mereka yang tidak menjadi anak terdidik. Pada tahun 2020, persentase organisasi pemuda yang aktif di Kota Tarakan sebesar 100%. Hal ini menunjukkan jika semua organisasi pemuda yang ada di Kota Tarakan aktif.

2) Persentase Wirausaha Muda

Wirausaha merupakan salah satu sektor bisnis yang penting, bersama dengan korporasi, koperasi, serta finansial dan perbankan. Saat ini yang digerakkan untuk menjadi wirausaha adalah yang usianya masih cukup muda, dengan alasan anak muda memiliki banyak inovasi dan tidak takut untuk mencoba hal-hal baru. Pada 100%.

3) Cakupan Pembinaan Olahraga

Dalam pembinaan olahraga, Pemerintah bertindak sebagai fasilitator dan penyandang dana pembinaan olahraga prestasi, sedangkan KONI sebagai pihak yang menjalankan pembinaan olahraga tersebut. Hal ini tertuang dalam Perpres Nomor 22 Tahun 2010 mengenai Program Satlak Prima. Cakupan pembinaan olahraga merupakan perbandingan jumlah cabang olahraga yang dibina terhadap jumlah seluruh cabang olahraga yang

ada/terdaftar dikali 100%. Pada Tahun 2017, cakupan pembinaan di Kota Tarakan mencapai 100%.

4) Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi

Sertifikasi bagi pelatih menjadi penting karena tanpa sertifikasi resmi dari badan organisasi olahraga yang bersangkutan atau Kemenpora RI, pelatih bisa terkendala untuk membina para atletnya yang tampil di kejuaraan resmi level nasional atau internasional. Cakupan pelatih yang bersertifikasi merupakan perbandingan jumlah pelatih bersertifikasi terhadap jumlah seluruh pelatih, dikali 100%. Pada tahun 2017, cakupan pelatih yang bersertifikasi di Kota Tarakan sudah mencapai 100%. Hal ini menunjukkan seluruh pelatih di Kota Tarakan sudah bersertifikasi.

5) Jumlah Atlet Berprestasi

Jumlah atlet berprestasi merupakan jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun. Pada tahun 2017, terdapat 45 atlet berprestasi di Kota Tarakan.

6) Jumlah Prestasi Olahraga

Jumlah prestasi olahraga merupakan jumlah prestasi cabang olah raga yang dimenangkan dalam satu tahun. Pada tahun 2017, terdapat 15 prestasi cabang olah raga yang dimenangkan.

14. Urusan Statistik

Di Kota Tarakan terdapat instansi vertikal yang khusus menangani penyediaan data dan informasi pembangunan, yakni Badan Pusat Statistik Kota Tarakan. Setiap tahun, Badan Pusat

Statistik Kota Tarakan mempublikasikan buku Kota Tarakan Dalam Angka dalam upaya perwujudan pembangunan daerah.

15. Urusan Kebudayaan

Kebudayaan adalah sesuatu yang akan memengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Kebudayaan Kota Tarakan cukup beranekaragam terutama kebudayaan Tidung yang masih terjaga samapai sekarang. Program budaya yang dilaksanakan untuk mendukung khususnya sektor .

1) Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya

Penyelenggaraan festival seni berupa penyelenggaraan festival budaya Irau Tengkayu dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali. Festival budaya Irau Tengkayu diselenggarakan dalam rangka Hari Ulang Tahun Kota Tarakan. Dalam kurun waktu 2016-2020, festival budaya ini telah diselenggarakan 2 kali kegiatan.

Gambar 2. 74
Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya
Kota Tarakan Tahun 2016 – 2020

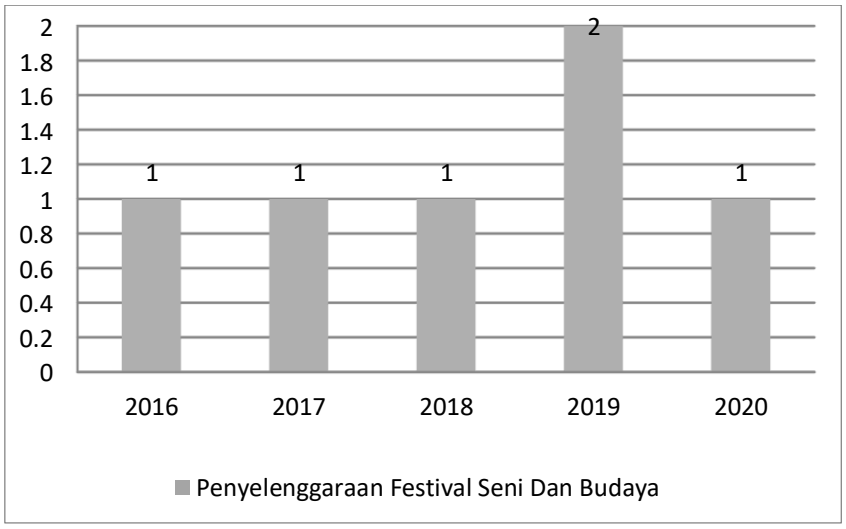

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan, 2021

2) Benda, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan

Cagar Budaya merupakan warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Kota Tarakan memiliki beragam peninggalan Cagar Budaya yang merefleksikan perjalanan panjang sejarah Kota Tarakan hingga terbentuk seperti sekarang. Cagar Budaya tersebut menjadi bukti fase perkembangan kota mulai dari masuknya Islam, tinggalan masa kolonial Belanda, Jepang, dan juga tinggalan budaya yang terkait dengan Australia. Cagar Budaya adalah warisan budaya yang perlu dilestarikan sebab merupakan saksi fisik tumbuh dan berkembangnya Kota Tarakan. Pelestarian Cagar Budaya pada dasarnya tidak hanya sekedar melestarikan fisik bendanya, namun juga melestarikan nilai yang dikandung oleh Cagar Budaya tersebut. Kota Tarakan memiliki 458 benda, situs dan kawasan cagar budaya yang sampai saat masih dilestarikan dengan baik.

Gambar 2. 75
Benda, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan Kota Tarakan Tahun 2016 – 2020

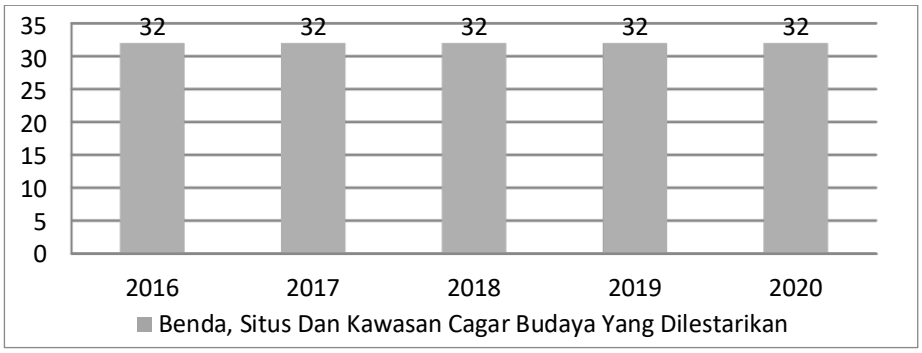

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan, 2020

3) Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi Dan Inventarisasi

Karya budaya merupakan sesuatu yang muncul akibat beberapa faktor seperti letak geografis, kebutuhan, hingga kepercayaan. Karya-karya budaya masa silam tidak semuanya tanggap zaman dalam artian mempunyai daya guna untuk memecahkan masalah-masalah kekinian. Karena itu ia patut ditepis mana yang tanggap dan mana yang sudah kedaluarsa. Untuk menilai kedaluarsa tidaknya suatu hasil budaya, tentu yang jadi ukurannya adalah kemampuan nilainya menjawab tantangan hari ini.

Revitalisasi karya budaya adalah kegiatan yang memungkinkan karya budaya lokal mampu menjawab tantangan jaman. Langkah ini merupakan tindak lanjut langkah pelestarian berupa inventarisasi karya budaya. Dalam kurun waktu 2016-2020, jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2017, jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi sejumlah 40 karya budaya, meningkat dari tahun sebelumnya ejumlah 33 karya budaya.

Gambar 2. 76
Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi Dan Inventarisasi Kota Tarakan Tahun 2016 – 2020

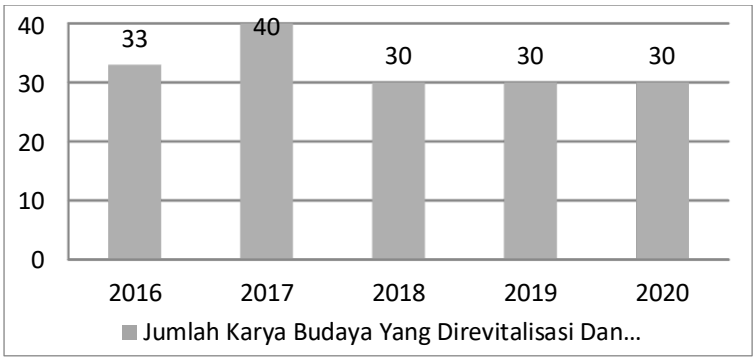

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan, 2020

4) Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu

Pada dasarnya pengelolaan cagar budaya harus dilakukan secara terpadu dan lintas sektoral. Secara internal, pengelolaan cagar budaya menggunakan konsep "three in one" yaitu konsep penelitian yang berwawasan pelestarian dan pemanfaatan, konsep pelestarian yang berwawasan pemanfaatan dan penelitian, serta konsep pemanfaatan yang berwawasan penelitian dan pelestarian. Sedangkan secara eksternal, ketiga lembaga pengelola cagar budaya arus memperhatikan kepentingan masyarakat yang akan dikelola oleh sektor-sektor lain yang terkait, seperti misalnya sektor pendidikan, pariwisata dan ekonomi kreatif, agama dan sebagainya. Oleh karena itu pengelolaan situs cagar budaya secara terpadu merupakan keniscayaan. Dalam kurun waktu 2016-2020, jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu di Kota Tarakan adalah sebesar 47 cagar budaya.

Gambar 2.77
Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu
Kota Tarakan Tahun 2016 – 2020

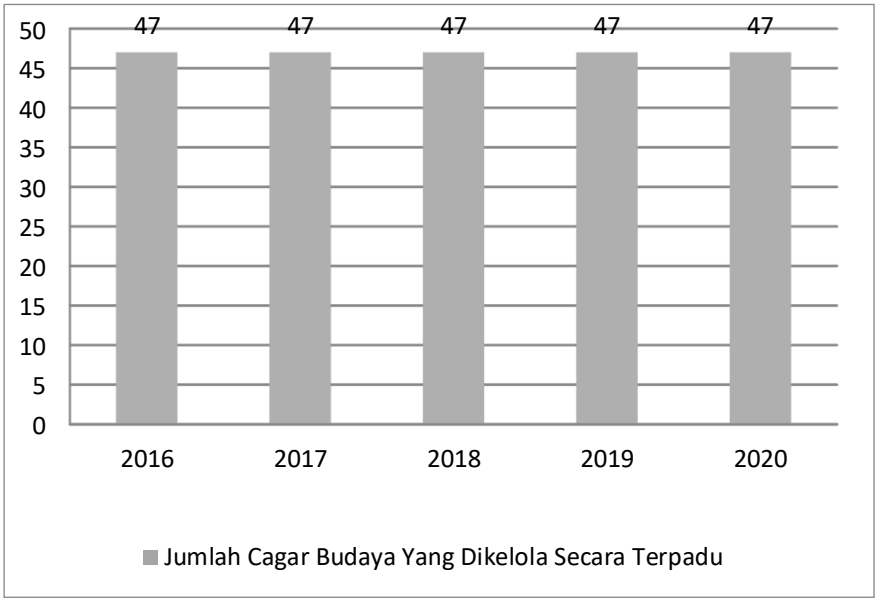

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan, 2020

16. Urusan Perpustakaan dan Kearsipan

Perpustakaan memiliki peran sebagai penyebarluasan data dan informasi dari berbagai bidang keilmuan kepada masyarakat. Dengan kata lain, perpustakaan mempunyai peran dalam mencerdaskan masyarakat melalui bahan pustakanya. Semakin banyak masyarakat yang mengakses bahan pustaka maka semakin baik pula kinerja perpustakaan tersebut. Sedangkan Kearsipan berperan dalam mengelola arsip penting daerah.

1) Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun

Perpustakaan sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Dalam kurun waktu tahun 2016-2019, jumlah pengunjung perpustakaan mengalami penurunan yang sangat signifikan. Pada tahun 2019, jumlah pengunjung perpustakaan mencapai 13.659 orang, menurun secara signifikan dari tahun 2018 yang hanya sebesar 23.254 orang. Dengan semakin baiknya kualitas layanan perpustakaan dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang baik maka minat masyarakat untuk berkunjung ke perpustakaan semakin baik.

Sedangkan di tahun 2020 Jumlah pengunjung perpustakaan mengalami pengurangan cukup significant yaitu sebesar 5.103 jumlah pengunjung. Hal tersebut merupakan dampak dari adanya covid 19 sehingga perpustakaan di tutup guna mencegah penularan covid 19 di Kota tarakan secara langsung.

Gambar 2. 78
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun

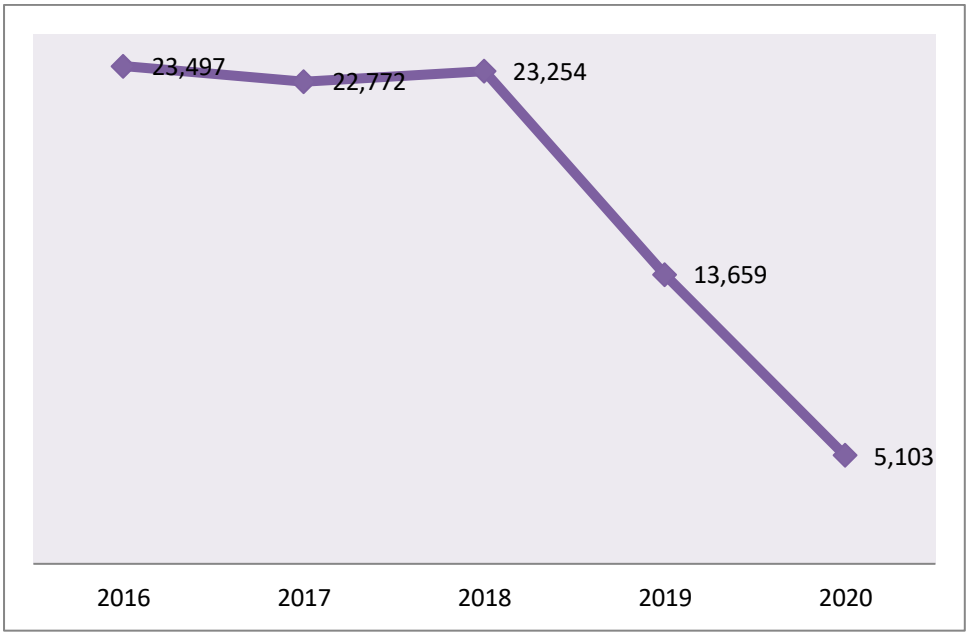

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Tarakan, 2021

2) Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah

Selain dukungan sarana dan prasarana yang baik, jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan juga dapat menarik minat baca masyarakat dan kunjungan ke perpustakaan. Dalam kurun waktu tahun 2016-2020, jumlah koleksi buku mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, jumlah koleksi buku yang ada di Perpustakaan Daerah Kota Tarakan mencapai 47.697 buah, Dengan meningkatnya jumlah koleksi buku diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan bahan bacaan yang diperlukan. Pada Tahun 2020 Koleksi buku di peprusatkaan mengalami peningkatan yaitu sebesar 47.697 judul buku.

Gambar 2. 79
Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah

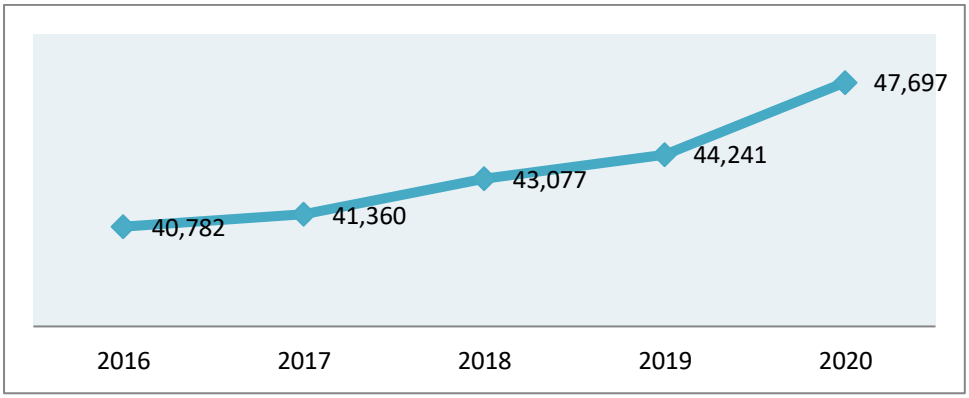

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Tarakan, 2021

3) Rasio Perpustakaan Per Satuan Penduduk

Rasio perpustakaan per satuan penduduk merupakan perbandingan antara jumlah perpustakaan yang ada terhadap jumlah penduduk dikali 1000. Jumlah perpustakaan yang ada di Kota Tarakan adalah 138 perpustakaan yang tersebar di sekolah-sekolah semua jenjang dan juga Taman Bacaan Masyarakat, sehingga bagi masyarakat sangat memudahkan untuk memperoleh layanan perpustakaan melalui perpustakaan maupun Taman Bacaan yang ada di wilayahnya.

Gambar 2. 80
Rasio Perpustakaan Per Satuan Penduduk

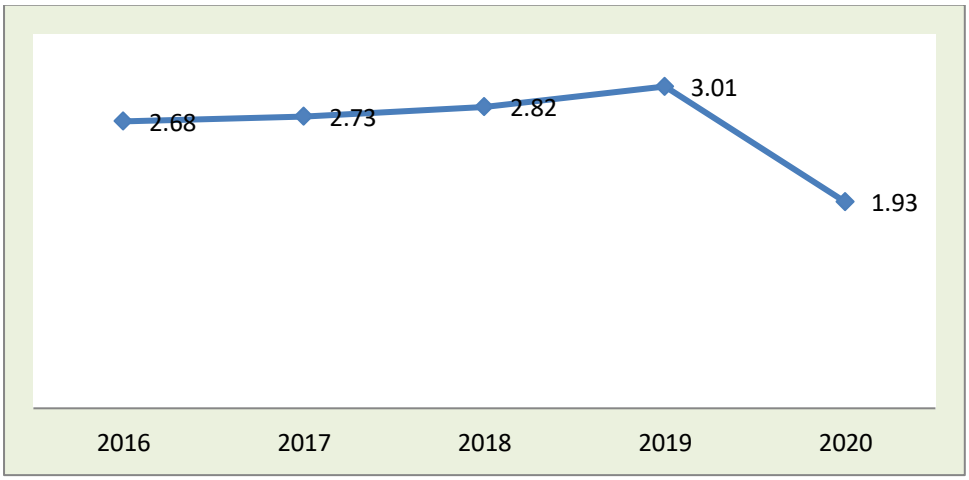

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Tarakan, 2021

4) Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun

Jumlah pengunjung perpustakaan setiap tahun mengalami penurunan. Jumlah pengunjung tertinggi ada pada tahun 2016 sebesar 32%. Semakin menurun pada tahun 2019 sebesar 13,49%. Hal ini menandakan minat baca masyarakat masih kurang.

Gambar 2. 81
Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun
Kota Tarakan Tahun 2016 – 2020

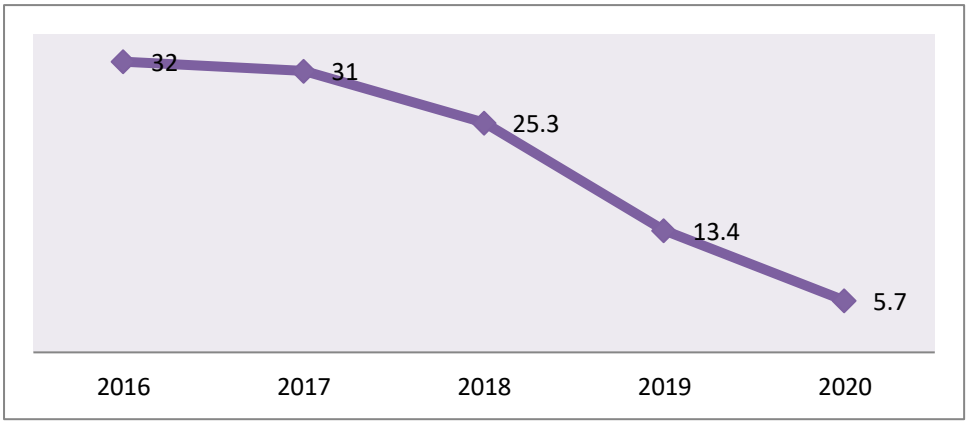

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Tarakan, 2021

5) Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan

Koleksi judul buku yang ada diperpustakaan hingga tahun 2020 sebanyak 14.002 judul buku. Koleksi buku ini masih kurang memenuhi kebutuhan akan bahan bacaan bagi masyarakat terutama bagi mahasiswa di Kota Tarakan. Kedepannya jumlah koleksi buku ini akan terus ditambah.

Gambar 2. 82
Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan
Kota Tarakan Tahun 2016 – 2020

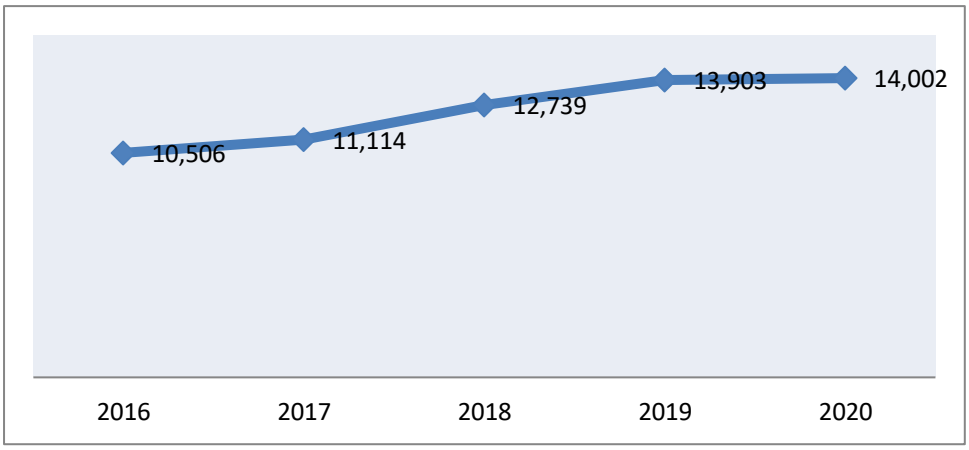

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Tarakan, 2021

6) Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat

Pustakawan merupakan seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan termasuk membantu orang menemukan buku, majalah, dan informasi lain. Pada tahun 2016-2020, perpustakaan daerah memiliki 4 orang pustakawan yang mengelola buku-buku koleksi perpustakaan daerah. Namun pada tahun 2017, dua orang pustakawan tersebut dilantik menjadi pejabat struktural sehingga tidak ada lagi pustakawan.

Tabel 2.107
Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip

Tahun	Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku
2016	2
2017	Tidak ada
2018	Tidak ada
2019	Tidak ada
2020	4

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Tarakan, 2021

7) Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku

Pengelolaan arsip secara baku sangat penting dilakukan agar dokumen yang ada terjamin keamanannya dan memudahkan apabila suatu saat membutuhkan arsip dokumen. Pada umumnya organisasi perangkat daerah sudah mulai melakukan pengelolaan arsip dengan baik sesuai dengan aturan yang ada. Mulai dari pencatatan dan penyimpanan arsip yang tertata dengan rapi. Selain itu pengelola kearsipan juga mendata dan menyimpan arsip-arsip yang berhubungan dengan sejarah dan budaya asli daerah dan sejarah NKRI. Secara umum, dalam kurun waktu 2016-2020, persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2020, persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku mencapai 37,50%,

Gambar 2.83
Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku Kota Tarakan Tahun 2016 – 2020

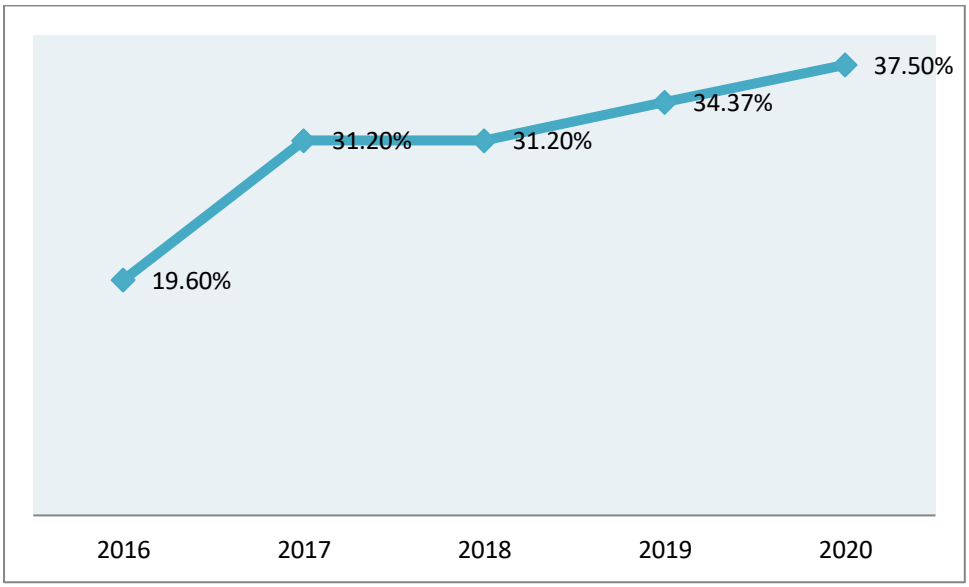

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Tarakan, 2021

8) Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

Peningkatan SDM pengelola kearsipan senantiasa dilaksanakan rutin pada setiap tahunnya karena belum semua SKPD dan Desa menerapkan pengelolaan arsip secara baku. Dalam rangka pengelolaan arsip secara baku pemerintah daerah melakukan pembinaan secara intensif melalui sosialisasi, penyuluhan, dan monitoring kearsipan di lingkungan pemerintahan. Pada tahun 2017, jumlah pengelola kearsipan yang ada di Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah (DAPD) sebanyak 3 orang, yang menangani pengelolaan arsip-arsip yang disimpan di depo arsip mengalami kenaikan setiap tahunnya dan di tahun 2020 SDM penanganan arsip meningkat cukup significant bertambah 8 orang guna men dukung kegiatan pemerintahan.

Gambar 2.84
Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Kota Tarakan Tahun 2016 – 2020

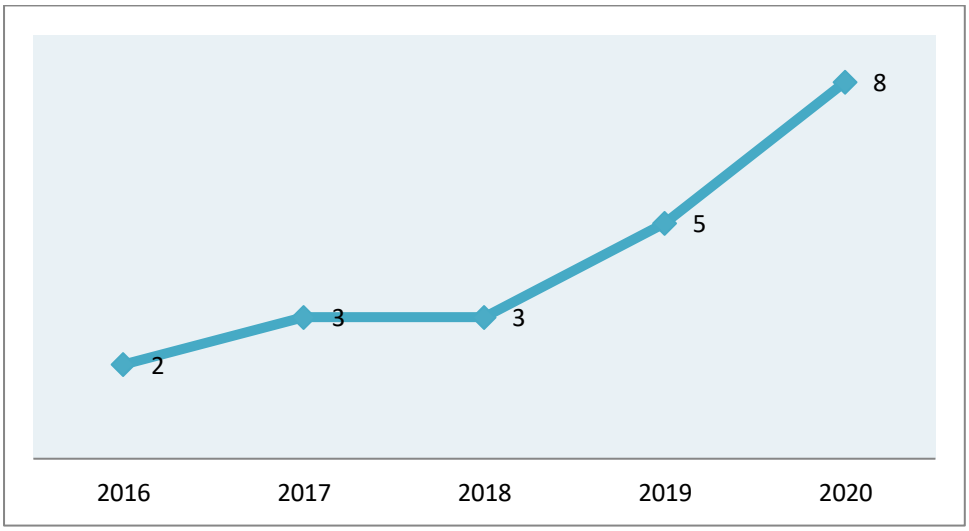

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Tarakan, 2021

c. Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan pemerintahan pilihan merupakan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah tersebut. Berikut analisis singkat potensi yang dimiliki oleh Kota Tarakan.

1. Urusan Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan sektor potensial yang perlu dikembangkan bagi perekonomian Kota Tarakan. Pembangunan sektor pariwisata diarahkan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata, meningkatkan waktu kunjung wisatawan yang akhirnya meningkatkan PAD Kota Tarakan.

1) Kunjungan Wisata

Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau

mempelajari keunikan Daya Tarik Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Sedangkan wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. Kunjungan wisata merupakan perbandingan antara jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Tarakan dan target jumlah wisatawan yang direncanakan,

Secara umum, capaian kunjungan wisata ke Kota Tarakan mengalami penurunan tiap tahunnya. Pada tahun 2020, jumlah wisatawan yang berkunjung di Kota Tarakan sebesar 163.759 wisatawan, menurun dari tahun sebelumnya sebesar 224.792 wisatawan dan kurang dari jumlah wisatawan yang ditargetkan yaitu sebesar 232.495.

Jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung di Kota Tarakan masih didominasi oleh wisatawan nusantara. Pada tahun 2020, wisatawan nusantara yang berkunjung ke Tarakan sebesar 157.821 wisatawan. Jumlah ini menurun dari tahun sebelumnya. Dalam kurun waktu 2016-2020, rata-rata pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan nusantara sebesar -4%.

Wisatawan mancanegara yang berkunjung di Kota Tarakan pada tahun 2020 sebesar 5.938 wisatawan, menurun dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 7.207 wisatawan. Seperti yang terjadi di banyak daerah lainnya, arus wisatawan mancanegara ke Kota Tarakan tersendat selama pandemi Covid 19. Walaupun demikian, jumlah wisatawan ini masih lebih tinggi ari pada tahun-tahun sebelumnya. Dalam kurun waktu 2016-2020, rata-rata pertumbuhan jumlah kunjungan wisata sebesar -1,20%.

Tabel 2.108
Kunjungan Wisata di Kota Tarakan Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	Pertum buhan Rata-Rata/ Tahun(%)
1	Kunjungan Wisman	2.263	2.628	4.128	7.207	5.938	17,65%
2	Kunjungan Wisnus	204.316	199.821	231.765	217.585	157.821	-4,00%
Jumlah		196.172	206.579	202.449	224.792	163.759	-3,55%
Target Daerah		232.495	232.495	232.495	232.495	232.495	0,00%
Kunjungan Wisata (%)		84,38	88,85	87,08	96,69	79,44	-1,20%

Sumber :Dinas Pariwisata Kota Tarakan, 2020

2) Lama Kunjungan Wisata

Lama kunjungan wisata (lama tinggal wisatawan) berkaitan dengan durasi wisatawan tinggal di suatu daerah tujuan wisata. Lama tinggal wisatawan merupakan sebuah variabel kunci untuk setiap daerah tujuan wisata karena berpengaruh terhadap keseluruhan pengeluaran wisatawan. Semakin lama wisatawan tinggal di suatu daerah yang dituju, maka akan semakin banyak pula uang yang akan dibelanjakan oleh wisatawan di daerah tujuan wisata tersebut. Paling sedikit, hanya untuk keperluan makan dan minum serta penginapan selama di daerah yang mereka kunjungi.

Pada tahun 2017, lama kunjungan wisata sebesar 1,74 dan merupakan lama kunjungan wisata tertinggi dalam kurun waktu 2016-2020. Sedangkan yang terendah pada tahun 2019 sebesar 1,07. Pada tahun 2020, lama kunjungan wisatawan menurun mencapai 0,2 hari, menurun 81% dari tahun sebelumnya sebesar 1,07 hari. Walaupun demikian, secara umum, lama kunjungan

wisata di Kota Tarakan masih termasuk rendah dimana wisatawan berkunjung ke Kota Tarakan hanya kurang dari 2 hari.

Gambar 2.85
Lama Kunjungan Wisata di Kota Tarakan Tahun 2016-2020

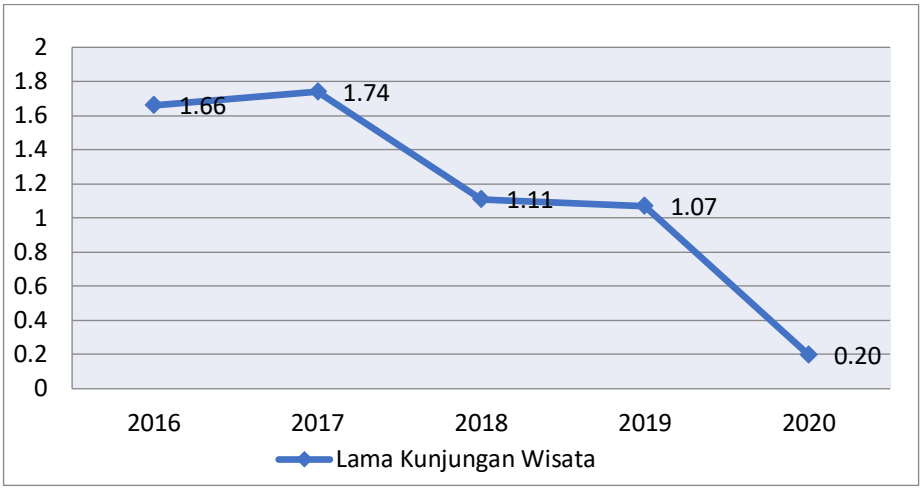

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Tarakan, 2020

3) PAD Sektor Pariwisata

Di era otonomi daerah, setiap daerah dituntut untuk dapat menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan asli suatu daerah (PAD). Pengembangan bidang pariwisata merupakan suatu hal yang sangat perlu dilakukan oleh pemerintah daerah, mengingat banyak sekali keuntungan atau manfaat yang bisa diambil dari kegiatan pariwisata, antara lain dapat menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan dan meratakan pendapatan masyarakat serta memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Secara umum, dalam kurun waktu tahun 2016-2020, kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kota Tarakan meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2020, PAD sektor pariwisata sebesar Rp.17.277.144.557 meningkat 13% dari tahun

sebelumnya dan merupakan PAD Sektor Pariwisata tertinggi dalam kurun waktu tahun 2015-2020. Pada tahun 2020, kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap PAD Daerah sebesar 17,70%, menurun dari tahun sebelumnya sebesar 20,89%. Selain meningkatnya PAD sektor pariwisata, menurunnya total PAD Kota Tarakan berpengaruh terhadap meningkatnya kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kota Tarakan.

Tabel 2.109
PAD Sektor Pariwisata di Kota Tarakan Tahun 2016-2020

Tahun	PAD Sektor Pariwisata (Rp.)	Total PAD (Rp.)	%
2016	11.816.510.914,00	62.198.512.278,56	19,00
2017	13.729.958.196,32	67.092.417.030,24	20,46
2018	14.957.658.452	98.571.841.371	15,17
2019	15.289.508.457,55	73.206.152.456,82	20,89
2020	11.807.911.452,09	66.679.183.508,09	17,70

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Tarakan, 2020

2. Urusan Pertanian

Sektor pertanian disini terdiri atas pertanian, perkebunan, hortikultura dan peternakan. Sektor pertanian pada dasarnya bukan merupakan komoditi utama pembentuk pertumbuhan ekonomi di Kota Tarakan, namun kontribusi harus terus ditingkatkan setiap tahunnya.

1) Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB

Kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian wilayah akan tampak pada kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB berdasarkan jenis lapangan usaha. Pada tahun 2016 kontirbusi sektor pertanian sebesar 11,75% sedangkan tahun 2020 turun menjadi 10,7%. Hal tersebut disebabkan menurunnya

jumlah lahan karena beralih fungsi menjadi hunian masyarakat serta adanya pandemic covid di Tahun 2020 yang menyebabkan produksi pertanian mengalami pengurangan.Untuk itu, perlu adanya peningkatan pemanfaatan lahan yang masih kosong agar produktif guna meningkatkan kontribusi sektor pertanian serta memenuhi kebutuhan masyarakat.

Gambar 2.86

Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture Foresty and Fishery menurut Lapangan Usaha Kota Tarakan Tahun 2016 -2020

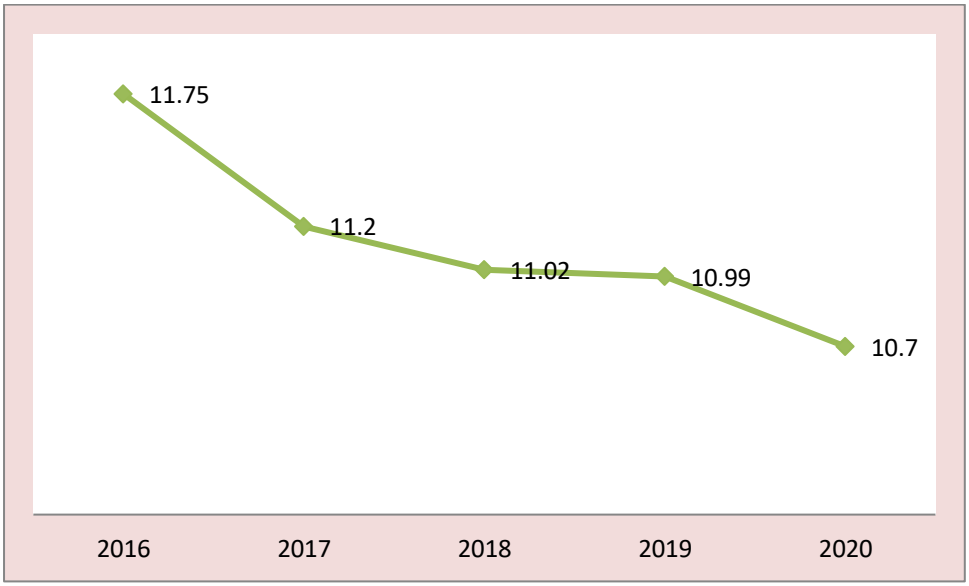

Sumber: PDRB, BPS Kota Tarakan 2021

2) Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB

Sub sektor perkebunan merupakan sub sektor dengan kontribusi terendah kedua setelah sub sektor kehutanan. Nilai PDRB sektor ini cenderung stabil dengan pertumbuhan rata-rata positif sebesar 10 persen per tahun dari tahun 2016–2019. Sementara itu, jika ditinjau dari pertumbuhan tahunannya, sub sektor perkebunan cenderung tidak mengalami pertumbuhan (stabil). Pada tahun 2016 kontribusi sub sektor perkebunan adalah sebesar 0,02 persen dari sektor pertanian/perkebunan.

Gambar 2.87
Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dalam PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha di Kota Tarakan Tahun 2016 – 2020

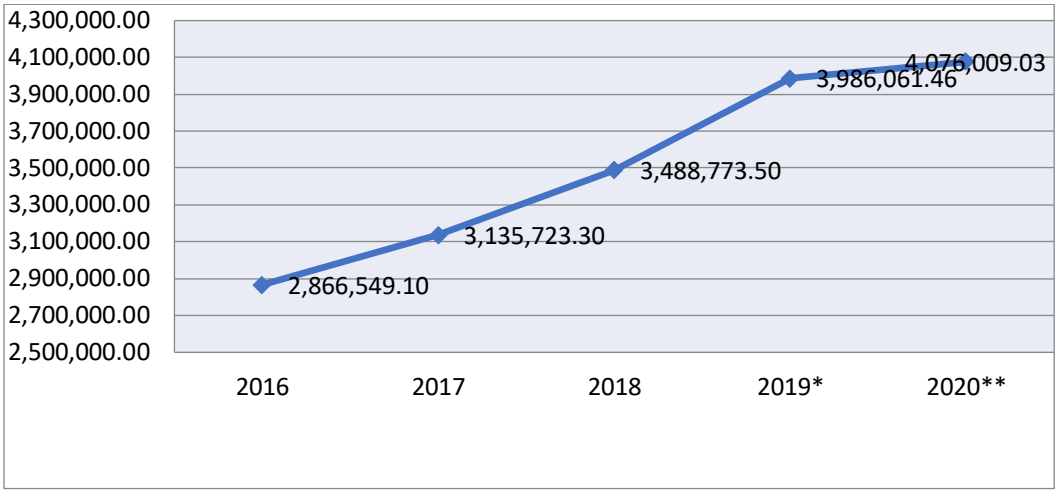

Keterangan: (*) Angka Sementara (**) Angka Sangat Sementara
Sumber: Kota Tarakan Dalam Angka, 2021

Kontribusi kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB Pada tahun 2019 atas dasar harga berlaku mencapai 3,95 triliun rupiah atau sebesar 10,90 persen. Pertumbuhan ekonomi pada kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh secara positif selama 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2019, Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) di Kota Tarakan adalah 36,29 triliun rupiah dan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 (PDRB ADHK 2010) adalah 22,24 triliun rupiah. Laju pertumbuhan PDRB ADHK 2010 di Kota Tarakan pada tahun 2019 adalah 7,69 persen. Laju pertumbuhan tertinggi bila dilihat menurut lapangan usaha di Kota Tarakan tahun 2019 adalah konstruksi (13,25 persen), diikuti oleh jasa kesehatan dan kegiatan sosial (11,02 persen) serta jasa pendidikan (9,98 persen).

3) Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar

Analisis produktivitas padi dan bahan pangan utama lokal di suatu daerah bertujuan untuk mengukur kemampuan daerah tersebut dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduknya. Nilai produktivitas ditentukan oleh jumlah panen serta luas lahan yang ada. Jika dilihat dari produksinya, padi bukan merupakan jenis tanaman utama di Kota Tarakan sedangkan produksi bahan pangan utama palawija (ubi kayu, ubi jalar dan jagung) cenderung lebih besar dari padi, sementara sayuran dan buah-buahan lokal cukup berlimpah dan mampu mencukupi kebutuhan penduduk kota Tarakan.

Apabila dilihat dari perkembangan produksi tanaman padi selama tahun 2016–2020, diketahui bahwa produksinya cenderung berfluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -0,26 persen per tahun, demikian juga perkembangan palawija, meskipun produksinya lebih tinggi daripada tanaman sayuran namun mengalami rata-rata pertumbuhan -0,05 persen pertahun.

Tabel 2.110
Produksi Padi Dan Bahan Pangan Lokal Lainnya Kota Tarakan Tahun 2016 – 2020

No	Jenis Tanaman	Produksi (ton)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Padi	413,8	309,6	285,7	118,8	82,8
2	Palawija	7.545	6.892,5	5.919	29.126	9889,9
3	Sayuran	32.414,	31.206,0	31.796,2	1.351	6655
4	Buah-buahan	19.030,	17.904,2	21.827,8	23.153	104,94
5	Biofarmaka	1.656	1.735,5	1.394,2	1.338	962

Sumber: Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tarakan, 2021

Sejak tahun 2016-2020 penurunan produksi padi tersebut terjadi seiring dengan penurunan hasil panen serta luasan panen. Penurunan luas lahan pertanian di daerah perkotaan umumnya disebabkan adanya alih fungsi lahan pertanian ke fungsi lain yang dianggap memberikan nilai ekonomi lebih tinggi. Sedangkan penurunan hasil panen lebih diakibatkan kualitas lahan yang menurun karena pengaruh lingkungan maupun alam.

Tabel 2.111
Luas Panen Padi Kota Tarakan Tahun 2016- 2020

No	Jenis Tanaman	Luas Panen (Ha)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Padi	63	50	54	33	23
2	Palawija	201	186	161	188	108
3	Sayuran	2.070	1.934	1.922	1.948	1462
4	Buah-buahan	1.917	1.917	1.917	575.995	857,24
5	Biofarmaka	32	35	32,44	31,64	219,28

Sumber: Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tarakan, 2021

Gambar 2.88
Produktivitas Padi Kota Tarakan Tahun 2016 – 2020

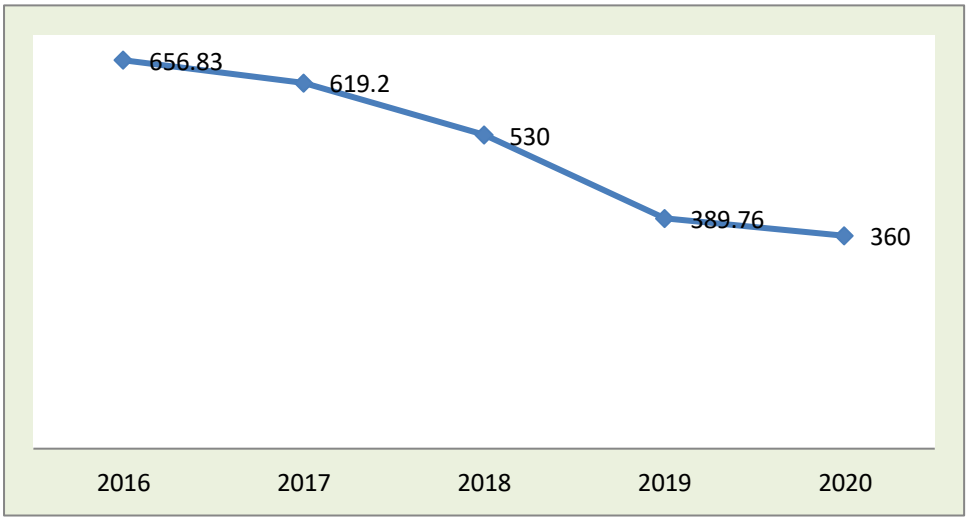

Sumber: Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tarakan, 2021

4) Cakupan Bina Kelompok Petani

Kelompok tani merupakan sebuah bagian penting dalam dinamika kegiatan pertanian di Kota Tarakan. Karena sektor pertanian di kota ini relatif sangat kecil, baik dilihat dari skala kegiatan maupun kontribusinya terhadap PDRB, maka diperlukan adanya koordinasi untuk mempermudah pengarahan dan pengembangan sektor ini. Salah satu langkah yang tepat adalah dengan pembentukan dan pembinaan kelompok-kelompok tani. Seluruh kelompok tani di Kota Tarakan secara umum mendapat pembinaan dari pemerintah daerah, misalnya dalam bentuk penyuluhan dan kegiatan pembinaan lainnya. Pertumbuhan rata-rata cakupan bina Kelompok Tani di Kota Tarakan selama tahun 2016 -2019 sebesar 100 persen per tahun.

Gambar 2.89
Cakupan Bina Kelompok Petani Tarakan Tahun 2016 – 2020

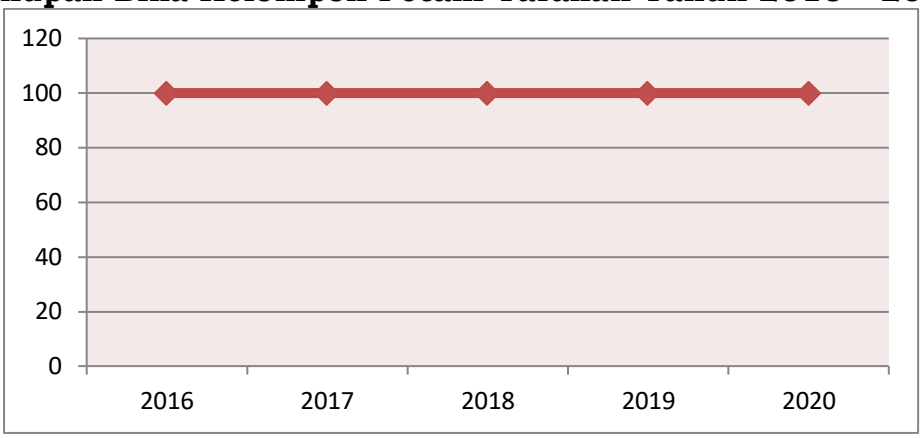

Sumber: Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tarakan, 2021

5) Jumlah Produksi Hasil Peternakan

Produksi hasil peternakan meliputi daging sapi, babi, kambing, ayam dan itik. Daging merupakan sumber protein hhhewani yang berguna untuk pembentukan sel, termasuk otot, otak, dan butiran darah merah, pemeliharaan sel dan jaringan

tubuh, pembentukan antibodi dan pertahanan tubuh, pembentuk hormon dan mempertahankan hormon.

Tabel 2.112
Jumlah Produksi Hasil Peternakan Tarakan Tahun 2016-2020

No	Produksi Ternak	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Produksi Sapi (daging)	Ton	268,75	271,5	273,8	302,05	311,19
2	Produksi babi (daging)	Ton	113,95	112,75	113,21	110,97	136,16
3	Produksi Kambing (daging)	Ton	10,77	12,76	12,98	68,48	70,09
4	Produksi Ayam Ras (daging)	Ton	6.873,84	4.597,62	4.598,11	7.087,24	6.624,07
5	Produksi Ayam Buras (daging)	Ton	826,91	785,56	786,45	640,92	582,50
6	Produksi Itik (daging)	Ton	10,78	3,99	3,56	1,83	5,47

Sumber: Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tarakan, 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui, dalam kurun waktu tahun 2016-2019, produksi daging di Kota Tarakan berfluktuasi. Produksi daging di Kota Tarakan paling besar berasal dari daging ayam ras. Pada tahun 2019, produksi daging ayam ras sebesar 7.087,24 ton. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 4.598,11 ton.

3. Urusan Perdagangan

Kota Tarakan terkenal sebagai pusat perdagangan di Provinsi Kalimantan Utara. Hal ini dikarenakan Kota Tarakan merupakan pintu gerbang perdagangan dari wilayah utara kalimantan. Oleh karena itu perdagangan merupakan salah satu sektor yang mempunyai andil dalam memberikan kontribusi yang signifikan dalam pertumbuhan perekonomian Kota Tarakan.

1) Ekspor Bersih Perdagangan

Ekspor bersih perdagangan merupakan selisih antara nilai ekspor dan nilai impor suatu wilayah. Dari tahun 2016 – 2020, nilai ekspor bersih perdagangan di Kota Tarakan menunjukkan tren menurun.Nilai ekspor bersih perdagangan di Kota Tarakan agar dapat meningkat perlu diadakan intervensi secara intensif dari pemerintah daerah terhadap pelaku usaha terutama difokuskan untuk mengembangkan pelaku usaha UKM agar dapat menghasilkan barang berkualitas dan berdaya saing hingga mampu diekspor.

Gambar 2.90
Ekspor Bersih Perdagangan Kota Tarakan Tahun 2016 – 2020

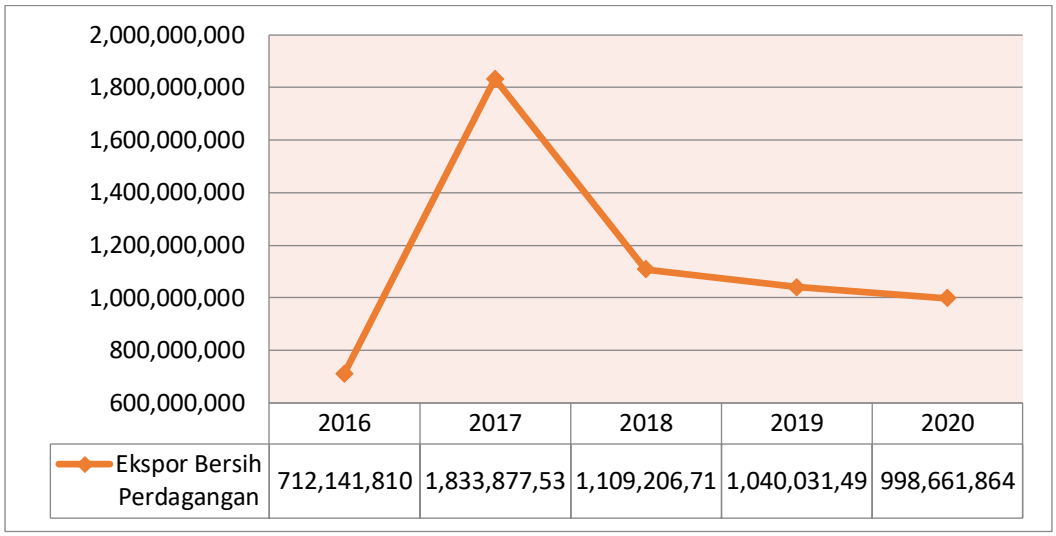

	2016	2017	2018	2019	2020
Ekspor Bersih Perdagangan	712,141,810	1,833,877,53	1,109,206,71	1,040,031,49	998,661,864

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi UMKM Kota Tarakan, 2021

2) Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal

Sektor informal merupakan salah satu solusi efektif penyediaan lapangan kerja bagi negara-negara dengan jumlah penduduk yang besar. Melalui sektor informal, *gap* yang timbul dari permintaan dan penawaran tenaga kerja dapat diperkecil. Selain itu, sektor informal juga memiliki keunggulan dalam imunitas

terhadap krisis perekonomian. Salah satu pelaku usaha informal di Kota Tarakan adalah Pedagang Kaki Lima (PKL). Dari tahun 2016 – 2020, jumlah PKL di Kota Tarakan tidak mengalami pertumbuhan. Jumlah PKL tidak mengalami perubahan, yaitu sebesar 1.279. Namun, jumlah PKL mengalami peningkatan sebesar 182,72%, yaitu sebesar 3.616 PKL.

Gambar 2. 91
Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal Di Kota Tarakan Tahun 2016 – 2020

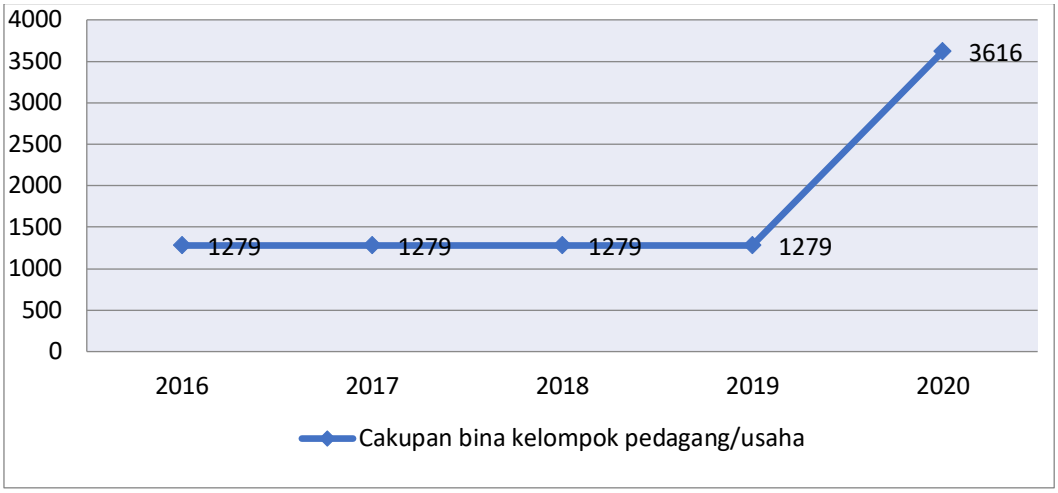

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi UMKM Kota Tarakan, 2021

4. Urusan Perindustrian

Sektor industri juga menjadi andalan ekonomi Kota Tarakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu sektor industri di berbagai skala perlu dikembangkan.

1) Cakupan Bina Kelompok Pengrajin

Konsep industri kerajinan merupakan aktivitas yang berbasis kreativitas yang mana nantinya berpengaruh terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakatnya serta sektor industri kerajinan ini juga yang mampu menyerap tenaga kerja yang

sangat tinggi. Pengrajin adalah orang yang pekerjaannya membuat barang-barang kerajinan atau orang yang mempunyai keterampilan berkaitan dengan pembuatan barang kerajinan tertentu. Barang-barang tersebut pada umumnya tidak dibuat dengan mesin, tetapi dengan tangan. Di Kota Tarakan, dalam kurun waktu tahun 2016-2020, jumlah kelompok pengrajin meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2018, terdapat 22 kelompok pengrajin di Kota Tarakan, meningkat 83,33% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019, jumlah kelompok pengarajin masih tetap sama sejumlah 22 kelompok. Tahun 2020 jumlah kelompok pengrajin meningkat menjadi 24 kelompok.

Gambar 2.92
Jumlah Kelompok Pengrajin Kota Tarakan Tahun 2016-2020

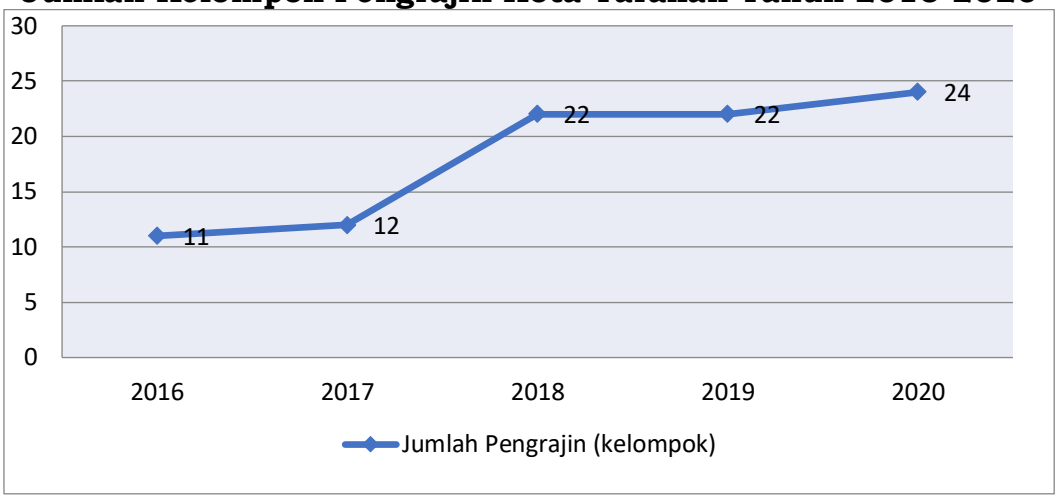

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, 2021

2) Pertumbuhan Industri

Industri adalah seluruh bentuk dari kegiatan ekonomi yang mengelolah bahan baku dan atau memanfaatkan sumber daya industri, sehingga dapat menghasilkan barang yang memiliki nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi, termasuk juga jasa industri. Secara umum, pertumbuhan industri di Kota Tarakan pada tahun

2016-2019 mengalami penurunan, dengan penurunan terbesar pada tahun 2016 sebesar 2,51%. Pada tahun 2017, pertumbuhan industri sebesar 1,13%, menurun 0,01% dari tahun 2016 yaitu sebesar 1.14%. Pada tahun 2018 meningkat sebesar 1,31%, namun kembali mengalami penurunan sebesar 0,55% di tahun 2019. ditahun 2020 rasio pertumbuhan mengalami pertumbuhan yang cukup significant yaitu diangka 23,23% dengan realisasi jauh di atas target karena data perizinan yang terbit melalui OSS juga diakomodir.

Gambar 2.93
Pertumbuhan Industri Kota Tarakan Tahun 2016-2020 (%)

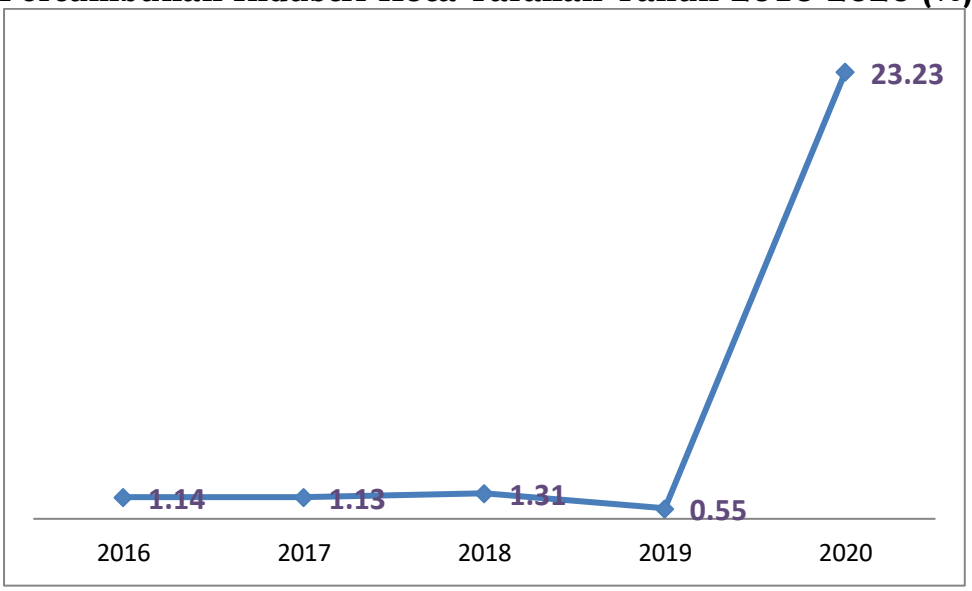

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, 2021

5. Urusan Kelautan dan Perikanan

Sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu komoditas utama yang dikembangkan oleh Kota Tarakan. Hal ini dikarenakan struktur daerah Kota Tarakan yang sesuai untuk mengembangkan usaha perikanan dan kelautan. Oleh karena itu potensi subsektor perikanan dan kelautan mempunyai prospek sangat bagus untuk dikembangkan.

1) Jumlah Produksi Ikan

Produksi ikan mencakup semua hasil penangkapan/budidaya ikan/binatang air lainnya/tanaman air yang ditangkap/dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan, baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan. Jumlah produksi ikan di Kota Tarakan pada tahun 2016-2020 meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2019, jumlah produksi kan di Kota Tarakan mencapai 23.517,89 ton. Sedangkan tahun 2020 mengalami penurunan sekitar 3000 ton menjadi 20.430,00 Ton. Hal tersebut diperikirakan karena dampak padnemi covid 19 menyebabkan berkurangnya nelayan melakukan aktivitasnya karena permintaan eksport ikan mengalami pengurangan.

Gambar 2.94
Jumlah Produksi Ikan Tahun 2016-2020

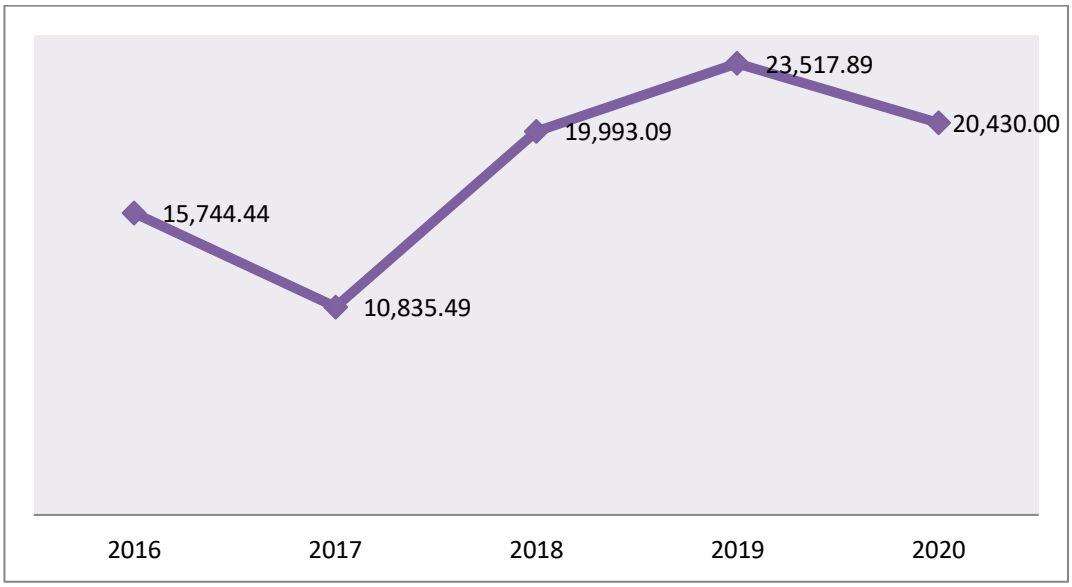

Sumber: Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tarakan, 2020

Tabel 2.113
Perkembangan Data Bidang Perikanan Kota Tarakan

No	Indikator	Satuan			Realisasi		
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Produksi Perikanan Budidaya						
	a. Produksi Rumput Laut (basah)	Ton	151.551.269	151.386,66	152.409,93	152.576,76	185.491,70
	b. Produksi Rumput Laut (kering)	Ton	21.750,61	21.762,77	21.772,85	21.796,70	26.445,92
	c. Produksi budidaya tanpa Rumput Laut	Ton	103,35	103,49	103,51	103,85	127,60
2	Produksi Perikanan Tangkap						
	a. Produksi Non Pelabuhan	Ton	17.685,31	18.789,47	19.889,58	23.414,04	13.441,52
3	Produksi UPI Mikro	Ton	351,22	350,10	377,12	1.029,95	505,89
4	Produksi UPI Menengah-Besar	Ton	16.212,34	16.464,51	17.647,23	15.905,93	15.575,47
5	Produksi UPPN	Ton	21.659,34	21.700,21	21.729,39	21.753,25	26.445,92
6	Konsumsi Ikan	Kg/Kap	70,20	69,21	70,40	72,63	72,73 72,23 73,14
7	Jumlah Izin yang di keluarkan	Izin	267	251	266	46	37 140
8	Ekspor perikanan	Ton	11.784,56	11.864,66	12.341,78	14.647,87	14.764,24
9	Nilai ekspor perikanan	Juta Rp	2.047.459,67	2.051.873,81	2.089.857,90	2.656.647,51	1.723.457,48

Sumber: Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tarakan,2020

2) Konsumsi Ikan

Konsumsi ikan merupakan salah satu indikator yang mampu menunjukkan kemampuan penduduk untuk mengonsumsi ikan. Selain itu konsumsi ikan menunjukkan pula kemampuan daerah untuk menyediakan ikan untuk penduduknya. Kota Tarakan memperoleh pasokan ikan dari hasil tangkapan nelayan dan juga

hasil budidaya ikan yang ada di Kota Tarakan. Konsumsi ikan di Kota Tarakan pada tahun 2016-2020 rata-rata berada pada kisaran angka 61,05 ton setiap tahunnya. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 0,07 persen per tahun.

Gambar 2.95
Konsumsi Ikan di Kota Tarakan Tahun 2016-2020

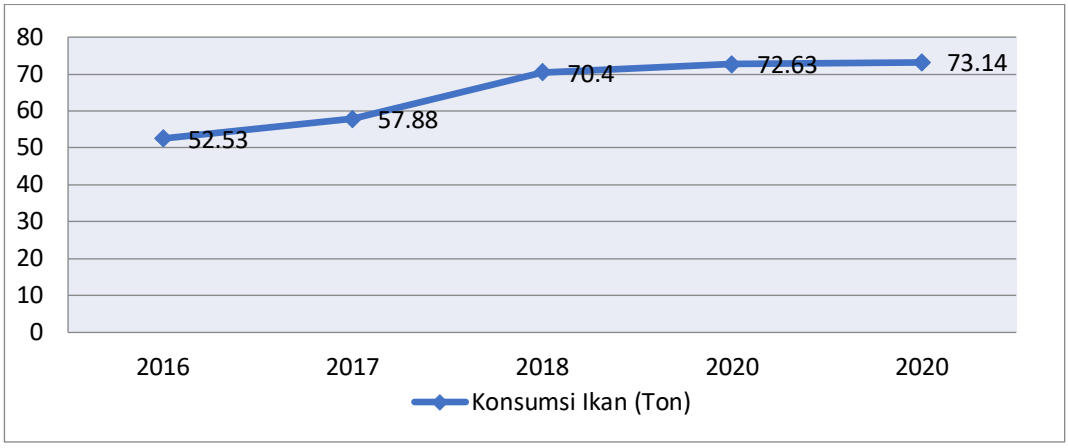

Sumber : Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan, 2020

3) Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Salah satu indikator perkembangan kinerja penyelenggaraaan pemerintah adalah cakupan bina kelompok nelayan maupun kelompok pembudidaya perikanan (POKDAKAN). Pembinaan terhadap nelayan dan kelompok pembudidaya perikanan ini meliputi kegiatan pendampingan /penyuluhan, pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan baik buat nelayan maupun pokdakan, pemberian bantuan (seperti alat tangkap, GPS, *life safety* untuk nelayan dan bantuan bibit dan pakan untuk pembudidaya ikan).

Tabel 2.114
Cakupan Bina Kelompok Nelayan di Kota Tarakan
Tahun 2016-2020

No	Variabel	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah POKDAKAN yang mendapatkan bantuan pemda	Kelompok	14	21	0	4	27
2	Jumlah POKDAKAN	Kelompok	56	79	91	98	69
3	Cakupan bina POKDAKAN	Persen	25	26,58	0	4,08	NA

Sumber: Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tarakan, 2020

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa cakupan bina POKDAKAN di Kota Tarakan dalam kurun waktu 2016-2020 berfluktuatif. Pada tahun 2019, cakupan bina POKDAKAN sebesar 4,08%. Cakupan bina kelompok pada tahun 2018 ini merupakan cakupan terendah dalam kurun waktu 2016-2020. Sedangkan tahun 2020 Jumlah pokdakan yang mendapat bantuan pemda sejumlah 27 yang didapatkan dari pemerintah pusat maupun propinsi Kalimantan utara. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk stimulus dalam penangan pemulihan ekonomi nasional dampak adanya covid 19 di Indonesia. Sedangkan cakupan bina POKDAKAN mencapai 26,58% dan merupakan cakupan tertinggi dalam kurun waktu 2016-2020.

4) Nilai Tukar Nelayan

Nilai tukar nelayan (NTN) merupakan angka yang menunjukkan perbandingan antara indeks harga yang diterima nelayan (IT) dan indeks harga yang dibayar nelayan (IB). IT adalah indeks pergerakan harga paket komoditas yang dihasilkan oleh

kegiatan penangkapan ikan oleh nelayan dibandingkan dengan tahun dasar. IB adalah indeks pergerakan harga paket komoditas yang dikeluarkan oleh nelayan termasuk konsumsi rumah tangga dan biaya produksi dan penambahan barang modal dibandingkan dengan tahun dasar. NTN menjadi proxy indikator kesejahteraan bagi nelayan. NTN>100 berarti bahwa harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya, artinya pendapatan nelayan naik lebih besar dari pengeluarannya atau surplus. NTN=100 memiliki arti bahwa kenaikan harga produksi sama dengan kenaikan harga konsumsi sehingga nelayan mengalami impas. NTN<100 berarti bahwa kenaikan harga produksi lebih rendah dari kenaikan harga konsumsi, pendapatan nelayan turun lebih kecil dari pengeluarannya sehingga nelayan mengalami defisit. Pada tahun 2016 adalah 102,00, kemudian tahun 2017 NTN naik 2% dari tahun sebelumnya menjadi 104,04. Meningkat hingga 126,09 di tahun 2019 sedangkan di Tahun 2020 nilai tukar nelayan berdasarkan penghitungan sementara yaitu sebesar 140,9.

d. Penunjang Urusan

Penunjang urusan mempunyai peranan penting bagi pembangunan berbagai bidang urusan dari wajib hingga pilihan. Oleh karena itu keberhasilan pembangunan bidang urusan yang ada sangat dipengaruhi oleh baiknya fungsi penunjang urusan.

1. Keuangan

Peran penunjang urusan keuangan berkaitan dengan kemampuan penganggaran pembangunan daerah. Keberhasilan peran penunjang urusan keuangan dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain:

1) Opini BPK terhadap Laporan Keuangan

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni :1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah (SAP), 2) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), 3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan 4) Efektivitas sistem pengendalian intern (SPI).

Opini WTP diberikan dengan kriteria sistem pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan. Secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) yang telah diberlakukan Pemerintah sesuai dengan PP nomor 71 tahun 2010. Sedangkan opini WDP diberikan dengan kriteria sistem pengendalian internal memadai, namun terdapat salah saji yang material pada beberapa pos laporan keuangan. Laporan keuangan dengan opini WDP dapat diandalkan, tetapi pemilik kepentingan harus memperhatikan beberapa permasalahan yang diungkapkan auditor atas pos yang dikecualikan tersebut agar tidak mengalami kekeliruan dalam pengambilan keputusan.

Tabel 2.115
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kota Tarakan

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Opini BPK terhadap laporan keuangan	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2021

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Opini BPK atas

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkot Tarakan pada tahun 2016-2018 Kota Tarakan mendapatkan penilai WDP. Pada tahun 2020 Kota Tarakan mampu mempertahankan opini WTP sejak tahun 2019.

2) Persentase SILPA terhadap APBD

SILPA adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan, yaitu selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Dalam penyusunan APBD angka SILPA ini seharusnya sama dengan nol. Artinya bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi.

Gambar 2.96
Persentase SILPA terhadap APBD Tarakan Tahun 2016-2020

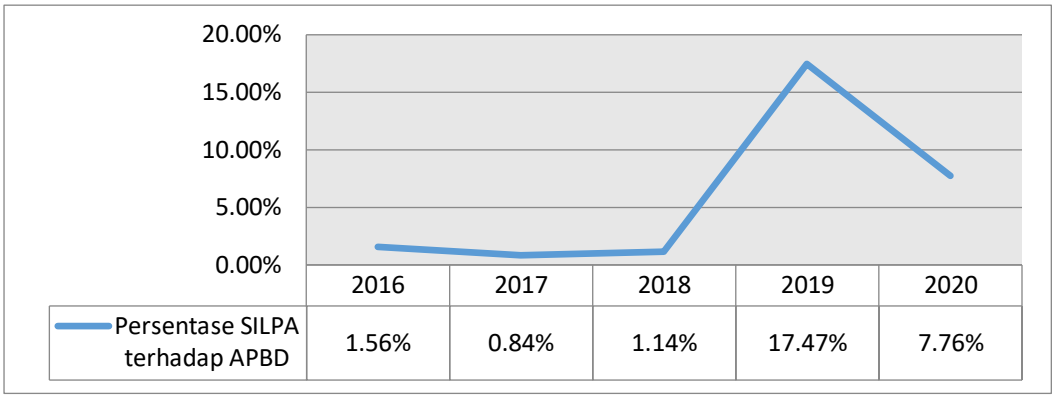

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tarakan, 2021

Berdasarkan gambar di atas, secara umum persentase SILPA terhadap APBD Kota Tarakan mengalami penurunan tiap tahunnya. Pada tahun 2018, persentase SILPA terhadap APBD Kota Tarakan sebesar 1,14%. Hal ini berarti SILPA tahun 2018 dapat dikategorikan baik karena dana telah teralokasi secara baik. Pada tahun 2019 presentase SILPA meningkat signifikan menjadi

17,47%, hal ini dikarenakan dampak pademi covid-19 yang terjadi pada tahun tersebut.

3) Persentase Belanja Pendidikan

Pendidikan adalah variabel yang menentukan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa, sehingga menjadi tanggung jawab pemerintah untuk dapat menjamin terselenggaranya pendidikan dengan mutu/kualitas yang baik. Berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diamanatkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Bentuk keseriusan pemerintah dan DPR dalam bidang pendidikan tertuang dalam Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 Amandemen ke 4 mengamanatkan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Hal ini dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 013/PUU-VI/2008, Pemerintah harus menyediakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Alokasi anggaran diharapkan dapat memenuhi kebutuhan yang terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan. Alokasi anggaran pendidikan lebih spesifik dituangkan dalam pasal 49 UU Nomor 20 tahun 2003 pasal 1 yaitu Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Gambar 2.97
Persentase Belanja Pendidikan Kota Tarakan
Tahun 2016-2020

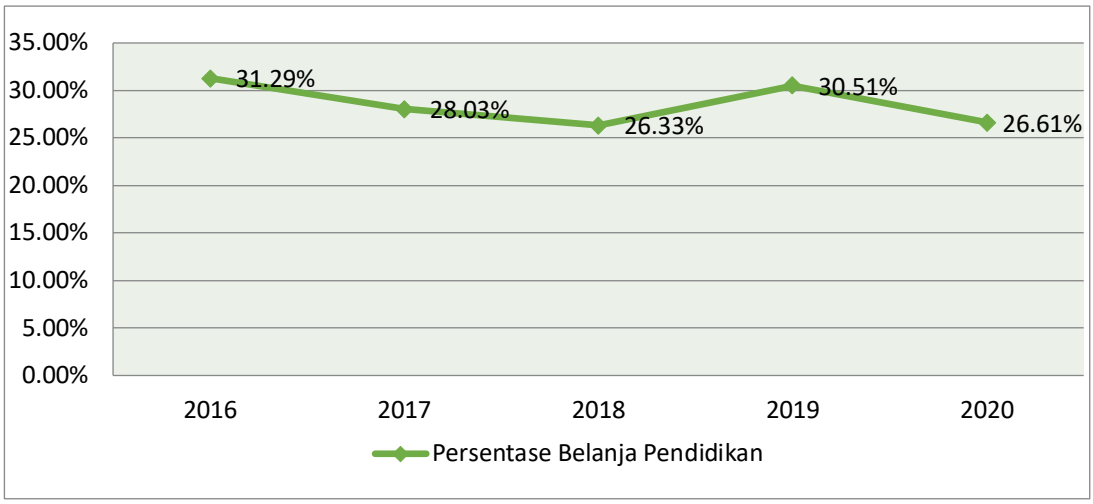

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tarakan, 2021

Berdasarkan gambar di atas, persentase belanja pendidikan secara umum berfluktuatif. Walaupun demikian, dalam kurun waktu 2016-2020, Pemerintah Kota Tarakan telah mengalokasikan anggaran minimal 20% dari APBD untuk dana pendidikan, dengan persentase belanja pendidikan terendah pada tahun 2018 sebesar 26,33%.

4) Persentase Belanja Kesehatan (10%)

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan penting bagi manusia, dan juga merupakan salah satu komponen untuk menghitung indeks pembangunan manusia (IPM) selain pendidikan dan tingkat pendapatan perkapita. Dalam Undang-undang nomor 36 tahun 2009 diamanatkan untuk mengalokasikan 10% dana APBD untuk kesehatan.

Gambar 2.98
Persentase Belanja Kesehatan Kota Tarakan
Tahun 2016-2020

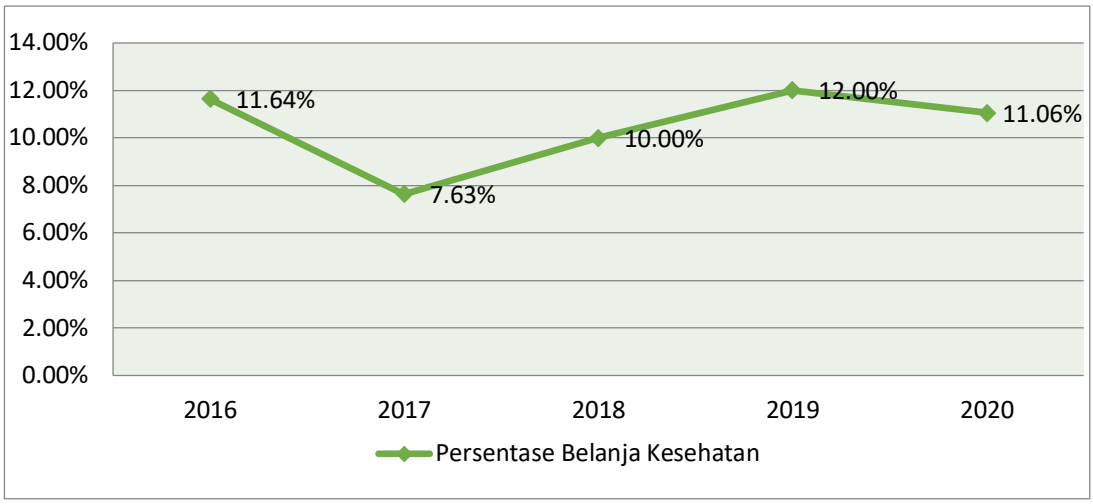

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tarakan, 2021

Berdasarkan gambar di atas, persentase belanja kesehatan secara umum berfluktuatif. Pemerintah Kota Tarakan telah mengalokasikan anggaran minimal 10% dari APBD untuk dana kesehatan, dengan persentase belanja kesehatan tertinggi pada tahun 2019 sebesar 12% dan terendah pada tahun 2017 sebesar 7,63%. Kembali meningkat pada tahun 2019 sebesar 12%. Dan kembali menurun menjadi 11,06% di tahun 2020.

2. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Peran penunjang urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan kemampuan penyediaan SDM yang berkualitas. Keberhasilan peran penunjang urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan pelatihan dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain:

1) Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan Dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan (diklat) sebagai upaya dalam mengembangkan sumber daya manusia (SDM) terutama untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan kepribadian manusia. Oleh karena itu untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam pengembangan pegawai diperlukan program pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan analisa jabatan agar pegawai mengetahui tujuan pendidikan dan pelatihan yang dijalankannya. Diklat bertujuan : 1) Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi; 2) Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan; 3) Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat; dan 4) Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya kepemerintahan yang baik. Pada tahun 2013, rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan adalah 249 jam.

2) Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal

Diklat Formal adalah diklat yang dilaksanakan secara resmi oleh suatu organisasi. Diklat formal bisa dikatakan diklat fungsional, dimana diklat ini merupakan diklat wajib oleh para calon dan pejabat fungsional tertentu seperti diklat auditor atau diklat profesi guru.

Gambar 2.99
Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal Kota Tarakan Tahun 2016-2020

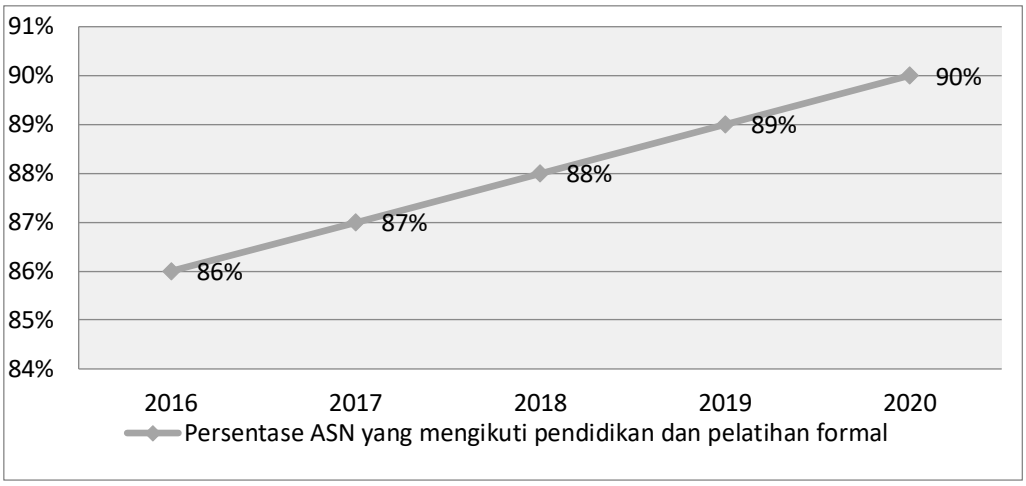

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Tarakan, 2021

3) Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural

Diklat Struktural/Penjenjangan adalah diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur yang sesuai dengan jenjang. Diklat Struktural terdiri dari: 1) Diklatpim Tingkat IV, yaitu Diklat struktural untuk jabatan struktural eselon IV; 2) Diklatpim Tingkat III, yaitu Diklat struktural untuk jabatan struktural eselon III; 3) Diklatpim Tingkat II, adalah Diklat Struktural untuk jabatan struktural eselon II; dan (4) Diklatpim Tingkat I, adalah Diklat Struktural untuk jabatan struktural eselon I. Peserta Diklatpim adalah PNS yang akan atau telah menduduki jabatan struktural.

Gambar 2.100
Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Kota Tarakan Tahun 2016-2020

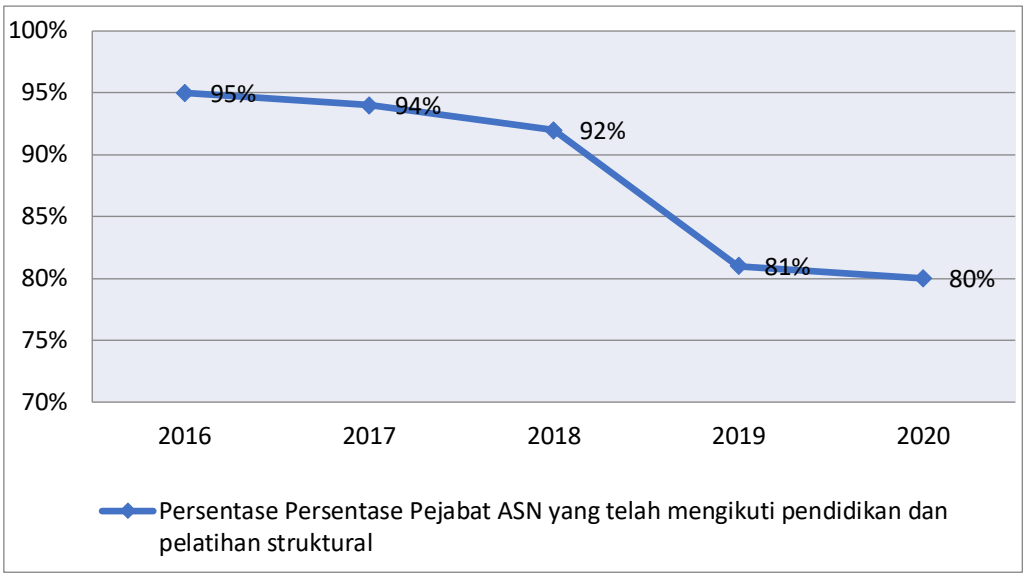

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Tarakan, 2021

Berdasarkan gambar di atas, dalam kurun waktu 2016-2020 persentase pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural di Kota Tarakan berfluktuatif dengan kecenderungan menurun dengan persentase terendah pada tahun 2020 sebesar 80%. Diklat Struktural belum dapat dilaksanakan kepada semua ASN/PNS yang akan atau telah menduduki jabatan struktural, sehingga masih ada ASN/PNS yang diangkat atau telah menduduki jabatan struktural belum pernah memperoleh Diklat Struktural yang dipersyaratkan untuk jabatan struktural tersebut. Padahal, menurut ketentuan PP No. 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural, disebutkan bahwa diklat struktural merupakan salah satu persyaratan untuk mengangkat PNS dalam jabatan struktural.

4) Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah

Jabatan Pimpinan Tinggi Aparatur Sipil Negara adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah. Jabatan Pimpinan Tinggi berfungsi memimpin dan memotivasi setiap Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah. Jabatan Pimpinan Tinggi hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian dan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara.

Gambar 2.101
Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah Kota Tarakan Tahun 2016-2020

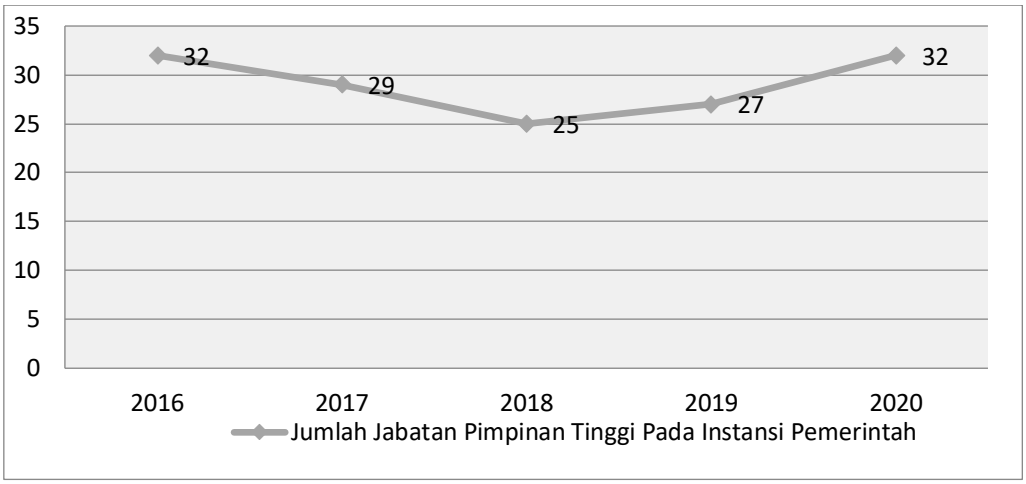

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Tarakan, 2021

Pada tahun 2019 jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi Pemkot Tarakan sebesar 27 orang, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 25 orang. Dan meningkat kembali di tahun 2020 menjadi 32 orang.

5) Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah

Dalam PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, jabatan PNS terdiri dari Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional Dan Jabatan Pimpinan Tinggi. Masih dalam PP ini, jenjang Jabatan Administrasi dari yang paling tinggi ke yang paling rendah terdiri atas Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana.

Gambar 2.102
Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah Kota Tarakan Tahun 2016-2020

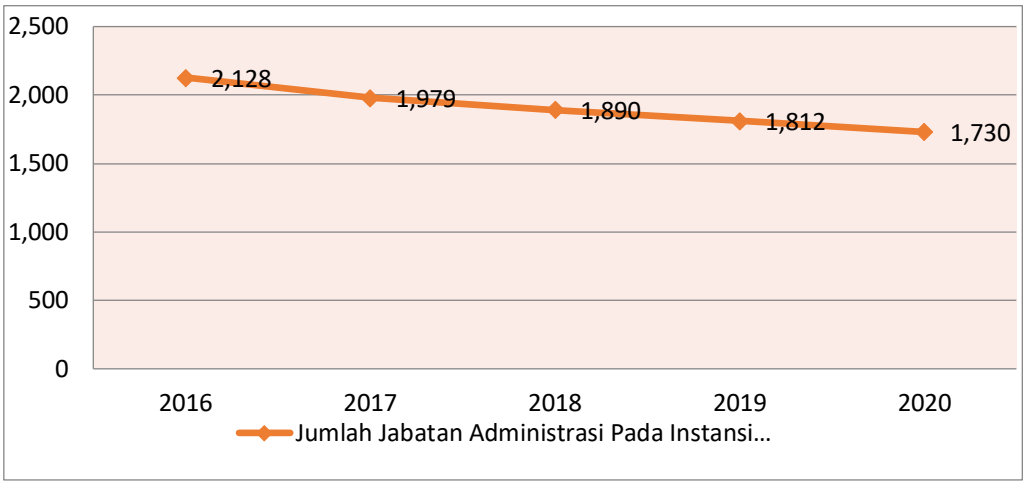

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Tarakan, 2021

Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu 2016-2020, jumlah jabatan administrasi pada instansi Pemerintah Kota Tarakan berfluktuatif dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2020, jumlah ini menurun menjadi 1.730 pegawai.

6) Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah

Jabatan Fungsional Aparatur Sipil Negara adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan

fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Jabatan fungsional dikelompokkan berdasarkan pengangkatan dan angka kredit yakni jabatan fungsional tertentu (JFT) dan jabatan fungsional umum (JFU). Pada jabatan fungsional tertentu/khusus, pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit, sedangkan jabatan fungsional umum tidak diisyaratkan dengan angka kredit.

Gambar 2.103
Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah Kota Tarakan Tahun 2016-2020

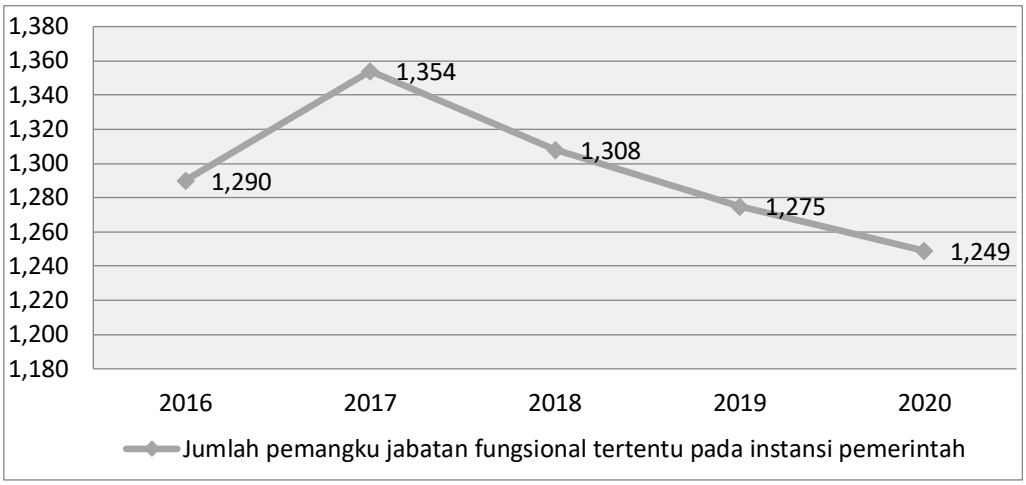

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Tarakan, 2021

Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu 2016-2020, jumlah JFT pada instansi pemerintah Kota Tarakan berfluktuatif dengan kecenderungan menurun.

3. Pengawasan

Peran penunjang urusan pengawasan berkaitan dengan control pelaksanaan pembangunan agar tetap sasaran dan tidak menyimpang. Keberhasilan peran penunjang urusan pengawasan dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain:

1) Persentase Tindak Lanjut Temuan

Setiap tahun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menerbitkan ragam rekomendasi yang berisi saran perbaikan atas berbagai temuan audit, termasuk yang berpotensi merugikan keuangan negara. Hasil rekomendasi BPK tersebut selanjutnya ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah.

Untuk menjamin pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi BPK secara efektif, cepat dan tepat, maka perlu pemahaman isi Laporan Hasil pemeriksaan (LHP) dan ketentuan mengenai tindak lanjut atas rekomendasi BPK. LHP BPK utamanya memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan, yaitu berupa kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan/ atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketidakpatuhan ini dapat mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, atau ketidakefektifan.

Permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara dan kekurangan penerimaan merupakan permasalahan ketidakpatuhan yang berdampak finansial. Sedangkan penyimpangan administrasi dan permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan ketidakhematan, ketidak efisienan, dan ketidakefektifan merupakan permasalahan ketidak patuhan yang tidak berdampak finansial. Permasalahan-permasalahan yang mengandung indikasi unsur pidana nantinya akan disampaikan kepada instansi yang berwenang secara terpisah.

Gambar 2.104
Persentase Tindak Lanjut Temuan Tarakan Tahun 2016-2020

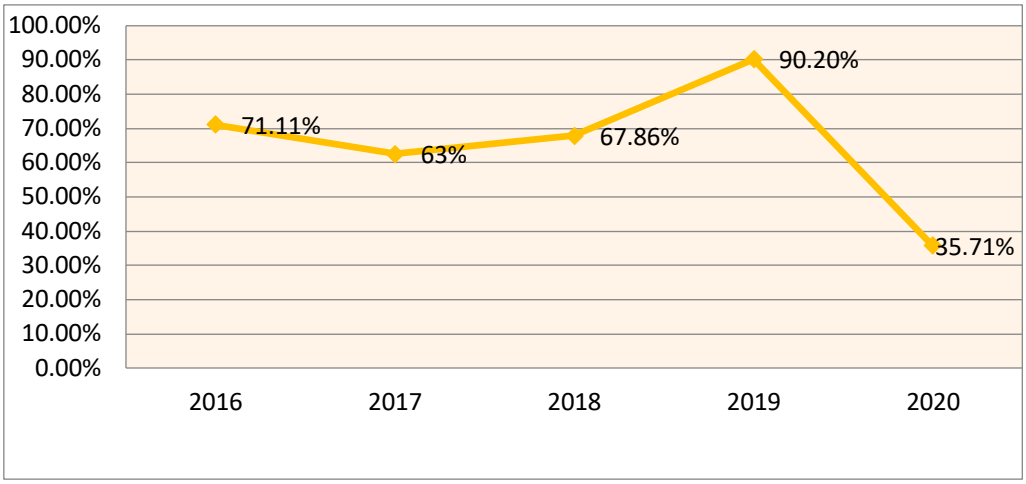

Sumber: Inspektorat Kota Tarakan, 2021

Berdasarkan gambar diatas terlihat bahwa dari tahun 2016 hingga tahun 2017 terjadi penurunan atas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI/APIP dimana target rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh SKPD tidak tercapai dari target yang ditetapkan. Penyebab yang mempengaruhi penilaian indikator ketidakberhasilan atas sasaran yang telah ditetapkan adalah kurangnya sumber daya aparatur pengawasan pada Inspektorat Kota Tarakan serta kurangnya komitmen Kepala SKPD untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan.

2) Persentase Pelanggaran Pegawai

Usaha dalam mencapai tujuan nasional diperlukan adanya pegawai negeri yang penuh kesetiaan dan ketaatan pada Pancasila dan Undang–Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berdaya guna dan berhasil guna, berkualitas tinggi, mempunyai kesadaran tinggi akan akan tanggung jawabnya sebagai aparatur negara, abdi negara, serta abdi masyarakat. Salah satu indikasi rendahnya kualitas Pegawai Negeri

Sipil Daerah tersebut adalah adanya pelanggaran disiplin yang banyak dilakukan oleh Pegawai Negeri. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

3) Jumlah Temuan BPK

BPK merupakan lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Temuan BPK kemudian dilaporkan dalam Laporan Ikhitsar Hasil Pemeriksaan.

Gambar 2.105
Jumlah Temuan BPK Kota Tarakan Tahun 2016-2020

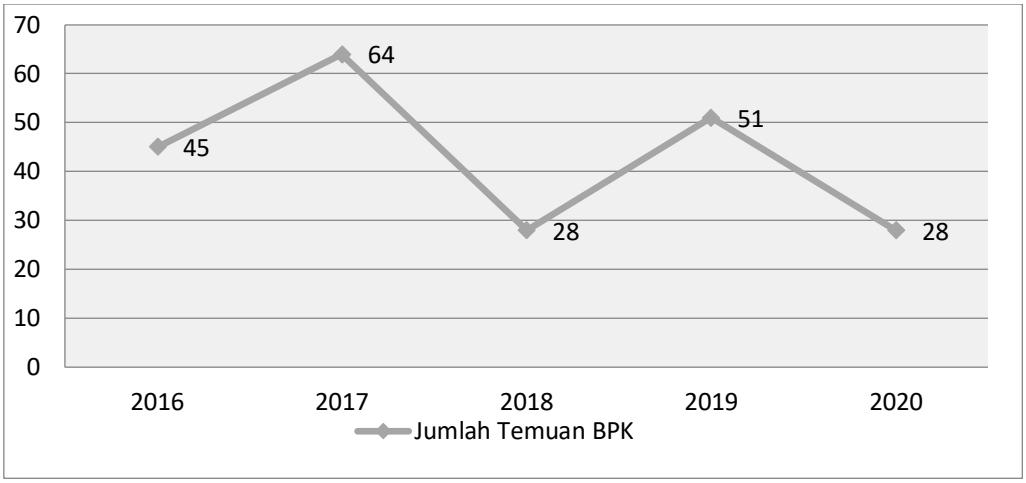

Sumber: Inspektorat Kota Tarakan, 2021

Berdasarkan gambar diatas diketahui bahwa jumlah temuan BPK sesuai Rekomendasi tercatat ada dalam kurun waktu 2016-2020, jumlah temuan BPK berfluktuatif dengan temuan paling sedikit pada tahun 2018 sejumlah 28 temuan dan temuan

terbanyak pada tahun 2017 sejumlah 64 temuan. Jumlah temuan BPK ini dipengaruhi oleh : 1) Adanya perubahan aturan dalam penyusunan LKPD yaitu dari sistem basis kas ke basis akrual yang menyebabkan laporan yang harus disesuaikan; 2) Adanya beberapa asset yang belum tercatat dengan baik; 3) Kurangnya aparatur di beberapa OPD yang paham tentang pengadaan barang/jasa.

4. Sekretariat Dewan

Peran penunjang urusan Sekretariat Dewan berkaitan dengan aspek penganggaran, regulasi, dan aspirasi masyarakat. Keberhasilan peran penunjang urusan Sekretariat Dewan dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain:

1) Ketersediaan Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kota Tarakan

Untuk menjalankan fungsi dan tugasnya, DPR memiliki beberapa unit-unit kerja yang biasa disebut dengan alat-alat kelengkapan. Alat-alat kelengkapan DPR tersebut ada yang bersifat tetap dan ada yang sementara. Yang dimaksud dengan tetap adalah unit kerja yang terus menerus ada selama masa kerja DPR berlangsung, yakni selama lima tahun. Keanggotannya juga tidak berubah dari awal sampai akhir, kecuali ada pemberhentian. Sedangkan yang sementara bersifat sebaliknya, hanya dibentuk untuk kebutuhan dan tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu pula. Begitu juga dengan keanggotannya, berganti-ganti untuk masa waktu sementara. Alat-alat kelengkapan lembaga ini diatur dalam Tata Tertib DPR RI.

Alat kelengkapan DPRD terdiri atas Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, Badan Kehormatan dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan

dibentuk berdasarkan rapat paripurna seperti panitia khusus yang bersifat tidak tetap. Jika dikaitkan dengan fungsi legislasi, tidak semua alat kelengkapan tersebut terlibat secara langsung. Alat-alat kelengkapan yang terlibat secaralangsung antara lain adalah komisi, badan musyawarah dan kemungkinan alat kelengkapan lain yang dibentuk khusus menangi masalah legislasi, misalnya Panitia Legislasi.

Jika kita mengacu pada fungsi dewan sebagai fungsi legislasi, komisi dapat mengajukan rancangan Peraturan Daerah dan membahas rancangan peraturan daerah bersama denganpemerintah daerah, baik terhadap rancangan Perda usul inisiatif Dewan maupun usul inisiatif Pemerintah Daerah. Untuk menunjang perancangan dan pembahasan Perda tersebut, komisi dapat melakukan kunjungan kerja dalam rangka mencari dan menjaring aspirasi masyarakat yang terkait dengan substansi materi rancangan Perda yang akan dibahas. Selain itu Komisi juga dapat melakukan rapat kerja dan dengar pendapat untuk melakukan pengayaan materi terhadap Rancangan Perda yang dibahas.

Tabel.2.116
Ketersediaan Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kota Tarakan Tahun 2016-2020

Tahun	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD
2016	Ada
2017	Ada
2018	Ada
2019	Ada
2020	Ada

Sumber: Sekretariat Dewan Kota Tarakan, 2021

2) Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang mempunyai fungsi pembentukan PERDA, anggaran, dan pengawasan, yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah.

Kewajiban anggota legislatif menjaring aspirasi dari masyarakat pada saat melakukan reses dituangkan dalam pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD sebagai bentuk saran dan pendapat kepada Kepala Daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD. Pokir DPRD dapat ditampung pada saat perencanaan atau penyusunan RKPD.

Tabel 2.117
Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Kota Tarakan untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)

Tahun	Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)
2016	Ada
2017	Ada
2018	Ada
2019	Ada
2020	Ada

Sumber: Sekretariat Dewan Kota Tarakan, 2021

3) Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD

Dalam Undang-undang Nomor 27 tahun 2009 tentang susunan dan kedudukan MPR/DPR serta DPD dan DPRD, menyatakan DPRD mempunyai tugas dan fungsi sebagai legislasi, anggaran dan pengawasan. Fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPRD selaku pemegang kekuasaan membentuk peraturan daerah, fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD yang diajukan oleh Walikota, sedangkan fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah dan APBD. DPRD melaksanakan fungsinya melalui program-program DPRD. Di Kota Tarakan, dalam kurun waktu 2013-2018, program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut telah terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Setwan DPRD.

Tabel. 2.118
Terintegrasi Program-Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda Dan Anggaran ke Dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD

Tahun	Terintegrasi Program-Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda Dan Anggaran Ke Dalam Dokumen Perencanaan Dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD
2016	Ada
2017	Ada
2018	Ada
2019	Ada
2020	Ada

Sumber: Sekretariat Dewan Kota Tarakan, 2021

Tabel 2.119
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kerja					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
I	***Aspek Kesejahteraan Masyarakat***							
1	**Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**							
1.1	Pertumbuhan PDRB	Angka	4,89	5,81	7,35	7,55	7,69	-0,78
1.2	PDRB atas harga berlaku	Rp (Juta)	21.824.569,73	24.316.216,30	27.907.034,65	31.665.386,22	36.289.710,68	38.110.722
1.3	PDRB atas harga konstan	Rp (Juta)	16.794.628,98	17.770.371,27	19.077.332,75	20.655.845,58	22.244.753,02	22.050.183,68
1.4	PDRB Per Kapita ADHB	Rp /Jiwa	92.647	99.869	110.677	120.869	133.869	136.005
1.5	PDRB Per Kapita ADHK	Rp /Jiwa	71.295	72.856	75.906	78.799	82.034	78.690
1.6	Laju Inflasi	Angka	3,42	4,31	2,77	5,00	1,47	1,15
1.7	Indeks gini	Angka	0,28	0,28	0,30	0,265	0,271	0,295
1.8	Persentase Penduduk Miskin	%	5,11	5,17	6,32	6,15	6,00	6,24

Tabel 2.119 (*Lanjutan*)
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kerja					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
I	***Aspek Kesejahteraan Masyarakat***							
2	**Fokus Kesejahteraan Sosial**							
2.1	Angka melek huruf	%	97,71	95,83	97,42	97,34	97,99	98,4
2.2	Angka harapan lama sekolah	Tahun	13,41	13,42	13,61	13,70	13,73	14,02
2.3	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	9.91	9.92	9.93	9,94	9,96	9,97
2.4	Angka partisipasi kasar SD	%	99,33	102,99	104,72	104,05	102,74	94,58
2.5	Angka partisipasi kasar SMP	%	100,6	91,09	95,98	91,09	87,59	107,50
2.6	Angka partisipasi murni SD	%	91,52	94,88	94,07	97,34	97,26	97,24
2.7	Angka partisipasi murni SMP	%	77,47	78,05	78,69	79,45	79,45	80,76
2.8	Angka kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	Per 1000 KH	4,06	1,28	0,48	0,46	0,63	0
2.9	Angka kematian Balita per 1.000 kelahiran hidup	Per 1000 KH	3,59	2,81	0,00	0,50	0,7	0,5
2.10	Angka kematian Ibu melahirkan per 100 Rb kelahiran	Per 100.000 KH	95,60	102,04	71,70	159,45	106	42
2.11	Angka usia harapan hidup	Tahun	73,52	73,69	73,85	73,88	73,92	73,97

Tabel 2.119 (*Lanjutan*)
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kerja					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
I	***Aspek Kesejahteraan Masyarakat***							
2	**Fokus Kesejahteraan Sosial**							
2.12	Tingkat Partisipasi angkatan kerja (TAPK)	%	62,77	N/A	66,18	62,34	64,53	65,65
2.13	Tingkat kesempatan kerja (TKK)	%	94,40	N/A	94,41	94,06	95,22	94,14
2.14	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	%	5,60	N/A	5,59	5,94	4,78	5,86
2.15	Indeks pembangunan manusia (IPM)	indeks	74,70	74,88	75,27	75,69	76,09	75,83
3	**Fokus Seni Budaya dan Olahraga**							
3.1.	Jumlah gedung olahraga	unit	12	12	12	12	12	12
3.2.	Jumlah gedung kesenian	unit	0	0	0	0	0	0
II	***Aspek Pelayanan Umum***							
1	**Layanan Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar**							
1.1	**Pendidikan**							
a	Angka Partisipasi Kasar PAUD	%	56,15	56,93	57,30	86,22	115,98	52,06
b	Angka Partisipasi Sekolah SD	%	94,65	86,06	84,77	85,63	96,4	90,89
c	Angka Partisipasi Sekolah SMP	%	89,51	78,67	75,19	68,38	89,95	99,68

Tabel 2.119 (*Lanjutan*)
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kerja					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
II	***Aspek Pelayanan Umum***							
1	**Layanan Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar**							
1.1	**Pendidikan**							
d	Angka putus sekolah SD	%	0,09	0,08	0,21	0,23	0,02	0,14
e	Angka putus sekolah SMP	%	0,72	0,05	0,01	0,40	0,28	0,35
f	Angka kelulusan SD	%	99,32	100	98,04	100,66	100	97,26
g	Angka kelulusan SMP	%	99,97	98,85	103,37	100,15	95,54	100
h	Angka melanjutkan SD ke SMP	%	95,50	91,16	100	114,28	99,47	94,12
i	Angka melanjutkan SMP ke SMA	%	98,95	128,39	NA	NA	NA	NA
j	Presentase Sekolah SD dengan kondisi baik	%	30,43	30,43	52,17	56,52	996,99	80,74

Tabel 2.119 (*Lanjutan*)
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kerja					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
II	***Aspek Pelayanan Umum***							
1	**Layanan Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar**							
1.1	**Pendidikan**							
k	Presentase sekolah SMP dengan kondisi baik	%	72,73	72,73	90,91	90,91	100	87,96
l	Rasio ketersediaan sekolah SD per 10rb penduduk	rasio	22,8	22,23	21,81	23,54	25	27,26
m	Rasio ketersediaan sekolah SMP per 10rb penduduk	rasio	20,15	16,78	17,11	19,96	26	32,34
n	Rasio guru terhadap murid SD	rasio	26,00	23,08	20,70	20,22	20,99	21,33
o	Rasio guru terhadap murid SMP	rasio	15,68	18,47	16,80	15,17	16,3	15,95
p	Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	64,69	74,7	88,34	88,73	89,78	92,46
q	Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	52,52	93,13	95,88	92,10	86,75	95,65

Tabel 2.119 (*Lanjutan*)
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kerja					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
II	***Aspek Pelayanan Umum***							
1	**Layanan Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar**							
1.2	**Kesehatan**							
a	Rasio posyandu per satuan balita	per 1000 balita	6,52	7,18	5,97	5,86	7,09	6,06
b	Rasio Puskesmas. poliklinik. pustu per satuan penduduk	per 100.000 penduduk	5,18	5.27	5.25	5,79	6,51	5,51
c	Rasio Rumah sakit persatuan penduduk	per 100.000 penduduk	1,29	1,22	1,21	1,16	0,015	0,014
d	Rasio Dokter per satuan penduduk	rasio	1:1.981	1: 2.221	1: 1.449	1: 1.489	1:1.489	0,95
e	Rasio Tenaga Kesehatan persatuan penduduk	per 1.000 penduduk	3,29	3,27	3,54	3,36	2,78	6,53

Tabel 2.119 (*Lanjutan*)
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kerja					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
II	***Aspek Pelayanan Umum***							
1	**Layanan Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar**							
1.2.	**Kesehatan**							
f	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	58,44	40,96	37,23	21,75	23,22	13,38
g	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	85,07	74,72	81,67	84,70	89,89	97,21
h	Cakupan Desa/Kelurahan UCI	%	65	45	90	85	95	75
i	Cakupan Balita Gizi buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	10 0	100
j	Cakupan penemuan dan penanganan pasien baru TB BTA (+)	%	62.46	48.01	47.20	63,77	71,51	48,64
k	Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD	%	100	100	100	100	100	100
l	Cakupan kunjungan bayi	%	56,52	66,33	72,87	91,30	81,45	46,58
m	Cakupan puskesmas	%	175	175	175	175	175	175

Tabel 2.119 (*Lanjutan*)
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kerja					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
II	***Aspek Pelayanan Umum***							
1	**Layanan Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar**							
1.3.	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**							
a	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	78,50	79,00	72,00	54,40	67,11	69,70
b	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah	%	42,50	40,93	40,93	60,64	95%	98
c	Rasio fasilitas pemakaman umum per satuan penduduk	rasio	1:3	1:3	1:3	1:3	1:3	1:2
d	Ketaatan terhadap RTRW	%	40	45	57	60	82,06	82,49
1.4.	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**							
a	Tersedianya air baku untuk kebutuhan pokok minimal sehari hari	%	78,84	91,01	87,43	88.25	92,70*	95,29**
b	Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter per orang per hari	%	49.13	53.59	57.6	60.59	61,99*	64,51**

Tabel 2.119 (*Lanjutan*)
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kerja					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
II	***Aspek Pelayanan Umum***							
1	**Layanan Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar**							
1.4.	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**							
c	Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota	Unit	3	7	29	37	NA	NA
d	Persentase perumahan yang belum memenuhi rumah sehat	%	17,8	13,2	8,47	20.99	NA	NA
e	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	87,63	89,19	90,07	91,20	93,56	94,11
1.5.	**Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat**							
a	Cakupan petugas Linmas	orang	20	20	20	20	20	20
b	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	%	100	100	100	100	100	100
c	Tingkat waktu tanggap (respon time) Wilayah Manajemen Kebakaran	%	64,18	66,00	66,67	63,16	90,91	NA
d	Persentase penegakan Perda	%	5,95	8,50	2,81	0	0	0

Tabel 2.119 (*Lanjutan*)
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kerja					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
II	***Aspek Pelayanan Umum***							
1	**Layanan Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar**							
1.6.	**Sosial**							
a	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	69,09	72,87	32,98	74,25	51.80	80.99
b	Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	%	100	100	100	100	100	100
2	**Layanan Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Non Dasar**							
2.1	**Urusan Tenaga Kerja**							
a	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Orang	208	224	240	624	1.024	400
b	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Orang	20	20	20	0	20	140
c	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Orang	810	613	1.074	1.197	689	117

Tabel 2.119 (*Lanjutan*)
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kerja					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
II	***Aspek Pelayanan Umum***							
2	**Layanan Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Non Dasar**							
2.2	**Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**							
a	Persentase partisipasi perempuan di lembaga legislative daerah	%	4	4	4	4	10	10
b	Rasio KDRT	%	0,08	0,06	0,07	0,06	0,06	0,05
c	Cakupan pengaduan dan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	%	100	100	100	100	100	100
d	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	90,61	NA	91,23	92,28	92,16	91,90
e	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	50,65	NA	51,33	52	59,34	NA
2	**Layanan Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Non Dasar**							
2.3	**Urusan Pangan**							
a	Ketersediaan pangan utama	Kg/jiwa	37,04	27,93	20,50	8,50	12,69	12,26
b	Ketersediaan energy per kapita per hari	Kkal/hari	11,73	10,47	9,06			
c	Ketersediaan protein perkapita per hari	Kg/ kapita/hari	2.919	2.678	2.434	2.571	3.141	2.484

Tabel 2.119 (*Lanjutan*)
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kerja					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
II	***Aspek Pelayanan Umum***							
2	**Layanan Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Non Dasar**							
2.4	**Urusan Pertanahan**							
a	Persentase lahan bersertifikat	%	45	54	55	60	62	71
2.5	**Urusan Lingkungan Hidup**							
a	Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100
II	***Aspek Pelayanan Umum***							
2	**Layanan Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Non Dasar**							
2.6	**Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**							
a	Persentase penduduk Ber KTP	%	53,13	59,46	99,98	97,59	95,44	96,29
b	Persentase penduduk berakte kelahiran	%	45,21	47,38	49,12	51,15	55,37	57,33
c	Persentase pasangan berakte nikah	%	49,31	50,95	53,28	55,90	61,11	60,19

Tabel 2.119 (*Lanjutan*)
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kerja					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
2.7	**Urusan Pemberdayaan masyarakat dan Kelurahan**							
a	Jumlah LPM	unit	24	24	24	24	24	24
b	Persentase PKK aktif	%	100	100	100	100	100	
c	Persentase posyandu aktif	%	100	100	100	100	100	100
2.8	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**							
a	Rata-rata jumlah anak per keluarga	anak	0,60	0,54	0,53	1,81	1,83	1,82
b	Persentase akseptor KB	%	66,07	67,99	70,54	68,50	69,22	69,22%
c	Persentase pemakaian kontrasepsi	%	66,07	68,01	69,85	68,50	69,22	62,13%
II	***Aspek Pelayanan Umum***							
2	**Layanan Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Non Dasar**							
2.9	**Urusan Perhubungan**							
a	Jumlah arus penumpang melalui bandara	orang	1.259.321	1.105.985	1.044.761	606.823	842.258	38.032
b	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	29,58	24,63	29,66	18,22	10,71	49,14
2.10	**Urusan Komunikasi dan Informatika**							
a	Cakupan layanan telekomunikasi	%	100	100	100	100	100	100

Tabel 2.119 (*Lanjutan*)
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kerja					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
b	Persentase anggota rumah tangga 5 tahun ke atas yang memiliki HP	%	71,67	73,00	73,63	77,96	80,44	73,67
c	Persentase rumah tangga dengan akses internet	%	30,78	37,36	42,57	54,17	66,75	69,21
2.11	**Urusan Koperasi dan UKM**							
a	Persentase koperasi aktif	%	60	48	49	62	54	60
b	Jumlah UKM	unit	1.463	2.524	2.972	3.897	4.934	15.014
2.12	**Urusan Penanaman Modal**							
a	Jumlah investor (PMDN/PMA)	investor	16	154	23	63	575	4439
b	Jumlah investasi (milyar)	Milyar	65,30	1009,87	49,88	179,31	714,51	1.257
II	***Aspek Pelayanan Umum***							
2	**Layanan Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Non Dasar**							
2.13	**Urusan Kepemudaan dan Olahraga**							
a	Persentase Oragnisasi pemuda yang aktif	%	100	100	100	100	100	100
b	Cakupan pembinaan olahraga	%	100	100	100	100	100	100
2.14	**Urusan Statistik**							
a	Buku Tarakan dalam Angka	Buku	ada	ada	ada	ada	ada	ada
b	Buku PDRB Kota Tarakan	Buku	ada	ada	ada	ada	ada	ada

Tabel 2.119 (*Lanjutan*)
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kerja					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
2.15	**Urusan Kebudayaan**							
a	Penyelenggaraan Festival Seni budaya	even	4	1	1	1	2	1
b	Benda situs cagar budaya yang dilestarikan	Cagar budaya	32	32	32	32	32	32
2.16	**Urusan Perpustakaan**							
a	Jumlah pengunjung perpustakaan	orang	18.084	23.497	22.772	23.254	13.659	5.103
b	Rasio perpustakaan per satuan penduduk	rasio	2,56	2,68	2,73	2,82	3,01	1,931
II	***Aspek Pelayanan Umum***							
3	**Layanan Urusan Pilihan**							
3.1	**Kelautan dan Perikanan**							
a	Jumlah produksi ikan	ton	10.926	15.744	10.835	19.993,09	23.517,89	24.737,40*
b	Jumlah konsumsi ikan	ton	51,80	52,53	57,88	70,4	72,63	71,52*
c	Jumlah Nelayan	Orang	3.561	3.707	4.573	4.717	3.707	4.858
3.2	**Urusan Pariwisata**							
a	Kunjungan wisatawan	wisatawan	207.585	196.172	206.579	202.449	224.792	163.759
b	Lama kunjungan wisatawan	hari	1,35	1,66	1,74	1,11	1,07	1,21

Tabel 2.119 (*Lanjutan*)
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kerja					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
3.3	**Urusan Pertanian**							
a	Distribusi sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan/agriculture, foresty, and fishing	%	12,51	11,75	11,20	11,02	10,99	10,70
b	Produksi Padi	ton	457,8	413,8	309,6	285,7	118,8	82,8
c	Produksi Palawija	ton	13.051	7.545	6.892	5.919	29.126	9889,9
d	Produksi Sayuran	ton	27.630	32.414	31.206	31.796	1.351	6655
e	Produksi Buah-buahan	ton	18.619	19.030	17.904	21.827	23.153	104,94
f	Luas lahan sawah	ha	70	63	50	54	33	23
g	Luas lahan palawija	ha	521	201	186	161	188	108
h	Luas lahan sayuran	ha	1.765	2.070	1.934	1.922	1.948	1462
i	Luas lahan Buah-buahan	ha	1.917	1.917	1.917	1.917	575.995	857,24
II	***Aspek Pelayanan Umum***							
3	**Layanan Urusan Pilihan**							
3.3	**Urusan Pertanian**							
j	Produksi daging sapi	ton	250,8	268,7	271,5	273,8	302,05	311,19
k	Produksi daging kambing	ton	23,85	10,77	12,76	12,98	68,48	70,09
l	Produksi daging ayam ras	ton	6.054,45	6.873,84	4.597,62	4.598,11	7.087,24	6.624,07
m	Produksi daging ayam buras	ton	709,95	826,91	785,56	786,45	640,92	582,50
n	Produksi daging itik	ton	18,3	10,78	3,99	3,56	1,83	5,47

Tabel 2.119 (*Lanjutan*)
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kerja					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
3.4	**Urusan Perdagangan**							
a	Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran; repaarasi mobil dan sepeda terhadap PDRB	%	20,41	20,96	21,01	21,60	21,97	22,25
a	Ekspor bersih perdagangan	Juta	1,49	712,14	1,83	1,11	1,04	0,99
b	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	unit	1.279	1.279	1.279	1.279	1.279	3.616
3.5	**Urusan Industri**							
a	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	12,83	12,73	12,63	11,92	11,43	11,18
b	Cakupan bina kelompok pengrajin	unit	9	11	12	22	22	24
c	Pertumbuhan industri	%	3,65	1,14	5,58	2,85	3,86	-3,75
II	***Aspek Pelayanan Umum***							
4	**Layanan Urusan Penunjang**							
a	Opini BPK	opini	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
b	Persentase Silpa terhadap APBD	%	2,64	1,56	0,84	1,14	17,47	7,76
c	Persentase PAD terhadap Pendapatan	%	11,26	6,13	8,67	8,48	7,95	11,67
d	Tersedianya RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
e	Tersedianya RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Tabel 2.119 (*Lanjutan*)
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kerja					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
f	Tersedianya RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
g	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal	%	87	86	87	68	71	2
h	Persentase Tindak lanjut temuan BPK	%	62,50	71,11	63	67,86	90,20	35,71
III	***Aspek Daya Saing***							
1	**Fokus Kemampuan Keuangan Daerah**							
a	Pengeluaran konsumsi RT per kapita	Rp	1.140.532	1.291.402	1.084.100	1.115.300	1.150.900	907.833
b	Pengeluaran konsumsi rumah tangga makanan perkapita	Rp	524.262	591.315	710.079	715.001	380.000	416.000
c	Pengeluaran konsumsi rumah tangga non makanan perkapita	Rp	616.271	700.087	737.458	875.807	440.000	725.000
III	***Aspek Daya Saing***							
1	**Fokus Kemampuan Keuangan Daerah**							
d	Jumlah Bank dan cabang	Bank	31	32	35	33	37	20
e	Jenis, kelas, dan jumlahotel/penginapan	hotel	41	45	45	44	46	45
2	**Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur**							
a	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	rasio	234,46	234,46	231,22	231,22	54,42	69,62

Tabel 2.119 (*Lanjutan*)
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kerja					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
b	Luas wilayah produktif	ha	16.184	16.184	16.184	16.184	13.053,55	14.162,19
c	Persentase rumah tangga menggunakan air bersih	%	77,63	85,40	90,88	92,45	97,45	99,45
d	Persentase rumah tangga menggunakan listrik	%	99,39	99,72	99,74	100	74,05	86,52
e	Persentase penduduk menggunakan HP	%	71,67	73,00	73,63	77,96	80,44	73,67
3	**Fokus Iklim Investasi**							
a	Angka kriminalitas per 10.000 penduduk	Per 10.000 penduduk	10,40	9,05	11,03	10,79*	11,11**	11,42***
III	***Aspek Daya Saing***							
4	**Fokus Sumber Daya Manusia**							
a	IPM	-	74,70	74,88	75,27	75,69	76,09	75,83
b	Rasio ketergantungan (dependency ratio)	%	47,81	47,34	46,93	46,57	46,28	44,88

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Perekonomian suatu daerah merupakan bagian integral dari sistem perekonomian nasional dan regional, yang saling berpengaruh antara satu dan lainnya. Perubahan perekonomian nasional akan berdampak pada perubahan perekonomian regional dan daerah atau sebaliknya. Hal tersebut salah satunya akan mempengaruhi pelaksanaan otonomi terutama khususnya pada sistem pembiayaan, pengelolaan, dan pengawasan keuangan daerah. Sistem pembiayaan daerah dalam konteksotonomi daerah merupakan aspek yang sangat penting. Daerahdiharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) agar mampu mencukupi kebutuhan fiskalnya (*fiscal need*) sehingga tidak mengalami defisit fiskal (*fiscal gap*). Salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah tersebut adalah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pada dasarnya pengelolaan keuangan daerah yang merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah adalah hal yang sangat penting dalam proses perencanaan suatu daerah secara keseluruhan. Tahapan-tahapan dalampengelolaan keuangan daerah sangat krusial dalam memulai roda pemerintahan dan pembangunan setiap tahunnya. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat, maka pengelolaan keuangan daerah harus

melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pembangunanyang terstruktur dengan baik.

Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu anggaran daerah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya.

3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Analisis kinerja keuangan masa lalu pada dasarnya dimaksudkan untuk mengetahui kinerja kondisi keuangan daerah yang sudah dilaksanakan dimasa lalu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya. Kemudian dari analisis kinerja beberapa tahun ke belakang,akan diketahui rata-rata pertumbuhan yang dijadikan sebagai acuan analisis proyeksi kemampuan keuangan kedepan. Analisis terhadap kinerja keuangan masa lalu mencakup kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan,

pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting di dalam rangka optimalisasi pemanfaatan potensi- potensi penerimaan daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah, sehingga dapat tercapai target-target dalam peningkatan kualitas pembangunan. Guna mengetahui pertumbuhan keuangan daerah diperlukan suatu analisis pengelolaan keuangan daerah masa lalu sebagai dasar di dalam penentuan proyeksi penerimaan keuangan daerah pada tahun-tahun mendatang.

Analisis kinerja keuangan masa lalu dilakukan terhadap penerimaan daerah dan pengeluaran daerah, penerimaan daerah yaitu pendapatan dari penerimaan pendapatan dan pembiayaan daerah serta pengeluaran daerah yaitu belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Kapasitas keuangan daerah pada dasarnya ditempatkan sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. Berbagai objek penerimaan daerah dianalisis untuk memahami perilaku atau karakteristik penerimaan selama ini.

Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi tahun-tahun mendatang, untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Sebagai tahap awal dalam menganalisis kinerja keuangan daerah pada masa-masa lalu perlu diketahui kemampuan pendanaan pembangunan pemerintahan daerah selama ini. Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) sebagai salah satu indikator untuk

menganalisis kemampuan keuangan daerah diukur melalui kontribusi realisasi PAD terhadap APBD. Kesinambungan penyelenggaraan pembangunan di masadatang ditentukan sejauh mana kemandirian pembiayaan tersedia untuk melaksanakan pembangunan daerah. Semakin tinggi nilai DOFD menunjukkan semakin kuat kemandirian pembiayaan pembangunan. Adapun klasifikasi DOFD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Skala interval Otonomi Fiskal

No	Derajat Otonomi Fiskal (DOF) (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
1	0,00-10,00	Sangat Kurang
2	10,01-20,00	Kurang
3	20,01-30,00	Sedang
4	30,01-40,00	Cukup
5	40,01-50,00	Baik
6	>50	Sangat Baik

Sumber: Wulandari, 2001

Kondisi kemandirian keuangan daerah Kota Tarakan dalam 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2016-2020 berfluktuasi namun trennya relatif menurun mulai tahun 2017 yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.2

Derajat Otonomi Fiskal Kota Tarakan Tahun 2016-2020

No.	Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan	Persentase (%)
1	2016	62.198.512.279	1.014.484.790.553	6,13%
2	2017	67.092.417.030	774.265.955.603	8,67%
3	2018	72.401.576.597	885.538.700.522	8,18%
4	2019	73.230.451.033	920.721.653.011	7,95%
5	2020	107.839.338.825	924.437.632.360	11,62%
Rata-Rata		**78.552.459.153**	**903.889.746.410**	**8,69%**

Sumber: BPKPAD Tarakan, diolah

Tren DOFD Kota Tarakan tahun 2016 ke tahun 2017 meningkat dari 6,13% di tahun 2016 menjadi 8,67% ditahun 2017. Namun tren tahun berikutnya relatif menurun hingga mencapai 7,95% ditahun 2019. Selanjutnya meningkat lagi ditahun 2020 sebesar 11,62%.

Dengan melihat kondisi tersebut kemudian Pemerintah Kota Tarakan mulai memanfaatkan dan mengenjot potensi-potensi PAD untuk meningkatkan penerimaan daerah. Usaha tersebut relatif berhasil yang terlihat dengan meningkatnya PAD dari tahun 2016 yang sebesar Rp. 62,198 miliar menjadi Rp. 107,839 miliar ditahun 2020.

Meskipun tren PAD semakin meningkat khususnya dari tahun 2016 hingga tahun 2019, namun DOFD tersebut terbilang masih rendah. Berdasarkan klasifikasi, rata-rata DOFD Kota Tarakan dari tahun 2016 hingga 2020 hanya mencapai 8,69% yang masih masuk kategori sangat kurang karena masih dibawah 10%.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD Kota Tarakan dapat dilihat dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sementara itu pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

1. Pendapatan Daerah

Sumber daerah pendapatan daerah terdiri atas:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
b. Dana Perimbangan yang meliputi Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus;
c. Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya, Pendapatan Lainnya.

Secara lebih rinci rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kota Tarakan Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3

Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Tarakan Tahun 2016-2020

No	URAIAN	REALISASI					Rata-Rata Pertum buhan(%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	**PENDAPATAN**	**1.014.484.790.552,96**	**774.265.955.603,07**	**885.538.700.521,69**	**920.721.653.011,36**	**924.448.557.055,66**	**-1,84%**
1.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**62.198.512.278,56**	**67.092.417.030,24**	**72.401.576.596,80**	**73.230.451.032,82**	**107.850.263.520,68**	**11,64%**
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	34.731.051.295,35	40.609.093.037,59	45.456.253.569,03	48.124.781.457,12	44.531.775.486,03	**5,10%**
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	12.043.176.073,42	11.968.343.203,00	13.521.988.321,00	9.570.197.527,63	10.880.768.187,70	**-2,01%**
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yangDipisahkan	4.626.503.005,52	6.067.486.106,57	5.456.435.066,89	5.142.188.576,95	2.923.987.753,67	**-8,77%**
1.1.4	Lain-lain Pendapatan AsliDaerah yang Sah	10.797.781.904,27	8.447.494.683,08	7.966.899.639,88	10.393.283.471,12	49.513.732.093,28	**35,61%**
1.2.	**DANA PERIMBANGAN**	**701.347.008.325,00**	**585.786.873.282,00**	**721.237.211.961,00**	**762.714.696.575,00**	**691.910.393.097,00**	**-0,27%**
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	255.402.084.965,00	138.370.519.529,00	182.678.993.462,00	236.549.108.153,00	178.880.299.783,00	**-6,87%**
1.2.2	Dana Alokasi Umum	336.447.029.000,00	346.753.157.000,00	380.969.519.000,00	409.970.995.000,00	425.960.694.000,00	**4,83%**
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	109.497.894.360,00	100.663.196.753,00	157.588.699.499,00	116.194.593.422,00	87.069.399.314,00	**-4,48%**

Tabel 3.3 (lanjutan)

Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Tarakan Tahun 2016-2020

No	URAIAN	REALISASI					Rata-Rata Pertum buhan(%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
1.3.	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**245.939.269.949,40**	**121.386.665.290,83**	**91.899.911.964,01**	**84.776.505.403,54**	**124.687.900.437,98**	**-49,30**
1.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	50.948.442.205,40	44.371.045.290,83	46.280.590.552,01	54.471.406.540,74	57.852.521.828,50	13,55
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	14.163.265.000,00	0,00
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	160.773.500.000,00	50.412.000.000,00	13.332.550.000,00	0,00	13.891.681.550,37	-91,36
1.3.6	Pendapatan Lainnya	34.217.327.744,00	26.603.620.000	32.286.771.412	30.305.098.862,80	38.780.432.059,11	13,36%

Sumber: BPKPAD Tarakan, diolah

Pendapatan daerah Kota Tarakan dalam 5 (lima) tahun terakhir (2016-2020) mengalami penurunan dengan rata-rata pertumbuhan negatif sebesar -1,84%. Jika dilihat dari komponen Pendapatan Daerah dalam kurun waktu 2016-2020 terlihat bahwa sumber pendapatan yang mengalami penurunan adalah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan rata-rata pertumbuhan negatif sebesar -49,30%. Pendapatan asli daerah rata-rata pertumbuhan selama tahun 2016-2020 adalah sebesar 11,64%. Sedangkan dana perimbangan rata-rata pertumbuhan selama tahun 2016-2020 adalah sebesar -0,27%.

Jika dibandingkan dengan komponen Pendapatan Daerah lainnya, PAD merupakan komponen yang mengalami rata-rata pertumbuhan positif selama lima tahun yaitu sebesar 11,64%. Meskipun terbilang rata-rata pertumbuhannya lebih baik dibanding dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, namun tetap saja masih harus ditingkatkan, jadi kedepan PAD masih perlu ditingkatkan. Jika dilihat lebih detil, sumber PAD yang mengalami rata-rata pertumbuhan negatif dalam lima tahun (2016-2020) adalah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (-8,77%) dan hasil retribusi daerah (-2,01%). Adapun sumber PAD yang mengalami pertumbuhan positif ialah Pendapatan Pajak Daerah (11,64%). Dari hal tersebut terlihat bahwa Pemerintah Kota Tarakan sedang berupaya untuk terus meningkatkan kemandirian keuangan daerah dengan menggenjot dua sumber PAD yaitu pajak dan retribusi daerah.

Untuk dana perimbangan secara agregat dari tahun 2016-2020 mengalami pertumbuhan negatif dengan rata-rata sebesar -0,27%. Untuk komponen dana perimbangan yang mengalami peningkatan ialah Dana Alokasi Umum sebesar 4,83%. Sedangkan

komponen dana perimbangan yang mengalami rata-rata pertumbuhan negatif adalah bagi hasil pajak dan bukan pajak (-6,87%) dan Dana Alokasi Khusus (-4,48%).

Untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah secara agregat dari tahun 2016-2020 juga mengalami pertumbuhan negatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -49,30%. Adapun komponen dari lain-lain pendapatan daerah yang sah yang mengalami pertumbuhan negatif adalah Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya mengalami rata-rata pertumbuhan negatif sebesar –91,36%, serta Pendapatan Lainnya mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 13,36%. Sedangkan komponen lain-lain pendapatan daerah yang mengalami rata-rata pertumbuhan positif adalah Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya yang mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 13,55%.

2. Belanja Daerah

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib. urusan pilihan. dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuanperundang-undangan. Selain itu belanja daerah diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan pembangunan berdasarkan pembagian kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Tabel 3.4

Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kota Tarakan Tahun 2016-2020

No	URAIAN	REALISASI					Rata-Rata Pertumbuhan(%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
2	**BELANJA**	**926.791.967.871**	**781.240.357.957**	**880.654.610.999**	**763.693.529.822**	**990.156.020.065**	**1,67**
2.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**455.541.369.500**	**420.793.569.016**	**432.542.255.786**	**372.176.863.279**	**428.605.119.412**	**-1,51**
2.1.1	Belanja Pegawai	433.373.404.000	370.939.737.777	395.845.858.820	353.538.817.596	399.245.759.008	-2,03
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	18.613.487.901	47.823.667.419	34.269.957.229	14.337.714.647	18.819.519.346	0,28
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.581.684.005	2.027.550.820	1.651.782.865	3.101.738.642	1.824.927.261	-8,31
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	-	-	-	-	-	-
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	898.793.594	898.785.855	774.656.872	898.768.224	-	-0,001
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	74.000.000	2.613.000	-	299.824.170	8.714.913.797	390,17
2.2	**BELANJA LANGSUNG**	**471.250.598.371**	**360.446.788.941**	**448.112.355.214**	**391.516.666.544**	**561.550.900.653**	**4,48**
2.2.1	Belanja Pegawai	15.682.689.633		128.200.000	1.237.756.500	7.458.788.450	-21,94
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	219.092.325.746	185.243.167.045	192.566.449.524	225.042.639.592	275.676.138.376	5,91
2.2.3	Belanja Modal	236.475.582.992	175.203.621.896	255.417.705.690	165.236.270.451	278.415.973.827	4,17

Sumber: BPKPAD Tarakan, diolah

Dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir tahun 2016-2020 realisasi belanja daerah mengalami pertumbuhan positif dengan rata-rata pertumbuhan selama lima tahun sebesar 1,67% dari Rp. 926,791 milyar ditahun 2016 menjadi Rp. 990,156 miliar ditahun 2020. Jika dilihat lebih rinci, Belanja Tidak Langsung (BTL) pada kurun waktu 2016-2020 mengalami pertumbuhan negatif dengan rata-rata pertubuhan -1,51% dari Rp. 455,541 miliar ditahun 2016 menjadi Rp. 428,678 miliar ditahun 2020. Penurunan nilai BTL tiap tahunnya sebenarnya bernilai positif. Artinya ada penekanan pada post-post tertentu dalam BTL. Dengan kondisi pendapatan daerah Kota Tarakan yang semakin menurun maka mau tidak mau Belanja Daerah harus ditekan. Adapun post di BTL yang telah berhasil ditekan dalam kurun waktu tersebut ialah Belanja bantuan sosial dimana belanja bantuan sosial di tahun 2016 sebesar Rp. 2,581 miliar turun menjadi 1,824 miliar ditahun 2020. Sedangkan belanja pegawai juga mengalami pertumbuhan yang negatif sebesar -2,03.

Belanja Langsung (BL) selama 5 tahun mengalami pertumbuhan positif sebesar 4,48% dari Rp. 471,250 miliar ditahun 2016 menjadi Rp. 561,550 miliar ditahun 2020. Hal ini tentunya akan berdampak positif bagi kualitas dan kuantitas belanja publik. Untuk itu maka Pemerintah Kota Tarakan akan mengefektifkan dan memprioritaskan belanja langsung yang sifatnya strategis.

Jika dilihat rasionya, proporsi BL terhadap total belanja dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Rasio BL ditahun 2016 sebesar 50,85% dan terus meningkat hingga mencapai 56,71% ditahun 2020. Sedangkan untuk proporsi BTL relatif mengalami penurunan dari 49,15% ditahun 2016 menjadi 43,29% ditahun 2020.

Peningkatan rasio BL pada dasarnya menunjukkan semakin meningkatnya kualitas belanja publik. Untuk itu pada tahun 2020 dan tahun-tahun kedepan, Pemerintah Kota Tarakan berusaha meningkatkan rasio belanja langsung.

3. Pembiayaan

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Dengan kata lain pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Tabel 3.5

Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Tarakan Tahun 2016-2020

No	URAIAN	REALISASI					Rata-Rata Pertum buhan(%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
3	**PEMBIAYAAN**						
3.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**22.717.389.910**	**14.484.826.066**	**6.587.608.203**	**10.023.491.379**	**160.831.703.932**	**63,11**
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	22.717.389.910	14.484.826.066	6.587.608.203	10.023.491.379	160.831.703.932	63,11
3.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**95.925.386.526**	**-**	**1.450.000.000**	**5.999.000.000**	**18.305.100.000**	**-42,43**
3.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			1.450.000.000	5.999.000.000	18.305.100.000	-42,43
3.2.2	Pengembalian Sisa Dana Transfer						
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	95.925.386.526					
	PEMBIAYAAN NETTO	**(73.207.996.616)**	**14.484.826.066**	**5.137.608.203**	**4.024.491.379**	**142.526.603.932**	

Sumber: BPKPAD Tarakan, diolah

Dalam lima tahun terakhir dari tahun 2016-2020 perkembangan pembiayaan daerah trennya relatif meningkat. Dengan kata lain penerimaan pembiayaan, nilainya lebih besar dibandingkan pengeluaran pembiayaan. Nilai pembiayaan (netto) daerah pada tahun 2016 sebesar Rp. -73,207 miliar, tahun 2017 sebesar Rp. 14,484 miliar, pada tahun 2018 sebesar Rp. 5,137 miliar, pada tahun 2019 sebesar Rp. 4,024 miliar dan tahun 2020 sebesar Rp. 142,526 miliar.

Seluruh penerimaan pembiayaan daerah di Kota Tarakan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sedangkan pengeluaran pembiayaan digunakan untuk Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah.

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas (perusahaan, pemerintah pusat, pemerintah daerah) yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan Neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintahan daerah (seperti Kepala Daerah dan Kepala Bagian Keuangan serta Kepala Dinas), pihak legislatif daerah maupun para Kreditur/Pemberi Pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu. Elemen utama neraca pemerintah daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Setiap elemen utama neraca tersebut diturunkan dalam sub-sub rekening yang lebih terinci.

1. Aset

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan

manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masadatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (i) aset lancar, (ii) investasi jangka panjang, (iii) aset tetap, (iv) dana cadangan, dan (v) aset lainnya.

Secara agregat nilai aset Kota Tarakan dari tahun 2016-2020 relatif mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan mencapai -1,53%. Tercatat aset Kota Tarakan pada tahun 2016 senilai Rp. 5,357 triliun menurun menjadi Rp. 5,036 triliun ditahun 2020 atau ada penurunan nilai aset sebesar Rp. 321 miliar. Adapun terjadinya penurunan aset tersebut merupakan dampak dari pelimpahan wewenang sebagaimana diatur melalui undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun aset pemerintah Kota Tarakan yang bersamaan urusannya dilimpahkan kepada Pemerintah Provinsi salah satunya adalah Pelabuhan Tengkayu.

2. Kewajiban

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Jenis kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Kota Tarakan hanya berupa kewajiban jangka pendek. Nilai kewajiban jangka pendek tersebut relatif terus meningkat dari Rp. 279,600 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp. 291,060 miliar pada tahun 2020 atau mengalami rata-rata peningkatan sebesar 1,01%. Jika dilihat lebih detil maka utang jangka pendek yang terjadi pada tahun 2016 sebesar Rp.

279,601 miliar dan tahun 2017 mencapai Rp. 337,900 miliar. Selanjutnya pada tahun 2018 Nilai kewajiban jangka pendek turun Rp. 25,592 miliar dan meningkat pada tahun 2019 menjadi Rp. 323,348, dan pada tahun 2020 menjadi Rp. 291,060 miliar.

3. Ekuitas Dana

Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan dalam Dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang. Semakin besar nilai ekuitas dana maka akan semakin bagus juga kondisi keuangan suatu daerah. Nilai ekuitas dana Kota Tarakan mempunyai tren yang menurun dengan rata- rata penurunan sebesar -1,14%. Tercatat nilai ekuitas Kota Tarakan ditahun 2016 sebesar Rp. 5,983 triliun dan menjadi Rp. 5,715 triliun ditahun 2020 atau ada penurunan sebesar 268 miliar dalam kurun waktu 5 tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa selisih antara nilai aset yang ada terhadap kewajiban yang harus dibayarkan terus menurun. Hal ini perlu diperhatikan oleh Pemerintah Kota Tarakan terutama berkaitan dengan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Kota Tarakan. Secara keseluruhan Neraca Kota Tarakan disajikan pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6

Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Tarakan Tahun 2016 – 2020

No.	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
	ASET						
A.	ASET LANCAR						
1	Kas di Kas Daerah	11.229.298.709	4.916.208.751	115.205.819.116	156.059.539.016	48.701.073.562	44,31
2	Kas di Bendahara Penerimaan	148.226.730	80.308.448	80.308.448	41.854.910	74.863.483	-15,70
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	2.236.731.474	198.381.938	3.641.671.663	217.843.363	-	
4	Kas di BLUD	-	-	-	-	21.561.121.820	
5	Kas di Bendahara FKTP	-	-	6.960.401.557	-	-	
6	Kas di Bendahara BOS	-	-	-	-	-	
7	Kas Lainnya	8.541.122.708	7.363.007.569	2.619.771.069	4.525.812.200	6.479.667.388	-6,69
8	Setara Kas				-		
9	Investasi Jangka Pendek				-		
10	Piutang Pendapatan	72.861.497.262	57.451.118.828	47.801.196.074	47.899.097.338	54.007.339.311	-7,21
11	Piutang Lainnya	21.549.862	107.469.437	11.630.379.737	143.282.157.871	68.991.559.228	652,22
12	Penyisihan Piutang	(30.720.928.793)	(31.413.246.218)	(31.413.246.218)	(35.952.859.624)	(39.506.563.558)	
13	Beban Dibayar Dimuka	159.339.349	159.339.349	159.339.349	131.283.379	131.006.831	-4,78
14	Persediaan	16.626.870.385	43.814.358.532	42.653.781.044	91.770.610.612	99.149.857.231	56,26
	JUMLAH ASET LANCAR	81.103.707.686	82.676.946.634	199.339.421.840	408.182.290.512	259.766.847.169	33,78
B.	INVESTASI JANGKA PANJANG						
1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	-	-	-	-	-	-
a	Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	-	-	-	-	-	-

No.	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
b	Investasi dalam Obligasi	-	-	-	-	-	-
c	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-	-	-	-	-
d	Dana Bergulir	4.945.000.000	4.944.955.024	4.944.955.024	4.944.955.024	4.944.955.024	-0,01
e	Deposito Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-
f	Investasi Non Permanen Lainnya	-	-	-	-	-	-
g	Penyisihan Dana Bergulir	(2.166.997.152)	(2.858.311.534)	(2.858.311.534)	(2.294.826.874)	(2.220.882.366)	
	JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	2.778.002.848	2.086.643.490	2.086.643.490	2.650.128.150	2.724.072.658	-0.49
2	Investasi Jangka Panjang Permanen	-	-	-	-	-	-
a	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	125.145.881.614	111.290.234.019	111.290.234.019	313.054.824.685	358.845.987.578	30,13
b	Investasi Permanen Lainnya	-	-	-	-	-	-
c	Penyertaan Modal Dalam Proyek Pembangunan	-	-	-	-	-	-
d	Penyertaan Modal Perusahaan Patungan	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	125.145.881.614	111.290.234.019	111.290.234.019	313.054.824.685	358.845.987.578	30,13
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	127.923.884.462	113.376.877.509	113.376.877.509	315.704.952.835	361.570.060.236	29,66
C.	ASET TETAP						
1	Tanah	1.660.551.750.250	1.903.098.683.772	1.909.129.314.861	1.999.185.577.455	1.983.706.887.753	4,55
2	Peralatan dan Mesin	464.546.180.217	446.526.611.256	453.332.082.334	470.195.644.470	498.560.708.781	1,78

No.	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
3	Gedung dan Bangunan	2.423.463.314.972	2.259.160.985.202	2.272.880.129.647	2.307.488.829.474	2.352.464.294.256	-0,74
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.882.104.959.911	2.685.944.784.861	2.740.117.506.443	2.444.840.207.575	2.453.377.438.569	-3,95
5	Aset Tetap Lainnya	25.265.328.549	26.723.237.244	31.222.090.354	31.508.325.764	19.470.069.540	-6,31
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	251.853.577.215	360.307.500.627	445.978.187.574	239.497.175.509	365.942.678.438	9,79
7	Akumulasi Penyusutan	(2.350.500.595.503)	(2.388.417.445.449)	(2.388.417.445.449)	(2.461.509.462.025)	(2.636.884.627.729)	
	JUMLAH ASET TETAP	5.357.284.515.611	5.293.344.357.513	5.464.241.865.764	5.031.206.298.222	5.036.637.449.608	-1,53
D.	DANA CADANGAN						
1	Dana Cadangan	0	0	0	0	0	
	JUMLAH DANA CADANGAN	0	0	0	0	0	
E.	ASET LAINNYA						
1	Tagihan Jangka Panjang	589.399.294	687.610.219	687.610.219	39.491.200	39.491.200	-49,12
2	Tuntutan Ganti Rugi	-	-	-	497.708.094	449.043.094	
3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	218.217.406.000	17.066.460.000	17.066.460.000	17.066.460.000	17.066.460.000	
4	Aset Tidak Berwujud	6.856.850.076	5.966.475.126	5.995.825.126	4.092.713.025	3.580.923.162	-14,99
5	Aset Lain-lain	471.403.736.958	401.972.373.057	401.972.373.057	325.685.146.231	327.750.955.356	-8,69
	JUMLAH ASET LAINNYA	697.067.392.328	425.692.918.401	425.722.268.401	347.381.518.550	348.886.872.812	-15,89
	JUMLAH ASET	6.263.379.500.087	5.915.091.100.057	6.202.680.433.514	6.102.475.060.118	6.006.861.229.823	-1,04
	KEWAJIBAN						
F.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-	-	20.014.293	3.308.646	
2	Utang Bunga	-	-	-	18.658.461.272	12.687.479.606	
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-	-	-	

No.	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
4	Pendapatan Diterima Dimuka	1.852.497.377	2.435.285.676	-	1.893.653.310	2.872.924.803	
5	Utang Beban	86.026.076.252	101.473.453.863	15.543.193.154	5.921.407.663	4.763.836.592	
6	Utang Jangka Pendek Lainnya	191.722.120.754	233.991.425.068	10.048.981.789	296.854.927.092	270.732.500.785	
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	279.600.694.383	337.900.164.607	25.592.174.943	323.348.463.630	291.060.050.432	1,01
G.	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
1	Utang Dalam Negeri	0	0	0	0	0	
2	Utang Jangka Panjang Lainnya	0	0	0	82.300.000	82.300.000	
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0	0	0	82.300.000	82.300.000	
	JUMLAH KEWAJIBAN	279.600.694.383	337.900.164.607	25.592.174.943	323.430.763.630	291.142.350.432	1,01
H.	EKUITAS						
1	EKUITAS	5.983.778.805.704	5.577.190.935.450	5.913.418.470.845	5.779.044.296.489	5.715.718.879.393	-1,14
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	6.263.379.500.087	5.915.091.100.057	5.939.010.645.788	6.102.475.060.118	6.006.861.229.825	-1,04

Sumber: BPKPAD Kota Tarakan, diolah

Untuk menganalisis neraca Kota Tarakan periode tahun 2016-2020 digunakanlah beberapa analisis rasio antara lain:

1. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Rasio inilah yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa llikuidnya suatu Pemerintah Daerah. Jika pemerintah daerah mampu memenuhi kewajibannya berarti pemerintah daerah tersebut likuid, sedangkan jika pemerintah daerah tidak mampu memenuhi kewajibannya berarti pemerintah daerah tersebut ilikuid

Dalam rasio ini akan diketahui sejauh mana aktiva lancar pemerintah daerah dapat digunakan untuk menutupi kewajiban jangka pendek atau utang lancarnya. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan utang lancar maka artinya semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah dalam menutupi kewajiban utang lancarnya. Tingginya Rasio lancar dapat menunjukkan adanya uang kas berlebih yang bisa berarti dua hal yaitu besarnya keuntungan yang telah diperoleh atau akibat tidak digunakannya keuangan pemerintah daerah secara efektif untuk berinvestasi.

Dalam kurun waktu tahun 2016-2020 rasio lancar Pemerintah Kota Tarakan sangat berfluktuasi namun mempunyai tren yang menurun. Rasio lancar Pemerintah Kota Tarakan ditahun 2016 sebesar 29,01%. Artinya Kota Tarakan ditahun 2016 mempunyai kemampuan menutup hutang jangka pendeknya sebesar 29,01% dari total kewajiban jangka pendeknya. Sedangkan ditahun 2020 kemampuan Kota Tarakan dalam menutup kewajiban jangka pendek sebesar 89,25% dari total kewajiban jangka pendek yang ada. Kondisi rasio lancar yang kurang baik terjadi ditahun 2016 dan

2017 serta tahun 2020. Nilai rasio lancar tahun 2016 dan 2017 serta 2020 nilainya dibawah 100% yaitu 29,01% ditahun 2016 dan 24,47% ditahun 2017 serta 89,25% ditahun 2020. Artinya ditahun tersebut aktiva lancar Kota Tarakan terutama uang kas daerah tidak cukup untuk membiayai kewajibannya khususnya untuk membayar Utang Beban dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Dengan melihat nilai rasio lancar ini yang relatif rendah khususnya ditahun 2016 dan tahun 2017 serta tahun 2020, maka Pemerintah Kota Tarakan harus membenahi dan mengatur nilai kewajiban khususnya kewajiban jangka pendeknya agar tidak melebihi kondisi nilai kas daerah yang ada, sehingga kas daerah dapat dimanfaatkan untuk investasi yang produktif.

Tabel 3.7

Rasio Lancar Kota Tarakan Tahun 2016 – 2020 (dalam Miliar)

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
ASET LANCAR	81,10	82,68	199,34	408,18	259,77
KEWAJIBAN LANCAR	279,60	337,90	25,59	323,35	291,06
RASIO LANCAR	**29,01%**	**24,47%**	**778,91%**	**126,23%**	**89,25%**

Sumber: BPKPAD Kota Tarakan, diolah

2. Rasio Solvabilitas

Solvabilitas merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk melunasi seluruh utang dengan memakai semua aset. Dengan kata lain aset menjadi penjamin utang yang menjadi konsep dasar akuntansinya. Solvabilitas pemerintah daerah penting untuk diketahui supaya tahu kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi atau membayar semuapinjaman melalui jumlah aktiva yang dimiliki yang memengaruhi jenis- jenis laporan keuangan. Atau secara singkat bisa dimaknai kemampuan

perusahaan dalam membayar seluruh kewajibannya apabila perusahaan dilikuidasi.

a) *Total Debt to Equity Ratio* (Rasio Hutang terhadap Ekuitas)

Merupakan Perbandingan antara hutang – hutang dan ekuitas dalam pendanaan suatu entitas dan menunjukkan kemampuan modal sendiri dari entitas tersebut untuk memenuhi seluruh kewajibannya.

Jika dilihat dari data yang ada, rasio hutang terhadap ekuitas Kota Tarakan dari tahun 2016-2020 secara keseluruhan masih relatif kecil. Adapun rasio hutang terhadap ekuitas ditahun 2016 yaitu sebesar 4,67%, tahun 2017 yaitu sebesar 6,06%, tahun 2018 sebesar 0,43%, tahun 2019 sebesar 5,60%, dan tahun 2020 sebesar 5,09%. Artinya total jumlah kewajiban yang ada tidak pernah lebih dari 6,06% dari total kekayaan sendiri setelah dikurangi dengan kewajiban yang ada. Sehingga dapat dikatakan bahwa nilai modal/ kekayaan bersih daerah Kota Tarakan masih sangat cukup sekali untuk menjamin pembayaran hutang yang ada.

Tabel 3.8
Rasio Hutang Terhadap Ekuitas Kota Tarakan
Tahun 2016 – 2020 (dalam Miliar)

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
KEWAJIBAN	279,60	337,90	25,59	323,35	291,06
EKUITAS	5.983,78	5.577,19	5.913,42	5.779,04	5.715,72
TOTAL DEBT TO EQUITY RATIO	**4,67%**	**6,06%**	**0,43%**	**5,60%**	**5,09%**

Sumber: BPKPAD Tarakan, diolah

b) *Total Debt to Total Asset Ratio* (Rasio Hutang terhadap Total Aktiva)

Rasio ini merupakan perbandingan antara hutang (baik hutang lancar maupun hutang jangka panjang) dengan jumlah seluruh aktiva (aset). Secara akuntansi rasio ini menunjukkan berapa bagian dari keseluruhan aktiva yang dibelanjai oleh hutang.

Pada dasarnya rasio ini tidak berbeda dengan rasio sebelumnya (Rasio Hutang terhadap Ekuitas). Bedanya rasio ini yang menjadi perbandingan total hutang ialah nilai total aset tanpa dikurangi kewajiban yang ada. Oleh karena itu rasionya akan sedikit lebih kecil.

Jika dilihat dari data yang ada, rasio hutang terhadap total aktiva (total aset) Kota Tarakan dari tahun 2016-2020 tidak pernah lebih dari 5,71%. Artinya total jumlah kewajiban yang ada tidak pernah lebih dari 5,71% dari nilai total aset ada. Adapun nilai rasio tertinggi terjadi ditahun 2017 yaitu sebesar 5,71% dan tahun 2019 sebesar 5,30%. Secara keseluruhan nilai total set daerah nilainya masih sangat cukup sekali untuk menjamin pembayaran hutang (kewajiban) yang ada di Kota Tarakan.

Tabel 3.9
Rasio Hutang Terhadap Total Aktiva Kota Tarakan
Tahun 2016 – 2020 (dalam Miliar)

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
KEWAJIBAN	279,60	337,90	25,59	323,35	291,06
AKTIVA	6.263,38	5.915,09	6.202,68	6.102,48	6.006,86
TOTAL DEBT TO ASSET RATIO	**4,46%**	**5,71%**	**0,41%**	**5,30%**	**4,85%**

Sumber: BPKPAD Tarakan, diolah

3. Rasio Aktivitas

Secara akuntansi rasio ini digunakan untuk mengukur efektifitas manajemen dalam menggunakan sumber daya ekonomis untuk menghasilkan penjualan yang menguntungkan.

a)* Perputaran aktiva tetap *(fixed assets turn over)

Perputaran aktiva tetap adalah rasio antara penjualan dengan aktiva tetap yang mengukur efisiensi penggunaan aktiva tetap atau perputaran aktiva tetap. Rasio ini menunjukkan bagaimana perusahaan dalam hal ini Pemerintah Kota Tarakan menggunakan aktiva tetapnya seperti tanah, gedung, jalan, kendaraan, mesin-mesin, perlengkapan kantor dll. untuk menghasilkan keuntungan atau dalam lingkup pemerintah daerah keuntungan tersebut berbentuk Penerimaan Asli Daerah (PAD). Semakin besar rasionya maka semakin baik pula manajemen sumberdaya ekonomis tersebut dalam memperoleh keuntungan.

Rasio perputaran aktiva tetap Kota Tarakan dalam kurun waktu 2016-2020 tren relatif meningkat. Adapun rasio ditahun 2016 mencapai 1,16% dan menjadi 2,14% ditahun 2020. Jika dilihat nominalnya maka, dari total pendayagunakan sumberdaya aset tetap ditahun 2016 yang senilai Rp. 5,357 triliun Pemerintah Kota Tarakan hanya mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 62,20 miliar. Sedangkan ditahun 2020 dengan mendayagunakan sumberdaya aset tetap senilai 5,036 triliun Pemerintah Kota Tarakan hanya mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 107,84 miliar. Secara keseluruhan pendayagunaan aset tetap yang nilainya cukup besar belum mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap perolehan PAD daerah.

Tabel 3.10
Rasio Perputaran Aktiva Tetap Kota Tarakan
Tahun 2016 – 2020 (dalam miliar)

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
PAD	62,20	67,09	72,40	73,23	107,84
AKTIVA TETAP (Aset Tetap)	5.357,28	5.293,34	5.464,24	5.031,20	5.036,64
RASIO PERPUTARAN AKTIVA TETAP	**1,16%**	**1,27%**	**1,32%**	**1,46%**	**2,14%**

Sumber: BPKPAD Tarakan, diolah

b) Perputaran total aktiva (*total assets turn over*)

Hampir mirip dengan perputaran aktiva tetap, perputaran total aktiva juga digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan total aset daerah untuk menghasilkan keuntungan atau dalam lingkup pemerintah daerah keuntungan tersebut berbentuk Penerimaan Asli Daerah (PAD). Dengan kata lain semakin tinggi rasionya semakin efisien pemerintah daerah dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan PAD.

Sebaliknya Rasio Perputaran Aset yang rendah menandakan kurang efisiennya manajemen dalam menggunakan asetnya dan kemungkinan besar adanya masalah manajemen ataupun produksinya.

Rasio perputaran total aktiva Kota Tarakan dalam kurun waktu 2016-2020 trennya relatif. Rasio ditahun 2016 mencapai 0,99% dan menjadi 1,80% ditahun 2020. Secara keseluruhan dari pada tahun 2016 nilai total aset daerah sebesar Rp. 6,263 triliun hanya mampu menghasilkan PAD sebesar Rp. 62,20 miliar sedangkan pada tahun 2020 nilai total aset daerah sebesar Rp.

6,006 triliun hanya mampu menghasilkan PAD sebesar Rp. 107,84 miliar. Hal itu terbilang sangat rendah dan bisa dikatakan bawah tingkat efisiensi pemerintah daerah dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan PAD masih sangat rendah. Untuk itu Pemerintah Kota Tarakan mempunyai kewajiban dan harus meningkatkan sisi produksi daerah dalam hal ini meningkatkan pengelolaan sumber-sumber potensial PAD. Oleh karena itu masih perlu dioptimalkan potensi-potensi penerimaan PAD daerah.

Tabel 3.11
Rasio Perputaran Total Aktiva Kota Tarakan
Tahun 2016– 2020 (dalam miliar)

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
PAD	62,20	67,09	72,40	73,23	107,84
TOTAL AKTIVA (Jumlah Aset)	6.263,38	5.915,09	6.202,68	6.102,48	6.006,86
RASIO PERPUTARAN TOTAL AKTIVA	**0,99%**	**1,13%**	**1,17%**	**1,20%**	**1,80%**

Sumber: BPKPAD Tarakan, diolah

3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Analisis kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan penggunaan anggaran, baik untuk belanja maupun pengeluaran pembiayaan pada periode tahun anggaran sebelumnya. Analisis ini digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan dimasa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi penggunaan anggaran menguraikan sekurang-kurangnya mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dan realisasi belanja. Oleh karena itu Analisis proporsi penggunaan anggaran dilakukan melalui analisis sebagai berikut:

a. Analisis proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur;
b. Analisis belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Belanja pemenuhan aparatur terdiri dari belanja tidak langsung pada belanja pegawai yang terdiri dari gaji dan tunjangan serta belanja langsung pada belanja pegawai terdiri dari insentif honor kegiatan, lembur dan lain-lain. Sedangkan pengeluaran pembiayaan wajib dan mengikat serta prioritas utama terdiri dari seluruh biaya yang harus dikeluarkan baik itu berupa belanja tidak langsung ditambah pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal investasi pemerintah daerah dan pembayaran pokok utang.

Rasio belanja pemenuhan untuk pemenuhan aparatur terhadap total pengeluaran menunjukkan tren yang fluktuatif setiap tahunnya. Rasio Belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur ditahun 2016 sebesar 44,45% dari total pengeluaran daerah dan rasionya meningkat hingga mencapai 50,88% ditahun 2019 namun dapat ditekan lagi ditahun 2020 dengan rasio 43,29%. Meskipun tren rasionya relatif meningkat ditahun 2016-2019, namun jika dilihat nominalnya nilai belanja pemenuhan untuk pemenuhan aparatur justru terus menurun. Berdasarkan data terlihat bahwa total belanja untuk aparatur ditahun 2016 sebesar Rp. 455,541 miliar dan menurun menjadi Rp. 428,605 miliar ditahun 2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota

Tarakan berusaha untuk menekan anggaran belanja aparatur dan terus meningkatkan anggaran untuk belanja publik atau belanja kepentingan masyarakat.

Rincian proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dapat dilihat pada tabel 3.12.

Tabel 3.12
Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kota Tarakan Tahun 2016-2020

No.	Tahun	Total belanja untukpemenuhan kebutuhan aparatur	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase (%)
1	2016	455.541.369.500	1.022.717.354.397	44,54%
2	2017	389.803.232.424	782.139.143.812	49,84%
3	2018	441.833.624.349	880.654.610.999	50,17%
4	2019	388.590.824.577	763.693.529.822	50,88%
5	2020	428.605.119.412	990.156.020.065	43,29%

Sumber: BPKPAD Tarakan, diolah

Untuk menghitung kemampuan belanja daerah, maka diperlukan analisis terhadap pengeluaran wajib dan mengikat daerah. Pada dasarnya analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat bertujuan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari dan ditunda sehingga harus dibayar dalam suatu tahun anggaran pemerintah daerah seperti: gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya serta pengeluaran pembiayaan yang wajib dibayarkan. Total pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja dalam rangka penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan.

Realisasi pengeluaran wajib dan mengikat selama tahun 2016-2020 cenderung mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan sebesar -5,12% selama 5 tahun. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya penerimaan daerah yang kemudian berimbas pada menurunnya kemampuan belanja daerah. Dengan kondisi kemampuan belanja daerah yang menurun, maka Pemerintah Kota Tarakan kemudian mencoba menekan pengeluaran BTL khususnya pada pos belanja bantuan sosial. Oleh karena itu adanya penekanan di BTL tersebut menyebabkan secara agregat belanja wajib dan mengikat nilainya relatif menurun.

Tabel 3.13
Realisasi Pengeluaran Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kota Tarakan Tahun 2015-2020 (dalam Miliar)

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
Belanja Pegawai	433,37	370,94	395,85	353,59	399,246	-2,03
Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
Belanja Hibah	18,61	15,93	34,27	14,39	18,82	0,28
Belanja Bantuan Sosial	2,58	2,03	1,65	3,10	1,82	-8,35
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	-	-	-	-	-	-
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	0,90	0,90	0,77	0,89	-	-0,37
Belanja Tidak Terduga	0,07	0,00	-	0,29	8,71	399,24
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-	1,45	5,99	18,30	255,56
Pembayaran Pokok Utang	95,93	-	-	-	-	-
Belanja Wajib Mengikat	**551,46**	**389,80**	**433,99**	**378,25**	**446,896**	**-5,12**

Sumber: BPKPAD Tarakan, diolah

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan menguraikan sekurang-kurangnya mengenai besaran nilai penerimaan pembiayaan dan pengeluaraan pembiayaan. Pada dasarnya pembiayaan netto yang merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan digunakan untuk menutup defisit belanja daerah. Oleh karena itu besaran defisit belanja daerah juga harus memperhatikan besaran nilai pembiayaan netto yang dapat digunakan untuk menutupnya yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, serta penerimaan piutang daerah.

Di Kota Tarakan, sumber penutup defisit riil anggaran dalam beberapa tahun terakhir berasal dari besaran SiLPA. Nilai SiLPA terbesar terjadi pada tahun 2020 yaitu mencapai Rp. 160,83 miliar dan yang terendah terjadi pada tahun 2018 hanya sebesar Rp. 6,59 miliar.

Besaran SilPA di Kota Tarakan bisa dikatakan jumlahnya tidak terlalu besar. Meskipun begitu, besaran SilPA tahun kedepannya masih perlu ditekan sebagai upaya efektifitas penggunaan anggaran.

Dalam penyelenggaraan pembangunan, perlu dipahami bahwa tidak selalu SiLPA sifatnya negatif, jika SiLPA terjadi karena penghematan maka justru berdampak positif bagi pembangunan. Untuk itu yang perluditekan dari SiLPA ialah yang disebabkan oleh tidak termanfaatkannya anggaran untuk kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan. Adapun efektifitas dan efisiensi pemanfaatan anggaran tetap harus terus ditingkatkan meskipun kemudian dapat meningkatkan besaran SiLPA.

Secara rinci komposisi penutup defisit riil anggaran Kota Tarakan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.14

Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Tarakan Tahun 2016-2020 (dalam Miliar)

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	14,48	6,59	10,02	160,83	76,82
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	4,63	6,07	5,46	5,14	2,92
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
Penerimaan Piutang Daerah	34,73	40,60	45,46	48,12	44,53
Total Komposisi Penutup Defisit	**53,84**	**53,26**	**60,94**	**214,09**	**124,27**

Sumber: BPKPAD Tarakan, diolah

Jika dilihat dari sumber SiLPA di Kota Tarakan dari tahun 2016-2020 terlihat bahwa nilai SiLPA tersebut berasal dari Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa sisa penghematan belanja atau akibat lainnya merupakan komponen utama penutup defisit rill anggaran yang ada di Kota Tarakan.

Tabel 3.15

Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Tarakan Tahun 2015-2020 (dalam miliar)

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Rata - rata Silpa
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	205,29	22,72	14,48	6,59	10,02	160,83	100%
Pelampauan Penerimaan PAD	0	0	0	0	0	0	0,00%
Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	0	0,00%
Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0	0	0	0	0	0	0,00%
Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	0	0	0	0	0	0	0,00%
Kewajiban Kepada Pihak Ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	0	0	0	0	303	0	0,00%
Kegiatan Lanjutan	0	0	0	0	0	0	0,00%

Sumber: BPKPAD Tarakan, diolah

3.3. KERANGKA PENDANAAN

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya. Kapasitas keuangan daerah adalah total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya.

Pada akhir Tahun 2019, beberapa peraturan baru yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

diterbitkan pemerintah pusat, termasuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Kesemuanya ini merupakan hal baru di dalam pengelolaan keuangan daerah yang harus diterapkan dan diberlakukan mulai Tahun anggaran 2021.

Pemerintah Daerah Kota Tarakan untuk perencanaan Tahun 2021 di dalam penyusunan APBDnya harus sudah mempedomani dan melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, sehingga berbeda dengan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020. Hal ini diperkuat dengan Surat Edaran Nomor 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang salah satu butir SE tersebut berisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Selain adanya peraturan baru yang terbit di akhir Tahun 2019, ada peristiwa yang tidak diduga sebelumnya yaitu merebaknya kasus berjangkitnya pandemi COVID-19 dengan penyebarannya sangat cepat, hal ini berdampak pada banyak aspek, yaitu antara lain aspek sosial dan ekonomi. Sektor usaha masyarakat kecil dan

menengah, bahkan industri dalam skala besar juga terkena imbasnya akibat dampak pandemi COVID-19 ini.

Perkembangan penyebaran COVID-19 yang semakin mengkhawatirkan membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi dan memutus penyebaran pandemi ini, kebijakan *social distancing* dan anjuran *work from home* yang diambil pemerintah, mengakibatkan beberapa sektor perekonomian, pelayanan publik, dan sektor lainnya mengurangi atau menghentikan aktivitasnya sementara sampai waktu yang belum ditentukan. Kebijakan tersebut mengakibatkan berkurangnya aktivitas masyarakat yang berdampak terhadap lesunya sendi-sendi perekonomian baik dalam skala makro maupun mikro. Pandemi COVID-19 berdampak pada terkoreksinya pertumbuhan ekonomi Kota Tarakan pada tahun 2020 dan tentu akan mempengaruhi capaian indikator-indikator ekonomi makro lainnya pada perencanaan di RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024.

Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Kota Tarakan pada Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021-2024 yang diasumsikan juga mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan target Tahun Anggaran 2020. Begitu juga dengan Belanja Daerah yang sebelumnya fokus untuk melaksanakan dan menuntaskan program/kegiatan yang sudah diamanatkan dalam RPJMD Pemerintah Daerah Kota Tarakan, pada tahun mendatang selain tetap menuntaskan program/kegiatan strategis, juga harus mendanai kegiatan-kegiatan dalam rangka pemulihan ekonomi dan kesehatan pasca pandemi COVID-19.

Pada bagian kerangka pendanaan memberikan gambaran tentang proyeksi pendapatan, Proyeksi Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran (SiLPA), dan Proyeksi belanja wajib dan mengikat yang kemudian akan dihitung seberapa besar kapasitas riil daerah untuk pendanaan indikatif pada tahun 2021 hingga 2024.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah

Proyeksi pendapatan dan belanja daerah dapat dilakukan berdasarkan pada data dan mengkaitkan dengan informasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah, antara lain:

a. Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu dengan menstandarkan data outlier atau ekstrem;
b. Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain);
c. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah; dan
d. Kebijakan dibidang keuangan negara.

Dalam proyeksi pendapatan dan belanja daerah Kota Tarakan ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan angka rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan dan belanja daerah tahun 2016 hingga 2020 (APBD) yang disesuaikan dengan menstandarkan data-data outlier yang sifatnya dapat membiaskan proyeksi. Hal ini dilakukan agar proyeksi pendapatan dan belanja daerah Kota Tarakan ini tidak bias dan mendekati proyeksi yang logis dengan melihat target-target pendapatan yang mampu dicapai.

Dalam memproyeksi pendapatan, proyeksi lebih difokuskan pada penerimaan yang bersumber dari daerah sendiri. Adapun penerimaan yang sifatnya eksternal dan bersumber dari luar baik

itu dari dana perimbangan maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah cenderung ditarget relatif tetap (flat). Seluruh proyeksi menggunakan tahun dasar target APBD tahun 2020.

Penerimaan PAD ditargetkan selama tahun 2021-2024 naik 6-7,5% pertahun. Adapun pendapatan pajak daerah ditargetkan naik ± 7-8,5% pertahun. Target ini ditentukan dengan asumsi bahwa seluruh potensi-potensi pajak yang hilang dapat dipungut. Selain itu dengan adanya potensi investasi yang cukup besar dengan diimplementasikannya sistem OSS yang memudahkan proses perizinan, maka efek turunan dari investasi tersebut sedikit banyak akan meningkatkan potensi pendapatan pajak daerah yang bisa dipungut. Dengan mendasarkan hal tersebut maka pendapatan pajak daerah ditargetkan sebesar Rp. 54,472 miliar ditahun 2021 meningkat menjadi Rp. 69,265 miliar ditahun 2024. Untuk penerimaan PAD dari hasil retribusi daerah ditargetkan naik cukup signifikan yaitu ± 13-14% pertahun. Hal didasarkan bahwa dalam beberapa waktu terakhir retribusi yang didapat sangat kurang maksimal. Hal ini dsebabkan terutama oleh tidak terawasinya pungutan retribusi, skema pungutan yang kurang menguntungkan Kota Tarakan, serta banyak titik-titik potensi pungutan retribusi yang belum termanfaatkan. Oleh karena itu hasil retribusi daerah ditargetkan sebesar Rp. 9,791 miliar ditahun 2021 meningkat menjadi Rp. 14,348 miliar ditahun 2024. Proyeksi Dana pendapatan transfer pemerintah pusat ditarget sedikit meningkat. Sedangkan target DAK ditargetkan tetap. Adapun proyeksi ditahun 2021 sebesar Rp. 760,49 miliar dan meningkat menjadi Rp. 798,10 miliar ditahun 2024. Sedangkan pendapatan transfer antar daerah memiliki target menurun di tahun 2022 yang sebelumnya 64,10 milyar menjadi 61,43 milyar dan tetap hingga di tahun 2024.

Proyeksi pendapatan daerah lainnya yaitu Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada dasarnya juga flat dari tahun 2021 hingga tahun 2024. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa sumber penerimaan yang sifatnya ekternal cenderung akan diproyeksikan tetap, dimana untuk nilai Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah ditarget sebesar Rp. 34,916 miliar ditahun 2021 hingga tahun 2024.

Komponen belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga. Proyeksi belanja operasi memiliki pertumbuhan 0,5% dengan target sebesar 756,867 milyar pada tahun 2021 meningkat menjadi 770,502 milyar pada tahun 2024. Sedangkan belanja modal diproyeksikan tetap dari tahun 2021 hingga 2024 yaitu sebesar 232,690 milyar rupiah. Selanjutnya belanja tidak terduga diproyeksinya lebih besar pada tahun 2021 sebesar 15,00 milyar dan menurun sebesar 66% yaitu menjadi 5 milyar pada tahun 2022 hingga 2024. Dengan mempertimbangkan potensi penerimaan dan proyeksi belanja dari tahun 2021-2024, maka besarnya APBD daerah Kota Tarakan memiliki nilai yang negatif atau defisit.

Adapun rincian realisasi dan proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tarakan tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel 3.16 dan 3.17.

Tabel 3.16
Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Tarakan Tahun 2019-2020 (dalam Juta)

NO	URAIAN	REALISASI	
		2019	2020
1	**PENDAPATAN**	**920.722**	**924.437**
1.1.	**PENDAPATAN ASLIDAERAH**	**73.230**	**107.839**
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	48.124	44.538
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	9.570	10.847
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yangDipisahkan	5.142	2.923
1.1.4	Lain-lain Pendapatan AsliDaerah yang Sah	10.393	49.528
1.2.	**DANA PERIMBANGAN**	**762.714**	**691.910**
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	236.549	178.880
1.2.2	Dana Alokasi Umum	409.970	425.960
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	116.194	87.069
1.3.	**LAIN-LAIN PENDAPATANDAERAH YANG SAH**	**84.776**	**124.687**
1.3.1	Pendapatan Hibah	30.305	38.780
1.3.2	Dana Darurat	-	-
1.3.3	Dana Bagi Hasil PajakDari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	54.471	57.852
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	14.163
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau PemerintahDaerah Lainnya	-	13.891
1.3.6	Pendapatan Lainnya	-	-
2	**BELANJA**	**763.693**	**990.156**
2.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**372.176**	**428.605**
2.1.1	Belanja Pegawai	353.538	399.245
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	14.337	18.819
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	3.101	1.824
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota danPemerintah Desa	-	-
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota danPemerintahan Desa	898	-
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	299	8.714
2.2	**BELANJA LANGSUNG**	**391.516**	**561.550**
2.2.1	Belanja Pegawai	1.237	7.458
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	225.042	275.676
2.2.3	Belanja Modal	165.236	278.415

Sumber: BPKPAD Tarakan, diolah

Tabel 3.17

Proyeksi Pendapatan dan Belanja Kota Tarakan Tahun 2021-2024 (dalam Juta)

No	URAIAN	PROYEKSI			
		2021	2022	2023	2024
1	**PENDAPATAN**				
1.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**90.293**	**95.753**	**101.912**	**109.641**
1.1.1	Pajak Daerah	54.472	58.512	63.265	69.265
1.1.2	Retribusi Daerah	9.791	11.213	12.619	14.348
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.300	8.300	8.300	8.300
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	17.730	17.728	17.728	17.728
1.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**824.606**	**820.472**	**839.717**	**859.539**
1.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	760.499	759.042	778.287	798.109
1.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	64.107	61.430	61.430	61.430
1.3.	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**34.916**	**34.916**	**34.916**	**34.916**
1.3.01	Pendapatan Hibah	6.000	6.000	6.000	6.000
1.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	28.916	28.916	28.916	28.916
	Jumlah Pendapatan	**949.815**	**951.141**	**976.545**	**1.004.096**
2	**BELANJA**				
2.1	**BELANJA OPERASI**	**756.867**	**761.367**	**765.912**	**770.502**
2.1.1	Belanja Pegawai	449.979	454.479	459.024	463.614
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	239.752	239.752	239.752	239.752
2.1.5	Belanja Hibah	64.862	64.862	64.862	64.862

No	URAIAN	PROYEKSI			
		2021	2022	2023	2024
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	2.274	2.274	2.274	2.274
2.2	**BELANJA MODAL**	**232.690**	**232.690**	**232.690**	**232.690**
2.2.01	Belanja Modal Tanah	4.933	4.933	4.933	4.933
2.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.589	36.589	36.589	36.589
2.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	77.733	77.733	77.733	77.733
2.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	113.100	113.100	113.100	113.100
2.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	335	335	335	335
2.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**15.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
2.3.01	Belanja Tidak Terduga	15.000	5.000	5.000	5.000
	Jumlah Belanja	**1.004.557**	**999.057**	**1.003.602**	**1.008.192**
	Total Surplus/(Defisit)	**-54.742**	**-47.916**	**-27.057**	**-4.096**
3	**PEMBIAYAAN**				
3.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**				
3.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	70.742	6.000	6.000	6.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**70.742**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
3.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**				
3.2.02	Penyertaan Modal Daerah	16.000	16.000	16.000	16.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
	PEMBIAYAAN NETTO	**54.742**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
3.3	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan**	**0**			

Sumber: BPKPAD Tarakan, diolah

3.3.2.Penghitungan Kerangka Pendapatan

Penghitungan kerangka pendanaan bertujuan untuk memperoleh kapasitas riil yang digunakan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan. Pada dasarnya Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah diperoleh dari total penerimaan (proyeksi) dikurangi dengan belanja tidak langsung dan pengeluaran pembiayaan. Namun dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, menyebabkan pengertian belanja tidak langsung dan belanja langsung tidak digunakan lagi dan diganti dengan a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer. Hal ini menyebabkan konsep kapasitas riil keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tidak sesuai lagi digunakan dengan adanya perubahan Belanja Daerah Dengan kondisi tersebut maka proyeksi belanja Tahun 2021 sampai dengan 2023 disusun sesuai konsep dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

Berdasarkan hasil proyeksi, terlihat bahwa pada Tahun 2021 belanja daerah lebih tinggi dibandingkan Tahun 2022. Namun pada Tahun 2023 dan 2024 belanja diproyeksikan meningkat. Adapun proyeksi kapasitas keuangan daerah Pemerintah Daerah Kota Tarakan untuk Tahun 2021 sampai 2024 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 3.18

Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah Kota Tarakan Tahun 2021-2024 (dalam Juta)

No	URAIAN	PROYEKSI			
		2021	2022	2023	2024
2	**BELANJA**				
2.1	**BELANJA OPERASI**	**756.867**	**761.367**	**765.912**	**770.502**
2.1.1	Belanja Pegawai	449.979	454.479	459.024	463.614
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	239.752	239.752	239.752	239.752
2.1.5	Belanja Hibah	64.862	64.862	64.862	64.862
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	2.274	2.274	2.274	2.274
2.2	**BELANJA MODAL**	**232.690**	**232.690**	**232.690**	**232.690**
2.2.01	Belanja Modal Tanah	4.933	4.933	4.933	4.933
2.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.589	36.589	36.589	36.589
2.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	77.733	77.733	77.733	77.733
2.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	113.100	113.100	113.100	113.100
2.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	335	335	335	335
2.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**15.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
2.3.01	Belanja Tidak Terduga	15.000	5.000	5.000	5.000
	Jumlah Belanja	**1.004.557**	**999.057**	**1.003.602**	**1.008.192**

No	URAIAN	PROYEKSI			
		2021	2022	2023	2024
3	**PEMBIAYAAN**				
3.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**				
3.2.02	Penyertaan Modal Daerah	16.000	16.000	16.000	16.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
	TOTAL	**1.020.557**	**1.015.057**	**1.019.602**	**1.024.192**

Sumber: BPKPAD Tarakan, diolah

Kebijakan alokasi anggaran merupakan serangkaian kebijakan yang telah ditetapkan sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan alokasi anggaran yang tersedia untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat, serta dalam rangka pencapaian efektifitas program. Mengingat keterbatasan anggaran, maka pengalokasiannya berdasarkan skala prioritas (*money follow programme*) dan kebutuhan.

Prioritas alokasi penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dikelompokkan menjadi 3 (tiga). Kelompok Prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum Kelompok Prioritas II. Kelompok Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah Kelompok Prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya. penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Rencana penggunaan kapasitas keuangan daerah Tahun 2021 sampai dengan 2024 tidak sepenuhnya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Rencana pengunaan kapasitas keuangan tetap akan dialokasikan kedalam 3 (tiga) prioritas dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, sehingga pernyataan prioritas masih sama dengan Tahun 2019 dan 2020, tetapi pengertian/lingkup belanja wajib dan mengikat pada prioritas I dan belanja pada prioritas II dan III berbeda untuk Tahun 2021 sampai dengan 2024.

Alokasi kapasitas keuangan daerah Pemerintah Daerah Kota Tarakan untuk mendanai pembangunan Tahun 2021 sampai 2024, sebagai berikut:

a. Prioritas I. digunakan untuk alokasi pembangunan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar.

b. Prioritas II. digunakan untuk dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah.

c. Prioritas III. digunakan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya

Pembagian pendanaan untuk program prioritas diatas secara lebih lanjut dapat dilihat dalam tabel berikut 3.19.

Tabel 3.19.
Rencana Penggunaan Kapasitas Keuangan Daerah
Kota Tarakan Tahun 2021-2024 (dalam Juta)

No	Uraian	Proyeksi			
		2021	2022	2023	2024
1	Kapasitas Keuangan Daerah	1.020.557	1.015.057	1.019.602	1.024.192
2	Prioritas I	574.167	575.158	600.058	595.506
3	Prioritas II	344.312	339.119	322.829	330.149
4	Prioritas III	102.078	100.780	96.715	98.537
	JUMLAH	1.020.557	1.015.057	1.019.602	1.024.192

Sumber: BPKPAD Tarakan, diolah

BAB

IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat menentukan sasaran dan program pembangunan. Isu strategis ini diperoleh dengan cara mengidentifikasi isu-isu penting dan permasalahan-permasalahan pembangunan.

Analisis isu-isu strategis adalah pemahaman permasalahan pembangunan dan isu-isu yang relevan sebagai pijakan penting dalam penyusunan rencana pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum sesuai harapan. Sedangkan, isu strategis merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa mendatang.

Suatu analisis isu-isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solutif atas berbagai kondisi yang tidak ideal di masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah dan panjang.

Dengan demikian, rumusan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan pembangunan jangka menengah Kota Tarakan 5 (lima) tahun mendatang. Dalam melakukan analisis isu strategis, dapat terlebih dahulu dilakukan telaah terhadap kebijakan di berbagai level. Telaah kebijakan tersebut meliputi kebijakan di level internasional, nasional, provinsi dan kabupaten.

Pengkategorian hasil capaian tersebut bertujuan untuk memetakan isu strategis apa saja yang perlu mendapatkan perhatian dalam pencapaian tujuan pembangunan di Kota Tarakan pada periode RPJMD yang telah ditentukan.

Dalam bab IV ini diuraikan isu-isu strategis yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi dalam pembangunan Kota Tarakan, khususnya untuk jangka waktu 2019-2024. Komponen pembentuk isu-isu strategis di Kota Tarakan terdiri dari : analisis terhadap hasil pembangunan periode sebelumnya 2014-2019 untuk mengetahui permasalahan pembangunan daerah Kota Tarakan dan faktor penentu keberhasilannya; hasil telaah terhadap dokumen RPJPD Kota Tarakan 2005-2025; hasil telaah terhadap dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 2021-2026; hasil telaah isu dari dunia internasional; dan analisis yang berasal dari dunia akademik, usaha/bisnis, sosial budaya.

4.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Permasalahan pembangunan daerah adalah "*gap expectation*"antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat, antara lain ;

1. Terkait dengan BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah, hasil analisis dan interpretasi dari data dan informasi setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disajikan.
2. Permasalahan harus diuraikan secara kuantitatif/kualitatif dan dibandingkan dengan standar/Indikator nasional, regional maupun internasional. Dalam pembahasan ini, permasalahan pembangunan yang dijabarkan ialah indikator kinerja di setiap bidang/urusan yang belum mencapai hasil yang diinginkan berdasarkan perbandingan dengan standar (SPM/SDGs/Standar Nasional/ dengan target tahunan di dalam RPJMD/capaian tahun sebelumnya atau tren).

Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi, oleh karenanya dibutuhkan ketepatan dalam melakukan identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pembangunan.

Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diangkat adalah:

1. Cakupan masalah yang luas.
2. Permasalahan cenderung meningkat atau membesar di masa yang datang dan berdampak negatif.
3. Memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu serta sinergitas berbagai pihak.

4.1.1 Permasalahan Berdasarkan Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

4.1.1.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

Pada tahun 2020 yang lalu pelaksanaan pendidikan sangat terganggu, dimana metode pembelajaran digunakan adalah metode online sehingga dikhawatirkan serapan belajar siswa akan terganggu. Hal ini dikarenakan kondisi Pandemi Covid-19 yang tentunya berdampak pada sistem pembelajaran dan dirasakan dengan sistem online tersebut terjadi penurunan kualitas siswa, Pada dasar urusan pendidikan ada beberapa permasalahan esensial yang harus diselesaikan bersamaan dengan pandemi Convid-19, yaitu:

a) Angka harapan lama sekolah belum optimal, dimana peningkatan AHLS 2015-2020 masih antara 0,01-0,1, dan ditahun 2018 sebesar 13,7 tahun, pada tahun 2019 meningkat tipis menjadi 13,73, sedangkan pada tahun 2020 meningkat lagi menjadi 14,02 tahun.

b) Rata-rata lama sekolah masih belum optimal, data terakhir tahun 2018 sebesar 9,94, hanya meningkat 0,01 dari 9,93 di tahun 2017, tahun 2019 menjadi 9,96 tahun dan meningkat tipis lagi pada tahun 2020 menjadi 9,97 tahun. Hal ini menunjukan rata-rata penduduk kota Tarakan telah mengenyam pendidikan sampai SMA kelas 1.

c) Angka partisipasi kasar (APK) siswa SD dan SMP mengalami penurunan di tahun 2018 dibanding tahun 2017. Pada tahun 2019 siswa SD terjadi peningkatan. Tercatat pada tahun 2020 APK tingkat SD 101,3, tingkat SMP sebesar 94,70.

d) Angka partisipasi pendidikan anak usia dini di Kota Tarakan Cukup tinggi, telah mencapai 100%, yaitu sebesar 115,98% di

tahun 2019. Meningkat dari tahun 2018 yang hanya sebesar 86,22%

e) Angka Partisipasi Sekolah baik tingkat SD maupun SMP di tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi sebesar 99,63%. Pada tahun 2018 hanya sebesar 97,76%.

f) Masih tingginya angka putus sekolah di tahun 2020, baik tingkat SD dan SMP di Kota Tarakan.

Untuk lebih jelasnya pemetaan permasalahan tersebut ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pendidikan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Kualitas Pendidikan Masyarakat Belum Optimal	Rata-rata Lama Sekolah	Tingkat partisipasi penduduk usia sekolah masyarakat khususnya yang tidak mampu relatif rendah
	Angka Harapan Lama Sekolah	Belum meratanya kualitas dan kuantitas serta cakupan sarpras layanan pendidikan dasar
	Masih Tingginya Angka Putus Sekolah	Penyelenggaraan pendidikan non formal belum optimal
	Rendahnya kualitas lulusan SD dan SMP	Pencapaian kompetensi pendidik belum memadai
	Angka Partisipasi Pendidikan Usia Sekolah SD	Jumlah guru masih terbatas
	Rata-rata Lama Sekolah	Minat baca masyarakat masih kurang

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa kualitas pendidikan merupakan masalah yang harus diselesaikan yang disebabkan beberapa akar permasalahan dan permasalahan.

2. Urusan Kesehatan

a) Rasio pos yandu per satuan balita semakin menurun hingga pada tahun 2018, dengan bertambahnya jumlah balita setiap tahun. Namun di tahun 2019 rasio posyandu meningkat 1,23 persen yaitu sebesar 7,09%.

b) Rasio sarana kesehatan persatuan penduduk semakin menurun dengan bertambahnya jumlah penduduk sampai pada tahun 2017. Namun demikian terjadi peningkatan jumlah sarana kesehatan di tahun 2018-2019. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan penduduk, sedangkan jumlah sarana tidak bertambah, sehingga rasio kembali mengalami penurunan sebesar 5,7%.

c) Rasio dokter persatuan penduduk menurun di tahun 2017 dibandingkan tahun 2019. Adapun target indikator Indonesia sehat, adalah 40 dokter per 100.000 penduduk.

d) Cakupan komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan masih rendah. Dan terus mengalami penurunan sejak tahun 2015 sampai 2019.

e) Belum tercapainya target Universal Child Immunization (UCI). Walaupun demikian, nilai cakupan pada tahun 2019 telah mencapai 95%.

f) Masih rendahnya penanganan penderita penyakit TBC BTA.

Tabel 4.2
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kesehatan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Kualitas Kesehatan Masyarakat Belum Optimal	Rendahnya peningkatan Angka Harapan Hidup	Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak
	Rasio sarana kesehatan persatuan penduduk	Cakupan pelaksanaan imunisasi dasar lengkap belum optimal
	Rasio dokter persatuan penduduk	Belum optimalnya penanganan Penyakit menular dan tidak menular
	Banyak kasus kesehatan yang belum diketahui	Kurang optimalnya upaya aktif untuk menemukan kasus kesehatan
	Masih banyak penyakit belum bisa dicegah dan diobati	Ketersediaan obat dan vaksin esensial belum optimal
	Masih banyak pasien RS yang belum bisa terlayani secara optimal	Kapasitas RS untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan masyarakat masih kurang
	Belum optimalnya pelayanan medis maupun pelayanan non medis	Sarana dan prasarana fasilitas layanan terbatas
	Masih banyak masyarakat belum terlayani dengan baik	Masih sangat kurangnya tenaga dokter umum, dokter gigi maupun dokter spesialis.
	Masih banyak masyarakat yang belum bisa menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan	Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan berbasis masyarakat
	Masih rentannya	Kualitas lingkungan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	masyarakat tertular berbagai macam penyakit	permukiman masyarakat belum optimal

Semua permasalahan tersebut diatas menjadi pemicu utama belum maksimalnya pembangunan daerah di Kota Tarakan yang ditandai dengan belum meratanya kesejahteraan masyarakat.

1. Rendahnya Daya Saing SDM Kota Tarakan

Daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) berhubungan dengan bagaimana kualitas masyarakat Kota Tarakan berperan di berbagai sektor penting dalam perekonomian daerah. Rendahnya daya saing SDM Kota Tarakan memiliki masalah inti yakni rendahnya kualitas SDM. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk memecahkan permasalahan terkait kualitas SDM yang akan berdampak pada peningkatan daya saing masyarakat Kota Tarakan.

Indikasi untuk mengukur kualitas SDM antara lain dengan mengukur sejauh mana SDM Kota Tarakan dapat bersaing dengan SDM wilayah lain, sekurang-kurangnya di “negeri” sendiri. Meski nilai IPM Kota Tarakan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun apabila dicermati lebih jauh, diketahui masih terdapat beberapa permasalahan diantaranya, Upaya pembangunan pendidikan melalui wajib belajar 12 tahun yang dilaksanakan untuk meningkatkan taraf pendidikan penduduk Kota Tarakan, dilihat dari capaian rata-rata lama sekolah penduduk Kota Tarakan sampai dengan Tahun 2020 baru mencapai 9,97 tahun atau rata-rata lama sekolah penduduk baru sampai kelas 1 SMA (pendidikan menengah). Belum optimalnya aksesibilitas dan kesempatan memperoleh pendidikan oleh

sebagian masyarakat karena faktor ekonomi merupakan alasan utama anak putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan, baik karena tidak memiliki biaya sekolah maupun karena harus bekerja. Kualitas lulusan pendidikan belum merata dan belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat (dunia kerja). Hal ini dikarenakan fasilitas, sumber dan media pembelajaran khususnya untuk jenjang pendidikan menengah belum tersedia secara merata, juga ketersediaan pendidik yang mengajar pada bidang bidang studi tertentu tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Pembangunan pendidikan belum sepenuhnya dapat meningkatkan kemampuan kewirausahaan lulusan. Lulusan pendidikan menengah cenderung memilih bekerja dari pada menciptakan pekerjaan. Selain itu, pendidikan non formal yang berfungsi sebagai bentuk pendidikan sepanjang hayat dan diarahkan terutama untuk meningkatkan kecakapan hidup dan kompetensi kejuruan belum optimal diakses secara luas oleh masyarakat.

Kuantitas SDM Kota Tarakan merupakan potensi yang besar dalam pembangunan,walaupun laju pertumbuhan penduduk rata-rata cukup tinggi, namun demikian kuantitas SDM yang besar ini tidak dibarengi dengan kualitas SDM, sehingga dapat menjadikan beban dan masalah dalam pembangunan. Kota Tarakan hampir tidak memiliki sumber daya alam, sehingga sumberdaya manusialah yang merupakan modal bagi kemajuan Kota Tarakan, namun demikian kualitas sumberdaya manusia Kota Tarakan sebagian besar belum mampu untuk bersaing secara global dikarenakan dikarenakan kualitas SDM ini rata-rata hanya sampai dengan kelas 1 SMA.

Gambar 4.1
Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kota Tarakan
Tahun 2015-2020

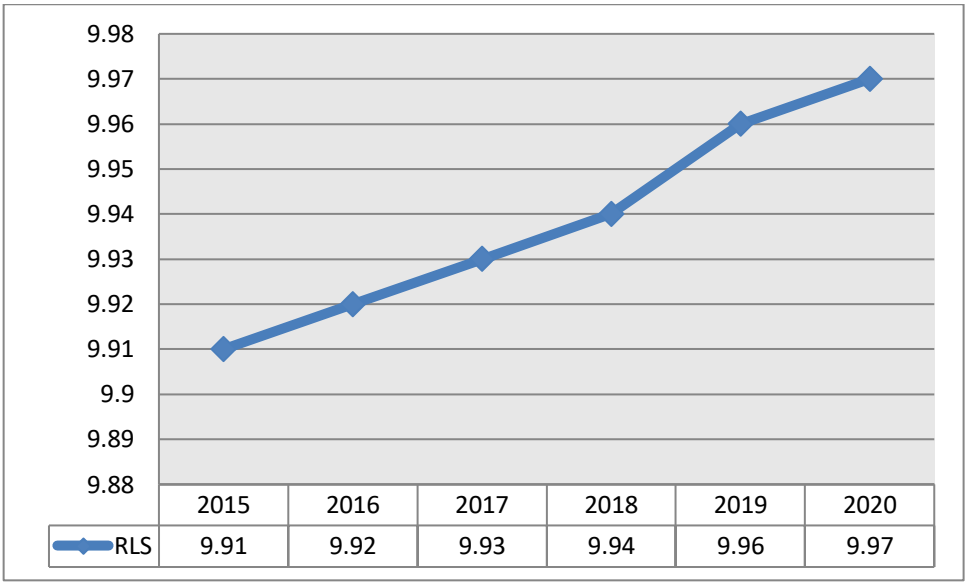

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tarakan, 2020

Sementara itu, untuk permasalahan kesehatan, kondisi di Kota Tarakan belum berada dalam kondisi yang ideal, baik dari sisi aksesibilitas maupun kualitas derajat dan pelayanan kesehatan di masyarakat, walaupun umur harapan hidup di Kota Tarakan sudah cukup baik dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun masih terdapat Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2018 sebesar 159,45 per 100.000 kelahiran hidup, yang menunjukkan masih adanya kasus kematian pada ibu melahirkan.

Kualitas pelayanan yang belum merata juga mejadi persoalan yang akan berdampak pada derajat kesehatan masyarakat yang perlu terus ditingkatkan. Melihat hal-hal tersebut diatas maka pelayanan perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dibidang terkait pendidikan dan kesehatan menjadi penting mengingat kerentanan sosial juga

dapat muncul sebagai akibat dari minimnya perhatian terhadap kedua hal tersebut.

Permasalahan berikutnya yang mempengaruhi rendahnya daya saing SDM Kota Tarakan adalah akses dan mutu pelayanan kesehatan. Peningkatan layanan kesehatan sangat perlu dilakukan mengingat kesehatan merupakan kunci utama individu dalam melaksanakan aktivitasnya. Perkembangan Angka harapan hidup di Kota Tarakan walaupun nilainya sudah baik dan diatas nilai Provinsi Kalimantan Utara, kecepatan peningkatannya berjalan lambat setiap tahunnya. dimana pada tahun 2015 sebesar 73,41 tahun dan hanya meningkat sebesar 0,47 point dalam kurun waktu enam tahun tahun menjadi 73,97 tahun pada tahun 2020.

Gambar 4.2
Angka Harapan Hidup Kota Tarakan Tahun 2015-2020

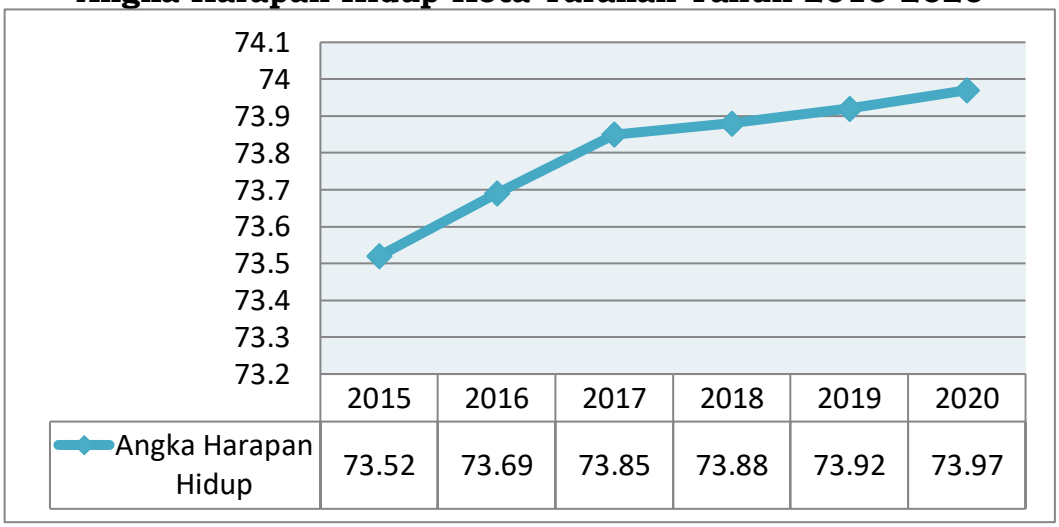

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Harapan Hidup	73.52	73.69	73.85	73.88	73.92	73.97

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tarakan, 2020

Permasalahan turunan yang juga dapat mempengaruhi rendahnya daya saing SDM Kota Tarakan adalah pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita di Kota Tarakan cukup berfluktuatif dimana pada tahun 2013 sebesar 10.073 juta rupiah menjadi

10.841 juta rupiah di tahun 2017. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir kecepatan peningkatan paritas daya beli masyarakat berjalan lambat.

Pertumbuhan indeks daya beli Kota Tarakan selama Tahun 2013 - 2017 cenderung mengalami perlambatan pertumbuhan. Pada tahun 2014 laju pertumbuhan indeks daya beli sebesar 1,26 %, pada tahun 2015 sebesar 0,57 % dan 0,68 % pada tahun 2016. Sedangkan pada tahun 2017, indeks daya beli mengalami laju pertumbuhan sebesar 1,17 %. Hal ini perlu menjadi permasalahan pembangunan karena daya beli masyarakat merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat.

Agar rumusan kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan tidak melenceng dari substansinya maka perlu dipahami sumber/akar masalah pada masing-masing masalah pokok yang telah diuraikan pada bagian terdahulu.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Belum terpenuhi dan meratanya infrastrukur yang berkualitas merupakan masalah pokok yang dihadapi pada aspek infrastruktur. Pengembangan infrastruktur merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan secara keseluruhan. Hal ini mengingat dampaknya yang mempengaruhi indikator kunci keberhasilan pembangunan dasar, baik pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi.

Pembangunan infrastruktur berkualitas dengan kapasitas yang memadai dan merata merupakan faktor penting untuk mendorong konektivitas antar wilayah sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi. Dibutuhkan jaringan infrastruktur yang efektif guna meningkatkan keterkaitan sektor primer berbasis pertanian dalam arti luas dengan sektor industri

pendukungnya melalui kluster dan pengembangan kawasan berdasarkan potensi dan unggulan komoditas daerah. Kualitas dan kapasitas infrastruktur yang memadai akan memperlancar aktivitas perdagangan dan menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan daya saing produk dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Beberapa permasalahan bidang infrastruktur adalah sebagai berikut:

a) Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik sejak tahun 2015-2018 cenderung menurun. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan yaitu sebesar 67,11.
b) Penyediaan fasilitas pengurangan sampah kota masih rendah. Namun demikian, mengalami peningkatan di tahun 2018 sebesar 60,64% daripada tahun 2017.
c) Ketersediaan air bersih masih kurang
d) Belum optimalnya pengendalian tata ruang.

Hal ini terjadi karena perubahan pola dan struktur tata ruang pada dokumen RTRW yang tersedia serta masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai penyelenggaraan Penataan Ruang. Pemetaan permasalahan dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pekerjaan Umum

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum Terpenuhi dan Meratanya Infrastrukur yang Berkualitas	Luasan RTH masih kurang	Terbatasnya ketersediaan lahan dalam rangka pembangunan RTH baru
		Ketersediaan RTH di permukiman kumuh masih kurang
	Penyediaan pemenuhan air bersih	Tampungan air baku yang masih kurang

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	yang masih belum terpenuhi	Jaringan sambungan rumah masih kurang
		Ketersediaan jaringan air minum di kawasan kumuh
	Akses darat Kota Tarakan sebagai kota pulau memiliki keterbatasan Pelayanan angkutan umum kurang maksimal	Tidak memiliki akses darat menuju hinterland
		Belum semua daerah terhubung dengan jalan yang bagus
		Trayek tidak optimal
		Waktu pelayanan BRT yang tidak reguler
		Sarana angkutan umum yang tidak laik jalan
		SDM awak angkutan tidak profesional
		Kesadaran dan kedisiplinan masyarakat dalam tertib berlalu lintas yang kurang

Dari Tabel diatas, maka dapat dilihat pada masalah infrastruktur terdapat masalah pokok yaitu Belum Terpenuhi dan Meratanya Infrastrukur yang Berkualitas yang terdiri 11 akar permasalahan yang mengakibat beberapa masalah yang harus diselesaikan.

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Urusan ini merupakan kebutuhan masyarakat yang utama, karena setiap masyarakat membutuhkan perumahan dan pemukiman. Namun untuk memenuhi kebutuhan ini terdapat berbagai masalah utama sebagai berikut:

a) Belum semua rumah tangga terlayani air minum.

b) Penataan pemukiman belum optimal. Masih terdapat kawasan kumuh yang belum tertata dan tersentuh program penataan lingkungan.

c) Masih terbatasnya kemampuan penyediaan permukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), besarnya biaya rumah layak huni sehingga tidak terjangkau oleh masyarakat.

d) Masih kurangnya Taman Bermain Ramah Anak di Kota Tarakan

Tabel 4.4
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum Optimalnya Pengelolaan Perumahan dan Pemukiman	Masih banyak masyarakat yang belum mempunyai rumah	Masih terbatasnya kemampuan penyediaan permukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
		besarnya biaya rumah layak huni sehingga tidak terjangkau oleh masyarakat
	Masih banyak pemukiman yang kumuh	Penataan pemukiman belum optimal
	Belum semua rumah tangga terlayani air minum	Masih banyak lokasi pemukiman yang tidak terjangkau instalasi air bersih
	Masih kurangnya Taman Bermain Ramah Anak di Kota Tarakan	Kurangnya perhatian terhadap keberadaan taman bermain anak dan taman kota

Dari Tabel diatas, dapat diketahui bahwa masalah pokok dari urusan perumahan rakyat dan pemukiman adalah belum optimalnya pengelolaan perumahan dan pemukiman masyarakat yang diuraikan dengan 5 akar permasalahan dan 4 masalah utama.

5. Urusan Pelayanan Kebencanaan

Belum optimalnya pelayanan kebencanaan merupakan masalah yang dihadapi pada pelayanan kebencanaan. Kebencanaan ini sangat perlu diperhatikan, karena Kota Tarakan merupakan pulau yang tentunya termasuk kategori rawan bencana yang tentunya disebabkan oleh berbagai situasi dan keadaan, baik itu faktor alam maupun faktor non alam.

Masalah optimalisasi pelayanan kebencanaan perlu diperluas hingga menjangkau masalah bencana secara umum. Pencapaian yang sudah diperoleh dalam pelayanan kebencanaan antara lain meliputi bencana kebakaran, tanah longsor. Pemasalahan kebencanaan ini dirumuskan berdasarkan analisis data sekunder, wawancara, *focus group discussion* dan dilengkapi dengan data statistik yang diperoleh dari perangkat daerah yang bersangkutan. Kompetensi sumber daya yang ada masih sebatas pada kejadian bencana, namun belum mengakomodasi kebencanaan secara luas. Permasalahan belum optimalnya penanganan kebencanaan disebabkan oleh :

1) Kurang optimalnya penanganan bencana daerah, yang diakibatkan kurangnya SDM, sarana prasarana, informasi kebencanaan, koordinasi dan kapasitas kelembagaan lintas sektoral.
2) Masih adanya lahan kritis pada tahun 2017 (kejadian tanah longsor 19 kali)
3) Masih rendahnya jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani sesuai waktu tanggap (*response time rate*), jumlah kasus kejadian kebakaran tahun 2017 sebanyak 30 kejadian maka yang dapat tertangani sesuai waktu tanggap hanya 66,67%.

Tabel 4.5
Rumusan Permasalahan Pembangunan
Belum Optimalnya Pelayanan Kebencanaan

MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH
1. Penanggulangan kebencanaan yang kurang efektif	Masih rendahnya jumlah kasus bencana khususnya kebakaran di WMK yang tertangani sesuai waktu tanggap (*respon time rate*)	Masih belum optimalnya manajemen waktu tanggap kebakaran
	Sebagian bencana tiba-tiba terjadi tanpa ada peringatan siaga	Upaya pencegahan potensi bencana belum maksimal
2. Cukup banyak titik potensi rawan longsor	Masih banyaknya kasus tanah longsor	Pemotongan bukit tidak terkontrol
		Tidak terkontrolnya Aktifitas masyarakat di daerah rawan longsor
3. Potensi Banjir	Masih banyaknya titik-titik terjadi pendangkalan sungai dan parit	Sedimentasi (sedimen sampah yang digenangi pasir dan terdapat gulma) yang terdapat disaluran
		Penanganan Hulu Hilir belum optimal
		Penampang/dimensi saluran yang tidak mampu menampung debit air

Dari Tabel diatas, diketahui bahwa masalah pokok kebencanaan di Kota Tarakan adalah penanggulangan bencana yang kurang efektif, banyaknya titik potensi rawan bencana dan masih banyak titik potensi banjir yang disebabkan beberapa akar permasalahan dan permasalahan umum.

6. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

Belum maksimalnya pelayanan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban kota merupakan masalah pokok yang terjadi di Kota Tarakan. Untuk itu perlu kiranya dicarikan solusi efektif, mengingat bencana akan menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi masyarakat, baik material maupun berupa immaterial.

Keamanan dan ketertiban merupakan bagian penting dalam penciptaan kondisi yang baik, agar semua dapat berjalan secara normal, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan lancar dan berhasil. Upaya untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban ini masih menghadapi beberapa permasalahan.

Permasalahan ketentraman dan ketertiban umum di Kota Tarakan antara lain :

1) Kecenderungan meningkatnya kasus kriminilitas, pada Tahun 2017 sebanyak 279 kasus kriminal, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan kejadian tahun 2016 terjadi sebanyak 221 kasus.
2) Belum optimalnya penegakan Perda.
3) Belum memadainya sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban.
4) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi Peraturan, Namun demikian, tingkat penyelesaian pelanggaran K3 telah mencapai 100% selama kurun waktu 2015-2020.
5) Masih banyaknya sengketa lahan antar warga, perselisihan hubungan industrial, Keagamaan dan demonstrasi
6) Kurang optimalnya penanganan bencana daerah, yang diakibatkan kurangnya SDM, sarana prasarana, informasi

kebencanaan, koordinasi dan kapasitas kelembagaan lintas sektoral. Namun demikian, cakupan pelayanan bencana kebakaran selama kurun waktu 2015-2019 mencapai 211%. Dan peningkatan upaya tingkat waktu tanggap pada tahun 2019 mencapai 90,91%, meningkat 27,75% dari tahun 2018.

.

Tabel 4.6
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan Kebencanaan

Masalah	Masalah	Akar Masalah
Pelayanan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat belum maksimal	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan daerah	Masih tingginya jumlah kasus pelanggaran PERDA
		Jumlah linmas masih terbatas
	Belum memadainya Sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban	Masih banyaknya konflik sosial yang belum tertangani dengan baik
		Meningkatnya angka kriminalitas
		Belum memadainya Sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa permasalahan pokok adalah pelaksanaan ketentraman, dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat belum maksimal yang disebabkan 5 akar permasalahan dan menimbulkan permasalahan umum.

7. Urusan Sosial

Urusan ini juga perlu diperhatikan mengingat permasalahan ini merupakan permasalahan turunan dari permasalahan urusan lain. Semakin sedikit permasalahan sosial yang ada, maka sebagai

refleksi dari perhatian pemerintah terhadap masyarakat miskin, karena yang mengalami masalah sosial ini umumnya masyarakat berpenghasilan rendah.

Belum optimalnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) merupakan permasalahan pokok yang dihadapi masyarakat Kota Tarakan. Untuk jelasnya dapat ditampilkan seperti pada Tabel berikut:

Tabel 4.7
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Sosial

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Masih rendahnya kualitas hidup Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Masih banyaknya masyarakat menyandang masalah sosial	Penanganan PPKS belum optimal
		Pemberian bantuan belum mengarah pada upaya pemberdayaan dan kemandirian agar terbebas dari masalah kesejahteraan sosial
	Masih banyak masyarakat miskin belum tertangani dan terentaskan	Kurang akuratnya data kemiskinan di daerah
		Masih rendahnya kualitas SDM bidang Sosial
		Belum optimalnya pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang PPKS di luar panti

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa masalah pokok pada urusan sosial adalah masih rendahnya kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial yang disebabkan 5 akar permasalahan dan menimbulkan beberapa permasalahan.

4.1.1.2. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Urusan Tenaga Kerja

Rendahnya kualitas tenaga kerja merupakan masalah umum dan akan berpengaruh pada hal lain seperti pendapatan masyarakat dan lain-lain. Adapun permasalahan yang teridentifikasi sebagai berikut:

a. Belum optimalnya penempatan pencari kerja yang mendaftar.
b. Masih rendahnya tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi.
c. Masih rendahnya tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan.
d. Masih kurangnya media informasi ketenagakerjaan.
e. Belum optimalnya peran lembaga ketenagakerjaan.
f. Belum optimalnya *link and match* antara dunia pendidikan dan pelatihan dengan dunia usaha.

Tabel 4.8
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Tenaga Kerja

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Kurang optimalnya penyerapan lapangan pekerjaan	Belum Optimalnya penempatan pencari kerja yang mendaftar.	▪ Kualifikasi pencari kerja kurang sesuai dengan kebutuhan lowongan kerja yang tersedia. ▪ Terbatasnya peluang kerja yang tersedia. ▪ Kurangnya koordinasi perusahaan dengan dinas.

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
	Masih rendahnya tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan kewirausahaan	Terbatasnya tenaga instruktur yang kompeten
	Masih kurangnya media informasi ketenagakerjaan.	Pemanfaatan media informasi seperti brosur, leaflet, spanduk, baliho dan internet (website) untuk memublikasikan informasi ketenagakerjaan belum optimal.
	Belum optimalnya peran Lembaga ketenagakerjaan	Masih rendahnya kesadaran perusahaan terhadap arti pentingnya Lembaga ketenagakerjaan di perusahan.
	Belum optimalnya link and match antar dunia pendidikan dan pelatihan dengan dunia usaha.	▪ Penyusunan kurikulum di dunia pendidikan dan pelatihan kurang adaptif terhadap Perkembangan dan kebutuhan dunia kerja. ▪ Terbatasnya sarana penunjang Lembaga pelaihan.

Dari Tabel diatas, dapat diketahui bahwa permasalahan pokok urusan tenaga kerja adalah kurang optimalnya penyerapan lapangan pekerjaan dengan 5 akar permasalahan dan 5 permasalahan ketenagakerjaan.

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan ini sangatlah penting karena isu perempuan dan anak merupakan isu sensitif, baik di dalam negeri maupun dunia

internasional. Masih terdapat beberapa permasalahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Tarakan sebagai berikut:

a. Masih rendahnya partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan.
b. Masih rendahnya proporsi perempuan yang duduk di DPRD Kota Tarakan.
c. Belum optimalnya pencegahan dan penanganan KDRT.
d. Belum optimalnya capaian Indeks Pemberdayaan Gender. Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kota Tarakan dalam kurun waktu 2015 – 2019 bersifat fluktuatif dengan kecenderungan meningkat di angka 90 – 92 persen. Angka ini cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat Provinsi dengan IPG sebesar 86,74 dan Nasional dengan IPG sebesar 90,99.

Tabel 4.9
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Kurang optimalnya penerapan kesetaraan gender	Partisipasi Perempuan di lembaga pemerintahan masih rendah	Daya saing perempuan yang masih rendah
	Proporsi perempuan duduk di DPRD masih rendah	Daya saing politik perempuan masih rendah
	Masih adanya kasus KDRT	Pencegahan dan Penanganan KDRT belum optimal
	Capaian Indeks Pemberdayaan Gender belum optimal	Masih belum optimal perhatian terhadap pemberdayaan perempuan

Dari Tabel diatas dapat diketahui permasalahan pokok pemberdayaan perempuan adalah belum optimalnya penerapaan kesetaraan gender dengan penyebab 4 akar permasalahan yang berdampak pada 4 permasalahan umum.

3. Urusan Pangan

Pangan merupakan faktor dasar yang harus dipertahankan oleh pemerintah Kota Tarakan, karena ketersediaan pangan merupakan refleksi dari kemakmuran masyarakat. Hal ini mendorong umumnya pemerintah mengadakan program ketahanan pangan. Namun di Kota Tarakan terdapat berbagai permasalahan sub sektor pangan sebagai berikut:

a. Ketersediaan pangan pertumbuhannya menurun.
b. Belum optimalnya implementasi keragaman pangan dan gizi.
c. Belum optimalnya pengelolaan distribusi pangan.
d. Luas lahan pertanian yang terbatas dan cenderung semakin berkurang, sangat berbanding terbalik dengan pertumbuhan jumlah penduduk sehingga terjadi alih fungsi lahan pertanian.

Tabel 4.10
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pangan

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Masih belum optimalnya nilai ekonomi sub sektor pangan daerah	Masih rendahnya kontribusi sektor pertanian pada PDRB	Luas lahan pertanian yang terbatas dan cenderung semakin berkurang, alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman; Faktor geografis
	Masih rendahnya hasil palawija	Produktivitas palawija masih rendah

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
	Masih rendahnya hasil perkebunan	Produktivitas perkebunan masih rendah
	Masih rendahnya hasil budidaya perikanan	Kegiatan budidaya ikan masyarakat masih minim
	Masih rendahnya hasil sumberdaya perikanan tangkap	Potensi sumberdaya perikanan tangkap belum termanfaatkan secara optimal

Permasalahan pokok bagi sub sektor pangan adalah masih belum optimalnya nilai ekonomi sub sektor ini yang berdampak pada penghasilan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Sub sektor ini mempunyai 5 akar permasalahan dan terdiri dari 5 permasalahan umum.

4. Urusan Pertanahan

Urusan pertanahan biasa merupakan urusan yang cukup rumit, mengingat apabila sengketa dan konflik pertanahan akan melibatkan banyak pihak dan banyak instansi. Itulah sebabnya setiap terjadi konflik tanah waktu penyelesaiannya cukup panjang. Adapun permasalahan yang muncul di Kota Tarakan adalah sebagai berikut:

a. Masih banyaknya tanah masyarakat yang belum mempunyai bukti kepemilikan yang sah/disertifikatkan dan masih banyaknya bidang tanah yang belum bersertifikat.
b. Masih adanya konflik/sengketa kepemilikan lahan.
c. Pengawasan, pemanfaatan dan penatagunaan tanah/lahan pembangunan milik pemerintah belum optimal.

Tabel 4.11
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pertanahan

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Masih belum optimalnya pengelolaan tanah di Kota Tarakan	Kepemilikan Tanah Masyarakat masih banyak belum punya bukti	Syarat dan Biaya bukti kepemilikan tanah yang ketat
	Masih Banyak Sengketa Kepimilikan Tanah	Kurang optimalnya verifikasi untuk penerbitan sertifikat tanah
	Masih ada pembangunan bangunan yang menyalahi ketentuan	Pengawasan, pemanfaatan dan penatagunaan tanah/lahan pembangunan milik pemerintah belum optimal

Masih belum optimalnya pengelolaan tanah di Kota Tarakan merupakan masalah pokok di Kota Tarakan yang bersumber pada 3 akar permasalahan dan 3 permasalahan umum.

5. Urusan Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan salah satu isu strategis dan sensitif di dunia internasional. Pemerintah Kota Tarakan telah memprogramkan agar lingkungan hidup tetap terjaga dan *sustain* (berkelanjutan). Permasalahan yang masih ada dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Belum tersusunnya Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
b. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan.

c. Kualitas lingkungan hidup rendah, karena masih adanya sungai yang tercemar yaitu sungai karang anyar dan sungai Sebengkok.

d. Masih lemahnya sistem pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL.

e. Masih terbatasnya Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Tabel 4.12
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Lingkungan Hidup

MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH
1. Kualitas air sungai tercemar (Sungai Karanganyar dan Sungai Sebengkok)	Banyak pembuangan limbah cair domestik/indutsri ke sungai	Kurangnya kesadaran masyarakat dan industri menjaga kesehatan lingkungan
		Masih lemahnya sistem pengawasan terhadap AMDAL
2. Kualitas lingkungan hidup rendah	Banyaknya sampah dibeberapa titik perkotaan	Lahan TPA tidak untuk menampung timbunan sampah
		Kurang optimalnya pengangkutan sampah ke TPA
		Ketersediaan fasilitas pengelolaan sampah di kawasan kumuh masih kurang
	Masih banyaknya limbah cair di beberapa titik perkotaan	belum optimalnya pengelolaan S3R (*sortir, reduce, reuse, recycle*) di rumah tangga
		pembuangan limbah cair (domestic maupun industri), limbah B3 yang tidak terkendali
	rumah bersanitasi masih 35%, dan tidak adanya layanan pengolahan	Masih belum optimalnya sistem sanitasi dan layanan pengolahan air limbah

	air limbah (sepitank)	masih terjadi genangan air dibeberapa titik
Kualitas udara berpotensi menurun dengan pertumbuhan pembangunan yang ada	Masih terjadinya polusi udara	Emisi kendaran yang semakin meningkat
		Meningkatnya pembukaan tutupan lahan

Dari Tabel diatas, terdapat 3 masalah pokok lingkungan hidup yaitu kualitas air sungai yang tercemar, kualitas lingkungan hidup rendah, kualitas udara menurun yang disebabkan oleh 11 akar permasalahan dan beberapa permasalahan umum.

6. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan hal yang sangat penting karena menyangkut kondisi internal sebuah daerah, sehingga diperlukan manajemen yang efektif. Beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

a. Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan, hal ini ditandai dengan masih rendahnya penduduk dengan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil (persentase kepemilikan akta kelahiran baru 57,33%, rasio pasangan berakte nikah 60,19%).
b. Belum optimalnya pengelolaan administrasi kependudukan sebagai akibat dinamika penduduk yang dipengaruhi oleh kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk.
c. Masih kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan dan pelayanan kependudukan.

Tabel 4.13
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Kurang optimalnya pelayanan kependudukan	Masih lamanya penyelesaian dokumen kependudukan, seperti KTP dan lain-lain	Pelayanan administrasi kependudukan belum optimal
		Pengelolaan administrasi kependudukan belum optimal
	Masih lambat ter update nya data kependudukan	Sarana dan prasarana pengelolaan dan pelayanan kependudukan belum optimal

Kurang optimalnya pelayanan kependudukan merupakan permasalahan pokok urusan kependudukan dan catatan sipil dengan 3 akar permasalahan dan 2 permasalahan umum.

7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah hal yang harus dilakukan untuk memperkuat dan meningkatkan daya saing daerah. Masih terdapat beberapa masalah yang masih dihadapi antara lain:

a. Masih banyak masyarakat yang belum diberdayakan baik secara kapasitas, ekonomi dan sosial.
b. Kurangnya koordinasi dan sinergi program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.
c. Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan secara langsung.

d. Insentif RT/RW, kader PKK, posyandu, Guru mengaji/Sekolah minggu, Dasa Wisma, dan kader-kader lainnya pembayaranya kurang lancar.

Tabel 4.14
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya peran masyarakat dalam pembangunan	Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan musrenbang kelurahan dan kecamatan	Usulan Masyarakat banyak yang tidak terakomodir dalam musrenbang RKPD
	Masih kurangnya fungsi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan	Kurang optimalnya kelembagaan seperti LPM, Karang taruna dll dalam melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat

Dari Tabel diatas, diketahui bahwa Belum optimalnya Belum optimalnya peran masyarakat dalam pembangunan merupakan masalah pokok urusan pemberdayaan masyarakat dengan bersumber dari 2 akar masalah dan 2 masalah umum.

8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pertumbuhan penduduk perlu dikendalikan dengan menerapkan program keluarga berencana yang efektif. Terdapat beberapa permasalahan dalam pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebagai berikut:

a. Masih tingginya Pasangan Usia subur yang belum menggunakan alat kontrasepsi. Data 2018 untuk penggunaan alat kontrasepsi adalah CPR : 69,22 %, Unmet Need 20,29 %, MKJP : 2,55%.
b. Jumlah kelahiran yang masih tinggi.

Tabel 4.15
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Pengelolaan Keluarga Berencana belum optimal	Pasangan Usia subur menggunakan kontrasepsi masih kurang	Belum efektifnya sosialisasi dan pembinaan
		Belum optimalnya penggunaan database pasangan usia subur
	Jumlah kelahiran masih tinggi	Keterbatasan jangkauan pelayanan program Keluarga Berencana

Pengelolaan Keluarga Berencana belum optimal merupakan permasalah pokok pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana ini dengan bersumber 3 akar masalah dan 2 permasalahan.

9. Urusan Perhubungan

Transportasi darat, sungai dan laut merupakan jenis-jenis perhubungan yang ada di kota Tarakan, dan sudah semestinya dikelola dengan baik, apalagi Tarakan merupakan satu-satunya kota Transit di Kalimantan Utara. Ada beberapa permasalahan urusan perhubungan yang masih ada seperti berikut:

a. Prasarana dan sarana transportasi darat yang kurang maksimal, faktor penyebab masalahnya adalah : (a) Kondisi dan Jumlah fasilitas dan Perlengkapan jalan yang yang masih

kurang memadai. (b) Masih terjadi perusakan fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, guardrill, dan lain-lain), (c) Kurang optimalnya sarana perhubungan, perlu dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan, (d) Sarana Uji/Perlengkapan yang kurang, (e) pelayanan PKB belum optimal, (e) Pelayanan terminal belum optimal.

b. Menurunnya kapasitas jalan, faktor penyebab masalahnya adalah : (a) Banyaknya kepemilikan kendaraan masyarakat, kepatuhan masyarakat, rambu jalan, V/C Ratio : Volume kendaraan per kapasitas Jalan terutama derajat kejenuhan di 25 ruas jalan, (b) Ketersediaan area parkir yang belum memadai.
c. Belum Maksimalnya pelayanan transportasi umum.
d. Masih banyak sarana angkutan umum yang tidak laik jalan.
e. SDM awak angkutan tidak profesional, terutama kelengkapan SIM.
f. Kesadaran dan kedisiplinan masyarakat dalam tertib berlalu lintas yang kurang, terjadi peningkatan jumlah kecelakan lalu lintas sejak tahun 2017 sebesar 44 kali dan tahun 2018 meningkat menjadi 74 kasus.
g. Masih rendahnya wawasan serta pemahaman masyarakat terhadap keselamatan berlalu lintas.

Tabel 4.16
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perhubungan

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya	Masih belum adanya transportasi umum yang disediakan	Prasarana dan sarana transportasi darat kurang maksimal

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
manajemen perhubungan	pemerintah	Belum efisiesinya penganggaran peningkatan dan pengembangan manajemen transportasi
		Pelayanan transportasi umum belum maksimal
	Banyak sarana yang rusak	Tidak terpeliharanya sarana angkutan umum.
	SDM awak angkutan masih ada belum memiliki SIM	Manajemen awak angkutan yang belum efektif
	Masih tingginya tingkat kecelakaan	Kesadaran dan kedisiplinan masyarakat dalam tertib berlalu lintas masih kurang
		Wawasan serta pemahaman masyarakat terhadap keselamatan berlalu lintas masih kurang
Pelayanan angkutan umum kurang maksimal	Semakin berkurangnya minat menggunakan angkutan umum	Trayek tidak optimal
		Sarana angkutan umum yang tidak laik jalan
	Tidak optimalnya penggunaan BRT	Waktu pelayanan BRT yang tidak reguler

Belum optimalnya manajemen perhubungan dan Pelayanan angkutan umum kurang maksimal merupakan masalah pokok urusan ini yang bersumber dari beberapa akar masalah dan permasalahan.

10. Urusan Komunikasi dan Informatika

Sebagai Pemerintah Kota yang mengusung SMART CITY sebagai visinya, maka urusan komunikas dan informatika

menjadikan prioritas atau leading sektor yang mengawal visi tersebut. Pada kenyataannya masih ada beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain:

a. Sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi belum memadai.
b. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi.
c. Belum terintegrasinya sistem informasi instansi pemerintah *(e-government*).
d. Belum optimalnya pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

Tabel 4.17
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pengelolaan komunikasi dan informasi	Masih banyak OPD yang terhubung pada Sistem Informasi yang terpadu	Sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi belum memadai
	Belum terintegrasi dan terupdate data secara periodik	Pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi belum optimal
		Sistem informasi instansi pemerintah *(e-government*). belum terintegrasi
	Masih ada data OPD yang belum bisa di akses oleh masyarakat	Pelaksanaan keterbukaan informasi publik belum optimal

Belum optimalnya pengelolaan komunikasi dan informasi merupakan masalah pokok urusan komunikasi dan informatika yang bersumber dar 4 akar masalah dan 3 permasalahan.

11. Urusan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil

Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil merupakan ketahanan ekonomi masyarakat dan pemerintah Kota Tarakan yang utama, khususnya pada masa Pandemi Covid-19 sekarang ini. Hal ini dikarenakan usaha ini yang paling mampu mempertahankan kelangsungan dan mempunyai daya tahan yang tinggi. Namun terdapat beberapa masalah yang masih dihadapi yang antara lain sebagai berikut:

a. Masih rendahnya manajemen pengelolaan koperasi dan UKM,
b. Masih terdapat koperasi yang tidak aktif. Koperasi yang aktif 60% (2015),48% (2016), 49%(2017), 62% (2018), 54% (2019), Tahun 2020 jumlah koperasi aktif sebesar 60%.
c. Masih rendahnya peluang UMKM untuk meningkatkan skala usaha melalui peningkatan asset dan omzet.
d. Belum optimalnya pengembangan UMKM yang berbasis ekonomi kreatif, Usaha mikro dan kecil.

Tabel 4.18
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Koperasi Usaha Mikro dan Kecil

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pengelolaan Koperasi dan IKM	Koperasi yang aktif terbatas hanya 60 persen	Manajemen pengelolaan koperasi dan UKM masih rendah
	Omzet UMKM yang kecil	Peluang UMKM untuk meningkatkan skala usaha melalui

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
		peningkatan asset dan omzet masih rendah
	Pertumbuhan UMKM lambat	Pengembangan UMKM yang berbasis ekonomi kreatif, Usaha mikro dan kecil belum optimal
Nilai dari aktifitas perdagangan belum optimal	Rendahnya nilai ekspor	Tebatasnya produksi komoditas yang layak ekspor
	Hasil industri kecil yang rendah	Belum adanya kawasan pergudangan yang representatif
	Transaksi perdagangan masih rendah	Aktifitas perdagangan belum terfasilitasi secara optimal

Belum optimalnya pengelolaan Koperasi dan IKM dan Nilai dari aktifitas perdagangan belum optimal merupakan masalah pokok urusan ini yang berumber dari 6 akar masalah dan beberapa permasalahan umum.

12. Urusan Penanaman Modal

Investasi sangat menentukan pembangunan ekonomi daerah, sehingga pengelolaaannya harus lebih professional sehingga mengundang investor untuk datang ke Kota Tarakan. Ada beberapa permasalahan yang masih dihadapi antara lain:

a. Iklim investasi masih kurang kondusif.
b. Belum optimalnya pemetaan potensi dan peluang investasi, hal ini terlihat dari realisasi investasi PMDN tahun 2018 sebesar Rp. 179.309.346.960, masih jauh dari target Rp.300.000.000.000,- per-tahun. Tahun 2019 sebesar Rp. 714.513.744.160 meningkat 297,48% dari tahun 2018.

c. Kurangnya promosi potensi Kota Tarakan kepada calon investor.

Tabel 4.19
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Penanaman Modal

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Pengembangan Investasi Belum Optimal	Kurangnya nilai investasi	Iklim investasi Kurang Kondusif
	Belum adanya database investasi	Pemetaan potensi dan peluang investasi Belum Optimal
	Kurang dikenalnya potensi investasi Kota Tarakan	Promosi potensi Kota Tarakan kepada calon investor Masih Kurang

Dari Tabel diatas diketahui bahwa Pengembangan Investasi Belum Optimal merupakan masalah pokok urusan ini, namun telah diidentifikasi 3 akar permasalahannya dan 3 permasalahan umumnya.

13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi urusan ini antara lain:

a. Belum optimalnya pembinaan atlet olahraga prestasi.
b. Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan.

Tabel 4.20
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Pengembangan Urusan	Minimnya prestasi olahraga	Pembinaan atlet olahraga prestasi

Kepemudaan dan Olah Raga Belum Optimal		belum optimal
	Kurangnya aktivitas kepemudaan dan keolahragaan	Pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan belum optimal

Pengembangan Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Belum Optimal merupakan masalah pokok yang dihadapi urusan ini dengan 2 akar masalah dan 2 masalah yang teridentifikasi.

14. Urusan Statistik

Pengumpulan, Pengolahan dan Penampilan data daerah merupakan fungsi utama urusan ini. Ada beberapa masalah yang dihadapi antara lain:

a. Belum lengkapnya data yang disajikan dalam buku statistik daerah sesuai dengan kebutuhan informasi pembangunan daerah.
b. Belum tepatnya waktu penerbitan buku statistik daerah.
c. Belum tersedianya *database* yang berisi data dan informasi yang valid dan *up to date.*

Tabel 4.21
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Statistik

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Pengelolaan Data Daerah Belum Optimal	Data yang disajikan dalam buku statistik daerah belum lengkap dan belum update	Sistem dan metode pendataan belum optimal
	Penerbitan buku statistik daerah belum tepat waktu	Sistem Perencanaan Belum Optimal

Masalah pokok urusan ini adalah Pengelolaan Data Daerah Belum Optimal sehingga diidentifikasi terdapat 2 akar permasalahan yang menyebabkan 2 permasalahan umum.

15. Urusan Kebudayaan

Ada beberapa masalah yang diidentifikasi sebagai berikut:

a. Masih terbatasnya sarana dan prasarana seni dan budaya.
b. Belum optimalnya pembinaan seni dan budaya tradisional.

Tabel 4.22
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kebudayaan

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Pengembangan seni dan budaya belum optimal	Kurang dikenalnya seni dan budaya lokal	Sarana dan prasarana seni dan budaya masih terbatas
	Kurangnya pameran seni dan budaya	Pembinaan seni dan budaya tradisional belum optimal

Pengembangan seni dan budaya belum optimal merupakan masalah pokok yang dihadapi dan diidentifikasi sebanyak 2 akar permasalahan dan 2 permasalahan.

16. Urusan Perpustakaan

Perpustakaan merupakan sarana dan prasarana pembelajaran bagi seluruh masyarakat. Ada beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain:

a. Minat baca masyarakat masih kurang.
b. Kurangnya kualitas layanan perpustakaan, Jumlah pengunjung perpustakaan tidak sampai 50% dari jumlah penduduk.

c. Terbatasnya jumlah dan jenis koleksi perpustakaan, koleksi buku yang tersedia 44.241 eksemplar.

Tabel 4.23
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perpustakaan

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Sistem Pembinaan dan Sosialisasi Minat Baca belum optimal	Minat baca masyarakat kurang	Pembinaan dan sosialisasi pentingnya membaca belum optimal
	Rendahnya kunjungan pembaca	Kualitas layanan perpustakaan
		Jumlah dan jenis koleksi perpustakaan

Sistem Pembinaan dan Sosialisasi Minat Baca belum optimal merupakan masalah pokok dengan 3 akar permasalahan dan 2 permasalahan yang teridentifikasi.

4.1.1.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Urusan Kelautan dan Perikanan.

Permasalahan di Bidang kelautan dan perikanan adalah : (1) Belum optimalnya produksi perikanan budidaya, jumlah produksi ikan mengalami fluktuasi, (2) Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman belum optimal, (3) Belum optimalnya pembinaan kelompok nelayan, baik itu kelompok nelayan tangkap, kelompok pembudidaya, maupun kelompok pengolah ikan.

Tabel 4.24
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kelautan dan Perikanan

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Sistem Pembinaan dan Sosialisasi Minat Baca belum optimal	Produksi perikanan budidaya masih kurang	Pembinaan kelompok budidaya perikanan masih belum optimal
	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman belum optimal	Pembinaan kelompok nelayan belum optimal
		Sarana dan prasarana tangkap belum optimal

2. Urusan Pariwisata

Permasalahan pembangunan pariwisata di Kota Tarakan adalah kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kota Tarakan masih kecil yaitu sekitar 17,277 M pada Tahun 2020. Permasalahan di Bidang Pariwisata antara lain : (1). Kurangnya dukungan infrastruktur (akses, transportasi, petunjuk mencapai lokasi) yang terintegrasi di lokasi-lokasi wisata. (2). Kurang terintegrasinya promosi yang dilakukan antar provinsi dan kabupaten yang didukung gambaran berbagai fasilitas yang tersedia dan akses menuju lokasi wisata. (3). Promosi destinasi dan event yang masih bersifat sektoral. (4). Pengelola destinasi wisata kurang profesional. (5). Belum optimalnya pengembangan destinasi dan atraksi wisata. (6). Belum optimalnya pemasaran pariwisata. (7.) Belum berkembangnya usaha pendukung pariwisata yang berbasis ekonomi kreatif.

Tabel 4.25
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pariwisata

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Pengembangan Pariwisata Belum Optimal	Kurang menarik destinasi wisata dan cenderung relative mahal	Dukungan infrastruktur (akses, transportasi, petunjuk mencapai lokasi) yang terintegrasi di lokasi-lokasi wisata masih kurang
	Kurangnya kunjungan wisatawan	Terintegrasinya promosi yang dilakukan antar provinsi dan kabupaten yang didukung gambaran berbagai fasilitas yang tersedia dan akses menuju lokasi wisata masih kurang
		Promosi destinasi dan event masih sektoral
		Pengelola destinasi wisata kurang profesional
		Pengembangan destinasi dan atraksi wisata belum optimal
	Destinasi wisata kurang populer	Pemasaran pariwisata belum optimal
	Kurangnya produksi buah tangan ciri khas Tarakan	Usaha pendukung pariwisata yang berbasis ekonomi kreatif belum berkembang
	Kurangnya pendapatan dari sektor pariwisata	Destinasi pariwisata terbatas dan kurang menarik
	Rendahnya kunjungan wisata budaya	Potensi wisata budaya belum dikelola secara maksimal

Pengembangan Pariwisata Belum Optimal merupakan masalah pokok urusan pariwisata dan diidentifikasi sebanyak 9 akar masalah dan sebanyak 6 permasalahan umum.

3. Urusan Pertanian

Permasalahan terkait pertanian di Kota Tarakan, antara lain: (1). Cenderung tidak stabilnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB. Kondisi 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan fluktuasi, Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB menurun dari tahun ke tahun sejak tahun 2013- 2017, (2) Pada umumnya produksi tanaman pangan di Kota Tarakan selama tahun 2015-2019 mengalami penurunan produksi, kecuali buah-buahan dan palawija, (3) Keterbatasan luas lahan pertanian di wilayah perkotaan dan kurangnya sarana dan prasarana serta fasilitasi pemasaran produk pertanian.

Tabel 4.26
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pertanian

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Kurangnya sarana dan prasarana pertanian
		Sistem Pembinaan dan penyuluhan belum optimal
		Luas lahan pertanian di wilayah perkotaan terbatas
	Kurangnya permintaan terhadap produk pertanian Tarakan	Fasilitasi pemasaran produk pertanian masih kurang
	Hasil produk palawija masih rendah	Produktivitas palawija masih rendah

	Hasil perkebunan masih rendah	Produktivitas perkebunan masih rendah
	Hasil ikan budidaya masih rendah	Kegiatan budidaya ikan masyarakat masih minim
	Hasil perikanan tangkap masih rendah	Potensi sumberdaya perikanan tangkap belum termanfaatkan secara optimal

Dari Tabel diatas diketahui bahwa Program Pengembangan Sektor Pertanian Belum Optimal merupakan masalah pokok pertanian dan terdapat 8 akar masalah dan 7 permasalahan.

4. Urusan Perdagangan

Permasalahan perdagangan dikota Tarakan, yaitu: (1) Cenderung menurunnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB. (2) Belum tersedianya Kawasan Pergudangan yang refresentatif (3) Pengelolaan dan pengembangan pasar tradisional dan modern yang belum optimal (4) Belum optimalnya dukungan pemerintah daerah terhadap usaha UMKM dalam menghadapi MEA dan CAFTA. (5) Menurunnya Ekspor Bersih Perdagangan, Nilai Ekspor bersih perdagangan 1.499.242.101,48 (2015); 712.141.810,17 (2016); 1.833.877.539,33 (2017) ; 1.109.206.716,11 (2018); 1.040.031.489,99 (2019). (6) Rendahnya kesadaran para pedagang dalam melakukan tera ulang alat ukur. (7) Belum optimalnya penataan, pembinaan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Tabel 4.27
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perdagangan

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Program Pengembangan Sektor Perdagangan Belum Optimal	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB masih kecil	Sistem perdagangan dan pengelolaannya masih belum optimal
	Harga barang dagangan yang dijual cenderung tinggi	Kawasan Pergudangan yang refresentatif belum tersedia
	Banyak toko masyarakat lokal yang merugi dan tutup	Pengelolaan dan pengembangan pasar tradisional dan modern belum optimal
	Pertumbuhan UMKM yang rendah	Dukungan pemerintah daerah terhadap usaha UMKM dalam menghadapi MEA dan CAFTA belum optimal
	Ekspor Bersih Perdagangan menurun	Belum adanya pelabuhan ekspor
	Banyaknya transaksi perdagangan yang menyalahi ketentuan	Kesadaran para pedagang dalam melakukan tera ulang alat ukur masih rendah
	Rendahnya profitability pedagang	Penataan, pembinaan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima belum optimal
	Rendahnya hasil ekspor	Tebatasnya produksi komoditas yang layak ekspor
	Volume perdagangan masih rendah	Aktifitas perdagangan belum terfasilitasi secara optimal

Dari Tabel diatas diketahui bahwa Program Pengembangan Sektor Perdagangan Belum Optimal merupakan masalah pokok pertanian dan terdapat 9 akar masalah dan 9 permasalahan.

5. Urusan Perindustrian

Permasalahan bidang perindustrian yang terjadi beberapa tahun terakhir di Kota Tarakan, yaitu: (1). Laju pertumbuhan Industri sejak tahun 2015-2019 terus mengalami penurunan, tahun 2015 menjadi 3,65 % dan tahun 2016 dan 2017 masing-masing pertumbuhannya sebesar 1,14 % dan 1,13 %. Pada tahun 2018 megalami peningkatan 1,31%, kembali mengalami penurunan 0,55%. (2) Belum optimalnya, (3) Masih terbatasnya kemampuan permodalan para pelaku Industri Kecil Menengah (IKM). (4) Daya saing produk IKM masih rendah. (5) pembinaan dan faslitasi pengembangan Industri kecil dan Menengah (6) Belum optimalnya pemanfaatan kawasan peruntukan industri.

Tabel 4.28
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perindustrian

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Kontribusi sektor industry pengolahan terhadap PDRB belum optimal	Menurunnya laju pertumbuhan industri.	▪ Perekonomian nasional dan daerah belum stabil/mantap. ▪ Persaingan pasar semakin ketat.
	Belum Optimalnya pembinaan dan fasilitasi pengembangan IKM	▪ Kurang maksimalnya dukungan (APBD) terhadap kegiatan pembinaan dan fasilitasi.
	Masih terbatasnya kemampuan permodalan para pelaku IKM.	Akses permodalan melalui Lembaga pembiayaan/keuangan (bank) terbatas.
	Daya saing produk IKM masih rendah	▪ Akses terhadap factor-faktor produksi permodalan, teknologi. Bahan baku dan

		bahan penolong serta pasar relative masih rendah. ▪ Penerapan prinsip-prinsip manajemen usaha, manajemen produksi, serta manajemen pemasaran pada iKM belum optimal.
	Perkembangan IKM lambat	Pembinaan dan faslitasi pengembangan Industri kecil dan Menengah belum optimal
	Belum optimalnya pemanfaatan kawasan peruntukan industri.	Sebagian besar kawasan peruntukan industri belum dikuasai (bukan asset) pemerintah (pemkot).
Kurangnya SDM yang berkualitas di bidang Industri dalam menyongsong pembangunan Kawasan industry dan Pelabuhan Internasional (KIPI)	Belum optimalnya peningkatan kualitas dan keterampilan SDM di bidang industri	Kurangnya Diklat dan Bimbingan teknis bagi SDM di bidang industri

Dari Tabel diatas diketahui bahwa Program Pengembangan Sektor Perindustrian Belum Optimal merupakan masalah pokok pertanian dan terdapat 6 akar masalah dan 6 permasalahan.

4.1.1.4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

1. Urusan Keuangan

a. Potensi PAD belum terkelola secara maksimal.

b. Masih tingginya rasio Dana Perimbangan dalam struktur APBD.

c. Belum optimalnya penatausahaan barang dan aset daerah.
d. Belum terintegrasinya sistem informasi perencanaan pembangunan, penganggaran, penatausahaan keuangan dan aset.

Tabel 4.29
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Keuangan

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Pengelolaan Keuangan Daerah Belum Optimal	Rendahnya pertumbuhan PAD	Potensi PAD Belum Terkelola dengan baik
	Rasio Dana Perimbangan dalam struktur APBD masih tinggi	Implementasi realisasi keuangan belum optimal
	Masih ada barang dan asset pemerintah tidak tercatat dengan baik	Penatausahaan barang dan aset daerah belum optimal
	Masih terjadi ketidaksinkronan data asset dan keuangan daerah	Sistem informasi perencanaan pembangunan, penganggaran, penatausahaan keuangan dan aset belum terintegrasi
	Prosedur keuangan masih ada yang belum diterapkan	SAP belum diterapkan sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010
	Belum terdokumentasi nilai pasti BMD	Barang Milik Daerah belum dikapitalisasi
	Tingkat kesalahan pengelolaan masih tinggi	Belum efektifnya sistem pengendalian internal
	Masih belum maksimalnya realisasi keuangan pengadaan barang dan jasa	Implementasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik belum maksimal

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
	Masih banyaknya tanah/lahan yang belum sesuai pemanfaatan dan penatagunaannya	Pengawasan, pemanfaatan dan penatagunaan tanah/lahan pembangunan belum optimal

2. Urusan Kepegawaian

a. Kurangnya kualitas dan kompetensi ASN

b. Belum optimalnya disiplin dan kinerja ASN

Tabel 4.30
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kepegawaian

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Pembinaan dan Pengembangan Karier Pegawai Belum Optimal	Rendahnya produktivitas pegawai	Banyaknya jabatan yang tidak sesuai dengan kompetensi pendidikan
	Banyaknya pelanggaran disiplin kerja	PNS kurang memahami aturan kepegawaian
	Masih banyak pegawai bekerja di luar Tupoksinya	PNS kurang memahami Tupoksi
	Masih ada pegawai berkinerja rendah	Kualitas ASN masih kurang
		Kompetensi ASN masih kurang

3. Urusan Administrasi Pemerintahan.

a. Belum optimalnya fungsi koordinasi, integrasi, sinkronisasi kebijakan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

b. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi di Pemerintahan.

c. Belum terpenuhinya pelayanan publik lebih cepat, mudah, murah dan transparan.

d. Belum semua perangkat daerah memiliki SOP.

Tabel 4.31
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Administrasi Pemerintahan

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Pengelolaan Pemerintahan dan Akuntabilitas Belum Optimal	Masih ada kesalahan komunikasi dalam melaksanakan pemerintahan	Koordinasi, integrasi, sinkronisasi kebijakan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan belum optimal
	Pelaksanaan pemerintahan yang belum efektif dan efisien	Pemanfaatan teknologi informasi di Pemerintahan belum optimal
	Masih banyak pelayanan yang waktunya tidak sesuai SOP	Pelayanan publik lebih cepat, mudah, murah dan transparan belum terpenuhi
	Masih ada ketidaksesuaian pelaksanaan pelayanan pemerintahan	Perangkat daerah ada yang tidak memiliki SOP
	Tingkat efektivitas dan efisiensi implementasi perencanaan dan anggaran masih rendah jika dibandingkan dengan capaian kinerjanya	Belum optimalnya pelaksanaan kinerja dan pengelolaan keuangan daerah di SKPD

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
	Pelaporan kinerja belum optimal	Masih rendahnya kualitas pelaksana pelaporan kinerja
	Masih banyak pelaksanaan pelayanan pemerintah yang tidak efektif	Masih banyaknya PD Teknis yang belum memiliki SOP Teknis
	Masih banyak OPD yang tingkat pelayanan publiknya statis	Masih terdapat OPD yang melaksanakan fungsi Pelayanan Publik tidak memiliki hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
	Masih ada database inventarisasi tidak sinkron	Belum terdokumentasinya dengan baik hasil inventarisasi barang / aset OPD

4. Urusan Pengawasan

a. Belum optimalnya fungsi pengawasan dan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

b. Belum optimalnya tindaklanjut temuan BPK dan pengaduan masyarakat.

c. Belum optimalnya hasil Penilaian Mandiri.

d. Belum maksimalnya pelaksanaan roadmap reformasi bikrokrasi.

e. Belum efektifnya sistem pengendalian internal.

Tabel 4.32
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pengawasan

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Implementasi Pengawasan Belum Optimal	Masih banyaknya temuan Inspektorat	Fungsi pengawasan dan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) belum optimal
	Tindaklanjut temuan BPK dan pengaduan masyarakat belum optimal	Manajemen Tindak Lanjut temuan belum optimal
	Hasil Penilaian Mandiri belum optimal	Kualitas Pelaksana Penilaian Mandiri
	Masih lambatnya perkembangan reformasi birkrasi	Pelaksanaan roadmap reformasi bikrokrasi belum maksimal belum efektif
	Masih ada fungsi SPI belum terimplementasi	Sistem pengendalian internal belum optimal

5. Urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

a. Belum optimalnya pelaksanaan Evaluasi Renstra PD, Evaluasi RKPD maupun hasil Renja PD baik secara triwulan maupun evaluasi akhir Tahun.

b. Belum optimalnya sinergitas dan keselarasan perencanaan pembangunan.

c. Belum optimalnya penerapan sistem informasi dalam perencanaan pembangunan daerah (*e-planning*).

d. Belum optimalnya pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta implementasinya dalam pembangunan.

Tabel 4.33
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Pengelolaan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Belum Optimal	Masih banyak program dengan realisasi keuangan dan fisik yang rendah	Pelaksanaan Evaluasi Renstra PD, Evaluasi RKPD maupun hasil Renja PD baik secara triwulan maupun evaluasi akhir Tahun belum optimal
	Masih ada perencanaan pembangunan yang belum terlaksana	Sinergitas dan keselarasan perencanaan pembangunan belum optimal
	Masih ada pelaksanaan pembangunan tidak sesuai dengan perencanaan (diluar RKPD)	Penerapan sistem informasi dalam perencanaan pembangunan daerah (*e-planning*) belum optimal
	Masih ada pelaksanaan pembangunan yang tidak tepat sasaran	Pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta implementasinya dalam pembangunan belum optimal

4.1.2. Aspek Daya Saing dan Indikator Makro

1. Aspek Daya Saing Daerah

1. Masih Rendahnya daya beli masyarakat.
2. Belum optimalnya pengendalian ketaatan terhadap RTRW.
3. Masih terdapat rumah tangga yang belum terlayani air bersih.
4. Masih tingginya tingkat kriminalitas di Kota Tarakan.
5. Belum optimalnya proses pelayanan perijinan.

6. Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi antara pemerintah, investor dan masyarakat
7. Masih rendahnya kualitas tenaga kerja baik dari segi pendidikan maupun keahlian.
8. Masih tingginya angka beban ketergantungan (*dependency ratio*).

Tabel 4.34
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Dari Aspek Daya Saing Daerah

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Pengembangan Daya Saing Daerah Belum Optimal	Volume transaksi ekonomi yang rendah	Masih Rendahnya daya beli masyarakat
	Masih banyak pembangunan pemukiman dan lain-lain tidak mengikuti RTRW	Belum optimalnya pengendalian ketaatan terhadap RTRW
	Masih terdapat rumah tangga yang belum terlayani air bersih	Jangkauan instalasi air bersih yang terbatas
	Masih tingginya tingkat kriminalitas di Kota Tarakan.	Masih rendahnya masyarakat yang sadar hukum
	Masih banyak perizinan yang terbitnya lambat dan tidak sesuai SOP	Belum optimalnya proses pelayanan perijinan
	Rendahnya tingkat investasi	Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi antara pemerintah, investor dan masyarakat
	Masih rendahnya produktivitas dan kinerja tenaga kerja	Masih rendahnya kualitas tenaga kerja baik dari segi pendidikan maupun keahlian

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
	Masih tingginya angka beban ketergantungan (*dependency ratio*)	Kompetensi dan daya saing tenaga kerja yang rendah

2. Aspek Geografi dan Demografi

Permasalahan pembangunan pada aspek geografi dan demografi yaitu:

1. Perubahan tata guna lahan lahan di kawasan daerah aliran sungai (DAS) mengakibatkan berkurangnya fungsi resapan air, erosi, dan juga sedimentasi.
2. Daya tampung dan debit air situ kurang optimal, terutama pada musim kemarau beberapa embung berkurang debit airnya.
3. Cuaca dan suhu udara cenderung meningkat sebagai dampak dari pemanasan global.
4. Arus urbanisasi yang terus meningkat sebagai akibat perkembangan kota.

Tabel 4.35
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Dari Aspek Geografi dan Demografi

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Pengelolaan Geografi Belum Optimal	Berkurangnya fungsi resapan air, erosi, dan juga sedimentasi.	Perubahan tata guna lahan lahan di kawasan daerah aliran sungai (DAS)
	Berkurang debit air.	Daya tampung dan debit air situ kurang optimal, terutama pada musim kemarau beberapa embung

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
	Cuaca dan suhu udara cenderung meningkat	Dampak dari pemanasan global.
	Arus urbanisasi yang terus meningkat	Perkembangan kota tidak terkendali dan tidak mengikuti master plan kota dan RTRW

3. Indikator Makro

Pertumbuhan Ekonomi (PDRB ADHK) Kota Tarakan Tahun 2015–2019, menunjukkan Trend yang fluktuatif. Dan pada tahun 2016 naik dari 4,89 menjadi 5,81, pada Tahun 2017 pertumbuhan ekonomi meningkat lagi menjadi 7,35, pada tahun 2018 menjadi 7,52 persen, tahun 2019 meningkat lagi 7,69 persen dan terakhir pada tahun 2020 menurun drastis menjadi negatif 0,78 persen Hal ini menunjukan belum kuatnya fundamental perekonomian Kota Tarakan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, baru perekonomian Kota Tarakan merosot tajam di tahun 2020 dikarenakan terjadi masalah nasional yaitu pandemi Covid-19 sejak awal tahun 2020.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Pertumbuhan ekonomi idealnya membawa maslahat bagi kesejahteraan masyarakat. Di tataran teori, indikator makro ekonomi ini menggambarkan kemajuan kegiatan ekonomi masyarakat seperti konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah hingga surplus ekspor atas impor. Akan tetapi secara faktual, pertumbuhan harus diuji pula apakah besarannya dalam suatu periode itu menyejahterakan atau malah sebaliknya.

Sebab tidak jarang pertumbuhan yang tinggi justru hanya dinikmati oleh sekelompok masyarakat saja (golongan kaya), namun masyarakat golongan bawah justru terkepung oleh ekonomi biaya tinggi dan makin tenggelam dalam kemiskinan struktural, kondisi inilah yang sering diironikan sebagai kondisi "yang kaya semakin kaya, sedangkan yang miskin bertambah miskin". Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, idealnya akan mampu menciptakan lapangan kerja, sehingga jumlah angka pengangguran dapat dikurangi.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga diharapkan akan memberi efek menetes atau "*tricle down effect*" secara baik, sehingga terjadi pembagian kue pembangunan yang lebih adil dan merat, meskipun dalam kenyataan tidak selalu berbanding lurus. Perputaran modal yang tidak tepat, justru hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi semu yang tidak mensejahterakan rakyat (*bubble economy).*

Faktor penyebabnya tentu beragam, tetapi biasanya ini disebabkan oleh lebih bertumpunya pertumbuhan ekonomi pada sektor konsumsi, artinya pengeluaran masyarakat dan pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta lebih banyak digunakan guna keperluan belanja barang konsumsi yang terpakai namun tidak untuk tujuan produktif berjangka

panjang, misalnya meningkatnya jumlah kredit kendaraan dan rumah.

Sebaliknya kredit usaha kurang terserap dengan optimal dan kurang berhasil guna. Sebelum reformasi, Ekonom Paul R. Krugman pernah mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih ditopang oleh konsumsi dan ini berlangsung sampai sekarang. Pertumbuhan tinggi juga tidak ideal jika diikuti oleh laju inflasi yang melambung, karena kontrol yang lemah terhadap distribusi barang dan ekonomi berbiaya tinggi di sektor riil. Demikian juga dengan investasi yang hanya melulu mengandalkan sektor-sektor padat modal, maka akan kurang efektif karena kurang signifikan dalam menyerap tenaga kerja.

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas juga ditandai oleh semakin mudahnya akses masyarakat terhadap sektor pangan (sembako murah dan cukup pasokan), perumahan yang terjangkau, sandang, kesehatan serta pendidikan yang terjamin, juga pada kualitas pelayanannya yang efisien dan berdaya saing. Pemangkasan waktu pengurusan investasi hingga pengurangan apa yang disebut sebagai "*dwelling time*" (waktu tunggu pengurusan) di pelabuhan niscaya akan mengurangi biaya-biaya logistik.

Ekonomi berbiaya tinggi (*high cost economy*) yang timbul akibat berbagai pungutan liar dan korupsi juga menghambat pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Karena itulah diperlukan kepemimpinan yang tegas dan konsisten memegang komitmen memberantas korupsi dengan segala jenisnya hingga ke akar-akarnya. Upaya meningkatkan sumber dana dari swasta dapat ditempuh dari perbaikan iklim investasi. Reformasi birokrasi ditujukan untuk mengeliminir semua

pengeluaran yang tidak efisien serta lebih meningkatkan lagi koordinasi diantara instansi terkait.

Ruang fiskal yang tersedia harus efektif penggunaannya pada semua sektor penting perekonomian, terutama ke sektor-sektor produktif. Sementara konsumsi masyarakat memang perlu dijaga, namun stimulusnya jangan sampai membuat konsumerisme meningkat. Tapi justru mengarahkan masyarakat pada konsumsi yang bernilai tambah.

Masyarakat bisa lebih diberdayakan untuk mengembangkan sektor ekonomi kreatif, terutama di wilayah-wilayah kelurahan hingga pada para keluarga nelayan di pesisir pantai yang banyak tersebar di kota Tarakan, untuk itu perlu dicanangkan pola penyaluran kredit yang lebih merakyat dan menjangkau golongan pengusaha kecil yang memiliki kapasitas produktif.

Tak kalah penting adalah faktor keamanan dan dukungan masyarakat, artinya stabilitas politik penting dikedepankan. Karena itu semua pihak harus berupaya secara bersama mendukung penuh kebijakan yang *pro-job* (menyerap lebih banyak tenaga kerja), *pro-poor* (mengentaskan kemiskinan) dan *pro growth and equality* (pertumbuhan yang merata dan mensejahterakan). Yang penting pemerintah juga harus memiliki kemauan politik serta berkomitmen menurunkan angka kemiskinan dan kesenjangan ekonomi sebagai prioritas kebijakan yang utama, itulah sejatinya substansi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Jika ditinjau dari fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dapat dijelaskan sebagai berikut :

a). Masih belum optimalnya kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB ADHK. Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan

yang merupakan sektor unggulan terhadap PDRB mengalami fluktuasi dengan kecenderungan mengalami penurunan. pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 13,031% dan menurun lagi di tahun 2016 menjadi 12,61%, dan menurun lagi ditahun 2017 dengan kontribusi sebesar 12,38%. Meningkat 12,47% pada tahun 2018, namun kembali mengalami penurunan menjadi 12,25% di tahun 2019.

b). Masih belum optimalnya kontribusi sektor industri pengolahan. Kontribusi sektor industri pengolahan yang merupakan sektor unggulan terhadap PDRB mengalami fluktuasi dengan kecenderungan mengalami penurunan. Pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 13,16% dan meningkat di tahun 2016 menjadi 13,24%, namun menurun lagi ditahun 2017 dengan kontribusi sebesar 13,00%. Sampai dengan tahun 2019 kontribusi sektor industri pengolahan masih tercatat positip, namun pada tahun 2020 sektor ini merupakan memberikan kontribusi negatif sebesar -3,76 persen tertinggi keempat setelah sektor penyediaan akomodasi dan bahan makan dan minum sebesar -10,34 persen, sektor transportasi dan pergudangan sebesar -5,92 persen, sektor pertambangan dan galian. -5,69 persen.

c). Belum terkendalinya inflasi daerah. Inflasi di Kota Tarakan mengalami fluktuasi yang tajam. Pada tahun 2015 inflasi mengalami perlambatan menjadi 3,42, dan pada tahun 2016 inflasi meningkat menjadi 4,31. Pada tahun 2017 tingkat inflasi mengalami perlambatan yaitu 2,77, namun pada tahun 2018 inflasi meningkat lagi menjadi 5,00, pada tahun 2019 menurun drastis menjadi 1,47 persen dan

pada tahun 2020 cukup terkendali mengalami penurunan menjadi 1,15 persen atau terjadi penurunan sebesar negatif 0,32 persen.

d). Masih relatif tingginya tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan kota Tarakan pada tahun 2015 dapat ditekan menjadi 5,11%. Namun pada tahun 2016 terjadi peningkatan kemiskinan di Kota Tarakan menjadi 5,17%, dan meningkat lagi di tahun 2016 sebesar 6,32%. Selanjutnya pada tahun 2018 tingkat kemiskinan Kota Tarakan sebesar 6,15%, pada tahun 2019 menurun menjadi 6,00 persen, baru pada tahun 2020 kembali meningkat menjadi 6,24 persen.

e). Masih relatif tingginya tingkat pengangguran tahun 2020 yang disebabkan oleh Covid-19.

Pada tahun 2019 Tingkat Pengangguran Terbuka ini menurun menjadi 4,78 persen, namun pada tahun 2020 terjadi peningkatan lagi menjadi 5,86 persen yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19

Meningkatnya angka pengangguran yang terjadi tahun 2020 lebih disebabkan pandem Covid-19. Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Utara, mencatat 71.445 tenaga kerja terkena dampak ekonomi saat pandemi covid-19. Dalam keterangan resminya, BPS Kaltara menyebut jika tenaga kerja yang terkena dampak pandemi berasal dari berbagai kriteria.

Pertama, sebanyak 3.160 orang usia kerja menjadi pengangguran karena dunia usaha terpaksa melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Ke dua, 1.141 orang bergeser dari kelompok angkatan kerja menjadi kelompok bukan angkatan kerja. Sederhananya, mereka tidak lagi

memiliki kegiatan apapun. Baik itu bekerja atau berusaha mencari pekerjaan. Sehingga tidak lagi aktif secara ekonomi.

Ke tiga, 4.267 orang dalam kondisi sementara tidak bekerja. Ini disebabkan beberapa lapangan usaha yang terpaksa merumahkan sementara pekerjanya sampai kondisi kembali pulih. Ke empat, 62.887 orang terpaksa mengalami pengurangan jam kerja. Ini bisa disebabkan sebagian besar lapangan usaha tidak beroperasi penuh. Sehingga berdampak pada jumlah jam kerja mereka.

Dari angka tersebut, diketahui jika kelompok usia yang paling banyak merasakan imbas pandemi adalah 25 sampai 59 tahun. Jumlahnya mencapai 57.489 orang. Sementara itu, 10.380 orang di antaranya berasal dari kelompok usia lebih muda. Yakni 15 sampai 24 tahun. Terakhir, dari kelompok lanjut usia (lansia) dengan umur 60 tahun ke atas. Totalnya ada 3.586 orang dari kelompok ini yang terdampak pandemi covid-19.

Untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 dan tahun-tahun selanjutnya adalah dengan cara membuka kesempatan kerja sebanyak mungkin dengan meluncurkan berbagai kebijakan yang mendorong terbukanya lapangan kerja antara lain memudahkan izin berusaha bagi pengusaha lokal (UMKM), melakukan pelatihan kewirausahaan (wirausaha muda dan pemula), melakukan inkubator wirausaha, meningkatkan sarana dan prasarana investasi, melakukan pelatihan ketrampilan era Covid-19, melakukan monitoring dan evaluasi kondusifitas usaha, memberikan stimulus usaha bergerak

bidang pangan, pertanian dan perikanan dalam skala UMKM dan lain-lain.

Tabel 4.36
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Dari Indikator Makro

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Pengendalian indikator makro yang belum optimal	Pertumbuhan ekonomi terkontraksi negatif	Masih belum optimalnya kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB ADHK. Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan akibat Covid-19
		Masih belum optimalnya kontribusi sektor industri pengolahan. Kontribusi sektor industri pengolahan yang merupakan sektor unggulan terhadap PDRB akibat Covid-19
	Tingkat inflasi yang sangat rendah	Rendahnya Daya Beli masyarakat diakibatkan oleh Covid-19
	Masih relatif tingginya tingkat kemiskinan	Bertambahnya batas garis kemiskinan setiap tahun pendapatan masyarakat yang menurun akibat Covid-19
	Masih relatif tingginya tingkat pengangguran tahun 2020	Berkurangnya lapangan pekerjaan diakibatkan Covid-19

Berdasarkan hasil data permasalahan pembangunan yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat dipilah antara masalah pokok, masalah dan akar masalah pembangunan. Perumusan masalah ini dipilah menjadi 3 (tiga) kelompok ini dimaksudkan

agar mampu memilah masalah, mulai dari masalah yang paling utama sampai dengan akar masalahnya.

Prioritas pembangunan yang baik akan menciptakan agenda utama pembangunan dan memberikan harapan baru bagi pemerintah dalam 5 (lima) tahun periode RPJMD. Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan untuk masing-masing aspek dan urusan pemerintahan serta kesepakatan dari para pemangku kepentingan, maka diketahui terdapat tujuh permasalahan utama pembangunan Kota Tarakan yaitu: rendahnya daya saing SDM Kota Tarakan, belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, belum terpenuhi dan meratanya infrastrukur yang berkualitas, belum terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing dan berkualitas, menurunnya kualitas lingkungan hidup, belum optimalnya pelayanan kebencanaan, dan belum maksimalnya pelayanan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban kota.

2. Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

Sekurang-kurangnya, terdapat empat elemen penting penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi: *accountability, transparancy, predictability,* dan *participation.* Tanpa empat elemen tersebut, sulit sekali untuk menjamin bahwa pembangunan daerah diselenggarakan dengan efektif dan efisien. Mencermati kinerja "tata kelola pemerintahan yang baik" di lingkungan Pemerintahan Kota Tarakan yang belum terwujud, Belum terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, kompeten, bersih, dan bebas KKN; pelayanan publik yang belum berkualitas; serta akuntabilitas kinerja yang belum memuaskan yang masing-masing permasalahan ditunjukkan oleh rendahnya indeks kepuasan masyarakat, rendahnya indeks

persepsi korupsi, dan predikat akuntabilitas kinerja yang masih perlu ditingkatkan. Pada tahun 2020 hasil survei menyebutkan bahwa indeks kepuasan masyarakat nilainya sudah baik sebesar 84,96 point. Angka ini perlu ditingkatkan karena mengindikasikan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang ada di Kota Tarakan, mengingat masih ada beberapa perangkat daerah yang fokus mendapatkan perhatian untuk ditingkatkan pelayanannya seperti Dinas Perizinan dan Penananaman Modal, Disdukcapil. Indeks persepsi korupsi Kota Tarakan pada tahun 2013 masih diangka 1 Sementara pemerintah provinsi telah mencanangkan zona integritas kawasan bebas korupsi (ZI WBK) sebagaimana arahan dari Presiden RI. Adapun untuk predikat akuntabilitas keuangan selama 5 tahun sejak tahun 2015 telah mengalami perubahan atau kenaikan peringkat pada level WTP. Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dapat dilihat pada tabel berikut.

4.1.3 Hasil Kajian Permasalahan Pembangunan Berkelanjutan

1. Faktor-Faktor Penentu Permasalahan

Dari permasalahan yang telah dipetakan pada bagian terdahulu, maka dapat dikaji faktor-faktor penentu masing-masing masalah sebagai berikut:

Tabel 4.37
Pemetaan Permasalahan dan Kajian Faktor Penentu Permasalahan

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
1	**Urusan Pendidikan**			
	Angka Harapan Lama Sekolah	Sesuai (=)	Belum Optimal	Kondisi Ekoomi Masyarakat

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
	Rata-rata Lama Sekolah	Sesuai (=)	Belum Optimal	Kondisi Ekonomi Masyarakat
	Angka partisipasi kasar (APK) siswa SD dan SMP	Belum Tercapai (<)	Mengalami Penurunan	Kondisi Ekonomi Masyarakat
	Angka Partisipasi Pendidikan Usia Dini	Belum Tercapai (<)	Mengalami Penurunan	Belum Merupakan Syarat Wajib
	Angka Partisipasi Pendidikan Usia Sekolah SD	Belum Tercapai (<)	Mengalami Penurunan	Kondisi Ekonomi Masyarakat
	Angka Putus Sekolah	Belum Tercapai (<)	Masih Tinggi	Kondisi Ekonoi Masyarakat
2	**Urusan Kesehatan**			
	Rasio Pos Yandu	Belum Tercapai (<)	Semakin Menurun	terbatasan Anggaran
	Rasio sarana kesehatan persatuan penduduk	Belum Tercapai (<)	Semakin Menurun	terbatasan Anggaran
	Rasio dokter persatuan penduduk	Belum Tercapai (<)	Menurun	Pertambahan Penduduk Tinggi dan Dokter Pertumbuhannya Lambant
	Cakupan komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan	Belum Tercapai (<)	Masih Rendah	Kurangnya tenaga bidan
	Target Universal Child Immunization (UCI).	Belum Tercapai (<)	Belum Tercapai	Keterbatasan Anggaran
	Penanganan penderita penyakit TBC BTA	Belum Tercapai (<)	Masih Rendah	Database Penderita TBC Kurang Lengkap
3	**Urusan Pekerjaan Umum**			
	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Belum Tercapai (<)	Cenderung Menurun	Terbatasnya Anggaran Pembangunan Jalan, sementara Kendaraan terus bertambah
	Penyediaan fasilitas pengurangan sampah kota	Belum Tercapai (<)	Masih Rendah	Keterbatasan Dana dan Inovasi
	Penyediaan air bersih	Belum Tercapai (<)	Masih Kurang	Berupa Pulau dan Kurangnya Air dan Penampungan Air
	Pengendalian Tata Ruang	Belum Tercapai (<)	Masih Kurang	Status dan Fungsi Lahan
4	**Urusan Perumahan Rakyat dan Pemukiman**			
	Rumah tangga terlayani air minum	Belum Tercapai (<)	Belum Semua	Persediaan Air Bersih Terbatas
	Penataan pemukiman	Belum Tercapai (<)	Belum Optimal	Perubahan RTRW Yang

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
				Kurang Cepat
	Penyediaan permukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Belum Tercapai (<)	Masih terbatasnya kemampuan	Rendahnya Penghasilan Masyarakat
	Taman Bermain Ramah Anak di Kota Tarakan	Belum Tercapai (<)	Masih kurang	Status dan Fungsi Lahan
5	**Urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**			
	Penanganan Bencana Daerah	Belum Tercapai (<)	Belum Optimal	Masih Kurangnya Personil dan Anggaran
	Kesadaran Masyarakat Mematuhi Peraturan	Belum Tercapai (<)	Masih Kurang	Kurangnya program pembinaan
	Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban	Belum Tercapai (<)	Masih Terbatas	Terbatasnya Anggaran
6	**Urusan Sosial**			
	Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Belum Tercapai (<)	Belum Optimal	Terbatasnya Anggaran
7	**Urusan Tenaga Kerja**			
	Penempatan Pencari Kerja Yang Mendaftar	Belum Tercapai (<)	Belum Optimal	Kurangnya kerjasama dengan berbagai perusahaan
	Pelatihan Berbasis Kompetensi	Belum Tercapai (<)	Masih Rendah	Terbatasnya Anggaran
	Pelatihan Kewirausahaan	Belum Tercapai (<)	Masih Rendah	Terbatasnya peminat dan anggaran
	Media Informasi Ketenagakerjaan	Belum Tercapai (<)	Masih Kurang	Sumberdaya Manusia Kurang Kreatif
	Peran Lembaga Ketenagakerjaan	Belum Tercapai (<)	Belum Optimal	Keterbatasan Jaringan
	Link and Match Lembaga Pendidikan dan Industri	Belum Tercapai (<)	Belum Optimal	Keterbatasan Jaringan
8	**Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**			
	Partisipasi Perempuan di lembaga pemerintahan	Belum Tercapai (<)	Masih Rendah	Persaingan Yang Sangat Ketat
	Proporsi perempuan duduk di DPRD	Belum Tercapai (<)	Masih Rendah	Persaingan Yang Sangat Ketat
	Pencegahan dan Penanganan KDRT	Belum Tercapai (<)	Belum Optimal	Keengganan Korban Untuk Melapor
	Capaian Indeks Pemberdayaan Gender	Belum Tercapai (<)	Belum Optimal	Permasalahan Budaya dan Religi

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
9	**Urusan Pangan**			
	Ketersediaan Pangan	Belum Tercapai (<)	Menurun	Petani yang berpindah mata pencahariannya
	Implementasi Keragaman Pangan dan Gizi	Belum Tercapai (<)	Belum Optimal	Terbatasnya persediaan keragaman pangan
	Pengelolaan Distribusi Pangan	Belum Tercapai (<)	Belum Optimal	Keterbatasan Anggaran
	Luas Lahan Pertanian	Belum Tercapai (<)	Terbatas	Merupakan Daerah Pulau
10	**Urusan Pertanahan**			
	Kepemilikan Tanah Masyarakat	Belum Tercapai (<)	Masih banyak belum punya bukti	Mahalnya biaya sertifikat dan memakan waktu yang lama
	Sengketa Kepimilikan Tanah	Belum Tercapai (<)	Masih Banyak	Kurang telitinya pengeluaran sertifikat
	Pengawasan, pemanfaatan dan penatagunaan tanah/lahan pembangunan milik pemerintah	Belum Tercapai (<)	Belum Optimal	Keterbatasan anggaran
11	**Urusan Lingkungan Hidup**			
	Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Belum Tercapai (<)	Belum Tersusun	Terbatasnya Anggaran
	Tingkat kesadaran masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan.	Belum Tercapai (<)	Masih Rendah	Kurangnya Pembinaan
	Kualitas lingkungan hidup	Belum Tercapai (<)	Masih Rendah	Kurangnya Pembinaan
	Sistem pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	Belum Tercapai (<)	Masih Lemah	Kurangnya Tenaga Pengawasan
	Tempat Pembuangan Akhir (TPA).	Belum Tercapai (<)	Masih Terbatas	Terbatasanya Anggaran
12	**Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil**			
	Pelayanan administrasi kependudukan	Belum Tercapai (<)	Belum Optimal	Sumberdaya Manusia
	Pengelolaan administrasi kependudukan	Belum Tercapai (<)	Belum Optimal	Sumberdaya Manusia
	Sarana dan prasarana pengelolaan dan pelayanan kependudukan	Belum Tercapai (<)	Belum Optimal	Keterbatasan Anggaran
13	**Urusan Pemberdayaan Masyarakat**			
	Pemberdayaan Masyarakat	Belum Tercapai (<)	Banyak Belum Diberdayakan	Terbatasnya Anggaran

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
	Sinergitas Program Pemberdayaan Masyarakat	Belum Tercapai (<)	Kurang Kordinasi	Sumberdaya Manusia
	Fungsi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan secara langsung	Belum Tercapai (<)	Belum Optimal	Sumberdaya Manusia
	Insentif Lembaga Kemasyarakatan	Belum Tercapai (<)	Pembayarannya Kurang Lancar	Sistem Perencanaan Penganggaran
14	**Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**			
	Pasangan Usia subur Menggunakan Kontrasepsi	Belum Tercapai (<)	Masih Kurang	Sosialisasi dan Pembinaan
	Jumlah kelahiran	Belum Tercapai (<)	Masih Tinggi	Sosialisasi dan Pembinaan
15	**Urusan Perhubungan**			
	Prasarana dan sarana transportasi darat	Belum Tercapai (<)	Kurang Maksimal	Manajemen
	Kapasitas jalan	Belum Tercapai (<)	Menurun	Terbatasnya Anggaran
	Pelayanan transportasi umum	Belum Tercapai (<)	Belum Maksimal	Terbatasnya Personil
	Sarana angkutan umum	Belum Tercapai (<)	Masih Banyak Belum Layak Jalan	Terbatasnya Anggaran
	SDM awak angkutan	Belum Tercapai (<)	Masih ada belum memiliki SIM	Penentuan Syarat Awak Angkutan
	Kesadaran dan kedisiplinan masyarakat dalam tertib berlalu lintas	Belum Tercapai (<)	Masih Kurang	Sosialisasi dan Pembinaan
	Wawasan serta pemahaman masyarakat terhadap keselamatan berlalu lintas	Belum Tercapai (<)	Masih Kurang	Sosialisasi dan Pembinaan
16	**Urusan Komunikasi dan Informatika**			
	Sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi	Belum Tercapai (<)	Belum Memadai	Terbatasnya Anggaran
	Pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi	Belum Tercapai (<)	Belum Optimal	Sumberdaya Manusia
	Sistem informasi instansi pemerintah (e-government).	Belum Tercapai (<)	Belum Terintegrasi	Terbatasnya Anggaran dan Prioritas Anggaran
	Pelaksanaan keterbukaan informasi publik	Belum Tercapai (<)	Belum Optimal	Belum ada dukungan sisitem informasi
17	**Urusan Koperasi dan Usaha Mikro**			
	Manajemen pengelolaan koperasi dan UKM	Belum Tercapai (<)	Masih Rendah	Sumberdaya Manusia

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
	Koperasi yang aktif	Belum Tercapai (<)	60 persen	Prospek Usaha Koperasi
	Peluang UMKM untuk meningkatkan skala usaha melalui peningkatan asset dan omzet	Belum Tercapai (<)	Masih Rendah	Pembinaan dan Bantuan Pemerintah
	Pengembangan UMKM yang berbasis ekonomi kreatif, Usaha mikro dan kecil	Belum Tercapai (<)	Belum Optimal	Sumberdaya Manusia
18	**Urusan Penanaman Modal**			
	Iklim investasi	Belum Tercapai (<)	Kurang Kondusif	Belum Menjadi Prioritas Pembangunan
	Pemetaan potensi dan peluang investasi	Belum Tercapai (<)	Belum Optimal	Belum Menjadi Prioritas Anggaran
	Promosi potensi Kota Tarakan kepada calon investor	Belum Tercapai (<)	Masih Kurang	Prioritas Anggaran dan Networking
19	**Urusan Kepemudaan dan Olah Raga**			
	Pembinaan atlet olahraga prestasi	Belum Tercapai (<)	Belum Optimal	Terbatasnya Anggaran
	Pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan	Belum Tercapai (<)	Belum Optimal	Terbatasnya Anggaran
20	**Urusan Statistik**			
	Data yang disajikan dalam buku statistik daerah	Belum Tercapai (<)	Belum Lengkap	Perencanaan Kebutuhan Data
	Penerbitan buku statistik daerah	Belum Tercapai (<)	Belum Tepat Waktu	Sumberdaya Manusia
	Database yang berisi data dan informasi yang valid dan up to date	Belum Tercapai (<)	Belum Tersedia	Keterbatasan Anggaran
21	**Urusan Kebudayaan**			
	Sarana dan prasarana seni dan budaya	Belum Tercapai (<)	Masih Terbatas	Terbatasnya Anggaran
	Pembinaan seni dan budaya tradisional	Belum Tercapai (<)	Belum Optimal	Sistem Pembinaan
22	**Urusan Perpustakaan**			
	Minat baca masyarakat	Belum Tercapai (<)	Masih Kurang	Sosialisasi dan Pembinaan
	Kualitas layanan perpustakaan	Belum Tercapai (<)	Masih Kurang	Sumberdaya Manusia
	Jumlah dan jenis koleksi perpustakaan	Belum Tercapai (<)	Masih Kurang	Terbatasnya Anggaran
23	**Urusan Kelautan dan Perikanan**			
	Produksi perikanan budidaya	Belum Tercapai (<)	Masih Kurang	Pembinaan dan Pendanaan

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	Belum Tercapai (<)	Belum Optimal	Peralatan Tangkap Nelayan
	Pembinaan kelompok nelayan	Belum Tercapai (<)	Belum Optimal	Kualitas Tenaga Penyuluh
24	**Urusan Pariwisata**			
	Dukungan infrastruktur (akses, transportasi, petunjuk mencapai lokasi) yang terintegrasi di lokasi-lokasi wisata	Belum Tercapai (<)	Masih Kurang	Terbatas Anggaran dan Prioritas Anggaran
	Terintegrasinya promosi yang dilakukan antar provinsi dan kabupaten yang didukung gambaran berbagai fasilitas yang tersedia dan akses menuju lokasi wisata	Belum Tercapai (<)	Masih Kurang	Terbatas program pariwisata
	Promosi destinasi dan event	Belum Tercapai (<)	Masih sektoral	Sistem Pembinaan Pariwisata
	Pengelola destinasi wisata	Belum Tercapai (<)	Kurang Profesional	Sistem Pembinaan Pariwisata
	Pengembangan destinasi dan atraksi wisata	Belum Tercapai (<)	Belum Optimal	Terkendala Prioritas Anggaran
	Pemasaran pariwisata	Belum Tercapai (<)	Belum Optimal	Sistem Pembinaan Pariwisata
	Usaha pendukung pariwisata yang berbasis ekonomi kreatif	Belum Tercapai (<)	Belum Berkembang	Sistem Pembinaan Ekonomi Kreatif
25	**Urusan Pertanian**			
	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Belum Tercapai (<)	Cenderung Tidak Stabei	Banyak Petani Merubah Usaha Pokoknya
	Produksi tanaman pangan	Belum Tercapai (<)	Menurun	Banyak Petani Merubah Usaha Pokoknya
	Luas lahan pertanian di wilayah perkotaan	Belum Tercapai (<)	Terbatas	Berkembangnya Daerah Pemukiman Penduduk
	Sarana dan prasarana serta fasilitasi pemasaran produk pertania	Belum Tercapai (<)	Masih Kurang	Terbatasnya Anggaran
26	**Urusan Perdagangan**			
	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Belum Tercapai (<)	Cenderung Menurun	Menguatnya sektor lain khususnya Jasa Kontruksi
	Kawasan Pergudangan yang refresentatif	Belum Tercapai (<)	Belum Tersedia	Prioritas Anggaran

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
	Pengelolaan dan pengembangan pasar tradisional dan modern	Belum Tercapai (<)	Belum Optimal	Sumberdaya Manusia
	Dukungan pemerintah daerah terhadap usaha UMKM dalam menghadapi MEA dan CAFTA	Belum Tercapai (<)	Belum Optimal	Sumberdaya Manusia
	Ekspor Bersih Perdagangan	Belum Tercapai (<)	Menurun	Perubahan Target Perdagangan
	Kesadaran para pedagang dalam melakukan tera ulang alat ukur	Belum Tercapai (<)	Masih Rendah	Sistem Pembinaan
	Penataan, pembinaan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	Belum Tercapai (<)	Belum Optimal	Sumberdaya Manusia
27	**Urusan Industri**			
	Pembinaan dan faslitasi pengembangan Industri kecil dan Menengah	Belum Tercapai (<)	Belum Optimal	Sistem Pembinaan
	Kemampuan permodalan para pelaku Industri Kecil Menengah (IKM).	Belum Tercapai (<)	Masih Terbatas	Sistem Pembinaan
	Daya saing produk IKM	Belum Tercapai (<)	Masih Rendah	Sistem Pembinaan
	Pembinaan dan faslitasi pengembangan Industri kecil dan Menengah	Belum Tercapai (<)	Belum Optimal	Sistem Pembinaan
	Pemanfaatan kawasan peruntukan industri	Belum Tercapai (<)	Belum Optimal	Kurangnya Jenis Industri
28	**Urusan Keuangan**			
	Potensi PAD	Belum Tercapai (<)	Belum Terkelola Dengan Baik	Sumberdaya Manusia
	Rasio Dana Perimbangan dalam struktur APBD	Belum Tercapai (<)	Masih Tinggi	Sumberdaya Manusia Pengelola Keuangan
	Penatausahaan barang dan aset daerah	Belum Tercapai (<)	Belum Optimal	Sumberdaya Manusia Pengelola Aset Daerah
	Sistem informasi perencanaan pembangunan, penganggaran, penatausahaan keuangan dan aset	Belum Tercapai (<)	Belum Terintegrasi	Sumberdaya Manusia
29	**Urusan Kepegawaian**			
	Kualitas ASN	Belum Tercapai (<)	Masih Kurang	Terbatasnya Anggaran Diklat
	Kompetensi ASN	Belum Tercapai (<)	Masih Kurang	Terbatasnya Anggaran Diklat
	Disiplin	Belum Tercapai (<)	Masih Kurang	Sistem Pembinaan
	Kinerja ASN	Belum Tercapai (<)	Belum Optimal	Terbatasnya Anggaran Diklat

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
30	**Urusan Administrasi Pemerintahan**			
	Koordinasi, integrasi, sinkronisasi kebijakan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	Belum Tercapai (<)	Belum Optimal	Sistem Pembinaan Kepegawaian
	Pemanfaatan teknologi informasi di Pemerintahan	Belum Tercapai (<)	Belum Optimal	Sumberdaya Manusia
	Pelayanan publik lebih cepat, mudah, murah dan transparan	Belum Tercapai (<)	Belum Terpenuhi	Sumberdaya Manusia
	Perangkat daerah memiliki SOP	Belum Tercapai (<)	Belum Semua	Sumberdaya Manusia
31	**Urusan Pengawasan**			
	Fungsi pengawasan dan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP	Belum Tercapai (<)	Belum Optimal	Sistem Pembinaan Kepegawaian
	Tindaklanjut temuan BPK dan pengaduan masyarakat	Belum Tercapai (<)	Belum Optimal	Disiplin dan Kualitas SDM
	Hasil Penilaian Mandiri	Belum Tercapai (<)	Belum Optimal	Sumberdaya Manusia
	Pelaksanaan roadmap reformasi bikrokrasi	Belum Tercapai (<)	Belum Maksimal	Sumberdaya Manusia
	Sistem pengendalian internal	Belum Tercapai (<)	Belum Efektif	Sistem Pengawasan dan SDM
32	**Urusan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan**			
	Pelaksanaan Evaluasi Renstra PD, Evaluasi RKPD maupun hasil Renja PD baik secara triwulan maupun evaluasi akhir Tahun	Belum Tercapai (<)	Belum Optimal	Manajemen dan Sistem Dan Data Base serta Sumberdaya Manusia
	Sinergitas dan keselarasan perencanaan pembangunan	Belum Tercapai (<)	Belum Optimal	Manajemen dan Sistem Dan Data Base serta Sumberdaya Manusia
	Penerapan sistem informasi dalam perencanaan pembangunan daerah (e-planning)	Belum Tercapai (<)	Belum Optimal	Sumberdaya Manusia
	Pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta implementasinya dalam pembangunan	Belum Tercapai (<)	Belum Optimal	Terbatasnya Anggaran

4.2. ISU STRATEGIS

4.2.1. Pengertian Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Suatu isu strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah yang bersifat strategis dan diperkirakan dapat mempengaruhi agenda pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Pertimbangan perumusan isu-isu strategis Kota Tarakan terdiri dari isu internasional, isu nasional, dan isu regional.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber, yaitu:

1. Permasalahan pembangunan Kota Tarakan.
2. Dinamika internasional, nasional dan regional yang mempengaruhi pembangunan Kota Tarakan.
3. Kebijakan pembangunan daerah sekitar yang mempengaruhi pembangunan Kota Tarakan.
4. Isu strategis dari kebijakan pembangunan Kota Tarakan yang antara lain terdiri dari RPJPD dan RTRW Kota Tarakan.
5. KLHS RPJMD;

4.2.2 Kajian Kebijakan Internasional dan Nasional

a. Penelaahan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*)

Agenda pembangunan dunia *Millenium Development Goals (MDGs)* tidak lagi berlaku terhitung mulai akhir tahun 2015 dan telah digantikan dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Program *SDGs* aktif mulai tahun 2016 hingga Tahun 2030.

Pasca agenda pembangunan 2015, telah dikenal istilah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2016-2030, yang diharapkan dapat menanggulangi berbagai masalah, termasuk menghapuskan kemiskinan dan kelaparan, memajukan kesehatan dan pendidikan, membangun kota-kota secara berkelanjutan, memerangi perubahan iklim serta melindungi samudera dan hutan.

Komitmen Indonesia untuk ikut mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan bersama dengan negara-negara lain, ditunjukkan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Adapun 17 tujuan dan sasaran pembangunan berkelanjutan yang harus diwujudkan bersama-sama oleh K/L dan pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota), yaitu:

1. Tanpa Kemiskinan

Tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia.

2. Tanpa Kelaparan

   Tidak ada lagi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan.

3. Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan

   Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat disegala umur.

4. Pendidikan Berkualitas

   Menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang, menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.

5. Kesetaraan Gender

   Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan perempuan.

6. Air Bersih dan Sanitasi

   Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang.

7. Energi Bersih dan Terjangkau

   Menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan dan modern untuk semua orang.

8. Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak

   Mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, lapangan kerja yang penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua orang.

9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi.

10. Mengurangi Kesenjangan

    Mengurangi ketidaksetaraan baik di dalam sebuah negara maupun di antara negara-negara di dunia.

11. Keberlanjutan Kota dan Komunitas

    Membangun kota-kota serta pemukiman yang inklusif, berkualitas, aman, berketahanan dan berkelanjutan.

12. Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab

    Menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi.

13. Aksi Terhadap Iklim

    Bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.

14. Kehidupan Bawah Laut

    Melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan pembangunan yang berkelanjutan. tujuan ini bukan merupakan kewenangan Kota Tarakan.

15. Kehidupan di Darat

    Melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati. tujuan ini bukan merupakan kewenangan Kota Tarakan.

16. Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian

    Meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk

keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan

17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

    Memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Gambar 4.3
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs

SDG's sebagai agenda global perlu diintegrasikan dengan agenda nasional sehingga idealnya perlu ada regulasi yang mengatur pelaksanaan pencapaian SDG's tersebut sebelum kemudian diturunkan menjadi agenda daerah. Hal ini bertujuan agar ada kepastian hukum dan arahan dalam penyesuaiannya dengan nawacita maupun RPJMD di daerah.

b. Penelaahan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah bentuk integrasi ekonomi negara-negara yang tergabung dalam ASEAN sehingga

pada prakteknya terbentuk sistem perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN. MEA ini telah disepakati oleh negara-negara di ASEAN dan mulai diberlakukan pada tanggal 31 Desember 2015;

Pemberlakuan ASEAN Economic Community, ditandai:

1. arus bebas barang bagi negara-negara ASEAN;
2. arus bebas jasa, dampak arus bebas investasi;
3. arus tenaga kerja terampil; dan
4. arus bebas modal

Dampak Positif Masyarakat Ekonomi ASEAN, antara lain:

a) Masyarakat Ekonomi ASEAN akan mendorong arus investasi dari luar masuk ke dalam negeri yang akan menciptakan *multiplier effect* dalam berbagai sektor khususnya dalam bidang pembangunan ekonomi.
b) MEA memberikan peluang kepada negara-negara anggota ASEAN dalam hal meningkatkan kecepatan perpindahan sumber daya manusia dan modal yang merupakan dua faktor produksi yang sangat penting.
c) Diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN ini menciptakan adanya transfer teknologi dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang yang ada diwilayah Asia Tenggara.
d) Kondisi pasar yang satu (pasar tunggal) membuat kemudahan dalam hal pembentukan joint venture (kerjasama) antara perusahaan-perusahaan diwilayah ASEAN sehingga akses terhadap bahan produksi semakin mudah

c. Penelaahan RPJMN 2020-2024

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) 2020-2024, RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi dan program presiden yang penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country*/MIC) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah: "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong".

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;

5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Dalam penyusunan Perubahan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024, maka perlu memperhatikan 5 arahan utama Presiden yang teLah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 terkait strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan Manusia

   Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
2. Pembangunan Infrastruktur

   Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat
3. Penyederhanaan Regulasi

   Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM
4. Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

5. Transformasi Ekonomi

   Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005- 2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas.

Tujuan RPJMN IV tahun 2020 – 2024 telah sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Target-target dari 17 tujuan (goals) dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah ditampung dalam 7 agenda pembangunan.

Tema dan Agenda Pembangunan

Indonesia Berpenghasilan Menengah - Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan

7 Agenda Pembangunan RPJMN IV tahun 2020 – 2024

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas.

   Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih

tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata.

Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

a) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
b) Akselerasi peningkatan nilai tambah *agro-fishery industry*, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang.

Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

a) Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah,
b) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang,
c) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif,
d) Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah, serta
e) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

   Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah.

   Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

   a) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
   b) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
   c) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
   d) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
   e) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
   f) Pengentasan kemiskinan; dan
   g) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa

   Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan sentral dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan negara-bangsa yang maju, modern, unggul, berdaya saing dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain.

   Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang membentuk nilai-nilai budaya di dalam masyarakat. Pembangunan karakter dilaksanakan secara

holistik dan integratif dengan melibatkan segenap komponen bangsa melalui:

a) Memperkukuh ketahanan budaya bangsa,
b) Memajukan kebudayaan,
c) Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama,
d) Meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga
e) Meningkatkan budaya literasi

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

   Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional.

   Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

   a) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah,
   b) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan,
   c) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK,
   d) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien,
   e) Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim melalui kebijakan:

a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
b) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta
c) Pembangunan Rendah Karbon.

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara.

Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

a) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas,
b) Meningkatkan Hak Hak Politik Dan Kebebasan Sipil,
c) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber,
d) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi.
e) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di Iuar negeri

4.2.3 Kajian Kebijakan Pembangunan Daerah

a. Penelaahan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026, visi pembangunan Provinsi Kalimantan Utara adalah "*Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara Yang Berubah, Maju Dan Sejahtera*". Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan misi:

Misi 1 : Mewujudkan Kalimantan Utara, Yang Aman, Nyaman Dan Damai Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik.

Tujuan 1: Terjaganya Kondusifitas Wilayah. Dengan 2 (dua) sasaran yaitu :

(1) Meningkatnya Keamanan Dan Ketertiban Wilayah
(2) Meningkatkan Kualitas Penanganan Bencana.

Misi 2 : Mewujudkan Sistem Pemerintahan Provinsi Yang Di Topang Oleh Tata Kelola Pemerintah Kabupaten/Kota Sebagai Pilar Utama Secara Profesional, Efisian, Efektif, Dan Fokus Pada Sistem Penganggaran Yang Berbasiskan Kinerja.

Tujuan 2: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Akuntabel Dan Inovatif, dengan 1 (satu) sasaran yaitu :

(1) Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Profesional, Efisien, Efektif, Dan Fokus Pada Sistem Penganggaran Yang Berbasiskan Kinerja.

Misi 3 : Mewujudkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Cerdas, Kreatif, Inovatif, Berakhlak Mulia, Produktif Dan Berdaya Saing Dengan Berbasiskan

Pendidikan Wajib Belajar 16 Tahun Dan Berwawasan Kebangsaan.

Tujuan 3: Mewujudkan SDM Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing, dengan 3 (tiga) sasaran yaitu :

(1) Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;

(2) Meningkatnya Kualitas Pendidikan Dan Kebudayaan Masyarakat;

(3) Meningkatnya Kemandirian Sosial Ekonomi Masyarakat.

Misi 4 : Mewujudkan Pemanfaatan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dengan Nilai Tambah, Berwawasan Lingkungan Yang Berkelanjutan, Secara Efisien, Terencana, Menyeluruh, Terarah, Terpadu, Dan Bertahap Dengan Berbasiskan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi.

Tujuan 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, dengan 2 (dua) sasaran yaitu:

(1) Terwujudnya Pembangunan Rendah Karbon;

(2) Meningkatnya Kualitas Air, Udara Dan Lahan.

Misi 5 : Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan, Pedalaman, Perkotaan, Pesisir Dan Perbatasan Untuk Meningkatkan Mobilisasi Dan Produktifitas Daerah Dalam Rangka Pemerataan Pembangunan.

Tujuan 5 : Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar, dengan 2 (dua) sasaran yaitu:

(1) Meningkatnya Aksesibilitas Dan Konektivitas Antar Pusat-Pusat Kegiatan;

(2) Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar.

Misi 6 : Mewujudkan Peningkatan Ekonomi Yang Berdaya Saing, Pertumbuhan Ekonomi Dan Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah Serta Meningkatkan Ketahanan Pangan Dengan Berorientasi Pada Kepentingan Rakyat Melalui Sektor Perdagangan, Jasa, Industri, Pariwisata, Dan Pertanian Dalam Arti Luas Dengan Pengembangan Infrastruktur Yang Berkualitas Dan Merata Serta Meningkatkan Konektivitas Antar Kabupaten/Kota;

Tujuan 6 : Mewujudkan Ekonomi Daerah Yang Berdaya Saing, dengan 1 (satu) sasaran yaitu :

(1) Meningkatnya Produktivitas Dan Nilai Tambah Sektor Pertanian, Perdagangan, Jasa, Industri, Pariwisata.

Misi 7 : Mewujudkan Kualitas Kerukunan Dan Kehidupan Beragama, Etnis Dan Latar Belakang Budaya Dalam Kerangka Semangat Kebhinnekaan Di Provinsi Kalimantan Utara.

Tujuan 7 : Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis dengan 1 (satu) sasaran:

(1) Meningkatnya Toleransi Antar Umat Beragama

Misi 8 : Mewujudkan Ketahanan Energi Dan Pengembangan PLTA Serta Mengembangkan Energi Terbarukan Dengan Pemanfaatan Potensi Daerah.

Tujuan 8 : Mewujudkan Ketahanan Energi Daerah dengan 1 (satu) sasaran:

(1) Meningkatnya Aksesibilitas Terhadap Penggunaan Listrik Dan Energi Baru Terbarukan.

Misi 9 : Mewujudkan Peningkatan Kualitas Kesetaraan Gender Dan Milenial Dalam Pembangunan.

Tujuan 9 : Mewujudkan Kesetaraan Gender Dan Milenial Dalam Pembangunan, dengan 2 (dua) sasaran:

(1) Meningkatnya Pengarusutamaan Gender;

(2) Meningkatnya Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan.

Misi 10 : Mewujudkan Perlindungan Dan Pemberdayaan Koperasi Dan UMKM.

Tujuan 10 : Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Kerakyatan, dengan 1 (satu) sasaran:

(1) Meningkatnya Produktivitas Dan Daya Saing Koperasi Dan UMKM;

Misi 11 : Meningkatkan Kinerja Pembangunan Dan Investasi Daerah Dengan Melibatkan Pengusaha Dan Investor Lokal Serta Nasional.

Tujuan 11 : Mewujudkan Iklim Investasi Yang Kondusif, dengan 1 (satu) sasaran:

(1) Meningkatnya Kepastian Hukum Berinvestasi.

Misi 12 : Memberi Bantuan Pengembangan Sektor Produktif Dan Potensi Strategis Di Setiap Desa Dan Kelurahan Melalui Pengembangan Produk Lokal Masing-Masing Kabupaten/Kota.

Tujuan 12 : Mewujudkan Pemerataan Pendapatan Antar Wilayah Yang Berkeadilan, dengan 1 (satu) sasaran:

(1) Menurunnya Kesenjangan Pendapatan Masyarakat.

Misi 13 : Mewujudkan Pembangunan Yang Berbasiskan RT/Komunitas Dalam Upaya Gerakan Membangun Desa Menata Kota Serta Memberi Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Sebagai Pilar Provinsi Sesuai Kemampuan APBD Setiap Tahun.

Tujuan 13 : Mewujudkan Pembangunan Desa Yang Berkualitas, dengan 1 (satu) sasaran:

(1) Meningkatnya Kemandirian Desa.

Misi 14 : Mewujudkan Tanjung Selor Menjadi DOB Sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara Serta Beberapa DOB Yang Telah Diusulkan Yaitu; Kota Sebatik, Kabupaten Kabudaya, Kabupaten Krayan, Kabupaten Apo Kayan.

Tujuan 14 : Mewujudkan Percepatan Pembentukan DOB, dengan 1 (satu) sasaran:

(1) Meningkatnya Pengembangan Wilayah Administrasi Kecamatan Untuk Pemenuhan Syarat Pembentukan Dob Yang Diusulkan.

Dalam dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara 2021-2026, isu strategis Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut :

1) Masih rendahnya kualitas dan daya saing SDM.
2) Masih rendahnya daya saing dan tingginya kesenjangan antar wilayah.
3) Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
4) Rentannya ketahanan ekonomi daerah sebagai kawasan perbatasan dalam menghadapi persaingan global.
5) Masih rendahnya aksesibilitas dan dukungan penyediaan layanan infrastruktur dasar yang merata dan terintegrasi.
6) Belum optimalnya tata kelola dan pelayanan pemerintahan.

Sepuluh prioritas pembangunan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 2021 - 2026, meliputi:

1. Pembangunan PLTA Sungai Mentarang dan Sungai Kayan.

2. Pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI).
3. Penguatan Ketahanan Pangan Daerah dengan Pembangunan Pertanian dalam arti luas, dan Jamiman Perlindungan kepada Petani, Nelayan dan Petani Tambak di setiap Kabupaten/Kota.
4. Penguatan Konektivitas Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Terpencil dalam Membangun Desa Menata Kota di setiap Kabupaten/Kota.
5. Pembangunan Infrastruktur Desa dan Kelurahan Di Kabupaten/Kota.
6. Pembangunan Ekonomi melalui Diversifikasi Produk dan Keunggulan Komparatif di setiap Kabupaten/Kota.
7. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Wajib Belajar 16 Tahun yang Berwawasan.
8. Pengadaan Balai Latihan Kerja, Perluasan Lapangan Kerja, Kesempatan Usaha dan Ekonomi Kreatif bagi Kaum Milenial.
9. Pengelolaan Bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Pelaku UMKM di setiap Kabupaten/Kota.
10. Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Aparat Desa dan RT, Tenaga Pendidikan, dan Kependidikan pada semua tingkatan Satuan Pendidikan, Tenaga Kesehataan Serta Tenaga Honorer di daerah Perbatasan, Pedalaman dan Terpencil serta Perkotaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Sesuai dengan rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara, No 1 Tahun 2017 -2037 Kota Tarakan ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), dengan arah pengembangan :

1. simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional;
2. simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi;
3. pusat industri pengolahan hasil pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu;
4. industri pengolahan lanjut kelapa sawit dan karet yang berdaya saing dan ramah lingkungan;
5. pusat industri pengolahan hasil hutan yang berdaya saing dan ramah lingkungan;
6. pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan yang ramah lingkungan; dan
7. pusat pengembangan ekowisata dan wisata budaya.

b. Penelaahan RTRW Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037, maka RTRW Provinsi Kalimantan Utara menjadi dokumen yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan RPJMD Kota Tarakan. Hal ini bertujuan untuk mencermati rencana penataan ruang wilayah di Provinsi Kalimantan Utara, yang dapat dilihat dari struktur ruang dan pola ruang wilayah.

Konsep pengembangan rencana struktur ruang untuk pengembangan

Provinsi Kalimantan Utara adalah :

(a) Menguatkan aglomerasi sosial-ekonomi;

(b) Mendukung terciptanya integrasi regional;

(c) Mengembangkan konektivitas regional; dan

(d) Mendukung pengembangan kawasan perbatasan.

Konsepsi tersebut, diwujudkan melalui:

a. Penguatan sistem pusat-pusat permukiman:

1) Kelestarian dan perlindungan *Heart of Borneo* (HoB) sebagai kawasan ekosistem yang dapat dimanfaatkan bagi penduduk, melalui PKL dengan fungsi utama konservasi & ekowisata; dan
2) Menguatkan aglomerasi sosial-ekonomi di kawasan pesisir melalui peningkatan fungsi sistem permukiman

b. Penguatan kapasitas sistem jaringan jalan:

1) Eksternal: antarprovinsi dan perbatasan; dan
2) Internal: antaribu kota kabupaten/kota (termasuk pembangunan jembatan lintas pulau).

c. Penguatan *gateways* dan penambahan/pembangunan baru:

1) Bandara utama (*gateways* untuk koneksi nasional/internasional);
2) *Air strips* untuk kawasan pedalaman (*gateways* untuk koneksi lokal dan nasional, baik barang/orang);
3) Pelabuhan (*gateways* untuk koneksi lokal, nasional,internasional);
4) Dermaga (*gateways* untuk koneksi lokal antarpulau dan pedalaman melalui laut dan *waterways*/sungai); dan
5) Terminal di perbatasan, dan ibu kota kabupaten/kota.

d. Pembangunan sistem koneksi transportasi darat, laut, dan udara:

1) Pergerakan terjadwal (untuk koneksi lokal, nasional, internasional);
2) Pergerakan yang disubsidi pemerintah (untuk *supply* logistik dan orang di kawasan pedalaman dan perbatasan); dan

3) Pergerakan yang diinisiasi oleh swasta/masyarakat (di seluruh kawasan).

Sedangkan konsep pengembangan rencana pola ruang untuk pengembangan wilayah Provinsi Kalimantan Utara, yaitu melalui:

a. Mengembangkan aglomerasi sosial-ekonomi di kawasan pesisir;
b. Mempertahankan dan meningkatkan kemampuan daya dukung lingkungan di kawasan pesisir, pedalaman, dan perbatasan;
c. Mendukung pelestarian *Heart of Borneo*; dan
d. Mengembangkan kawasan perbatasan.

Konsepsi perlindungan dan pelestarian kawasan lindung di Provinsi Kalimantan Utara, yaitu sebagai berikut:

a) Mendukung pelestarian Kawasan *Heart of Borneo*, dan termasuk pelestarian Taman Nasional di dalam dan di luar HOB, serta pengembangan kawasan perbatasan untuk kesejahteraan dan ketahanan nasional dengan memperhatikan kaidah lingkungan dan pelestarian *Heart of Borneo*;
b) Intensitas pengembangan di kawasan pesisir dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan dan keterbatasan lahan; dan
c) Mengembangkan kawasan lindung di kawasan pedalaman, dan mengijinkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan produktif secara terbatas dengan tetap memperhatikan kaidah pelestarian lingkungan.

Sedangkan konsepsi pengembangan kawasan budidaya di Provinsi Kalimantan Utara, yaitu melalui:

(a) Pengembangan aglomerasi sosial-ekonomi di kawasan pesisir;
(b) Pengembangan kawasan perbatasan.

Dalam RTRW Provinsi Kalimantan Utara 2017-2037, disebutkan bahwa tujuan penataan ruang Provinsi Kalimantan Utara adalah: "Mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkelanjutan sesuai potensi
fisiogeografis Provinsi Kalimantan Utara sebagai pintu gerbang internasional dengan tetap menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia." Kebijakan untuk mewujudkan tujuan penataan ruang tersebut adalah dengan:

1. Pengembangan kawasan perbatasan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis kelestarian lingkungan hidup;
2. Peningkatan fungsi kawasan perbatasan untuk pertahanan dan keamanan negara;
3. Penguatan sistem perkotaan dan sinergi hubungan fungsional kota-desa;
4. Pembangunan kawasan berbasis daya dukung lingkungan dan mitigasi bencana;
5. Pembangunan kawasan berbasis kearifan lokal;
6. Pembangunan sistem jaringan prasarana wilayah; dan
7. Penguatan kelembagaan pembangunan wilayah.

c. Penelaahan RPJPD Kota Tarakan Tahun 2005-2025

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tarakan Tahun 2005-2025, Visi Kota Tarakan 2005-2025 adalah *"Kota Tarakan sebagai Pusat Pelayanan, Perdagangan dan Jasa Menuju Masyarakat yang Sejahtera dalam Lingkungan Hidup Berkelanjutan".*

Sebagai upaya mewujudkan visi pembangunan Kota Tarakan tersebut, misi pembangunan Kota Tarakan adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya struktur ekonomi wilayah yang kuat dengan sektor perdagangan dan jasa sebagai penopang pembangunan ekonomi yang didukung oleh sektor perindustrian dan usaha kecil menengah.
2. Mewujudkan infrastruktur perkotaan yang modern.
3. Terciptanya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi dan berbudi pekerti luhur dengan mewujudkan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.
4. Mewujudkan kualitas lingkungan hidup menuju kota berwawasan lingkungan hidup berkelanjutan (*green city*).
5. Mewujudkan pemerintahan Kota Tarakan yang efektif dan efisien dengan berpedoman pada penegakan hukum.

Tujuan pembangunan jangka panjang Kota Tarakan 2005-2025 adalah menciptakan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin dalam lingkungan hidup yang berkelanjutan sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya.

Sasaran pokok pembangunan Kota Tarakan berkaitan dengan setiap misi pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya struktur ekonomi wilayah yang kuat dengan sektor perdagangan dan jasa sebagai penopang pembangunan ekonomi yang didukung oleh sektor perindustrian dan usaha kecil menengah, yang ditandai oleh :
   a. Tercapainya sektor perdagangan dan jasa sebagai basis pembangunan ekonomi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi rata-rata tahunan mencapai 7%-8%, sehingga pendapatan per kapita Kota Tarakan 2025 mencapai US $ 11 000.
   b. Terciptanya keterkaitan yang kuat antara sektor perdagangan dan jasa dengan sektor perindustrian,

terutama industri yang berbasis sektor perikanan dan industri kerakyatan sehingga mampu menyerap tenaga kerja secara optimal dan menurunkan tingkat kemiskinan di bawah 5% pada tahun 2025 dan terjadinya penetesan ke bawah atas hasil-hasil pembangunan di Kota Tarakan.

c. Terciptanya pelayanan investasi yang handal sebagai daya tarik investasi di sektor perdagangan, jasa dan industri
d. Meningkatnya produksi dan nilai tambah sektor perikanan dan industri perikanan
e. Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah industri kerakyatan dan usaha kecil menengah (UKM)

2. Mewujudkan infrastruktur perkotaan yang modern yang ditandai oleh :
   a. Terciptanya infrastruktur jalan darat dan jembatan yang memadai dan berkualitas.
   b. Terwujudnya Bandara Juwata sebagai bandara internasional dengan infrastruktur terminal dan landasan pacu yang memadai, jalur penerbangan domestik dan internasional yang lebih luas.
   c. Terwujudnya pelabuhan laut di Kota Tarakan yang memiliki standar internasional yakni kapasitas dermaga yang memadai, penampungan peti kemas yang besar, dan kapasitas penumpang yang luas sehingga menjadi pelabuhan ekspor yang langsung melakukan aktivitas pengangkutan ke pelabuhan luar negeri seperti Singapura. Terciptanya pelabuhan barang dan penumpang yang terpisah untuk mengoptimalkan kontrol dan pelayanan bagi pengguna pelabuhan.
   d. Terciptanya jaringan jalan yang merata dan memiliki jangkauan yang lebih luas dengan membangun jalan linkar

(ring road) untuk mendorong berkembangnya kegiatan ekonomi di daerah pesisir.

e. Tersedianya pasokan listrik yang andal dan merata dengan kapasitas pembangkit yang memadai.
f. Ketersediaan air bersih yang tepat waktu dengan kualitas yang baik dan kuantitas yang mencukupi sehingga menunjang kehidupan masyarakat.
g. Tersedianya transportasi umum yang nyaman sehingga memberikan insentif kepada masyarakat untuk menggunakan angkutan umum untuk mengatasi kemacetan di masa depan dan dan mengurangi polusi udara.
h. Tersedianya teknologi telekomunikasi yang canggih akan memfasilitasi seluruh aktivitas masyarakat Kota Tarakan dalam menjalankan aktivitas dan menopang kegiatan industri, perdagangan dan jasa yang efisien.
i. Terwujudnya kantor pemerintahan yang bersih dan nyaman.

3. Terciptanya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi dan berbudi pekerti luhur dengan mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas serta pelayanan kesehatan yang memadahi.
   a. Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan berkualitas.
   b. Pemerataan dan peningkatan kesempatan pendidikan sehingga rata-rata pendidikan masyarakat Kota Tarakan minimal setingkat SLTA pada tahun 2025
   c. Terwujudnya guru/dosen yang berkualitas dan kompeten dibidangnya di semua jenjang pendidikan
   d. Tercapainya kualitas pendidikan sehingga luluan sekolah di Kota Tarakan dapat bersaing di level Kalimantan Timur

e. Terwujudnya kualitas SDM yang memiliki kemampuan berbahasa inggris yang memadahi. Minimal lulusan SMA di Tarakan memiliki nilai Test of English as Second Language (TOEFL) 450 (pada periode 2007-2012). Mahasiswa Universitas Borneo (UB) memiliki skor TOEFL minimal 500 lulusannya diuji oleh penguji dari UI, ITB, NUS, dan pengajar dari Universitas-universitas di Jepang dan Canada (pada tahun 2015). Semua disertasi dan tesis pada periode yang sama juga harus sudah dalam Bahasa Inggris.
f. Terwujudnya Universitas Borneo menjadi center of excellence untuk penelitian dan kajian bidang maritim dan perikanan (Tahun 2015).
g. Terwujudnya pendidikan budi pekerti dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi
h. Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan yang memadai dan berkualitas dan modern
i. Pemerataan pelayanan kesehatan ke pelosok-pelosok
j. Tersedianya rumah sakit dengan standar internasional
k. Terwujudnya asuransi kesehatan bagi seluruh masyarakat Kota Tarakan

4. Mewujudkan kualitas lingkungan hidup menuju kota berwawasan lingkungan hidup berkelanjutan (green city) yang ditandai oleh :
   a. Terciptanya pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan aspek ekonomi dan ekologi.
   b. Tetap terpeliharanya taman-taman kota, hutan kota dan hutan manggrove
   c. Terwujudnya kota tarakan yang bebas dari perumahan-perumahan kumuh

d. Tercipatnya penerapan standar amdal untuk mencegah polusi air, udara dan tanah
e. Tercapainya rehabilitasi lapangan minyak dan gas yang sudah tidak menghasilkan
f. Tercipatnya peran serta masyarakat dalam penanganan masalah lingkungan hidup dan persampahan

5. Mewujudkan pemerintahan Kota Tarakan yang efektif dan efisien dengan berpedoman pada penegakan hukum (Law Enforcement) yang ditandai oleh :
   a. Terwujudnya aparat pemerintahan Kota Tarakan yang berbudi pekerti luhar dan kompeten dalam bidangnya
   b. Tercipatnya pemerintahan Kota Tarakan berorientasikan public services dengan didukung sumber daya manusia yang handal (Good Governance)
   c. Terwujudnya supremasi hukum tanpa pandang bulu.
   d. Terwujudnya aparat pemerintah dan masyarakat yang sadar hukum
   e. Penegakan perda untuk menjaga ketertiban dan keamanan daerah.
   f. Menguatnya peranan masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan politik
   g. Terwujudnya keamanan dan ketertiban di Kota Tarakan yang menjamin keselamatan masyarakat dan martabat kemanusiaan.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kota Tarakan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya diperlukan skenario serta pentahapannya untuk mencapainya dalam lima tahunan. Berikut akan diuraikan skenario pembangunan jangka panjang daerah Kota Tarakan arah pembangunan Kota Tarakan serta pentahapan

untuk menvapai visi dan misi yang telah ditentukan. Tahapan pembangunan lima tahunan yang diuraikan berikut disusun untuk menjamin konsistensi dan kesinambungan pembangunan daerah dalam 20 tahun mendatang.

RPJPD Kota Tarakan akan dilaksanakan secara bertahap lima tahunan sesuai dengan tujuan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Tarakan sehingga pembangunan dapat berjalan dengan efisien, efektif dan berkelanjutan. Pentahapan pembangunan tersebut dibagi menjadi:

1. RPJMD ke-1 (2005-2009)
2. RPJMD ke-2 (2010-2014)
3. RPJMD ke-3 (2015-2019)
4. RPJMD ke-4 (2020-2025)

Periode RPJPD saat ini masuk pada periode keempat, dimana Kebijakan pembangunan ekonomi wilayah jangka menengah ke empat (pada periode 2020-2025) diarahkan untuk mempertahan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 7%-8% disertai dengan pemantapan struktur ekonomi sektor perdagangan dan jasa yang kuat yang mempunyai keterkaitan tinggi dengan sektor industri dan sektor-sektor lainnya. Berbagai hasil pembangunan yang dicapai pada periode sebelumnya terus dipertahankan. Dalam periode ini kebijakan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat meningkat yang ditunjukkan oleh pendapatan perkapita dalam kategori wilayah dengan pendapatan tinggi yang mencapai US $ 9000-11000 yang diikuti oleh terjadinya pemerataan hasil-hasil pembangunan, menurunya angka pengangguran hingga mencapai 5% serta menurunnya angka kemiskinan hingga mencapai 5%.

Kebijakan pengembangan SDM pada periode 2020 - 2025 diarahkan untuk makin memantapkan kualitas SDM Kota

Tarakan melalui pemantapan sektor kesehatan dan pendidikan. Arah kebijakannya meliputi pemantapan dan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan dan kesahatan, pemantapan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam bidang kesehatan. Tersedia dua rumah sakir dengan standar kualitas pelayanan internasional dan menjadi rujukan perawatan terlengkap di Kalimantan Timur pada umumnya. Angka harapan hidup yang semakin meningkat, angka kematian bayi dan kamatian ibu melahirkan terus berkurang, tidak dijumpai lagi kasus kekurangan gizi dan gizi buruk. Pemantapan saran dan prasarana puskesmas-puskesmas dengan sarana-prasarana kedokteran dan perawatan yang modern serta ditunjang oleh tenaga dokter dan tenaga medis yang handal.

Dibidang pendidikan, periode ini diharapkan makin memantapkan Kota Tarakan sebagai kota pusat pendidikan di Kalimantan Timur dengan kelengkapan saran prasarana pendidikan yang berkualitas, guru yang berkualitas, serta kurikulum modern dengan disertai muatan budi pekerti luhur, serta penerapan kualitas sekolah dengan standar internasional.

Untuk peningkatan kualitas SDM pemerintahan diarahkan untuk setiap pegawai mengambil pendidikan lanjutan. Dengan pencapaian ini, diharapkan Kota Tarakan makin mantap menjadi smart city (kota yang cerdas dengan SDM yang berkualitas sehingga mampu bersaing secara global).

Kebijakan pembangunan infrastruktur perkotaan diarahkan untuk pemantapan kualitas infrastruktur untuk terus mendukung pengembangan ekonomi wilayah. Arah kebijakan periode ini meliputi infrastruktur jalan yang berkualitas dan menjangkau seluruh pelosok, bandara Juwata telah menjadi bandara internasioanl dengan jalur penerbangan domestik dan internasional yang lengkap ke berbagai tujuan. Pelabuhan laut

diarahkan menjadi pelabuhan pendukung sektor perdagangan dan jasa dengan pergudangan dan contaiiner yang memadahi. Kebijakan tranpsortasi darata diarahkan untuk menciptakan transporatsi umum yang nyaman dan bebas dari kemacetan. Kebijakan energu diarahkan untuk peningkatan kapasitas listrik dan air bersih serta pemantapan teknologi komunikasi yang canggih.

Kebijakan pembangunan lingkungan hidup pada RPJMD ke-4 ini diarahkan untuk optimalisasi taman, hutan kota dan hutan manggrove bagi paru-paru kota, pengendalian pencemaran air, udara dan tanah. Kebijakan pada periode ini digunakan untuk optimalisasi Kota Tarakan sebagai kota hijau yang berkelanjutan.

Kebijakan digunakan untuk pemantapan kehidupan politik, hukum dan keamanan, optimalisasi SDM di pemerintahan serta optimalisasi sistem pemerintahan yang mengikuti tata kelola pemerintahan yang baik. Pada periode ini, kebijakan juga diarahkan agar kehidupan masyarakat makin tertib dengan suasana aman dan tenteram.

d. Penelaahan Revisi RTRW Kota Tarakan Tahun 2021-2041

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan Tahun 2021-2041, maka Revisi RTRW Kota Tarakan menjadi dokumen yang perlu dipedomani dalam penyusunan Perubahan RPJMD Kota Tarakan. Hal ini bertujuan untuk mencermati rencana penataan ruang wilayah di Kota Tarakan, yang dapat dilihat dari struktur ruang dan pola ruang wilayah.

Tujusn Penataan ruang wilayah Kota Tarakan yaitu Terwujudnya Ruang Wilayah Kota Tarakan sebagai pengembangan

kegiatan minapolitan serta sentra perdagangan dan jasa, industri dan pariwisata berskala regional yang nyaman dan berkelanjutan.

Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota Tarakan merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang, meliputi :

1. Kebijakan perencanaan pembangunan dengan konsep pemerataan pelayanan dalam skala regional dan skala kota, dengan strategi :
   a. menetapkan pusat dan subpusat pelayanan di seluruh Kota Tarakan secara merata dengan pengembangan fasilitas dan bangkitan kegiatan;
   b. melakukan kerjasama dengan wilayah sekitar secara sinergis dalam pengembangan infrastruktur dan ekonomi daerah;
   c. integrasi antara pusat pelayanan kota, subpusat pelayanan kota dan wilayah sekitarnya dengan penyediaan aksesibilitas yang terjangkau;
   d. mengembangan pusat pelayanan kota dengan fungsi utama sebagai pusat perdagangan dan jasa dan pusat pelayanan umum; dan
   e. mengembangkan pusat kota baru.
2. Kebijakan perencanaan sarana dan prasarana permukiman secara inklusif, berkelanjutan, terpadu dan merata, dengan strategi :
   a. meningkatkan kualitas jaringan sarana dan prasarana serta mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut, dan udara yang dilakukan melalui:
      1) pengembangan Bandar Udara Juwata;
      2) pengembangan Pelabuhan Feri, Tengkayu I, Tengkayu II, dan Malundung;
      3) pengembangan pelabuhan rakyat;

4) pembangunan stasiun dan rel KA secara terpadu.
5) pembangunan jembatan Bulungan – Tarakan; dan
6) pengembangan dan peningkatan kualitas jaringan jalan.

b. mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan listrik dan telekomunikasi yang dilakukan melalui:
1) pengembangan dan peningkatan kualitas jaringan listrik;
2) mengembangkan daerah pelayanan energi ke seluruh wilayah Kota Tarakan;
3) pengembangan dan peningkatan kualitas jaringan telekomunikasi;
4) meningkatkan kapasitas pelayanan telekomunikasi secara terestrial atau sistem kabel ke seluruh kawasan perumahan dan kawasan fasilitas umum kota lainya; dan
5) mengembangkan jaringan telepon seluler dengan penggunaan menara bersama antar operator dalam satu sistem pengelolaan.

c. meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan air bersih, drainase, dan air limbah yang dilakukan melalui:
1) pengembangan dan peningkatan kualitas jaringan air bersih;
2) melindungi sumber – sumber mata air dan daerah resapan air;
3) meningkatkan penggunaan sumur resapan perkotaan;
4) memperluas jaringan air minum;
5) mengembangkan sistem pengolahan limbah secara terpusat;
6) meningkatkan pengelolaan sistem persampahan dengan prinsip 3R (Reuse, Reduce, Recycle); dan

7) melakukan normalisasi sistem drainase kota,

3. Kebijakan pelestarian kawasan lindung, dengan strategi :
   a. mewujudkan kawasan berfungsi lindung sesuai dengan kondisi ekosistemnya;
   b. mengembalikan (memulihkan) dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat berkembangnya kegiatan budi daya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
   c. menjaga luasan dan fungsi kawasan hutan lindung;
   d. membatasi perkembangan kawasan terbangun dan perumahan dengan mengembangkan jalur hijau di sekitar kawasan badan air;
   e. mempertahankan dan memelihara keaslian benda dan kawasan cagar budaya dan melakukan konservasi dan preservasi benda dan kawasan cagar budaya yang kondisinya menurun;
   f. mempertahankan ruang terbuka hijau yang sudah ada; dan
   g. menambah penyediaan RTH publik dalam bentuk rimba kota, taman kota, taman kecamatan, taman kelurahan, taman RT, taman RT, pemakaman dan jalur hijau.
4. Kebijakan pengembangan kawasan budidaya dengan strategi :
   a. mengembangkan kegiatan budi daya unggulan perikanan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya;
   b. mengembangkan pusat perdagangan produk unggulan kota;
   c. mengembangkan sentra pariwisata belanja dan budaya;

d. mengembangkan kawasan peruntukan industri;
e. meningkatkan kualitas pemukiman nelayan dan infrastrukturnya untuk mendukung kegiatan perikanan;
f. meningkatkan kualitas perumahan pada kawasan kumuh melalui perbaikan kondisi lingkungan perumahan;
g. mengembangkan pasar induk dan pasar tradisional;
h. mengembangkan kawasan pusat perbelanjaan secara berhierarki sesuai skala pelayanan;
i. mengembangkan kawasan khusus perdagangan dan jasa di pusat pelayanan kota yang sekaligus berfungsi sebagai kawasan wisata;
j. mengelola dan menata ruang untuk sektor informal di kawasan perdagangan;
k. melengkapi setiap kawasan budidaya dengan prasarana pejalan kaki dan RTH;
l. mengembangkan kawasan perkantoran baru dan perkantoran swasta;
m. menyediakan sentra pemasaran atau outlet industri kecil sekaligus sebagai toko cindramata;
n. mengembangkan kawasan peruntukan industri secara khusus pada wilayah barat, timur dan utara kota;
o. mengembangkan galeri khusus untuk pariwisata budaya;
p. mengembangkan wisata alam pantai;
q. menyediakan akomodasi wisata, promosi wisata dan menggelar event wisata skala regional – nasional;
r. menyediakan ruang bagi sektor informal yang berdekatan dengan kawasan fungsional kota;
s. memanfaatkan ruang terbuka untuk aktivitas masyarakat; dan

t. mengembangkan tempat evakuasi bencana, dengan strategi menyediakan kawasan untuk ruang evakuasi bencana melalui penggunaan RTH dan fasilitas umum.

5. Kebijakan pengembangan kawasan perbatasan negara sebagai fungsi pertahanan dan keamanan serta ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat dengan strategi :
   a. mengembangkan sistem permukiman dan sistem prasarana wilayah sesuai fungsi pertahanan dan keamanan serta ekonomi;
   b. mengembangkan zona penyangga di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan;
   c. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
   d. menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan.
6. Kebijakan pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan perekonomian kota yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional dan internasional dengan strategi :
   a. mengembangkan pusat pelayanan kota baru di bagian utara Kota Tarakan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah kota;
   b. mengendalikan perkembangan pusat kota lama agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan;
   c. menciptakan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan minat investasi pada sektor industri dan pariwisata;
   d. mengelola pemanfaatan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan;

e. mengelola dampak negatif kegiatan kota agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan;
f. meningkatkan promosi peluang investasi;
g. meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi; dan
h. mengembangkan kawasan perikanan, perdagangan dan jasa, industri dan pariwisata sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi.

7. Kebijakan pengendalian kawasan yang berkepadatan tinggi dengan strategi :
   a. menetapkan daya tampung dan daya dukung lingkungan; dan
   b. memberikan arahan pada daerah yang daya tampung dan daya dukung melebihi batas yang telah ditetapkan melalui pengaturan zonasi.
8. Kebijakan pemantapan kawasan untuk penyelamatan lingkungan hidup dengan strategi:
   a. melindungi dan melestarikan kawasan resapan air untuk mengimbangi perkembangan kegiatan budidaya
   b. meningkatkan dan mengembangkan ekosistem mangrove pada wilayah pesisir;
   c. melindungi dan melestarikan flora, fauna dan keragaman hayati; dan
   d. melindungi dan melestarikan cagar budaya.

Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Kota Tarakan terdiri atas:

1. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi meliputi :

b. Kawasan Pengembangan Kota Baru di Kelurahan Juata Permai yang dikembangkan untuk pemerataan pelayanan di Kota Tarakan bagian utara;
c. Kawasan Perdagangan dan Jasa Pusat Kota di Jalan Yos Sudarso, Jalan Kusuma Bangsa, Jalan Gajah Mada, Jalan Jendral Sudirman, Jalan Mulawarman, Jalan Diponegoro, Jalan KH Dewantara yang dikembangkan sebagai pusat perdagangan dan jasa regional;
d. Kawasan Peruntukan Industri di Kelurahan Juata Laut, Kelurahan Mamburungan dan Kelurahan Mamburungan Timur, serta kawasan minapolitan di Kelurahan Pantai Amal yang dikembangkan untuk meningkatkan investasi di Kota Tarakan.
e. Kawasan Peternakan di Kelurahan Karang Harapan yang dikembangkan sebagai pusat pengembangan peternakan terpadu.

2. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup meliputi :
   a. Kawasan konservasi mangrove dan bekantan di Kecamatan Tarakan Barat;
   b. Kawasan konservasi mangrove dan kepiting di Kecamatan Tarakan Tengah yang dipertahankan untuk kelestarian flora dan fauna endemik di Kota Tarakan.

e. Penelaahan KLHS Kota Tarakan Tahun 2019-2024

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Hasil KLHS

menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka: (1) kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan (2) segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi ketersediaan program dan kegiatan pelayanan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Jika ada program dan kegiatan pelayanan perangkat daerah kabupaten/kota yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS.

Dalam implementasi TPB, Indonesia mengembangkan indikator TPB sebanyak 319 indikator dan 169 target untuk pencapaian 17 tujuan TPB. Upaya pencapaian 319 indikator tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota dan Kota sesuai dengan pembagian wewenang yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hasil analisis wewenang indikator TPB berdasarkan wewenang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menunjukkan bahwa, dari 319 indikator TPB, Pemerintah Pusat memiliki wewenang sebanyak 303 indikator. Adapun pemerintah provinsi, pemerintah Kota, dan pemerintah kota memiliki wewenang pencapaian indikator TPB masing-masing sebanyak 235 indikator, 220 indikator dan 222 indikator. Hasil analisis wewenang indikator SDGs/TPB berdasarkan wewenang

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menunjukkan bahwa penapisan indikator SDGs/TPB yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Tarakan adalah 95 indikator, dengan mempertimbangkan beberapa indikator tidak sepenuhnya terdapat di wilayah Kota Tarakan karena aspek geografisnya.

1) Capaian TPB Kota Tarakan Terhadap Target Nasional

Berdasarkan hasil perhitungan dan pengolahan data menunjukkan bahwa indikator TPB di Kota Tarakan yang telah dilaksanakan baik mencapai target nasional atau belum target. Kota Tarakan masih menghadapi tantangan panjang dalam pencapaian indikator TPB yang didasarkan atas capaian jumlah indikator yang telah mencapai target nasional. Capaian indikator TPB Kota Tarakan terhadap target nasional diperoleh proporsi seperti dalam tabel dan gambar di bawah ini.

Tabel 4.38

Capaian TPB Kota Tarakan terhadap Target Nasional

TUJUAN TPB	KATEGORI CAPAIAN				Grand Total
	A	B	C	D	
1. Tanpa Kemiskinan	2	4		4	10
2. Tanpa Kelaparan		2		1	3
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera	3	7		4	14
Pendidikan Berkualitas	5	1		1	7
5. Kesetaraan Gender	3		1		4
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak	1	2		2	5
7. Energi Untuk Semua	1				1
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	2	1			3
9. Industri, Inovasi dan		1		1	2

TUJUAN TPB	KATEGORI CAPAIAN				Grand Total
	A	B	C	D	
Infrastruktur					
10. Berkurangnya Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	3	1			4
11. Kota dan Pemukiman Berkelanjutan	4		3	3	10
12. Produksi dan Konsumsi yang Bertanggung Jawab	2	2	2	1	7
13. Penanganan Perubahan Iklim			1	1	2
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	6	1	4	5	16
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	2	1	3	1	7
Grand Total	**34 (35,79%)**	**23 (24,21%)**	**14 (14,74%)**	**24 (25,26%)**	**95 (100%)**

Sumber: Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Kota Tarakan, 2021

Sebanyak 95 indikator TPB yang menjadi wewenang dan relevan di Pemerintah Kota Tarakan, sebanyak 34 indikator (35,79%) diantaranya sudah mencapai target nasional yang ditetapkan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017, sisanya yaitu 23 indikator (24,21%) belum mencapai target nasional yang ditetapkan. Sebanyak 14 indikator (14,74%) termasuk dalam kriteria indikator belum dilaksanakan dan belum tercapai. Sisanya 24 indikator (25,26%) tidak terdapat data.

Pengkategorian hasil capaian tersebut bertujuan untuk memetakan isu strategis apa saja yang perlu mendapatkan perhatian dalam pencapaian tujuan pembangunan di Kota Tarakan pada periode RPJMD yang telah ditentukan. Isu strategis yang perlu diprioritaskan yaitu target-target tujuan pembangunan berkelanjutan yang memiliki indikator sudah dilaksanakan di daerah tetapi tidak tercapai (B), dan indikator

yang belum dilaksanakan di daerah dan belum tercapai (C), serta perlu adanya dokumentasi dan penyusunan data sebagai baseline penentuan target TPB. Target TPB yang semua indikatornya sudah mencapai target nasional (A) juga perlu terus dijalankan untuk mempertahankan capaian indikator tersebut. Berikut grafik capaian TPB Kota Tarakan.

Gambar 4.4
Rincian Capaian TPB Kota Tarakan Menurut Tujuan

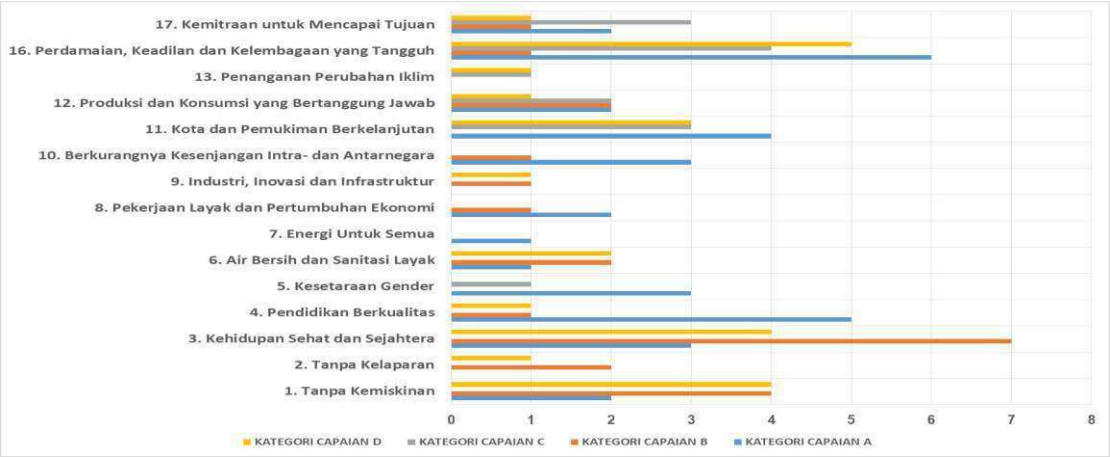

Sumber: Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Kota Tarakan, 2021

2) Capaian Indikator TPB pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Berdasarkan pada hasil analisis tiap indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kota Tarakan dengan total sebesar 95 indikator yang dikelompokkan ke dalam 4 kategori pencapaian yakni tercapainya target nasional (A), indikator sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional (B), indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target (C) dan indikator yang belum terdapat data (D). Capaian indikator Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada setiap kategori yaitu sebagai berikut.

Tabel 4.39
Capaian indikator TPB Organisasi Perangkat Daerah Kota Tarakan

Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	KATEGORI CAPAIAN				Grand Total
	A	B	C	D	
Sekretariat Daerah	1			1	**2**
Kantor Pertanahan Tarakan		1			**1**
Inspektorat	3	1		1	**5**
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	2	1	3		**6**
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	1				**1**
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja			3		**3**
Dinas Perhubungan		1			**1**
Dinas Pendidikan	5	1			**6**
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6	2	1	2	**11**
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1	1	2		**4**
Dinas Lingkungan Hidup	4	3	2	4	**13**
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan			1		**1**
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1			1	**2**
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		1	2		**3**
Dinas Kesehatan	4	4	6		**14**
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1		1		**2**
Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	1				**1**
Biro Hukum	1				**1**
Badan Pusat Statistik	2		1		**3**
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		1		3	**4**
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah	1		1		**2**
Badan Penanggulangan Bencana Daerah		5		2	**7**
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		2			**2**
Grand Total	**34**	**24**	**23**	**14**	**95**

Sumber: Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Kota Tarakan, 2021

Gambar 4.5
Capaian Indikator TPB Organisasi Perangkat Daerah Kota Tarakan

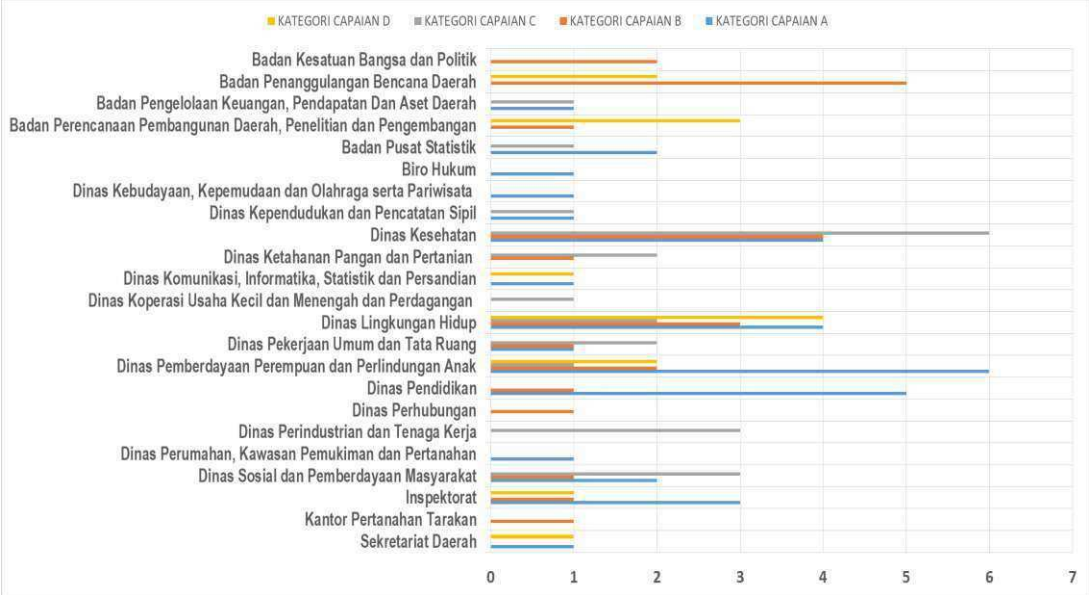

Sumber: Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Kota Tarakan, 2021

4.2.4 Penetapan Isu Strategis Kota Tarakan

Isu strategis merupakan permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang karena memiliki dampak yang signifikan bagi daerah dan masyarakat. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber antara lain: (1) Isu strategis dinamika internasional dan nasional yang berpengaruh terhadap Kota Tarakan, (2) Isu strategis dari kebijakan pembangunan daerah yang berpengaruh terhadap Kota Tarakan, dan (3) Isu strategis dari kebijakan pembangunan daerah RPJPD Kota Tarakan, RTRW Kota Tarakan.

Berdasarkan hasil telaahan terhadap isu kebijakan internasional dan kebijakan nasional, penalaahan kebijakan pembangunan daerah, serta permasalahan pembangunan yang

ada selama beberapa tahun terakhir, maka ditetapkan isu strategis Kota Tarakan sebagai berikut:

1. ***Sumber Daya Manusia Belum Kompetitif***

   Penyiapan sumber daya manusia yang berdaya saing mutlak dilakukan dimana ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas merupakan prasyarat guna mengahadapi tantangan global.

   Rendahnya daya saing sumber daya manusia Kota Tarakan terkait dengan relatif rendahnya kualitas pendidikan dan kesehatan. Rendahnya kualitas pendidikan dan kesehatan penduduk ini akan menjadi salah satu penghambat bagi berkembangnya sebuah daerah, mengingat penduduk merupakan sumber daya manusia yang potensial sebagai pelaku aktif untuk menggerakkan pembangunan.

2. ***Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintah Daerah***

   Optimalisasi pelayanan publik dalam rangka memperpendek rentang kendali (span of control) pemerintahan menjadi peran yang sesungguhnya yang harus menjadi pedoman utama, agar tujuan efisien dan efektif sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yang pada akhirnya diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing daerah, dan memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. ***Belum Optimalnya Pelayanan Infrastruktur Wilayah***

   Rendahnya aksesibilitas, konektivitas antar wilayah dan keterbatasan ketersediaan infrastruktur mengakibatkan ketertinggalan suatu daerah. Jaringan transportasi yang

meliputi jaringan jalan (infrastruktur transportasi) dan layanan transportasi memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketersediaan jaringan jalan mampu membuka isolasi wilayah sehingga berbagai potensi yang ada di wilayah tersebut dapat di manfaatkan dan dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat setempat. Pengangkutan orang dan barang diperlukan agar pergerakan orang dan barang tersebut dapat cepat aman dan ekonomis. Oleh karena itu ketersediaan layanan transportasi menjadi penting untuk meningkatkan mobilitas masyarakat, mendorong pergerakan orang dan barang, mendukung distribusi berbagai hasil pembangunan yang dapat diwujudkan. Layanan transportasi dapat membangkitkan peluang-peluang kerja dan pertumbuhan ekonomi.

4. ***Tingkat Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah Belum Optimal***

Kesenjangan wilayah dan ketidakmerataan ruang kegiatan ekonomi berpotensi mengakibatkan kemiskinan dan pengangguran. Jika dilihat dari pencapaian pembangunan yang diukur dari indicator makro, yakni pertumbuhan ekonomi, inflasi, penurunan tingkat kemiskinan, penurunan persentase tingkat pengangguran, dan Indeks Gini selama kurun waktu 2014-2019 laju pembangunan di Kota Tarakan sudah melebihi sasaran pembangunan nasional yang disyaratkan dalam RPJMN 2015-2019. Akan tetapi jika dilihat dari perkembangan wilayah menurut capaian indikator makro tersebut, terlihat masih terdapat kesenjangan wilayah. Hal ini mengakibatkan relatif tingginya tingkat kemiskinan dan

tingkat pengangguran di Kota Tarakan. Masih rendahnya pemerataan kesejahteraan akibat kemiskinan di Kota Tarakan dapat disebabkan oleh banyak faktor antara lain tidak meratanya distribusi kegiatan ekonomi, belum optimalnya pengendalian harga barang kebutuhan pokok masyarakat, belum optimalnya pengembangan usaha di sektor produktif bagi masyarakat, adanya keterbatasan kesempatan kerja atau belum optimalnya perluasan kesempatan kerja, kualitas tenaga kerja yang tidak sesuai dengan permintaan lapangan kerja yang tersedia.

5. ***Belum Optimalnya Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup***

   Penurunan daya dukung lingkungan akibat perubahan tata guna lahan untuk pembangunan yang tidak ramah lingkungan seperti kerusakan infrastruktur jalan, kebisingan aktifitas industri, kualitas udara yang menurun, banyak terjadi genangan air, meningkatnya sedimentasi dan pencemaran air sungai, menjadi sebuah keniscayaan. Untuk itu pemerintah daerah perlu menekan terjadinya kerusakan lingkungan sebagai dampak dari pembangunan di Kota Tarakan.

   Selain itu, pemerintah juga perlu tetap memperhatikan tersedianya kebutuhan akan energi dan air di masa depan, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk sebagai akibat terciptanya kegiatan-kegiatan ekonomi.

6. ***Potensi Meningkatnya Kerawanan dan Gangguan Ketertiban Umum***

   Kota Tarakan merupakan kota pulau yang terletak di Provinsi Kalimantan Utara yang merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia.

Oleh sebab itu masih sering dan banyak terjadi kegiatan illegal seperti perdagangan ilegal, human traffikcing, TKI ilegal hingga penyelundupan narkoba dan obat-obatan terlarang. Kegiatan ilegal khususnya perdagangan barang lintas batas disebabkan antara lain oleh faktor harga dan tingkat aksesibilitas. Selain itu, kegiatan pencurian ikan (illegal fishing) yang semakin meningkat di wilayah perairan Indonesia oleh kapal asing, termasuk di wilayah perairan provinsi ini yang sangat merugikan para nelayan lokal.

BAB

V

VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi

Visi pembangunan jangka menengah Kota Tarakan 2019-2024 merupakan penjabaran dari visi wali kota dan wakil wali kota terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kota Tarakan. Pernyataan visi Kota Tarakan periode 2019-2024 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Kota Tarakan sampai dengan Tahun 2024 difokuskan untuk mewujudkan visi. Adapun visi pembangunan jangka menengah Kota Tarakan 2019-2024, adalah:

"Terwujudnya Tarakan sebagai Kota Maju dan Sejahtera melalui *Smart City*"

Pernyataan visi Kota Tarakan 2019-2024 memiliki makna sebagai berikut:

Maju : Mengandung pengertian seiring dengan pertambahan waktu, Kota Tarakan harus terus maju dan bertambah baik disemua lini kehidupan. Masyarakat harus mampu menjadi pelopor dalam proses pembangunan daerah sehingga menempatkan masyarakat sebagai subyek bukan obyek pembangunan.

Maju merupakan cara pandang untuk berprestasi dan memiliki keunggulan. Masyarakat harus selalu berada paling depan dengan mengambil berbagai peran, prakarsa dan terobosan untuk

meningkatkan proses pembangunan di daerah dengan tetap mengacu pada upaya menggali nilai-nilai dan jati diri masyarakat Tarakan sebagai karateristik yang khas dengan kearifan lokalnya.

Sejahtera : Mengandung makna keselamatan seutuhnya. Sejahtera berarti hidup makmur, aman, penuh dengan keselamatan, ketenteraman dan kebahagian. Sejahtera, sangat erat maknanya dengan keberhasilan meraih cita-cita. Oleh karena itu, kondisi masyarakat daerah merupakan penentu dari kesejahteraan. Masyarakat yang akan menentukan arah pergerakan
bersama, bukan pemerintah. Namun, pemerintah memiliki begitu banyak akses untuk bisa mengelola modal bersama dan jaringan kerja sehingga kedudukannya dalam menciptakan kesejahteraan umum tak bisa digantikan. Disisi lain, masyarakat yang terkelola dengan baik senantiasa akan menghasilkan pemerintahan yang kuat pula.

Smart City: Dimaknai sebagai sebuah konsep perencanaan kota dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang akan membuat hidup yang lebih mudah dan sehat dengan tingkat efisiensi dan efektifitas yang tinggi. Pengertian *smart city* secara umum dapat dilihat dari cara menyelesaikan masalah dari tiga aspek utama kota: fisik, sosial dan ekonomi. sebuah kota dapat dikatakan *smart* bila bisa memecahkan masalah dari ketiga aspek tersebut dengan menggunakan teknologi dan sumber daya yang ada pada kota tersebut secara efisien dan efektif. Ada 6 (enam) indikator utama *smart city* (*Boyd Cohen*) menuju masyarakat maju dan sejahtera antara lain : *Smart Living* atau hidup yang cerdas, *Smart Governance* atau Pemerintahan yang cerdas, *Smart Economy* atau Ekonomi cerdas, *Smart Mobility* atau Mobilitas cerdas, *Smart*

Environment atau Lingkungan cerdas, dan *Smart People* atau Masyarakat cerdas.

Khusus *Smart Environtment* atau Lingkungan Cerdas dapat diartikan pembangunan yang dilakukan merupakan pembangunan yang berkelanjutan *(sustainable development)* dimana semua pembangunan ekonomi dan pembangunan infrastruktur sangat memperhatikan keberlangsungan lingkungan. Pernyataan visi diatas akan dicapai dengan misi yang relevan sehingga dalam periode 2019 sd 2024 visi tersebut akan terealisir.

5.2. Misi

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Kota Tarakan 2019-2024, yaitu:

1. *Meningkatkan sumber daya manusia yang terampil, mandiri, berkualitas, dan berdaya saing.*

   Misi pertama, Meningkatkan sumber daya manusia yang terampil, mandiri, berkualitas, dan berdaya saing mengandung arti bahwa Manusia sebagai insan menjadi perhatian utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia karena menjadi dasar dari kehidupan dirinya. Keberhasilan membangun manusia sebagai insan seutuhnya akan menentukan keberhasilan membangun manusia pada sisi lainnya, yakni pelaku yang tangguh dalam membangun diri dan lingkungannya. Pengetahuan, keterampilan, dan keahlian harus ditegakkan di atas dasar etika moral dan akhlak yang baik. Pembangunan manusia sebagai insan tidak terbatas pada kelompok umur tertentu, tetapi berlangsung dalam seluruh kehidupan manusia sejak janin sampai usia lanjut. Setiap tahap dari pertumbuhan tersebut terutama tahap awal

sangat mempengaruhi kualitasnya sehingga perhatian yang sungguh-sungguh akan membentuk manusia yang tangguh, baik dalam sikap mental, daya pikir maupun daya ciptanya, serta sehat jasmani dan rohaninya.

2. *Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif dan efesien yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro-rakyat.*

   Misi kedua, Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, professional, efektif dan efesien yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro rakyat mengandung arti bahwa suatu tata pemerintahan terdapat pihak pemangku kepentingan yaitu pemerintahan, masyarakat dan sektor swasta. Salah satu aspek penting dari tata pemerintahan yaitu pengaturan mengenai penggunaan kewenangan, dimana dalam mengatur kewenangan disertai juga dengan pengembangan prinsip partisipasi publik dan akuntabilitas publik. Penerapan prinsip akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan termasuk keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan pelaksanaan (akuntabilitas kinerja) secara periodik.

3. *Meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur publik yang cepat, mudah, murah, adil, dan transparan.*

   Misi ketiga, Meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur publik yang cepat, murah, adil, dan transparan mengandung arti bahwa pembangunan infrastruktur merupakan bagian integral pembangunan nasional dan roda

penggerak pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur diyakini sebagai motor pembangunan suatu kawasan. Infrastruktur juga mempunyai peran yang penting dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Jaringan transportasi dan telekomunikasi merupakan salah satu perekat utama Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tulang punggung distribusi baik barang, penumpang maupun jasa, serta merupakan aspek penting dalam peningkatan produktivitas sektor produksi. Ketersediaan utilitas perumahan dan permukiman, seperti layanan air minum dan sanitasi secara luas dan merata serta pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan turut menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat.

4. *Mengembangkan ekonomi daerah yang berorientasi kepada kepentingan rakyat (ekonomi pro rakyat) melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata dan pertanian dalam arti luas.*

   Misi keempat, Mengembangkan ekonomi daerah yang berorientasi kepada kepentingan rakyat (ekonomi pro rakyat) melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata dan pertanian dalam arti luas mengandung arti bahwa menggapai pertumbuhan ekonomi berkualitas menjadi tantangan tersendiri bagi setiap daerah, pertumbuhan ekonomi suatu daerah pada dasarnya akan berkualitas, jika pertumbuhan ekonominya berkonstribusi menekan berkurangnya jumlah penduduk miskin. Pertumbuhan ekonomi berkualitas juga tercermin dari aktivitas perekonomian yang mampu memberikan pemerataan pendapatan masyarakat, serta mendongkrak tumbuhnya lapangan kerja baru yang memiliki

daya serap yang tinggi terhadap pertumbuhan tenaga kerja. Fokus pada pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas penting karena secara empirik berkorelasi positif terhadap penurunan angka kemiskinan, penciptaan lapangan kerja serta peningkatan indikator kesejahteraan lainnya.

5. *Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam melalui peningkatan nilai tambah yang berwawasan lingkungan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna, kreatif dan inovatif berbasiskan ilmu pengetahuan.*

   Misi kelima, Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam melalui peningkatan nilai tambah yang berwawasan lingkungan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna, kreatif dan inovatif berbasiskan ilmu pengetahuan mengandung arti bahwa sumber daya alam senantiasa harus dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan. Prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) di seluruh sektor menjadi prasyarat utama untuk diinternalisasikan ke dalam kebijakan, terutama dalam mendorong investasi pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang. Prinsip-prinsip tersebut saling sinergis dan melengkapi dengan pengembangan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mendasarkan pada asas partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas yang mendorong upaya perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup termasuk didalamnya mitigasi bencana.

6. *Meningkatkan pembangunan akhlak dan moral sesuai kearifan lokal serta mewujudkan kepastian hukum.*

Misi keenam, Meningkatkan pembangunan akhlak dan moral sesuai kearifan lokal serta mewujudkan kepastian hukum mengandung arti bahwa pembangunan akhlak dan moral sangat penting, dimana apabila akhlak dan moral dijunjung tinggi maka tatanan kehidupan akan mengarah pada kepastian masa depan yang baik.

5.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Bab ini memuat tujuan dan sasaran pembangunan Kota Tarakan yang dirumuskan berdasarkan pendekatan teknokratik, yaitu dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah berdasarkan data dan informasi yang telah digali dan dianalisis pada bab-bab sebelumnya.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Perumusan tujuan pembangunan jangka menengah Kota Tarakan secara teknokratik ditempuh dengan menelaah arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Tarakan, kebijakan pembangunan jangka menengah nasional dan isu-isu strategis pembangunan Kota Tarakan yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya. Selanjutnya, tujuan tersebut dikolaborasi dengan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan terpilih untuk menghasilkan rumusan tujuan pembangunan Kota Tarakan sampai dengan Tahun 2024.

Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan ke sasaran. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan

daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah. Sasaran RPJMD selain menerjemahkan tujuan dari visi dan misi kepala daerah terpilih, sekurang-kurangnya berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenaan. Hal ini dimaksudkan agar sasaran pembangunan jangka menengah Kota Tarakan merupakan sarana untuk melaksanakan dan sekaligus upaya untuk mewujudkan sasaran pembangunan jangka panjang Kota Tarakan 2005-2025.

Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kota Tarakan periode 2019-2024 selain sebagai penjabaran visi dan misi Kota Tarakan Tahun 2019-2024, juga dilakukan dalam upaya mencapaian arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Kota Tarakan Tahun 2005-2025 periode berkenaan.

Dalam proses perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Tarakan, digunakan pendekatan holistik-tematik dan integratif. Pendekatan holistik-tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan aspek pembangunan serta unsur penting dan strategik yang berperan dalam pencapaian visi dan misi. Sementara pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan untuk merumuskan sasaran pembangunan yang fokus dan terukur dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan.

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kota Tarakan Tahun 2019-2024 dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur. Dengan demikian, apa yang mau dicapai atau diubah dalam pembangunan lima tahun kedepan menjadi semakin jelas dan dapat diukur pencapaiannya.

Berdasarkan hasil perumusan, maka penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah Kota Tarakan 2019-2024

terdiri dari 6 (enam) tujuan dan 18 (delapan belas) sasaran. Setiap tujuan dan sasaran pembangunan disertai dengan indikator dan target pembangunan setiap tahun selama 5 (lima) tahun. Adapun tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kota Tarakan disajikan pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1
Realisasi Tujuan dan Sasaran RPJMD
Kota Tarakan Tahun 2020
Visi : "Terwujudnya Tarakan Sebagai Kota Maju Dan Sejahtera Melalui *Smart City*"

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	Satuan	TARGET 2020	REALISASI 2020
Misi I : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Terampil, Mandiri, Berkualitas, Dan Berdaya Saing				
Tujuan 1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	76,93	75,83
1. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,18	73,97
2. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Harapan Lama sekolah	Tahun	13,85	14,02
	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,96	9,97
3. Meningkatnya daya beli masyarakat	Pengeluaran Perkapita Masyarakat	Rupiah/ Bulan	1.700.000	1.713.021
Misi II : Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Amanah, Profesional, Efektif Dan Efisien Yang Berbasis Pada Sistem Penganggaran Yang Pro-Rakyat				
Tujuan 2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	57,00	53,91
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan	Opini BPK	Opini	WTP	WTP
	Nilai SAKIP	Nilai/ Predikat	62,00/B	62,67/B
5. Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif dan Efisien	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	73	49,28

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	Satuan	TARGET 2020	REALISASI 2020
~~6.~~ Terwujudnya Birokrasi Yang Memiliki Pelayanan Publik Yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	79,59	84,91
Misi III : Meningkatkan Dan Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Publik Yang Cepat, Mudah, Murah, Adil, Dan Transparan				
Tujuan 3. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks	78,50	n/a
7. Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau	Persentase Ruang Terbuka Hijau	Persen	46,54	50,40
8. Meningkatnya pelayanan air bersih	Persentase Rumah Tangga Yang Dapat Mengakses Air Bersih	Persen	67,51	85,53
9. Meningkatnya aksesibilitas perkotaan	Persentase panjang jalan dengan kondisi mantap	Persen	57,54	70,08
	Rasio Volume Kendaraan per Kapasitas Jalan	Rasio	0,57	0,57
10. Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni untuk MBR	Persentase perumahan DP 0% untuk MBR yang terbangun	Persen	10	0,18
11. Menurunnya luas kawasan kumuh	Persentase luas kawasan kumuh	Persen	47,33	38,34
Misi IV : Mengembangkan Ekonomi Daerah Yang Berorientasi Kepada Kepentingan Rakyat (Ekonomi Pro Rakyat) Melalui Sektor Perdagangan, Jasa, Industri, Pariwisata Dan Pertanian Dalam Arti Luas				
Tujuan 4. Meningkatnya Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Daerah	Indeks Gini	Indeks	0,30	0,295
12. Menurunnya kemiskinan	Angka Kemiskinan	Persen	5,85	6,24
13. Menurunya pengangguran.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,84	5,86
14. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah	Laju pertumbuhan ekonomi	Angka	7,00	-0,78
15. Terkendalinya Inflasi daerah	Tingkat Inflasi	Angka	4,00	1,15
Misi V : Meningkatkan Pemanfaatan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Melalui Peningkatan Nilai Tambah Yang Berwawasan Lingkungan Dengan Memanfaatkan Teknologi Tepat Guna, Kreativitas Dan Inovatif Berdasarkan Ilmu Pengetahuan				
Tujuan 5. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	64	67,07
16. Menurunnya pencemaran lingkungan	Indeks Kualitas Air	Indeks	44,00	45,56

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	Satuan	TARGET 2020	REALISASI 2020
	Indeks Kualitas Udara	Indeks	87	93,42
	Indeks Tutupan Lahan	Indeks	55,50	55,30
	Persentase sampah yang dikelola	Persen	79,50	90,77
17. Meningkatnya penanganan kebencanaan yang efektif	Persentase Pelayanan Bencana Kebakaran	Persen	100	92
	Persentase Pelayanan Bencana Longsor	Persen	87,00	100
	Persentase Luas Genangan Banjir	Persen	0,229	0,182
Misi VI : Meningkatkan Pembangunan Akhlak Dan Moral Sesuai Kearifan Lokal Serta Mewujudkan Kepastian Hukum				
Tujuan 6. Meningkatnya kerukunan, ketentraman, dan ketertiban di masyarakat	Indeks Toleransi	Indeks	5,25	5,337
18. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban kota	Persentase pelanggaran K3 yang tertangani	Persen	100	100

Tabel 5.2
Rumusan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD
Kota Tarakan Tahun 2021-2024
Visi : "Terwujudnya Tarakan Sebagai Kota Maju Dan Sejahtera Melalui *Smart City*"

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	
Misi I : Meningkatkan sumber daya manusia yang terampil, mandiri, berkualitas, dan berdaya saing							
Tujuan 1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,83	77,48	78,03	78,58	79,13	79,13
Sasaran 1, Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	73,97	74,29	74,40	74,51	74,62	74,62
Sasaran 2, Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Harapan Lama sekolah	14,02	13,93	14,01	14,09	14,17	14,17
	Rata-Rata Lama Sekolah	9,97	9,97	9,98	9,99	10,00	10,00
Sasaran 3, Meningkatnya daya beli masyarakat	Pengeluaran Rata-rata Perkapita	Rp1.713.021	Rp1.800.000	Rp1.900.000	Rp2.000.000	Rp2.100.000	Rp2.100.000
Misi II : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif dan efesien yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro-rakyat							

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	
Tujuan 2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	53,91	58,00	59,00	60,00	61,00	61,00
Sasaran 4, Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Nilai SAKIP	62,67/B	64,00/B	66,00/B	70,01/BB	72,00/BB	72,00/BB
Sasaran 5, Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif dan Efisien	Indeks Profesionalitas ASN	49,28	55	60	65	70	70
Sasaran 6, Terwujudnya Birokrasi Yang Memiliki Pelayanan Publik Yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,91	84,50	84,75	85	85,25	85,25
Misi III : Meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur publik yang cepat, mudah, murah, adil, dan transparan.							

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	
Tujuan 3. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	n/a	79,00	79,50	80,00	81,50	81,50
Sasaran 7, Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau	Persentase Ruang Terbuka Hijau	50,40%	52,96%	55,51%	58,07%	60,63%	60,63%
Sasaran 8, Meningkatnya pelayanan air bersih	Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air Minum	86,52%	74,38%	92,34%	95,62%	95,96%	95,96%
Sasaran 9, Meningkatnya sarana prasarana perkotaan	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	72,63%	72,75%	72,87%	72,99%	73,11%	73,11%
	Persentase Penambahan Bangunan Pemerintah dan Fasilitas Umum	16,67%	57,58%	72,73%	87,88%	100,00%	100,00%

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	
	Persentase Bangunan dan Lingkungan Yang Tertata	21,12%	45,00%	58,75%	82,50%	100,00%	100,00%
	Persentase Panjang Jalan dengan Kondisi Mantap	70,08%	60,65%	64,14%	65,63%	65,94%	65,94%
	Persentase pembinaan jasa konstruksi	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	82,49%	86,01%	89,54%	93,94%	98,35%	98,35%
	Rasio Panjang Jalan Dibagi Jumlah Kendaraan	1,38	1,29	1,27	1,25	1,23	1,23
	Persentase Pemeliharaan Pelabuhan	n/a	0,00%	30,00%	60,00%	100,00%	100,00%

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	
Sasaran 10, Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni untuk MBR	Persentase Rumah untuk MBR yang terbangun dan terenovasi	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%	100,00%
Sasaran 11, Menurunnya luas kawasan kumuh	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	74,96%	49,17%	31,74%	17,64%	6,87%	6,87%
Misi IV : Mengembangkan ekonomi daerah yang berorientasi kepada kepentingan rakyat (Ekonomi Pro Rakyat) melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata dan pertanian dalam arti luas							
Tujuan 4. Meningkatnya Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Daerah	Gini Rasio	0,295	0,30	0,29	0,29	0,28	0,28
Sasaran 12, Menurunnya kemiskinan	Angka Kemiskinan	6,24	5,70	5,55	5,40	5,25	5,25
Sasaran 13, Menurunnya pengangguran,	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,86	5,79	5,74	5,69	5,64	5,64

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	
Sasaran 14, Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah	Laju pertumbuhan ekonomi	-0,78	5,65	5,93	6,23	6,53	6,53
Sasaran 15, Terkendalinya Inflasi daerah	Tingkat Inflasi	1,15	3,70	3,50	3,20	3,00	3,00
Misi V : Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam melalui peningkatan nilai tambah yang berwawasan lingkungan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna, kreativitas dan inovatif berdasarkan ilmu pengetahuan							
Tujuan 5. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,07	68,83	69,28	69,74	70,19	70,19
Sasaran 16, Menurunnya pencemaran lingkungan	Indeks Kualitas Air	45.56	54,82	54.92	55,02	55,12	55,12
	Indeks Kualitas Udara	93.42	91.45	91.55	91.66	91.77	91.77

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	
	Indeks Tutupan Lahan	55,30	51,06	52,76	54,46	56,16	56,16
	Persentase sampah yang dikelola	90,77%	98,00%	99,00%	99,00%	98,00%	98,00%
Sasaran 17, Meningkatnya penanganan kebencanaan yang efektif	Persentase Luas genangan banjir	0,182%	0,23%	0,12%	0,11%	0,10%	0,10%
	Persentase pelayanan Kebencanaan	n/a	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase pelayanan bencana kebakaran	92%	100%	100%	100%	100%	100%

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	
Misi VI : Meningkatkan Pembangunan Akhlak Dan Moral Sesuai Kearifan Lokal Serta Mewujudkan Kepastian Hukum							
Tujuan 6. Meningkatnya kerukunan, ketentraman, dan ketertiban di masyarakat	Indeks Kota Toleran	5,337	5,30	5,35	5,40	5,45	5,45
Sasaran 18, Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban kota	Persentase pelanggaran K3 yang tertangani	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

5.4. Tujuan dan Sasaran Perubahan

Sebagaimana yang dijelaskan pada Bab I, bahwa perlu dilakukan perubahan RPJMD agar terjadi sinkronisasi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dengan pemerintah Kota Tarakan. Perubahan juga dilakukan untuk menyesuaikan beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri sekaligus mengantisipasi pandemi Covid-19 yang berkepanjangan sehingga perlu dilakukan perubahan sasaran, indikator dan target. Ada satu sasaran dan beberapa target indikator tujuan dan sasaran yang perlu dilakukan perubahan yaitu:

1. Sasaran Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif dengan indikator Indeks Profesionalitas ASN;

   Dilakukan perubahan terhadap targetnya setiap tahun karena target yang ditetapkan terlalu tinggi dan tidak realistis. Capaian Indeks Profesionalitas ASN pada tahun 2020 hanya 49,28 sedangkan targetnya adalah 73. Kriteria Pengukuran Tingkat Profesionalitas ASN diukur melalui dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin. Pada tahun 2020 kegiatan peningkatan jenjang pendidikan terakhir tidak dianggarkan, kegiatan pengembangan kompetensi ASN dilaksanakan tapi tidak banyak ASN yang bisa mengikuti diklat penjenjangan karena keterbatasan anggaran, apalagi dengan adanya pandemi covid-19, dilakukan pembatasan tugas luar atau pelatihan yang bersifat outdoor training dan lain-lain, sehingga pada tahun 2020 sangat minim pegawai yang ditingkatkan pendidikannya dan juga katena adanya mutasi / penempatan ASN yang tidak sesuai dengan sertifikat diklat tertentu yang sudah dimilikinya. Dengan demikian target skor 75 pada tahun 2021 diturunkan menjadi 55 dan dianggap terjadi peningkatan skor sebanyak 5

per tahun. Pada akhir periode ditargetkan skor yang diperoleh adalah 70.

2. Sasaran Terwujudnya Birokrasi Yang Memiliki Pelayanan Publik Yang Berkualitas dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilakukan perubahan target setiap tahunnya mengingat capaian tahun 2020 sudah melampaui target, bahkan target tahun 2021. Untuk itu perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan target yaitu pada tahun 2021 menjadi 84,50 dan pada akhir periode yaitu tahun 2024 ditargetkan dengan nilai 85,25.
3. Sasaran Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau dengan indikator Persentase Ruang Terbuka Hijau dilakukan perubahan terhadap target indikator sasaran. Dalam hal ini eksisting luasan RTH berdasarkan RTRW tahun 2021 seluas 1463,07 Ha dari 2902,97 atau 20 persen dari yang ditargetkan.

   Menurut Perda RTRW nomor 3 Tahun 2021 RTH ditentukan seluas 2.648 Ha atau 18,75 persen. Eksisting RTH pada tahun 2020 seluas 1.463,07 Ha. Selisih Perda RTRW dengan Eksisting RTH adalah sebesar 1.185 Ha (selama 20 tahun), sehingga dari selisih ini setiap tahun ditentukan RTH sebesar 59,2465 Ha Disisi lain pernyataan dari Wali Kota bahwa selama kurun waktu tahun 2021-2025 akan disiapkan 75 Ha, atau ditentukan setiap tahun seluas 15 Ha. Dengan demikian dari tahun 2021 sd 2025 setiap tahun ditargetkan pertambahan RTH seluas 74,25 Ha.

   Pada tahun 2021 ditargetkan seluas 1.463,07 Ha ditambah 74,25 Ha atau seluas 1.537,32 Ha atau RTH menjadi 52,96 persen dari kewajiban 20 persen RTH. Penambahan RTH seluas 74,25 Ha setiap tahunnya sehingga pada tahun 2024 akan terdapat RTH seluas 1.760,07 Ha atau 60,63 persen dari 20 persen RTH yang diwajibkan.

4. Sasaran Meningkatnya aksesibilitas perkotaan dirubah menjadi Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perkotaan, agar cakupan yang diukur lebih luas dengan indikator persentase panjang jalan dengan kondisi mantap, rasio jumlah kendaraan per panjang jalan, Persentase pembinaan jasa konstruksi, Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang, Persentase Penambahan Bangunan Pemerintah dan Fasilitas Umum, Persentase Bangunan dan Lingkungan Yang Tertata, Persentase Pembangunan dan Pemeliharaan Pelabuhan, Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik.
5. Ketersediaan Rumah Layak Huni;

   Perubahan indikator sasaran meningkatnya ketersediaan rumah layak huni untuk MBR yaitu indikator persentase perumahan DP 0% untuk MBR yang terbangun menjadi Persentase Rumah untuk MBR yang terbangun dan terenovasi, karena kondisi pandemic covid-19 menyebabkan kemampuan daya beli masyarakat juga mengalami penurunan sehingga dilakukan penyesuaian target yang terukur hingga tahun 2024. Dengan menggunakan based line tahun 2020 dimana jumlah renovasi rumah layak huni yang dilakukan sebanyak 900 unit dan terbangunnya rumah layak huni sebanyak 18 unit. Dengan data diatas, maka dapat dilakukan perubahan target pada tahun 2021 menjadi 920 unit rumah layak huni terbangun dan terenovasi atau sebesar 40%, dan ditargetkan terjadi pertambahan sebanyak 460 unit pertahun. Dan jumlah rumah layak huni pada tahun 2024 ditargetkan 100% yaitu sebanyak 2.300 unit rumah layak huni yang terbangun dan terenovasi.

6. Luas Kawasan Kumuh

   Luas kawasan kumuh pada tahun 2020 seluas 130,03 Ha yang yang tersebar di 10 kawasan yakni 4 kawasan kumuh di kecamatan Tarakan Timur, 3 kawasan kumuh di kecamatan Tarakan Tengah, 2 kawasan kumuh di Kecamatan Tarakan Barat, dan 1 kawasan kumuh di Kecamatan Tarakan Utara. Pada tahun 2020, capaian pengurangan kawasan kumuh seluas 32,56 Ha sehingga luas lingkungan pemukiman kumuh menjadi 97,47 Ha atau 74,56%. Pada tahun 2021 ditargetkan luas lingkungan pemukiman kumuh berkurang menjadi 63,93 Ha atau 49,17%. Selanjutnya luas lingkungan pemukiman kumuh ditargetkan pada tahun 2022 dan 2023 seluas 41,27 Ha dan 22,94 Ha atau sebesar 31,74% dan 17,64%. Pada akhir periode ditargetkan luas lingkungan pemukiman kumuh menjadi 8,93 Ha atau 6,87%.

7. Pertumbuhan Ekonomi.

   Indikator sasaran Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yaitu Pertumbuhan ekonomi perlu dilakukan penyesuaian target, mengingat pada tahun 2020 terjadi kondisi tidak normal (masa pandemic covid 19) sehingga pertumbuhan ekonomi daerah yang didominasi sektor perdagangan dan jasa menjadi sangat terganggu dan terpengaruh. Hal tersebut tampak pada kondisi pertumbuhan ekonomi nasional yang terkontraksi -2,07% dan untuk Tarakan terkontraksi -0,78%. Pertumbuhan ekonomi nasional memiliki perubahan target tahun 2021 sebesar (4,3%-5,3%). Sehingga untuk Kota Tarakan disesuaikan dengan taget pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan kondisi diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 dan tahun-tahun berikutnya adalah kondisi tidak normal sehingga perlu

dilakukan perubahan target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024.

Untuk kondisi tidak normal untuk menentukan target tersebut tidak dapat digunakan metode peramalan garis lurus (least square) dikarenakan adanya outlier atau error yang terjadi. Sehingga perlu dilakukan metode Comparative Estimator. Dalam hal yang sudah diramalkan oleh BPS untuk tahun 2021 adalah pertumbuhan ekonomi nasional yaitu berkisar antara 4,3 – 5,3 atau dapat dikatakan estimasi optimis adalah 5,3 persen dan estimasi pesimis sebesar 4,3 persen.

Perbandingan yang dimaksud adalah perbandingan kondisi pada tahun 2020 dimana Kota Tarakan dan Nasional mempunyai kondisi yang sama yaitu sama-sama mengalami pandemi Covid-19, dimana dilakukan perbandingan antara pertumbuhan ekonomi nasional sebesar -2,07 dibanding pertumbuhan ekonomi Kota Tarakan sebesar -0,78 atau dengan perbandingan 2,65 : 1 dan mengingat banyak ketidakpastian perbandingan ini diturunkan 50 persen sehingga menjadi 1,325 : 1. Sehingga pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kota Tarakan ditargetkan menjadi 4,3 + 1,325 = 5,625. Untuk tahun-tahun berikutnya karena pandemi tidak diketahui pasti kapan berakhirnya, namun mengingat vaksinasi Covid-19 sudah dijalankan dapat dipastikan aktivitas ekonomi akan semakin membaik. Namun diperkirakan untuk menaikkan 1 persen pertumbuhan dari 5,63 persen tersebut. Untuk itu diprediksi pertambahan pertumbuhan ekonomi paling tinggi adalah 0,3 persen per tahun. Sehingga target pertumbuhan ekonomi dapat ditargetkan sebagai berikut:

Tabel 5.3
Target Pertumbuhan Ekonomi Kota Tarakan 2021-2024

Tahun	RPJMD 2019-2024	Perubahan RPJMD 2019-2024
	Target Pertumbuhan	Target Pertumbuhan
2021	7,30	5,63
2022	7,50	5,93
2023	7,80	6,23
2024	8,00	6,53

8. Tujuan meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, dilakukan penyesuaian target, karena realisasi pada tahun 2020 tercatat melampaui target secara signifikan dan perlu dilakukan penyesuaian sesuai hasil konsultasi dan koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam menyusun target IKLH. Indeks kualitas lingkungan hidup pada tahun 2021 ditingkatkan targetnya menjadi 68,83 dan pada akhir periode yakni tahun 2024 ditargetkan sebesar 70,19.
9. Target indikator sasaran Menurunnya pencemaran lingkungan dengan indikator indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks tutupan lahan serta persentase sampah yang dikelola dilakukan penyesuaian target dengan capaian tahun 2020, dimana capaian tersebut melampaui secara signifikan target yang telah ditetapkan sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan agar lebih realistis dan memberi motivasi peningkatan capaian dan kinerja perangkat daerah yang bersangkutan.
10. Indikator sasaran meningkatnya penanganan kebencanaan yang efektif yaitu persentase pelayanan bencana longsor diubah menjadi persentase pelayanan kebencanaan karena penanganan bencana yang terjadi tidak hanya bencana longsor saja tetapi

terdapat juga jenis bencana lainnya seperti gempa, banjir, tsunami, dan lain-lain sehingga targetnya juga dilakukan penyesuaian, mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 ditingkatkan target pertahunnya menjadi 100%.

5.4. Program Unggulan OKE

Program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih Kota Tarakan merupakan hal-hal yang strategik dan untuk itu perlu dikedepankan dalam upaya mencapai visi dan misi. Program unggulan OKE, meliputi:

1. Program Pemberdayaan Rukun Tetangga :
   a. Dana alokasi khusus 50 – 200 juta per RT per tahun untuk bidang fisik, ekonomi, sosial dan budaya.
   b. Insentif RT sebesar 1 – 1,2 juta perbulan.
2. Program Bidang Pendidikan :
   a. Pemberian apresiasi bagi siswa berprestasi
   b. Program pendidikan gratis untuk SD dan SMP dengan tetap memperhatikan pemenuhan anggran untuk 8 standar pendidikan nasional
   c. Pemberian beasiswa 1.000 siswa pertahun
3. Program Bidang Kesehatan :
   a. Pemenuhan kecukupan biaya operasional kesehatan
   b. Pelayanan Puskesmas buka 24 jam
   c. Akselerasi operasionalisasi Rumah Sakit Kota Tarakan.
4. Program Pembangunan Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan atau Tanpa Uang Muka (DP 0%);
5. Program Gratis Pemasangan Sambungan Rumah Air PDAM;

6. Program Restorasi :
   a. Jaminan kelancaran pembayaran tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) ASN, insentif guru honor, veteran dan pensiunan, guru ngaji dan sekolah minggu, dan insentif kader;
   b. Pengembalian pemberian uang lauk pauk (ULP) ASN.
7. Program Jaring Pengaman Sosial (Social Security Net) :
   a. Fasiliasi asuransi kesehatan uniiversal;
   b. Program social security number (Kartu Pintar);
   c. Program terpadu dokter, pemadam kebakaran dan keamanan "On Call" untuk kondisi darurat;
   d. Jaminan kesehatan dan kecelakaan kerja untuk tenaga kontrak, pasukan kuning dan pasukan hijau.
8. Program Penuntasan Masalah Pertanahan;
9. Fasilitasi Kehandalan Energi Listrik dan Jaringan Telpon/Internet serta Penyederhanaan Perijinan dalam Mendukung Pengembangan Investasi Kota Tarakan;
10. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Jalan Darat dan Jembatan;
11. Program Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni;
12. Program Peningkatan Ketahanan Pangan dan Perikanan berupa bantuan pupuk, bibit, sarana dan prasarana serta fasilitasi pemasaran produk pertanian dan perikanan/kelautan;
13. Pengembangan Kawasan Sentra Industri Kecil Menengah Terpadu;
14. Program Pengembangan Seni Budaya dan Olahraga, Kepemudaan dan Kewanitaan;
15. Program Pengembangan Taman Bermain Ramah Anak (TBRA) Satu Kelurahan Satu Playground;

16. Program Smart City – Plus.

Program-program unggulan ini akan diterjemahkan lebih lanjut kedalam program pembangunan daerah yang akan disajikan pada Bab VI RPJMD ini.

Tabel 5.4

Program Unggulan OKE

NO.	BIDANG	JANJI POLITIK
1	***PELAYANAN PUBLIK KESEHATAN***	1. Jaminan Kesehatan dan Kecelakaan Kerja 2. Biaya Operasional Kesehatan (BOK), puskesmas 24 Jam.. 3. Pemenuhan kecukupan biaya operasional kesehatan 4. Pelayanan Puskesmas 24 jam 5. Akselerasi operasionalisasi Rumah Sakit Kota Tarakan 6. Program Jaring Pengaman Sosial (Social Security Net) 7. Jaminan Kesehatan dan Kecelakaan Kerja untuk Tenaga Kontrak, Pasukan Kuning dan Pasukan Hijau
2	***PELAYANAN PUBLIK PENDIDIKAN***	1. Pemberian Apresiasi bagi siswa berprestasi 2. Program Pendidikan gratis untuk SD dan SMP dengan tetap memperhatikan pemenuhan anggaran untuk 8 standar pendidikan pendidikan nasional 3. Pemberian beasiswa 1.000 siswa pertahun
3	***PEMBERDAYAAN MASYARAKAT***	1. Dana Alokasi Khusus 50-200 Juta per RT per Tahun untuk Bidang Fisik, Sosial, Budaya. 2. Pemberian Insentif RT 12-14,4 juta per Tahun

NO.	BIDANG	JANJI POLITIK
4	***EKONOMI***	1. Fasilitasi Kehandalan Energi Listrik dan Jaringan Telepon/Internet serta Penyederhanaan Perijinan dalam Mendukung Pengembangan Investasi Kota Tarakan 2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan dan Perikanan Berupa Bantuan Pupuk, Bibit, Sarana dan Prasarana serta Fasilitasi Pemasaran Produk Pertanian dan Perikanan/Kelautan 3. Pengembangan Kawasan Sentra Industri Kecil Menengah Terpadu
5	***PERTANAHAN***	1. Program Penuntasan Masalah Pertanahan
6	***FASILITAS PUBLIK (DPU-TR, PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP)***	1. Program Pembangunan perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan atau Tanpa Uang Muka (DP 0%) 2. Program gratis pemasangan sambungan rumah air PDAM 3. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Jalan Darat dan Jembatan 4. Program Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 5. Program Pengembangan Taman Bermain Ramah Anak (TBRA) Satu Kelurahan Satu Playground.

NO.	BIDANG	JANJI POLITIK
7	***PROGRAM RESTORASI***	1. Jaminan kelancaran pembayaran tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) ASN, insentif guru honor, veteran dan pensiunan, guru ngaji dan sekolah minggu dan insentif kader 2. Pengembalian pemberian uang lauk pauk (ULP) ASN
8	***SENI BUDAYA, OLAHRAGA, KEPEMUDAAN DAN KEWANITAAN***	1. Pembinaan dan Pengembangan Seni Budaya 2. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 3. Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan 4. Pembinaan dan Pengembangan Kewanitaan
9	***PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK***	1. Program Smart City – Plus Kota Tarakan sebagai kota cerdas merupakan pengembangan sistem pengelolaan pemerintahan secara digital yang sudah lama dilakukan, menjadi lebih terkoneksi dan lebih melibatkan pihak lain untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat akan lebih efisien, efektif, terbuka, adil dan akuntabel. Hal itu bisa terwujud dengan terbangun dan terkelolanya sistem data

NO.	BIDANG	JANJI POLITIK
		besar, *command centre*, pengelolaan lalu lintas dan parkir, administrasi kependudukan, pelayanan kesehatan, pendidikan, pariwisata, UMKM, Wi-Fi gratis di *public space* secara digital, serta pengembangan aplikasi yang lebih mudah dan sederhana sehingga mudah untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Konsep ini tidak hanya berhenti pada digitalisasi pengelolaan pemerintah dan pelayanan ke masyarakat. Smart City pada tindak lanjutnya juga menyentuh pembangunan untuk terciptanya pemukiman dan lingkungan, sarana mobilitas warga dan aktifitas ekonomi yang cerdas, yaitu ekosistem lingkungan yang tertata dan nyaman bagi siapa saja. Pemanfaatan teknologi informasi dilakukan dalam rangka peningkatan informasi publik. Hal ini juga mendukung kebijakan nasional yang tertuang dalam isu strategis tatakelola RPJMN 2015-2019 yaitu peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik. Melalui keterbukaan informasi dan komunikasi publik ini maka penduduk di Kota Tarakan

NO.	BIDANG	JANJI POLITIK
		diharapkan dapat memperlancar informasi dan semakin memudahkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Untuk mendukung visi **"Terwujudnya Tarakan sebagai Kota Maju dan Sejahtera melalui Smart City"** maka perlu dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Tarakan Tahun 2019-2024. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kota Tarakan melakukan upaya untuk mencapai Visi, Misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan.

Strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah tahun 2019- 2024 disusun berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan di Kota Tarakan.

6.1. Strategi

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi berisi langkah-langkah yang berupa program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/ perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Strategi adalah salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi tersebut berupa pernyataan yang

menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi diturunkan dalam arah kebijakan dan program pembangunan daerah sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan.

Arsitektur perencanaan pembangunan daerah dipisahkan menjadi dua:

1. Perencanaan Strategik yaitu perencanaan pembangunan daerah yangmenekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.
2. Perencanaan Operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan.

Perencanaan strategik didukung oleh keberhasilan kinerja dari implementasi perencanaan operasional dengan kerangka sebagaimanadijelaskan dalam bagan berikut ini:

Gambar 6.1 Perencanaan Strategik

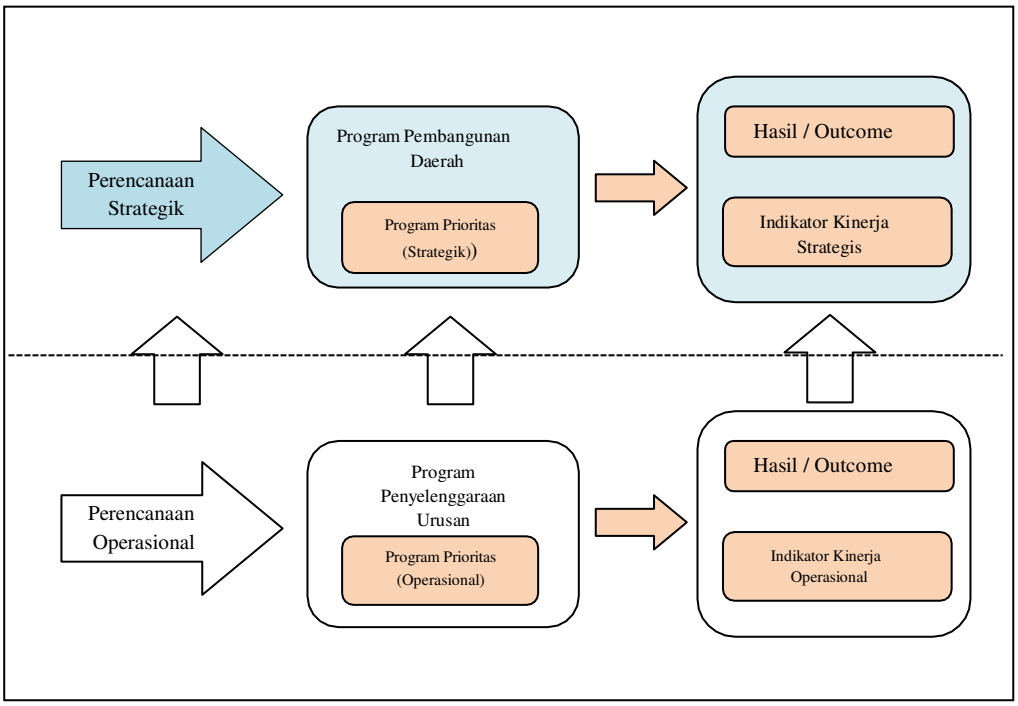

Beberapa langkah yang ditempuh untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah Kota Tarakan antara lain:

1. Mengkaji sasaran pembangunan periode sebelumnya maupun periode pembangunan yang akan datang (periode lima tahunan);
2. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya;
3. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi; serta
4. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memerhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran pembangunan.

Gambar 6.2
Strategi Pembangunan Jangka Menengah

SASARAN	STRATEGI 2020 2021 2022 2023 2024
1. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	S (1) Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat
2. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	S (2) Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan Kepada Masyarakat Secara Merata
1. Meningkatnya daya beli masyarakat	S (3) Pemberdayaan Ekonomi Mikro Masyarakat
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan 5. Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif dan Efisien 6. Terwujudnya Birokrasi Yang Memiliki Pelayanan Publik Yang Berkualitas	S (4) Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan
7. Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau perkotaan	S (5) Peningkatan RTH
8. Meningkatnya pelayanan air bersih	S (6) Pemenuhan Air Bersih Masyarakat
9. Meningkatnya Sarana Prasarana Perkotaan	S (7) Peningkatan Sarana Prasarana Perkotaan
10. Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni baik yang direnovasi maupun yang dibangun untuk MBR 11. Menurunnya luas kawasan kumuh	S (8) Pengembangan Permukiman dan Rehabilitasi kawasan kumuh
12. Menurunnya kemiskinan 13. Menurunnya pengangguran	S (9) Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin S (10) Peningkatan kualitas sumber daya dan penyerapan tenaga kerja lokal
14. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah 15. Terkendalinya Inflasi daerah	S (11) Penguatan Potensi Unggulan Ekonomi Lokal S (12) Menjaga Stabilitas Harga dan distribusi Barang
16. Menurunnya pencemaran lingkungan	S (13) Pencegahan Dan Pengendalian Kerusakan
17. Meningkatnya penanganan Kebencanaan yang efektif	S (14) Optimalisasi Penanganan Bencana
18. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban kota	S (15) Penguatan Kondusifitas Keamanan Dan Ketertiban Wilayah

Berdasarkan gambar 6.2 diatas, terlihat jelas bahwa pencapaian sasaran pembangunan (RPJMD) ditentukan oleh keberhasilan dalam perumusan strategi yang kemudian ditindaklanjuti dengan pelaksanaan strategi sebagai prioritas pembangunan *(strategy focused organization)* lima tahun mendatang. Dalam manajemen kinerja, prioritas pembangunan merupakan salah satu teknik dalam mengarahkan perhatian birokrasi terhadap fokus utama pembangunan daerah. Untuk itu, pemerintah daerah telah menyusun strategi pembangunan sebagaimana telah digambarkan di atas sehingga dapat dijadikan sebagai prioritas pembangunan daerah lima tahun ke depan.

Strategi pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Tarakan 2019-2024, meliputi:

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat;
2. Peningkatan Kualitas Pendidikan Kepada Masyarakat Secara Merata;
3. Pemberdayaan Ekonomi Mikro Masyarakat;
4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan;
5. Peningkatan Ruang Terbuka Hijau;
6. Pemenuhan Air Bersih Masyarakat;
7. Peningkatan Sarana Prasarana Perkotaan;
8. Pengembangan Permukiman dan Rehabilitasi Kawasan Kumuh;
9. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Miskin;
10. Peningkatan Kualitas Sumber Daya dan Penyerapan Tenaga Kerja Lokal;
11. Penguatan Potensi Unggulan Ekonomi Lokal;
12. Menjaga Stabilitas Harga dan Distribusi Barang;
13. Pencegahan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan;

14. Optimalisasi Penanganan Bencana;
15. Penguatan Kondusifitas Keamanan Dan Ketertiban Wilayah;

6.2. Arah Kebijakan

6.2.1. Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan menjadi pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun mulai 2020 sampai dengan 2024. Arah kebijakan memberi pedoman bagi prioritas dan sasaran pokok tahunan di Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Arah kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih terarah dalam menentukan dan mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan namun tetap selaras dengan pengaturan waktu. Penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam RPJMD.

Di samping itu, arah kebijakan juga dimaksudkan untuk memberikan jawaban atas permasalahan dan isu-isu strategis

pembangunan kewilayahan. Analisis permasalahan dan isu-isu strategis kewilayahan akan menjadi basis utama rumusan arah kebijakan pembangunan kewilayahan untuk memberikan prioritas terkait pemerataan pembangunan dan penciptaan daerah-daerah unggulan. Untuk selanjutnya, fokus kebijakan kewilayahan harus dipedomani bersama antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota termasuk Perangkat Daerah yang terlibat di dalamnya.

6.2.2 Arah Kebijakan Tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Arah kebijakan merupakan keputusan dari *stakeholder* sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Fokus atau tema pembangunan Kota Tarakan dapat dilihat pada Gambar 6.3.

Gambar 6.3
Fokus/Tema Pembangunan Kota Tarakan,
RKPD Tahun 2020-2024

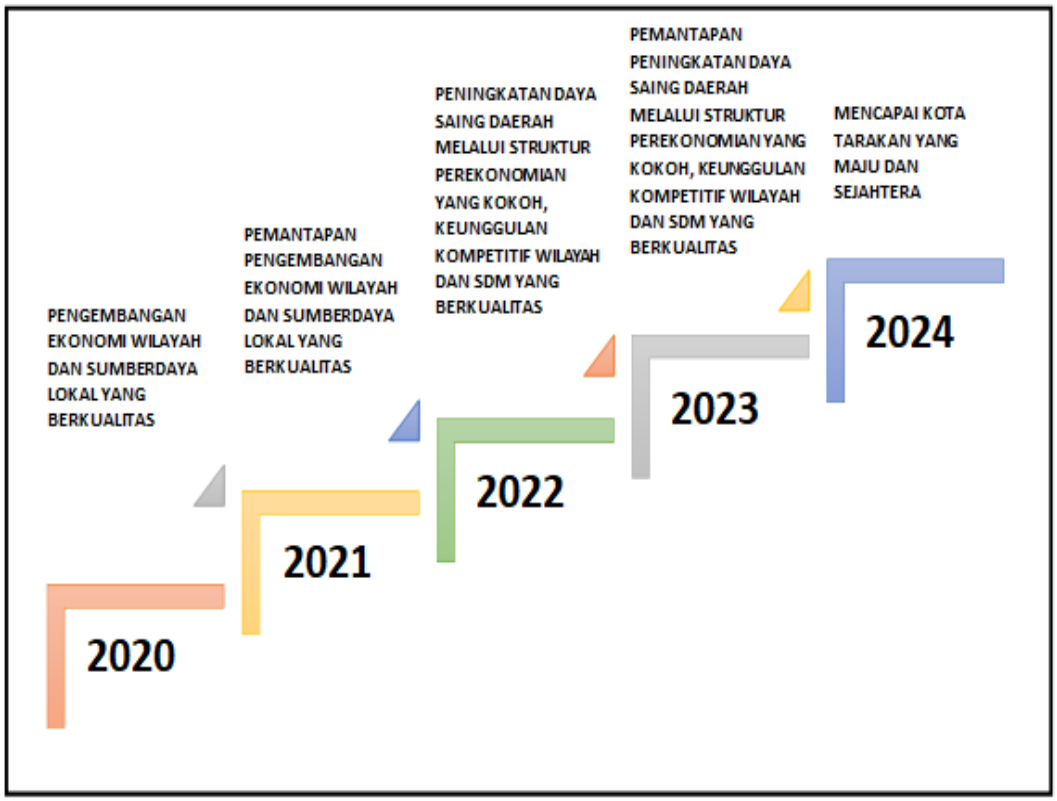

Untuk selanjutnya, masing-masing tema pembangunan di atas diterjemahkan dalam strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tarakan Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6.1
Strategi Dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kota Tarakan Tahun 2019-2024
Visi : "Terwujudnya Tarakan Sebagai Kota Maju Dan Sejahtera Melalui Smart City"

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
Misi I : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Terampil, Mandiri, Berkualitas, Dan Berdaya Saing.							
T.1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	S.1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	ST.1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	AK. 1	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan
						AK. 2	Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi SDM Kesehatan
						AK. 3	Pemenuhan sediaan farmasi, alat kesehatan, makanan dan minuman
						AK. 4	Peningkatan pemberdayaan kesehatan masyarakat
						AK. 5	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
		S.2	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	ST.2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan kepada Masyarakat Secara Merata	AK. 6	Pemerataan sarana dan prasarna pendidikan serta Peningkatan Partisipasi Pendidikan Masyarakat Khususnya yang Tidak Mampu
						AK. 7	Optimalisasi Pendidikan Dasar
						AK. 8	Pemenuhan tenaga pendidikan yang berkualitas
						AK. 9	Pengembangan Minat Baca Masyarakat
		S.3	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	ST 3	Pemberdayaan Ekonomi Mikro Masyarakat	AK. 10	Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
						AK. 11	Peningkatan Kesempatan dan Kemudahan Usaha Mikro
Misi II : Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Amanah, Profesional, Efektif Dan Efesien Yang Berbasis Pada Sistem Penganggaran Yang Pro-Rakyat							
T.2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggraan Pemerintahan	S. 4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan	ST. 4	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan	AK. 12	Peningkatan Kualitas Pengelolaan BMD, Keuangan Daerah dan Pengendalian Internal Pemerintah
						AK. 13	Peningkatan Kualitas Pengadaan barang dan Jasa
						AK. 14	Peningkatan tertib administrasi pertanahan dalam pembangunan
						AK. 15	Peningkatan kualitas dan efektifitas perencanaan, pengendalian evaluasi pembangunan daerah dan Kelitbangan Daerah
						AK. 16	Peningkatan Akuntabilitas Perangkat Daerah
		S. 5	Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif dan Efisien			AK. 17	Peningkatan Profesionalisme ASN
		S. 6	Terwujudnya Birokrasi Yang Memiliki Pelayanan Publik Yang Berkualitas			AK. 18	Peningkatan Kualitas Layanan Publik berbasis Teknologi Informasi
						AK. 19	Pengembangan Seni Budaya dan Olahraga, Pemuda dan Kewanitaan

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
Misi III : Meningkatkan Dan Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Publik Yang Cepat, Mudah, Murah, Adil, Dan Transparan							
T. 3	Meningkatnya ketersediaan infrastrukur yang merata dan berkualitas	S. 7	Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau	ST. 5	Peningkatan Ruang Terbuka Hijau	AK. 20	Pengembangan dan Pembangunan Ruang Terbuka Kota
		S.8	Meningkatnya pelayanan air bersih	ST. 6	Pemenuhan Air Bersih Masyarakat	AK. 21	Perluasan dan Pemerataan Jaringan Air Bersih Skala Lokal dan Regional
		S.9	Meningkatnya sarana prasarana perkotaan	ST. 7	Peningkatan Sarana Prasarana Perkotaan	AK. 22	Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Sarana Prasarana Perkotaan
		S.10	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni baik yang direnovasi maupun yang dibangun untuk MBR	ST. 8	Pengembangan Permukiman dan Rehabilitasi Kawasan Kumuh	AK.23	Pengembangan Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
		S.11	Menurunnya luas kawasan kumuh			AK. 24	Peningkatan Prasarana, sarana, utilitas umum Kawasan permukiman Kumuh

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
Misi IV : Mengembangkan Ekonomi Daerah Yang Berorientasi Kepada Kepentingan Rakyat (Ekonomi Pro Rakyat) Melalui Sektor Perdagangan, Jasa, Industri, Pariwisata Dan Pertanian Dalam Arti Luas							
T. 4	Meningkatnya Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Daerah	S.12	Menurunnya kemiskinan	ST. 9	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Miskin	AK. 25	Perbaikan layanan dasar masyarakat miskin yang tepat sasaran
		S.13	Menurunnya pengangguran	ST.10	Peningkatan Kualitas Sumberdaya dan Penyerapan Tenaga kerja lokal	AK. 26	Perencanaan Tenaga Kerja
						AK. 27	Peningkatan kualitas tenaga kerja
						AK. 28	Perluasan Kesempatan Kerja
		S.14	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah	ST.11	Penguatan Potensi Unggulan Ekonomi Lokal	AK. 29	Pengembangan dan Pembangunan pertanian dalam arti luas
						AK. 30	Pembangunan dan Pengembangan Sektor Industri
						AK. 31	Peningkatan perdagangan barang dan jasa berbasis sumber daya lokal
						AK. 32	Peningkatan pengelolaan potensi dan destinasi wisata
						AK. 33	Peningkatan Kemudahan Investasi
		S.15	Terkendalinya Inflasi daerah	ST.12	Menjaga stabilitas harga dan distribusi barang	AK. 34	Pengendalian Inflasi

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
Misi V : Meningkatkan Pemanfaatan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Melalui Peningkatan Nilai Tambah Yang Berwawasan Lingkungan Dengan Memanfaatkan Teknologi Tepat Guna, Kreatif Dan Inovatif Berbasiskan Ilmu Pengetahuan							
T. 5	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	S.16	Menurunnya pencemaran lingkungan	ST.13	Pencegahan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan	AK. 35	Pengendalian Pencemaran Lingkungan
						AK. 36	Peningkatan Pengelolaan Persampahan
`		S.17	Meningkatnya penanganan kebencanaan yang efektif	ST.14	Optimalisasi Penangan Bencana	AK. 37	Peningkatan kualitas Mitigasi dan Penanggulangan Bencana
						AK. 38	Peningkatan kualitas Mitigasi dan Penanggulangan Bencana Banjir
Misi VI : Meningkatkan Pembangunan Akhlak Dan Moral Sesuai Kearifan Lokal Serta Mewujudkan Kepastian Hukum							
T.6	Meningkatnya Kerukunan, Ketentraman, dan Ketertiban di Masyarakat	S.18	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban kota	ST.15	Penguatan Kondusifitas Keamanan Dan Ketertiban Wilayah	AK. 39	Optimalisasi Keamanan, Ketertiban, dan ketentraman Masyarakat
						AK. 40	Peningkatan Toleransi Keagamaan

Tabel 6.2
Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif
Kota Tarakan 2020 (dalam ribuan) Sebelum Perubahan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2020		
				Target	Rp (Ribuan)	realisasi	Rp (Ribuan)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Misi I : Meningkatkan sumber daya manusia yang terampil, mandiri, berkualitas, dan berdaya saing							
	Tujuan 1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75.27*	76.93	91,692,981	75,83	152,033,633	
	Sasaran 1, Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	73,92	74,18	32,897,913	73,97	27,903,863	
	ST.1 Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat							
	AK.1 Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak							
1.02.01.07	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan yang dilaksanakan	100%	100%	6,351,300	100%	14,172,242	Dinkes

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2020		
				Target	Rp (Ribuan)	realisasi	Rp (Ribuan)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.02.01.19	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Cakupan pertolongan persalinan oleh nakes yang berkompeten	85%	87%	250,000	100%	495,543	Dinkes
1.02.01.16	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Persentase bayi dan balita yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	100%	100%	70,400	100%	29,724	Dinkes
	AK.2 Peningkatan Jaminan Pencegahan dan Penanganan Penyakit Menular dan Tidak Menular							
1.02.01.12	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan desa/Kelurahan KLB yg dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%	100%	713,000	100%	1,652,504	Dinkes
	AK.3 Pemenuhan Kebutuhan Obat							
1.02.01.06	Program obat dan perbekalan kesehatan	Persentase pemenuhan ketersediaan dan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan	100%	100%	2,000,000	100%	1,723,493	Dinkes

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2020		
				Target	Rp (Ribuan)	realisasi	Rp (Ribuan)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	AK.4 Peningkatan Sarana dan Prasarana dan Pelayanan Kesehatan yang Terpadu, Berkualitas dan Berstandar							
1.02.02.07	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Persentase penyediaan sarana dan prasarana sesuai standar	70%	70%	8,381,452	65%	7,627,963	RSUD
1.02.02.08	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase Sarana dan prasarana RS sesuai kebutuhan	100%	100%	871,800	98%	339,357	RSUD
1.02.01.15	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya	Persentase sarana prasaarana Puskesmas yang layak	50%	100%	500,000	100%	198,793	Dinkes
1.02.01.13	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Puskesmas yang terakreditasi	100%	100%	630,000	50%	39,095	Dinkes

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2020		
				Target	Rp (Ribuan)	realisasi	Rp (Ribuan)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.02.02.06	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Status RS	Belum Blud	BLUD	300,000	BLUD	0	RSUD
	AK. 5 Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan dan Lingkungan Permukiman Masyarakat							
1.02.01.09	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Cakupan rumah tangga ber-PHBS	50%	65%	31,000	65%	0	Dinkes
1.02.01.11	Program pengembangan lingkungan sehat	Persentase rumah yang dilakukan inspeksi kesehatan lingkungan	10%	20%	40,000	20%	0	Dinkes
4.05.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi Perkantoran	100%	100%	13,111,961	100%	1,609,147	BKPP
	AK.6 Peningkatan Partisipasi KB Masyarakat							
2.02.01.10	Program pelayanan kontrasepsi	Persentase tingkat keberlangsungan pemakai kontrasepsi	30%	32.89%	187,000	62,13%	16,002	DPPPAPPKB
		Harapan Lama sekolah	13,61*	13,85	43,440,988	14,02	110,540,630	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2020		
				Target	Rp (Ribuan)	realisasi	Rp (Ribuan)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Sasaran 2, Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	9.93*	9.96		9.97		
	ST.2 Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat secara merata							
	AK.7 Pemerataan Sarana dan Prasarana pendidikan serta Peningkatan Partisipasi Pendidikan Masyarakat Khususnya yang Tidak Mampu							
1.01.01.06	Program wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	APK/APM/APS/Akreditasi, SD, SMP	85	88.13	26,018,867	APK SD (91,42) SMP (92,38) APM SD (82,15) APM SMP (70,78) APS SD (91,38) APS SMP (81,24) Akreditasi SD 84,51 Akreditasi SMP 90,63	83,422,159	disdikbud
	AK.8 Optimalisasi Pendidikan Non-Formal							
1.01.01.07	Program pendidikan non formal	Persentase siswa yang mengikuti pendidikan kesetaraan (Angka Melek Huruf)	70	100	343,050	98,40	1,656,300	disdikbud

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2020		
				Target	Rp (Ribuan)	realisasi	Rp (Ribuan)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.01.01.05	Program pendidikan anak usia dini	APK, APM, APS, Akreditasi PAUD	25	26.44	200,000	APK 52,06, APM 41,90, APS 60,69 Akreditasi : 94,83%	1,396,641	disdikbud
	AK.9 Pemenuhan tenaga pendidikan yang berkualitas							
1.01.01.08	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase pendidik yang berkualifikasi S-1/D-4	89%	91%	625,000	90,96%	258,415	disdikbud
1.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi perkantoran	100%	100%	15,509,072	100%	23,712,045	disdikbud
1.01.01.09	Program manajemen pelayanan pendidikan	Persentase Sekolah yang menerapkan PPDB berbasis IT	100%	100%	250,000	100%	20,600	disdikbud
	AK.10 Pengembangan Minat Baca Masyarakat							
2.17.01.05	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Persentase Pengunjung perpustakaan	35%	45%	495,000	10,05%	74,470	Perpustakaan & Arsip

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2020		
				Target	Rp (Ribuan)	realisasi	Rp (Ribuan)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Sasaran 3, Meningkatnya daya beli masyarakat	Pengeluaran Perkapita Masyarakat	1,590,808	1,700,000	15,354,080	1,713,021	13,589,140	
	ST.3 Pemberdayaan ekonomi mikro masyarakat							
	AK.11 Peningkatan Kesejahteran Buruh							
2.01.01.07	Program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang memiliki lembaga ketenagakerjaan	15%	20%	41,780	69,23%	35,000	Dinakerin
	AK.12 Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat							
4.01.05.12	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang aktif	100%	100%	2,647,500	100%	2,590,936	Kec. Tarakan Tengah
4.01.06.14	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang aktif	50%	65%	2,859,000	100%	2,785,325	Kec. Tarakan Barat
4.01.07.12	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang aktif	100%	100%	2,507,400	100%	2,322,341	Kec. Tarakan Timur

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2020		
				Target	Rp (Ribuan)	realisasi	Rp (Ribuan)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4.01.08.11	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang aktif	100%	100%	1,106,400	100%	977,249	Kec. Tarakan Utara
4.01.05.15	Program Pembangunan Kelurahan	Persentase sarana prasarana kelurahan yang terbangun	100%	100%	1,298,500	100%	1,223,982	Kec. Tarakan Tengah
4.01.06.17	Program Pembangunan Kelurahan	Persentase sarana prasarana kelurahan yang terbangun	100%	100%	1,298,500	100%	1,224,580	Kec. Tarakan Barat
4.01.07.15	Program Pembangunan Kelurahan	Persentase sarana prasarana kelurahan yang terbangun	100%	100%	1,817,900	100%	1,698,333	Kec. Tarakan Timur
4.01.08.13	Program Pembangunan Kelurahan	Persentase sarana prasarana kelurahan yang terbangun	100%	100%	779,100	100%	731,394	Kec. Tarakan Utara
	AK.13 Peningkatan Kesempatan dan Kemudahan Usaha Mikro							
2.11.01.08	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	54	56	267,000	27,6	0	Disdagkop UMKM

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2020		
				Target	Rp (Ribuan)	realisasi	Rp (Ribuan)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.11.01.09	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah	Persentase UMKM yang aktif	45	50	200,000	50	0	Disdagkop UMKM
2.11.01.07	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	Persentase UKM yang unggul dan berdaya saing	n/a	10%	531,000	11,46%	0	Disdagkop UMKM
	Misi II : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif dan efesien yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro-rakyat							
	Tujuan 2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	56.09	57.00	31,279,286	53,91	18,193,016	
	Sasaran 4, Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan	Opini BPK	WDP	WTP	23,920,786	WTP	18,193,016	
		Nilai SAKIP	60,12/B	62,00/B		62,67/B		
	ST.4 Reformasi birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah							
	AK.14 Peningkatan Kualitas Pengelolaat Aset dan Pengendalian Internal Pemerintah							

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2020		
				Target	Rp (Ribuan)	realisasi	Rp (Ribuan)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4.02.01.05	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase OPD yang diperiksa	100%	100%	1,430,600	100%	578,925	Inspektorat
4.01.04.08	Program Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Aset Daerah	Persentase pengelolaan aset daerah yang akuntabel	100%	100%	521,000	100%	1,031,452	BPKAD
4.02.01.06	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase aparatur pengawasan yang bersertifikat	75%	80%	400,000	80%	0	Inspektorat
	AK.15 Peningkatan Kualitas Pengadaan barang dan Jasa							
4.01.03.25	Program Penguatan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah	Persentase PD yang tertata baik secara kelembagaan	100%	100%	700,000	100%	73,803	Setda
	AK.16 Peningkatan tertib administrasi pertanahan dalam pembangunan							
1.04.01.12	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Persentase tanah pemerintah yang tersertifikasi	13,30	13,70	5,010,000	13,69	2,265,060	DPKPP

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2020		
				Target	Rp (Ribuan)	realisasi	Rp (Ribuan)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.04.01.11	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Persentase konflik pertanahan yang tertangani	100%	100%	150,000	81,81%	29,067	DPKPP
	AK.17 Peningkatan kualitas dan efektifitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah							
4.03.01.08	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan daerah yang tepat waktu	100	100	750,000	100	143,697	Bappeda
4.03.01.12	Program pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase dokumen perencanaan yang dievaluasi tepat waktu	100	100	200,000	100	1,975	Bappeda
4.03.01.09	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Persentase rata-rata capaian renstra bidang ekonomi	100	100	250,000	100	9,851	Bappeda
4.03.01.10	Program perencanaan sosial budaya	Persentase rata-rata capaian renstra bidang PKSDM	100	100	550,000	100	27,531	Bappeda
4.03.01.11	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Persentase rata-rata capaian renstra bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam	100	100	700,000	100	191,386	Bappeda

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2020		
				Target	Rp (Ribuan)	realisasi	Rp (Ribuan)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4.02.01.07	Program Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kesadaran Penyelenggaraan Negara	Nilai Maturitas SPIP	Level 2	Level 3	750,000	Level 3	307,215	Inspektorat
4.01.03.05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu	100%	100%	155,000	100%	80,990	Setda
	AK.18 Pemenuhan dan Implementasi SOP Teknis Perangkat Daerah							
4.01.03.18	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase peningkatan layanan kedinasan KDH/WKDH	100%	100%	883,250	100%	467,212	Setda
4.01.04.06	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase fasilitasi rapat kerja DPRD	100%	100%	11,470,936	100%	12,984,852	Set. DPRD
	Sasaran 5, Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif dan Efisien	Indeks Profesionalitas ASN	n/a	73	2,408,500	49,28	488,536	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2020		
				Target	Rp (Ribuan)	realisasi	Rp (Ribuan)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	ST.4 Reformasi birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah							
	AK.19 Peningkatan Profesionalisme ASN							
4.05.01.10	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase Indeks Profesionalisme ASN	n/a	90%	2,408,500	66%	488,536	BKPP
	Sasaran 6, Terwujudnya Birokrasi Yang Memiliki Pelayanan Publik Yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77,59*	79,59	4,950,000	84,91	4,770,871	
	ST.4 Reformasi birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah							
	AK.20 Peningkatan Kualitas Layanan Publik berbasis Teknologi Informasi							
2.10.01.08	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase system komunikasi, informasi dan media massa yang dikembangkan	50%	52%	1,200,000	75%	901,578	DKISP
2.10.01.09	Program Fasilitasi Peningkatan SDM	Persentase ASN yang bersertifikat	30%	40%	50,000	30%	0	DKISP

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2020		
				Target	Rp (Ribuan)	realisasi	Rp (Ribuan)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.10.01.10	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Persentase kerjasama pemkot dengan media massa	100%	100%	950,000	100%	337,589	DKISP
2.10.01.06	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase pemanfaatan teknologi informasi terhadap layanan public	75%	100%	500,000	100%	267,020	DKISP
2.12.01.10	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Prosentase penanganan pengaduan masyarakat	100%	100%	50,000	100%	0	DPMPTSP
2.06.01.05	Program penataan administrasi kependudukan	Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan	70%	73.72%	550,000	80%	857,363	Capil
	AK.21 Pengembangan seni budaya dan olah raga, pemuda dan kewanitaan							
	Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda	Persentase kegiatan Kepemudaan yang berbasis pembinaan Karakter sesuai dengan Pedoman	75%	75%	0	75%	0	Dispora

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2020		
				Target	Rp (Ribuan)	realisasi	Rp (Ribuan)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Prosentase Pemuda yang difasilitasi untuk mengikuti kegiatan Kepemudaan	70%	75%	500,000	100%	19,581	Dispora
	Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Cakupan Partisipasi Masyarakat dalam Even Keolahragaan	70%	85%	425,000	100%	142,397	Dispora
	Program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga	Persentase cabor yang mempunyai manajemen yang baik	20%	25%	75,000	25%	0	Dispora
	Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Persentse Gedung Olahraga yang memadai	50%	75%	100,000	100%	2,081,839	Dispora
1.05.01.11	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase partisipasi politik masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu	68%	70%	550,000	68,70%	163,504	Bakesbangpol
	Misi III : Meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur publik yang cepat, mudah, murah, adil, dan transparan.							
	Tujuan 3. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	78.00	78.50	73,882,474	n/a	149,791,062	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2020		
				Target	Rp (Ribuan)	realisasi	Rp (Ribuan)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Sasaran 7, Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau	Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau	46,54	46,54	16,666,752	50,40	12,177,846	
	ST.5 Pemenuhan ruang perkotaan yang berkualitas dan berkelanjutan							
	AK.22 Pengembangan dan Pembangunan Ruang Terbuka Kota							
1.03.01.11	Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Persentase Luas RTH	46%	46.54	3,000,000	50,40	1,736,723	DPUTR
1.03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	13,666,752	100	10,441,123	DPUTR
	Sasaran 8, Meningkatnya pelayanan air bersih	Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air bersih	60,64	67,51	32,205,562	86,52	35,883,142	
	ST.6 Pemerataan pemenuhan air bersih masyarakat							
	AK.23 Peningkatan Kapasitas Tampungan Air Baku							

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2020		
				Target	Rp (Ribuan)	realisasi	Rp (Ribuan)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.03.01.24	Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Pertumbuhan Volume Tampungan Air Baku	15,95	15.95	0	18.94	3,137,585	DPUTR
	AK.24 Perluasan dan Pemerataan Jaringan Air Bersih Skala Lokal dan Regional							
1.03.01.25	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Cakupan Layanan Air Bersih (%)	63%	67.51	32,205,562	86,52	18,028,652	DPUTR
1.03.01.23	Program Penyediaan dan pengolahan air baku	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kapasitas Produksi Air Bersih Kota	58,89	60	1,690,936	86,52	14,716,905	DPUTR
	Sasaran 9, Meningkatnya aksesibilitas perkotaan	Persentase panjang jalan dengan kondisi mantap	54,42	57,54	12,701,160	70,08	40,710,766	
		Rasio volume kendaraan per kapasitas jalan	0.59	0.57		0.57		
	ST.7 Peningkatan interkoneksi wilayah							
	AK.25 Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Jalan Darat dan Jembatan							

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2020		
				Target	Rp (Ribuan)	realisasi	Rp (Ribuan)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.03.01.16	Program pembangunan jalan dan jembatan	Rasio Panjang Jalan Perluas wilayah (km/km2)	1,119	1.120	1,502,160	1.121	5,274,153	DPUTR
1.03.01.18	Program peningkatan jalan dan jembatan	Prosentase ruas jalan yang ditingkatkan	70	85	5,200,000	70,08	33,381,521	DPUTR
1.03.01.17	Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan yang terpelihara	50%	53.71%	2,000,000	53,71%	1,544,930	DPUTR
	ST.8 Pembangunan sistem transportasi perkotaan							
	AK.26 Peningkatan Layanan dan Penataan Transportasi Kota							
2.09.01.08	Program peningkatan pelayanan angkutan	Persentase angkutan umum yang layak	40	43	325,000	43,95	410,722	Dishub
2.09.01.10	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Jumlah titik rawan lakalantas	70	64	2,774,000	36	0	Dishub
	AK.27 Pemenuhan Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan yang Berkualitas							

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2020		
				Target	Rp (Ribuan)	realisasi	Rp (Ribuan)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.09.01.09	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Persentase sarana dan prasarana perhubungan yang terbangun	0	20	700,000	0	0	Dishub
2.09.01.07	Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	Persentase Fasilitas LLAJ yang baik	75.22	78.22	100,000	78.22	99,440	Dishub
	AK.28 Penguatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Perhubungan							
2.09.01.04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang telah mengikuti Diklat dan Bimtek	100	100	100,000	0	0	Dishub
	AK.29 Penataan dan Optimalisasi Lahan Parkir							
2.09.01.09	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Persentase sarana dan prasarana perhubungan yang terbangun	0	20	700,000	0	0	Dishub
	Sasaran 10, Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni untuk MBR	Persentase perumahan DP 0% untuk MBR yang terbangun	0	10	500,000	0,18	4,333,102	
	AK. 30 Pengembangan Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)							

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2020		
				Target	Rp (Ribuan)	realisasi	Rp (Ribuan)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.04.01.06	Program Pengembangan perumahan	Persentase Fasilitasi Rumah MBR	0	100	500,000	100	4,333,102	DPKPP
1.04.01.08	Program lingkungan sehat perumahan	Persentase perumahan yang sehat terdata	n/a	25	80,000	45	0	DPKPP
	Sasaran 11, Menurunnya luas kawasan kumuh	Persentase luas kawasan kumuh	52,59	47,33	11,809,000	38,34	56,686,206	
	AK.31 Peningkatan Jalan Lingkungan Kawasan Kumuh							
1.04.01.15	Program peningkatan jalan lingkungan perkotaan	Prosentase jalan lingkungan yang ditingkatkan	-	1,5	5,500,000	1,2	28,197,202	DPKPP
	ST.9 Rehabilitasi kawasan kumuh dan pengembangan permukiman							
	AK.32 Rehabilitasi dan Penataan Bangunan							
1.03.01.10	Program pengendalian pemanfaatan ruang	prosentase pengawasan pemanfaatan ruang	100	100	509,000	100	9,653	DPUTR
1.04.01.10	Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/social	Persentase Rumah akibat bencana yang direhabilitasi	100	100	200,000	0	0	DPKPP

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2020		
				Target	Rp (Ribuan)	realisasi	Rp (Ribuan)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	AK. 33 Penyediaan sanitasi layak							
1.04.01.14	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Persentase penduduk yang terlayani ipal komunal	n/a	40	100,000	54,81	18,028,652	DPUTR/DPKPP
1.04.01.16	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Pertumbuhan panjang drainase lingkungan	n/a	1,5	5,500,000	0.93	10,450,699	DPUTR/DPKPP
	Misi IV : Mengembangkan ekonomi daerah yang berorientasi kepada kepentingan rakyat (Ekonomi Pro Rakyat) melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata dan pertanian dalam arti luas							
	Tujuan 4. Meningkatnya Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Daerah	Indeks Gini	0.30	0.30	28,414,659	0.295	17,217,728	
	Sasaran 12, Menurunnya kemiskinan	Angka Kemiskinan	6,15	5,85	3,962,185	6,24	5,793,978	
	ST.10 Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin							
	AK.34 Perbaikan layanan dasar masyarakat miskin yang tepat sasaran							

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2020		
				Target	Rp (Ribuan)	realisasi	Rp (Ribuan)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.06.01.05	Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (kat) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (pmks) lainnya	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	74,25%	74.27%	1,232,128	47%	47,271	Dinas Sosial
1.06.01.06	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang memperoleh pembinaan, bimbingan dan Pelatihan dalam menunjang pelaksanaan Kesejahteraan Sosial	n/a	6.67%	230,057	0	0	Dinas Sosial
1.02.01.14	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Persentase Penduduk yang mendapatkan jaminan Kesehatan	90%	98%	2,500,000	100%	5,746,707	Dinkes
1.06.01.08	Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang memperoleh pembinaan, bimbingan dan Pelatihan dalam menunjang pelaksanaan Kesejahteraan Sosial	n/a	12.93%	0	0%	0	Dinas Sosial

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2020		
				Target	Rp (Ribuan)	realisasi	Rp (Ribuan)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Sasaran 13, Menurunya pengangguran,	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,94	5,84	2,380,000	5,86	269,806	
	ST.11 Peningkatan kualitas sumberdaya dan penyerapan tenaga kerja local							
	AK.35 Perluasan lapangan kerja							
2.01.01.08	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase Perusahaan yang menerima tenaga kerja	20%	20,94%	470,000	13,01	19,940	Dinakerin
	AK.36 Peningkatan kualitas tenaga kerja							
2.01.01.06	Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Persentase pencari kerja yang terserap	66,88	75	1,910,000	13,01	249,866	Dinakerin
	Sasaran 14, Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah	Laju pertumbuhan ekonomi	6.00	7.00	21,982,474	-0,78	10,683,689	
	ST.12 Penguatan potensi unggulan ekonomi local							
	AK.37 Pengembangan dan Pembangunan pertanian dalam arti luas							

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2020		
				Target	Rp (Ribuan)	realisasi	Rp (Ribuan)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.03.01.08	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Persentase Pertumbuhan Produksi pertanian (%)	n/a	1.03	1,637,000	69,43	288,786	DP3
3.03.01.11	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Produksi peternakan (kg)	n/a	7.750.000 kg daging dan 2.801.000 kg telur	528,300	7.753.890 kg daging dan 741.940 kg telur	803,930	DP3
3.03.01.13	Program pengembangan budidaya perikanan	Produksi perikanan budidaya (juta rupiah)	258,000	260,000	534,000	262,000	954,286	DP3
3.03.01.14	Program pengembangan perikanan tangkap	Produksi perikanan tangkap (juta rupiah)	1,364,00	1,365,000	305,670	1,366,000	761,426	DP3
3.03.01.15	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Nilai pemasaran produksi perikanan (juta rupiah)	1,950,000	1,960,000	400,000	1,962,000	112,616	DP3
	Program Pengembangan Kawasan Perikanan	Persentase Kawasan Perikanan yang dikembangkan	n/a	10%	1,000,000	20%	0	DP3
	AK.38 Pembangunan dan Pengembangan Sektor Industri							

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2020		
				Target	Rp (Ribuan)	realisasi	Rp (Ribuan)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.01.01.12	Program Penataan struktur industri	Persentase klaster yang terbangun	20%	29%	350,000	11%	0	Dinakerin
2.01.01.09	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Persentase IKM yang terfasilitasi	10%	19%	700,000	4,70%	129,550	Dinakerin
	AK.39 Peningkatan perdagangan barang dan jasa berbasis sumber daya local							
2.11.01.12	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	Nilai Ekspor Kota Tarakan	-	2.780.000	75,000	2.777.990	0	Disdagkop UMKM
2.11.01.13	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase Pelaku Usaha yang dibina	7	8	10,450,000	8	1,146,378	Disdagkop UMKM
2.11.01.10	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Prosentase peningkatan pelaku usaha yang tertib niaga	-	425 uttp tertera	565,000	668 uttp tertera	105,057	Disdagkop UMKM
2.11.01.14	Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan.	Persentase PK5 dan Asongan yang dibina	-	30%	20,000	30%	299,009	Disdagkop UMKM
	AK.40 Peningkatan pengelolaan potensi dan destinasi wisata							

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2020		
				Target	Rp (Ribuan)	realisasi	Rp (Ribuan)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.02.01.07	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Persentase Destinasi wisata yang dipromosikan	100	100	50,000	100	763,832	Dinas Pariwisata
3.02.01.06	Program pengembangan destinasi pariwisata	Persentase destinasi pariwisata yang dikembangkan	100	100%	4,523,854	100%	3,935,380	Dinas Pariwisata
1.01.01.10	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase adat budaya daerah yang dilestarikan	80%	85%	200,000	100%	55,895	Disdikbud
1.01.01.11	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase kegiatan kebuda yaan yang difasilitasi	70%	85%	100,000	100%	76,752	Disdikbud
	AK.41 Peningkatan Kemudahan Investasi							
2.12.01.05	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Realisasi investasi	70%	100%	325,000	100%	83,623	DPMPTSP
2.12.01.14	Program peningkatan pelayanan dan administrasi perizinan	Persentase layanan perizinan yang ditingkatkan	-	60	50,000	100	192,000	DPMPTSP
	AK. 42 Optimalisasi Pengelolaan Sumber-Sumber PAD Potensial							

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2020		
				Target	Rp (Ribuan)	realisasi	Rp (Ribuan)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4.04.01.06	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase wajib pajak baru terhadap yang ditargetkan	100%	100%	1,218,650	100%	975,169	BPPRD
	Sasaran 15, Terkendalinya Inflasi daerah	Tingkat Inflasi	5	4	90,000	1,15	470,255	
	ST.13 Menjaga stabilitas harga dan distribusi barang							
	AK.43 Pengendalian Inflasi							
3.03.01.05	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Ketersediaan data kebutuhan bahan makanan penyumbang inflasi	-	1 dokumen	90,000	1 dokumen	470,255	DP3
	Misi V : Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam melalui peningkatan nilai tambah yang berwawasan lingkungan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna, kreativitas dan inovatif berdasarkan ilmu pengetahuan							
	Tujuan 5. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	NA	64	20,359,261	67,07	54,940,136	
	Sasaran 16, Menurunnya pencemaran lingkungan	Indeks Kualitas Air	43,75	44	17,506,359	45,56	14,730,041	
		Indeks Kualitas Udara	85	87		93,42		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2020		
				Target	Rp (Ribuan)	realisasi	Rp (Ribuan)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Indeks Tutupan Lahan	55.29	55.50		55.30		
		Persentase sampah yang dikelola	78.8	79.5		90,77		
	ST.14 Pencegahan dan pengendalian kerusakan lingkungan							
	AK.44 Pengendalian Pencemaran Air							
2.05.01.04	Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Persentase jumlah usaha atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pengendalian pencemaran air, udara dan lahan	60.56	66.67	1,253,700	48	318,157	DLH
	AK.45 Pengendalian Pencemaran Udara							
2.05.01.08	Program peningkatan pengendalian polusi	Persentase kendaraan dan aktivitas industri yang diuji polusi	n/a	20	50,000	0	0	DLH
	AK.46 Perlindungan Kualitas Tutupan Lahan							

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2020		
				Target	Rp (Ribuan)	realisasi	Rp (Ribuan)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.05.01.06	Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam	Persentase luasan Hutan dan lahan yang direhabilitasi	n/a	8,5	825,000	4,57	225,337	DLH
	AK. 47 Peningkatan Pengelolaan Sampah							
2.05.01.04	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	persentase pengurangan sampah di perkotaan	n/a	12,50	4,650,000	12,45	4,217,949	DLH
2.05.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	10,777,659	100	9,968,598	DLH
	Sasaran 17, Meningkatnya penanganan kebencanaan yang efektif	Persentase pelayanan bencana kebakaran	100	100	2,852,902	92	40,210,095	
		Persentase pelayanan bencana longsor	69.60	87.00		100		
		Persentase Luas genangan banjir	0.23	0.229		0.182		
	ST.15 Mengurangi Resiko Bencana							
	AK.48 Peningkatan Kualitas Mitigasi dan Penanggulangan Bencana Kebakaran							

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2020		
				Target	Rp (Ribuan)	realisasi	Rp (Ribuan)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Persentase kecamatan siaga bencana kebakaran	n/a	50	50,000	100	44,159	Satpol PP & PK
1.05.02.07	Program Tanggap Darurat Logistik dan Penanggulangan Bencana	Persentase layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran dalam tingkat waktu tanggap	91%	100%	700,000	92%	268,000	Satpol PP & PK
1.06.02.06	Program pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana	Kejadian Tanah Longsor	21	17 kejadian	350,000	35 kejadian	312,771	BPBD
1.06.02.07	Program tanggap darurat logistik dan penanggulangan bencana	Persentase ketersediaan logistik untuk setiap kejadian bencana	100	100	270,000	100	389,864	BPBD
1.06.02.08	Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Persentase kejadian bencana yang mendapatkan rehabilitasi dan rekonstruksi	100	100	663,200	100	163,200	BPBD
	AK.49 Peningkatan Kualitas Mitigasi dan Penanggulangan Bencana Longsor							

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2020		
				Target	Rp (Ribuan)	realisasi	Rp (Ribuan)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.05.01.05	Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Persentase Hutan kota dan mangrove yang terlindungi	45,33	49.44	300,000	55,30	66,183	DLH
1.03.01.21	Program pembangunan turap/talud/brojong	Persentase Lokasi yang akan Dibangun Turap/Talud/ Bronjong	100	100	560,000	100	398,251	DPUTR
	AK. 50 Peningkatan Kualitas Mitigasi dan Penanggulangan Banjir							
1.03.01.22	Program pengendalian banjir	Prosentase Luas genangan yang tertangani	50%	69.07	9,702	79,18	38,567,667	DPUTR
	Misi VI : Meningkatkan Pembangunan Akhlak Dan Moral Sesuai Kearifan Lokal Serta Mewujudkan Kepastian Hukum							
	Tujuan 6. Meningkatnya kerukunan, ketentraman, dan ketertiban di masyarakat	Indeks Toleransi	5.23	5.25	2,819,000	5,337	889,418	
	Sasaran 18, Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban kota	Persentase pelanggaran K3 yang tertangani	100	100	2,819,000	100	889,418	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2020		
				Target	Rp (Ribuan)	realisasi	Rp (Ribuan)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	ST.16 Penguatan kondusifitas keamanan dan ketertiban wilayah							
	AK.51 Optimalisasi Keamanan, Ketertiban, dan ketentraman Masyarakat							
1.05.02.09	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase penegakan PERDA	100%	100%	250,000	100%	21,200	Satpol PP & PK
1.05.02.08	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase penangan tingkat gangguan keamanan dan kenyamanan lingkungan (K3)	100%	100%	1,194,000	100%	237,500	Satpol PP & PK
1.05.01.09	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Persentase penangan konflik social	100%	100%	425,000	100%	69,477	Bakesbangpol
	AK.52 Peningkatan Toleransi Keagamaan							
4.01.03.24	Program Pembinaan Keagamaan	Persentase pembinaan keagamaan	100%	100%	650,000	100%	375,627	Setda

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2020		
				Target	Rp (Ribuan)	realisasi	Rp (Ribuan)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.05.01.07	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase konflik SARA yang tertangani	100%	100%	300,000	100%	185,614	Bakesbangpol

Tabel 6.3
Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif
Kota Tarakan 2021-2024 (dalam ribuan) Setelah Perubahan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penangung Jawab
				2021		2022		2023		2024				
				target	Rp (Ribuan)	target	Rp. (Ribuan)	target	Rp. (Ribuan)	target	Rp. (Ribuan)	target	Rp (Ribuan)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Misi I : Meningkatkan sumber daya manusia yang terampil, mandiri, berkualitas, dan berdaya saing													**MISI**
	Tujuan 1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	**75,83**	**77,48**	**154.229.500**	**78,03**	**126.718.718**	**78,58**	**130.161.641**	**79,13**	**131.254.661**	**79,13**	**542.364.519**	**TUJUAN**
	Sasaran 1, Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	**Usia Harapan Hidup**	**73,97**	**74,29**	**52.581.641**	**74,40**	**34.980.835**	**74,51**	**34.251.623**	**74,62**	**33.602.623**	**74,62**	**155.416.722**	**SASARAN**
	ST.1 Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat													STRATEGI
	AK.1 Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan													ARAH KEBIJAKAN
1.02.02 ..	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase UPT yang melaksanakan UKP dan UKM	100%	100%	48.738.531	100,00%	31.177.786	100,00%	30.358.974	100,00%	29.709.974	100,00%	139.985.266	DINAS KESEHATAN
		Rasio Daya Tampung RS terhadap jumlah penduduk	0,00091	0,02		0,02		0,02		0,02		0,02		DINAS KESEHATAN
		Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi	40%	40%		60,00%		60,00%		80,00%		80,00%		DINAS KESEHATAN
		Angka Kematian Ibu Melahirkan	42/100.000 KH	42/100.000 KH		42/100.000 KH		42/100.000 KH		42/100.000 KH		42/100.000 KH		DINAS KESEHATAN
		Angka Kematian Bayi	6/1000 KH	6/1000 KH		6/1000 KH		6/1000 KH		6/1000 KH		6/1000 KH		DINAS KESEHATAN
		Angka Kematian Balita	6/1000 KH	6/1000 KH		6/1000 KH		6/1000 KH		6/1000 KH		6/1000 KH		DINAS KESEHATAN
		Pelayanan kesehatan ibu hamil	127,38%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		DINAS KESEHATAN

		Pelayanan kesehatan ibu melahirkan	134,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		DINAS KESEHATAN
		Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	137,75%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		DINAS KESEHATAN
		Pelayanan kesehatan balita	20,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		DINAS KESEHATAN
		Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	93,63%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		DINAS KESEHATAN
		Pelayanan kesehatan pada usia produktif	16,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		DINAS KESEHATAN
		Pelayanan kesehatan pada usia lansia	4,80%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		DINAS KESEHATAN
		Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	10,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		DINAS KESEHATAN
		Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	31,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		DINAS KESEHATAN
		Pelayanan kesehatan Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	63,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		DINAS KESEHATAN
		Pelayanan kesehatan Orang terduga tuberkulosis	58,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		DINAS KESEHATAN
		Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tubuh manusia (HIV)	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		DINAS KESEHATAN
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	14,85%	10,00%		9,50%		7,50%		6,00%		6,00%		DINAS KESEHATAN
		Persentase UPT yang memiliki ketersediaan obat, vaksin esensial, dan perbekalan kesehatan	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		DINAS KESEHATAN
	AK.2 Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi SDM kesehatan													ARAH KEBIJAKAN
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase SDM Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar	100%	100%	773.671	100%	760.160	100%	856.489	100%	856.489	100%	3.246.810	DINAS KESEHATAN
	AK.3 Pemenuhan sediaan farmasi, alat kesehatan,makanan dan minuman													ARAH KEBIJAKAN

1.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase pengawasan obat dan makanan pada masyarakat dan pelaku usaha yang dilakukan	100%	100%	212.983	100%	232.983	100%	236.654	100%	236.654	100%	919.274	DINAS KESEHATAN
	AK.4 Peningkatan pemberdayaan kesehatan masyarakat													ARAH KEBIJAKAN
1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan	100%	100%	1.873.691	100%	1.879.226	100%	1.879.226	100%	1.879.226	100%	7.511.370	DINAS KESEHATAN
	AK.5 Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana													ARAH KEBIJAKAN
2.14.02 ..	Program Pengendalian Penduduk	Persentase keluarga yang terdata	4,00%	8,88%	186.906	17,77%	94.159	26,65%	94.159	35,53%	94.159	35,53%	469.383	DPPPAPPKB
		TFR	2,3	2,29	0	2,28	0	2,25	0	2,24	0	2,24	0	DPPPAPPKB
		Median (nilai tengah) usia kawin pertama perempuan seluruh wanita umur 25-49 tahun	n/a	25	0	25	0	25	0	25	0	25	0	DPPPAPPKB
2.14.03 ..	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Persentase peserta KB aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	62,13%	63,15%	795.858	64,15%	836.520	65,15%	826.120	66,15%	826.120	66,15%	3.284.619	DPPPAPPKB
		Unmeet need	25,98%	24,50%	0	24,25%	0	24,00%	0	23,50%	0	23,50%	0	DPPPAPPKB
		Persentase masyarakat yg terpapar isi program KKBPK	n/a	50,00%	0	55,00%	0	60,00%	0	65,00%	0	65,00%	0	DPPPAPPKB
..	**Sasaran 2, Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan**	**Harapan Lama sekolah**	**14,02**	**13,93**	**101.356**	**14,01**	**91.166**	**14,09**	**95.339**	**14,17**	**97.081**	**14,17**	**384.941**	**SASARAN**
		Rata-Rata Lama Sekolah	**9,97**	**9,97**		**9,98**		**9,99**		**10**		**10**		**SASARAN**
	ST.2 Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan masyarakat secara merata													STRATEGI
	AK.6 Pemerataan Sarana dan Prasarna pendidikan serta Peningkatan Partisipasi Pendidikan Masyarakat Khususnya yang Tidak Mampu													ARAH KEBIJAKAN

1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	Rasio siswa per kelas SD	35,00	33,00	100.739.365	30,00	90.611.417	29,00	95.018.552	28,00	96.756.572	28,00	383.125.907	DINAS PENDIDIKAN
		Rasio siswa per kelas SMP	31,00	30,00	0	29,00	0	28,00	0	28,00	0	28,00	0	DINAS PENDIDIKAN
		Rasio siswa per rombongan belajar SD	27,26	27,81	0	28,00	0	28,00	0	28,00	0	28,00	0	DINAS PENDIDIKAN
		Rasio siswa per rombongan belajar SMP	31,94	30,00	0	29,00	0	28,00	0	28,00	0	28,00	0	DINAS PENDIDIKAN
		Rasio siswa per kelas PAUD	14,00	14,70	0	15,00	0	15,00	0	15,00	0	15,00	0	DINAS PENDIDIKAN
		Angka Partisipasi Murni PAUD	60.5	61,00		61.5		62,0		62.50		62.50		DINAS PENDIDIKAN
		Angka Partisipasi Murni SD/ MI	87.34	84.24		86.75		87.49		88.15		88.15		DINAS PENDIDIKAN
		Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	71.80	75.39		79.16		83.12		87.27		87.27		DINAS PENDIDIKAN
		Angka Kelulusam SD/MI	97,26	99,21	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	DINAS PENDIDIKAN
		Angka Kelulusan SMP/MTs	100,00	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	DINAS PENDIDIKAN
		Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	94,12	96,00	0	98,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	DINAS PENDIDIKAN
		Angka putus sekolah SD/MI	0,39	0,29	0	0,19	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	DINAS PENDIDIKAN
		Angka putus sekolah SMP/MTs	0,42	0,32	0	0,22	0	0,12	0	0,07	0	0,00	0	DINAS PENDIDIKAN
	AK.7 Optimalisasi Pendidikan Dasar													ARAH KEBIJAKAN
1.01.03	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase sekolah yang melaksanakan kurikulum muatan lokal	100,00%	100,00%	0	100,00%	10.000	100,00%	10.000	100,00%	10.000	100,00%	30.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.05	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase sekolah yang memiliki ijin operasional	100,00%	100,00%	0	100,00%	10.000	100,00%	5.000	100,00%	9.000	100,00%	24.000	DINAS PENDIDIKAN
	AK.8 Pemenuhan tenaga pendidikan yang berkualitas													ARAH KEBIJAKAN
1.01.04.	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Rasio siswa per guru PAUD	9	15	149.986	15	360.000	15	130.000	15	130.000	15	769.986	DINAS PENDIDIKAN
		Rasio siswa per guru SD/MI	19	28	0	28	0	28	0	28	0	28	0	DINAS PENDIDIKAN

		Rasio siswa per guru SMP/MTs	14	28	0	28	0	28	0	28	0	28	0	DINAS PENDIDIKAN
1.01.06	Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Persentase sekolah yang menerapkan bahasa dan sastra daerah	100,00%	100,00%	0	100,00%	10.000	100,00%	10.000	100,00%	10.000	100,00%	30.000	DINAS PENDIDIKAN
	AK.9 Pengembangan Minat Baca Masyarakat													ARAH KEBIJAKAN
2.23.02 ..	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Pengunjung Perpustakaan	45,15%	45,25%	466.390	45,30%	135.000	45,40%	135.000	45,50%	135.000	45,50%	871.390	DISPUSPAN
2.23.03	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Persentase Koleksi Bahan Pustaka yang Dilestarikan	100,00%	100,00%	0	100,00%	30.000	100,00%	30.000	100,00%	30.000	100,00%	90.000	DISPUSPAN
..	**Sasaran 3, Meningkatnya daya beli masyarakat**	**Pengeluaran Perkapita Masyarakat**	**Rp1.713.021**	**Rp1.800.000**	**292.118**	**Rp1.900.000**	**571.465**	**Rp2.000.000**	**571.465**	**Rp2.100.000**	**571.465**	**Rp2.100.000**	**2.006.514**	**SASARAN**
	ST.3 Pemberdayaan ekonomi mikro masyarakat													STRATEGI
	AK.10 Peningkatan Pemberdayaan ekonomi masyarakat													ARAH KEBIJAKAN
2.14.04	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Persentase Kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina	100%	100%	103.200	100%	228.200	100%	228.200	100%	228.200	100%	787.800	DPPPAPPKB
	AK.11 Peningkatan Kesempatan dan Kemudahan Usaha Mikro													ARAH KEBIJAKAN
2.17.02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	persentase KSP/ USP yang berizin	52,38%	100,00%	0	100,00%	19.265	100,00%	19.265	100,00%	19.265	100,00%	57.796	DKUKMP
2.17.03	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi aktif dan patuh	34,21%	73,68%	0	100,00%	44.000	100,00%	44.000	100,00%	44.000	100,00%	132.000	DKUKMP
2.17.04	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Persentase Koperasi sehat	9,52%	71,43%	0	83,33%	40.000	88,10%	40.000	88,10%	40.000	88,00%	120.000	DKUKMP
2.17.05	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang menerapkan manajemen perkoperasian	n/a	19,74%	24.944	42,11%	50.000	68,42%	50.000	100,00%	50.000	100,00%	174.944	DKUKMP
2.17.06	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi yang difasilitasi pemberdayaan dan perlindungan koperasi	n/a	13,16%	0	19,74%	28.000	32,89%	28.000	39,47%	28.000	39,47%	84.000	DKUKMP

2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Persentase pertumbuhan UMKM	32,99%	45,23%	138.997	47,31%	112.000	54,93%	112.000	61,01%	112.000	61,01%	474.997	DKUKMP
2.17.08	Program Pengembangan Umkm	Persentase usaha mikro yg naik kelas	n/a	0,88%	24.976	1,76%	50.000	2,64%	50.000	3,51%	50.000	3,51%	174.976	DKUKMP
..	**Misi II : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif dan efesien yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro-rakyat**													**MISI**
	Tujuan 2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**53,91**	**58,00**	**639.704**	**59,00**	**661.278**	**60,00**	**663.491**	**61,00**	**665.190**	**61,00**	**2.629.662**	**TUJUAN**
	Sasaran 4, Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan	**Opini BPK**	**WTP**	**WTP**	**616.510**	**WTP**	**634.058**	**WTP**	**635.886**	**WTP**	**637.607**	**WTP**	**2.524.061**	**SASARAN**
		Nilai SAKIP	**62,67/B**	**64,00/B**		**66,00/B**		**70,01/BB**		**72,00/BB**		**72,00/BB**		**SASARAN**
	ST.4 Reformasi birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah													STRATEGI
	AK.12 Peningkatan Kualitas Pengelolaan BMD dan Keuangan dan Pengendalian Internal Pemerintah													ARAH KEBIJAKAN
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase laporan keuangan OPD yang tertib administrasi	100,00%	100,00%	17.348.927	100,00%	8.655.000	100,00%	8.655.000	100,00%	8.655.000	100,00%	43.313.927	BPKPAD
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase laporan BMD OPD yang tertib administrasi	100,00%	100,00%	980.300	100,00%	2.060.000	100,00%	2.060.000	100,00%	2.060.000	100,00%	7.160.300	BPKPAD
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase meningkatnya jumlah pengelolaan penerimaan Pajak	100,00%	100,00%	1.561.500	100,00%	2.410.000	100,00%	2.410.000	100,00%	2.410.000	100,00%	8.791.500	BPKPAD
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase penyelenggaraan pengawasan yang optimal	100%	100%	579.934	100%	1.650.000	100%	1.650.000	100%	1.650.000	100%	5.529.934	INSPEKTORAT

6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase perumusan kebijakan teknis dan pendampingan pengawasan yang terlaksana	0%	100%	140.764	100%	530.000	100%	550.000	100%	550.000	100%	1.770.764	INSPEKTORAT
	AK.13 Peningkatan Kualitas Pengadaan barang dan Jasa													ARAH KEBIJAKAN
4.01.03	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Layanan pengadaan Barang dan Jasa	100%	100%	121.775	100%	121.775	100%	121.775	100%	121.775	100%	487.098	SETDA
	AK.14 Peningkatan tertib administrasi pertanahan dalam pembangunan													ARAH KEBIJAKAN
2.10.04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100,00%	100,00%	30.000	100,00%	30.000	100,00%	30.000	100,00%	30.000	100,00%	120.000	DPRKPP
2.10.05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase ganti kerugian dan/atau santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan	100,00%	0,00%	0	100,00%	3.200.000	100,00%	3.200.000	100,00%	3.200.000	100,00%	9.600.000	DPRKPP
2.10.10	Program Penatagunaan Tanah	Persentase dokumen SPL yang ditindaklanjuti	100,00%	100,00%	3.168.677	100,00%	20.000	100,00%	20.000	100,00%	20.000	100,00%	3.228.677	DPRKPP
	AK.15 Peningkatan kualitas dan efektifitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan Kelitbangan Daerah													ARAH KEBIJAKAN
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan daerah yang tepat waktu	100,00%	100,00%	600.000	100,00%	120.000	100,00%	170.000	100,00%	645.000	100,00%	1.535.000	BAPPEDA LITBANG
5.01.03	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi RPJMD, RKPD, RENSTRA dan Renja OPD	100,00%	100,00%	620.000	100,00%	300.000	100,00%	420.000	100,00%	780.000	100,00%	2.120.000	BAPPEDA LITBANG
5.05.02	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase implementasi rencana kelitbangan	0,00%	25,00%	125.000	50,00%	60.000	75,00%	115.000	100,00%	135.000	100,00%	435.000	BAPPEDA LITBANG
2.2.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase data sektoral yang dipublikasikan	100,00%	100,00%	40.000	100,00%	40.000	100,00%	40.000	100,00%	40.000	100,00%	160.000	DKISP

2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase sosialisasi kebijakan keamanan informasi	20,00%	40,00%	5.000	60,00%	5.000	80,00%	5.000	100,00%	10.000	100,00%	25.000	DKISP
	AK.16 Peningkatan Akuntabilitas Perangkat Daerah													ARAH KEBIJAKAN
4. 01. 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	62,00 (B)	62,00 (B)	27.368.679	66,00 (B)	26.055.723	70,01 (BB)	26.289.622	72,00 (BB)	26.628.306	72,00 (BB)	106.342.330	SETDA
		Nilai IKM	79,59	79,59	0	81,59	0	82,59	0	83,59	0	83,59		SETDA
		Persentase Pelayanan Prokopim	100%	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%		SETDA
		Persentase Rekomendasi LHP yang ditindak Lanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%		SETDA
		Indeks Reformasi dan Birokrasi	57,00	57,00	0	59,00	0	60,00	0	61,00	0	61.00		SETDA
4.01. 02	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai LPPD	3,5	3,7	12.378.288	3,9	9.970.281	4,1	10.574.157	4,3	9.416.366	4,3	42.339.093	SETDA
		Persentase SPM	100%	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%		SETDA
		Persentase Hibah Bansos yang tersalurkan	0%	80%	0	85%	0	90%	0	95%	0	95%		SETDA
		Penilaian Kota Peduli HAM dan RANHAM	Pencapaian Kota Peduli Ham dan RANHAM Kuning (cukup peduli)	Pencapaian Kota Peduli Ham dan RANHAM HIJAU (Sangat Peduli)	0	Pencapaian Kota Peduli Ham dan RANHAM HIJAU (Sangat peduli)	0	Pencapaian Kota Peduli Ham dan RANHAM HIJAU (Sangat peduli)	0	Pencapaian Kota Peduli Ham dan RANHAM HIJAU (Sangat peduli)	0	Pencapaian Kota Peduli Ham dan RANHAM HIJAU (Sangat peduli)	0	SETDA
		Persentase realisasi penyusunan Perda	100%	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	SETDA
4.01.03	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase BUMD yang sehat	40%	40%	161.802	60%	105.000	80%	130.000	100%	110.000	100%	506.802	SETDA
		Persentase Realisasi Pembangunan Daerah	80%	85%	10.000	87%	36.000	89%	36.000	90%	36.000	90%	118.000	SETDA

x.xx.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100,00%	100,00%	551.269.793	100,00%	578.689.259	100,00%	579.409.156	100,00%	581.109.699	100,00%	2.290.477.907	SELURUH OPD
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Persentase fasilitasi layanan dan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	n/a	100%	6.685.221	100%	6.685.221	100%	6.685.221	100%	6.685.221	100%	26.740.884	SET. DPRD
	Sasaran 5, Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif dan Efisien	**Indeks Profesionalitas ASN**	**49,28**	**55**	**2.925.000**	**60**	**2.925.000**	**65**	**2.925.000**	**70**	**2.925.000**	**70**	**11.700.000**	**SASARAN**
	ST.4 Reformasi birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah													STRATEGI
	AK.17 Peningkatan Profesionalisme ASN													ARAH KEBIJAKAN
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase layanan kepegawaian daerah	100%	100%	1.075.000	100%	1.075.000	100%	1.075.000	100%	1.075.000	100%	4.300.000	BKPSDM
5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pegawai yang mengikuti diklat sesuai jabatannya	100%	100%	1.850.000	100%	1.850.000	100%	1.850.000	100%	1.850.000	100%	7.400.000	BKPSDM
	Sasaran 6, Terwujudnya Birokrasi Yang Memiliki Pelayanan Publik Yang Berkualitas	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**84,91**	**84,50**	**20.268.234**	**84,75**	**24.295.048**	**85**	**24.680.013**	**85,25**	**24.657.818**	**85,25**	**93.901.113**	**SASARAN**
	ST.4 Reformasi birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah													STRATEGI
	AK.18 Peningkatan Kualitas Layanan Publik berbasis Teknologi Informasi													ARAH KEBIJAKAN
2.16.02	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi Pemerintah Daerah yang dipublikasikan melalui media komunikasi publik pemerintah dan media massa mitra kerja pemerintah	100%	100%	488.000	100%	488.000	100%	488.000	100%	488.000	100%	1.952.000	DKISP

2.16.03	Program Aplikasi Informatika	Persentase Aplikasi Layanan Publik yang dapat diakses	100%	100%	200.000	100%	500.000	100%	700.000	100%	700.000	100%	2.100.000	DKISP
		Persentase ketersediaan jaringan internet (bandwith) OPD	66%	100%	1.100.000	100%	500.000	100%	600.000	100%	600.000	100%	2.800.000	DKISP
2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Kategori kelurahan	Berkembang	Berkembang	23.000	Cepat Berkembang	25.000	Cepat Berkembang	25.000	Cepat Berkembang	25.000	Cepat Berkembang	98.000	DINSOSPM
2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase perekaman KTP Elektronik	96,29%	98,21%	23.200	100%	67.000	100%	80.000	100%	80.000	100%	250.200	DISDUKCAPIL
		Persentase anak usia 0-17 kurang 1 hari yang memiliki KIA	53,26%	63,91%		76,69%		92,02%		100%		100%		DISDUKCAPIL
2.12.03	Program Pencatatan Sipil	Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan	100 %	100%	15.000	100%	10.000	100%	40.000	100%	40.000	100%	105.000	DISDUKCAPIL
2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Perangkat Daerah Yang Memanfaatkan Data Kependudukan	80%	80%	0	80%	130.000	80%	132.195	80%	110.000	80%	372.195	DISDUKCAPIL
2.12.05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Cakupan Ketersediaan Profil Kependudukan	100%	100%	0	100%	50.000	100%	10.000	100%	10.000	100%	70.000	DISDUKCAPIL
2.24.02 ..	Program Pengelolaan Arsip	Persentase pengelolaan Arsip	0,00%	-	0	1 Lokasi	30.000	1 Lokasi	30.000	1 Lokasi	30.000	1 Lokasi	90.000	DISPUSPAN
2.24.03	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Persentase Pengelolaan Kerasipan Sesuai Standar	n/a	0,00%	0	3 Jenis Usaha Budidaya	100.000	3 Jenis Usaha Budidaya	100.000	3 Jenis Usaha Budidaya	100.000	9 Jenis Usaha Budidaya	300.000	DISPUSPAN
2.24.04	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Persentase Penggunaan dan Pemanfaatan Arsip	0,00%	100,00%	7.686.717	100,00%	7.879.118	100,00%	7.879.118	100,00%	7.879.118	100,00%	31.324.072	DISPUSPAN
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	0,00%	100,00%	10.000	100,00%	1.500	100,00%	1.500	100,00%	1.500	100,00%	14.500	CTG

7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100%	100%	1.765.799	100%	1.780.799	100%	1.775.799	100%	1.775.799	100%	7.098.197	CTT
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100%	100%	797.500	100%	797.500	100%	800.000	100%	800.000	100%	3.195.000	CTU
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase tercapainya kinerja pemberdayaan masyarakat kelurahan	100%	100%	2.327.297	100%	2.331.475	100%	2.331.475	100%	2.331.475	100%	9.321.722	CTB
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100%	100%	2.118.000	100%	2.123.000	100%	2.133.000	100%	2.133.000	100%	8.507.000	CTG
	AK.19 Pengembangan seni budaya dan olah raga, pemuda dan kewanitaan													ARAH KEBIJAKAN
2.22.02..	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Kebudayaan yang dikembangkan	n/a	50%	1.325.000	55%	1.600.000	60%	1.600.000	65%	1.600.000	65%	6.125.000	Disbudporapar
2.22.03..	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan	n/a	50%	0	50%	200.000	60%	200.000	75%	200.000	75%	600.000	Disbudporapar
2.22.04.	Program Pembinaan Sejarah	Persentase data informasi sejarah yang dapat diakses masyarakat	n/a	80%	0	90%	75.000	100%	75.000	100%	75.000	100%	225.000	Disbudporapar
2.22.05.	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang dilindungi, dikembangkan dandimanfaatkan	n/a	80%	50.000	85%	980.000	90%	980.000	95%	980.000	95%	2.990.000	Disbudporapar
2.22.06..	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase museum yang dikelola	n/a	80%	350.000	90%	725.000	100%	725.000	100%	725.000	100%	2.525.000	Disbudporapar
2.19.03..	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase cabor yang mempunyai manajemen yang baik	n/a	80%	704.999	90%	1.836.546	100%	1.836.546	100%	1.836.546	100%	6.214.637	Disbudporapar

2.19.04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase kapasitas Kepramukaan yang dikembangkan	n/a	80%	100.000	90%	100.000	100%	100.000	100%	100.000	100%	400.000	Disbudporapar
2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pemuda yang difasilitasi untuk mengikuti kegiatan Kepemudaan	n/a	80%	394.998	90%	550.000	100%	550.000	100%	550.000	100%	2.044.998	Disbudporapar
2.08.02	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	1. Cakupan PUG yang aktif	10%	23,33%	214.986	33,33%	215.000	43,33%	215.000	53,33%	215.000	53,33%	859.986	DPPPAPPKB
..		2. Persentase ARG pada APBD	n/a	10,00%		10,00%		11,00%		12,00%		12,00%		DPPPAPPKB
2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang terlayani	100%	100%	289.746	100%	289.746	100%	307.016	100%	307.016	100%	1.193.526	DPPPAPPKB
..		Rasio kekerasan terhadap peremp termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	18,98	18,72		18,50		18,20		17,95		17,95		DPPPAPPKB
2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Keluarga yang mendapatkan informasi tentang Kesetaraan Gender dan Hak Anak	30%	30%	0	30%	125.000	35%	125.000	35%	125.000	35%	375.000	DPPPAPPKB
2.08.05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki data gender dan anak	100%	100%	0	100%	10.000	100%	25.000	100%	25.000	100%	60.000	DPPPAPPKB
2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Persentase pemenuhan indikator KLA	n/a	20,83%	14.925	33,33%	500.000	50%	500.000	62,50%	500.000	62,50%	1.514.925	DPPPAPPKB
2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	0,023%	0,023%	269.066	0,022%	275.363	0,021%	315.363	0,020%	315.363	0,020%	1.175.154	DPPPAPPKB
..		Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100%	100%		100%		100%		100%		100%		DPPPAPPKB

..	**Misi III : Meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur publik yang cepat, mudah, murah, adil, dan transparan.**													**MISI**
..	**Tujuan 3. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang merata dan berkualitas**	**Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur**	**n/a**	**79,00**	**184.038.150**	**79,50**	**184.607.470**	**80,00**	**183.171.810**	**81,50**	**184.044.163**	**81,50**	**735.861.593**	**TUJUAN**
..	**Sasaran 7, Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau**	**Persentase Ruang Terbuka Hijau**	**50,40%**	**52,96%**	**1.686.583**	**55,51%**	**1.777.000**	**58,07%**	**1.777.000**	**60,63%**	**1.777.000**	**60,63%**	**7.017.583**	**SASARAN**
	ST.5 Peningkatan Ruang Terbuka Hijau													STRATEGI
	AK.20 Pengembangan dan Pembangunan Ruang Terbuka Kota													ARAH KEBIJAKAN
1.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase layanan pengelolaan taman makam pahlawan	100%	100%	76.623	100%	77.000	100%	77.000	100%	77.000	100%	307.623	DINSOSPM
2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau	50,40%	52,96%	1.609.961	55,51%	1.700.000	58,07%	1.700.000	60,63%	1.700.000	60,63%	6.709.961	DLH
	Sasaran 8, Meningkatnya pelayanan air bersih	**Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air Minum**	**86,52%**	**74,38%**	**55.938.789**	**92,34%**	**43.209.088**	**95,62%**	**58.265.323**	**95,96%**	**68.991.665**	**95,96%**	**226.404.865**	**SASARAN**
	ST.6 Pemerataan pemenuhan air bersih masyarakat													STRATEGI
	AK.21 Perluasan dan Pemerataan Jaringan Air Bersih Skala Lokal dan Regional													ARAH KEBIJAKAN
1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Volume tampungan air baku (meter3)	775 m3	897.982 m3	34.842.488	1.025.590 m3	26.289.430	1.031.590 m3	30.441.469	1.160.590 m3	47.317.583	.160.590 m3	138.890.971	DPUPR
1.03.03	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga Yang Dapat Mengakses Air Minum (%)	86,52%	74,38%	21.096.300	92,34%	16.919.658	95,62%	27.823.854	95,96%	21.674.082	95,96%	87.513.894	DPUPR

	Sasaran 9, Meningkatnya sarana prasarana perkotaan	**Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik**	**72,63%**	**72,75%**	**811.250**	**72,87%**	**230.000**	**72,99%**	**1.130.000**	**73,11%**	**1.130.000**	**73,11%**	**3.301.250**	**SASARAN**
		Persentase Penambahan Bangunan Pemerintah dan Fasilitas Umum	**16,67%**	**57,58%**	**14.960.790**	**72,73%**	**35.660.081**	**87,88%**	**37.964.190**	**100,00%**	**813.501**	**100,00%**	**89.398.561**	**SASARAN**
		Persentase Bangunan dan Lingkungan Yang Tertata	**21,12%**	**45,00%**	**27.245.484**	**58,75%**	**40.248.738**	**82,50%**	**18.280.869**	**100,00%**	**29.500.000**	**100,00%**	**115.275.091**	**SASARAN**
		Persentase Panjang Jalan dengan Kondisi Mantap	**70,08%**	**60,65%**	**57.447.964**	**64,14%**	**37.598.153**	**65,63%**	**39.935.268**	**65,94%**	**55.867.583**	**65,94%**	**190.848.969**	**SASARAN**
		Persentase pembinaan jasa konstruksi	**20,00%**	**20,00%**	**30.062**	**20,00%**	**150.000**	**20,00%**	**50.000**	**20,00%**	**50.000**	**20,00%**	**280.062**	**SASARAN**
		Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	**82,49%**	**86,01%**	**134.476**	**89,54%**	**700.000**	**93,94%**	**900.000**	**98,35%**	**800.000**	**98,35%**	**2.534.476**	**SASARAN**
		Rasio Panjang Jalan Dibagi Jumlah Kendaraan	**1,38**	**1,29**	**2.861.129**	**1,27**	**2.222.756**	**1,25**	**2.147.506**	**1,23**	**2.392.759**	**1,23**	**9.624.150**	**SASARAN**
		Persentase Pemeliharaan Pelabuhan	**n/a**	**0%**	**0**	**30%**	**150.000**	**60%**	**100.000**	**100%**	**100.000**	**100%**	**350.000**	**SASARAN**
	ST.7 Peningkatan sarana prasarana perkotaan													STRATEGI
	AK.22 Peningkatan Kuantitas dan Kualitas sarana prasarana perkotaan													ARAH KEBIJAKAN
1.03.05	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	72,63%	72,75%	811.250	72,87%	230.000	72,99%	1.130.000	73,11%	1.130.000	73,11%	3.301.250	DPUPR
1.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Penambahan Bangunan Pemerintah dan Fasilitas Umum	16,67%	57,58%	14.960.790	72,73%	35.660.081	87,88%	37.964.190	100,00%	813.501	100,00%	89.398.561	DPUPR

1.03.09	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase Bangunan dan Lingkungan Yang Tertata	21,12%	45,00%	27.245.484	58,75%	40.248.738	82,50%	18.280.869	100,00%	29.500.000	100,00%	115.275.091	DPUPR
1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Panjang Jalan dengan Kondisi Mantap	70,08%	60,65%	57.447.964	64,14%	37.598.153	65,63%	39.935.268	65,94%	55.867.583	65,94%	190.848.969	DPUPR
1.03.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase pembinaan jasa konstruksi	20,00%	20,00%	30.062	20,00%	150.000	20,00%	50.000	20,00%	50.000	20,00%	280.062	DPUPR
1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	82,49%	86,01%	134.476	89,54%	700.000	93,94%	900.000	98,35%	800.000	98,35%	2.534.476	DPUPR
1.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	jumlah titik daerah potensi dan rawan laka	64 titik	57 titik	2.498.159	44 titik	1.553.932	40 titik	1.807.506	35 titik	2.052.759	35 titik	7.912.356	DISHUB
		Presentase Kendaraan yang Melaksankan Wajib Uji di Kota Tarakan	25,99%	42,29%	333.000	50,75%	478.825	59,21%	150.000	67,67%	150.000	67,67%	1.111.825	DISHUB
		Titik Kemacetan yang teratasi	36 Titik	31 Titik	29.970	26 Titik	190.000	21 Titik	190.000	17 Titik	190.000	17 Titik	599.970	DISHUB
		Rasio Panjang Jalan Dibagi Jumlah Kendaraan	n/a	1,29	0	1,27	0	1,25	0	1,23	0	1,23	0	DISHUB
1.15.03	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Pemeliharaan Pelabuhan	n/a	0,00%	0	30,00%	150.000	60,00%	100.000	100,00%	100.000	100,00%	350.000	DISHUB
	Sasaran 10, Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni untuk MBR	**Persentase Rumah untuk MBR yang terbangun dan terenovasi**	**20%**	**40%**	**1.197.278**	**60%**	**1.340.000**	**80%**	**1.340.000**	**100%**	**1.340.000**	**100%**	**5.217.278**	**SASARAN**
	ST. 8 Pengembangan Permukiman dan Rehabilitasi Kawasan Kumuh				2.861.129		2.372.756		2.247.506		2.492.759			STRATEGI
	AK. 23 Pengembangan Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)													ARAH KEBIJAKAN
1.04.02	Program Pengembangan Perumahan	Persentase ketersediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana / relokasi	100,00%	100,00%	59.203	100,00%	140.000	100,00%	140.000	100,00%	140.000	100,00%	479.203	DPRKPP

1.04.04	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase layanan ketersediaan rumah layak huni untuk MBR	20,00%	40,00%	1.138.074	60,00%	1.200.000	80,00%	1.200.000	100,00%	1.200.000	100,00%	4.738.074	DPRKPP
	Sasaran 11, Menurunnya luas kawasan kumuh	**Persentase lingkungan pemukiman kumuh**	**74,96%**	**49,17%**	**21.724.344**	**31,74%**	**21.321.654**	**17,64%**	**21.281.654**	**6,87%**	**21.281.654**	**6,87%**	**85.609.306**	**SASARAN**
	ST. 8 Pengembangan Permukiman dan Rehabilitasi Kawasan Kumuh													STRATEGI
	AK.24 Peningkatan prasarana, sarana, utilitas umum kawasan permukiman kumuh													ARAH KEBIJAKAN
1.04.03	Program Kawasan Permukiman	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	38,34%	30,47%	75.000	22,61%	1.745.000	14,74%	1.405.000	6,87%	1.405.000	6,87%	4.630.000	DPRKPP
1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang ditingkatkan	93,46%	100,00%	21.649.344	100,00%	19.576.654	100,00%	19.876.654	100,00%	19.876.654	100,00%	80.979.306	DPRKPP
..	**Misi IV : Mengembangkan ekonomi daerah yang berorientasi kepada kepentingan rakyat (Ekonomi Pro Rakyat) melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata dan pertanian dalam arti luas**													**MISI**
..	**Tujuan 4. Meningkatnya Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Daerah**	**Gini Rasio**	**0,295**	**0,30**	**3.597.776**	**0,29**	**8.504.028**	**0,29**	**8.068.242**	**0,28**	**8.681.468**	**0,28**	**28.851.514**	**TUJUAN**
..	**Sasaran 12, Menurunnya kemiskinan**	**Angka Kemiskinan**	**6,24**	**5,70**	**293.862**	**5,55**	**380.000**	**5,40**	**405.000**	**5,25**	**365.000**	**5,25**	**1.443.862**	**SASARAN**
	ST.9 Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin													STRATEGI

	AK.25 Perbaikan layanan dasar masyarakat miskin yang tepat sasaran													ARAH KEBIJAKAN
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase partisipasi PSKS yang memperoleh pembinaan, bimbingan dan pelatihan dalam menunjang pelaksanaan kesejahteraan sosial	100%	100%	5.500	100%	0	100%	10.000	100%	0	100%	15.500	DINSOSPM
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar serta gelandangan pengemis terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	100%	60.877	100%	190.000	100%	210.000	100%	200.000	100%	660.877	DINSOSPM
1.06.05	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase perlindungan dan jaminan sosial yang dilayani	75%	75%	177.498	78%	140.000	78%	115.000	80%	115.000	80%	547.498	DINSOSPM
1.06.06	Program Penanganan Bencana	Persentase layanan penanganan bencana alam dan sosial	100%	100%	49.987	100%	50.000	100%	70.000	100%	50.000	100%	219.987	DINSOSPM
	Sasaran 13, Menurunnya pengangguran,	**Tingkat Pengangguran Terbuka**	**5,84**	**5,79**	**114.977**	**5,74**	**504.993**	**5,69**	**504.993**	**5,64**	**574.993**	**5,64**	**1.699.954**	**SASARAN**
	ST.10 Peningkatan kualitas sumberdaya dan penyerapan tenaga kerja local													STRATEGI
	AK.26 Perencanaan tenaga kerja													ARAH KEBIJAKAN
2.07.02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase dokumen Rencana Tenaga Kerja yang tersusun	n/a	0,00%	0	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	70.000	100,00%	70.000	DPTK
	AK.27 Peningkatan kualitas tenaga kerja													ARAH KEBIJAKAN
2.07.03	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang kompeten	53,00%	93,30%	52.497	94,00%	200.000	95,00%	200.000	96,00%	200.000	96,00%	652.497	DPTK
	AK. 28 Perluasan Kesempatan Kerja													ARAH KEBIJAKAN

2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang terserap	20,94%	21,62%	25.000	22,35%	155.000	24,36%	155.000	24,40%	155.000	24,40%	490.000	DPTK
2.07.05	Program Hubungan Industrial	Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan	30,00%	40,00%	37.480	50,00%	149.993	60,00%	149.993	70,00%	149.993	70,00%	487.457	DPTK
	Sasaran 14, Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah	**Laju pertumbuhan ekonomi**	**-0,78**	**5,65**	**2.878.064**	**5,93**	**7.303.038**	**6,23**	**6.754.252**	**6,53**	**7.203.475**	**6,53**	**24.138.830**	**SASARAN**
	ST.11 Penguatan potensi unggulan ekonomi local													STRATEGI
	AK.29 Pengembangan dan Pembangunan pertanian dalam arti luas													ARAH KEBIJAKAN
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi perikanan tangkap	13441.52 Ton	4,00%	338.821	4,00%	504.000	4,00%	524.000	4,00%	424.000	16,00%	1.790.821	DISKAN
3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Produksi perikanan budidaya	185.732,80 ton	5,00%	415.000	5,00%	460.000	5,00%	460.000	5,00%	480.000	20,00%	1.815.000	DISKAN
3.25.05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan	5,78%	4,00%	0	4,00%	100.000	5,00%	150.000	5,00%	400.000	18,00%	650.000	DISKAN
3.25.06	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase pemasaran produk perikanan	0,80%	1,00%	150.000	1,50%	350.000	2,00%	350.000	2,50%	350.000	2,50%	1.200.000	DISKAN
3.27.02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas Hasil Peternakan (Daging)	100,00%	100,00%	0	100,00%	95.000	100,00%	93.400	100,00%	220.000	100,00%	408.400	DKPP
		Produktivitas Hasil Pertanian	3.6 ton/ha	4 ton/ha	0	4.4 ton/ha	50.000	4.8 ton/ha	75.000	5.2 ton/ha	125.000	5.2 ton/ha	250.000	DKPP
3.27.03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase peningkatan produksi pertanian	0,10%	0,10%	50.000	0,20%	360.000	0,30%	100.000	0,40%	120.000	0,40%	630.000	DKPP

3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Cakupan waktu pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	12 bulan	12 bulan	50.000	12 bulan	153.409	12 bulan	118.409	12 bulan	175.000	12 bulan	496.817	DKPP
3.27.06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Cakupan surat rekomendasi izin usaha yang diterbitkan	n/a	0,00%	0	100,00%	15.000	100,00%	7.500	100,00%	15.000	100,00%	37.500	DKPP
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Rata-rata pendapatan petani miskin per kapita selama setahun (dalam Jutaan)	Rp 22.800	Rp 24.000	77.000	Rp 25.200	210.000	Rp 26.400	230.000	Rp 27.600	275.000	Rp 27.600	792.000	DKPP
	AK.30 Pembangunan dan Pengembangan Sektor Industri													ARAH KEBIJAKAN
3.31.02	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	persentase peningkatan daya saing IKM yang difasilitasi	20,80%	5,60%	24.956	11,11%	206.000	13,91%	206.000	17,91%	206.000	17,91%	642.956	DPTK
3.31.03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase izin usaha industri yang dipantau dan dianalisis	n/a	90,00%	0	90,00%	4.000	90,00%	4.000	90,00%	4.000	90,00%	12.000	DPTK
3.31.04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	persentase data perusahaan industri yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan	n/a	32,54%	0	40,01%	24.000	46,12%	24.000	51,32%	24.000	51,32%	72.000	DPTK
	AK.31 Peningkatan perdagangan barang dan jasa berbasis sumber daya local													ARAH KEBIJAKAN
3.30.02	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase peningkatan SKA yang diterbitkan	n/a	2,37%	0	4,73%	35.000	7,10%	30.000	9,47%	30.000	9,47%	95.000	DKUKMP
3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	n/a	80,00%	202.000	100,00%	300.000	100,00%	100.000	100,00%	100.000	100,00%	702.000	DKUKMP
3.30.05	Program Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor Kota Tarakan (dalam Milyar)	Rp 2.780	Rp 2.780	0	Rp 2.790	178.627	Rp 2.790	178.627	Rp 2.800	178.627	Rp 2.800.000	535.881	DKUKMP
3.30.06	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase UTTP Tertera bertanda sah	45,54%	27,27%	40.000	47,72%	105.000	47,72%	105.000	47,72%	113.735	47,72%	363.735	DKUKMP
3.30.07	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase peningkatan jenis produk lokal Kota Tarakan yang dipasarkan	n/a	0,00%	199.980	5,00%	200.000	10,00%	200.000	15,00%	200.000	15,00%	799.980	DKUKMP

	AK.32 Peningkatan pengelolaan potensi dan destinasi wisata													ARAH KEBIJAKAN
3.26.02.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Daya Tarik Destinasi yang Ditingkatkan	n/a	100%	258.978	100%	2.075.000	100%	2.075.000	100%	2.075.000	100%	6.483.978	Disbudporapar
3.26.03.	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan	n/a	211.477 orang	300.000	211.577 orang	350.000	231.677 orang	350.000	241.777 orang	350.000	241.777 orang	1.350.000	Disbudporapar
3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase terlaksananya Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreati	n/a	100 %	229.999	100%	190.000	100%	190.000	100%	190.000	100%	799.999	Disbudporapar
	AK.33 Peningkatan Kemudahan Investasi													ARAH KEBIJAKAN
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan rencana investasi Kota Tarakan	75,94%	25,30%	50.000	15,87%	165.000	13,70%	100.000	9,64%	83.000	9,64%	398.000	DPMPTSP
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase kegiatan Promosi Penanaman Modal	n/a	100,00%	19.996	100,00%	400.000	100,00%	325.000	100,00%	323.000	100,00%	1.067.996	DPMPTSP
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Nilai IKM (Unsur Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu)	82 B	86 B	89.978	86 B	350.000	87 B	350.000	88 B	88 B	7,54%	1.129.978	DPMPTSP
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Nilai realisasi investasi Kota Tarakan (dalam milyar rupiah)	Rp 248.672	Rp 574.345	381.356	Rp 650.000	361.002	Rp 745.000	358.317	Rp 860.000	360.000	Rp 860.000	1.460.674	DPMPTSP
2.18.06	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang dikelola	100,00%	100,00%	0	100,00%	62.000	100,00%	50.000	100,00%	42.114	100,00%	154.114	DPMPTSP
	Sasaran 15, Terkendalinya Inflasi daerah	**Tingkat Inflasi**	**1,15**	**3,70**	**310.873**	**3,50**	**315.998**	**3,20**	**403.998**	**3,00**	**538.000**	**3,00**	**1.568.869**	**SASARAN**
	ST.12 Menjaga stabilitas harga dan distribusi barang													STRATEGI
	AK.34 Pengendalian Inflasi													ARAH KEBIJAKAN
2.09.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase ketersediaan sarana pendukung kemandirian pangan	0,00%	0,00%	0	33,00%	10.000	33,00%	10.000	33,00%	10.000	33,00%	30.000	DKPP

2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Peningkatan skor pola pangan harapan	85,00	83,00	50.000	84,00	100.000	85,00	100.000	86,00	190.000	86,00	440.000	DKPP
		Persentase ketersediaan dan kebutuhan terhadap bahan pangan penyumbang inflasi	112,0%	113,00%	0	114,00%	0	115,00%	0	116,00%	0	116,00%	0	DKPP
2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penanganan daerah rawan pangan	n/a	-	0	100,00%	60.000	100,00%	138.000	100,00%	138.000	100,00%	336.000	DKPP
2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	persentase keamanan pangan yang dilaksanakan	n/a	100,00%	20.000	100,00%	10.000	100,00%	20.000	100,00%	85.000	100,00%	135.000	DKPP
3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase pemantauan Perkembangan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting ditingkat Pasar Kabupaten/ Kota	n/a	100,00%	30.000	100,00%	75.000	100,00%	75.000	100,00%	75.000	100,00%	255.000	DKUKMP
4.01.03 ..	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Nilai IHK	108 HK	108 IHK	210.873	111 IHK	60.998	114 IHK	60.998	117 IHK	40.000	117 IHK	372.869	SETDA
		Persentase Pemantauan Rumah Tangga yang teraliri Gas Alam secara optimal	90%	90%	0	95%	30.000	100%	30.000	100%	25.000	100%	85.000	SETDA
		Persentase Pemantauan Rumah Tangga yang teraliri air Bersih secara optimal	100%	90%	89.826	100%	75.000	100%	75.000	100%	70.000	100%	309.826	SETDA
	Misi V : Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam melalui peningkatan nilai tambah yang berwawasan lingkungan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna, kreativitas dan inovatif berdasarkan ilmu pengetahuan													**MISI**

	Tujuan 5. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	**67,07**	**68,83**	**17.469.439**	**69,28**	**12.541.208**	**69,74**	**13.825.868**	**70,19**	**13.862.640**	**70,19**	**57.699.154**	**TUJUAN**
	Sasaran 16, Menurunnya pencemaran lingkungan	**Indeks Kualitas Air**	**45,56**	**54,82**	**549.922**	**54,92**	**1.815.000**	**55,02**	**1.465.000**	**55,12**	**1.465.000**	**55,12**	**5.294.922**	**SASARAN**
		Indeks Kualitas Udara	**93,42**	**91,45**		**91,55**		**91,66**		**91,77**		**91,77**		**SASARAN**
		Indeks Tutupan Lahan	**55,3**	**51,06**		**52,76**		**54,46**		**56,16**		**56,16**		**SASARAN**
		Persentase sampah yang dikelola	**90,77%**	**98,00%**	**2.124.518**	**99,00%**	**2.196.617**	**99,00%**	**3.760.868**	**98,00%**	**3.797.640**	**98,00%**	**11.879.642**	**SASARAN**
	ST.13 Pencegahan dan pengendalian kerusakan lingkungan													STRATEGI
	AK.35 Pengendalian Pencemaran Lingkungan													ARAH KEBIJAKAN
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase ketersedian dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	100,00%	100,00%	100.000	100,00%	200.000	100,00%	300.000	100,00%	300.000	100,00%	900.000	DLH
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,07	68,83	159.922	69,28	600.000	69,74	250.000	70,19	250.000	70,19	1.259.922	DLH
2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase penanganan limbah B3	100,00%	100.00%	240.000	100.00%	170.000	100.00%	170.000	100.00%	170.000	100.00%	750.000	DLH
2.11.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang melanggar izin lingkungan	52,00%	48,00%	25.000	45,00%	370.000	41,00%	270.000	38,00%	270.000	38,00%	935.000	DLH
2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	50,00%	50,00%	0	50,00%	250.000	75,00%	250.000	100,00%	250.000	100,00%	750.000	DLH
2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	n/a	50,00%	0	50,00%	125.000	50,00%	125.000	50,00%	125.000	50,00%	375.000	DLH

		Persentase Perusahaan yang mendapatkan minimal level biru	35%	35,00%	0	35,00%	75.000	35,00%	75.000	35,00%	75.000	35,00%	225.000	DLH
2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	100,00%	100,00%	25.000	100,00%	25.000	100,00%	25.000	100,00%	25.000	100,00%	100.000	DLH
	AK.36 Peningkatan Pengelolaan Persampahan													ARAH KEBIJAKAN
1.03.04	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang terbangun	47,06%	64,71%	100.000	76,47%	800.000	88,24%	2.000.000	100,00%	2.000.000	100,00%	4.900.000	DPUPR
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang dikelola	90,77%	98,00%	2.024.518	99,00%	1.396.617	99,00%	1.760.868	98,00%	1.797.640	98,00%	6.979.642	DLH
	Sasaran 17, Meningkatnya penanganan kebencanaan yang efektif	**Persentase Luas genangan banjir**	**0,230%**	**0,228%**	**14.794.999**	**0,116%**	**8.529.591**	**0,110%**	**8.600.000**	**0,096%**	**8.600.000**	**0,096%**	**40.524.590**	**SASARAN**
		Persentase pelayanan Kebencanaan	n/a	**100%**	**419.913**	**100%**	**1.245.000**	**100%**	**1.032.000**	**100%**	**660.000**	**100%**	**3.356.913**	**SASARAN**
		Persentase pelayanan bencana kebakaran	**92%**	**100%**	**144.950**	**100%**	**416.000**	**100%**	**196.000**	**100%**	**176.000**	**100%**	**932.950**	**SASARAN**
	ST.14 Optimalisasi penanganan bencana													STRATEGI
	AK.37 Peningkatan Kualitas Mitigasi dan Penanggulangan Bencana													ARAH KEBIJAKAN
1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Prosentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	0	100%	250.000	100%	95.000	100%	20.000	100%	365.000	BPBD
		Prosentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100%	100%	219.993	100%	755.000	100%	697.000	100%	400.000	100%	2.071.993	BPBD

		Prosentase Jumlah Warga Negara Yang Memperolah Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100%	199.920	100%	240.000	100%	240.000	100%	240.000	100%	919.920	BPBD
1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	92%	100%	144.950	100%	346.000	100%	181.000	100%	161.000	100%	832.950	SATPOL PP & PMK
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (Operasi darurat non kebakaran)	100%	100%	0	100%	70.000	100%	15.000	100%	15.000	100%	100.000	SATPOL PP & PMK
	AK.38 Peningkatan Kualitas Mitigasi dan Penanggulangan Banjir													ARAH KEBIJAKAN
1.03.06	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Luas Genangan Banjir (%)	0,23%	0,23%	14.794.999	0,12%	8.529.591	0,11%	8.600.000	0,10%	8.600.000	0,10%	40.524.590	DPUPR
	Misi VI : Meningkatkan Pembangunan Akhlak Dan Moral Sesuai Kearifan Lokal Serta Mewujudkan Kepastian Hukum													**MISI**
	Tujuan 6. Meningkatnya kerukunan, ketentraman, dan ketertiban di masyarakat	**Indeks Kota Toleran**	**5,337**	**5,30**	**5.833.294**	**5,35**	**4.665.328**	**5,40**	**4.605.133**	**5,45**	**5.252.328**	**5,45**	**20.356.083**	**TUJUAN**
	Sasaran 18, Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban kota	**Persentase pelanggaran K3 yang tertangani**	**100%**	**100%**	**5.833.294**	**100%**	**4.665.328**	**100%**	**4.605.133**	**100%**	**5.252.328**	**100%**	**20.356.083**	**SASARAN**
	ST.15 Penguatan kondusifitas keamanan dan ketertiban wilayah													STRATEGI
	AK.39 Optimalisasi Keamanan, Ketertiban, dan ketentraman Masyarakat													ARAH KEBIJAKAN

1.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%	75.000	100%	155.000	100%	70.000	100%	80.000	100%	380.000	Satpol PP & PMK
		Persentase Perda dan Perkada yang di tegakkan	100%	100%	91.200	100%	165.000	100%	165.000	100%	165.000	100%	586.200	Satpol PP & PMK
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Capaian Kinerja Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	100%	5.000	100%	5.000	100%	5.000	100%	5.000	100%	20.000	CTG
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Capaian Kinerja Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0%	100%	0	100%	0	100%	10.000	100%	10.000	100%	20.000	CTU
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Capaian Kinerja Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0%	100%	0	100%	5.000	100%	5.000	100%	10.000	100%	20.000	CTT
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Capaian Kinerja Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0%	0%	0	100%	5.000	100%	5.000	100%	5.000	100%	15.000	CTB
8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Prosentase partai politik yang berperan dalam pembangunan nasional	100%	100%	1.098.744	100%	1.113.745	100%	1.113.745	100%	1.713.745	100%	5.039.979	Bakesbangpol
8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Prosentase capaian kinerja penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	100%	998.596	100%	835.000	100%	835.000	100%	835.000	100%	3.503.596	Bakesbangpol
8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase penanganan konflik sosial yang difasilitasi	100%	100%	74.971	100%	235.000	100%	235.000	100%	235.000	100%	779.971	Bakesbangpol

2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga masyarakat yang aktif	100%	100%	799.689	100%	839.932	100%	814.737	100%	846.932	100%	3.301.289	DINSOSPM
	AK.40 Peningkatan Toleransi Keagamaan													ARAH KEBIJAKAN
8.01.05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase capaian kinerja Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	100%	100%	199.997	100%	130.000	100%	130.000	100%	130.000	100%	589.997	Bakesbangpol
8.01.04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Prosentase ormas yang aktif	80%	80%	1.670.283	80%	360.000	80%	360.000	80%	360.000	80%	2.750.283	Bakesbangpol
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	205.000	100%	203.500	100%	218.500	100%	218.500	100%	845.500	CTG
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	138.152	100%	140.000	100%	165.000	100%	165.000	100%	608.152	CTU
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	271.666	100%	271.666	100%	271.666	100%	271.666	100%	1.086.666	CTT
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	204.996	100%	201.485	100%	201.485	100%	201.485	100%	809.451	CTB

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Program perangkat daerah adalah program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Program pembangunan Daerah disusun untuk menggambarkan keterkaitan program perangkat daerah dalam mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih.

Perencanaan program perangkat daerah dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1. Penjabaran visi dan misi wali kota dan wakil wali kota terpilih.
2. Berbasis permasalahan serta isu strategis daerah.
3. Pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM).
4. Peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup.
5. Penerapan sub urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota.

Untuk mendukung program perangkat daerah, maka dialokasikan anggaran belanja sebagaimana telah dihitung dan dianalisis pada Bab III RPJMD ini. Adapun anggaran dimaksud disajikan pada Tabel 7.1

Tabel 7.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah
Kota Tarakan Tahun 2021-2024 (dalam juta)

Kode	URAIAN	PROYEKSI			
		2021	2022	2023	2024
2	**BELANJA**				
2.1	**BELANJA OPERASI**	**756,867**	**761,367**	**765,912**	**770,502**
2.1.01	Belanja Pegawai	449,979	454,479	459,024	463,614
2.1.02	Belanja Barang dan Jasa	239,752	239,752	239,752	239,752
2.1.05	Belanja Hibah	64,862	64,862	64,862	64,862
2.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2,274	2,274	2,274	2,274
2.2	**BELANJA MODAL**	**232,690**	**232,690**	**232,690**	**232,690**
2.2.01	Belanja Modal Tanah	4,933	4,933	4,933	4,933
2.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36,589	36,589	36,589	36,589
2.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	77,733	77,733	77,733	77,733
2.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	113,100	113,100	113,100	113,100
2.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	335	335	335	335
2.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**15,000**	**5,000**	**5,000**	**5,000**
2.3.01	Belanja Tidak Terduga	15,000	5,000	5,000	5,000
	Jumlah Belanja	**1,004,557**	**999,057**	**1,003,602**	**1,008,192**

Tabel 7.2

Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Tarakan Tahun 2021-2024

Kode	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat daerah Penanggung Jawab
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		Kondisi kinerja pada alhir periode RPJMD		
				TARGET	Rp (dalam ribuan rupiah	TARGET	Rp (dalam ribuan rupiah	TARGET	Rp (dalam ribuan rupiah	TARGET	Rp (dalam ribuan rupiah	TARGET	Rp (dalam ribuan rupiah	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**649.434.012**		**641.075.697**		**643.980.492**		**646.928.569**		**2.581.718.770**	
1.01.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**281.170.359**		**274.888.744**		**278.863.056**		**280.661.413**		**1.115.583.572**	**Dinas Pendidikan**
1.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi			180.281.009	100%	183.887.326	100%	183.689.504	100%	183.745.841	100%	731.603.679	Dinas Pendidikan
1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	Rasio siswa per kelas SD	35,00	33,00	100.739.365	30,00	90.611.417	29,00	95.018.552	28,00	96.756.572	28,00	383.125.907	Dinas Pendidikan
		Rasio siswa per kelas SMP	31,00	30,00		29,00		28,00		28,00		28,00		Dinas Pendidikan
		Rasio siswa per rombongan belajar SD	27,26	27,81		28,00		28,0		28,0		28,0		Dinas Pendidikan
		Rasio siswa per rombongan belajar SMP	31,94	30,00		29,00		28,0		28,0		28,0		Dinas Pendidikan
		Rasio siswa per kelas PAUD	14,00	14,70		15,00		15,0		15,0		15,0		Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Murni PAUD	60.5	61,00		61.5		62,0		62.50		62.50		Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Murni SD/ MI	87.34	84.24		86.75		87.49		88.15		88.15		Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	71.80	75.39		79.16		83.12		87.27		87.27		Dinas Pendidikan

		Angka Kelulusam SD/MI	97,26	99,21		100,00		100,0		100,0		100,0		Dinas Pendidikan
		Angka Kelulusan SMP/MTs	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Pendidikan
		Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	94,12	96,00		98,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Pendidikan
		Angka putus sekolah SD/MI	0,39	0,29		0,19		0,00		0,00		0,00		Dinas Pendidikan
		Angka putus sekolah SMP/MTs	0,42	0,32		0,22		0,12		0,07		0,00		Dinas Pendidikan
1.01.03	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase sekolah yang melaksanakan kurikulum muatan lokal	100%	100%	0	100%	10.000	100%	10.000	100%	10.000	100%	30.000	Dinas Pendidikan
1.01.04	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Rasio siswa per guru PAUD	9	15	149.986	15	360.000	15	130.000	15	130.000	15	769.986	Dinas Pendidikan
		Rasio siswa per guru SD/MI	19	28		28		28		28		28	0	Dinas Pendidikan
		Rasio siswa per guru SMP/MTs	14	28		28		28		28		28	0	Dinas Pendidikan
1.01.05	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase sekolah yang memiliki ijin operasional	100%	100%	0	100%	10.000	100%	5.000	100%	9.000	100%	24.000	Dinas Pendidikan
1.01.06	Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Persentase sekolah yang menerapkan bahasa dan sastra daerah	100%	100%	0	100%	10.000	100%	10.000	100%	10.000	100%	30.000	Dinas Pendidikan
1.02.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**130.445.953**		**130.410.171**		**130.410.171**		**130.410.171**		**521.676.466**	**Dinas Kesehatan**
1:02:01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%	100%	78.847.076	100%	96.360.015	100%	97.078.827	100%	97.727.827	100%	370.013.745	Dinas Kesehatan
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase UPT yang melaksanakan UKP dan UKM	100%	100%	48.738.531	100%	31.177.786	100%	30.358.974	100%	29.709.974	100%	139.985.266	Dinas Kesehatan
		Rasio Daya Tampung RS terhadap jumlah penduduk	0,00091	0,02		0,02		0,02		0,02		0,02		Dinas Kesehatan

		Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten Kota yang terakreditasi	40%	40%		60%		60%		80%		80%		Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Ibu Melahirkan	42/100.000 KH	42/100.000 KH		42/100.000 KH		42/100.000 KH		42/100.000 KH		42/100.000 KH		Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Bayi	6/1000 KH	6/1000 KH		6/1000 KH		6/1000 KH		6/1000 KH		6/1000 KH		Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Balita	6/1000 KH	6/1000 KH		6/1000 KH		6/1000 KH		6/1000 KH		6/1000 KH		Dinas Kesehatan
		Pelayanan kesehatan ibu hamil	127,38%	100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Kesehatan
		Pelayanan kesehatan ibu melahirkan	134%	100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Kesehatan
		Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	137,75%	100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Kesehatan
		Pelayanan kesehatan balita	20%	100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Kesehatan
		Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	93,63%	100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Kesehatan
		Pelayanan kesehatan pada usia produktif	16%	100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Kesehatan
		Pelayanan kesehatan pada usia lansia	4,80%	100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Kesehatan
		Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	10%	100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Kesehatan
		Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	31%	100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Kesehatan
		Pelayanan kesehatan Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	63%	100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Kesehatan
		Pelayanan kesehatan Orang terduga tuberkulosis	58%	100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Kesehatan

		Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tubuh manusia (HIV)	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Kesehatan
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	14,85%	10,00%		9,50%		7,50%		6,00%		6,00		Dinas Kesehatan
		Persentase UPT yang memiliki ketersediaan obat, vaksin esensial, dan perbekalan kesehatan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Kesehatan
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase SDM Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar	100%	100%	773.671	100%	760.160	100%	856.489	100%	856.489	100%	3.246.810	Dinas Kesehatan
1.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase pengawasan obat dan makanan pada masyarakat dan pelaku usaha yang dilakukan	100%	100%	212.983	100%	232.983	100%	236.654	100%	236.654	100%	919.274	Dinas Kesehatan
1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan	100%	100%	1.873.691	100%	1.879.226	100%	1.879.226	100%	1.879.226	100%	7.511.370	Dinas Kesehatan
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				**183.826.647**		**179.210.694**		**179.210.694**		**179.837.793**		**722.385.828**	**DPUPR**
1.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100,00%	100%	12.362.833	100%	12.085.044	100%	12.085.044	100%	12.085.044	100%	48.617.963	DPUPR
1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Volume tampungan air baku (meter3)	775 m3	897.982 m3	34.842.488	1.025.590 m3	26.289.430	1.031.590 m3	30.441.469	1.160.590 m3	47.317.583	1.160.590 m3	138.890.971	DPUPR

1.03.03	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga Yang Dapat Mengakses Air Minum (%)	86,52%	74,38%	21.096.300	92,34%	16.919.658	95,62%	27.823.854	95,96%	21.674.082	95,96%	87.513.894	DPUPR
1.03.04	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang terbangun	47,06%	64,71%	100.000	76,47%	800.000	88,24%	2.000.000	100,00%	2.000.000	100,00%	4.900.000	DPUPR
1.03.05	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	72,63%	72,75%	811.250	72,87%	230.000	72,99%	1.130.000	73,11%	1.130.000	73,11%	3.301.250	DPUPR
1.03.06	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Luas Genangan Banjir (%)	0,182%	0,228%	14.794.999	0,116%	8.529.591	0,110%	8.600.000	0,096%	8.600.000	0,096%	40.524.590	DPUPR
1.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Penambahan Bangunan Pemerintah dan Fasilitas Umum	16,67%	57,58%	14.960.790	72,73%	35.660.081	87,88%	37.964.190	100,00%	813.501	100,00%	89.398.561	DPUPR
1.03.09	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase Bangunan dan Lingkungan Yang Tertata	21,12%	45,00%	27.245.484	58,75%	40.248.738	82,50%	18.280.869	100,00%	29.500.000	100,00%	115.275.091	DPUPR
1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Panjang Jalan dengan Kondisi Mantap	70,08%	60,65%	57.447.964	64,14%	37.598.153	65,63%	39.935.268	65,94%	55.867.583	65,94%	190.848.969	DPUPR
1.03.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase pembinaan jasa konstruksi	20%	20,00%	30.062	20,00%	150.000	20,00%	50.000	20,00%	50.000	20,00%	280.062	DPUPR
1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	82,49%	86,01%	134.476	89,54%	700.000	93,94%	900.000	98,35%	800.000	98,35%	2.834.476	DPUPR
1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**				**28.575.975**		**28.560.449**		**28.582.329**		**28.585.449**		**114.304.202**	**DPRKPP**

1.04.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%	100%	5.654.353	100%	5.898.795	100%	5.960.675	100%	5.963.795	100%	23.477.618	DPRKPP
1.04.02	Program Pengembangan Perumahan	Persentase ketersediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana / relokasi	100%	100%	59.203	100%	140.000	100%	140.000	100%	140.000	100%	479.203	DPRKPP
1.04.03	Program Kawasan Permukiman	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	74,96%	49,17%	75.000	31,74%	1.745.000	17,64%	1.405.000	6,87%	1.405.000	6,87%	4.630.000	DPRKPP
1.04.04	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase layanan ketersediaan rumah layak huni untuk MBR	20%	40,00%	1.138.074	60,00%	1.200.000	80,00%	1.200.000	100,00%	1.200.000	100,00%	4.738.074	DPRKPP
1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang ditingkatkan	93%	100%	21.649.344	100%	19.576.654	100%	19.876.654	100%	19.876.654	100,00%	80.979.306	DPRKPP
1.05.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				**21.253.029**		**23.835.199**		**22.717.194**		**23.236.694**		**91.042.115**	
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%	100%	17.144.605	100%	18.249.313	100%	17.929.313	100%	18.557.313	100%	71.880.545	Satpol PP & PMK
1.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%	75.000	100%	155.000	100%	70.000	100%	80.000	100%	380.000	Satpol PP & PMK
		Persentase Perda dan Perkada yang di tegakkan	100%	100%	91.200	100%	165.000	100%	165.000	100%	165.000	100%	586.200	Satpol PP & PMK

1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	92%	100%	144.950	100%	346.000	100%	181.000	100%	161.000	100%	832.950	Satpol PP & PMK
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (Operasi darurat non kebakaran)	100%	100%	0	100%	70.000	100%	15.000	100%	15.000	100%	100.000	Satpol PP & PMK
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%	100%	3.888.473	100%	4.834.886	100%	4.441.880	100%	4.418.380	100%	17.583.621	BPBD
1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Prosentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	0	100%	250.000	100%	95.000	100%	20.000	100%	365.000	BPBD
		Prosentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100%	100%	219.993	100%	755.000	100%	697.000	100%	400.000	100%	2.071.993	BPBD
		Prosentase Jumlah Warga Negara Yang Memperolah Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100%	199.920	100%	240.000	100%	240.000	100%	240.000	100%	919.920	BPBD
1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**				**4.162.049**		**4.170.440**		**4.197.049**		**4.197.049**		**16.726.587**	**DINSOSPM**
1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%	100%	3.791.564	100%	3.713.440	100%	3.715.049	100%	3.755.049	100%	14.975.102	DINSOSPM

1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase partisipasi PSKS yang memperoleh pembinaan, bimbingan dan pelatihan dalam menunjang pelaksanaan kesejahteraan sosial	100%	100%	5.500	100%	0	100%	10.000	100%	0	100%	15.500	DINSOSPM
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar serta gelandangan pengemis terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	100%	60.877	100%	190.000	100%	210.000	100%	200.000	100%	660.877	DINSOSPM
1.06.05	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase perlindungan dan jaminan sosial yang dilayani	75%	75%	177.498	78%	140.000	78%	115.000	80%	115.000	80%	547.498	DINSOSPM
1.06.06	Program Penanganan Bencana	Persentase layanan penanganan bencana alam dan sosial	100%	100%	49.987	100%	50.000	100%	70.000	100%	50.000	100%	219.987	DINSOSPM
1.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase layanan pengelolaan taman makam pahlawan	100%	100%	76.623	100%	77.000	100%	77.000	100%	77.000	100%	307.623	DINSOSPM
2.	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**101.466.601**		**110.082.630**		**110.495.774**		**110.995.467**		**433.040.472**	
2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**				**7.022.368**		**7.860.847**		**7.860.847**		**7.930.847**		**30.674.909**	**DPTK**
2.07.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perangkat daerah	100%	100%	6.907.391	100%	7.355.855	100%	7.355.855	100%	7.355.855	100%	28.974.955	DPTK
2.07.02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase dokumen Rencana Tenaga Kerja yang tersusun	n/a	0%	0	100%	0		0		70.000	100%	70.000	DPTK

2.07.03	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang kompeten	53%	93%	52.497	94%	200.000	95%	200.000	96%	200.000	96%	652.497	DPTK
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang terserap	20,94%	21,62%	25.000	22,35%	155.000	24,36%	155.000	24,40%	155.000	24,40%	490.000	DPTK
2.07.05	Program Hubungan Industrial	Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan	30%	40%	37.480	50%	149.993	60%	149.993	70%	149.993	70%	487.457	DPTK
2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				**5.775.357**		**5.729.003**		**5.735.140**		**5.744.403**		**22.983.904**	**DPPPAPPKB**
2.08.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%	100%	4.986.634	100%	4.313.894	100%	4.247.761	100%	4.257.024	100%	17.805.313	DPPPAPPKB
2.08.02	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	1. Cakupan PUG yang aktif	10%	23%	214.986	33%	215.000	43%	215.000	53%	215.000	53%	859.986	DPPPAPPKB
		2. Persentase ARG pada APBD	n/a	10%		10%		11%		12%		12%	0	DPPPAPPKB
2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang terlayani	100%	100%	289.746	100%	289.746	100%	307.016	100%	307.016	100%	1.193.526	DPPPAPPKB
		Rasio kekerasan terhadap peremp termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	18,98	18,72		18,50		18,20		17,95		17,95		DPPPAPPKB
2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Keluarga yang mendapatkan informasi tentang Kesetaraan Gender dan Hak Anak	30%	30%	0	30%	125.000	35%	125.000	35%	125.000	35%	375.000	DPPPAPPKB

2.08.05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki data gender dan anak	100%	100%	0	100%	10.000	100%	25.000	100%	25.000	100%	60.000	DPPPAPPKB
2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Persentase pemenuhan indikator KLA		20,83%	14.925	33,33%	500.000	50,00%	500.000	62,50%	500.000	62,50%	1.514.925	DPPPAPPKB
2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	0,023%	0,023%	269.066	0,022%	275.363	0,021%	315.363	0,020%	315.363	0,020%	1.175.154	DPPPAPPKB
		Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100%	100%		100%		100%		100%		100%		DPPPAPPKB
2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**				**5.768.053**		**6.241.644**		**6.350.744**		**6.633.057**		**24.993.499**	**DKPP**
2.09.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%	100%	5.698.053	100%	6.061.644	100%	6.082.744	100%	6.210.057	100%	24.052.499	DKPP
2.09.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase ketersediaan sarana pendukung kemandirian pangan	0%	0%	0	33%	10.000	33%	10.000	33%	10.000	33%	30.000	DKPP
2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Peningkatan skor pola pangan harapan	85	83	50.000	84	100.000	85	100.000	86	190.000	86	440.000	DKPP
		Persentase ketersediaan dan kebutuhan terhadap bahan pangan penyumbang inflasi	112%	113%		114%		115%		116%		116%		DKPP
2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penanganan daerah rawan pangan		-	0	100%	60.000	100%	138.000	100%	138.000	100%	336.000	DKPP
2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	persentase keamanan pangan yang dilaksanakan		100%	20.000	100%	10.000	100%	20.000	100%	85.000	100%	135.000	DKPP

2.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**				**3.198.677**		**3.250.000**		**3.250.000**		**3.250.000**		**12.948.677**	**DPRKPP**
2.01.04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100%	100%	30.000	100%	30.000	100%	30.000	100%	30.000	100%	120.000	DPRKPP
2.01.05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase ganti kerugian dan/atau santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan	100%	0		100%	3.200.000	100%	3.200.000	100%	3.200.000	100%	9.600.000	DPRKPP
2.01.10	Program Penatagunaan Tanah	Persentase dokumen SPL yang ditindaklanjuti	100%	100%	3.168.677	100%	20.000	100%	20.000	100%	20.000	100%	3.228.677	DPRKPP
2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**				**26.517.262**		**31.066.116**		**31.069.525**		**31.126.297**		**119.779.200**	**DLH**
2.11.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%	100%	22.332.862	100%	26.154.499	100%	26.143.657	100%	26.163.657	100%	100.794.675	DLH
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase ketersedian dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	100%	100%	100.000	100%	200.000	100%	300.000	100%	300.000	100%	900.000	DLH
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,07	68,83	159.922	69,28	600.000	69,74	250.000	70,19	250.000	70,19	1.259.922	DLH
2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau	50,40%	52,96%	1.609.961	55,51%	1.700.000	58,07%	1.700.000	60,63%	1.700.000	60,63%	6.709.961	DLH

2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase penanganan limbah B3	100%	100%	240.000	100%	170.000	100.00%	170.000	100.00%	170.000	100.00%	750.000	DLH
2.11.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang melanggar izin lingkungan	52%	48%	25.000	45%	370.000	41%	270.000	38%	270.000	38%	935.000	DLH
2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	50%	50%	0	50%	250.000	75%	250.000	100%	250.000	100%	750.000	DLH
2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	n/a	50%	0	50%	125.000	50%	125.000	50%	125.000	50%	375.000	DLH
		Persentase Perusahaan yang mendapatkan minimal level biru	35%	35%	0	35%	75.000	35%	75.000	35%	75.000	35%	225.000	DLH
2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	100%	100%	25.000	100%	25.000	100%	25.000	100%	25.000	100%	100.000	DLH
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang dikelola	91%	98%	2.024.518	99%	1.396.617	99%	1.760.868	98%	1.797.640	98%	6.979.642	DLH
2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**				**5.166.577**		**5.136.334**		**5.161.529**		**5.154.334**		**20.618.775**	**DISDUKCAPIL**

2.12.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang terpenuhi	100%	100%	5.128.377	100%	4.879.334	100%	4.899.334	100%	4.914.334	100%	19.821.380	DISDUKCAPIL
2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase perekaman KTP Elektronik	96,29%	98,21%	23.200	100%	67.000	100%	80.000	100%	80.000	100%	250.200	DISDUKCAPIL
		Persentase anak usia 0-17 kurang 1 hari yang memiliki KIA	53,26%	63,91%		76,69%		92,02%		100%		100%	0	DISDUKCAPIL
2.12.03	Program Pencatatan Sipil	Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan	100 %	100%	15.000	100%	10.000	100%	40.000	100%	40.000	100%	105.000	DISDUKCAPIL
2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Perangkat Daerah Yang Memanfaatkan Data Kependudukan	80%	80%	0	80%	130.000	80%	132.195	80%	110.000	80%	372.195	DISDUKCAPIL
2.12.05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Cakupan Ketersediaan Profil Kependudukan	100%	100%	0	100%	50.000	100%	10.000	100%	10.000	100%	70.000	DISDUKCAPIL
2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**				**822.689**		**864.932**		**839.737**		**871.932**		**3.399.289**	**DINSOSPM**
2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Kategori kelurahan	Berkembang	Berkembang	23.000	Cepat Berkembang	25.000	Cepat Berkembang	25.000	Cepat Berkembang	25.000	Cepat Berkembang	98.000	DINSOSPM
2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga masyarakat yang aktif	100%	100%	799.689	100%	839.932	100%	814.737	100%	846.932	100%	3.301.289	DINSOSPM

2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				**1.085.965**		**1.158.879**		**1.148.479**		**1.148.479**		**4.541.801**	**DPPPAPPKB**
2.14.02	Program Pengendalian Penduduk	Persentase keluarga yang terdata	4,00%	8,88%	186.906	17,77%	94.159	26,65%	94.159	35,53%	94.159	35,53%	469.383	DPPPAPPKB
		TFR	2,3	2,29		2,28		2,25		2,24		2,24		DPPPAPPKB
		Median (nilai tengah) usia kawin pertama perempuan seluruh wanita umur 25-49 tahun	n/a	25		25		25		25		25		DPPPAPPKB
2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR)	62,13%	63,15%	795.858	64,15%	836.520	65,15%	826.120	66,15%	826.120	66,15%	3.284.619	DPPPAPPKB
		Unmeet need	25,98%	24,50%		24,25%		24,00%		23,50%		23,50%		DPPPAPPKB
		Persentase masyarakat yg terpapar isi program KKBPK	n/a	50,00%		55,00%		60,00%		65,00%		65,00%		DPPPAPPKB
2.14.04	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Persentase Kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina	100%	100%	103.200	100%	228.200	100%	228.200	100%	228.200	100%	787.800	DPPPAPPKB
2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**				**21.099.782**		**19.000.000**		**19.000.000**		**19.000.000**		**78.099.782**	**DISHUB**
2.15.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%	100%	18.238.653	100%	16.627.244	100%	16.752.494	100%	16.507.241	100%	68.125.632	DISHUB
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	jumlah titik daerah potensi dan rawan laka	64 titik	57 titik	2.498.159	44 titik	1.553.932	40 titik	1.807.506	35 titik	2.052.759	35 titik	7.912.356	DISHUB

		Presentase Kendaraan yang Melaksankan Wajib Uji di Kota Tarakan	25,99%	42,29%	333.000	50,75%	478.825	59,21%	150.000	67,67%	150.000	67,67%	1.111.825	DISHUB
		Titik Kemacetan yang teratasi	36 Titik	31 Titik	29.970	26 Titik	190.000	21 Titik	190.000	17 Titik	190.000	17 Titik	599.970	DISHUB
		Rasio Panjang Jalan Dibagi Jumlah Kendaraan	1,32	1,29		1,27	0	1,25	0	1,23	0	1,23	0	DISHUB
2.15.03	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Pemeliharaan Pelabuhan	n/a	0%	0	30%	150.000	60%	100.000	100%	100.000	100%	350.000	DISHUB
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**				**6.483.765**		**6.183.765**		**6.483.765**		**6.483.765**		**25.635.059**	**DKISP**
2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layaanan Penunjang Perangkat Darah yang Terpenuhi	100%	100%	4.695.765	100%	4.695.765	100%	4.695.765	100%	4.695.765	100%	18.783.059	DKISP
2.16.02	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi Pemerintah Daerah yang dipublikasikan melalui media komunikasi publik pemerintah dan media massa mitra kerja pemerintah	100%	100%	488.000	100%	488.000	100%	488.000	100%	488.000	100%	1.952.000	DKISP
2.16.03	Program Aplikasi Informatika	Persentase Aplikasi Layanan Publik yang dapat diakses	100%	100%	200.000	100%	500.000	100%	700.000	100%	700.000	100%	2.100.000	DKISP
		Persentase ketersediaan jaringan internet (bandwith) OPD	52%	65%	1.100.000	65%	500.000	81%	600.000	100%	600.000	100%	2.800.000	DKISP

2.17	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**				**5.304.746**		**6.193.178**		**6.198.098**		**6.244.443**		**23.940.465**	**DKUKMP**
2.17.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perangkat daerah	100%	100%	5.115.828	100%	5.849.913	100%	5.854.833	100%	5.901.178	100%	22.721.751	DKUKMP
2.17.02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	persentase KSP/ USP yang berizin	52,38%	100%	0	100%	19.265	100%	19.265	100%	19.265	100%	57.796	DKUKMP
2.17.03	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi aktif dan patuh	34,21%	74%	0	100%	44.000	100%	44.000	100%	44.000	100%	132.000	DKUKMP
2.17.04	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Persentase Koperasi sehat	9,52%	71%	0	83%	40.000	88%	40.000	88%	40.000	88%	120.000	DKUKMP
2.17.05	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang menerapkan manajemen perkoperasian	n/a	20%	24.944	42%	50.000	68%	50.000	100%	50.000	100%	174.944	DKUKMP
2.17.06	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi yang difasilitasi pemberdayaan dan perlindungan koperasi	n/a	13,16%	0	19,74%	28.000	32,89%	28.000	39,47%	28.000	39,47%	84.000	DKUKMP
2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Persentase pertumbuhan UMKM	32,99%	45,23%	138.997	47,31%	112.000	54,93%	112.000	61,01%	112.000	61,01%	474.997	DKUKMP
2.17.08	Program Pengembangan Umkm	Persentase usaha mikro yg naik kelas	n/a	0,88%	24.976	1,76%	50.000	2,64%	50.000	3,51%	50.000	3,51%	174.976	DKUKMP
2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**				**5.768.343**		**6.778.368**		**6.778.346**		**6.783.346**		**26.108.403**	**DPMPTSP**
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%	100%	5.227.013	100%	5.440.366	100%	5.595.029	100%	5.635.232	100%	21.897.641	DPMPTSP

2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan rencana investasi Kota Tarakan	75,94%	25,30%	50.000	15,87%	165.000	13,70%	100.000	9,64%	83.000	9,64%	398.000	DPMPTSP
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase kegiatan Promosi Penanaman Modal	n/a	100%	19.996	100%	400.000	100%	325.000	100%	323.000	100%	1.067.996	DPMPTSP
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Nilai IKM (Unsur Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu)	82 B	86 B	89.978	86 B	350.000	87 B	350.000	88 B	340.000	88 B	1.129.978	DPMPTSP
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Nilai realisasi investasi Kota Tarakan (dalam milyar rupiah)	Rp249	Rp574	381.356	Rp650	361.002	Rp745	358.317	Rp860	360.000	Rp860	1.460.674	DPMPTSP
2.18.06	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang dikelola	100%	100%	0	100%	62.000	100%	50.000	100%	42.114	100%	154.114	DPMPTSP
2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**				**1.199.998**		**2.486.546**		**2.486.546**		**2.486.546**		**8.659.636**	**Disbudporapar**
2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pemuda yang difasilitasi untuk mengikuti kegiatan Kepemudaan	n/a	80%	394.998	90%	550.000	100%	550.000	100%	550.000	100%	2.044.998	Disbudporapar
2.19.04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase kapasitas Kepramukaan yang dikembangkan	n/a	80%	100.000	90%	100.000	100%	100.000	100%	100.000	100%	400.000	Disbudporapar
2.19.03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase cabor yang mempunyai manajemen yang baik	n/a	80%	704.999	90%	1.836.546	100%	1.836.546	100%	1.836.546	100%	6.214.637	Disbudporapar
2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**				**40.000**		**40.000**		**40.000**		**40.000**		**160.000**	**DKISP**
2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase data sektoral yang dipublikasikan	100%	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	160.000.000	DKISP

2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**				**5.000**		**5.000**		**5.000**		**10.000**		**25.000**	**DKISP**
2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase sosialisasi kebijakan keamanan informasi	100%	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	10.000.000	100%	25.000.000	DKISP
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				**9,411,717**		**11,459,118**		**11,459,118**		**11,459,118**		**43,789,072**	**Disbudporapar**
2.22.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi		100%	7.686.717	100%	7.879.118	100%	7.879.118	100%	7.879.118	100%	31.324.072	Disbudporapar
2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Kebudayaan yang dikembangkan	n/a	50%	1.325.000	55%	1.600.000	60%	1.600.000	65%	1.600.000	65%	6.125.000	Disbudporapar
2.22.03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan	n/a	50%	0	50%	200.000	60%	200.000	75%	200.000	75%	600.000	Disbudporapar
2.22.04	Program Pembinaan Sejarah	Persentase data informasi sejarah yang dapat diakses masyarakat	n/a	80%	0	90%	75.000	100%	75.000	100%	75.000	100%	225.000	Disbudporapar
2.22.05	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang dilestarikan dan di kelola	n/a	80%	50.000	85%	980.000	90%	980.000	95%	980.000	95%	2.990.000	Disbudporapar
2.22.06	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase museum yang dikelola	n/a	100%	350.000	100%	725.000	100%	725.000	100%	725.000	100%	2.525.000	Disbudporapar
2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**				**4.445.525**		**4.252.627**		**4.252.627**		**4.252.627**		**17.203.404**	**DISPUSPAN**
2.23.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%	100%	3.979.135	100%	4.087.627	100%	4.087.627	100%	4.087.627	100%	16.242.015	DISPUSPAN
2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Pengunjung Perpustakaan	45,15%	45,25%	466.390	45,30%	135.000	45,40%	135.000	45,50%	135.000	45,50%	871.390	DISPUSPAN

2.23.03	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Persentase Koleksi Bahan Pustaka yang Dilestarikan	100%	100%	0	100%	30.000	100%	30.000	100%	30.000	100%	90.000	DISPUSPAN
2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**				**37.494**		**255.391**		**255.391**		**255.391**		**803.669**	**DISPUSPAN**
2.24.02	Program Pengelolaan Arsip	Persentase pengelolaan Arsip	79,29%	81,50%	37.494	84,58%	150.500	88,58%	150.500	93,39%	150.500	100%	488.994	DISPUSPAN
2.24.03	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Persentase Pengelolaan Kerasipan Sesuai Standar	79.29%	81.50%	0	84.58%	64.891	88.58%	64.891	93.39%	64.891	100%	194.674	DISPUSPAN
2.24.04	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Persentase Penggunaan dan Pemanfaatan Arsip	79.29%	81.50%	0	84.58%	40.000	88.58%	40.000	93.39%	40.000	100%	120.000	DISPUSPAN
3.	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				**14.626.882**		**18.942.188**		**18.478.088**		**18.887.514**		**71.084.672**	
3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**				**5.477.251**		**6.437.034**		**6.437.034**		**6.532.034**		**25.033.353**	**DISKAN**
3.25.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%	100%	4.573.430	100%	5.023.034	100%	4.953.034	100%	4.878.034	100%	19.427.532	DISKAN
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi perikanan tangkap	13441.52 Ton	4%	338.821	4%	504.000	4%	524.000	4%	424.000	16%	1.790.821	DISKAN
3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Produksi perikanan budidaya	185.732,8 0 ton	5%	415.000	5%	460.000	5%	460.000	5%	480.000	20%	1.815.000	DISKAN
3.25.05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan	5,78%	4%	0	4%	100.000	5%	150.000	5%	400.000	18%	650.000	DISKAN
3.25.06	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase pemasaran produk perikanan	0,80%	1,00%	150.000	1,50%	350.000	2,00%	350.000	2,50%	350.000	2,50%	1.350.000	DISKAN
3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**				**788,977**		**2,615,000**		**2,615,000**		**2,615,000**		**8,633,977**	**Disbudporapar**

3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Daya Tarik Destinasi yang Ditingkatkan	n/a	100%	258.978	100%	2.075.000	100%	2.075.000	100%	2.075.000	100%	6.483.978	Disbudporapar
3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan	n/a	211.477 orang	300.000	211.577 orang	350.000	231.677 orang	350.000	241.777 orang	350.000	241.777 orang	1.350.000	Disbudporapar
3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase terlaksananya Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreati	n/a	100 %	229.999	100%	190.000	100%	190.000	100%	190.000	100%	799.999	Disbudporapar
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**				**177.000**		**883.409**		**624.309**		**930.000**		**2.614.717**	**DKPP**
3.27.02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas Hasil Peternakan (Daging)	100%	100%	0	100%	95.000	100%	93.400	100%	220.000	100%	408.400	DKPP
		Produktivitas Hasil Pertanian	3.6 ton/ha	4 ton/ha	0	4.4 ton/ha	50.000	4.8 ton/ha	75.000	5.2 ton/ha	125.000	5.2 ton/ha	250.000	DKPP
3.27.03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase peningkatan produksi pertanian	0,10%	0,10%	50.000	0,20%	360.000	0,30%	100.000	0,40%	120.000	0,40%	630.000	DKPP
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Cakupan waktu pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	12 bulan	12 bulan	50.000	12 bulan	153.409	12 bulan	118.409	12 bulan	175.000	12 bulan	496.817	DKPP
3.27.06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Cakupan surat rekomendasi izin usaha yang diterbitkan	n/a	0%	0	100%	15.000	100%	7.500	100%	15.000	100%	37.500	DKPP
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Rata-rata pendapatan petani miskin per kapita selama setahun (dalam Jutaan)	Rp22,8	Rp24,0	77.000	Rp25,2	210.000	Rp26,4	230.000	Rp27,6	275.000	Rp27,6	792.000	DKPP
3.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**				**471.980**		**893.627**		**688.627**		**697.362**		**2.751.596**	**DKUKMP**
3.03.02	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase peningkatan SKA yang diterbitkan	n/a	2%	0	5%	35.000	7%	30.000	9%	30.000	9%	95.000	DKUKMP
3.03.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	n/a	80%	202.000	100%	300.000	100%	100.000	100%	100.000	100%	702.000	DKUKMP

3.03.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase pemantauan Perkembangan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting ditingkat Pasar Kabupaten/ Kota	n/a	100%	30.000	100%	75.000	100%	75.000	100%	75.000	100%	255.000	DKUKMP
3.03.05	Program Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor Kota Tarakan (dalam Milyar)	Rp2,78	Rp2,78	0	Rp2,79	178.627	Rp2,79	178.627	Rp2,80	178.627	Rp2,80	535.881	DKUKMP
3.03.06	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase UTTP Tertera bertanda sah	45,54%	27,27%	40.000	47,72%	105.000	47,72%	105.000	47,72%	113.735	47,72%	363.735	DKUKMP
3.03.07	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase peningkatan jenis produk lokal Kota Tarakan yang dipasarkan	n/a	0,00%	199.980	5,00%	200.000	10,00%	200.000	15,00%	200.000	15,00%	799.980	DKUKMP
3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**				**24.956**		**234.000**		**234.000**		**234.000**		**726.956**	**DPTK**
3.31.02	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	persentase peningkatan daya saing IKM yang difasilitasi	20,80%	5,60%	24.956	11,11%	206.000	13,91%	206.000	17,91%	206.000	17,91%	642.956	DPTK
3.31.03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase izin usaha industri yang dipantau dan dianalisis	n/a	90%	0	90%	4.000	90%	4.000	90%	4.000	90%	12.000	DPTK
3.31.04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	persentase data perusahaan industri yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan	n/a	32,54%	0	40,01%	24.000	46,12%	24.000	51,32%	24.000	51,32%	72.000	DPTK
4.	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**71.206.822**		**67.320.356**		**68.183.130**		**67.313.026**		**274.023.334**	
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**				**40.341.243**		**36.454.777**		**37.317.551**		**36.447.447**		**150.561.017**	**SETDA**
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rekomendasi LHP yang ditindak Lanjuti	100%	100%	27.368.679	100%	26.055.723	100%	26.289.622	100%	26.628.306	100%	106.342.330	SETDA
		Indeks Reformasi dan Birokrasi	57,00	57,00		59,00		60,00		61,00		61.00		SETDA
		Nilai SAKIP	62,00 (B)	62,00 (B)		66,00 (B)		70,01 (BB)		72,00 (BB)		72,00 (BB)		SETDA
		Nilai IKM	79,59	79,59		81,59		82,59		83,59		83,59		SETDA

		Persentase Pelayanan Prokopim	100%	100%		100%		100%		100%		100%		SETDA
4.01.02	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai LPPD	3,5	3,7	12.378.288	3,9	9.970.281	4,1	10.574.157	4,3	9.416.366	4,3	42.339.093	SETDA
		Persentase SPM	100%	100%		100%		100%		100%		100%		SETDA
		Persentase Hibah Bansos yang tersalurkan	0%	80%		85%		90%		95%		95%		SETDA
		Penilaian Kota Peduli HAM dan RANHAM	Pencapaian Kota Peduli Ham dan RANHAM Kuning (cukup peduli)	Pencapaian Kota Peduli Ham dan RANHAM HIJAU (Sangat Peduli)		Pencapaian Kota Peduli Ham dan RANHAM HIJAU (Sangat peduli)		Pencapaian Kota Peduli Ham dan RANHAM HIJAU (Sangat peduli)		Pencapaian Kota Peduli Ham dan RANHAM HIJAU (Sangat peduli)		Pencapaian Kota Peduli Ham dan RANHAM HIJAU (Sangat peduli)		SETDA
		Persentase realisasi penyusunan Perda	100%	100%		100%		100%		100%		100%		SETDA
4.01.03	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Nilai IHK	108 HK	108 IHK	210.873	111 IHK	60.998	114 IHK	60.998	117 IHK	40.000	117 IHK	372.869	SETDA
		Persentase BUMD yang sehat	40%	40%	161.802	60%	105.000	80%	130.000	100%	110.000	100%	506.802	SETDA
		Persentase Pemantauan Rumah Tangga yang teraliri Gas Alam secara optimal	90%	90%	0	95%	30.000	100%	30.000	100%	25.000	100%	85.000	SETDA
		Persentase Pemantauan Rumah Tangga yang teraliri air Bersih secara optimal	100%	90%	89.826	100%	75.000	100%	75.000	100%	70.000	100%	309.826	SETDA
		Persentase Realisasi Pembangunan Daerah	80%	85%	10.000	87%	36.000	89%	36.000	90%	36.000	90%	118.000	SETDA
		Persentase Layanan pengadaan Barang dan Jasa	100%	100%	121.775	100%	121.775	100%	121.775	100%	121.775	100%	487.098	SETDA
4.02	**SEKRETARIAT DPRD**				**30.865.579**		**30.865.579**		**30.865.579**		**30.865.579**		**123.462.316**	**SET. DPRD**

4.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi	100%	100%	24.180.359	100%	24.180.358	100%	24.180.358	100%	24.180.358	100%	96.721.433	SET. DPRD
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Persentase fasilitasi layanan dan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	n/a	100%	6.685.221	100%	6.685.221	100%	6.685.221	100%	6.685.221	100%	26.740.884	SET. DPRD
5.	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**89.626.131**		**79.256.242**		**79.481.571**		**80.677.087**		**329.041.031**	
5.01	**PERENCANAAN**				**6.509.434**		**5.698.695**		**5.869.024**		**6.730.433**		**24.807.586**	**BAPPEDA LITBANG**
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%	100%	5.289.434	100%	5.278.695	100%	5.279.024	100%	5.305.433	100%	21.152.586	BAPPEDA LITBANG
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan daerah yang tepat waktu	100%	100%	600.000	100%	120.000	100%	170.000	100%	645.000	100%	1.535.000	BAPPEDA LITBANG
5.01.03	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi RPJMD, RKPD, RENSTRA dan Renja OPD	100%	100%	620.000	100%	300.000	100%	420.000	100%	780.000	100%	2.120.000	BAPPEDA LITBANG
5.02	**KEUANGAN**				**81.141.697**		**71.647.547**		**71.647.547**		**71.961.654**		**296.398.445**	**BPKPAD**
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%	100%	61.250.970	100%	58.522.547	100%	58.522.547	100%	58.836.654	100%	237.132.718	BPKPAD
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase laporan keuangan OPD yang tertib administrasi	100%	100%	17.348.927	100%	8.655.000	100%	8.655.000	100%	8.655.000	100%	43.313.927	BPKPAD
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase laporan BMD OPD yang tertib administrasi	100%	100%	980.300	100%	2.060.000	100%	2.060.000	100%	2.060.000	100%	7.160.300	BPKPAD
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase meningkatnya jumlah pengelolaan penerimaan Pajak	100%	100%	1.561.500	100%	2.410.000	100%	2.410.000	100%	2.410.000	100%	8.791.500	BPKPAD

5.03	**KEPEGAWAIAN**				**20.961.362**		**20.961.362**		**20.961.362**		**20.961.362**		**83.845.448**	**BKPSDM**
5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%	100%	18.036.362	100%	18.036.362	100%	18.036.362	100%	18.036.362	100%	72.145.448	BKPSDM
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase layanan kepegawaian daerah	100%	100%	1.075.000	100%	1.075.000	100%	1.075.000	100%	1.075.000	100%	4.300.000	BKPSDM
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**				**1.850.000**		**1.850.000**		**1.850.000**		**1.850.000**		**7.400.000**	**BKPSDM**
5..04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pegawai yang mengikuti diklat sesuai jabatannya	100%	100%	1.850.000	100%	1.850.000	100%	1.850.000	100%	1.850.000	100%	7.400.000	BKPSDM
5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**				**125.000**		**60.000**		**115.000**		**135.000**		**435.000**	**BAPPEDA LITBANG**
5.05.02	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase implementasi rencana kelitbangan	0%	25%	125.000	50%	60.000	75%	115.000	100%	135.000	100%	435.000	BAPPEDA LITBANG
6.	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**				**5.201.746**		**7.492.930**		**7.527.247**		**7.561.445**		**27.783.368**	
6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**				**5.201.746**		**7.492.930**		**7.527.247**		**7.561.445**		**27.783.368**	**INSPEKTORAT**
6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi	100%	100%	4.481.048	100%	5.312.930	100%	5.327.247	100%	5.361.445	100%	20.482.670	INSPEKTORAT
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase penyelenggaraan pengawasan yang optimal	100%	100%	579.934	100%	1.650.000	100%	1.650.000	100%	1.650.000	100%	5.529.934	INSPEKTORAT
6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase perumusan kebijakan teknis dan pendampingan pengawasan yang terlaksana	0%	100%	140.764	100%	530.000	100%	550.000	100%	550.000	100%	1.770.764	INSPEKTORAT
7.	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**46.245.430**		**48.730.465**		**49.162.385**		**49.282.785**		**193.421.064**	
7.01	**KECAMATAN**				**46.245.430**		**48.730.465**		**49.162.385**		**49.282.785**		**193.421.064**	**KECAMATAN**

7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%	100%	9.980.580	100%	10.671.781	100%	10.925.801	100%	10.951.881	100%	42.530.042	CTG
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%	100%	6.376.860	100%	6.795.294	100%	6.795.294	100%	6.795.294	100%	26.762.743	CTU
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%	100%	12.410.103	100%	12.465.801	100%	12.534.041	100%	12.597.281	6 Unit	50.007.226	CTT
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	100%	9.644.477	100%	10.933.162	100%	10.985.322	100%	11.011.402	100%	42.574.364	CTB
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100%	100%	2.118.000	100%	2.123.000	100%	2.133.000	100%	2.133.000	100%	8.507.000	CTG
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100%	100%	797.500	100%	797.500	100%	800.000	100%	800.000	100%	3.195.000	CTU
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100%	100%	1.765.799	100%	1.780.799	100%	1.775.799	100%	1.775.799	100%	7.098.197	CTT
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase tercapainya kinerja pemberdayaan masyarakat kelurahan	100%	100%	2.327.297	100%	2.331.475	100%	2.331.475	100%	2.331.475	100%	9.321.722	CTB
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Capaian Kinerja Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	100%	5.000	100%	5.000	100%	5.000	100%	5.000	100%	20.000	CTG
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Capaian Kinerja Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	100%	0	100%	0	100%	10.000	100%	10.000	100%	20.000	CTU

7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Capaian Kinerja Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	100%	0	100%	5.000	100%	5.000	100%	10.000	100%	20.000	CTT
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Capaian Kinerja Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	0	100%	5.000	100%	5.000	100%	5.000	100%	15.000	CTB
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	205.000	100%	203.500	100%	218.500	100%	218.500	100%	845.500	CTG
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	138.152	100%	140.000	100%	165.000	100%	165.000	100%	608.152	CTU
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	271.666	100%	271.666	100%	271.666	100%	271.666	100%	1.086.666	CTT
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	204.996	100%	201.485	100%	201.485	100%	201.485	100%	809.451	CTB
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	n/a	100%	10.000	100%	1.500	100%	1.500	100%	1.500	100%	14.500	CTG
8.	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**				**7.122.421**		**5.768.961**		**6.049.361**		**6.568.961**		**25.509.705**	
8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**				**7.122.421**		**5.768.961**		**6.049.361**		**6.568.961**		**25.509.705**	**Bakesbangpol**
8.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%	100%	3.079.830	100%	3.095.217	100%	3.375.617	100%	3.295.217	100%	12.845.880	Bakesbangpol

8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Prosentase capaian kinerja penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	100%	998.596	100%	835.000	100%	835.000	100%	835.000	100%	3.503.596	Bakesbangpol
8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Prosentase partai politik yang berperan dalam pembangunan nasional	100%	100%	1.098.744	100%	1.113.745	100%	1.113.745	100%	1.713.745	100%	5.039.979	Bakesbangpol
8.01.04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Prosentase ormas yang aktif	80%	80%	1.670.283	80%	360.000	80%	360.000	80%	360.000	80%	2.750.283	Bakesbangpol
8.01.05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase capaian kinerja Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	100%	100%	199.997	100%	130.000	100%	130.000	100%	130.000	100%	589.997	Bakesbangpol
8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase penanganan konflik sosial yang difasilitasi	100%	100%	74.971	100%	235.000	100%	235.000	100%	235.000	100%	779.971	Bakesbangpol
	TOTAL				**1.004.562.518**		**999.012.331**		**1.003.587.910**		**1.008.147.717**		**4.015.760.476**	**TOTAL**

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan periode 2019-2024 yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Indikator kinerja utama pemerintah Kota Tarakan merupakan tolok ukur penilaian keberhasilan pecapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah periode 2019-2024

Tabel 8.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
	TUJUAN								
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	75,27*	76,93	75,83	77,48	78,03	78,58	79,13
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	56,09	57	53,91	58	59	60	61
3	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks	78,00	78,50	n/a	79,00	79,50	80,00	81,50
4	Indeks Gini	Indeks	0,3	0,3	0,295	0,3	0,29	0,29	0,28
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	n/a	64	67,07	68,83	69,28	69,74	70,19
6	Indeks Kota Toleran	Indeks	5,23	5,25	5,337	5,3	5,35	5,4	5,45
	SASARAN								
1	Usia Harapan Hidup	Tahun	73,85*	74,18	73,97	74,29	74,40	74,51	74,62
2	Harapan Lama sekolah	Tahun	13,61*	13,85	14,02	13,93	14,01	14,09	14,17
3	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,93*	9,96	9,97	9,97	9,98	9,99	10,00
4	Rata-rata Pengeluaran Perkapita	Rupiah/ bulan	1.590.808	1.700.000	1.713.021	1.800.000	1.900.000	2.000.000	2.100.000

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
5	Opini BPK	Opini	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
6	Nilai SAKIP	Nilai/ Predikat	60,12/B	62,00/B	62,67/B	64,00/B	66,00/B	70,01/BB	72,00/BB
7	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	n/a	73	49,28	55	60	65	70
8	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	77,59*	79,59	84,91	84,50	84,75	85,00	85,25
9	Persentase Ruang Terbuka Hijau	Persen	46,54	46,54	50,40	52,96	55,51	58,07	60,63
10	Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air minum	Persen	60,64	67,51	86,52	74,38	92,34	95,62	95,96
11	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Persen	n/a	n/a	72,63%	72,75%	72,87%	72,99%	73,11%
12	Persentase Penambahan Bangunan Pemerintah dan Fasilitas Umum	Persen	n/a	n/a	16,67%	57,58%	72,73%	87,88%	100,00%
13	Persentase Bangunan dan	Persen	n/a	n/a	21,12%	45,00%	58,75%	82,50%	100,00%

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
	Lingkungan Yang Tertata								
14	Persentase panjang jalan dengan kondisi mantap	Persen	54,42%	57,54%	70,08%	60,65%	64,14%	65,63%	65,94%
15	Persentase pembinaan jasa konstruksi	Persen	n/a	n/a	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
16	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persen	n/a	n/a	82,49%	86,01%	89,54%	93,94%	98,35%
17	Rasio panjang jalan dibagi jumlah kendaraan	Rasio	n/a	n/a	1,38	1,29	1,27	1,25	1,23
18	Persentase Pemeliharaan Pelabuhan	Persen	n/a	n/a	n/a	0,00%	30,00%	60,00%	100%
19	Persentase Rumah untuk MBR yang terbangun dan terenovasi	Persen	0	10%	20%	40%	60%	80%	100%
20	Persentase Lingkungan pemukiman kumuh	Persen	52,59	47,33	38,34	30,47	22,61	14,74	6,87
21	Angka Kemiskinan	Persen	6,15	5,85	6,24	5,7	5,55	5,4	5,25

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
22	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,94	5,84	5,86	5,79	5,74	5,69	5,64
23	Laju Pertumbuhan ekonomi	Angka	6,0	7,0	-0,78	5,63	5,93	6,23	6,53
24	Tingkat Inflasi	Angka	5,00	4,00	1,15	3,70	3,50	3,20	3,00
25	Indeks Kualitas Air	Indeks	43,75	44	45,56	54,82	54,92	55,02	55,12
26	Indeks Kualitas Udara	Indeks	85	87	93,42	91,45	91,55	91.66	91.77
27	Indeks Tutupan Lahan	Indeks	55,29	55,50	55,30	51,06	52,76	54,46	56,16
28	Persentase sampah yang dikelola	Persen	78,8	79,5	90,77	98,00%	99,00%	99,00%	98,00%
29	Persentase Luas genangan banjir	Persen	0,23	0,229	0,182	0,228	0,116	0,110	0,096
30	Persentase pelayanan bencana kebakaran	Persen	100	100	100	100	100	100	100
31	Persentase pelayanan kebencanaan	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100
32	Persentase pelanggaran K3 yang tertangani	Persen	100	100	100	100	100	100	100

Tabel 8.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Kota Tarakan

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD tahun 2019	Target	Realisasi	Target				Kondisi kinerja Pada akhir Periode RPJMD
				2020	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Aspek Kesejahteraan Masyarakat										
1.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Angka	6,0	7,0	-0,78	5,63	5,93	6,23	6,53	6,53
1.2	Tingkat Inflasi	Angka	5,0	4,0	1,15	3,7	3,5	3,2	3,0	3,0
1.3	Gini Rasio	Indeks	0,3	0,3	0,295	0,3	0,29	0,29	0,28	0,28
1.4	Angka Kemiskinan	%	6,15	5,85	6,24	5,70	5,55	5,40	5,25	5,25
1.5	Tingkat pengangguran terbuka	%	5,94	5,84	5,86	5,79	5,74	5,69	5,64	5,64
1.6	IPM	Indeks	75,27*	76,93	75,83	77,48	78,03	78,58	79,13	79,13
1.7	Rata-rata Pengeluaran Perkapita	Rp/bulan	1.590.808	1.700.000	1.713.021	1.800.000	1.900.000	2.000.000	2.100.000	2.100.000
1.8	Angka Melek Huruf	%	99,84	100	98,4	100	100	100	100	100
1.9	Angka harapan lama sekolah	tahun	13,61	13,85	14,02	13,93	14,01	14,09	14,17	14,17
1.10	Angka rata-rata lama sekolah	tahun	9,93*	9,96	9,97	9,97	9,98	9,99	100	100
1.11	Angka usia harapan hidup	Tahun	73,85*	74,18	73,97	74,29	74,40	74,51	74,62	74,62
1.12	Persentase balita gizi buruk	%	0,07	0,07	0,00	0,06	0,05	0,05	0,04	0,04

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD tahun 2019	Target	Realisasi	Target				Kondisi kinerja Pada akhir Periode RPJMD
				2020	2020	2021	2022	2023	2024	
1.13	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	77,59*	79,59	84,91	84,50	84,75	85,00	85,25	85,25
1.14	Opini BPK	Opini	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
II. Aspek Daya Saing										
2.1	Rata-rata Pengeluaran Perkapita	Rp/bulan	1.590.808	1.700.000	1.713.021	1.800.000	1.900.000	2.000.000	2.100.000	2.100.000
2.2	Rasio ketergantungan (dependency ratio)	%	46,57	46,25	45,99	45,75	45,50	45,25	45,00	44,75
III.Aspek Pelayanan Umum										
I	**Pelayanan Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar**									
A.	**Pendidikan**									
1.1	Angka Partisipasi Sekolah PAUD Usia 5-6 tahun	%	65.65	66.15	60.68	67.15	67.65	68.15	68.85	68.85
1.2	Angka Partisipasi Sekolah SD Usia 7-12	%	96.40	92.61	90.95	97.46	98.75	99.28	100	100
1.3	Angka Partisipasi Sekolah SMP Usia 13-15	%	89.95	91,05	93.25	94.24	96.15	98.96	100	100
1.4	Angka Melek Huruf	%	99.31	99.6	98.4	100	100	100	100	100
1.5	Angka Partisipasi Kasar PAUD	%	63.9	71.52	52.06	72.02	72.52	73.02	73.52	73.52
1.6	Angka Partisipasi Kasar SD/MI	%	102.7	96.65	91.43	101.48	106.56	111.89	117.48	117.48
1.7	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs	%	92.99	85.94	92.38	94.24	95.75	99.49	104.46	104.46
1.8	Angka Partisipasi Murni PAUD	%	34.7	60.50	41.90	61	61.50	62	62.50	62.50
1.9	Angka Partisipasi Murni SD/MI	%	89.16	87.34	82.15	84.24	86.75	87.49	88.15	88.15

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD tahun 2019	Target	Realisasi	Target				Kondisi kinerja Pada akhir Periode RPJMD
				2020	2020	2021	2022	2023	2024	
1.10	Angka Partisipasi Murni SMP/ MTs	%	70.99	71.8	70.78	75.39	79.16	83.12	87.27	87.27
B	**Kesehatan**									
2.1	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	79,98	100	127,38	100	100	100	100	100
2.2	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	85,94	100	133,83	100	100	100	100	100
2.3	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	81,20	100	137,75	100	100	100	100	100
2.4	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	28,00	100	20,01	100	100	100	100	100
2.5	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	92,60	100	93,63	100	100	100	100	100
2.6	Persentase orang usia 15- 59 Tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	34,50	100	16,08	100	100	100	100	100
2.7	Persentase orang usia 60 Tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	45,90	100	4,81	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD tahun 2019	Target	Realisasi	Target				Kondisi kinerja Pada akhir Periode RPJMD
				2020	2020	2021	2022	2023	2024	
2.8	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	11,94	100	10,05	100	100	100	100	100
2.9	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	15,05	100	31,54	100	100	100	100	100
2.10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	63,12	100	100	100	100	100
2.11	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100	56,85	100	100	100	100	100
2.12	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2.13	Rasio posyandu per satuan balita (per 1.000)	Per 1000 balita	6	6	6,06	6	6	6	6	6
2.14	Angka kematian Ibu Melahirkan	Per 100.000 KH	159	42	42	42	42	42	42	42
2.14	Angka kematian Bayi	Per 1000 KH	6	6	6	6	6	6	6	6
2.15	Angka Kematian Balita	Per 1.000 KH	6	6	6	6	6	6	6	6
2.16	Prevalensi Stunting (pendek dan	%	n/a	n/a	14,85	10,00	9,50	7,50	6,00	6,00

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD tahun 2019	Target	Realisasi	Target				Kondisi kinerja Pada akhir Periode RPJMD
				2020	2020	2021	2022	2023	2024	
	sangat pendek) pada balita									
2.17	Rasio dokter per satuan penduduk (per 1.000)	Per 1.000 penduduk	0,34	0,35	0,95	0,97	0,99	1	1	1
2.18	Rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk (per 1.000)	Per 1.000 penduduk	0,11	0,11	6,53	6,5	6,6	6,7	6,8	6,8
2.19	Persentase kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	85	100	75	100	100	100	100	100
2.20	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2.21	Rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah penduduk	%	n/a	n/a	0,00091	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
2.22	Persentase RS Rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	n/a	n/a	40%	40%	60%	60%	80%	80%
C	**Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**									
3.1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan kabupaten/kota	%	n/a	n/a	66,19	71,29	77,33	78,34	79,29	79,29
3.2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi	%	n/a	n/a	89,5	89,50	89,50	89,79	89,79	89,79

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD tahun 2019	Target	Realisasi	Target				Kondisi kinerja Pada akhir Periode RPJMD
				2020	2020	2021	2022	2023	2024	
	oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota									
3.3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	n/a	n/a	Surat Pernyataan	Surat Pernyataan	Surat Pernyataan	Surat Pernyataan	Surat Pernyataan	Surat Pernyataan
3.4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	n/a	n/a	86,52	74,38	92,34	95,62	95,96	95,96
3.5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	n/a	n/a	72,63	72,75	72,87	72,99	73,11	73,11
3.6	Rasio kepatuhan IMB kabupaten/ kota	%	n/a	n/a	77,43	77,43	77,43	77,43	77,43	77,43
3.7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	n/a	n/a	86,98	60,65	64,14	65,63	65,94	65,94
3.8	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Rasio	n/a	n/a	9,69	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
3.9	Rasio proyek yang menjadi	Rasio	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD tahun 2019	Target	Realisasi	Target				Kondisi kinerja Pada akhir Periode RPJMD
				2020	2020	2021	2022	2023	2024	
	kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi									
D	**Perumahan Rakyat dan Pemukiman**									
4.1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	%	n/a	n/a	0	19,00	25,00	35,00	21,00	21,00
4.4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	n/a	n/a	4,95	3,07	2,17	1,37	0,65	0,65
4.5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	n/a	n/a	100,00	51,99	68,94	83,06	100,00	100,00
E	**Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**									
5.1	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
5.2	Persentase Perda dan Perkada	%	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD tahun 2019	Target	Realisasi	Target				Kondisi kinerja Pada akhir Periode RPJMD
				2020	2020	2021	2022	2023	2024	
	yang di tegakkan									
5.3	Prosentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	n/a	100	100	100	100	100	100	100
5.4	Prosentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	%	n/a	100	100	100	100	100	100	100
5.5	Prosentase Jumlah Warga Negara Yang Memperolah Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	n/a	100	100	100	100	100	100	100
5.6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	91	100	92	100	100	100	100	100
5.7	Waktu Tanggap (Renponse Time) Penanganan Kebakaran	Menit	n.a	15	11.4	15	15	15	15	15
F	**Sosial**									
6.1	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, anak terlantar, usia lanjut terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar Panti	%	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD tahun 2019	Target	Realisasi	Target				Kondisi kinerja Pada akhir Periode RPJMD
				2020	2020	2021	2022	2023	2024	
6.2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana di Kota Tarakan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
II	**Pelayanan Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar**									
A	**Tenaga Kerja**									
1.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	n/a	n/a	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	n/a	n/a	1,55	0,0075	0,0083	0,0091	0,01002	0,01002
1.3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Nominal	n/a	n/a	148.106,34	151,068.46	154,089.83	157,171.63	160,315.06	160,315.06
1.4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	n/a	n/a	6,87	42,76	45,00	47,00	50,00	50,00
1.5	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam	%	n/a	n/a	13,01	13,27	13,53	13,80	14,08	14,08

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD tahun 2019	Target	Realisasi	Target				Kondisi kinerja Pada akhir Periode RPJMD
				2020	2020	2021	2022	2023	2024	
	Wilayah Kabupaten/Kota									
B	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**									
2.1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	92,28	92,29	91,90	92,10	92,29	92,30	92,32	92,32
2.2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	51,33*	51,53	59,72	59,73	59,93	60,13	60,33	60,33
2.3	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan daerah	%	52,06	52,06	52,70	52,70	52,70	52,70	52,70	52,70
2.4	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	%	n/a	n/a	0,023	0,023	0,022	0,021	0,020	0,020
2.5	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	n/a	n/a	18,98	18,72	18,50	18,20	17,95	17,95
2.6	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	n/a	n/a	NA	10%	10%	11%	12%	12%
C	**Pangan**									
3.1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	n/a	n/a	0,22	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
D	**Pertanahan**									

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD tahun 2019	Target	Realisasi	Target				Kondisi kinerja Pada akhir Periode RPJMD
				2020	2020	2021	2022	2023	2024	
4.1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.2	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	%	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.3	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	%	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	n/a	n/a	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
4.5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	%	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	n/a	n/a	81,82	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E	**Lingkungan Hidup**									
5.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	Indeks	n/a	64	67,07	68,83	69,28	69,74	70,19	70,19

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD tahun 2019	Target	Realisasi	Target				Kondisi kinerja Pada akhir Periode RPJMD
				2020	2020	2021	2022	2023	2024	
5.2	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah kabupaten/kota	%	n/a	n/a	78,32	98,00	99,00	99,00	98,00	98,00
5.3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	%	n/a	n/a	51,72	48,00	45,00	41,00	38,00	38,00
F	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**									
6.1	Persentase Perekaman KTP elektronik	%	n/a	n/a	96,29	98,21	100	100	100	100
6.2	Persentase anak usia 01-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	%	n/a	n/a	53,26	63,91	76,69	92,02	100	100
6.3	Persentase Kepemilikan akta kelahiran (0 – 18 Tahun)	%	n/a	n/a	87,03	95	97	98	99	99
6.4	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	%	n/a	n/a	40	80	80	80	80	80
G	**Pemberdayaan Masyarakat**									
7.1	Persentase PKK Aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD tahun 2019	Target	Realisasi	Target				Kondisi kinerja Pada akhir Periode RPJMD
				2020	2020	2021	2022	2023	2024	
7.2	Persentase Posyandu aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	100
H	**Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**									
8.1	TFR (Angka Kelahiran Total)	Angka	n/a	n/a	2,3	2,29	2,28	2,25	2,24	2,24
8.2	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR)	%	n/a	n/a	62,13	63,15	64,15	65,15	66,15	66,15
8.3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeed need)	%	n/a	n/a	25,98	24,50	24,25	24,00	23,50	23,50
I	**Perhubungan**									
9.1	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	Rasio	n/a	n/a	Surat Pernyataan	2,1	2,8	2,8	2,8	2,8
9.2	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	Rasio	n/a	n/a	0,22	0,22	0,24	0,26	0,30	0,30
J	**Komunikasi dan Informatika**									
10.1	Persentase organisasi perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100	100	100	100	100	Ada
10.2	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD tahun 2019	Target	Realisasi	Target				Kondisi kinerja Pada akhir Periode RPJMD
				2020	2020	2021	2022	2023	2024	
10.3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100
K	**Koperasi Usaha Kecil Menengah**									
11.1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	n/a	n/a	16,28	17,50	20,00	25,00	40,00	40,00
11.2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	n/a	n/a	26,44	20,74	22,00	25,00	30,00	30,00
L	**Penanaman Modal**									
12.1	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	%	n/a	n/a	75,94	130,96	13,17	14,62	15,44	15,44
M	**Kepemudaan dan Olahraga**									
13.1	Persentase tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0.004	n/a	0.006	0.007	0.008	0.009	0.01	0.01
13.2	Persentase atlet yang berprestasi	%	n/a	n/a	0	20	30	40	50	9250
N	**Statistik**									

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD tahun 2019	Target	Realisasi	Target				Kondisi kinerja Pada akhir Periode RPJMD
				2020	2020	2021	2022	2023	2024	
14.1	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	n/a	81,25	81,25	85	90	95	100	100
14.2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi Pembangunan daerah	%	n/a	81,25	81,25	85	90	95	100	100
	Persandian									
14.3	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Surat Pernyataan	Surat Pernyataan	Surat Pernyataan	Surat Pernyataan	Surat Pernyataan	Surat Pernyataan	Surat Pernyataan	Surat Pernyataan	Surat Pernyataan
O	**Kebudayaan**									
15.1	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan	%	44.44	44.44	44.44	50	52.63	55	58.33	58.33
P	**Perpustakaan**									
16.1	Persentase pengunjung perpustakaan per tahun	%	44.90	45.15	10.05	45.25	45.30	45.40	45.50	45.50
Q	**Kearsipan**									
17.1	Persentase OPD yang mengelola arsip secara baku	%	34.38	48.88	34.38	62.50	75.13	93.75	100	100
III	**Urusan Pilihan**									

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD tahun 2019	Target	Realisasi	Target				Kondisi kinerja Pada akhir Periode RPJMD
				2020	2020	2021	2022	2023	2024	
A	**Pertanian**									
1.3	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton	9.982,7 kg	4	4,4	4,8	5,2	2.804,10	2.805,25	2.805,25
1.4	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular (penyakit scabies)	%	6,67	7,14	7,69	8,30	9,10	22.085	22.095	22.095
B	**Perikanan**									
2.1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	Ton	n/a	n/a	199.174, 30	209.133, 02	219.448, 53	230.274, 17	241.635, 23	241.635, 23
C	**Pariwisata**									
2.1	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Orang	3.2	n/a	29.6	16.8	7	11	14	14
2.2	Persentase tingkat hunian akomodasi	%	28.98	n/a	22.82	23.96	25.10	26.24	26.24	2
D	**Perdagangan**									

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD tahun 2019	Target	Realisasi	Target				Kondisi kinerja Pada akhir Periode RPJMD
				2020	2020	2021	2022	2023	2024	
3.1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	n/a	n/a	44,36	59,00	72,00	86,00	100,00	100,00
3.2	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	n/a	n/a	52,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	n/a	n/a	45,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E	**Perindustrian**									
4.1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	%	n/a	n/a	23,16	28.75	30.94	32.04	33.20	33.20
4.2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%	n/a	n/a	Surat Pernyataan	Surat Pernyataan	Surat Pernyaaan	8.00	10.00	10.00
4.3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha	%	n/a	n/a	Surat Pernyataan	Surat Pernyataan	Surat Pernyataan	Surat Pernyataan	Surat Pernyataan	Surat Pernyataan

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD tahun 2019	Target	Realisasi	Target				Kondisi kinerja Pada akhir Periode RPJMD
				2020	2020	2021	2022	2023	2024	
	Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait									
4.4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	n/a	n/a	Surat Pernyataan	Surat Pernyataan	Surat Pernyataan	Surat Pernyataan	Surat Pernyataan	Surat Pernyataan
4.5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	%	n/a	n/a	Surat Pernyataan	Surat Pernyataan	Surat Pernyataan	Surat Pernyataan	Surat Pernyataan	Surat Pernyataan
4.6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Nilai	n/a	n/a	Surat Pernyataan	Surat Pernyataan	Surat Pernyataan	Surat Pernyataan	Surat Pernyataan	Surat Pernyataan
IV	**Urusan Penunjang**									
1.1	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	%	n/a	n/a	23,46	23,80	23,80	23,80	23,80	23,80
1.2	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	n/a	n/a	0	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD tahun 2019	Target	Realisasi	Target				Kondisi kinerja Pada akhir Periode RPJMD
				2020	2020	2021	2022	2023	2024	
1.3	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Rasio	n/a	n/a	22,651	22,61	22,61	22,61	22,61	22,61
1.4	Opini Laporan Keuangan	Opini	n/a	n/a	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
1.5	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	n/a	n/a	8,04	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30
1.6	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	n/a	n/a	2,41	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
1.7	Assets Management	Nilai	n/a	n/a	4	4	4	4	4	4
1.8	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	%	n/a	n/a	7,47	6,31	6,30	6,30	6,30	6,30